

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

LOKUMEN TUGAS/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	KAWASAN	INDIKATOR	TARGET						
				2013		2014		2015		2016
				2013	2014	2014	2015	2015	2016	
1	Pemilihan dan Pengawasan Pabrik Es/Dinginkan, Daging, dan Susu (Ikan, Lada, dan Padi)	1. Pelaksanaan inspeksi yang mengancam keselamatan masyarakat, dan kesehatan masyarakat.	Jumlah perusahaan/pekerjaan yang terdapat dan terawasi Jumlah Dugaan Pelanggaran Penalty/teguran Penalty/teguran Penalty/teguran	3 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3 3	3 3 3 3	
05	Unggulanisasi SDOO Korban Injeksi Perikanan	SDOOR memiliki jumlah peternak sesuai ketentuan	Jumlah SDOOR yang terdapat dan terawasi Jumlah SDOOR yang terdapat dan terawasi Jumlah SDOOR yang terdapat dan terawasi Jumlah SDOOR yang terdapat dan terawasi	7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi	7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi	7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi	7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi	7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi	7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi 7 SDOOR yang terdapat dan terawasi	
6	Pelatihan dan Pengawasan Perikanan	Pelatihan dan pengawasan perikanan	Jumlah pelatihan perikanan yang dilaksanakan Jumlah pelatihan perikanan yang dilaksanakan Jumlah pelatihan perikanan yang dilaksanakan Jumlah pelatihan perikanan yang dilaksanakan	1.500 1.500 1.500 1.500	1.500 1.500 1.500 1.500	1.500 1.500 1.500 1.500	1.500 1.500 1.500 1.500	1.500 1.500 1.500 1.500	1.500 1.500 1.500 1.500	

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KOMISI TUBUH/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	KAWASAN	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (Rp. Miliar)		
				HERIANA		PISIRISAN RUMU		HERIANA		PISIRISAN MAIL		
				2013	2014	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2016
c	Program Kelautan dan Perikanan	Keunggulan: Jumlah kapal yang dibangun dan pelabuhannya di kawasan perikanan	Jumlah kapal yang dibangun dan pelabuhannya	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	14.100	14.100	14.100
00	Pengembangan dan Penguasaan Perikanan Pangkajene	Pengembangan dan Penguasaan Perikanan Pangkajene dan sekitarnya yang berbasis kelestarian SDI	Jumlah kapal yang dibangun dan pelabuhannya	1.300	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	2.245,0	2.245,0	2.245,0
			Jumlah kapal yang dibangun dan pelabuhannya	5.747,120	5.500,000	5.500,000	5.500,000	5.500,000	5.500,000	1.330,0	1.330,0	1.330,0
			Nilai Tukar Nasional (NTN)	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5			
			Jumlah pendayagunaan nelayan									
			- Pendapatan nelayan melalui/ melalui	2.235,900	2.441,550	2.441,550	2.441,550	2.441,550	2.441,550			
			- Pendapatan nelayan melalui/ melalui	952,69%	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000			
1	Perencanaan, Pengembangan, dan Penguasaan Kapal Perikanan yang Berbasis Kelestarian Perikanan	Perencanaan, Pengembangan, dan Penguasaan Kapal Perikanan yang Berbasis Kelestarian Perikanan	Jumlah kapal yang dibangun dan pelabuhannya	550	750	750	750	750	750	942,0	942,0	942,0
			Jumlah kapal yang dibangun dan pelabuhannya	17,125	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7			
			Jumlah kapal yang dibangun dan pelabuhannya	13,52	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05			
			Jumlah kapal yang dibangun dan pelabuhannya	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			
			Jumlah kapal yang dibangun dan pelabuhannya	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300			

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KELOMPOK PERUBAHAN	KAWASAN	INDIKATOR	TARGET									
				JERENYAK		PERSARAFAN KEMBU		JERENYAK		PERSARAFAN MAIL			
				2013	2014	2014	2015	2014	2015	2014	2015		
1	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia		<p>1. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>2. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam yang terdampak bencana alam</p> <p>3. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam yang terdampak bencana alam</p> <p>4. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam yang terdampak bencana alam</p> <p>5. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam yang terdampak bencana alam</p> <p>6. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam yang terdampak bencana alam</p> <p>7. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam yang terdampak bencana alam</p> <p>8. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam yang terdampak bencana alam</p> <p>9. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam yang terdampak bencana alam</p> <p>10. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam yang terdampak bencana alam</p>	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia		<p>1. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>2. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>3. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>4. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>5. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>6. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>7. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>8. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>9. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>10. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p>	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia		<p>1. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>2. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>3. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>4. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>5. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>6. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>7. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>8. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>9. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p> <p>10. Jumlah masyarakat yang terdampak bencana alam</p>	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	KAWASAN	INDIKATOR	TARGET											
				TERRITORY		PERSARAFAN KEMU		TERRITORY		PERSARAFAN MAIL					
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016				
1	Program 1.5. Rehab Daps Bar (SDI)	Nasional 2. Kabupaten yang 3 dan SDI status 3. Tidak ada	<p>Indikator: amblyopia dan strabismus (100%)</p> <p>Jumlah orang yang dirawat dalam Desakan (1-3) yang terdaftar di desakan (100%)</p> <p>Jumlah orang yang terdaftar di kegiatan yang terdaftar di desakan (100%)</p> <p>Jumlah orang yang terdaftar di desakan (100%)</p> <p>Terselenggara 100% di Indonesia (100%)</p> <p>100% orang yang terdaftar dan di desakan (100%)</p> <p>100% orang yang terdaftar dan di desakan (100%)</p> <p>100% orang yang terdaftar dan di desakan (100%)</p> <p>100% orang yang terdaftar dan di desakan (100%)</p>	31	33	35	37	31	33	35	37	31	33	35	37
				31	33	35	37	31	33	35	37	31	33	35	37

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KOMENTARIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	KASUS/ISAM	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (Rp. Miliar)				
				HERIANA		PISIRASAN RUMU		HERIANA		PISIRASAN RUMU		2013	2014	2015
				2013	2014	2014	2015	2013	2014	2014	2015			
07	Peningkatan Produk Perikanan Budidaya	Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perikanan Budidaya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Ekspor, serta Meningkatkan Pendapatan	Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Produksi perikanan budidaya air tawar (ton) Produksi perikanan budidaya air payau (ton) Produksi perikanan budidaya laut (ton)	14.020.800 3.460.505 1.031.620 5.760,075	16.019.000 4.580,045 2.022.220 10.200,075	20.114 20.114 20.114 20.114	20.114 20.114 20.114 20.114	20.114 20.114 20.114 20.114	20.114 20.114 20.114 20.114	1.405,5 1.413,1	1.413,1	1.413,1		
1	Pengembangan Sistem Perikanan Budidaya Unggulan: Pembudidayaan Benih	Terpenuhi, hingga kebutuhan bahan baku benih yang sesuai dengan persyaratan produksi perikanan budidaya yang aman, berkualitas, dan terjangkau	Laboratorium yang beroperasi, terakreditasi, dan memiliki alat dan mesin yang lengkap dan modern yang terakreditasi dan terakreditasi internasional Jumlah induk ikan yang dipelihara Jumlah induk ikan yang dipelihara Jumlah induk ikan yang dipelihara Jumlah induk ikan yang dipelihara Jumlah induk ikan yang dipelihara Jumlah induk ikan yang dipelihara Jumlah induk ikan yang dipelihara	10 71 15 98 202	49 51 23 57 227	49 51 23 57 227	50 111 28 98 202	50 111 28 98 202	50 111 28 98 202	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0	0,0		

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KOMUNITAS/LEMBAGA : KEMENTERIAN SELATAN DAN PERHUMANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	ASASISAM	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (Rp. Miliar)		
				PERBARISAN RUMAH			HIBRIDA			PRASARANA MAIL		
				2013	2014	2015	2014	2015	2016	2014	2015	2016
b	Pengembangan Sistem Perumahan Baru	1. Meningkatkan kualitas perumahan di provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai	1. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi	17	17	20	194,7	194,7	194,7	194,7		
			2. Jumlah rumah yang dibangun di kabupaten/kota	17	190	211						
			3. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			4. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			5. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			6. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			7. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			8. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			9. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			10. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
c	Pengembangan Sistem Perumahan Baru	1. Meningkatkan kualitas perumahan di provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai	1. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi	17	17	20	194,7	194,7	194,7	194,7		
			2. Jumlah rumah yang dibangun di kabupaten/kota	17	190	211						
			3. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			4. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			5. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			6. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			7. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			8. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			9. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						
			10. Jumlah rumah yang dibangun di provinsi dan kabupaten/kota	34	307	311						

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	KASUS/ISAM	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (Rp. Miliar)			
				HERIANA 2013		PISIRISAN RUMU		HERIANA		PISIRISAN MAIL			
				2013	2014	2015	2014	2015	2013	2014	2015	2014	2015
d	Peningkatan Sistem Perencanaan Pembangunan Berbasis	Usaha meningkatkan kualitas dan daya saing pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Indikator: jumlah pelayanan publik yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
e	Peningkatan Sistem Perencanaan Berbasis	Usaha meningkatkan kualitas dan daya saing pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Indikator: jumlah pelayanan publik yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	KAWASAN	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (Rp. Miliar)			
				2013		2014		2015		2013		2014	
				2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2015	2014
1	Penguatan dan Peningkatan Teknologi dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu	KAWASAN	Jumlah peserta pemilu yang mendapat layanan mobile phone (Pelayanan Pemilu)	21.744	19.116	21.991	21.744						
				1.302	12.654	13.666	12.654						
		KAWASAN	Jumlah warga kerja pelaksanaan pemilu yang dibekali (Pembinaan)	250	260	350	250						
				580	840	200	250						
		KAWASAN	Jumlah peserta pemilu yang mendapat layanan mobile phone (Pelayanan Pemilu)	33	25	33	33						
				71	51	111	71			27,1	28,3	28,4	28,4
		KAWASAN	Jumlah peserta pemilu yang mendapat layanan mobile phone (Pelayanan Pemilu)	14	14	14	14						
				106	133	166	106						
		KAWASAN	Jumlah peserta pemilu yang mendapat layanan mobile phone (Pelayanan Pemilu)	1.020	1.750	1.200	1.020						
				6.931	7.310	7.400	6.931						

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KOMENTARIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	KAWASAN	INDIKATOR	TABEL 1								
				HERIANA		PISIRAN RUMU				HERIANA		
				2013	2014	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
c	Industri perikanan/ perikanan budidaya/ perikanan	Kawasan perikanan budidaya/ perikanan	Indikator utama dan sasaran: peningkatan hasil perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries) dan peningkatan nilai tambah produk perikanan	19.300 ton (budidaya)	1.500 ton (budidaya)	1.500 ton (budidaya)	1.500 ton (budidaya)	1.500 ton (budidaya)	1.500 ton (budidaya)	1.500 ton (budidaya)	1.500 ton (budidaya)	1.500 ton (budidaya)
				6.500 ton (budidaya)	6.500 ton (budidaya)	6.500 ton (budidaya)	6.500 ton (budidaya)	6.500 ton (budidaya)	6.500 ton (budidaya)	6.500 ton (budidaya)	6.500 ton (budidaya)	
d	Peningkatan produksi perikanan budidaya/ perikanan	Kawasan perikanan budidaya/ perikanan	Indikator utama dan sasaran: peningkatan produksi perikanan budidaya/ perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries) dan peningkatan nilai tambah produk perikanan	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)
				1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	1.945 ton (budidaya)	

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	ASAS/ISAM	INDIKATOR	TARGET										
				TERRITORY		PERSARAFAN MANUSIA		TERRITORY		PERSARAFAN MANUSIA				
				2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014			
1	Usaha dan pembinaan dan pengembangan bisnis Usaha Kecil dan Menengah		Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perbankan Rakyat (UMKPR) yang aktif dan berkembang Standar Nasional Indonesia yang dirumuskan secara nasional dan diimplementasikan di semua provinsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
2	Usaha dan pembinaan dan pengembangan bisnis Usaha Kecil dan Menengah		Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perbankan Rakyat (UMKPR) yang aktif dan berkembang Standar Nasional Indonesia yang dirumuskan secara nasional dan diimplementasikan di semua provinsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	ASASISAM	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					
				2013		2014		2015		2013				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015			
			<p>Indikator yang tertera pada kolom ini mengulih dan memverifikasi bahwa 300 juta akan terdistribusikan kepada 1000 desa yang akan menerima manfaat langsung dari program ini. Indikator ini akan diukur melalui jumlah desa yang menerima manfaat langsung dari program ini. Indikator ini akan diukur melalui jumlah desa yang menerima manfaat langsung dari program ini.</p> <p>Indikator yang tertera pada kolom ini mengulih dan memverifikasi bahwa 300 juta akan terdistribusikan kepada 1000 desa yang akan menerima manfaat langsung dari program ini. Indikator ini akan diukur melalui jumlah desa yang menerima manfaat langsung dari program ini.</p>	200 Ea. 10.000	220 Ea. 11.000	240 Ea. 12.000	260 Ea. 13.000	280 Ea. 14.000	300 Ea. 15.000	320 Ea. 16.000	340 Ea. 17.000	360 Ea. 18.000	380 Ea. 19.000	400 Ea. 20.000
			<p>Indikator yang tertera pada kolom ini mengulih dan memverifikasi bahwa 300 juta akan terdistribusikan kepada 1000 desa yang akan menerima manfaat langsung dari program ini. Indikator ini akan diukur melalui jumlah desa yang menerima manfaat langsung dari program ini.</p> <p>Indikator yang tertera pada kolom ini mengulih dan memverifikasi bahwa 300 juta akan terdistribusikan kepada 1000 desa yang akan menerima manfaat langsung dari program ini. Indikator ini akan diukur melalui jumlah desa yang menerima manfaat langsung dari program ini.</p>	200 Ea. 10.000	220 Ea. 11.000	240 Ea. 12.000	260 Ea. 13.000	280 Ea. 14.000	300 Ea. 15.000	320 Ea. 16.000	340 Ea. 17.000	360 Ea. 18.000	380 Ea. 19.000	400 Ea. 20.000

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PERIKLAS	KASUS/ISU	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (Rp. Miliar)			
				PERIODE 2013		PERIODE 2014		2013	2014	2015	
				2013	2014	2014	2015				
09	Program Pengalihan Sumber Daya Laut, Perairan dan Perairan Kecil	Meningkatkan pemanfaatan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan, dan perikanan laut secara berkelanjutan dan bertanggung jawab serta meningkatkan analisis/pengabdian	Jumlah kawasan perikanan yang teridentifikasi serta hampas terdapat ancaman kerusakan	17 kawasan	18 kawasan	48 kawasan	10 kawasan	570,0	864,0	914,0	914,0
		Jumlah ragam produk kelautan yang teridentifikasi pengembangannya	3 produk	3 produk	3 produk	3 produk					
		Jumlah lobster laut, penstip dan pulau-pulau kecil yang memiliki potensi pariwisata	60 lokasi	60 lokasi	60 lokasi	60 lokasi					
		Tersedianya kawasan perikanan yang dikelola secara berkelanjutan	3.442.500 ha	4,5 juta ha	4,8 juta ha	5,1 juta ha					
		Jumlah pulau-pulau kecil teraspek pulau kecil baru yang dikelola	40 pulau	30 pulau	60 pulau	60 pulau					
		Jumlah nelayan usaha mikro yang mandiri serta jumlah usaha mikro di kawasan perikanan dan pulau-pulau kecil	7.097 kelompok 5.640 usaha 150 unit	11,1 juta jiwa 7.100 usaha 190 unit	11,1 juta jiwa 7.100 usaha 190 unit	11,1 juta jiwa 7.100 usaha 190 unit					
		Jumlah produksi garam yang dihasilkan (ton)	1.845 jt ton	3,3 jt ton	3,3 jt ton	3,3 jt ton					
1	Pengelolaan dan pengembangan kawasan perikanan laut, air, dan perikanan	Peningkatan kawasan perikanan laut, air, dan perikanan serta teralokasinya pada kawasan perikanan laut, air, dan perikanan yang produktif dan berkelanjutan	Luas kawasan konservasi perikanan yang dikelola secara berkelanjutan	2.637.200 ha	1,5 juta ha	2,9 juta ha	2,9 juta ha	22,0	13,1	15,1	19,4
		Perbaikan kualitas perikanan	5.000 ton	500 ton	200 ton	200 ton					
		Jumlah nelayan yang diorganisir	12	18	18	18					
		Peningkatan status lingkungan perikanan	24	24	24	24					

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KOMENTARIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PERUBAHAN	KAWASAN	INDIKATOR	TARUJIT									
				HERIANA		PISARISAN RUMU				HERIANA		PISARISAN MAIL	
				2013	2014	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
b	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan
c	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya perikanan dan perikanan di kawasan konservasi perikanan

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	KAWASAN	INDIKATOR	TARGET									
				HERIANA		PINSERJAN RUMU		HERIANA		PRASERJAN MAIL			
				2013	2014	2014	2015	2014	2015	2014	2015		
4	Pembangunan Perumahan Tanger	Perumahan yang layak pembangunan perumahan pembangunan perumahan pembangunan perumahan	Perumahan layak huni di wilayah pembangunan perumahan pembangunan perumahan pembangunan perumahan pembangunan perumahan	23 Perumahan	50 Perumahan	75 Perumahan	100 Perumahan	140 Perumahan	140 Perumahan	73,4	14,4	2014	2015
5	Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan Pembangunan Jalan	Perumahan yang layak pembangunan perumahan pembangunan perumahan pembangunan perumahan pembangunan perumahan	Perumahan layak huni di wilayah pembangunan perumahan pembangunan perumahan pembangunan perumahan pembangunan perumahan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KOMPLEMENTER/LEMBAGA : KEMENTERIAN SELATAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	ASAS/ISAM	INDIKATOR	TARGET							
				HERIANA		PISIRISAN RUMU		HERIANA		PISIRISAN MAIL	
				2013	2014	2015	2014	2014	2014	2014	2014
III	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Hertan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan	<p>Presentase cakupan wilayah Pengendalian Perikanan (WPP-NRI) yang Persepsi dari tingkat fishing</p> <p>Presentase cakupan wilayah Pengendalian Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>Presentase pemantauan/pemantauan tidak pernah dilakukan secara sistematis dan tepat waktu</p>	39%	64%	67%	74%	283,0	812,4	702,4	702,6
4	Penindakan Over-exploited dan Over-fished Kapal Pengerusi	Menegakkan kebijakan WPP-NRI yang terawasi dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan	<p>Presentase cakupan wilayah Pengendalian Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>Presentase pemantauan/pemantauan tidak pernah dilakukan secara sistematis dan tepat waktu</p>	25%	37%	48%	51%				
5	Penindakan Over-exploited dan Over-fished Kapal Pengerusi	Menegakkan kebijakan WPP-NRI yang terawasi dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan	<p>Presentase cakupan wilayah Pengendalian Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>Presentase pemantauan/pemantauan tidak pernah dilakukan secara sistematis dan tepat waktu</p>	73%	74%	75%	76%				
			<p>Presentase cakupan wilayah Pengendalian Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>Presentase pemantauan/pemantauan tidak pernah dilakukan secara sistematis dan tepat waktu</p>	27,9% (129 Kapal)	57,0% (130 Kapal)	69% (130 Kapal)	90% (125 Kapal)				
			<p>Presentase cakupan wilayah Pengendalian Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan</p> <p>Presentase pemantauan/pemantauan tidak pernah dilakukan secara sistematis dan tepat waktu</p>	29,39% (125 Kapal)	57,23% (130 Kapal)	69% (130 Kapal)	70% (125 Kapal)				

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	ASASISAM	INDIKATOR	TARGET							
				HERIANA		PINSIRISAN RUMBU		HERIANA		PINSIRISAN MAIL	
				2013	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
b	Memfasilitasi tindak lanjut pertemuan dan pertemuan	Harapan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama	<p>Perwujudan pelaksanaan tindak lanjut pertemuan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan</p> <p>Penyusunan perencanaan bersinergi bulat dan secara tepat secara keseluruhan</p> <p>Penyuluhan koordinasi antara aparat penegak hukum yang berkaitan dengan lingkungan sosial</p> <p>Perwujudan kerjasama yang baik dan produktif, komprehensif dan sosial</p>	794	715	754	714	754	714	714	714
c	Penyelenggaraan Over annual Pengawasan dan Pemberdayaan	Meningkatkan kinerja dan wawasan serta kemampuan KPPN yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan Pengawasan	<p>Penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan peningkatan wawasan, dan dan keprofesionalan serta kemampuan yang relevan untuk daya dan daya</p> <p>Penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan wawasan, dan dan keprofesionalan serta kemampuan yang relevan untuk daya dan daya</p>	334	305	324	304	324	304	304	304

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	KAWASAN	INDIKATOR	TARGET															
				2013		2014		2015		2016									
				HERIANA	2013	HERIANA	2014	HERIANA	2015	HERIANA	2016								
*	Pengembangan Dukungar Manajemen dan Pelaksanaan TSP T-1 dan T-2 - RRTSP - Jember dan Kabupaten Jember	Pengembangan dan kucapan program dan pelaksanaan TSP T-1 dan T-2 - RRTSP - Jember dan Kabupaten Jember	Peningkatan jumlah pengguna layanan TSP T-1 dan T-2 - RRTSP - Jember dan Kabupaten Jember	3,86	3,83	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86								
				3,86	3,83	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86									
				3,86	3,83	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86									
				3,86	3,83	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86									

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KOMENTARIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PERUBAHAN	KAWASAN	INDIKATOR	TABEL 1									
				HERIANA		PISIRAN RUMU		HERIANA		PRASARANA MAJIL			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
b	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perikanan Budidaya	Pengembangan Program untuk meningkatkan produktivitas perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan air tawar (kg) dan ikan laut (kg) yang dihasilkan per hektar per tahun	30.000	35.000	40.000	45.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000
c	Pengembangan Sistem Perikanan Budidaya	Pengembangan sistem perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan air tawar (kg) dan ikan laut (kg) yang dihasilkan per hektar per tahun	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000
d	Pengembangan Sistem Perikanan Budidaya	Pengembangan sistem perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan air tawar (kg) dan ikan laut (kg) yang dihasilkan per hektar per tahun	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ REGISTRASI/PROJEK/TAJAS	SASARAN	KADIVIS/LOKASI	INDIKATOR	TARGET				SLOKUSI (Rp. Miliar)				
					2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	TOTAL	
												2013	2014
1	Program Pembangunan Pusat dan Bantuk	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan KEMHUKAM	1. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 2. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 3. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 4. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi	1. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 2. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 3. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 4. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi	1. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 2. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 3. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 4. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi	1. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 2. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 3. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 4. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi	1. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 2. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 3. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 4. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi	1. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 2. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 3. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 4. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi	1. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 2. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 3. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 4. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi	1. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 2. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 3. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 4. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi	1. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 2. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 3. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 4. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi	1. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 2. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 3. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 4. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi	1. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 2. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 3. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi 4. Peningkatan kemampuan manajemen dan administrasi

III. Matrik

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ REGISTRASI/PROJEK/TAJ	MUSKAWA	KADIV/KADUM	TARGET						SILOKASI (Rp. Miliar)							
				REVISI 2013	2014		2015		2016		2017	2018	2019	2020			
					17 Feb 2014	17 Feb 2014	17 Feb 2015	17 Feb 2015	17 Feb 2016	17 Feb 2016							
2	Penyusunan Instruksi Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan koordinasi dengan KEMHUKUM	2. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan koordinasi dengan KEMHUKUM	17 Feb 2014	17 Feb 2014	17 Feb 2015	17 Feb 2015	17 Feb 2016	17 Feb 2016	17 Feb 2017	17 Feb 2017	17 Feb 2018	17 Feb 2018	17 Feb 2019	17 Feb 2019	17 Feb 2020	17 Feb 2020
		1. Penyusunan Perda Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala	1. Penyusunan Perda Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala	17 Feb 2014	17 Feb 2014	17 Feb 2015	17 Feb 2015	17 Feb 2016	17 Feb 2016	17 Feb 2017	17 Feb 2017	17 Feb 2018	17 Feb 2018	17 Feb 2019	17 Feb 2019	17 Feb 2020	17 Feb 2020
		1. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 2. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	1. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 2. Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait	17 Feb 2014	17 Feb 2014	17 Feb 2015	17 Feb 2015	17 Feb 2016	17 Feb 2016	17 Feb 2017	17 Feb 2017	17 Feb 2018	17 Feb 2018	17 Feb 2019	17 Feb 2019	17 Feb 2020	17 Feb 2020
3	Pelaksanaan Kegiatan Bina Desa KEMHUKUM	1. Pelaksanaan kegiatan bina desa 2. Pelaksanaan kegiatan bina desa	1. Pelaksanaan kegiatan bina desa 2. Pelaksanaan kegiatan bina desa	17 Feb 2014	17 Feb 2014	17 Feb 2015	17 Feb 2015	17 Feb 2016	17 Feb 2016	17 Feb 2017	17 Feb 2017	17 Feb 2018	17 Feb 2018	17 Feb 2019	17 Feb 2019	17 Feb 2020	17 Feb 2020

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ REGISTRASI POKROK	NOMOR	KADIVIS/UMH	REVISI 2013	TARGET			SLOKUSI (Rp. Miliar)		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016
			20 silsilah kepemimpinan yang sudah ada di seluruh Aceh silsilah	38.000	38.000	38.000	4.852	4.852	4.852	4.852
			20 silsilah kepemimpinan yang sudah ada di seluruh Aceh silsilah	95.000	95.000	95.000	3.127	3.127	3.127	3.127
			20 silsilah kepemimpinan yang sudah ada di seluruh Aceh silsilah	32.000 km	32.000 km	31.000 km	4.825	4.825	4.825	4.825
			20 silsilah kepemimpinan yang sudah ada di seluruh Aceh silsilah	11.000 km	11.000 km	11.000 km	4.000	4.000	4.000	4.000
			20 silsilah kepemimpinan yang sudah ada di seluruh Aceh silsilah	15.000 km	15.000 km	15.000 km	2.250	2.250	2.250	2.250
			Terdapatnya dokumen dan data sejarah serta sumber keagamaan Aceh				22.1	22.1		
			Terdapatnya dokumen dan data sejarah serta sumber keagamaan Aceh				2.5.1	2.5.1		
			Terdapatnya dokumen dan data sejarah serta sumber keagamaan Aceh				7.1	7.1		
			Terdapatnya dokumen dan data sejarah serta sumber keagamaan Aceh				2.2	2.2		
III	Program Inisiasi, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan Tugas Tesis & Laporan Riset dan Penelitian							4.817	4.816	4.816
IV	Program Pelaksanaan Survei dan Penelitian dan Riset dan Penelitian						200.3	224.1	224.1	247.1

III. Matrik 2.3

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ REGISTRASI PRIORITAS	SASARAN	KADIVIS/LOKASI	TARGET								
				RENCANA 2013		TARGET		SLOKUSI (Rp. Miliar)				
				2013	2014	2013	2014	2013	2014			
1	Penguatan Penguasaan dan Penguasaan Kompetensi	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Kesehatan	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian Kesehatan	1.333,0	1.333,0	1.333,0	1.333,0	400	400	500	500
					1.333,0	1.333,0	1.333,0	1.333,0	400	400	500	500
					1.333,0	1.333,0	1.333,0	1.333,0	400	400	500	500
					1.333,0	1.333,0	1.333,0	1.333,0	400	400	500	500
					1.333,0	1.333,0	1.333,0	1.333,0	400	400	500	500
					1.333,0	1.333,0	1.333,0	1.333,0	400	400	500	500
					1.333,0	1.333,0	1.333,0	1.333,0	400	400	500	500
					1.333,0	1.333,0	1.333,0	1.333,0	400	400	500	500
					1.333,0	1.333,0	1.333,0	1.333,0	400	400	500	500
					1.333,0	1.333,0	1.333,0	1.333,0	400	400	500	500

11. MUI 444

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	REKORDEK			REKORDEK (MUTUASIPILAH)		
				2013	2013		2013	2013	
					2013	2013		2013	2013
4.	Program Pembinaan Manajemen dan Administrasi Tugas Pokok dan Fungsi	Meningkatkan dan meningkatkan kemampuan profesionalitas dan operasionalitas aparatur sipil negara	1. % pegawai terampil dan profesionalitas aparatur sipil negara	90%	90%	90%	90%	90%	90%
				90%	90%	90%	90%	90%	
				90%	90%	90%	90%	90%	
4.1	Peningkatan Kemampuan dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Keterampilan dan profesionalitas aparatur sipil negara	1. % pegawai terampil dan profesionalitas aparatur sipil negara	90%	90%	90%	90%	90%	90%
				90%	90%	90%	90%	90%	
				90%	90%	90%	90%	90%	
4.1.1	Peningkatan Kemampuan dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Keterampilan dan profesionalitas aparatur sipil negara	1. % pegawai terampil dan profesionalitas aparatur sipil negara	90%	90%	90%	90%	90%	90%
				90%	90%	90%	90%	90%	
				90%	90%	90%	90%	90%	

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	REKORDEK					REKORDEK (MELAKUKAKAN)					
				2013	2013		2013		2013	2014	2015			
					2012	2011	2010	2009						
2441	Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan peradilan bagi dan masyarakat kelas menengah ke atas	Terselenggaranya pelayanan peradilan bagi dan masyarakat kelas menengah ke atas	1. % angka keberhasilan penyelesaian perkara	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
			2. % angka keberhasilan penyelesaian perkara	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
			3. % angka keberhasilan penyelesaian perkara	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
			4. % angka keberhasilan penyelesaian perkara	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
			5. % angka keberhasilan penyelesaian perkara	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
2442	Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan peradilan bagi dan masyarakat kelas menengah ke bawah	Terselenggaranya pelayanan peradilan bagi dan masyarakat kelas menengah ke bawah	1. % angka keberhasilan penyelesaian perkara	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
			2. % angka keberhasilan penyelesaian perkara	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
			3. % angka keberhasilan penyelesaian perkara	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
			4. % angka keberhasilan penyelesaian perkara	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
			5. % angka keberhasilan penyelesaian perkara	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	REKORSAH					REKORSAH (MILIKAN RUMAH)			
				2013		2014			2015			
				2013	2014	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
2118	Keputusan Pembelian Pengadaan Perumahan	<p>1. Terlaksananya kegiatan pembangunan perumahan di lingkungan Kementerian Kehutanan</p> <p>2. Terlaksananya kegiatan pembangunan perumahan di lingkungan Kementerian Kehutanan</p>	<p>1. % Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan keuangan (LK) yang tepat waktu</p> <p>2. Jumlah pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan</p> <p>3. % Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan laporan keuangan (LK) yang tepat waktu</p>	<p>90%</p> <p>100%</p> <p>90%</p>	<p>90%</p> <p>100%</p> <p>90%</p>	<p>90%</p> <p>100%</p> <p>90%</p>	<p>1,1</p>	<p>1,1</p>	<p>1,1</p>	<p>1,1</p>	<p>1,1</p>	<p>1,1</p>
2444	Keputusan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan	<p>1. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di lingkungan Kementerian Kehutanan</p> <p>2. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di lingkungan Kementerian Kehutanan</p>	<p>1. Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan</p> <p>2. Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan</p>	<p>90%</p> <p>90%</p>	<p>90%</p> <p>90%</p>	<p>90%</p> <p>90%</p>	<p>10,7</p>	<p>10,7</p>	<p>10,7</p>	<p>10,7</p>	<p>10,7</p>	
5011	Keputusan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan	<p>1. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di lingkungan Kementerian Kehutanan</p> <p>2. Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan di lingkungan Kementerian Kehutanan</p>	<p>1. Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan</p> <p>2. Jumlah koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan</p>	<p>90%</p> <p>90%</p>	<p>90%</p> <p>90%</p>	<p>90%</p> <p>90%</p>	<p>10,0</p>	<p>10,0</p>	<p>10,0</p>	<p>10,0</p>	<p>10,0</p>	

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	REKORDEK					REKORDEK (MUTUASIPILIPAH)						
				DIKEMBANGKAN		PENGALIHAN BUDU		REKORDEK		REKORDEK		REKORDEK			
				2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		
2112	Kordinasi Pembangunan Nasional	Perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan nasional	1. Urut-urutan kebijakan pembangunan nasional 2. % pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional 3. % anggaran pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional yang dilaksanakan 4. Urut-urutan kegiatan pembangunan nasional	1,2	-	1,2	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	
				95%	90%	90%	90%								
				95%	90%	90%	90%								
				9	0	0	0								
				1,2	-	1,2	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	
2447	Kordinasi Badan Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan nasional	1. Urut-urutan kebijakan pembangunan nasional 2. % pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional 3. % anggaran pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional 4. Urut-urutan kegiatan pembangunan nasional	1,2	-	1,2	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	
				95%	90%	90%	90%								
				95%	90%	90%	90%								
				9	0	0	0								
				1,2	-	1,2	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	
2113	Kelembagaan Koordinasi dan Strategi	Perencanaan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan nasional	1. Urut-urutan kebijakan pembangunan nasional 2. % pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional 3. % anggaran pembangunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional 4. Urut-urutan kegiatan pembangunan nasional	1,2	-	1,2	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	
				95%	90%	90%	90%								
				95%	90%	90%	90%								
				9	0	0	0								
				1,2	-	1,2	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	1,2	0,7	

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	REKORD					REKORD (MILIK BIPERAH)					
				2013	2013		2013		2013	2014	2015			
					2013	2014	2015	2016				2017		
2434	Komitmen Koordinasi dan Pengkoordinasian	Terdapat rencana koordinasi dan pengkoordinasian yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	1. % aspek perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			2. % aspek pelaksanaan dan evaluasi koordinasi dan pengkoordinasian yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			3. % aspek pemantauan dan evaluasi koordinasi dan pengkoordinasian yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. % aspek evaluasi dan tindak lanjut koordinasi dan pengkoordinasian yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. % aspek koordinasi dan pengkoordinasian yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2435	Komitmen Koordinasi dan Pengkoordinasian	Terdapat rencana koordinasi dan pengkoordinasian yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	1. % aspek perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan pengkoordinasian yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			2. % aspek pelaksanaan dan evaluasi koordinasi dan pengkoordinasian yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			3. % aspek pemantauan dan evaluasi koordinasi dan pengkoordinasian yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	BENTUK 2013	REKORDEK				ALOKASI (MILYAR RUPIAH)				
					PENGALOKASIAN BUDU				BENCANA				
					2013	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	
2458	Kampanye kerjasama aktif, Partisipatif dan Ziltra	Peningkatan kerjasama internasional, nasional dan provinsi dalam bidang kesehatan	1. % peningkatan jumlah pertemuan kerjasama internasional, nasional dan provinsi yang dilaksanakan	75%	80%	80%							
			2. % upaya peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat komunitas	75%	80%	80%							
			3. Jumlah pertemuan internasional, nasional dan provinsi yang dilaksanakan	4	4	4							
			4. Jumlah pertemuan internasional, nasional dan provinsi yang dilaksanakan	14	12	12		0,7					
2459	Kampanye pengalokasian sumberdaya kesehatan ke daerah	Peningkatan kerjasama internasional, nasional dan provinsi dalam bidang kesehatan	1. Jumlah laporan kerjasama internasional, nasional dan provinsi yang dilaksanakan	75%	80%	80%							
			2. % upaya peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat komunitas	75%	80%	80%							
			3. Jumlah pertemuan internasional, nasional dan provinsi yang dilaksanakan	4	4	4							
2460	Kampanye pengalokasian sumberdaya kesehatan ke daerah	Peningkatan kerjasama internasional, nasional dan provinsi dalam bidang kesehatan	1. Jumlah laporan kerjasama internasional, nasional dan provinsi yang dilaksanakan	75%	80%	80%							
			2. % upaya peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat komunitas	75%	80%	80%							

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	REKORDEAN					REKORDEAN (MILIK BIPPAR)			
				2013	2013		2013		2014	2013	2014	2015
					2012	2015	2015	2016				
2458	Kemampuan Monev, Hukum, dan Kebijakan	Penyempurnaan kemampuan dan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Monev yang dilaksanakan dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 4. Monev yang dilaksanakan secara sistematis 5. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 6. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 7. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 8. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 9. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 10. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 	72%	90%	80%	80%	0%	0%	0%	0%	0%
2459	Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, dan Kebijakan	Perbaikan kelembagaan, reformasi birokrasi, dan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 2. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 3. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 4. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 5. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 6. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 7. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 8. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 9. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 10. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 	75%	80%	80%	80%	0%	0%	0%	0%	0%
2460	Kelembagaan, Reformasi Birokrasi, dan Kebijakan	Perbaikan kelembagaan, reformasi birokrasi, dan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 2. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 3. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 4. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 5. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 6. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 7. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 8. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 9. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 10. Monev yang dilaksanakan secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat dilaksanakan 	75%	80%	80%	80%	0%	0%	0%	0%	0%

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	REKORDEK					REKORDEK (MUTUASIPILIPAH)			
				2013	2013		2013		2014	2013	2014	2016
					2013	2015	2016	2015				
2460	Kegiatan Komunikasi dan Koordinasi	Penyediaan Informasi dan Komunikasi	1. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	1. % laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	90%	80%	80%	90%				
				2. Jumlah surat undangan	12	12	12	12				
				3. Jumlah surat undangan	4	4	4	4				
				4. Jumlah surat undangan	13	13	13	13	13	13	13	13
				5. Jumlah surat undangan	75%	80%	80%	80%				
2461	Kegiatan Komunikasi dan Koordinasi	Penyediaan Informasi dan Komunikasi	2. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	1. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	12	12	12	12	12	12	12	12
				2. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	4	4	4	4				
				3. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	75%	80%	80%	80%				
2462	Kegiatan Komunikasi dan Koordinasi	Penyediaan Informasi dan Komunikasi	3. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	1. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	12	12	12	12	12	12	12	12
				2. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	4	4	4	4				
				3. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	75%	80%	80%	80%				
2463	Kegiatan Komunikasi dan Koordinasi	Penyediaan Informasi dan Komunikasi	4. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	1. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	12	12	12	12	12	12	12	12
				2. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	4	4	4	4				
				3. Jumlah laporan dan informasi yang diterima dan ditindaklanjuti	75%	80%	80%	80%				

Il. M.02/21

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	REKORDEK				REKORDEK (MUTUASIPILIPAH)							
				DIKETAHUI		PENCAPAIAN		REKORDEK		REKORDEK					
				2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013				
2404	Kampanye Nasional "Agar Kita Bisa Hidup Lebih Sehat dan Aman"	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan dan Keselamatan	1. % peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan	75%	90%	80%	80%								
			2. % peningkatan jumlah kunjungan ke puskesmas dan rumah sakit	75%	80%	80%	80%								
			3. % peningkatan jumlah kunjungan ke puskesmas dan rumah sakit	4	4	4	4								
			4. % peningkatan jumlah kunjungan ke puskesmas dan rumah sakit	14	12	12	12								
			5. % peningkatan jumlah kunjungan ke puskesmas dan rumah sakit	75%	90%	80%	80%								
2405	Kampanye Nasional "Agar Kita Bisa Hidup Lebih Sehat dan Aman"	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan dan Keselamatan	1. % peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan	75%	90%	80%	80%								
			2. % peningkatan jumlah kunjungan ke puskesmas dan rumah sakit	75%	80%	80%	80%								
			3. % peningkatan jumlah kunjungan ke puskesmas dan rumah sakit	4	4	4	4								
			4. % peningkatan jumlah kunjungan ke puskesmas dan rumah sakit	14	12	12	12								
			5. % peningkatan jumlah kunjungan ke puskesmas dan rumah sakit	75%	90%	80%	80%								

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	REKORDEAN					REKORDEAN (MUTUAS BIPAK)			
				2013	2014			2013	2014			
					2013	2015	2016		2013	2014	2015	
2100	Kordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Politik, Hukum dan Keamanan	Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi politik HAM	1. Berkaitan dengan formulasi dan penyusunan RUP-RUP 2010-2014	1,2	-2	-2	1,2					
			2. Rekomendasi rapat koordinasi pelaksanaan SAS UNSZ 2010-2014	70%	80%	80%	100%					
2101	Kordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Politik, Hukum dan Keamanan	Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi politik HAM	1. Berkaitan dengan formulasi dan penyusunan RUP-RUP 2010-2014	1,2	-2	-2	1,2					
			2. Asesmen hasil rapat koordinasi tentang tindak lanjut kerangka kerja KSP-AL-1	75%	80%	80%	100%					
			1. Berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Politik, Hukum dan Keamanan	1,2	-2	-2	1,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
			2. Rekomendasi rapat koordinasi tentang tindak lanjut kerangka kerja KSP-AL-1	70%	80%	80%	100%					
			3. Laporan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan dan pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Politik, Hukum dan Keamanan	70%	80%	80%	100%					
			4. Berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Politik, Hukum dan Keamanan	1,000	1,000	1,000	1,000					
2102	Kordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Politik, Hukum dan Keamanan	Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi politik HAM	1. Berkaitan dengan koordinasi dan penyusunan RUP-RUP 2010-2014	1,2	-2	-2	1,2					
			2. Rekomendasi rapat koordinasi tentang tindak lanjut kerangka kerja KSP-AL-1	70%	80%	80%	100%					

Il...M.002/23

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	REKORSAH					REKORSAH (MILIKAN BIPPTAH)							
				DIKRYA 2013	PENGABDIAN MASYARAKAT			BENCANA 2013	2014	2013	2014	2015				
					2013	2014	2015									
2167	Kordinasi Pelaksanaan Kegiatan	Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan	1. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			2. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			3. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			4. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			5. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			6. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			7. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
2168	Kordinasi Pelaksanaan Kegiatan	Peningkatan Koordinasi dan Pelaksanaan Kegiatan	1. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			2. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			3. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			4. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			5. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			6. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								
			7. % ketercapaian indikator kinerja utama	75%	90%	80%	80%	90%								

II. M.02/24

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	BENYAK				PERSENTASE DULU				ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
				2013		2014		2013		2014		2013		2014	
				2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		
2467	Revisi Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Asuransi	Terdapatnya Komposisi Kebijakan Perilaku Jaminan Asuransi	1. Jumlah pengalokasian awal dana 2. Jumlah pengalokasian awal dana 3. Jumlah pengalokasian awal dana 4. Jumlah pengalokasian awal dana	1 12 75%	2 12 80%	1 12 80%	2 12 80%	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7		
2470	Revisi Kebijakan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Asuransi	Terdapatnya Komposisi Kebijakan Perilaku Jaminan Asuransi	1. Jumlah pengalokasian awal dana 2. Jumlah pengalokasian awal dana 3. Jumlah pengalokasian awal dana 4. Jumlah pengalokasian awal dana	1 12 75%	2 12 80%	1 12 80%	2 12 80%	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7		
2471	Kebijakan penanganan daerah rawan konflik dan bencana	Terdapatnya Komposisi Kebijakan Perilaku Jaminan Asuransi	1. Jumlah pengalokasian awal dana 2. Jumlah pengalokasian awal dana 3. Jumlah pengalokasian awal dana 4. Jumlah pengalokasian awal dana	1 12 75%	2 12 80%	1 12 80%	2 12 80%	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7		

II..M.002/2.5

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	BIAYA		PERSERAPAN BUDJET				PERSERAPAN BUDJET												
				2013	2014	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015										
													2013	2014	2013	2014	2015	2016				
2172	Pegangan Koordinasi Pembangunan Kegiatan dan Standart dan Pengaturan Kebijakan Kesehatan Region	Terlempangray: Koordinasi; Kegiatan dan Standart dan Pengaturan Kebijakan Kesehatan Region	1. Jumlah penemuan kasus sakit yang terdapat di wilayah yang terdapat kasus sakit dan terdapat kasus sakit	1	1	100%	100%	100%	100%													
			2. Jumlah penemuan kasus perlu penanganan, jumlah di KSD	1	1	100%	100%	100%	100%													
			3. Jumlah laporan, laporan desk sakit	1,2	1,2	100%	100%	100%	100%													
			4. Jumlah rekomendasi komitee teknis kesehatan, dinas kesehatan	1	1	100%	100%	100%	100%													
			5. Jumlah laporan, laporan desk sakit	1,2	1,2	100%	100%	100%	100%													
			6. Jumlah rekomendasi komitee teknis kesehatan, dinas kesehatan	1	1	100%	100%	100%	100%													
			7. Jumlah laporan, laporan desk sakit	1,2	1,2	100%	100%	100%	100%													
			8. Jumlah rekomendasi komitee teknis kesehatan, dinas kesehatan	1	1	100%	100%	100%	100%													
			9. Jumlah laporan, laporan desk sakit	1,2	1,2	100%	100%	100%	100%													
			10. Jumlah rekomendasi komitee teknis kesehatan, dinas kesehatan	1	1	100%	100%	100%	100%													

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	REKORDEAN					REKORDEAN (MELAKUKAKAN)					
				MENDAPAI 2013	PENCAPAIAN (MILYAR)				2013	REKORDEAN (MILYAR)				
					2013	2014	2015	2016		2013	2014	2015	2016	
217A	Koordinasi Pembangunan	Koridor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	1. terdapat surat keputusan	1,2	-2	1,2	1,2							
			2. terdapat surat keputusan	100%	90%	90%	90%							
			3. terdapat surat keputusan	1,2	-2	1,2	1,2	3,8						
			4. terdapat surat keputusan	20%	30%	30%	30%							
			5. terdapat surat keputusan	1,2	-2	1,2	1,2							
217B	Koordinasi Pembangunan	Koridor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	1. terdapat surat keputusan	1,2	-2	1,2	1,2							
			2. terdapat surat keputusan	100%	90%	90%	90%							
			3. terdapat surat keputusan	1,2	-2	1,2	1,2							
			4. terdapat surat keputusan	20%	30%	30%	30%							
			5. terdapat surat keputusan	1,2	-2	1,2	1,2							
217C	Koordinasi Pembangunan	Koridor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	1. terdapat surat keputusan	1,2	-2	1,2	1,2							
			2. terdapat surat keputusan	100%	90%	90%	90%							
			3. terdapat surat keputusan	1,2	-2	1,2	1,2							
			4. terdapat surat keputusan	20%	30%	30%	30%							
			5. terdapat surat keputusan	1,2	-2	1,2	1,2							

II...M.002/2013

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	BELANJA					ALOKASI (MILYAR RUPIAH)		
				DANA					BENCANA		
				2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
2172	Kegiatan Koordinasi Pengabdian Masyarakat	Pengabdian Masyarakat	1. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	1. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	12	12	12	0,7	0,7	0,7	0,7
				2. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	7754	8054	8054				
				3. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	7554	8054	8054				
				4. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	4	4	4				
				5. Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	14	12	12	1,7	1,7	1,7	1,7
2173	Kegiatan Struktur Politik Luar Negeri	Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan luar negeri	1. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan luar negeri	1. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan luar negeri	12	12	12	0,7	0,7	0,7	0,7
				2. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan luar negeri	8054	8054	8054				
				3. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan luar negeri	9254	9054	9054				
				4. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan luar negeri	2	2	2				
				5. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan luar negeri	12	12	12	0,7	0,7	0,7	0,7
2177	Kegiatan Struktur Organisasi	Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	1. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan	1. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan	12	12	12	0,7	0,7	0,7	0,7
				2. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan	7754	8054	8054				
				3. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan	7554	8054	8054				
				4. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan	4	4	4				
				5. Jumlah kegiatan koordinasi dan pengawasan kegiatan	12	12	12	0,7	0,7	0,7	0,7

II...M.002/2.3

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RELEWAN					ALOKASI BUDGET (Miliar)							
				2013	2013		2014		2013	2013		2014		2013	2014	
					2013	2013	2013	2014		2013	2013	2014	2013		2014	
2401	Koordinasi dan komunikasi dengan lembaga internasional dan lembaga donor internasional	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan lembaga internasional dan lembaga donor internasional	Struktur dan prosedur kerja	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
2402	Penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	Meningkatkan pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2403	Penyusunan dan pelaksanaan program-program kesehatan	Meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2404	Penyusunan dan pelaksanaan program-program kesehatan	Meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2405	Penyusunan dan pelaksanaan program-program kesehatan	Meningkatkan pelaksanaan program-program kesehatan	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOTAL				517,2	517,2	517,2	517,2	517,2	517,2	517,2	517,2	517,2	517,2	517,2	517,2	517,2

II...M.002-21

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PROMPTIS	SUMBANG	INDIKATOR	TARGET								
				2013		2014		2015		2016		
				2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2016	
1	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya								110,6	110,6	110,6	110,6
2	Pengaturan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi								5,6	5,6	5,6	5,6
3	Program Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Perencanaan								150,2	154,3	154,4	154,4
4	Kelembagaan, Kebijakan dan Manajerial	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas keorganisasian	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas keorganisasian	75%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
5	Kelembagaan, Kebijakan dan Manajerial	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas keorganisasian	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas keorganisasian	70%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6	Kelembagaan, Kebijakan dan Manajerial	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas keorganisasian	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas keorganisasian	70%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7	Kelembagaan, Kebijakan dan Manajerial	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas keorganisasian	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas keorganisasian	70%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
8	Kelembagaan, Kebijakan dan Manajerial	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas keorganisasian	Meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas keorganisasian	70%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (Miliar Rupiah)		
				PERMULAAN BAWA			RENCANA		
				2013	2014	2015	2014	2015	2016
J.	Anggaran, Rencana Pembangunan Anggaran, MSF, Kebijakan Investasi	Meningkatnya kemampuan keuangan dan UKM Negara di berbagai daerah	Anggaran yang memadai hasil koordinasi, koordinasi penganggaran, LKM berbagai provinsi yang terdapat capaian	100%	100%	100%	4,9	4,9	4,9
K.	Keberhasilan pembangunan dan pengembangan sektor	Meningkatnya kualitas indikator kinerja yang terdapat di setiap provinsi	Presentase rekomendasi hasil koordinasi, koordinasi penganggaran, LKM berbagai provinsi yang terdapat capaian	90,90%	90,90%	90,90%	3,0	3,0	3,0
L.	Keberhasilan dan pengembangan Sektor Logistik	Peningkatan daya pelayanan publik dan pelayanan di bidang logistik	Anggaran, koordinasi, koordinasi penganggaran, LKM berbagai provinsi yang terdapat capaian	90%	90%	90%	4,1	4,1	4,1
M.	Keberhasilan dan pengembangan Sektor Investasi	Meningkatnya koordinasi dan peningkatan investasi	Presentase rekomendasi hasil koordinasi, koordinasi penganggaran, LKM berbagai provinsi yang terdapat capaian	70%	70%	70%	0,0	0,0	0,0
N.	Keberhasilan dan pengembangan Sektor MSF dan MSW	Meningkatnya koordinasi dan peningkatan investasi	Presentase rekomendasi hasil koordinasi, koordinasi penganggaran, LKM berbagai provinsi yang terdapat capaian	90%	90%	90%	5,0	5,0	5,0
O.	Keberhasilan dan pengembangan Sektor	Meningkatnya koordinasi dan peningkatan investasi	Presentase rekomendasi hasil koordinasi, koordinasi penganggaran, LKM berbagai provinsi yang terdapat capaian	70%	70%	70%	1,5	1,5	1,5

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (Miliar Rupiah)		
				RUMAHANA 2013	PERMISALAN DAU		RENCANA DAU	LUSURKAMI DAU	
					2014	2015		2016	2014
1.	Strukturisasi, Reformasi dan Kawalan Sistem dan Risiko (SRK)	Meningkatkan koordinasi kebijakan SRK	Percepatan koordinasi, komunikasi, sosialisasi, dan pelaksanaan SRK	100%	100%	100%	12,0	12,0	12,0
2.	Strukturisasi, Reformasi dan Kawalan Sistem dan Risiko (SRK)	Meningkatkan koordinasi kebijakan SRK	Percepatan koordinasi, komunikasi, sosialisasi, dan pelaksanaan SRK	100%	100%	100%	14,0	14,0	14,0
3.	Strukturisasi, Reformasi dan Kawalan Sistem dan Risiko (SRK)	Meningkatkan koordinasi kebijakan SRK	Percepatan koordinasi, komunikasi, sosialisasi, dan pelaksanaan SRK	100%	100%	100%	14,0	14,0	14,0
4.	Strukturisasi, Reformasi dan Kawalan Sistem dan Risiko (SRK)	Meningkatkan koordinasi kebijakan SRK	Percepatan koordinasi, komunikasi, sosialisasi, dan pelaksanaan SRK	100%	100%	100%	14,0	14,0	14,0
5.	Strukturisasi, Reformasi dan Kawalan Sistem dan Risiko (SRK)	Meningkatkan koordinasi kebijakan SRK	Percepatan koordinasi, komunikasi, sosialisasi, dan pelaksanaan SRK	100%	100%	100%	14,0	14,0	14,0

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (Sukses Tujuh)			
				RUMAH 2013		PRAKARANGAN DAU		RENCANA 2013		RENCANA 2013	
				2013	2014	2014	2015	2014	2015	2014	2015
e.	Analisis, Pengantar Anggaran, dan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tahunan, Sifat dan Puncak Pengah	Meningkatnya koordinasi, komunikasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, strategi dan Puncak Pengah	Persentase hasil koordinasi, koordinasi di tingkat, koordinasi dengan dan koordinasi yang di tingkat, koordinasi yang di tingkat	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
f.	Analisis, Pengantar Anggaran, dan Rencana Kerja dan Pelaksanaan Tahunan	Meningkatnya koordinasi, komunikasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan	Persentase koordinasi hasil koordinasi, koordinasi di tingkat, koordinasi dengan dan koordinasi yang di tingkat	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
g.	Tugas dan tanggung jawab Regional (ASPEK, KPT)	Mendukung koordinasi, komunikasi, dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan	Persentase koordinasi hasil koordinasi, koordinasi di tingkat, koordinasi dengan dan koordinasi yang di tingkat	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
TOTAL ALOKASI						240,9	270,6	270,6	270,6	270,6	270,6

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target				Alokasi (Miliar Rupiah)		
			Rekomendasi 2013	2014	2015	2016	2014	2015	
			Rekomendasi 2013	2014	2015	2016	2014	2015	
I.	Dukungan Murnasihan dan Peningkatan Tugas Teknis Lainnya Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	<p>5% tersosialisasinya kegiatan bidang kesejahteraan rakyat melalui media massa</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Partisipasi UJFP setiap waktu</p> <p>5% penyelesaian keluhan/pepet waktu</p> <p>5% terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan operasional pemerintahan</p> <p>Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan</p> <p>Jumlah tindakan pemerintahan yang dihasilkan</p> <p>Jumlah kajian kebijakan bidang kesejahteraan rakyat</p>			1 dilakukan			84,3	84,6
II.	Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	<p>30 kegiatan koordinasi</p> <p>30 kegiatan koordinasi</p>	50 kegiatan koordinasi	30 kegiatan koordinasi	30 kegiatan koordinasi	211,9	107,4	107,4	107,4

11/56

Kementerian/Kemsetra: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target						Alokasi (Miliar Rupiah)					
			Rencana 2013	Praktoran Maju		Rencana 2013	Praktoran Maju		2014	2015	2016			
				2014	2015		2016	2017				2018		
1.	Perataan Ketersediaan Jaminan Sosial Sistem (Pusat) antara Prati	Perataan tingkat ketersediaan jaminan sosial (JUS) yang merata di seluruh provinsi (KardinalJuli)	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
		Perataan akses layanan kesehatan yang merata di seluruh provinsi jaminan sosial.	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
		Perataan status pendapatan penduduk miskin dan jaminan sosial.	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
		Perataan status pendapatan penduduk miskin dan jaminan sosial.	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		Harmonisasi dengan LU Laka Prati dan Lu Laka Prati (KardinalJuli)	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
		Perataan status pendapatan penduduk miskin dan jaminan sosial.	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
		Perataan akses layanan jaminan sosial dan masyarakat miskin (KardinalJuli)	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%

Kementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Kegiatan Prioritas	Indikator	Target					Alokasi (Miliar Rupiah)				
			Rencana 2013	2014		Praktoran Maju		Rencana 2013	2014		2018	
				9 kgp	10 kgp	10 kgp	11 kgp		2014	2018		
2.	Koordinasi Kebijakan Perguruan Tinggi Kedokteran dan Keperawatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah sarjana kedokteran koordinasi dan akreditasi kelulusan di perguruan tinggi kedokteran pelayanan kesehatan di lingkup pengusahaan kesehatan	5 kgp	6 kgp	6 kgp	6 kgp	6 kgp	6 kgp	6 kgp	2,4	2,3	2,0
3.	Koordinasi Kebijakan Perubahan Organisasi Kedokteran Persepsi dan Perilaku	Jumlah sarjana kedokteran koordinasi dan akreditasi kelulusan di perguruan tinggi kedokteran pelayanan kesehatan di lingkup pengusahaan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,2	1,1	1,8
4.	Koordinasi Kebijakan Perubahan Organisasi Keperawatan	Jumlah sarjana keperawatan koordinasi dan akreditasi kelulusan di perguruan tinggi keperawatan pelayanan kesehatan di lingkup pengusahaan kesehatan	7 kgp	8 kgp	8 kgp	8 kgp	8 kgp	8 kgp	8 kgp	1,2	1,3	1,8

Kementerian/Kemlitbang : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

No	Program/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target					Alokasi (Miliar Rupiah)					
			Rencana 2013	Praktoran Maju		Rencana 2013	Praktoran Maju		Rencana 2013	Praktoran Maju			
				2014	2015		2014	2015		2014	2015		
		Jumlah capaian kegiatan koordinasi dan sinergis (pembinaan kegiatan) ke berbagai masyarakat dan kawasan sasaran.	11 keg	12 keg	12 keg	12 keg							
		Tingkat (deskriptor) capaian non struktural kegiatan pertemuhan masyarakat dan pengujian penguatan dan wawasan pelaksanaan kegiatan.	100%	100%	100%	100%							
4.	Kecerdasan Kelangkaan, Kemandirian dan Nelayar	Jumlah capaian kegiatan koordinasi dan sinergis ke berbagai wilayah sasaran.	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg			2,1	2,1			2,4
		Jumlah capaian kegiatan koordinasi dan sinergis ke berbagai wilayah sasaran.	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg							
		Tingkat (deskriptor) capaian non struktural pelaksanaan kegiatan.	100%	100%	100%	100%							

Kementerian/Kemsetra: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Kegiatan/Profilas	Indikator	Target				Alokasi (Miliar Rupiah)					
			Rencana 2013		Praktoran Maju		Rencana 2013	Praktoran Maju				
			2014	2015	2014	2015		2014	2015	2016		
6.	Koordinasi Kebijakan Keuangan & Koordinasi Lembaga Keuangan (LTK);	Jumlah tampilan kegiatan koordinasi dan sinergitas antar lembaga keuangan nasional dan internasional	6 kali	8 kali	6 kali	8 kali	6 kali	8 kali	2013	2014	2015	2016
7.	Koordinasi Kebijakan Pengawasan Sistem Pembayaran & Sistem Pembayaran Elektronik	Jumlah jumlah pertemuan koordinasi dan sinergitas antar lembaga keuangan nasional dan internasional	5 kali	7 kali	5 kali	7 kali	5 kali	7 kali	2013	2014	2015	2016
TOTAL ALOKASI												
									208,2	174,4	174,7	174,7

11/56/3

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA		TARGET			ALOKASI (MILIAR RUPIAH)		
			2013	2014	2013		2013	2014	2015	
					2013	2014				2015
01	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan, pemenuhan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembiayaan, aduasi/keadilan dan keuangan. Keajaiban kreatif	(1)	36	36	36	36	185,5	187,6	197,5	204,0
02	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pendanaan kegiatan, peningkatan partisipasi dan ekonomi kreatif di daerah	5	5	5	5				
03	Meningkatnya akuntabilitas dan kemampuan kerjasama dan peningkatan akuntabilitas aparatur negara	Jumlah dibayar emilik pariwisata dan ekonomi kreatif Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan aparaturnegara Jumlah pelaksanaan layanan sesuai dan prasarana	5	6	6	6				
			406	524	524	524				
			131	131	131	131	17,9	17,9	20,9	20,0
			20	10	10	10	52,0	52,0	52,0	52,0

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2013	TARGET			ALOKASI (MILIAR RUPIAH)		
				PRAKORAN MAJU			PRAKORAN MAJU		
				2013	2015	2016	2013	2015	2016
04 PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA	Tercapainya destinasi pariwisata yang berdaya saing	Dengeluaran wisatawan per kunjungan a. wisatawan (TSD) b. wisatawan (Rp. Ribut) Indeks daya saing pariwisata Indonesia	11.50 700 4.00	1200 750 4.00	1300 750 4.00	393,5	294,0	313,0	300,0
4.1. Peningkatan Masyarakat Tradisional Perkebunan	Meningkatnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata sebagai destinasi	Nilai daya tarik kepariwisataannya Jumlah wisatawan yang datang secara langsung Jumlah kunjungan wisatawan lokal Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	4,29 600 580 900	4,29 600 580 900	4,29 600 580 900	91,5	94,0	95,0	95,0
4.2. Peningkatan UKM Mandiri Hiliris Pariwisata	Meningkatnya peran dan kontribusi UKM dalam keragaman pariwisata	Jumlah wisatawan per kunjungan daya tarik wisata unggulan dari destinasi Jumlah wisatawan per kunjungan per destinasi/kepariwisataan (wisata)	29 33	26 32	29 33	12,9	7,5	72,5	90,0
4.3. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah wisatawan per kunjungan daya tarik wisata unggulan dari destinasi/kepariwisataan (wisata)	4 100	4 00	4 00	20,0	25,0	25,0	30,0

Lampiran 2

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERUWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2013		TARGET PRAKTIKUM MAJU			ALOKASI (MILIAR RUPIAH)							
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020					
											2013	2014	2015	2016	
45. Perencanaan, Realisasi dan Evaluasi Pariwisata	Meningkatnya peran serta swasta dalam investasi pariwisata	Jumlah investasi yang berhasil untuk meningkatkan pariwisata (dalam triliun Rupiah) Jumlah fasilitas pariwisata yang dibangun (dalam unit) Jumlah lokasi yang dilibatkan dalam kegiatan pariwisata (dalam destinasi/ kabupaten/kota) Jumlah pelatihan/pertemuan/pengembangan perencana pariwisata (dalam pertemuan) Jumlah pelatihan/pertemuan/pengembangan perencana pariwisata (dalam pertemuan)	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
46. Pengembangan Wisata Mural, Mural, Berorientasi, Inovatif, dan Berbudaya	Meningkatnya kunjungan wisatawan asing, domestik, wisatawan mancanegara, dan wisatawan lokal ke destinasi pariwisata	Jumlah wisatawan yang datang ke destinasi pariwisata (dalam wisatawan) Jumlah wisatawan yang datang ke destinasi pariwisata (dalam wisatawan) Jumlah wisatawan yang datang ke destinasi pariwisata (dalam wisatawan)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

L. B. 143-3

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

NO. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA		TARGET			ALOKASI (MILIAR RUPIAH)		
			2013	2013	PRAKTIK MAJU		2013	PRAKTIK MAJU		
					2013	2015		2013	2015	2016
5.2. Penguatan Basis dan Layanan Peradilan	Meningkatkan kualitas, pascatarbitasi, dan pembinaan advokat	Jumlah publikasi etika profesi, komisi, disiplin etika, dan moralitas (sengaja)	51	50	51	50	510			
		Jumlah publikasi etika profesi, disiplin etika, dan moralitas (tidak sengaja)	0	0	0	0	0			
5.3. Penguatan Promosi dan Pelayanan Hukum	Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan hukum	Jumlah publikasi dan sosialisasi pascatarbitasi	25	26	25	26	26	45,0	45,0	50,0
		Jumlah publikasi dan sosialisasi pascatarbitasi (tidak sengaja)	0	0	0	0	0			
5.4. Penguatan Promosi dan Pelayanan Hukum	Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan hukum	Jumlah publikasi dan sosialisasi pascatarbitasi (tidak sengaja)	550	600	600	600	600			
		Jumlah publikasi dan sosialisasi pascatarbitasi (tidak sengaja)	37	34	34	34	34	127,3	127,3	150,0
5.5. Penguatan Promosi dan Pelayanan Hukum	Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan hukum	Jumlah publikasi dan sosialisasi pascatarbitasi (tidak sengaja)	37	36	36	36	36			
		Jumlah publikasi dan sosialisasi pascatarbitasi (tidak sengaja)	45	48	48	48	48			
5.6. Penguatan Promosi dan Pelayanan Hukum	Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan hukum	Jumlah publikasi dan sosialisasi pascatarbitasi (tidak sengaja)	33	33	33	33	33			
		Jumlah publikasi dan sosialisasi pascatarbitasi (tidak sengaja)								

L. B. DAS

Matrik 2.3 Rencana Tindak Pembangunan Kementerian/ Lembaga Tahun 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KRUSIAL

NO. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA		TARGET						ALOKASI (MILIAR RUPIAH)							
			2013	2013	PRAKTIK MAJU			PRAKTIK MAJU			2013	2014	2015					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018				2019				
5.4. Perbaikan kualitas pariwisata	Meningkatkan daya tarik wisata di destinasi wisata (budaya, alam, sejarah, kuliner, seni, dan kerajinan)	Jumlah destinasi wisata baru yang dikembangkan Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata baru Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke destinasi wisata baru Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata baru Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke destinasi wisata baru Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata baru Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke destinasi wisata baru	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
5.5. Pengembangan destinasi wisata	Meningkatkan pelayanan wisata di destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata baru Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke destinasi wisata baru Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata baru Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke destinasi wisata baru Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata baru Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke destinasi wisata baru	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
			61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
			35	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			1,5	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
			154	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
			33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

L. P. D. S. H.

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KRUALITE

NO. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA		TARGET				ALOKASI (MILIAR RUPIAH)			
			2013	2013	PRAKORAN MAJU		2013	2014	2015	2016		
					2013	2014					2013	2014
6.2. Pengembangan Hari Lahir Indonesia dan Industri Musik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan festival musik internasional serta pertumbuhan industri musik nasional	Jumlah festival seni musik yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival musik nasional dan internasional Jumlah festival seni musik yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival musik nasional dan internasional Jumlah festival seni musik yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival musik nasional dan internasional Jumlah festival seni musik yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival musik nasional dan internasional Jumlah festival seni musik yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival musik nasional dan internasional Jumlah festival seni musik yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival musik nasional dan internasional	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
6.3. Pengembangan Seni Rupa	Meningkatnya kualitas dan jumlah hasil seni rupa yang dihasilkan serta pertumbuhan industri seni rupa nasional	Jumlah festival seni rupa yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival seni rupa nasional dan internasional Jumlah festival seni rupa yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival seni rupa nasional dan internasional Jumlah festival seni rupa yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival seni rupa nasional dan internasional Jumlah festival seni rupa yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival seni rupa nasional dan internasional Jumlah festival seni rupa yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival seni rupa nasional dan internasional Jumlah festival seni rupa yang diselenggarakan melalui penyelenggaraan festival internasional serta pelaksanaan festival seni rupa nasional dan internasional	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERWISAYATA DAN EKONOMI KREATIF

NO. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2013		TARGET							
			PRAKTISAN MAJU		2013		2014		2015		2016	
			2013	2014	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
64. Pengembangan Sektor Nasional	Meningkatkan peran dan kontribusi sektor pariwisata nasional	Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Indonesia Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Indonesia Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Indonesia Jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia	1.900	2.000	7	91	4	4	4	4	200	200
65. Dukungan, Monev dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Program Kreativitas Berbasis Sains, Teknologi, Inovasi dan Budaya	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan program kreativitas berbasis sains, teknologi, inovasi dan budaya	Jumlah kegiatan dan program kreativitas berbasis sains, teknologi, inovasi dan budaya yang dilaksanakan Jumlah kegiatan dan program kreativitas berbasis sains, teknologi, inovasi dan budaya yang dilaksanakan Jumlah kegiatan dan program kreativitas berbasis sains, teknologi, inovasi dan budaya yang dilaksanakan Jumlah kegiatan dan program kreativitas berbasis sains, teknologi, inovasi dan budaya yang dilaksanakan Jumlah kegiatan dan program kreativitas berbasis sains, teknologi, inovasi dan budaya yang dilaksanakan Jumlah kegiatan dan program kreativitas berbasis sains, teknologi, inovasi dan budaya yang dilaksanakan Jumlah kegiatan dan program kreativitas berbasis sains, teknologi, inovasi dan budaya yang dilaksanakan Jumlah kegiatan dan program kreativitas berbasis sains, teknologi, inovasi dan budaya yang dilaksanakan Jumlah kegiatan dan program kreativitas berbasis sains, teknologi, inovasi dan budaya yang dilaksanakan	10	9	1	1	1	1	1	1	85,0	85,0
07. PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN, DAN IPTEK	Meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek	Kontribusi PDB ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek (persen) Tagihan pendapatan tenaga kerja ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek (persen) Jumlah pelaku usaha UKM yang mengidentifikasi kegiatan ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan iptek	4,74	4,04	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	163,0	174,3
7.1. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media	Meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif berbasis media	Jumlah pelaku usaha UKM yang mengidentifikasi kegiatan ekonomi kreatif berbasis media (orang)	100	100	100	100	100	100	100	100	41,0	-5,0

Lampiran 1

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PARUWISATA DAN EKONOMI KRUSIAL

NO. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	ALOKASI (MILIAR RUPIAH)					
			RENCANA 2013	TARGET			PRAKIRAAN MAJU	
				2013	2013	2015	2013	2015
7.2. Pengembangan Destinasi Pariwisata		<p>Jumlah pemberi kredit (PKM) yang merupakan penerima alokasi sesuai dengan target basis (0,000)</p> <p>Jumlah pemberi kredit (PKM) yang merupakan penerima alokasi sesuai dengan target basis (0,000)</p>	100	100	100	100	100	100
7.2. Pengembangan Destinasi Pariwisata	Memperlunya kemitraan dan kualitas fasilitas pengembangan destinasi pariwisata	<p>Jumlah pemberi kredit (PKM) yang merupakan penerima alokasi sesuai dengan target basis (0,000)</p> <p>Jumlah pemberi kredit (PKM) yang merupakan penerima alokasi sesuai dengan target basis (0,000)</p>	200	200	200	200	200	200
7.3. Peningkatan Fasilitas dan Fasilitas	Memperlunya kemitraan dan kualitas fasilitas pengembangan destinasi pariwisata	<p>Jumlah pemberi kredit (PKM) yang merupakan penerima alokasi sesuai dengan target basis (0,000)</p> <p>Jumlah pemberi kredit (PKM) yang merupakan penerima alokasi sesuai dengan target basis (0,000)</p>	100	100	100	100	100	100
7.4. Dukungan Marketing dan Dukungan Pemasaran	Memperlunya kemitraan dan kualitas fasilitas pengembangan destinasi pariwisata	<p>Jumlah pemberi kredit (PKM) yang merupakan penerima alokasi sesuai dengan target basis (0,000)</p> <p>Jumlah pemberi kredit (PKM) yang merupakan penerima alokasi sesuai dengan target basis (0,000)</p>	200	200	200	200	200	200
7.4. Dukungan Marketing dan Dukungan Pemasaran	Memperlunya kemitraan dan kualitas fasilitas pengembangan destinasi pariwisata	<p>Jumlah pemberi kredit (PKM) yang merupakan penerima alokasi sesuai dengan target basis (0,000)</p> <p>Jumlah pemberi kredit (PKM) yang merupakan penerima alokasi sesuai dengan target basis (0,000)</p>	200	200	200	200	200	200

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PARUWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						
			RENCANA 2013	PRAKIRAN MAJU			ALOKASI (MILIAR RUPIAH)		
				2013	2015	2016	2013	2015	2016
001 PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PARUWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja	1.443	1.490	1.490	333,6	360,9	422,7	
001.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pariwisata	Meningkatnya lobbng pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata nasional	Jumlah SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi kompetensi	9.000	6.000	6.000				
001.1.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pariwisata	Meningkatnya lobbng pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata nasional	Jumlah hasil lobbng pariwisata dan ekonomi kreatif	14	24	24				
001.1.1.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pariwisata	Meningkatnya lobbng pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata nasional	Jumlah orang yang bekerja di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	7	11	11	10,0	15,0	20,0	
001.1.1.1.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pariwisata	Meningkatnya lobbng pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata nasional	Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi hasil lobbng pariwisata nasional	12	14	14				
001.1.1.1.1.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pariwisata	Meningkatnya lobbng pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata nasional	Jumlah dokumen program dan kerjasama kepariwisataan	10	12	12				
001.1.1.1.1.1.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pariwisata	Meningkatnya lobbng pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata nasional	Jumlah SDM peserta pelatihan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (orang)	1.190	1.200	1.200	9,9	10,0	20,0	
001.1.1.1.1.1.1.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pariwisata	Meningkatnya lobbng pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata nasional	Jumlah lulusan IPT pendidikan tinggi kepariwisataan	1.443	1.490	1.490	250,0	265,0	316,0	
001.1.1.1.1.1.1.1.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Bidang Pariwisata	Meningkatnya lobbng pariwisata dalam mendukung kebijakan pembangunan pariwisata nasional	Jumlah orang yang bekerja di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	22	22	22	21,4	21,4	25,0	

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KRUSIAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA		TARGET						ALOKASI (MILIAR RUPIAH)			
				2013	2014	PRAKTIKUM MAJU		PRAKTIKUM MAJU		2014	2015	2016	2014	2015	2016
						2013	2014	2015	2016						
85	Perbaikan sumber daya manusia dan profesionalitas di kalangan Pegawai	Meningkatkan SDM profesional yang memiliki sertifikasi profesi	Jumlah SDM bidang pariwisata di Direktorat yang memiliki sertifikasi profesi	3000	6000	6000	6000	6000			279	250	270	300	
86	Penelitian dan pengembangan kebijakan dan regulasi pariwisata	Meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi pariwisata	Jumlah studi/analisis/pengaruh kebijakan publik yang diterbitkan Jumlah di bidang ekowisata Jumlah di bidang ekowisata kearifan lokal (sastha) Jumlah kebijakan, peraturan dan regulasi yang diterbitkan Jumlah dokumen program dan aksi pariwisata (Buku saku/ Lembaran)	30	30	30	30								
TOTAL															
											20465	18867	14580	21538	

11.1.p.010-12

KEP	GK	KEL	CG	REKRESI/KEHUMAS	INDUKSI KE	TARGET				STRESES									
						01-04	05-08	09-12	13-16	RHS/ANG PUS	01-04	05-08	09-12	13-16					
					001 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	2	2	2	2										
					002 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	3	3	3	3										
					003 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	7	7	7	7										
					004 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	13	13	13	13										
					005 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	22	22	22	22										
					006 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	28	28	28	28										
01			0307	Peningkatan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja											1,1	1,1	1,1	1,1	
					001 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	2	2	2	2										
					002 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	8	8	8	8										
					003 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	22	22	22	22										
					004 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	28	28	28	28										
01			0308	Peningkatan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja															
					001 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	1	1	1	1										
					002 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	2	2	2	2										
					003 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	7	7	7	7										
					004 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	13	13	13	13										
					005 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	22	22	22	22										
					006 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	28	28	28	28										
01			0309	Peningkatan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja															
					001 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	1	1	1	1										
					002 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	2	2	2	2										
					003 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	7	7	7	7										
					004 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	13	13	13	13										
					005 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	22	22	22	22										
					006 meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama di lingkungan kerja	28	28	28	28										

Matriks 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

Kode	Program/Kegiatan	In-Jumlah	Rencana			Target			Alokasi			Ket
			2013			2014			2015			
			2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
2600	PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUSAHA SISTEM BANGUNAN NASIONAL Peningkatan Investasi Lintas											
2600	Peningkatan Jaringan Fesyons Pengajar Fesyons Book											
2600	Ukrainian Biaditas Usatsecans Strukturisasi Pop. Jur Tinggi Pengajar Luar Negeri Lintas											
2655	Festivals Proses Perchten Fek-Eden dan Kompetitor IRI Pw & Tindakan dan Pw & Knuff											
2655	Partisipasi Kompetitor Lintas											

11110001

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

Kode	Program/Kegiatan	In-Jumlah	Target						Alokasi			Ket									
			Rencana		Prakiraan		Rencana		Prakiraan												
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2015										
2657	Peningkatan Literasi Anak Unggulan di Bidang Kesehatan, Olahraga, dan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan kegiatan (PK)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2658	Perencanaan sistem legislas lokal	Jumlah pelaksanaan (PK)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2662	Perencanaan dan pengujian M&A	Jumlah rekomendasi pelaksanaan (PK)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2663	Analisis Penguatan Miri	Jumlah rekomendasi pelaksanaan (PK)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2664	Perencanaan dan pelaksanaan projek Indeks Basah	Jumlah pelaksanaan (PK)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2665	Insentif Sosial 3. Negeri	Jumlah pelaksanaan (PK)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2666	Perencanaan dan pelaksanaan projek Indeks Kualitas Masyarakat (IKM)	Jumlah pelaksanaan (PK)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

11/10/2012

Matriks 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Rencana			Target			Mulus			Ket
			2013	2014	2015	2013	2014	2015	Praktis/Selesai			
									2013	2014	2015	
2687	Unit Kegiatan Kerja dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Parasitologi	Jumlah Penelitian Internasional (SIF-IPN)	0	1	10	0	1	10	0	0	0	k
		Jumlah CM/DOC dan Pengkaji Kompetensi Kesehatan (P3)	2	2	4				4	4	4	B
2677	Partisipasi Dalam Konferensi Internasional dan Pertemuan Internasional tentang Penyakit Paru-paru	Jumlah Konferensi/Workshop/Forum	1	1	1				1	1	1	B
		Jumlah Publikasi Internasional	1	1	1				1	1	1	B
2678	Partisipasi Dalam Konferensi Internasional tentang Penyakit Paru-paru	Jumlah Konferensi Internasional	1	1	1				1	1	1	B
		Jumlah Publikasi Internasional	1	1	1				1	1	1	B
2679	Partisipasi Dalam Konferensi Internasional tentang Penyakit Paru-paru	Jumlah Konferensi Internasional	1	1	1				1	1	1	B
		Jumlah Publikasi Internasional	1	1	1				1	1	1	B
2679	Partisipasi Dalam Konferensi Internasional tentang Penyakit Paru-paru	Jumlah Konferensi Internasional	1	1	1				1	1	1	B
		Jumlah Publikasi Internasional	1	1	1				1	1	1	B
		Jumlah Konferensi Internasional	1	1	1				1	1	1	B
		Jumlah Publikasi Internasional	1	1	1				1	1	1	B
		Jumlah Konferensi Internasional	1	1	1				1	1	1	B
		Jumlah Publikasi Internasional	1	1	1				1	1	1	B

11/11/2012

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

Kode	Program/Kegiatan	In-Jumlahur	Target						Ket
			Rencana		Prakiraan Maju		Mulus		
			2013	2014	2015	2016	2014	2015	
268a	Program Kerja-4-SDU-001 Eksistensi		S2 = 20.000 S3 = 10	S2 = 20.000 S3 = 10	S2 = 20.000 S3 = 10	100,0	100,0	100,0	B
		Jumlah karyawan Bala - Pesenti	S2 = 20.000 S3 = 10	S2 = 20.000 S3 = 10	S2 = 20.000 S3 = 10	100,0	100,0	100,0	B
		Jumlah karyawan RIST-001	S2 = 20.000 S3 = 10	S2 = 20.000 S3 = 10	S2 = 20.000 S3 = 10	100,0	100,0	100,0	B
	Duyun Mula ya Rancangan Esai Pembinaan Takselah-001					100,0	100,0	100,0	B
TOTAL JIKAS P-51						100,0	100,0	100,0	

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEKANTERAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM / KEGIATAN / URAIAN	SASARAN	INDIKATOR	JULI 2012		AGUSTUS 2012		SEPTEMBER 2012		OKTOBER 2012		NOVEMBER 2012		DESEMBER 2012	
				TARUHAN		TARUHAN		TARUHAN		TARUHAN		TARUHAN		TARUHAN	
				2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
I	PROG. PETA SARUNG BANGUNAN DAN PERUBAHAN TUGAS JAWABAN BERHIMPUNAN BINA SAHABAT LAKSIKAWATI 2012	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1	PROG. PETA SARUNG BANGUNAN DAN PERUBAHAN TUGAS JAWABAN BERHIMPUNAN BINA SAHABAT LAKSIKAWATI 2012	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
II	PROG. PETA SARUNG BANGUNAN DAN PERUBAHAN TUGAS JAWABAN BERHIMPUNAN BINA SAHABAT LAKSIKAWATI 2012	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
1	Penyempurnaan (medical) peralatan kesehatan	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	Penyempurnaan (medical) peralatan kesehatan	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
3	Penyempurnaan (medical) peralatan kesehatan	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
4	Penyempurnaan (medical) peralatan kesehatan	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
5	Penyempurnaan (medical) peralatan kesehatan	1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

11111111

NO	PROGNYA/KELOMPOK/PROBITYS	SASARAN	INDIKATOR	TANGGUNG JAWAB	TAHUN			KISRA/AMA/2011	ALOKASI/REKONSTRUKSI	
					2014	2015	2016		514	515
					24 juta	24 juta	24 juta			
1	Perbaikan sarana transportasi angkutan sipil	Perbaikan sarana transportasi angkutan sipil	<p>1. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p> <p>2. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p> <p>3. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p>	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta				
2	Perbaikan sarana transportasi angkutan sipil	Perbaikan sarana transportasi angkutan sipil	<p>1. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p> <p>2. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p> <p>3. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p>	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	
3	Perbaikan sarana transportasi angkutan sipil	Perbaikan sarana transportasi angkutan sipil	<p>1. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p> <p>2. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p> <p>3. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p>	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	
4	Perbaikan sarana transportasi angkutan sipil	Perbaikan sarana transportasi angkutan sipil	<p>1. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p> <p>2. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p> <p>3. Jumlah sarana transportasi angkutan sipil yang terdapat di Kabupaten...</p>	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	2.4 juta	

11/11/2012

NO	PROGNOSA/KELOMPOK/INDUKSI/REKAM/INDUKSI	SASARAN	INDUKTOR	TEMPORAL	TANGGAPAN			ALOKASI/Indikator/Target	
					TANGGAPAN			KIRI	KANAN
					2014	2015	2016		
1	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Evaluasi	
2	Penyusunan dan pelaksanaan program kerja	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	
3	Penyusunan dan pelaksanaan program kerja	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	1. Penyusunan 2. Pelaksanaan	

11/11/2012

NO	PROGNOSE/PEROLEHAN PUNYAITAS	SASARAN	INDIKATOR	TANGGUNG JAWAB	TAHAPAN				ALOKASI BUDGET		
					2014		2015		KIRAN AWAL 2011	2014	2015
					1	2	3	4			
17	Yayasan Kabupaten Sukabakti Sukla	<p>1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>2. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>3. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>4. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Sukabakti</p>	<p>1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>2. Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>3. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>4. Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Sukabakti</p>	<p>1. Bupati</p> <p>2. Wakil Bupati</p> <p>3. Kepala Dinas Pariwisata</p> <p>4. Kepala Dinas Kebudayaan</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	
18	Yayasan Kabupaten Sukabakti Sukla	<p>1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>2. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>3. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>4. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Sukabakti</p>	<p>1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>2. Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>3. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Sukabakti</p> <p>4. Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Kabupaten Sukabakti</p>	<p>1. Bupati</p> <p>2. Wakil Bupati</p> <p>3. Kepala Dinas Pariwisata</p> <p>4. Kepala Dinas Kebudayaan</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	<p>1. 100.000.000</p> <p>2. 100.000.000</p> <p>3. 100.000.000</p> <p>4. 100.000.000</p>	

NO	PROJEK / PROGRAM / KEGIATAN / TUGAS / KEGIATAN / KEGIATAN / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TANGGUNG JAWAB	LEMBAGA			LOKASI			MONEV
					MONEV	MONEV	MONEV	MONEV	MONEV	MONEV	
22	Angket dan Survei Kondisi Masyarakat	Penyakit menular di kota-kota besar dan daerah pinggiran kota-kota besar di provinsi Jawa Barat dan sekitarnya	jumlah kasus penyakit menular di provinsi Jawa Barat dan sekitarnya	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang
23	Angket dan Survei Kondisi Masyarakat	Penyakit menular di kota-kota besar dan daerah pinggiran kota-kota besar di provinsi Jawa Barat dan sekitarnya	jumlah kasus penyakit menular di provinsi Jawa Barat dan sekitarnya	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang

11 M 36-3

DAFTAR KAWASAN BUDAYA YANG TERDAFTAR

No	PROVINSI	KAWASAN BUDAYA	KAWASAN BUDAYA	KAWASAN BUDAYA		KAWASAN BUDAYA		KAWASAN BUDAYA	KAWASAN BUDAYA	KAWASAN BUDAYA	KAWASAN BUDAYA	KAWASAN BUDAYA	KAWASAN BUDAYA
				LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI						
1	DIY
2	DIY
3	DIY
4	DIY
5	DIY
6	DIY
7	DIY
8	DIY
9	DIY
10	DIY

LOKUMERHISAM / UNDUSIPA : KEMERDEKAAN RISET

NO	PROJEK/KEGIATAN/PROBITYS	SASARAN	INDIKATOR	TANGGUNG JAWAB	TAHUN			PERSEKUTUAN		
					2014	2015	2016	2014	2015	2016
27	inkubasi dan bisnis sumber daya manusia pengembangan lapangan kerja	kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia kompetensi kewirausahaan 28	jumlah sub-kegiatan dan sumber daya manusia 28	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Studi Kelayakan dan Rintis "Pengembangan" Sampah Berkualitas	Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia kompetensi kewirausahaan 28	jumlah sub-kegiatan dan sumber daya manusia 28	0,000000	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	PROGNOSE/REVISI/PERUBAHAN/PERUBAHAN	SASARAN	INDIKATOR	TANGGAPAN	TANGGAPAN			REVISI/PERUBAHAN/PERUBAHAN			TOTAL
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	
20	Perbaikan pelayanan administrasi kependudukan	Perbaikan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan per kecamatan	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	651.000	
			Jumlah pelayanan administrasi kependudukan per kecamatan	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	651.000	
			Jumlah pelayanan administrasi kependudukan per kecamatan	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	651.000	
21	Perbaikan pelayanan administrasi kependudukan	Perbaikan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan per kecamatan	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	651.000	
			Jumlah pelayanan administrasi kependudukan per kecamatan	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	651.000	
			Jumlah pelayanan administrasi kependudukan per kecamatan	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	651.000	

01/0000-0

MATRIKS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	Kategori Kegiatan	Subyek	Indikator Kinerja	Tahun			Skala Wilayah (Rakor 2013)		
				Indikator Output			Rencana 2013	Rencana 2014	Rencana 2015
				2013	2014	2015			
1	Strategi, Kebijakan, Rencana Kerja, dan Anggaran	Menyusun dan melaksanakan kebijakan, strategi, rencana kerja, dan anggaran	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	
2	Strategi, Kebijakan, Rencana Kerja, dan Anggaran	Menyusun dan melaksanakan kebijakan, strategi, rencana kerja, dan anggaran	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	
3	Strategi, Kebijakan, Rencana Kerja, dan Anggaran	Menyusun dan melaksanakan kebijakan, strategi, rencana kerja, dan anggaran	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	
4	Strategi, Kebijakan, Rencana Kerja, dan Anggaran	Menyusun dan melaksanakan kebijakan, strategi, rencana kerja, dan anggaran	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	
5	Strategi, Kebijakan, Rencana Kerja, dan Anggaran	Menyusun dan melaksanakan kebijakan, strategi, rencana kerja, dan anggaran	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	Kategori Kegiatan	Sasaran	MPCN/Aliran	Tipe				Mencakup	Kategori				
				MPCN	MPCN Mitra		MPCN		MPCN	MPCN			
					MPCN	MPCN					MPCN		
1	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
2	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
3	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan	Manajemen, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	Kategori/Spesifikasi Kegiatan	Sasaran	Momen/Alasan	Tipe				Momen/Alasan	Kategori/Spesifikasi Kegiatan			
				Jenis	Momen/Alasan		Momen/Alasan		Momen/Alasan	Momen/Alasan		
					2013	2014					2015	
1	Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua	Standar Nasional Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (SNKUM) yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Internasional (ISO)	Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah
2	Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di seluruh Indonesia	Perbaikan kinerja dan daya saing UKM	Perbaikan kinerja dan daya saing UKM	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah	1. Penyusunan dan pelaksanaan standar nasional koperasi dan usaha kecil dan menengah

31/3/2012

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	Kategori/Spesifikasi	Satuan	Keterangan/Detail	Unit				Kategori/Spesifikasi			Kategori/Spesifikasi				
				Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit		
A	Kategori/Spesifikasi	Satuan	Keterangan/Detail	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	
				1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.2	1.1.1.1.1.1.2
				1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.3	1.1.1.1.1.1.3
				1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.4	1.1.1.1.1.1.4
				1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.5	1.1.1.1.1.1.5
				1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.6	1.1.1.1.1.1.6
B	Kategori/Spesifikasi	Satuan	Keterangan/Detail	1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.2.1	1.1.1.1.1.2.1	
				1.1.1.1.1.2.2	1.1.1.1.1.2.2	1.1.1.1.1.2.2	1.1.1.1.1.2.2	1.1.1.1.1.2.2	1.1.1.1.1.2.2	1.1.1.1.1.2.2	1.1.1.1.1.2.2	1.1.1.1.1.2.2	1.1.1.1.1.2.2	1.1.1.1.1.2.2	1.1.1.1.1.2.2
				1.1.1.1.1.2.3	1.1.1.1.1.2.3	1.1.1.1.1.2.3	1.1.1.1.1.2.3	1.1.1.1.1.2.3	1.1.1.1.1.2.3	1.1.1.1.1.2.3	1.1.1.1.1.2.3	1.1.1.1.1.2.3	1.1.1.1.1.2.3	1.1.1.1.1.2.3	1.1.1.1.1.2.3
				1.1.1.1.1.2.4	1.1.1.1.1.2.4	1.1.1.1.1.2.4	1.1.1.1.1.2.4	1.1.1.1.1.2.4	1.1.1.1.1.2.4	1.1.1.1.1.2.4	1.1.1.1.1.2.4	1.1.1.1.1.2.4	1.1.1.1.1.2.4	1.1.1.1.1.2.4	1.1.1.1.1.2.4
				1.1.1.1.1.2.5	1.1.1.1.1.2.5	1.1.1.1.1.2.5	1.1.1.1.1.2.5	1.1.1.1.1.2.5	1.1.1.1.1.2.5	1.1.1.1.1.2.5	1.1.1.1.1.2.5	1.1.1.1.1.2.5	1.1.1.1.1.2.5	1.1.1.1.1.2.5	1.1.1.1.1.2.5
				1.1.1.1.1.2.6	1.1.1.1.1.2.6	1.1.1.1.1.2.6	1.1.1.1.1.2.6	1.1.1.1.1.2.6	1.1.1.1.1.2.6	1.1.1.1.1.2.6	1.1.1.1.1.2.6	1.1.1.1.1.2.6	1.1.1.1.1.2.6	1.1.1.1.1.2.6	1.1.1.1.1.2.6

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	No. Surat Keputusan	Sesuai	MOTIVASI	Tipe				Kategori (Batas-batas)					
				Jenis	Roket dan Mula		Rencana	Kategori					
					SIK	RIK		RIK	RIK				
1	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/SK/KP/01/2001	Strategis, teknis, dan administratif	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK
2	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/SK/KP/01/2001	Strategis, teknis, dan administratif	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK
3	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/SK/KP/01/2001	Strategis, teknis, dan administratif	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK
4	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/SK/KP/01/2001	Strategis, teknis, dan administratif	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK
5	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/SK/KP/01/2001	Strategis, teknis, dan administratif	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK
6	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/SK/KP/01/2001	Strategis, teknis, dan administratif	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK
7	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/SK/KP/01/2001	Strategis, teknis, dan administratif	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK
8	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/SK/KP/01/2001	Strategis, teknis, dan administratif	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK
9	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/SK/KP/01/2001	Strategis, teknis, dan administratif	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK
10	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 10/SK/KP/01/2001	Strategis, teknis, dan administratif	Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK	RIK

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	No. Surat Keputusan	Sesuai	Materi Pokok	Tipe					Materi Pokok			Materi Pokok					
				Uraian	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok	Materi Pokok			
															Uraian	Materi Pokok	Materi Pokok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

...

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	No. Surat Keputusan	Sasaran	Maksud/Alasan	Tipe						Materi Pokok (Materi)			Materi Pokok (Materi)						
				Kategori	Materi Pokok (Materi)	Materi Pokok (Materi)	Materi Pokok (Materi)	Materi Pokok (Materi)	Materi Pokok (Materi)	Materi Pokok (Materi)	Materi Pokok (Materi)	Materi Pokok (Materi)	Materi Pokok (Materi)	Materi Pokok (Materi)	Materi Pokok (Materi)				
																SK	SK	SK	
1	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 111/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/2010			Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri
2	Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/2010			Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	No. Surat Keputusan	Sesuai	Materi	Tipe				Materi	Materi	Kategori		
				Date of	Materi		Materi			Materi	Materi	Materi
					Year	Year						
6	Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11/2012	Sesuai	Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11/2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
7	Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11/2012	Sesuai	Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11/2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
8	Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11/2012	Sesuai	Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 11/2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012

11/2012

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	Kategori/Spesies/Kelestarian	Sesuai	MORFOTIPIK	Tipe				Morfologi	Karakteristik				
				MHC	Morfologi Mula		MHC		MHC	MHC			
					MHC	MHC					MHC		
1	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)	Spesies yang terancam punah (Kategori I)
2	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)	Spesies yang terancam punah (Kategori II)
3	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)	Spesies yang terancam punah (Kategori III)
4	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)	Spesies yang terancam punah (Kategori IV)
5	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)	Spesies yang terancam punah (Kategori V)

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

No	Kategori/Spesifikasi/Item	Satuan	Keterangan/Detail	Unit			Kategori/Spesifikasi/Item			Kategori/Spesifikasi/Item	Kategori/Spesifikasi/Item	Kategori/Spesifikasi/Item
				Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit			
1
2
3
4
5

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBRANGINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	SISWA	INDIKATOR	Rencana 2013		Target					KPI (PERKIL)
				2013	2013	Praktikan (bnp)					
				(5)	(6)	2013 (7)	2014 (8)	2015 (9)	2016 (10)	2017 (11)	
01	Kelembagaan, Cerdas dan Pembedayaan generasi muda	(B)	(B)	5	5	5	140	113	90,0	90,0	
1	Kelembagaan, Cerdas dan Pembedayaan generasi muda		1. Meningkatkan jumlah kegiatan pelayanan PUS di tingkat provinsi dan kabupaten	5	5	5	140	113	90,0	90,0	
2	Kelembagaan, Cerdas dan Pembedayaan generasi muda		2. Meningkatkan jumlah kegiatan pelayanan PUS di tingkat provinsi dan kabupaten	4	4	4	140	113	90,0	90,0	
3	Kelembagaan, Cerdas dan Pembedayaan generasi muda		3. Meningkatkan jumlah kegiatan pelayanan PUS di tingkat provinsi dan kabupaten	3	3	3	140	113	90,0	90,0	
4	Kelembagaan, Cerdas dan Pembedayaan generasi muda		4. Meningkatkan jumlah kegiatan pelayanan PUS di tingkat provinsi dan kabupaten	30	30	30	140	113	90,0	90,0	
5	Kelembagaan, Cerdas dan Pembedayaan generasi muda		5. Meningkatkan jumlah kegiatan pelayanan PUS di tingkat provinsi dan kabupaten	250	250	250	140	113	90,0	90,0	
6	Kelembagaan, Cerdas dan Pembedayaan generasi muda		6. Meningkatkan jumlah kegiatan pelayanan PUS di tingkat provinsi dan kabupaten	1	1	1	140	113	90,0	90,0	
7	Kelembagaan, Cerdas dan Pembedayaan generasi muda		7. Meningkatkan jumlah kegiatan pelayanan PUS di tingkat provinsi dan kabupaten	1	1	1	140	113	90,0	90,0	

T. M. 071

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERANGINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target										KPI (P/BL)	
				Rencana 2013		2013		2014		2015		2016			
				2013	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016			
1.2	Program dan dan koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan strategi nasional	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia	1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia	KPI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
				Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.3	Program dan dan koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan strategi nasional	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia	1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia	KPI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
				Indikator	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

T. M. 072

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBRANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	MOMOKH	INDIKATOR	Target						KPI (P/BEK)		
				Rencana 2013		2013		2014			2015	
				2013	2013	2014	2015	2014	2015			
1.1	Program dan kegiatan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan PLS, hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PLS di tingkat desa/kelurahan/sampah bank	1.1	1. Jumlah KPI yang sudah tercapai dari target yang ditetapkan tahun 2013	1	1	1	1	1	1	1	1	
			2. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota/kelurahan/desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			3. Jumlah KPI yang sudah tercapai dari target yang ditetapkan tahun 2013	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			4. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota/kelurahan/desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.2	Program dan kegiatan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan PLS, hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PLS di tingkat desa/kelurahan/sampah bank	1.2	1. Jumlah KPI yang sudah tercapai dari target yang ditetapkan tahun 2013	1	1	1	1	1	1	1	1	
			2. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota/kelurahan/desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			3. Jumlah KPI yang sudah tercapai dari target yang ditetapkan tahun 2013	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			4. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota/kelurahan/desa/kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1

T. M. G. 7

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROFESI	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	MATERI	INDIKATOR	Rencana 2013		Target Pelaksanaan (Rp)				KPI (P/BEK)
				2013	2013	Berkas/Nilai/Rupiah				
						2013	2014	2015	2016	
13	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai...	1. Jumlah kegiatan sosialisasi...	1. Jumlah kegiatan sosialisasi...	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3		
				4	4	4	4	4		
14	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai...	1. Jumlah kegiatan sosialisasi...	1. Jumlah kegiatan sosialisasi...	1	1	1	1	1	1	1
				2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3		
				4	4	4	4	4		

T. M. 07 5

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERANGINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN	MOMOKH	INDIKATOR	Rencana 2013		Target Pelaksanaan (Rp. juta)			Alokasi (Miliar/Rupiah)			KPI (P/BEK/L)
				2013	2013	2013	2014	2015	2016			
										2013	2014	
1 III	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan PPH di keluarga dan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan PPH di keluarga dan masyarakat	1. Jumlah keluarga terlayani dengan pelayanan kesehatan PPH di keluarga dan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	h
				2. Jumlah keluarga terlayani dengan pelayanan kesehatan PPH di keluarga dan masyarakat	1	1	1	1	1	1		
				3. Jumlah keluarga terlayani dengan pelayanan kesehatan PPH di keluarga dan masyarakat	1	1	1	1	1	1		
				4. Jumlah keluarga terlayani dengan pelayanan kesehatan PPH di keluarga dan masyarakat	1	1	1	1	1	1		
1 III	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan PPH di keluarga dan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan PPH di keluarga dan masyarakat	1. Jumlah keluarga terlayani dengan pelayanan kesehatan PPH di keluarga dan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	h	
				2. Jumlah keluarga terlayani dengan pelayanan kesehatan PPH di keluarga dan masyarakat	1	1	1	1	1	1		

T.M.07.3

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERANGINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	Program/Rektori/Polindos	Sasaran	Indikator	Target										KPI (P/RSK)	
				Rencana 2013		2013		2014		2015		2016			
				2013	2013	2014	2015	2016	2016						
1.12	Peningkatan kemampuan penyediaan dan pemeliharaan sarana kesehatan	Meningkatkan jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas	1. Jumlah kunjungan pasien ke Puskesmas	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N	
				2	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				3	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				4	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				5	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				6	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				7	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				8	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				9	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				10	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				11	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
				12	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100

T. M. 077

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERANGKIAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	Program/ Kegiatan	Maksud	Indikator	Target					KPI (R/K/L)
				Miliar/Rupiah					
				2013	2014	2015	2016	2017	
1.11	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit	1. Jumlah kunjungan per ndangar per orang	1	1,1	1,2	1,3	1,4	
				2. Jumlah kunjungan per ndangar per orang	1	1,1	1,2	1,3	1,4
1.12	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit	1. Jumlah kunjungan per ndangar per orang	1	1,1	1,2	1,3	1,4	
				2. Jumlah kunjungan per ndangar per orang	1	1,1	1,2	1,3	1,4
1.13	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit	1. Jumlah kunjungan per ndangar per orang	1	1,1	1,2	1,3	1,4	
				2. Jumlah kunjungan per ndangar per orang	1	1,1	1,2	1,3	1,4
1.14	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit	1. Jumlah kunjungan per ndangar per orang	1	1,1	1,2	1,3	1,4	
				2. Jumlah kunjungan per ndangar per orang	1	1,1	1,2	1,3	1,4
1.15	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit	1. Jumlah kunjungan per ndangar per orang	1	1,1	1,2	1,3	1,4	
				2. Jumlah kunjungan per ndangar per orang	1	1,1	1,2	1,3	1,4

T. M. 7.8

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	SISWA	INDUKTOR	Target					Objektif (Miliar Rupiah)			KPI (R/KL)		
				Perencanaan (Rp)					Perencanaan (Milyar)					
				2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016			
1	Pengarusahan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan		1. Jumlah kelompok usaha produktif di pedesaan	1	3	3								
1	Pengarusahan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan		2. Jumlah kelompok usaha produktif di pedesaan	1	3	3								
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		2. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		3. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
4	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		4. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
5	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		5. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
6	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		6. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
7	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		7. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
8	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		8. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
9	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		9. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
10	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		10. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
11	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		11. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
12	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
13	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		13. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
14	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		14. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
15	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		15. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
16	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		16. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
17	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		17. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
18	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		18. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
19	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		19. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								
20	Peningkatan kualitas sumber daya manusia		20. Jumlah lulusan pendidikan menengah kejuruan	100	250	250								

T. M. 13

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	PROGAM/REKAM/PROJEK	MISI	INDIKATOR	Rencana		Target				KPI (P/BEK)
				2013	2014	2013		2014		
						2013	2014	2013	2014	
2.2	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif	1. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	1. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1
				2. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	2	2	2	2	2	2
				3. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	3	3	3	3	3	3
2.3	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif	1. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	1. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1
				2. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	2	2	2	2	2	2
				3. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	3	3	3	3	3	3
2.4	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif	1. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	1. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1
				2. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	2	2	2	2	2	2
				3. Jumlah kegiatan promotif dan preventif yang dilaksanakan	3	3	3	3	3	3

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBRANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA	PROGRAM/KEGIATAN/PROJEK	MUSYAWARAH	INDIKATOR	Rencana 2013		Target Pelaksanaan (Milyar Rupiah)				KPI (P/BEK/L)		
				Target Pelaksanaan (Milyar Rupiah)		2013		2014			2015	
				2013	2014	2013	2014	2015	2016			
3.1	Peningkatan kemampuan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan RI	Meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Masyarakat (KCM)	1. Jumlah kunjungan/pengobatan ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Masyarakat	K/L	1	1	1	1	1	1	1	
			2. Jumlah KCM yang berakreditasi	K/L	1	1	1	1	1	1	1	
			3. Jumlah KCM yang mendapat kunjungan ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Masyarakat	K/L	1	1	1	1	1	1	1	
			4. Jumlah KCM yang mendapat kunjungan ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Masyarakat	pro	1	1	1	1	1	1	1	
3.6	Peningkatan kemampuan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan RI	Meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Masyarakat (KCM)	1. Jumlah kunjungan/pengobatan ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Masyarakat	K/L	1	1	1	1	1	1	1	
			2. Jumlah KCM yang berakreditasi	pro	1	1	1	1	1	1	1	
			3. Jumlah KCM yang mendapat kunjungan ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Masyarakat	K/L	1	1	1	1	1	1	1	
			4. Jumlah KCM yang mendapat kunjungan ke Puskesmas dan Klinik Kesehatan Masyarakat	pro	1	1	1	1	1	1	1	
Jumlah												

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					KPI (P/TKL)
				Rencana 2013		Maksimal (Miliar Rupiah)			
				2013	2014	2015	2016	2017	
2.1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat	1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	5	
				2. Jumlah puskesmas yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	
				3. Jumlah puskesmas yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	
				4. Jumlah puskesmas yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	
2.2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat	1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	5	
				2. Jumlah puskesmas yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	
				3. Jumlah puskesmas yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	
				4. Jumlah puskesmas yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	
2.3	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat	1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	5	
				2. Jumlah puskesmas yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	
				3. Jumlah puskesmas yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	
				4. Jumlah puskesmas yang memiliki puskesmas	1	2	3	4	

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERANGKIN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PELOMBAK/PROFESIONALISASI	MISI	Sasaran	Indikator	Target					Efisiensi (Miliar Rupiah)			KPI (P/BEK)	
					2013		2014		2015		2014	2015		2016
					Rencana	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.10	Peningkatan dan keberlanjutan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat	1. Jumlah K- dan perantara yang terakreditasi	KPI	1	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1.2	b	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018			
1.11	Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga kesehatan	Meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat	2. Jumlah K- dan perantara yang terakreditasi	KPI	1	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1.3	b	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018			
3	Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga kesehatan	Meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat	3. Jumlah K- dan perantara yang terakreditasi	KPI	129	2013	2014	2015	2016	2017	2018	1.4	b	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018			

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBRANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PELOPOR	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	SISWA	INDUKTOR	Target						KPI (R/KL)					
				Rencana 2013		2013		2014			2015				
				2013	2013	2013	2014	2014	2015		2015				
3. Bidang hukum, kebijakan, pelaksanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dan regulasi	1. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	3.1. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	1. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	1.1. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				1.2. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				1.3. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				1.4. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				1.5. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				1.6. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	2.1. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	2.1.1. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	2.1.1.1. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	2.1.1.1.1. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				2.1.1.1.2. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				2.1.1.1.3. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				2.1.1.1.4. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				2.1.1.1.5. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
				2.1.1.1.6. Mengembangkan program dan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

11/11/2012

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERANGINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	SISWA	INDIKATOR	Target					KPI (P/RSK)
				Rencana 2013		Praktisi (Miliar/Rupiah)			
				2013	2013	2013	2014	2015	
3.1	Pengembangan dan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat kabupaten/kota 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi	
3.2	Pengembangan dan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat provinsi 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional	
3.3	Pengembangan dan peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat internasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat internasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat internasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat internasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat internasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat internasional	1. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat nasional 2. Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat di tingkat internasional	

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERANGKINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR	SISWA	INDIKATOR	Target										KPI (P/TKL)		
				2013		2014		2015		2016		2017				
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1			1. Jumlah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di tingkat SD, SMP, dan SMA/MA.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2			2. Jumlah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di tingkat SMA/MA.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3			3. Jumlah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di tingkat SMA/MA.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4			4. Jumlah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di tingkat SMA/MA.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5			5. Jumlah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di tingkat SMA/MA.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL				230,7	236,0	241,3	246,6	251,9	257,2	262,5	267,8	273,1	278,4	283,7	289,0	294,3

Hal. 5 dari 7

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEPANTERANGAN KEWARGA: KEMENTERIAN PANCAKIH

NO	PROGRAM / RENCANA PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI DOLLAR RUPIAH		
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	RENCANA 2013	2014	2015	2016
1	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMERTANAN TUGAS PERUSAHAAN KEMERDEKAAN DAN USAHA RUMAH TANGGA	1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kepuasan kerja (KRI) sebagai indikator kinerja dalam pelaksanaan pelayanan program PSE. 2. Persentase KLI dalam adainas ras. 3. Persentase pemantauan, kawatirasi, dan penanganan yang dapat dilaksanakan. 4. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat. 5. Persentase penyelesaian keluhan masyarakat. 6. Persentase penyelesaian keluhan masyarakat. 7. Persentase penyelesaian keluhan masyarakat. 8. Persentase penyelesaian keluhan masyarakat. 9. Persentase penyelesaian keluhan masyarakat. 10. Persentase penyelesaian keluhan masyarakat. 11. Persentase penyelesaian keluhan masyarakat. 	100%	100%	100%	100%	20.000	20.000	20.000	20.000

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RB

NO	PROGRAM / JERBATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TARGET					SALINAN DOLAN RUPESMI			
				PERKARA 2013	2014	2015	2016	REKANA 2013	2011	2015	2016	
2	PROGRAM PEMINERATAN SARANA DAN PRASARANA KAWILKOTER KEMERDEKAAN DAK RB	Meningkatkan kemampuan kualitas sarana dan prasarana di semua kabupaten/kota pelayanan, akses, dan keselamatan	12. Persentase jumlah sarana dan prasarana yang pada tingkat kesesuaian	100%	100%	100%	100%					
			13. Persentase jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki	100%	100%	100%	100%					
			14. Persentase jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki	100%	100%	100%	100%					
			15. Mula dan berakhirnya kegiatan	4	4	4	4					
			16. Nilai RP/RK	RP/RK	RP/RK	RP/RK	RP/RK					
3	PROGRAM PUNYAIAN KAWILKOTER KEMERDEKAAN DAK RB	Meningkatkan kemampuan kualitas sarana dan prasarana di semua kabupaten/kota pelayanan, akses, dan keselamatan	17. Rata-rata nilai RP/RK	RP/RK	RP/RK	RP/RK	RP/RK					
			18. Rata-rata nilai RP/RK	RP/RK	RP/RK	RP/RK	RP/RK					
3	PROGRAM PUNYAIAN KAWILKOTER KEMERDEKAAN DAK RB	Meningkatkan kemampuan kualitas sarana dan prasarana di semua kabupaten/kota pelayanan, akses, dan keselamatan	1. Jumlah sarana dan prasarana yang rusak dan perbaikan	80%	80%	80%	80%					
			2. Persentase sarana dan prasarana yang rusak dan perbaikan	80%	80%	80%	80%					
			3. Persentase sarana dan prasarana yang rusak dan perbaikan	80%	80%	80%	80%					
			4. Persentase sarana dan prasarana yang rusak dan perbaikan	80%	80%	80%	80%					
			5. Persentase sarana dan prasarana yang rusak dan perbaikan	80%	80%	80%	80%					

11/1/2012

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RD

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDUKTOR	TARGET				SASARAN DOLAN RUMAH		
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	RENTAN 2013	2011	2016
			6. Peningkatan kemampuan dan wawasan para-petani yang telah terbukti capaian dan hasil usahanya 7. Peningkatan Indeks Produktivitas Petani (IPK-P) yang telah terbukti capaian dan hasil usahanya 8. Peningkatan Konsiliasi struktural dan fungsional Kabupaten/Kota dan Kecamatan (KOR) dan LAR 9. Peningkatan peran yang aktual organisasi dan kelembagaan 10. Peningkatan kemampuan dan wawasan aparatur	0%	0%	100%	100%			
			1. Peningkatan kemampuan dan wawasan aparatur yang substansial, vertikal, horizontal, dan seluler	0%	100%	100%	100%			
			2. Peningkatan kemampuan dan wawasan aparatur yang substansial, vertikal, horizontal, dan seluler	0%	100%	100%	100%			
			3. Peningkatan kemampuan dan wawasan aparatur yang substansial, vertikal, horizontal, dan seluler	0%	100%	100%	100%			
			4. Peningkatan kemampuan dan wawasan aparatur yang substansial, vertikal, horizontal, dan seluler	0%	100%	100%	100%			
			5. Peningkatan kemampuan dan wawasan aparatur yang substansial, vertikal, horizontal, dan seluler	0%	100%	100%	100%			
			6. Peningkatan kemampuan dan wawasan aparatur yang substansial, vertikal, horizontal, dan seluler	0%	100%	100%	100%			

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RB

NO	PROGRAM / JERISIAN PRIORITY	SASARAN	INDUKTOR	TARGET					SALINAN DOKUMEN/FORMULIR		
				REPERANG 2013	2014	2015	2016	REKTAMA 2013	2011	2015	2016
		<p>3. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya</p> <p>4. Tercapainya terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya</p>	<p>1. Jumlah pelayanan publik di tingkat pusat</p> <p>2. Persentase akses pelayanan publik yang terlayani</p> <p>3. Jumlah pelayanan publik di tingkat pusat</p> <p>4. Persentase akses pelayanan publik yang terlayani</p> <p>5. Jumlah pelayanan publik di tingkat pusat</p> <p>6. Persentase akses pelayanan publik yang terlayani</p> <p>7. Jumlah pelayanan publik di tingkat pusat</p> <p>8. Persentase akses pelayanan publik yang terlayani</p> <p>9. Jumlah pelayanan publik di tingkat pusat</p> <p>10. Persentase akses pelayanan publik yang terlayani</p>	<p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p>	<p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p>	<p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p>	<p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p>				
		<p>5. Tercapainya terwujudnya kualitas pelayanan publik</p>	<p>1. Jumlah pelayanan publik yang terlayani</p> <p>2. Jumlah pelayanan publik yang terlayani</p> <p>3. Jumlah pelayanan publik yang terlayani</p> <p>4. Jumlah pelayanan publik yang terlayani</p> <p>5. Jumlah pelayanan publik yang terlayani</p> <p>6. Jumlah pelayanan publik yang terlayani</p> <p>7. Jumlah pelayanan publik yang terlayani</p> <p>8. Jumlah pelayanan publik yang terlayani</p> <p>9. Jumlah pelayanan publik yang terlayani</p> <p>10. Jumlah pelayanan publik yang terlayani</p>	<p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p>	<p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p>	<p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p>	<p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p> <p>30%</p> <p>100%</p>				

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RU

NO	PROGRAM / KEBIJAKAN /PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TARGET				SALURAN DOKUMEN/INFORMASI								
				PERKARA 2013	TUMBUHAN BUNU		REKTANA 2013	2011	2015	2016						
					2014	2015					2016					
			<p>7. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional.</p> <p>8. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal nasional.</p> <p>9. Jumlah artikel publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2013.</p> <p>10. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2014.</p> <p>11. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2015.</p> <p>12. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2016.</p>	80%	90%	95%	90%	95%	100%							
			<p>1. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2013.</p> <p>2. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2014.</p> <p>3. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2015.</p> <p>4. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2016.</p>	700	800	900	800	900	1000							
			<p>1. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2013.</p> <p>2. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2014.</p> <p>3. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2015.</p> <p>4. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2016.</p>	1.000	1.100	1.200	1.000	1.100	1.200							
			<p>1. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2013.</p> <p>2. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2014.</p> <p>3. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2015.</p> <p>4. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2016.</p>	1.000	1.100	1.200	1.000	1.100	1.200							
			<p>1. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2013.</p> <p>2. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2014.</p> <p>3. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2015.</p> <p>4. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2016.</p>	1.000	1.100	1.200	1.000	1.100	1.200							
			<p>1. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2013.</p> <p>2. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2014.</p> <p>3. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2015.</p> <p>4. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2016.</p>	1.000	1.100	1.200	1.000	1.100	1.200							
			<p>1. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2013.</p> <p>2. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2014.</p> <p>3. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2015.</p> <p>4. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2016.</p>	1.000	1.100	1.200	1.000	1.100	1.200							
			<p>1. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2013.</p> <p>2. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2014.</p> <p>3. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2015.</p> <p>4. Jumlah publikasi ilmiah dan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional dan nasional yang diterbitkan pada tahun 2016.</p>	1.000	1.100	1.200	1.000	1.100	1.200							

Lampiran 3

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RB

NO	PROGRAM / KEGIATAN / PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TARGET			SALINAN DOKUMEN/FORMULIR					
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	RENTANA 2013	2011	2016		
1	Penguatan kohesi dan kondusifitas sosial masyarakat	Peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat	8. Jumlah kegiatan pelatihan dan lokakarya	2	2							
			4. Jumlah dana anggaran kegiatan sosial	1,028	1,028							
			5. Jumlah kegiatan sosial dan kegiatan lainnya	100% (100%)	100% (100%)							
			6. Jumlah kegiatan sosial dan kegiatan lainnya	50% (50%)	50% (50%)							
			7. Jumlah kegiatan sosial dan kegiatan lainnya	1	1							
			8. Jumlah kegiatan sosial dan kegiatan lainnya	1	1							
			9. Jumlah kegiatan sosial dan kegiatan lainnya	1	1							
			10. Jumlah kegiatan sosial dan kegiatan lainnya	1	1							
			11. Jumlah kegiatan sosial dan kegiatan lainnya	1	1							
			12. Jumlah kegiatan sosial dan kegiatan lainnya	1	1							

11/1/2012

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RD

NO	PROGRAM / KEGIATAN / PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TARGET				
				PERKARA 2013	2014	2015	2016	RENTANA 2013
2	Peningkatan kualitas, kuantitas, dan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>2. Meningkatkan kuantitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>5. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>6. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>8. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>9. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>10. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p>	90%	90%	90%	90%	90%
				90%	90%	90%	90%	90%
3	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah	1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>2. Meningkatkan kuantitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>5. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>6. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>8. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>9. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p> <p>10. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat (KIP) pada instansi pemerintah</p>	90%	90%	90%	90%	90%
				90%	90%	90%	90%	90%

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RD

NO	PROGRAM / JERBATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TARGET					MAGNUS DOLAN RUPESMI			
				RERANGKA 2013	2014		2015		RENTANA 2013	2011	2015	2016
					2014	2015	2015	2016				
8	Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	Terdapatnya kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
9	Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pertanian	Terdapatnya kebijakan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pertanian	Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
10	Pengembangan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pertanian	Terdapatnya kebijakan, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pertanian	Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								
			Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan pertanian	0,0%								

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RB

NO	PROGRAM / JERIDYARAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TARGET				MAGASINI DOKUMEN/UPHILL				
				REPERANG 2013	2014	2015	2016	REKTANA 2013	2011	2015	2016	
18	Peningkatan lebih lanjut hasil dan kualitas SDM keahliannya	Peningkatan jumlah dan kualitas SDM keahliannya	Peningkatan jumlah dan kualitas SDM keahliannya	1.5%								
			Tingkat Realisasi SDG (Kategori 2013) dan Realisasi SDG (Kategori 2014) dan Realisasi SDG (Kategori 2015)	Realisasi SDG (Kategori 2013)								
			Tingkat Realisasi SDG (Kategori 2013) dan Realisasi SDG (Kategori 2014) dan Realisasi SDG (Kategori 2015)	Realisasi SDG (Kategori 2013)								
			Tingkat Realisasi SDG (Kategori 2013) dan Realisasi SDG (Kategori 2014) dan Realisasi SDG (Kategori 2015)	Realisasi SDG (Kategori 2013)								
			Tingkat Realisasi SDG (Kategori 2013) dan Realisasi SDG (Kategori 2014) dan Realisasi SDG (Kategori 2015)	Realisasi SDG (Kategori 2013)								
			Tingkat Realisasi SDG (Kategori 2013) dan Realisasi SDG (Kategori 2014) dan Realisasi SDG (Kategori 2015)	Realisasi SDG (Kategori 2013)								
			Tingkat Realisasi SDG (Kategori 2013) dan Realisasi SDG (Kategori 2014) dan Realisasi SDG (Kategori 2015)	Realisasi SDG (Kategori 2013)								
			Tingkat Realisasi SDG (Kategori 2013) dan Realisasi SDG (Kategori 2014) dan Realisasi SDG (Kategori 2015)	Realisasi SDG (Kategori 2013)								
			Tingkat Realisasi SDG (Kategori 2013) dan Realisasi SDG (Kategori 2014) dan Realisasi SDG (Kategori 2015)	Realisasi SDG (Kategori 2013)								
			Tingkat Realisasi SDG (Kategori 2013) dan Realisasi SDG (Kategori 2014) dan Realisasi SDG (Kategori 2015)	Realisasi SDG (Kategori 2013)								

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RB

NO	PROGRAM / JENJANG PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TARGET				ALOKASI DOLAN RUPESMI			
				PERKARA 2013	2014	2015	2016	REKTANA 2013	2011	2016	
16	Peningkatan kualitas pelayanan dan pengabdian masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan pengabdian masyarakat	1. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			2. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			3. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			4. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			5. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			6. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			7. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			8. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			9. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			10. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			11. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			12. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			13. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			14. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							
			15. Meningkatkan jumlah kunjungan ke Puskesmas	2013: 100% 2014: 100% 2015: 100% 2016: 100%							

LIN 045-2

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBAHANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RB

NO	PROGRAM / KEGIATAN / PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TARGET				
				REPERANG 2013	2014	2015	2016	RENTANA 2013
17	Peningkatan kredibilitas dan kualitas pelayanan publik SDM aparatur	Terdapatnya kredibilitas dan kualitas pelayanan publik aparatur	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur	62%	03%			73%
			Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur	70% (Rata-rata 2013-2016)				73%
18	Peningkatan kredibilitas dan kualitas pelayanan publik SDM aparatur	Terdapatnya kredibilitas dan kualitas pelayanan publik aparatur	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur	62%				73%
			Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur	70% (Rata-rata 2013-2016)				73%
19	Peningkatan kredibilitas dan kualitas pelayanan publik SDM aparatur	Terdapatnya kredibilitas dan kualitas pelayanan publik aparatur	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur	62%				73%
			Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur	70% (Rata-rata 2013-2016)				73%
20	Peningkatan kredibilitas dan kualitas pelayanan publik SDM aparatur	Terdapatnya kredibilitas dan kualitas pelayanan publik aparatur	Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur	62%				73%
			Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur	70% (Rata-rata 2013-2016)				73%

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RD

NO	PROGRAM / JENJANG PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TARGET				MAGNUS DOLAN RUPESMI								
				PERKARA 2013	2014	2015	2016	RENTANA 2013	2011	2015	2016					
19	Pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, profesionalitas, dan akuntabilitas pemerintah pusat.	Terdapatnya peningkatan indeks kinerja pelayanan publik pemerintah pusat	Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan peningkatan indeks kinerja pelayanan publik pemerintah pusat 2. Melakukan kegiatan peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas pemerintah pusat 	100%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
20	Pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, profesionalitas, dan akuntabilitas pemerintah pusat.	Terdapatnya peningkatan indeks kinerja pelayanan publik pemerintah pusat	Pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan peningkatan indeks kinerja pelayanan publik pemerintah pusat 2. Melakukan kegiatan peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas pemerintah pusat 	100%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RB

NO	PROGRAM / KEGIATAN / PRIORITAS	SASARAN	INDUKTOR	TARGET				SALINAN DOKUMEN/FORMULIR		
				REPERANG 2013	2014	2015	2016	RENTANA 2013	2011	2015
22	Kemampuan pelaksanaan kebijakan publik yang berkualitas, inovatif, transparan dan akuntabel	Kemampuan pelaksanaan kebijakan publik yang berkualitas, inovatif, transparan dan akuntabel	<p>1. Jumlah Kebijakan Publik yang diterbitkan</p> <p>2. Jumlah Kebijakan Publik yang direvisi</p> <p>3. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>4. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>5. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>6. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>7. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>8. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>9. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>10. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>
23	Kualitas pelaksanaan kebijakan publik yang berkualitas, inovatif, transparan dan akuntabel	Kualitas pelaksanaan kebijakan publik yang berkualitas, inovatif, transparan dan akuntabel	<p>1. Jumlah Kebijakan Publik yang diterbitkan</p> <p>2. Jumlah Kebijakan Publik yang direvisi</p> <p>3. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>4. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>5. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>6. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>7. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>8. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>9. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>10. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>
24	Pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, transparan dan akuntabel	Pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, transparan dan akuntabel	<p>1. Jumlah Kebijakan Publik yang diterbitkan</p> <p>2. Jumlah Kebijakan Publik yang direvisi</p> <p>3. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>4. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>5. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>6. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>7. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>8. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>9. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p> <p>10. Jumlah Kebijakan Publik yang ditinjau kembali</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>	<p>1. 100 %</p> <p>2. 100 %</p> <p>3. 100 %</p> <p>4. 100 %</p> <p>5. 100 %</p> <p>6. 100 %</p> <p>7. 100 %</p> <p>8. 100 %</p> <p>9. 100 %</p> <p>10. 100 %</p>

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PAN & RU

NO	PROGRAM / KEGIATAN / PRIORITAS	SASARAN	INDUKATOR	TARGET				SALINAN DOLAN RUMAH		
				REPERANG 2013	2014	2015	2016	RENTANA 2013	2011	2016
25	Pelaksanaan pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian, dan reformasi administrasi	Meningkatkan nilai publikasi di jurnal internasional	Jumlah Publikasi Internasional Jumlah Publikasi Nasional Jumlah Publikasi Internasional Jumlah Publikasi Nasional Jumlah Publikasi Internasional Jumlah Publikasi Nasional Jumlah Publikasi Internasional Jumlah Publikasi Nasional	1.000.000.000 23.500.000.000 23.500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000	1.000.000.000 23.500.000.000 23.500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000	1.000.000.000 23.500.000.000 23.500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000	1.000.000.000 23.500.000.000 23.500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000	1.000.000.000 23.500.000.000 23.500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000	1.000.000.000 23.500.000.000 23.500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000	1.000.000.000 23.500.000.000 23.500.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000
TOTAL				1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

MATRICES 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/LOKASI	INDIKATOR	KUALITAS	KUPAS			KUPAS			KUPAS				
				2013			2014			2015				
				2013	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		
1	Program Penguatan dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Pokok dan Fungsi BKN	Kecepatan dan ketepatan pelayanan publik	Memastikan tercapainya target pelayanan publik dan administrasi kependudukan	31%	32%	33%	32%	33%	32%	33%	32%	33%	32%	33%
2	Program Penguatan dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Pokok dan Fungsi BKN	Kecepatan dan ketepatan pelayanan publik	Kecepatan dan ketepatan pelayanan publik dan administrasi kependudukan	30%	31%	32%	30%	31%	30%	31%	30%	31%	30%	31%
3	Program Penguatan dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Pokok dan Fungsi BKN	Kecepatan dan ketepatan pelayanan publik	Kecepatan dan ketepatan pelayanan publik dan administrasi kependudukan	31%	32%	33%	31%	32%	31%	32%	31%	32%	31%	32%

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PEKERJAAN/REVISI/REVISI/REVISI	INDIKATOR	DASAR HUKUM	RUPUKAS 2013		RUPUKAS 2014		RUPUKAS 2015		RUPUKAS 2016
				RUPUKAS 2013		RUPUKAS 2014		RUPUKAS 2015		
				2013	2014	2014	2015	2015	2016	
a.	Kepolisian Daerah Irian Jaya	Kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian	Kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
b.	Kepolisian Daerah Irian Jaya	Kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian	Kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
c.	Kepolisian Daerah Irian Jaya	Kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian	Kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
d.	Kepolisian Daerah Irian Jaya	Kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian	Kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
e.	Kepolisian Daerah Irian Jaya	Kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian	Kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
TOTAL AKHIR				1.141,8	1.141,8	1.141,8	1.141,8	1.141,8	1.141,8	1.141,8

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMERAGASANDI NEGARA

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITY	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (MILYAR RUPIAH)		
			2011		2012		2013		2011	2012	2013
			MPN-AMA 2011	MPN-AMA 2012	MPN-AMA 2011	MPN-AMA 2012	MPN-AMA 2013				
1.	Program Dukungan Monev dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Samsi Mages	1. Jumlah administrasi permohonan pelayanan masyarakat di lingkungan Samsi Mages 2. Jumlah kegiatan monev di lingkungan Samsi Mages 3. Jumlah kegiatan pelayanan masyarakat di lingkungan Samsi Mages 4. Jumlah kegiatan pelayanan masyarakat di lingkungan Samsi Mages	250	217	270	270	270	1946	2162	2162	2016
2.	Program Pengembangan Persebaran Nasional	1. Jumlah kegiatan persebaran nasional 2. Jumlah kegiatan persebaran nasional 3. Jumlah kegiatan persebaran nasional 4. Jumlah kegiatan persebaran nasional	250	217	270	270	270	1946	2162	2162	2016
3.	Program Pengembangan Persebaran Nasional	1. Jumlah kegiatan persebaran nasional 2. Jumlah kegiatan persebaran nasional 3. Jumlah kegiatan persebaran nasional 4. Jumlah kegiatan persebaran nasional	250	217	270	270	270	1946	2162	2162	2016
4.	Program Pengembangan Persebaran Nasional	1. Jumlah kegiatan persebaran nasional 2. Jumlah kegiatan persebaran nasional 3. Jumlah kegiatan persebaran nasional 4. Jumlah kegiatan persebaran nasional	250	217	270	270	270	1946	2162	2162	2016

L.L.5.051-1

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN KESEHATAN : REVISI RENCANA

NO	URUTAN / KEGIATAN / PRIORITAS	ESKALASI	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
				JUMLAH 2013	PERFORMAN MAJU		RENLANS 2013	PRAKSIAN MAJU		
					2013	2015		2016	2013	2015
6.	Analisa Situasi	pengembangan perencanaan model pelayanan di Puskesmas	Indikator: akses dan kualitas	12	12	12	30,00	22,80	22,80	22,80
7.	Perencanaan dan Pelaksanaan	penyediaan dan distribusi obat	Indikator: ketersediaan persediaan obat	10	10	10	25,3	20,7	20,7	20,7
8.	Perencanaan dan Pelaksanaan	penyediaan dan distribusi obat	Indikator: ketersediaan persediaan obat	34	34	34	45,0	44,1	44,1	44,1
9.	Perencanaan dan Pelaksanaan	penyediaan dan distribusi obat	Indikator: ketersediaan persediaan obat	2	2	2	4,2	3,3	3,3	3,3
TOTAL ALOKASI							1.191,7	1.309,6	1.309,6	1.309,6

L.L.5.051-2

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011

NO	PROGRAM/ KELOMPOK/LOKASI	MUSKAW	INDIKATOR	REVENUE			EXPENSE			ALOKASI DAJARAN SUKSES	
				REVENUE		EXPENSE		2013	2014	2015	2016
				2013	2014	2013	2014				
1	Pengembangan Kapasitas dan Peningkatan Tingkat Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan keperawatan, kefarmasi, kegawatmukaan, ke farmasi	a. Tersentiasa pelayanan keperawatan di bidang pelayanan keperawatan kefarmasi, kefarmasi, kegawatmukaan dan kefarmasi	b. Tingkat kepuasan pelayanan di bidang pelayanan keperawatan dan kefarmasi	c. Peningkatan kekuasaan kefarmasi kefarmasi	d. Peningkatan kekuasaan kefarmasi	e. Peningkatan kekuasaan kefarmasi	f. Peningkatan kekuasaan kefarmasi	13,4	10,4	20,5

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2011

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DEWAN KETAHANAN NASIONAL		SASARAN	INDIKATOR	"AKHIR"									
				REVISI 2015	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
NO	TRIGER/ MENDALAM												
2	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	<p>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kependidikan</p> <p>2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan nasional</p> <p>3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan nasional</p> <p>4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan nasional</p> <p>5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan nasional</p> <p>6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ketahanan nasional</p>	<p>A. Terselenggaranya kegiatan dalam bentuk kegiatan tidak beraturan seperti pelatihan, seminar, diskusi, dan lain-lain</p> <p>B. Terselenggaranya kegiatan dalam bentuk kegiatan beraturan seperti pelatihan, seminar, diskusi, dan lain-lain</p> <p>C. Terselenggaranya kegiatan dalam bentuk kegiatan beraturan seperti pelatihan, seminar, diskusi, dan lain-lain</p> <p>D. Terselenggaranya kegiatan dalam bentuk kegiatan beraturan seperti pelatihan, seminar, diskusi, dan lain-lain</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Matriks 2.3 Rencana Tindak Pembangunak Kementerian/ Lembaga Tahun 2011

No	Tugas/ Mekanisme/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Tercapainya RUP-AM												
				Rencana 2011	Tercapainya 2011		Rencana 2011	Tercapainya 2011												
					2011	2012		2011	2012	2013	2014	2015	2016							
1.	Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Nasional, Kebijakan Nasional, dan Instruksi Menteri/ Kepala		2. Peningkatan secara program di bidang kesehatan, gizi dan kesehatan serta malnutrisi balita yang berujung kepada peningkatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan		4. Peningkatan sistem pelayanan di bidang kesehatan yang dapat meningkatkan mutu pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan		3. Peningkatan gizi, gizi buruk, stunting, dan anemia pada anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan		5. Peningkatan gizi, gizi buruk, stunting, dan anemia pada anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOTAL ALOKASI				38,7	43,7	48,2	53,3	58,8	63,8	68,8	73,8	78,8	83,8	88,8	93,8	98,8	103,8	108,8	113,8	118,8

11/06/2011

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KADAN PUSAT STATISTIK	KEMENTERIAN/LEMBAGA	MATERI	INDIKATOR	TAKSIK			ALOKASI BUDGET (Rp)		
				2012	2013	2014	2013	2014	2015
1	KEMENTERIAN PERKOTAMADINEAN DAN TRANSPORTASI	Strategi Pengembangan Bandara	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	KEMENTERIAN PERKOTAMADINEAN DAN TRANSPORTASI	Strategi Pengembangan Bandara	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	KEMENTERIAN PERKOTAMADINEAN DAN TRANSPORTASI	Strategi Pengembangan Bandara	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	KEMENTERIAN PERKOTAMADINEAN DAN TRANSPORTASI	Strategi Pengembangan Bandara	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MT 1054 1

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN, LEMBAGA TAHUN 2013

NO	NOMOR DAN NAMA PROGRAM	KEMERIA	INDUKTOR	145811			145812			145813		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145811	145811	145811	145811	145811	145811	145811	145811	145811	145811	145811
2	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145812	145812	145812	145812	145812	145812	145812	145812	145812	145812	145812
3	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145813	145813	145813	145813	145813	145813	145813	145813	145813	145813	145813
4	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145814	145814	145814	145814	145814	145814	145814	145814	145814	145814	145814
5	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145815	145815	145815	145815	145815	145815	145815	145815	145815	145815	145815
6	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145816	145816	145816	145816	145816	145816	145816	145816	145816	145816	145816
7	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145817	145817	145817	145817	145817	145817	145817	145817	145817	145817	145817
8	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145818	145818	145818	145818	145818	145818	145818	145818	145818	145818	145818
9	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145819	145819	145819	145819	145819	145819	145819	145819	145819	145819	145819
10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145820	145820	145820	145820	145820	145820	145820	145820	145820	145820	145820
11	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145821	145821	145821	145821	145821	145821	145821	145821	145821	145821	145821
12	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145822	145822	145822	145822	145822	145822	145822	145822	145822	145822	145822
13	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145823	145823	145823	145823	145823	145823	145823	145823	145823	145823	145823
14	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145824	145824	145824	145824	145824	145824	145824	145824	145824	145824	145824
15	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145825	145825	145825	145825	145825	145825	145825	145825	145825	145825	145825
16	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145826	145826	145826	145826	145826	145826	145826	145826	145826	145826	145826
17	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145827	145827	145827	145827	145827	145827	145827	145827	145827	145827	145827
18	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145828	145828	145828	145828	145828	145828	145828	145828	145828	145828	145828
19	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145829	145829	145829	145829	145829	145829	145829	145829	145829	145829	145829
20	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia	145830	145830	145830	145830	145830	145830	145830	145830	145830	145830	145830

145811

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN, LEMBAGA TAHUN 2013

NO	KEMENTERIAN, LEMBAGA, LAYANAN, UNIT/STAF DAN/LEMBAGA	KEMERDEHAAN	INDUKTOR	19501		19502		19503		19504		19505	
				2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1.	KEHUTANAN DAN PERBURUHAN	KEHUTANAN	KEHUTANAN	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.	KEHUTANAN DAN PERBURUHAN	KEHUTANAN	KEHUTANAN	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3.	KEHUTANAN DAN PERBURUHAN	KEHUTANAN	KEHUTANAN	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
4.	KEHUTANAN DAN PERBURUHAN	KEHUTANAN	KEHUTANAN	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5.	KEHUTANAN DAN PERBURUHAN	KEHUTANAN	KEHUTANAN	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
			TOTAL	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000

11/11/2012

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBAHANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013
PERPUS TAKAN NASIONAL

KEMENTERIAN/LEMBAGA: PERPUS TAKAN NASIONAL

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDUKATOR	TARGET					ALOKASI DITUNJANG BELAKANG					
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015			
01	Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
02	Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
03	Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
04	Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
05	Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
06	Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
07	Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
08	Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
09	Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
10	Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	1. Jumlah publikasi internasional dan nasional 2. Jumlah publikasi internasional dan nasional 3. Jumlah publikasi internasional dan nasional	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

**MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013
PERPUS TAKAN NASIONAL**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2012			TARGET			ALOKASI DANA BERTAMBAH		
				2012	2013	2014	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			1. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2012 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2013 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2014 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1	Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat											
			1. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2012 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2013 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2014 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2015 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2016 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2017 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2018 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2019 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			9. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2020 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2021 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			11. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2022 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			12. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2023 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			13. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2024 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			14. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2025 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			15. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2026 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			16. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2027 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			17. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2028 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			18. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2029 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	
			19. Jumlah pertemuan nasional dan internasional yang diselenggarakan pada 2030 (Rp. 0,00)	0	0	0	0	0	0	0	0	

01/11/2012

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMILANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013
PERPUS TAKAN NASIONAL

No.	PROGRAM/UTGATAN	SASARAN	INDUKTOR	TARGET					ALOKASI DITUNJANG BERTAMBAH												
				BERILIANA 2013 (5)	2014 (6)	2015 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	2019 (11)	2020 (12)										
												2013 (5)	2014 (6)	2015 (7)	2016 (8)	2017 (9)	2018 (10)	2019 (11)	2020 (12)		
10		(3)	1. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
			2. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
			3. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
			4. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
			5. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
			6. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
2.3	Pendidikan dan Pelatihan (P2L) Nasional	Meningkatkan kemampuan SDM (P2L) Nasional	1. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
			2. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
			3. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
			4. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
			5. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
			6. media persasiaran provinsi yang memiliki rencana persasiaran lokal	30	30	30	30	30													
				10,11											4,75						

01/10/2012

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMILANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013
PERPUS TAKAN NASIONAL

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDUKATOR	TARGET					ALOKASI (MILYAR RUPIAH)					
				BERILUASA 2013		PERALIHAN MASU		PERALIHAN MASU		PERALIHAN MASU				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1.1	Persebaran 80% (80%) Perustakaan Nasional	(3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah peserta didik, peserta didik yang mengikuti pendidikan (diklat) 2. jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat) 3. jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan (diklat) 4. jumlah buku dan alat yang diserahkan/dibagikan 5. jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat) 	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.1	Persebaran 80% (80%) Perustakaan Nasional	<p>1. Jumlah peserta didik, peserta didik yang mengikuti pendidikan (diklat)</p> <p>2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p> <p>3. Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan (diklat)</p> <p>4. Jumlah buku dan alat yang diserahkan/dibagikan</p> <p>5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p>	<p>1. Jumlah peserta didik, peserta didik yang mengikuti pendidikan (diklat)</p> <p>2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p> <p>3. Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan (diklat)</p> <p>4. Jumlah buku dan alat yang diserahkan/dibagikan</p> <p>5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p>	117,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
3.2	Persebaran 80% (80%) Perustakaan Nasional	<p>1. Jumlah peserta didik, peserta didik yang mengikuti pendidikan (diklat)</p> <p>2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p> <p>3. Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan (diklat)</p> <p>4. Jumlah buku dan alat yang diserahkan/dibagikan</p> <p>5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p>	<p>1. Jumlah peserta didik, peserta didik yang mengikuti pendidikan (diklat)</p> <p>2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p> <p>3. Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan (diklat)</p> <p>4. Jumlah buku dan alat yang diserahkan/dibagikan</p> <p>5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p>	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.3	Persebaran 80% (80%) Perustakaan Nasional	<p>1. Jumlah peserta didik, peserta didik yang mengikuti pendidikan (diklat)</p> <p>2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p> <p>3. Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan (diklat)</p> <p>4. Jumlah buku dan alat yang diserahkan/dibagikan</p> <p>5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p>	<p>1. Jumlah peserta didik, peserta didik yang mengikuti pendidikan (diklat)</p> <p>2. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p> <p>3. Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan (diklat)</p> <p>4. Jumlah buku dan alat yang diserahkan/dibagikan</p> <p>5. Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (diklat)</p>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

01/10/2012

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMILANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013
PERPUS TAKAN NASIONAL

No.	PRORABOT TUGAS	SASARAN	INDUKATOR	REALISASI 2012		TARGET				ALOKASI DITUNJANG BERTAMBAH										
				(5)	(6)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021						
10		(3)	1. meningkatkan sistem kepastian standar prosedur operasional (kepastian)	(4)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
				2. meningkatkan sistem kepastian standar prosedur operasional (kepastian)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
				3. meningkatkan sistem kepastian standar prosedur operasional (kepastian)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				4. meningkatkan sistem kepastian standar prosedur operasional (kepastian)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
				5. meningkatkan sistem kepastian standar prosedur operasional (kepastian)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
				6. meningkatkan sistem kepastian standar prosedur operasional (kepastian)	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
				7. meningkatkan sistem kepastian standar prosedur operasional (kepastian)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
				159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159				
				2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230	2.230			
				230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230			
				120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000			

III A 007-5

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMILANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013
 PERPUS TAKAN NASIONAL

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI DITUVAR BIKHAM			
				BERLAKU 2013 (5)	PILGIRAS MAJU		2014 (6)	2015 (7)	2016 (8)	2013 (9)	2014 (10)	2015 (11)
					2013 (5)	2014 (6)						
10	Persepsi (U) Praktek	(3)	1. Jumlah dan jenis kegiatan sosialisasi dan evaluasi (14) 2. Persepsi masyarakat (15) 3. Jumlah sosialisasi (16)	1. 120 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100
11	Persepsi (U) Praktek	(3)	1. Jumlah sosialisasi (16) 2. Jumlah sosialisasi (16) 3. Jumlah sosialisasi (16)	1. 120 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100
12	Persepsi (U) Praktek	(3)	1. Jumlah sosialisasi (16) 2. Jumlah sosialisasi (16) 3. Jumlah sosialisasi (16)	1. 120 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100	1. 140 2. 100 3. 100

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMLANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013
PERPUS TAKAN NASIONAL

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDUKATOR	BERILUANA 2013		TARGET					ALOKASI DANA/ BUKU/ BELANJA								
				(5)	2013	2014	PENCAPAIAN MAJU			2015	2016	2017	2018	2019	2020				
							(6)	(7)	(8)							(9)	(10)	(11)	(12)
11	Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi	11	1. Mula-mula, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan instansi lain yang bersangkutan, untuk:	1. Mula-mula, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan instansi lain yang bersangkutan	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663			
				2. Mula-mula, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan instansi lain yang bersangkutan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
				3. Mula-mula, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan instansi lain yang bersangkutan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				4. Pelaksanaan, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan instansi lain yang bersangkutan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
				5. Mula-mula, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan instansi lain yang bersangkutan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				6. Mula-mula, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan instansi lain yang bersangkutan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi	11	1. Mula-mula, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan instansi lain yang bersangkutan	1. Mula-mula, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan instansi lain yang bersangkutan	15.038	15.038	15.038	15.038	15.038	15.038	15.038	15.038	15.038	15.038	15.038	15.038			
				2. Mula-mula, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan instansi lain yang bersangkutan	111.794	111.794	111.794	111.794	111.794	111.794	111.794	111.794	111.794	111.794	111.794	111.794	111.794		
				3. Mula-mula, dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan instansi lain yang bersangkutan	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

111/3007/2012

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMILANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013
PERPUS TAKAN NASIONAL

No.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDUKATOR	BERILUASA				TARGET				ALOKASI (MILYAR RUPIAH)				
				2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1. Jumlah basis data nasional yang dikelola/dialih.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			2. Jumlah tenaga dan prasarana yang dikerahkan.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			3. Jumlah dokumen/kegiatan yang diinput/diupload.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			4. Jumlah pelaksanaan seremonial/kegiatan.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5. Jumlah pengalihan dana/kegiatan lainnya.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			6. Jumlah pengalihan dana/kegiatan lainnya.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			7. Jumlah pengalihan dana/kegiatan lainnya.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			8. Jumlah pengalihan dana/kegiatan lainnya.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			TOTAL ALOKASI					442,25		442,25		289,44		289,44		33,81

011/11/0017-B

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAH PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	REKORD DATA					ALIHAN/INDUKSI/REKORD DATA									
				REKORD DATA 2013	REKORD DATA 2012				REKORD DATA 2013	REKORD DATA 2012				REKORD DATA 2013	REKORD DATA 2012			
					2013	2012	2011	2010		2013	2012	2011	2010		2013	2012	2011	2010
1.		[5]	1. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik 2. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2003	Enhancement/Development/Service/Support/Improvement/Program/Information	2. Peningkatan kemampuan pelayanan publik yang dapat diakses secara elektronik	2. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2004	Enhancement/Development/Service/Support/Improvement/Program/Information	2. Peningkatan kemampuan pelayanan publik yang dapat diakses secara elektronik	2. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2005	Enhancement/Development/Service/Support/Improvement/Program/Information	2. Peningkatan kemampuan pelayanan publik yang dapat diakses secara elektronik	2. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2006	Enhancement/Development/Service/Support/Improvement/Program/Information	2. Peningkatan kemampuan pelayanan publik yang dapat diakses secara elektronik	2. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2007	Enhancement/Development/Service/Support/Improvement/Program/Information	2. Peningkatan kemampuan pelayanan publik yang dapat diakses secara elektronik	2. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2008	Enhancement/Development/Service/Support/Improvement/Program/Information	2. Peningkatan kemampuan pelayanan publik yang dapat diakses secara elektronik	2. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2009	Enhancement/Development/Service/Support/Improvement/Program/Information	2. Peningkatan kemampuan pelayanan publik yang dapat diakses secara elektronik	2. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2010	Enhancement/Development/Service/Support/Improvement/Program/Information	2. Peningkatan kemampuan pelayanan publik yang dapat diakses secara elektronik	2. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2011	Enhancement/Development/Service/Support/Improvement/Program/Information	2. Peningkatan kemampuan pelayanan publik yang dapat diakses secara elektronik	2. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2012	Enhancement/Development/Service/Support/Improvement/Program/Information	2. Peningkatan kemampuan pelayanan publik yang dapat diakses secara elektronik	2. Jumlah pengguna layanan publik yang menggunakan layanan publik secara elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAH PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	REKADSA 2013					ALIHANSI/REKADSA RUMAH						
				REKADSA 2013	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016			
1.	Program Pengembangan Prioritas Informatika	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	1.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 1.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014
2.	Program Pengembangan Prioritas Informatika	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014	2.1.1 Ketersediaan layanan publik 2012/2013 - 5000000000 2.1.2 Ketersediaan layanan publik 2013/2014

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAH PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/KEGAYATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	REKORDSAK RAKIL					ALIHAN/REKORDSAK RAKIL						
				REKORDSAK RAKIL					REKORDSAK RAKIL	REKORDSAK RAKIL					
				2013	2014	2015	2016	2017		2013	2014	2015	2016		
1.		ISI	<p>1. Jumlah pengguna layanan publik yang terlayani secara langsung dan tidak langsung di seluruh Indonesia, khususnya di 34 provinsi.</p> <p>2. Jumlah pengguna layanan publik yang terlayani secara langsung dan tidak langsung di seluruh Indonesia.</p> <p>3. Jumlah pengguna layanan publik yang terlayani secara langsung dan tidak langsung.</p>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2012	<p>1. Jumlah pengguna layanan publik yang terlayani secara langsung dan tidak langsung di seluruh Indonesia.</p> <p>2. Jumlah pengguna layanan publik yang terlayani secara langsung dan tidak langsung.</p>	ISI	<p>1. Jumlah pengguna layanan publik yang terlayani secara langsung dan tidak langsung di seluruh Indonesia.</p> <p>2. Jumlah pengguna layanan publik yang terlayani secara langsung dan tidak langsung.</p>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
3052	<p>1. Jumlah pengguna layanan publik yang terlayani secara langsung dan tidak langsung di seluruh Indonesia.</p> <p>2. Jumlah pengguna layanan publik yang terlayani secara langsung dan tidak langsung.</p>	ISI	<p>1. Jumlah pengguna layanan publik yang terlayani secara langsung dan tidak langsung di seluruh Indonesia.</p> <p>2. Jumlah pengguna layanan publik yang terlayani secara langsung dan tidak langsung.</p>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAH PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2013				ALIHAN BUDILAHIR/REKADSA					
				RENCANA 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.		ISI	1. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 2. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia	15	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person
202	Program Pengembangan Pemasaran Produk dan Jasa	1. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 2. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia	1. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 2. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia	15	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person
3	Program Pengembangan Produk dan Jasa	1. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 2. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia	1. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 2. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia	15	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person
301	Program Pengembangan Produk dan Jasa	1. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 2. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia	1. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 2. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia 3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang terdapat di seluruh Indonesia	15	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person	10 person

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAH PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/KEGATIAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	REKORDA				SUBIANSI (MILIAK EKIP/SAHIB)			
				REKORDA 2013	REKORDA 2014	REKORDA 2015	REKORDA 2016	REKORDA 2013	REKORDA 2014	REKORDA 2015	REKORDA 2016
1.	INDUKSI BUDUK	ISI		12	31	39	131	0	120	122	122
3013	PROGRAM PERSIAPAN PANGKALAN (P3) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi dan komunikasi	Memiliki 250.000 orang	Timbal Penger. Didat. 75.000 orang, Timbal. dan Kom. 175.000	300.000 orang	320.000 orang	360.000 orang	560.000 orang	509	977	999	979
3101	POLITIK DAN KUMUNIKASI										
3102	Program Penerimaan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Komunikasi dan Informatika	Selaras dengan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi komunikasi dan informatika						4,2	7,4	7,4	8,6
3103	Program Penerimaan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Komunikasi dan Informatika	Memiliki 250.000 orang						2,60	5,74	4,25	4,54
3104	Program Penerimaan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Komunikasi dan Informatika	Memiliki 250.000 orang						3,2	6,2	6,2	6,38
3105	Program Penerimaan dan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Komunikasi dan Informatika	Memiliki 250.000 orang						3,28	6,25	6,25	6,58

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAH PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA REALISASI					ALOKASI BUDGET KEMENTERIAN/LEMBAGA WAJIB						
				RENCANA 2013	2013	2014	2015	2016	RENCANA 2013	2014	2015	2016			
1.		ISI	Indikator yang berkaitan dengan pencapaian indikator disamping ini.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2
2016	Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	Realisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	Indikator yang berkaitan dengan pencapaian indikator disamping ini.	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2
2017	Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	Realisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Kementerian/ Lembaga	Indikator yang berkaitan dengan pencapaian indikator disamping ini.	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2

11/1/2012

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAH PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2013	KERUSAKAN RUMIL				REKADSA 2013	ALIHANSI/BIKUM/KEKIPRIAN/PERKURUKAN WAJIB		
					2013	2014	2015	2016		2014	2015	2016
1.		ISI	1. Jumlah pengguna layanan publik yang dapat diakses melalui layanan publik online. 2. Jumlah pengguna layanan publik yang dapat diakses melalui layanan publik mobile. 3. Jumlah pengguna layanan publik yang dapat diakses melalui layanan publik desktop.	1. 2. 3.	31	31	31	31	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
2.	1. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik online. 2. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik mobile. 3. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik desktop.	1. Jumlah pengguna layanan publik online. 2. Jumlah pengguna layanan publik mobile. 3. Jumlah pengguna layanan publik desktop.	1. Jumlah pengguna layanan publik online. 2. Jumlah pengguna layanan publik mobile. 3. Jumlah pengguna layanan publik desktop.	1. 2. 3.	31	31	31	31	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
3.	1. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik online. 2. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik mobile. 3. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik desktop.	1. Jumlah pengguna layanan publik online. 2. Jumlah pengguna layanan publik mobile. 3. Jumlah pengguna layanan publik desktop.	1. Jumlah pengguna layanan publik online. 2. Jumlah pengguna layanan publik mobile. 3. Jumlah pengguna layanan publik desktop.	1. 2. 3.	31	31	31	31	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
4.	1. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik online. 2. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik mobile. 3. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik desktop.	1. Jumlah pengguna layanan publik online. 2. Jumlah pengguna layanan publik mobile. 3. Jumlah pengguna layanan publik desktop.	1. Jumlah pengguna layanan publik online. 2. Jumlah pengguna layanan publik mobile. 3. Jumlah pengguna layanan publik desktop.	1. 2. 3.	31	31	31	31	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
5.	1. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik online. 2. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik mobile. 3. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik desktop.	1. Jumlah pengguna layanan publik online. 2. Jumlah pengguna layanan publik mobile. 3. Jumlah pengguna layanan publik desktop.	1. Jumlah pengguna layanan publik online. 2. Jumlah pengguna layanan publik mobile. 3. Jumlah pengguna layanan publik desktop.	1. 2. 3.	31	31	31	31	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
6.	1. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik online. 2. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik mobile. 3. Pengembangan dan pemeliharaan layanan publik desktop.	1. Jumlah pengguna layanan publik online. 2. Jumlah pengguna layanan publik mobile. 3. Jumlah pengguna layanan publik desktop.	1. Jumlah pengguna layanan publik online. 2. Jumlah pengguna layanan publik mobile. 3. Jumlah pengguna layanan publik desktop.	1. 2. 3.	31	31	31	31	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAH PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PROGRAM/KEGAYATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2013			RENCANA 2013			ALIHAN BUDGET KEMERDEHAAN PERKURHAN WAKIL		
				2013	2014	2015	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.	Program Pengembangan Sistem dan Aplikasi Perangkat Komunikasi dan Informatika	51	1. Pengembangan Sistem dan Aplikasi Perangkat Komunikasi dan Informatika	15	31	31	15	31	31	15	31	31
2.	Program Pengembangan Sistem dan Aplikasi Perangkat Komunikasi dan Informatika	51	2. Pengembangan Sistem dan Aplikasi Perangkat Komunikasi dan Informatika	15	31	31	15	31	31	15	31	31
3.	Program Pengembangan Sistem dan Aplikasi Perangkat Komunikasi dan Informatika	51	3. Pengembangan Sistem dan Aplikasi Perangkat Komunikasi dan Informatika	15	31	31	15	31	31	15	31	31
4.	Program Pengembangan Sistem dan Aplikasi Perangkat Komunikasi dan Informatika	51	4. Pengembangan Sistem dan Aplikasi Perangkat Komunikasi dan Informatika	15	31	31	15	31	31	15	31	31
				JUMLAH			JUMLAH			JUMLAH		
				15	31	31	15	31	31	15	31	31

MAJLIS 2.3 REALISASI LINDAK PEMISANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : REPUBLIK INDONESIA

KID	PROGRAM / KEGIATAN / PRESTASI	SARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI PADANG RAPAND			
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Program Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Pangan dan Obat-obatan	1. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu produk pangan dan obat-obatan di tingkat nasional dan internasional. 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu produk pangan dan obat-obatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu produk pangan dan obat-obatan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian mutu produk pangan dan obat-obatan di tingkat rumah tangga.	1. Jumlah sampel yang diperiksa 2. Jumlah produk pangan dan obat-obatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu 3. Jumlah produk pangan dan obat-obatan yang ditarik dari peredaran 4. Jumlah produk pangan dan obat-obatan yang ditarik dari peredaran 5. Jumlah produk pangan dan obat-obatan yang ditarik dari peredaran 6. Jumlah produk pangan dan obat-obatan yang ditarik dari peredaran 7. Jumlah produk pangan dan obat-obatan yang ditarik dari peredaran 8. Jumlah produk pangan dan obat-obatan yang ditarik dari peredaran 9. Jumlah produk pangan dan obat-obatan yang ditarik dari peredaran 10. Jumlah produk pangan dan obat-obatan yang ditarik dari peredaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1) dari 1000-1

MAJLIS 2.3 REALISASI LINDAK PEMISANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : REPUBLIK INDONESIA

KID	PROGRAM/KELOMPOK/PROJEK/TAHAP	SARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI PADANG RAPAH							
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kerja Sama Internasional (P2M2KSI) Ditjen Kerja Sama Internasional (Ditjen KSI) Ditjen Kerja Sama Internasional (Ditjen KSI)	1. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 2. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 3. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 4. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 5. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 6. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri	1. Jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 2. Jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 3. Jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 4. Jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 5. Jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 6. Jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
2	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kerja Sama Internasional (P2M2KSI) Ditjen Kerja Sama Internasional (Ditjen KSI) Ditjen Kerja Sama Internasional (Ditjen KSI)	1. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 2. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 3. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 4. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 5. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 6. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri	1. Jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 2. Jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 3. Jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 4. Jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 5. Jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 6. Jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
3	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kerja Sama Internasional (P2M2KSI) Ditjen Kerja Sama Internasional (Ditjen KSI) Ditjen Kerja Sama Internasional (Ditjen KSI)	1. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 2. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 3. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 4. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 5. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 6. Meningkatkan jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri	1. Jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 2. Jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 3. Jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 4. Jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri 5. Jumlah kunjungan dinas ke luar negeri 6. Jumlah kunjungan dinas ke dalam negeri	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%

10/10/2012

MAJLIS 2.3 REALISASI LINDAK PEMISANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

KID	PROGRAM / KEGIATAN / PERISTIWA	SARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI PADANG RUPAH			
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015
4	Program Kerja Tahun 2013 (KEMHUKUMHAN)	1. Meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 4. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional	1. Jumlah pelayanan publik yang diterima 2. Jumlah koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 4. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 5. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional	9185	9239	9239	9239	9239	9239	13
5	Program Kerja Tahun 2013 (KEMHUKUMHAN)	1. Meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 4. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional	1. Jumlah pelayanan publik yang diterima 2. Jumlah koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 4. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 5. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional	1465	1473	1473	1473	1473	1473	13
6	Program Kerja Tahun 2013 (KEMHUKUMHAN)	1. Meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 4. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional	1. Jumlah pelayanan publik yang diterima 2. Jumlah koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 4. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 5. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional	1	1	1	1	1	1	13
7	Program Kerja Tahun 2013 (KEMHUKUMHAN)	1. Meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 4. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional	1. Jumlah pelayanan publik yang diterima 2. Jumlah koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 4. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 5. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.2087
8	Program Kerja Tahun 2013 (KEMHUKUMHAN)	1. Meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 4. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional	1. Jumlah pelayanan publik yang diterima 2. Jumlah koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 4. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 5. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional	156	156	156	156	156	156	657
9	Program Kerja Tahun 2013 (KEMHUKUMHAN)	1. Meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 4. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional	1. Jumlah pelayanan publik yang diterima 2. Jumlah koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 4. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 5. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional	2385,000	2385,000	2385,000	2385,000	2385,000	2385,000	657
10	Program Kerja Tahun 2013 (KEMHUKUMHAN)	1. Meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 4. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional 5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional	1. Jumlah pelayanan publik yang diterima 2. Jumlah koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait 3. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 4. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional 5. Jumlah kerjasama dengan organisasi internasional	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3022

(Lanjutan)

MATRIKS 2.3 REALISASI LINDAK PEMISANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

KID	PROGRAM / KEGIATAN / PEMERIKSAAN	SARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI PADANG RAPAH		
				RENCANA 2013	2014	2015	2013	2014	2015
5	Program Reformasi Birokrasi (P3B) 2013	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan efisiensi anggaran 3. Meningkatkan integritas aparatur sipil negara	1. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat 2. Jumlah pengaduan yang ditanggapi 3. Jumlah pengaduan yang selesai	400	400	400	526,4	253,7	612,4
6	Program Reformasi Birokrasi (P3B) 2013	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan efisiensi anggaran 3. Meningkatkan integritas aparatur sipil negara	1. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat 2. Jumlah pengaduan yang ditanggapi 3. Jumlah pengaduan yang selesai	400	400	400	526,4	253,7	612,4
7	Program Reformasi Birokrasi (P3B) 2013	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan efisiensi anggaran 3. Meningkatkan integritas aparatur sipil negara	1. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat 2. Jumlah pengaduan yang ditanggapi 3. Jumlah pengaduan yang selesai	400	400	400	526,4	253,7	612,4
8	Program Reformasi Birokrasi (P3B) 2013	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan efisiensi anggaran 3. Meningkatkan integritas aparatur sipil negara	1. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat 2. Jumlah pengaduan yang ditanggapi 3. Jumlah pengaduan yang selesai	400	400	400	526,4	253,7	612,4
9	Program Reformasi Birokrasi (P3B) 2013	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan efisiensi anggaran 3. Meningkatkan integritas aparatur sipil negara	1. Jumlah keluhan dan pengaduan masyarakat 2. Jumlah pengaduan yang ditanggapi 3. Jumlah pengaduan yang selesai	400	400	400	526,4	253,7	612,4

(1) dari 4

MAJLIS 2.3 REALISASI LINDAK PEMISANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : REPUBLIK INDONESIA

KID	PROGRAM/KELOMPOK/PROJEK/REKAMIS	SARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI PADANG RAPAH										
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						
1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di daerah pedesaan dan pinggiran kota, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi akibat penyakit menular dan infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA).	1.1.1. Jumlah kasus ISPA yang dilaporkan di daerah pedesaan dan pinggiran kota, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi akibat penyakit menular dan infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	2.1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di daerah pedesaan dan pinggiran kota, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi akibat penyakit menular dan infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA).	2.1.1. Jumlah kasus ISPA yang dilaporkan di daerah pedesaan dan pinggiran kota, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi akibat penyakit menular dan infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat di daerah pedesaan dan pinggiran kota, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi akibat penyakit menular dan infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA).	3.1.1. Jumlah kasus ISPA yang dilaporkan di daerah pedesaan dan pinggiran kota, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat kesakitan dan kematian yang tinggi akibat penyakit menular dan infeksi saluran pernapasan bagian atas (ISPA).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1) (1) (1) (1)

MELAKUKAKAN TINDAK PEMISANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : REPUBLIK INDONESIA

KID	PROGRAM/KELOMPOK/PROJEK/IS	SARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI PADANG RUPAH						
				RENCANA 2013	2014	2015	RENCANA 2013	2014	2015				
			2. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan yang terdapat dalam rencana kerja										
1.	Perencanaan Lapangan Kerja	Meningkatkan kemampuan daya saing dan daya tahan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan	1. Jumlah peserta pelatihan dan pelatihan yang dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan	2.700	2.700	2.700	1.200	1.200	1.200				814
2.	Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatkan kualitas dan daya saing dan daya tahan tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi dan keterampilan	1. Jumlah peserta pelatihan dan pelatihan yang dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				1.000

11/10/2012

MAJLIS 2.3 REALISASI LINDAK PEMISANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : REPUBLIK RI

KID	PROGRAM / KEGIATAN / PRESTASI	SARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI PADANG RAPAH		
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	2013	2014
1	Program pengalihan anggaran ke daerah-daerah, provinsi dan kabupaten/kota, serta ke lembaga-lembaga yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		1. Persentase perolehan dana alokasi daerah (PAD) dari total PAD yang tersedia 2. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah 3. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah provinsi 4. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota 5. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah provinsi 6. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
2	Realisasi Pelaksanaan Tevarama	Memenuhi pelaksanaan Tevarama	1. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah 2. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah provinsi 3. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota 4. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah provinsi 5. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Realisasi Pelaksanaan Tevarama	Memenuhi pelaksanaan Tevarama	1. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah 2. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah provinsi 3. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota 4. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah provinsi 5. Jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(1) (1) (1)

MAJLIS 2.3 REALISASI LINDAK PEMISANGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : REPUBLIK RI

KID	PROGRAM / KEGIATAN / PRESTASI	SARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI PADANG RUPAH								
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
12	Program Pengembangan Kualitas Kelembagaan Pengadilan Negeri Banda Aceh	1. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai pengadilan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan 3. Meningkatkan sarana prasarana pengadilan	1. Jumlah pegawai pengadilan 2. Jumlah pengadilan 3. Fasilitas pengadilan 4. Jumlah sarana prasarana pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Program Pengembangan Kualitas Pengadilan	1. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai pengadilan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan 3. Meningkatkan sarana prasarana pengadilan	1. Jumlah pegawai pengadilan 2. Jumlah pengadilan 3. Fasilitas pengadilan 4. Jumlah sarana prasarana pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Program Pengembangan Kualitas Pengadilan	1. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai pengadilan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan 3. Meningkatkan sarana prasarana pengadilan	1. Jumlah pegawai pengadilan 2. Jumlah pengadilan 3. Fasilitas pengadilan 4. Jumlah sarana prasarana pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
TOTAL				300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%	300%

(1) (1) (1) (1)

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kategori	PROGRAM/KELUARAN	SAVIBARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DILYAK/UTAK)				
				PROSES/ASAS SAMIL					2013	2014	2015	2016	2017
				2012	2013	2014	2015	2016					
1.1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-Tugaskes (PDM) dan Pelaksanaan Tugas-Tugaskes (PDM)	Meningkatkan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan proyek yang dilaksanakan di seluruh provinsi dengan standar sistem manajemen yang...	1. Persentase uji kerjasaat yang tercapai secara nasional	161	177	181	191	192,2	199,3	199,3	199,3	199,3	199,3
1.1	Koordinasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan proyek yang dilaksanakan di seluruh provinsi dengan standar sistem manajemen yang...	2. Persentase uji kerjasaat yang tercapai secara nasional	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1.1	Koordinasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan proyek yang dilaksanakan di seluruh provinsi dengan standar sistem manajemen yang...	3. Jumlah informasi yang disampaikan dan maklumat yang dipublikasikan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.1	Koordinasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan proyek yang dilaksanakan di seluruh provinsi dengan standar sistem manajemen yang...	4. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1	Koordinasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan proyek yang dilaksanakan di seluruh provinsi dengan standar sistem manajemen yang...	5. Jumlah tembusan yang diterbitkan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1.1	Koordinasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan proyek yang dilaksanakan di seluruh provinsi dengan standar sistem manajemen yang...	6. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

P. M. 063

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO	PROGRAM/KELUARAN	SAVIRAN	INDIKATOR	REVISI 2013	TARGET				ALOKASI (DILYAK/UTUK)			
					2013	2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017
1.2	Peningkatan pengawasan DLUK dan Kerjasama Luar Negara	Kontribusi keaktifan Subjagar dan serasi intelektual DLUK pada tingkat Nasional, regional, internasional dan internasional	1 Jumlah Partisipasi Kery 20M dalam Inisiatif dan serasi intelektual, regional, internasional dan internasional (forum)	42	45	48	50	65	50	57	55	
			2 Jumlah keaktifan pada "Gathering" DLUK Kery dengan perinsip "go global, go home, get better" (global gathering)	7	7	9	9					
1.3	Perbaikan Partisipasi Kery dan Penguatan Organisasi Penyelidikan, Penelitian dan Pengembangan Produk	Kontribusi keaktifan, peningkatan Kery dan penguatan organisasi penyelidikan, penelitian dan pengembangan produk	1 Jumlah keaktifan dalam "Gathering" Kery dan serasi intelektual, regional, internasional dan internasional (forum)	15	15	15	15	67,0	81	80	88,7	
			2 Jumlah keaktifan dalam "Gathering" Kery dan serasi intelektual, regional, internasional dan internasional (forum)	17	17	17	17					

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kategori	PROGRAM/KELUARAN	SAKUPAN	INDIKATOR	REVISI 2013	TARGET				ALOKASI (DILYAKIN/UTAK)				
					PROSESAS SIML								
					2012	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016	
1.	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	Perolehan tenaga dan pengembangan tenaga, serta peningkatan kompetensi dan keahlian	1. Jumlah pegawai dari KEMKOP yang ditugaskan untuk membantu tim yang terdiri dari tim ahli BSM (perwakilan)	5	5	5	5						
1.	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	Perolehan tenaga dan pengembangan tenaga, serta peningkatan kompetensi dan keahlian	1. Jumlah pegawai dari KEMKOP yang ditugaskan untuk membantu tim ahli BSM (perwakilan) 2. Jumlah pegawai dari KEMKOP yang ditugaskan untuk membantu tim ahli BSM (perwakilan)	50	50	50	50			500	500	500	500
			3. Jumlah pegawai dari KEMKOP yang ditugaskan untuk membantu tim ahli BSM (perwakilan)	30	30	30	30						

PLM 063.3

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

KLU	PROGRAM/KELUARAN	SAWARAN	INDIKATOR	RENYARAN 2013	TARGET					ALOKASI (DILYAKUTUKAN)			
					PROSESAS SIML					RENYARAN 2013	RENYARAN 2014	RENYARAN 2015	RENYARAN 2016
					2013	2013	2013	2014	2015				
1.5	Pemawasan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Perolehan layanan pengawasan farmasi dan kosmetik melalui POM yang terakreditasi internasional	<ol style="list-style-type: none"> Pemawasan pengawasan POM yang dilaksanakan secara sistematis (dibantu dengan sistem pengawasan POM) Pemawasan layanan farmasi yang terakreditasi internasional Pemawasan layanan farmasi yang terakreditasi internasional Terdapat layanan farmasi yang terakreditasi internasional 	85	90	90	90	90	90	5,6	6,3	6,7	7,1
1.8	Pelaksanaan Timas (Timas) dan Timas	Realisasi pelaksanaan Timas dan Timas	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat pelaksanaan Timas dan Timas Terdapat pelaksanaan Timas dan Timas Terdapat pelaksanaan Timas dan Timas 	47	55	57	100	100	100	17,4	19,0	20,7	22,1

PLM 0634

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

NU	PROGRAM/KELUARAN	SAWARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (DILYAK/UTAK)				
				PROSESAS SIML				REKAMAN 2013	REKAMAN 2013	2014	2015	2016
				2013	2013	2013	2013					
2	Program Perbaikan Sarana dan Fasilitas Aparatur PPOM	Memorandum berisikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tahun 2013 dan 2014	<p>1. Tersesainya daftar kebutuhan dan kebutuhan yang akan direalisasikan</p> <p>2. Tersesainya anggaran belanja dan mekanisme pelaksanaan</p>	95	95	95	95	95	95	95	95	
2.1	Unit dan sarana dan prasarana aparatur PPOM	Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur PPOM	<p>1. Tersesainya daftar kebutuhan dan prasarana aparatur PPOM yang akan direalisasikan</p> <p>2. Tersesainya anggaran belanja dan mekanisme pelaksanaan</p>	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.2	Pengadaan Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Aparatur PPOM	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur PPOM	<p>1. Tersesainya daftar kebutuhan dan prasarana aparatur PPOM yang akan direalisasikan</p> <p>2. Tersesainya anggaran belanja dan mekanisme pelaksanaan</p>	95	95	95	95	95	95	95	95	

PLM 063.5

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO	PROGRAM/KELUARAN	SAVIBARAN	INDIKATOR	REVISI 2013	TARGET				ALOKASI (DILYAK/UTAK)				
					PROSESAS SIML				REKAMAN 2013	2014	2015	2016	
					2013	2013	2014	2015					
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meminimalisir efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat	1. Presorai Obat yang momentan mendarat (karena manfaat dan fungsi) 2. Presorai makanan yang momentan mendarat	25	50	75	100						
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Meminimalisir efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat	1. Presorai Obat yang momentan mendarat (karena manfaat dan fungsi) 2. Presorai makanan yang momentan mendarat	99,33	99,67	99,68	99,69	99,69	99,69	99,69	99,69	99,69	99,69
2.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Badan Pengawas Obat dan Makanan	Meminimalisir efektivitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka melindungi masyarakat	1. Jumlah parameter uji Obat di 50 kota untuk setiap provinsi (di yang dari angka 50.000 Sampel) 2. Jumlah literatur ilmiah yang diterbitkan oleh dan makanan	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12
			1. Jumlah literatur ilmiah yang diterbitkan oleh dan makanan 2. Jumlah literatur ilmiah yang diterbitkan oleh dan makanan	140	67	141	67	67	67	67	67	67	67
			1. Jumlah literatur ilmiah yang diterbitkan oleh dan makanan 2. Jumlah literatur ilmiah yang diterbitkan oleh dan makanan	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14
			1. Jumlah literatur ilmiah yang diterbitkan oleh dan makanan 2. Jumlah literatur ilmiah yang diterbitkan oleh dan makanan	210	203	210	203	210	210	210	210	210	210

PLM 003.4

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO	PROGRAM/KELUARA	SAVIRAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DILYAK/UTAK)					
				REVISI 2013	PROYEKSI 2013				2014	2015	2016	2017		
					2013	2013	2013	2013						
			3. Jumlah laporan insidensi obat pengacuan	425	440	459	478							
			4. Persentase cakupan pengawasan secara regulasi CPO dan Makanan (ditinjau dari 6.300 obat)	57	52	58	63							
			7. Desainase seluruh pengawas secara di rumah CPO dan Makanan (persentase) (dari anggaran 43.500 orang)	19	22	40	50							
			8. Jumlah Bk, Baw, Bk, dan Bk yang diterbitkan secara daring, yang ditinjau sebagai indikator keefektifan dan efisiensi pengawasan obat dan makanan di daerah (saw (saw))	2	21	37	51							
34	Inspeksi dan sertifikasi obat Tradisional, Eksotik dan Produk Kompleksi	Manajemen manajemen, untuk sertifikasi obat tradisional dan produk kompleks (KEMENKUMHAMA dan GIZI)	1. Persentase laporan insidensi obat tradisional dan produk kompleks (KEMENKUMHAMA dan GIZI)	25	30	35	40							

P.11.063.7

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

MUI	PROGRAM/KELUARAN	SAYORAN	INDIKATOR	REVISI 2013	TARGET				ALOKASI (DILYAK/UTAK)				
					PROSESAS SIML				2013	2014	2015	2016	
					2012	2013	2014	2015					
			4. Terwujudnya indikator GMP Tradisional (GT) yang memiliki sertifikasi GMP, dihitung dari 77)	66	54	67	73						
			8. Terwujudnya sarana dan fasilitas produksi yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (jumlah sarana yang dipertajam)	77	74	80	84						
			4. Terwujudnya sarana dan fasilitas produksi yang memenuhi ketentuan (jumlah sarana yang dipertajam)	77	74	80	84						
			5. Tersedianya sistem manajemen mutu (SMP) dan GMP di dalam rangka pencapaian tujuan PVM sub-kegiatan (Pabel)	-	1	-	1						
			5. Jumlah klinik kesehatan, sarana dan fasilitas kesehatan yang terakreditasi oleh badan penyelenggara akreditasi dan badan pembina/pengawas (pabel)	5	4	7	7						

PLM 0638

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

KLU	PROGRAM/KELOMPOK	SAKSIAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DILYAK/UTAK)									
				REVISI 2013	PROSESAS SIML				REVISI 2013	2014	2015	2016						
					2013	2013	2014	2015										
			7. Jumlah kasus komersial yang memenuhi ketentuan CCO (sektor/produk)	7	5	5	5	5										
			8. Jumlah MCO/DAI Terdapat 12 MCO/DAI yang telah selesai proses pendaftaran dan laporan (pencapaian)	8	7	7	7	7										
K3	Respon dan Sarif/da/Plague	Peningkatan: maintenance fund (sal. dan BSL dan. P. reg.)	1. Peningkatan sarana produksi (kelembagaan) dan sarana (SDP) dan (C) untuk standar GMP (sektor/produk) 300 unit (dari 1.000 sarana produksi)	01	55	50	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			2. Peningkatan sarana penunjang (kelembagaan) dan sarana (SDP) dan (C) untuk standar GMP (sektor/produk) 5.000 (dari 5.000 sarana produksi)	50	55	60	65											
			9. Peningkatan partisipasi dalam forum pengajaran (kelembagaan) dan sarana (SDP) dan (C) untuk standar GMP (sektor/produk) 1.000 (dari 1.000 sarana produksi)	85	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
			10. Jumlah sarana produksi (kelembagaan) dan sarana (SDP) dan (C) untuk standar GMP (sektor/produk) 1.000 (dari 1.000 sarana produksi)	075	1268	1680	1680	2063										

PLM 063 0

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO	PROGRAM/KELUARAN	SAWARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DILYAK/UTAK)				
				REVISI 2013	PROSESAS SIML				2013	2014	2015	2016	
					2013	2013	2014	2015					
3.4	Pengembangan Obat dan Makanan	Kontribusi pengawas obat dan makanan	1. Persentase sarana farmasi yang mendapat lisensi (diikuti persentase COO sarana pengedaran) (persentase)	20	50	20	50	50	50	50	50	50	50
3.5	Pengawasan Distribusi Produk Farmasi dan Pembuatan Kaselaman Karah Garga (PKRT)	Peningkatan mutu sarana distribusi produk farmasi PKRT serta dengan COO distribusi garga (KAG)	1. Persentase jumlah sarana distribusi farmasi (PSP, pengedaran) (jumlah dan persentase)	15	60	50	60	60	60	60	60	60	60
			2. Persentase jumlah farmasi distribusi (PSP, pengedaran) (jumlah dan persentase)	25	75	45	75	75	75	75	75	75	75
			3. Persentase jumlah obat ilegal masuk obat palsu (jumlah dan persentase)	30	60	30	60	60	60	60	60	60	60

IT.11.002-0

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

NU	PROGRAM/KELUARAN	SANGKAPAN	INDIKATOR	REVISI 2013	TARGET				ALOKASI (DILYAK UTUK)				
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			4. Meningkatkan kualitas layanan informasi kesehatan masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. 5. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 6. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 7. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 8. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 9. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 10. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 11. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 12. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 13. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 14. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 15. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 16. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 17. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 18. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 19. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet. 20. Meningkatkan jumlah informasi kesehatan masyarakat yang diterima masyarakat melalui media massa, elektronik, dan internet.	10	30	25	30	30					
			1. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 2. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 3. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 4. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 5. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 6. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 7. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 8. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 9. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 10. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 11. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 12. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 13. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 14. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 15. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 16. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 17. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 18. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 19. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat. 20. Jumlah literasi masyarakat yang dapat membaca dan memahami informasi kesehatan masyarakat.	3	3	3	3	3					

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

MID	PROGRAM/KELUARA	SAWARAN	INDIKATOR	REVISI RENCANA 2013	TARGET				ALOKASI (DILYAK/UTUAK)				
					PROSEKAS, SIML				2014	2015	2016	2017	
					2013	2014	2015	2016					
3.6	Pengawasan Sirkulasi Produk Obat, Cosmeceutikal dan Obat Aditif	Konsumsi pangan memiliki karakteristik fisikokimia, keamanan dan mutu legal yang memuaskan ke seluruh kalangan masyarakat. Tidak ada pelanggaran keamanan pangan, kosmetik, dan obat aditif yang menimbulkan masalah di masyarakat. Interview yang dilaksanakan	1. Terdapatnya sarana pengontrolan produk, pelaksanaan dan pelaksanaan pemantauan serta pemantauan informasi (dibidang car, food, safety, hygiene)	35	40	42,5	45	50	55	60	65	70	75
			2. Tidak terdapat pelanggaran yang mengakibatkan terdapatnya masalah kesehatan masyarakat (misalnya, keracunan, penyakit infeksi, alergi, gangguan kesehatan lainnya, dll.)	3	3	3	3	3					
3.7	Pengawasan Produk dan Jasa Kesehatan	Pemerintah melakukan tugas mengandung nilai kesehatan	1. Terdapatnya sarana distribusi yang menyelenggarakan distribusi produk pangan (bahan aditif, kosmetik, obat) yang sesuai dengan ketentuan kesehatan (misalnya, GMP, HACCP, dan lainnya)	30	30	30	30	30					
			2. Terdapatnya layanan yang terjangkau, terjangkau, terjangkau, dan terjangkau	10	12	14	16	18					

11.11.2012

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO	PROGRAM/KELUARAN	SAVORAN	INDIKATOR	REVISI 2013	TARGET				ALOKASI (DILYAKINUTAN)				
					PROSESAS SIML				2013	2014	2015	2016	
					2012	2013	2014	2015					
			1. Jumlah pembina farmasi yang melakukan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan pada 2013 (proses)	15	18	18	15						
			4. Jumlah pasar yang diterveni secara langsung oleh satuan kerjanya (unit x th) (capaian target)	62	81	65	435						
23	Pengawasan Produk Obat Farmasi dan Produk Kesehatan Lainnya (PRAK)	Peningkatan jumlah, kualitas, dan aksesibilitas produk farmasi, kosmetik, dan kesehatan lainnya yang beredar di pasaran (PRAK) melalui kegiatan pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi	1. Meningkatkan jumlah pembina farmasi yang melakukan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan pada 2013 (proses)	30	35	35	305	100	305	305	305		305
			2. Meningkatkan jumlah pembina farmasi yang melakukan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan pada 2013 (proses)	50	75	100	100						

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013
Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

KLU	PROGRAM/KELUARAN	SARAN	INDIKATOR	REVISI 2013	TARGET					ALOKASI (DILYAKUTKAN)									
					PROSESAS SIML					2013	2014	2015	2016	2017					
					2013	2013	2013	2013	2013										
3.0	Tenaga Ahli	Meningkatkan jumlah Produk Bekerjasama (KIR) Beras dan Edukasi	1. Jumlah penyetoran dan terdapatnya KIR Beras di seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan kota/kabupaten yang menerapkan peraturan tentang distribusi pangan pokok (beras) (bekerja)	4	8	12	15												
3.0	Tenaga Ahli	Meningkatkan jumlah Produk Bekerjasama (KIR) Beras dan Edukasi	1. Desentralisasi dan peningkatan jumlah terdapatnya KIR Beras di seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan kota/kabupaten (dari 10.000 ke 20.000)	50	71	92	113												
3.0	Tenaga Ahli	Meningkatkan jumlah Produk Bekerjasama (KIR) Beras dan Edukasi	2. Peningkatan terdapatnya KIR Beras di seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan kota/kabupaten (dari 10.000 ke 20.000)	50	71	92	113												
3.0	Peningkatan Produk Bekerjasama	Perdagangan dan distribusi Produk Bekerjasama (KIR) Beras dan Edukasi	1. Peningkatan terdapatnya KIR Beras di seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan kota/kabupaten (dari 10.000 ke 20.000)	50	71	92	113												

IT.11.102.14

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO	PROGRAM/KELUARAN	SAWARAN	INDIKATOR	RENYARAN 2013	TARGET				ALOKASI (DILYAK/UTUK)				
					PROSESAS SIML				2014	2015	2016	2010	
					2013	2013	2013	2010					
87.1	Peningkatan Kualitas Kompetensi	Meningkatkan jumlah produk obat tradisional, kosmetik dan produk suplemen yang memiliki Nomor Per-Obat	1. Meningkatkan efektivitas proses pendaftaran obat-obat 2. Meningkatkan jumlah produk obat tradisional, kosmetik dan produk suplemen yang memiliki nomor per-Obat 3. Meningkatkan jumlah obat tradisional yang memiliki nomor per-Obat 4. Meningkatkan jumlah kosmetik yang memiliki nomor per-Obat 5. Meningkatkan jumlah produk suplemen yang memiliki nomor per-Obat 6. Meningkatkan jumlah produk obat tradisional yang memiliki nomor per-Obat	15	37	32	32	32	32	32	32	32	32

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

M U	PROGRAM/KELUARA	SAWARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DILYAKUTUAKU)			
				PROSEKUSI SIML					2014	2015	2016	2017
				2013	2013	2013	2013	2013				
S.2	Strategi, Kebijakan, Komando dan Perencanaan	1. Perencanaan regulasi, kebijakan dan standar Obat, Tradisional, Kosmetik dan Produk Kesehatan yang tepat dan akurat yang mampu melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan	1. Jumlah regulasi, kebijakan, standar obat, tradisional, kosmetik dan produk kesehatan	18	19	18	13,2	0,0	4,2	0,7		
S.3	Strategi, Kebijakan, Komando dan Perencanaan	2. Tindakan regulasi, kebijakan, standar, komando, dan perintah	2. Jumlah regulasi, kebijakan, standar, komando, dan perintah yang diterbitkan	30	30	30						
S.4	Strategi, Kebijakan, Komando dan Perencanaan	3. Tindakan regulasi, kebijakan, standar, komando, dan perintah yang diterbitkan	3. Jumlah regulasi, kebijakan, standar, komando, dan perintah yang diterbitkan	2	2	2						
S.5	Strategi, Kebijakan, Komando dan Perencanaan	4. Tindakan regulasi, kebijakan, standar, komando, dan perintah yang diterbitkan	4. Jumlah regulasi, kebijakan, standar, komando, dan perintah yang diterbitkan	10	10	10	10,1	0,2	2,7	1,1		
S.6	Strategi, Kebijakan, Komando dan Perencanaan	5. Tindakan regulasi, kebijakan, standar, komando, dan perintah yang diterbitkan	5. Jumlah regulasi, kebijakan, standar, komando, dan perintah yang diterbitkan	4	4	4						
S.7	Strategi, Kebijakan, Komando dan Perencanaan	6. Tindakan regulasi, kebijakan, standar, komando, dan perintah yang diterbitkan	6. Jumlah regulasi, kebijakan, standar, komando, dan perintah yang diterbitkan	50	50	50	70					

IT.11.002-3

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

KLU	PROGRAM/KELUARAN	SAVIRAN	INDIKATOR	REVISI 2013	TARGET				ALOKASI (DILYAK/UTUAK)			
					2012	2013	2014	2015	2014	2015	2016	2017
2.4	Sanksi Sosial (Tindakan) Terhadap Pelaku CBT dan CBT	Perencanaan, pengantar dan kritikal, audit, evaluasi dan RPT, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi, dan lain-lain	1. Persentase kepatuhan pelaku usaha yang memiliki dokumen izin di kalangan pelaku usaha (44.000 unit)	80	94	94	94	94	16,3	20,9	4,5	5,1
				2	2	2	2					
2.5	Surveilans dan Penyelidikan Kejadian Kejadian	Kampanye, sosialisasi, edukasi, pelatihan, informasi, penelitian, dan lain-lain	1. Persentase tanggapan masyarakat (RPT) yang aktif melaporkan kejadian CBT (5000 kasus)	5	10	15	20	25	100	100	100	140
				2	2	2	2					

Matriks 2.3 Rencana Tindak Pembangunan Kementerian/Lembaga Tahun 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				Alokasi (Dilyakur/TAU)					
				2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015		
3.5	Penerbitan surat izin edar obat baru dan penerbitan izin edar obat impor.	Meningkatkan kemampuan pelayanan publik dan kinerja BPOM dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.	1. Jumlah profil realitas kesehatan yang di akses oleh masyarakat web dan mobile 2. Jumlah surat izin edar obat baru 3. Jumlah izin edar obat impor	2	2	2	2						
			1. Jumlah surat izin edar obat baru 2. Jumlah izin edar obat impor	2	2	2	2						
		Meningkatkan kemampuan pelayanan publik dan kinerja BPOM dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.	1. Jumlah surat izin edar obat baru 2. Jumlah izin edar obat impor	100	100	100	100			50,0	50,0	50,0	50,0
			3. Penetapan sample uji pada tindak lanjut pengawasan di lapangan	90	95	100							
			4. Jumlah hasil pemeriksaan di lapangan	50	50	50							
			5. Jumlah hasil pemeriksaan di laboratorium	60	60	60							

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

KLU	PROGRAM/KELUARAN	SAVANGAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DILYAKKANTUKAN)						
				REVISI 2013	PROYEKSI 2013				REVISI 2013	2013	2014	2015	2016		
					2013	2013	2013	2013							
3.2.7	Memastikan ketersediaan obat sediaan injeksi Pemeriksaan Obat Other dan Makanan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas PMO dan meningkatkan kinerja PMO dan penyediaan berbagai pelayanan di tingkat obse dan makanan	1. Tersampainya 100% pelayanan pemeriksaan obat sediaan injeksi 2. Peningkatan jumlah pemeriksaan obat sediaan injeksi 3. Peningkatan jumlah pemeriksaan obat sediaan injeksi 4. Peningkatan jumlah pemeriksaan obat sediaan injeksi 5. Peningkatan jumlah pemeriksaan obat sediaan injeksi 6. Peningkatan jumlah pemeriksaan obat sediaan injeksi 7. Peningkatan jumlah pemeriksaan obat sediaan injeksi 8. Peningkatan jumlah pemeriksaan obat sediaan injeksi 9. Peningkatan jumlah pemeriksaan obat sediaan injeksi 10. Peningkatan jumlah pemeriksaan obat sediaan injeksi	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
				90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan

KLU	PROGRAM/KELUARAN	SAYARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DILYAK/UTAK)						
				REVISI 2013	2013	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2016		
2.3	REVISI KAWASAN, SISTEM, DAN FLUKU DULU DAN Makanan	Ministris beres hasil dari tim kerja untuk melakukan penelitian obat dan makanan	1 Jumlah metode statistik yang dilakukan 2 Jumlah hasil penelitian yang diterbitkan	45	30	28	31	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL													1170	1350	1140

IT.11.005.24

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

NO	PROGRAM/ KEUJARAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA		TARGET PULSAAN MAJU			ALOKASI (MILIAH RUPIAH)		
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1.	Program Dukung Mandiri dan Keluasan Tugas Pokok Fungsi Lembagaan	Meningkatkan efisiensi dan kelengkapan data/pic pelaksanaan tugas dan operasional lembaga	a. Peningkatan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan	75%	76%	77%	78%	1.554	3.114	2.817	2.565
			b. Peningkatan laporan aset kegiatan yang dilakukan	100%	102%	104%	106%				
			c. Tingkat ketepatan rata-rata penyelesaian urusan tata usaha lulus (online/offline), bimbingan, koordinasi dan bimbingan	80%	82%	84%	86%				
			d. Jumlah surat perintah liberalisasi perdagangan perdagangan internasional	100%	102%	104%	106%				
			e. Rasio jumlah surat perintah liberalisasi perdagangan internasional yang diterbitkan jumlah perawat	100%	102%	104%	106%				
			f. Rasio jumlah surat perintah liberalisasi perdagangan internasional yang diterbitkan jumlah perawat	100%	102%	104%	106%				
2.	Program Penguatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Lembagaan	Meningkatkan akuntabilitas organisasi Pusat Pembinaan dan Pendidikan	Percepatan jumlah kegiatan komunikasi yang dilakukan	50%	51%	52%	53%	5.6	1.9	2.2	2.7

11.10.054-1

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

NO	PROGRAM/ KELOMPOK PRODUKSI	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA			TARGET			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)		
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
3	Program Persiapan dan Kelembagaan Nasional	Meningkatnya kualitas pelayanan pemantauan pemeriksaan tingkat nasional serta efektif dan efisien serta optimal yang dapat diandalkan (terukur)	a. Indeks Pemantauan dan Pemeriksaan Sampel Angkutan [IPSA] Perbaikan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
			b. Indeks Keberhasilan Pemeriksaan Logistik Angkutan [PKA] Perbaikan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
			c. Indeks Pemantauan dan Pemeriksaan [IPSA, PKA] Perbaikan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
			d. Indeks Pemantauan dan Pemeriksaan [IPSA, PKA] Perbaikan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
			e. Indeks Pemantauan dan Pemeriksaan [IPSA, PKA] Perbaikan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
4	Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengajian Strategis di Bidang Politik	Meningkatnya kualitas penyusunan rencana pengajian strategis di bidang politik	a. Jumlah dan jenis dokumen penelitian dan pengajian strategis di bidang politik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Jumlah dan jenis dokumen penelitian dan pengajian strategis di bidang ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11.14.054-2

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

NO	PROGRAM/ KELOMPOK PRODUKSI	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA				TARGET				ALOKASI (MILYAR RUPIAH)							
				2013		2014		2015		2016		2013		2014		2015		2016	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
c	Penerapan Instruksi dan Pelaksanaan Penetapan Nilai-nilai Kelangkaan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan secara komprehensif, pengembangannya konsep, dan penyediaan atau ketersediaan data yang akurat, serta manfaatnya	Jumlah peserta, penyelesaian awal dan penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
d	Pengaturan Penerbitan dan Pelaksanaan Peredaran Uang, Kertas, dan Logam Mulia	Meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan secara komprehensif, pengembangannya konsep, dan penyediaan atau ketersediaan data yang akurat, serta manfaatnya	Jumlah peserta, penyelesaian awal dan penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
e	Pengaturan Penerbitan dan Pelaksanaan Peredaran Uang, Kertas, dan Logam Mulia	Meningkatnya kualitas perencanaan kebijakan secara komprehensif, pengembangannya konsep, dan penyediaan atau ketersediaan data yang akurat, serta manfaatnya	Jumlah peserta, penyelesaian awal dan penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN KOORDINASI FINANSIAMAN MODAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ PRIORITAS	SUBSABAN	INDIKATOR	TARGET					
				RENCANA 2013		RENCANA 2014		RENCANA 2015	
1	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran belanja negara	1. Jumlah Laporan Keuangan Negara yang diperiksa	2013	2014	2015	2013	2014	2015
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran belanja negara	2. Jumlah Laporan Keuangan Negara yang diperiksa	2013	2014	2015	2013	2014	2015
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran belanja negara	3. Jumlah Laporan Keuangan Negara yang diperiksa	2013	2014	2015	2013	2014	2015
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran belanja negara	4. Jumlah Laporan Keuangan Negara yang diperiksa	2013	2014	2015	2013	2014	2015
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

11111111

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011

KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN KOORDINASI FINANSIAL MODAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PROJEK	SASARAN	INDIKATOR	TARGET								
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	2017	2018			
			1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			2. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			3. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			4. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			5. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			6. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			7. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			8. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			9. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			10. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			11. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			12. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			13. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			14. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			15. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			16. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			17. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			18. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			19. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									
			20. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian bagi pengusaha MSME, khususnya di sektor perikanan									

11/20/2013

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011

KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN KOORDINASI FINANSIAL MODAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PROJEK	SASARAN	FUNGSI/TOR	TARGET					REVISI 2011	REVISI 2012	REVISI 2013	REVISI 2014	REVISI 2015	REVISI 2016
				2011	2012	2013	2014	2015						
7	1. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	Pendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	1. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.
8	2. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	Pendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	2. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.
9	3. Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	Pendukung pelaksanaan kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.	3. Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dan masyarakat.

11/05/2011

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET								
				RENCANA 2013		PEKERJAAN		RENCANA 2013				
				2013	2014	2013	2014	2013	2014			
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Anggaran	Kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran	1. Jumlah pelayanan publik yang diterima masyarakat	2. Jumlah anggaran yang efisien	3. Jumlah anggaran yang efisien	4. Jumlah anggaran yang efisien	5. Jumlah anggaran yang efisien	6. Jumlah anggaran yang efisien	7. Jumlah anggaran yang efisien	8. Jumlah anggaran yang efisien	9. Jumlah anggaran yang efisien	10. Jumlah anggaran yang efisien
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Anggaran	Kualitas pelayanan publik dan efisiensi anggaran	1. Jumlah pelayanan publik yang diterima masyarakat	2. Jumlah anggaran yang efisien	3. Jumlah anggaran yang efisien	4. Jumlah anggaran yang efisien	5. Jumlah anggaran yang efisien	6. Jumlah anggaran yang efisien	7. Jumlah anggaran yang efisien	8. Jumlah anggaran yang efisien	9. Jumlah anggaran yang efisien	10. Jumlah anggaran yang efisien

11/05/2011

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011

KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN KOORDINASI FINANSIAL MODAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PROJEK	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			RENCANA 2011		RENCANA 2012	
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	
2	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan
3	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan
4	Program Pengembangan Sistem Informasi Keuangan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan	1. Jumlah pengguna sistem informasi keuangan 2. Jumlah transaksi keuangan 3. Jumlah laporan keuangan 4. Jumlah aset keuangan

11/2011-6

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011

KEMENTERIAN/LEMBAGA BADAN KOORDINASI FINANSIEMAN MODAL

NO	PROGRAM / KEGIATAN / PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					
				RENCANA 2003		PREKUALIFIKASI		RENCANA 2013	
				2013	2017	2014	2015	2014	2015
1	Keluhan Masyarakat Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor		1. Jumlah keluhan masyarakat Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor						
2	Keluhan Masyarakat Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor		2. Jumlah keluhan masyarakat Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor						
3	Keluhan Masyarakat Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor		3. Jumlah keluhan masyarakat Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor						
4	Keluhan Masyarakat Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor		4. Jumlah keluhan masyarakat Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor						
5	Keluhan Masyarakat Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor		5. Jumlah keluhan masyarakat Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor						

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA			TARGET			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
				2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2013	2014	2015
1.	Pengembangan Manajemen dan Pelaksanaan Operasi Lapangan BNN	Meningkatnya kinerja aparat penegak dan kesatuan BNN	<p>Uphold Operation Accountability Improve dan Penanganan Tindak</p> <p>Perilaku, Laporan, Akutabilitas Kinerja, Insidensi, Keberhasilan Tindak, RPK</p>	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
2.	Pengembangan Hubungan dan Perencanaan Pengalihan dan Penanganan Salah Selingan (P4S)	Meningkatnya sikap positif, kerjasama, dan tanggung jawab yang alihannya dan pencegahan gelap angketa	<p>Perilaku, Laporan, Akutabilitas Kinerja, Insidensi, Keberhasilan Tindak, RPK</p>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1.045,8	1.045,8	1.045,8	1.045,8	1.045,8	1.045,8	1.045,8	1.045,8	1.045,8	1.045,8

11.11.000.1

Matriks 2.3 Rencana Tindak Pembangunank Kementerian/Lembaga Tahun 2013

No	Program/ Kegiatan/Prioritas	Sasaran	Indikator	Rencana 2013		Target			Alokasi (Miliar Rupiah)		
				Pilkabupaten Maju		Pilkabupaten Maju		Rencana 2013		Pilkabupaten Maju	
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015
a.	Penyediaan Informasi Kesehatan	Terwujudnya media informasi kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat	Bahasa sebagai media informasi kesehatan elektronik	142	109	133	109	72,0	21,1	24,6	21,3
b.	Penyediaan Informasi Kesehatan	Terwujudnya informasi kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat	Bahasa sebagai media informasi kesehatan elektronik	5	7	7	7	3,0	0,2	0,4	0,4
c.	Penyediaan Informasi Kesehatan	Terwujudnya informasi kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat	Bahasa sebagai media informasi kesehatan elektronik	4	5	5	5				
d.	Penyediaan Informasi Kesehatan	Terwujudnya informasi kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat	Bahasa sebagai media informasi kesehatan elektronik	30	37	37	37	17,0	17,3	15,7	16,1
e.	Penyediaan Informasi Kesehatan	Terwujudnya informasi kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat	Bahasa sebagai media informasi kesehatan elektronik	54	75	57	57	9,5	9,7	9,9	9,9

11.11.000.2

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/LEMBAGA	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
				RENCANA 2013	PILKRIKSIAN MAJU			RENCANA 2013	PILKRIKSIAN MAJU		RENCANA 2013	PILKRIKSIAN MAJU	
					2014	2015	2016		2014	2015		2016	2014
6.	Keperawatan Lembaga Rehabilitasi Nasional (KORNETA)	Persepsi pengguna pelayanan program terapi dan rehabilitasi pergo abunuran dan atau penerapan teknologi medis berbasis-terintegrasi sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah.	Jumlah tim kerja rehabilitasi pergo abunuran dan atau penerapan teknologi medis berbasis-terintegrasi sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah.	700	745	745	745	940	940	940	1981	1981	1981
7.	Keperawatan Lembaga Rehabilitasi dan Rawat Jalan (KORNETA)	Persepsi pengguna pelayanan program terapi dan rehabilitasi pergo abunuran dan atau penerapan teknologi medis berbasis-terintegrasi sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah.	Jumlah tim kerja rehabilitasi pergo abunuran dan atau penerapan teknologi medis berbasis-terintegrasi sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah.	80	80	80	80	120	120	120	239	239	239
8.	Kelembagaan dan Pengembangan Fasilitas 84% di Daerah	Kelembagaan dan pengembangan fasilitas pergo abunuran dan atau penerapan teknologi medis berbasis-terintegrasi sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah.	Jumlah ruangan rehabilitasi pergo abunuran dan atau penerapan teknologi medis berbasis-terintegrasi sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah.	513	578	578	578	5038	5038	5038	6387	6387	6387

11.11.06.03

Matriks 2.3 Rencana Tindak Pembangunank Kementerian/ Lembaga Tahun 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2013		TARGET PILKITAAN MAJU			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)		
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
			Jumlah terasid orang yang dideteksi berada di BUN	179	179	179	179	949			
			Jumlah kasus aksi terduga yang teridentifikasi	47688	46257	-6250	46230				
			Jumlah orang yang pendidiknya yang dididikasikan keater BUN	1093	1017	1275	1215				
			Jumlah implementasi ESMB yang dilaksanakan	677	734	754	754	934			
			Jumlah asasi (Pengadilan Narkotika) di daerah perwakilan yang dilaksanakan "pemerintah"	77	62	62	62	62			
			Jumlah penyidik gina dan/atau penarikan narkoba yang melaku di JAWA BARAT, Lampung	*	*	*	*	*			
			Jumlah terasid, zona dan/atau peredaran narkoba yang di aturakan secara terpadu car sabal il ilegal	1344	2079	2073	2073	2073			
			Jumlah Laporan Kasus Narkotika (RK) Posti perasetaan	193	204	203	203	203			

Rp.14.066,4

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2013	TARGET			RENCANA 2013	ALOKASI (MILYAR RUPIAH)					
					PILSKITDAAN MAJU				2014	2015	2016	PILSKITDAAN MAJU		
					2014	2015	2016					2014	2015	2016
			Jumlah artikel publikasi sains kesehatan narkoba yang diterbitkan (P/1)	77	107	107	112							
			Jumlah artikel terdapat kegiatan tindak lanjut dalam masalah yang diselesaikan dan diujikan serta uji pemerintah (1/21)	68	87	87	95							
			Jumlah dosen dan sumber tenaga belajar unit sains	1162	1190	1190	1190							
			Jumlah instrumen standar akademik, manajemen dan operasional di Lektor	12	12	12	12							
TOTAL								1.020,6	1.240,6	1.240,6	1.240,6	1.240,6	1.240,6	

11.11.066.5

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PERANGKIHAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI					
				RENTANSA 2011	BAGIAN BERSIH			SPESIFIKASI	PERSARAFAN/INJAL					
					2011	2012	2013		2011	2012	2013			
1	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar dan Menengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERKAWINAN DAN KUALITAS BERTANGGAL

No	INDIKATOR ALOKASI BUDGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI			
				RENTANSA 2011	BAGIAN BAWAH			SPESIFIKASI	2011	2012		
					2011	2012	2013			2011	2012	
1	Strategi, Kebijakan, dan Sistem Sarana dan Prasarana	5. Meningkatkan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja	001. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja	60%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Strategi, Kebijakan, dan Sistem Sarana dan Prasarana	2. Meningkatkan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja	002. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja	60%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Strategi, Kebijakan, dan Sistem Sarana dan Prasarana	3. Meningkatkan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja	003. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja	60%	100	100	100	100	100	100	100	100

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	INDIKATOR KEMENTERIAN/LEMBAGA	SASARAN	INDIKATOR	TARUHAN					ALOKASI				
				REVISI 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
													2011
1	Strategi Nasional Pengembangan Sistem Perikanan Tangkap	1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	1.1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	1.1.1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	1.1.2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	1.1.3. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	1.1.4. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	1.1.5. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	1.1.6. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	1.1.7. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	1.1.8. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	1.1.9. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	1.1.10. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional
2	Strategi Nasional Pengembangan Sistem Perikanan Tangkap	2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	2.1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	2.1.1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	2.1.2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	2.1.3. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	2.1.4. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	2.1.5. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	2.1.6. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	2.1.7. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	2.1.8. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	2.1.9. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional	2.1.10. Meningkatkan produksi perikanan tangkap nasional

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PEMBAHANGINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERKAWINAN DAN KELUARGA

No	INDIKATOR ALOKASI BUDGET	MASALAH	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI		URAIAN BUDGET
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PEMBAHILIAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	INDIKATOR ALOKASI PENDANAAN	MASARAH	INDIKATOR	REPERTORI					ALOKASI				
				REPERTORI 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012		
1	Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas	001. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			002. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			003. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas	004. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			005. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			006. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	INDIKATOR KUALITAS PERBUKTIAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					SPESIFIKASI	ALOKASI								
				REVISI 2011	2012			2013		2014	2015	2016	2017	2018				
					2011	2012	2013								2014	2015	2016	2017
1	P2	100%	003.001.001.000.000 Sistem informasi manajemen kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	P2	100%	003.001.001.000.000 Sistem informasi manajemen kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	P2	100%	003.001.001.000.000 Sistem informasi manajemen kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	P2	100%	003.001.001.000.000 Sistem informasi manajemen kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	P2	100%	003.001.001.000.000 Sistem informasi manajemen kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	P2	100%	003.001.001.000.000 Sistem informasi manajemen kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	P2	100%	003.001.001.000.000 Sistem informasi manajemen kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	P2	100%	003.001.001.000.000 Sistem informasi manajemen kegiatan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PERANGKALAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	INDIKATOR ALOKASI PERANGKALAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI				
				RENTANSA 2011	2013			SPESIFIKASI	2011	2012	2013		
					2011	2012	2013						
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PEMBAHANGINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

No	INDIKATOR ALOKASI BUDGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI		
				RENCANA 2013	BAGIAN BAWAH			SPESIFIKASI	2013	2014	
					2013	2014	2015				2013
1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMAJUAN BERKUALITAS

No	INDIKATOR KUALITAS PERKULIAHAN	MASALAH	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI								
				RENYANA 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015			
1	1.1 1.1.1 1.1.2	1.1 1.1.1 1.1.2	1.1 1.1.1 1.1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	2.1 2.1.1 2.1.2	2.1 2.1.1 2.1.2	2.1 2.1.1 2.1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3.1 3.1.1 3.1.2	3.1 3.1.1 3.1.2	3.1 3.1.1 3.1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PERANGKIHAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERKOTAAN DAN TRANSPORTASI

No	INDIKATOR ALOKASI BUDGET	MASALAH	INDIKATOR	TARGET				SPESIFIKASI	ALOKASI				
				RENTANSA 2011	BAGIAN BUDGET				2011	2012	2013	2014	
					2011	2012	2013						
1	Kelembagaan												
2	Strategis, Kebijakan, dan Rencana Kerja	1. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 2. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 3. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja	1. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 2. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 3. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja	60%	60%	60%	60%	100	100	100	100	100	100
3	Strategis, Kebijakan, dan Rencana Kerja	1. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 2. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 3. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja	1. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 2. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 3. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja	60%	60%	60%	60%	100	100	100	100	100	100
4	Strategis, Kebijakan, dan Rencana Kerja	1. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 2. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 3. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja	1. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 2. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja 3. Kebijakan, Strategi, dan Rencana Kerja	60%	60%	60%	60%	100	100	100	100	100	100

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PEMBAHANGINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMAJUAN BERPENDIDIKAN

No	INDIKATOR ALOKASI BUDGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI		
				RENTAN 2011	KUALITAS MANUSIA			SPESIFIKASI	2011	2012	2013
					2011	2012	2013				
1	Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan perguruan tinggi 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan perguruan tinggi 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan perguruan tinggi 4. Meningkatkan kualitas kelembagaan perguruan tinggi 5. Meningkatkan kualitas kelembagaan perguruan tinggi	001 Indikator kelembagaan perguruan tinggi 002 Indikator kelembagaan perguruan tinggi 003 Indikator kelembagaan perguruan tinggi 004 Indikator kelembagaan perguruan tinggi 005 Indikator kelembagaan perguruan tinggi	001 002 003 004 005	001 002 003 004 005	001 002 003 004 005	001 002 003 004 005	001 002 003 004 005	001 002 003 004 005	001 002 003 004 005	

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PERANGKILAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERKOTAMADINEAN DAN KAWILAYATAN

No	INDIKATOR ALOKASI BUDGET	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI					
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Perkotaan	1) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan perkotaan	003 Perencanaan, Pengembangan dan Pelaksanaan Program Kerja	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Perkotaan	1) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan perkotaan	003 Perencanaan, Pengembangan dan Pelaksanaan Program Kerja	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

11 ME 11/13

MATRIKS 2.1 RENCANA TINDAK PENGALIHAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERKERJAAN DAN BURUHAN

No	TUGAS DAN FUNGSI	SASARAN	INDIKATOR	RESTRUKTURISASI			TANGGUL			ALOKASI		
				2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Struktur Organisasi, Kebijakan, Sistem, dan Prosedur Kerja	01) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga	001) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga	12	13	13	110	110	110	110	110	110
2	Pengembangan SDM, Sistem dan Prosedur Kerja	01) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga	001) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga	12	12	12	110	110	110	110	110	110
				12	12	12	110	110	110	110	110	110
				12	12	12	110	110	110	110	110	110
				12	12	12	110	110	110	110	110	110
3	Pengembangan SDM, Sistem dan Prosedur Kerja	01) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga	001) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga	12	12	12	110	110	110	110	110	
4	Pengembangan SDM, Sistem dan Prosedur Kerja	01) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga	001) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga	12	12	12	110	110	110	110	110	110
				12	12	12	110	110	110	110	110	110
				12	12	12	110	110	110	110	110	110

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA DEPARTEMEN NASIONAL (SKKRI)

No	PENCAPAIAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	SISUANYA	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	TARUHAN			SASARAN (MILLER RUFOM)		
					2012	2013	2014	2013	2014	2015
1	KELOMPOK SASARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	KELOMPOK SASARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA	1. Jumlah penduduk miskin di desa 2. Jumlah penduduk miskin di kota 3. Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota 4. Jumlah penduduk miskin di provinsi 5. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 6. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 7. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 8. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 9. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 10. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 11. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 12. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 13. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 14. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 15. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 16. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 17. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 18. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 19. Jumlah penduduk miskin di negara bagian 20. Jumlah penduduk miskin di negara bagian	1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000	

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA DEPARTEMEN NASIONAL (USKUN)

No	FUNGSI/KELOMPOK JURNALIS	SISWA	INDIKATOR	REVISI 2012		TARUHAN		KEMERDEGAAN		
				2012	2013	2012	2013	2012	2013	
1	1. Indikator: ... 2. Indikator: ... 3. Indikator: ... 4. Indikator: ... 5. Indikator: ... 6. Indikator: ... 7. Indikator: ... 8. Indikator: ... 9. Indikator: ... 10. Indikator: ... 11. Indikator: ... 12. Indikator: ... 13. Indikator: ... 14. Indikator: ... 15. Indikator: ... 16. Indikator: ... 17. Indikator: ... 18. Indikator: ... 19. Indikator: ... 20. Indikator: ... 21. Indikator: ... 22. Indikator: ... 23. Indikator: ... 24. Indikator: ... 25. Indikator: ... 26. Indikator: ... 27. Indikator: ... 28. Indikator: ... 29. Indikator: ... 30. Indikator: ... 31. Indikator: ... 32. Indikator: ... 33. Indikator: ... 34. Indikator: ... 35. Indikator: ... 36. Indikator: ... 37. Indikator: ... 38. Indikator: ... 39. Indikator: ... 40. Indikator: ... 41. Indikator: ... 42. Indikator: ... 43. Indikator: ... 44. Indikator: ... 45. Indikator: ... 46. Indikator: ... 47. Indikator: ... 48. Indikator: ... 49. Indikator: ... 50. Indikator: ... 51. Indikator: ... 52. Indikator: ... 53. Indikator: ... 54. Indikator: ... 55. Indikator: ... 56. Indikator: ... 57. Indikator: ... 58. Indikator: ... 59. Indikator: ... 60. Indikator: ... 61. Indikator: ... 62. Indikator: ... 63. Indikator: ... 64. Indikator: ... 65. Indikator: ... 66. Indikator: ... 67. Indikator: ... 68. Indikator: ... 69. Indikator: ... 70. Indikator: ... 71. Indikator: ... 72. Indikator: ... 73. Indikator: ... 74. Indikator: ... 75. Indikator: ... 76. Indikator: ... 77. Indikator: ... 78. Indikator: ... 79. Indikator: ... 80. Indikator: ... 81. Indikator: ... 82. Indikator: ... 83. Indikator: ... 84. Indikator: ... 85. Indikator: ... 86. Indikator: ... 87. Indikator: ... 88. Indikator: ... 89. Indikator: ... 90. Indikator: ... 91. Indikator: ... 92. Indikator: ... 93. Indikator: ... 94. Indikator: ... 95. Indikator: ... 96. Indikator: ... 97. Indikator: ... 98. Indikator: ... 99. Indikator: ... 100. Indikator: ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1. Indikator: ... 2. Indikator: ... 3. Indikator: ... 4. Indikator: ... 5. Indikator: ... 6. Indikator: ... 7. Indikator: ... 8. Indikator: ... 9. Indikator: ... 10. Indikator: ... 11. Indikator: ... 12. Indikator: ... 13. Indikator: ... 14. Indikator: ... 15. Indikator: ... 16. Indikator: ... 17. Indikator: ... 18. Indikator: ... 19. Indikator: ... 20. Indikator: ... 21. Indikator: ... 22. Indikator: ... 23. Indikator: ... 24. Indikator: ... 25. Indikator: ... 26. Indikator: ... 27. Indikator: ... 28. Indikator: ... 29. Indikator: ... 30. Indikator: ... 31. Indikator: ... 32. Indikator: ... 33. Indikator: ... 34. Indikator: ... 35. Indikator: ... 36. Indikator: ... 37. Indikator: ... 38. Indikator: ... 39. Indikator: ... 40. Indikator: ... 41. Indikator: ... 42. Indikator: ... 43. Indikator: ... 44. Indikator: ... 45. Indikator: ... 46. Indikator: ... 47. Indikator: ... 48. Indikator: ... 49. Indikator: ... 50. Indikator: ... 51. Indikator: ... 52. Indikator: ... 53. Indikator: ... 54. Indikator: ... 55. Indikator: ... 56. Indikator: ... 57. Indikator: ... 58. Indikator: ... 59. Indikator: ... 60. Indikator: ... 61. Indikator: ... 62. Indikator: ... 63. Indikator: ... 64. Indikator: ... 65. Indikator: ... 66. Indikator: ... 67. Indikator: ... 68. Indikator: ... 69. Indikator: ... 70. Indikator: ... 71. Indikator: ... 72. Indikator: ... 73. Indikator: ... 74. Indikator: ... 75. Indikator: ... 76. Indikator: ... 77. Indikator: ... 78. Indikator: ... 79. Indikator: ... 80. Indikator: ... 81. Indikator: ... 82. Indikator: ... 83. Indikator: ... 84. Indikator: ... 85. Indikator: ... 86. Indikator: ... 87. Indikator: ... 88. Indikator: ... 89. Indikator: ... 90. Indikator: ... 91. Indikator: ... 92. Indikator: ... 93. Indikator: ... 94. Indikator: ... 95. Indikator: ... 96. Indikator: ... 97. Indikator: ... 98. Indikator: ... 99. Indikator: ... 100. Indikator: ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (SKKRI)

No	PROMOSI/PELAKSANAAN JURNALIS	SISWA	INSTRUMEN	KELOMPOK	TANGGUNG JAWAB		MUTU BAHAN		
					2012	2013	2012	2013	
			1. Instrumen yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: a. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: b. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: c. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: d. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: e. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: f. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: g. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: h. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: i. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: j. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: k. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: l. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: m. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: n. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: o. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: p. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: q. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: r. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: s. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: t. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: u. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: v. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: w. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: x. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: y. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut: z. Instrumen yang akan digunakan adalah sebagai berikut:						
					100	100	100	100	

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA DEPARTEMEN NASIONAL (USKUN)

No	PROMOSI/KELOMPOK JURNALIS	SISWA	INDIKATOR	KELOMPOK	TARUHAN			KEMUNGKINAN		
					2012	2013	2014	2012	2013	2014
2	Zakaria, M. (2012). <i>Kelembagaan dan Kebijakan Keluarga Berencana di Indonesia</i> . Jakarta: PT. Bumi Aksara.	1. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	4	4	4	4	4	4	
			2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	1	1	1	1	1	1	
			3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	10	10	10	10	10	10	
			4. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	2	2	2	2	2	2	
			5. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	70	70	70	70	70	70	
			6. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	1	1	1	1	1	1	
			7. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
			8. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	10	10	10	10	10	10	
			9. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	10	10	10	10	10	10	
			10. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	10	10	10	10	10	10	
			11. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	10	10	10	10	10	10	
			12. Jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi di bidang kependudukan dan keluarga berencana di perguruan tinggi.	10	10	10	10	10	10	

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA DEPRUDUKA NASIONAL (USKUN)

No	FUNGSI/KELOMPOK JURNALIS	SISWA	INDIKATOR	KELOMPOK	TAKSIKUM			KEMERDEKAAN		
					2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	1. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1
2	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	2. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1
3	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	3. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1
4	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	4. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1
5	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	5. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1
6	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	6. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1
7	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	7. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1
8	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	8. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1
9	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	9. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1
10	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	10. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1
11	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	11. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1
12	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	100%	12. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah terdapatnya 100% (100%) orang tua yang mengikuti kegiatan ini	1	1	1	1	1	1	1

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA DEPARTEMEN NASIONAL (USKUN)

No	FUNGSI/KELOMPOK KERJA	SISWA	INDIKATOR	KELOMPOK	TAKSIKUM			KEMERDEKAAN		
					2012	2013	2014	2012	2013	2014
2	Sambutan 2.1. Monev dan evaluasi program kerja	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	6	2	4	1	12	12
			2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	1	10	10	
			3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	10	10	10	10	10	10	
			4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	6	2	4	1	12	
			5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	2	2	4	1	12	
			6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	10	10	10	
			7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	10	10	10	
			8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	10	10	10	
			9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	10	10	10	
			10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	10	10	10	
3	Sambutan 3.1. Monev dan evaluasi program kerja	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	6	2	4	1	12	12
			2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	10	10	10	
			3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	10	10	10	10	10	10	
			4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	6	2	4	1	12	
			5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	2	2	4	1	12	
			6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	10	10	10	
			7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	10	10	10	
			8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	10	10	10	
			9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	10	10	10	
			10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	1	10	10	10	10	10	

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA DEPARTEMEN NASIONAL (SKKRI)

No	FUNGSI/KELOMPOK JURNALIS	SISWA	INDIKATOR	KELOMPOK	TAKSIKUM			MUTUAS KUALITAS			
					2012	2013	2014	1201	1202	1203	
1	Lembaga Kependudukan dan Keluarga Departemen Nasional		1. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dan terbelakang di seluruh Indonesia	4	4	4	1	1	1	1	1
			2. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dan terbelakang di seluruh Indonesia	4	4	4	1	1	1	1	1
			3. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dan terbelakang di seluruh Indonesia	4	4	4	1	1	1	1	1
			4. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dan terbelakang di seluruh Indonesia	4	4	4	1	1	1	1	1
			5. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dan terbelakang di seluruh Indonesia	4	4	4	1	1	1	1	1
			6. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dan terbelakang di seluruh Indonesia	4	4	4	1	1	1	1	1
			7. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dan terbelakang di seluruh Indonesia	4	4	4	1	1	1	1	1
			8. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dan terbelakang di seluruh Indonesia	4	4	4	1	1	1	1	1
			9. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dan terbelakang di seluruh Indonesia	4	4	4	1	1	1	1	1
			10. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dan terbelakang di seluruh Indonesia	4	4	4	1	1	1	1	1
			11. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah-rumah penduduk miskin dan terbelakang di seluruh Indonesia	4	4	4	1	1	1	1	1

MATRIS 2.1. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA DEPARTEMEN NASIONAL (SKRIPSI)

No	FORSOS/KELOMPOK TUMBUHAN	SISWA	INDIKATOR	KELOMPOK	TAKSIK		KEMERDEKAAN		KEMERDEKAAN		KEMERDEKAAN	
					2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
			1. Indikator: ...	1	1	1	1					
			2. Indikator: ...	2	2	2	2					
			3. Indikator: ...	3	3	3	3					
			4. Indikator: ...	4	4	4	4					
			5. Indikator: ...	5	5	5	5					
			6. Indikator: ...	6	6	6	6					
			7. Indikator: ...	7	7	7	7					
			8. Indikator: ...	8	8	8	8					
			9. Indikator: ...	9	9	9	9					
			10. Indikator: ...	10	10	10	10					
			11. Indikator: ...	11	11	11	11					
			12. Indikator: ...	12	12	12	12					
			13. Indikator: ...	13	13	13	13					
			14. Indikator: ...	14	14	14	14					
			15. Indikator: ...	15	15	15	15					
			16. Indikator: ...	16	16	16	16					
			17. Indikator: ...	17	17	17	17					
			18. Indikator: ...	18	18	18	18					
			19. Indikator: ...	19	19	19	19					
			20. Indikator: ...	20	20	20	20					

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

No	FUNGSI/KELOMPOK KERJA	SISWA	INDIKATOR	KELOMPOK	PEMBANGUNAN		KEMUNGKINAN		SASARAN (MILLER RUFORD)	
					2012	2013	2012	2013	2012	2013
1	Kecamatan Karamba Jember	1. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1	1	1	1	1	1	1
			2. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1	1	1	1	1	1	1
			3. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1	1	1	1	1	1	1
			4. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1	1	1	1	1	1	1
			5. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1	1	1	1	1	1	1
			6. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1	1	1	1	1	1	1
			7. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1	1	1	1	1	1	1
			8. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1	1	1	1	1	1	1
			9. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1	1	1	1	1	1	1
			10. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1	1	1	1	1	1	1
			11. Meningkatkan kemampuan literasi masyarakat di desa-desa binaan melalui kegiatan literasi desa	1	1	1	1	1	1	1

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (SKKRI)

No	FUNKSI/KELOMPOK JURNALIS	SISWA	INSTRUMEN	KELOMPOK	TANGGUNG JAWAB				KEMENTERIAN/LEMBAGA
					KELOMPOK	PEMERIKSA	KELOMPOK	KELOMPOK	
			1. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 2. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 3. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal.	1. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 2. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 3. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal.	1. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 2. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 3. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal.	1. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 2. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 3. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal.	1. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 2. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 3. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal.	1. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 2. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal. 3. Untuk mengetahui apakah ada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah tinggal.	

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN KEMERDEKAAN DAN KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA (SKRIPSI)

No	PERSORONG/KELOMPOK TIRUAN/AS	SYGOREN	INDIKATOR	KELOMPOK/SDP	TAKSIKUM		KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA		
					2012	2013	2012	2013	
4	Sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	Membuat sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	1. Indikator: Sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	1	2	2	2	2012	2013
			2. Indikator: Sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	1	1	1	1	2012	2013
			3. Indikator: Sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	1	1	1	1	2012	2013
			4. Indikator: Sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	1	1	1	1	2012	2013
			5. Indikator: Sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	1	1	1	1	2012	2013
			6. Indikator: Sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	1	1	1	1	2012	2013
			7. Indikator: Sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	1	1	1	1	2012	2013
			8. Indikator: Sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	1	1	1	1	2012	2013
			9. Indikator: Sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	1	1	1	1	2012	2013
			10. Indikator: Sambutan dan sambutan di berbagai kesempatan	1	1	1	1	2012	2013

MATRIKS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBINAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

REKORD JURNAL: KEMENTERIAN/KEMENTERIAN DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA NASIONAL (SUKSES)

No	PENGORGANISASIAN/ JURNALIS	SIBER	INDIKATOR	RESPONSABILITAS	TAKSIKUM				SISTEM (MATERI BAHAN)			
					2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	
2	Sistem Informasi dan Komunikasi	Keberhasilan dan keberhasilan dalam sistem informasi dan komunikasi	<p>1. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>2. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>3. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>4. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>5. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>6. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>7. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>8. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>9. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>10. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>11. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>12. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>13. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>14. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p> <p>15. Tersedia dan dapat diakses informasi dan komunikasi</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	
				4	4	4	4	4	4	4	4	4
				1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA DEPARTEMEN NASIONAL (SKKRI)

No	PENCAPAIAN KAWALAN TURUNAN	SYGEBY	INDIKATOR	KELOMPOK	TAKSIKUM			MUTU BUKAN				
					2012	2013	2014	2012	2013	2014		
1	Zakat dan Pengabdian Masyarakat	Bidang Kependudukan dan Keluarga Departemen Nasional (SKKRI) Kantor Pusat Kantor Wilayah Kantor Kabupaten/Kota	1. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...	1	1	1	1	1	1	1	1	
2. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23. Meningkatkan jumlah zakat yang dibayarkan...			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA DEPARTEMEN NASIONAL (BUMHUK)

No	PROMOSI/PELAYANAN JURUSAN	SYGERSY	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	TARUHAN			SASARAN (MILLER RUFORD)		
					2012	2013	2014	2012	2013	2014
2	Zacarias K. L. D. (1978-01-14) (1978-01-14) (1978-01-14)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 2. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 3. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 4. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 5. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 6. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 7. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 8. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 9. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 10. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 			
3	Zacarias K. L. D. (1978-01-14) (1978-01-14) (1978-01-14)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 2. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 3. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 4. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 5. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 6. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 7. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 8. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 9. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 10. Meningkatkan jumlah kunjungan ke rumah sakit jiwa dan klinik jiwa di seluruh Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 1000 jiwa 			

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA DEPARTEMEN NASIONAL (SKRIPSI)

No	PENCAPAIAN TAHUNAN	SISWA	INDIKATOR	KEMUNGKINAN	TARUHAN			SALURAN (MILLER BUDAH)		
					2012	2013	2014	2011	2012	2013
			21. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	6.000	1.500	6.000	1.500			
			22. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	2.700	1.350	2.700	1.350			
			23. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	90	20	90	20			
			24. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	31	7	31	7			
			25. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	-	-	-	-			
			26. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	0	0	0	0			
			27. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	110	30	110	30			
			28. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	200	50	200	50			
			29. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	0	0	0	0			
			30. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	-	-	-	-			
			31. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	0	0	0	0			
			32. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	0	0	0	0			
			33. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	210	50	210	50			
			34. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	15	4	15	4			
			35. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	90	20	90	20			
			36. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	1	1	1	1			
			37. Indikator: Jumlah KIP Pradiklat Di Daerah (KIP Pradiklat)	31	7	31	7			

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

No	FUNGSI/KELOMPOK JURNALIS	SISWA	INDIKATOR	KEMUNGKINAN	TAKSI			KEMUNGKINAN	KEMUNGKINAN	KEMUNGKINAN	KEMUNGKINAN	KEMUNGKINAN
					100%	50%	0%					
1			1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
2			2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
3			3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
4			4. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
5			5. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
6			6. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
7			7. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
8			8. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
9			9. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
10			10. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
11			11. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
12			12. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
13			13. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
14			14. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
15			15. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
16			16. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
17			17. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
18			18. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
19			19. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
20			20. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
21			21. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
22			22. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
23			23. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
24			24. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
25			25. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
26			26. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
27			27. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
28			28. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
29			29. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
30			30. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
31			31. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
32			32. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
33			33. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
34			34. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
35			35. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
36			36. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
37			37. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
38			38. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
39			39. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
40			40. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
41			41. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
42			42. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
43			43. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
44			44. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
45			45. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
46			46. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
47			47. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
48			48. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
49			49. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0
50			50. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kuliah	100	50	0	100	50	0	100	50	0

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

No	PROMOSI/INFORMASI	SISWA	INISIATOR	KELOMPOK	TANGGUNG JAWAB			MUTUAS BUKAN							
					KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK					
1			1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata												
2			2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, dan perkebunan												
3			3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang kesehatan, keolahragaan, dan kebudayaan												
4			4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi informasi dan komunikasi												
5			5. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa dan sastra												
6			6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang seni dan budaya												
7			7. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang lingkungan hidup												
8			8. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang hukum dan tata negara												
9			9. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang manajemen dan administrasi												
10			10. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang akuntansi dan keuangan												
11			11. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Inggris												
12			12. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Arab												
13			13. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Mandarin												
14			14. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Jepang												
15			15. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Korea												
16			16. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Spanyol												
17			17. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Prancis												
18			18. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Italia												
19			19. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Jerman												
20			20. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Belanda												
21			21. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Portugis												
22			22. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Rusia												
23			23. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Cina												
24			24. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Thailand												
25			25. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Vietnam												
26			26. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Myanmar												
27			27. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Laos												
28			28. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Kamboja												
29			29. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Filipina												
30			30. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Tagalog												
31			31. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Jawa												
32			32. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Bali												
33			33. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Sunda												
34			34. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Melayu												
35			35. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Aceh												
36			36. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Nias												
37			37. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Toraja												
38			38. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Bugis												
39			39. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Makassar												
40			40. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Batak												
41			41. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Minangkabau												
42			42. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Palembang												
43			43. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Bengkulu												
44			44. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Lampung												
45			45. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Riau												
46			46. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Jambi												
47			47. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Sumatera Utara												
48			48. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Aceh												
49			49. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Nias												
50			50. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Toraja												
51			51. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Bugis												
52			52. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Makassar												
53			53. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Batak												
54			54. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Minangkabau												
55			55. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Palembang												
56			56. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Bengkulu												
57			57. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Lampung												
58			58. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Riau												
59			59. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Jambi												
60			60. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja di bidang bahasa Sumatera Utara												

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

PERMINTAAN BUDGET : RUMAH KEMENDUKURAN DAN KELUARGA DEPARTEMEN NASIONAL (USKRN)

No	FUNGSI/KELOMPOK JURNALIS	SUDUT	INDIKATOR	KEMUKAAN	TAKSIK			KEMUKAAN SPP		
					2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP	1	1. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5	5	5	5	5	5	
			2. Pelaksanaan program yang terdapat pada laporan dan tanggapan	5	5	5	5	5	5	
			3. Pelaksanaan program yang terdapat pada laporan dan tanggapan	100	100	100	100	100	100	
			4. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	2 (dua kali)	2 (dua kali)	2 (dua kali)	2 (dua kali)	2 (dua kali)	2 (dua kali)	
			5. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	
			6. Pelaksanaan program yang terdapat pada laporan dan tanggapan	100	100	100	100	100	100	
			7. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	
			8. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	
			9. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	
			10. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	
2	KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP KEMUKAAN SPP	1	1. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5	5	5	5	5	5	
			2. Pelaksanaan program yang terdapat pada laporan dan tanggapan	5	5	5	5	5	5	
			3. Pelaksanaan program yang terdapat pada laporan dan tanggapan	100	100	100	100	100	100	
			4. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	2 (dua kali)	2 (dua kali)	2 (dua kali)	2 (dua kali)	2 (dua kali)	2 (dua kali)	
			5. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	
			6. Pelaksanaan program yang terdapat pada laporan dan tanggapan	100	100	100	100	100	100	
			7. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	
			8. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	
			9. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	
			10. Jumlah pertemuan/pengantar dan tanggapan yang dilaksanakan	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	5 (lima kali)	

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/KEMENTERIAN : LEMBAGA KEPENDUDUKAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN NASIONAL (SKKRI)

No	FUNGSI/KELOMPOK JURNALIS	STASYUN	INDIKATOR	REVISI 2012	TANPA		DENGAN (MILIK RUMAH)			
					2012	2013	2012	2013		
2	Zonalisasi wilayah (KORPRI)	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00								113
3	Proses evaluasi dan penilaian	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00								90
4	Kelembagaan (KORPRI)	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00								110

34 SKKRI III

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA (SKOR)

No	PENGORANGAN TAHUNAN	SISWA	INDIKATOR	KEMUNGKINAN	TARUHAN			SISTEM (MILITER BUDIDHA)		
					2012	2013	2014	2013	2014	2015
10	KELOMPOK/KELOMPOK BUKAN POKOK BAHASA/KELOMPOK BUKAN BAHASA	110	1. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia dini 2. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia remaja 3. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia dewasa 4. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 5. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 6. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 7. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut	44	110	110	110	110	110	110
11	KELOMPOK/KELOMPOK BUKAN POKOK BAHASA/KELOMPOK BUKAN BAHASA	110	1. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia dini 2. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia remaja 3. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia dewasa 4. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 5. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 6. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 7. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut	44	110	110	110	110	110	110
12	KELOMPOK/KELOMPOK BUKAN POKOK BAHASA/KELOMPOK BUKAN BAHASA	110	1. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia dini 2. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia remaja 3. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia dewasa 4. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 5. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 6. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 7. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut	44	110	110	110	110	110	110
13	KELOMPOK/KELOMPOK BUKAN POKOK BAHASA/KELOMPOK BUKAN BAHASA	110	1. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia dini 2. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia remaja 3. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia dewasa 4. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 5. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 6. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 7. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut	44	110	110	110	110	110	110
14	KELOMPOK/KELOMPOK BUKAN POKOK BAHASA/KELOMPOK BUKAN BAHASA	110	1. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia dini 2. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia remaja 3. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia dewasa 4. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 5. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 6. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut 7. Peningkatan kemampuan literasi membaca di kalangan penduduk usia lanjut	44	110	110	110	110	110	110

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (SKKRI)

No	FUNGSI/KELOMPOK JURNALIS	SISWA	INDIKATOR	KELOMPOK	TANGGUNG JAWAB			MUTU BAHAN		
					SIKAP	KELOMPOK	KELOMPOK	SIKAP	KELOMPOK	KELOMPOK
			b. Jarak antar RT/ RW tercapai c. Jarak antar desa/ kecamatan tercapai d. Infrastruktur jalan tercapai	40	40	40	40	40	40	40
			e. Infrastruktur jalan tercapai f. Infrastruktur jalan tercapai	40	40	40	40	40	40	40
			g. Infrastruktur jalan tercapai h. Infrastruktur jalan tercapai	40	40	40	40	40	40	40

MATRIS 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

No	PROMOSI/PELAYANAN JURUSAN	SYGOREN	INDIKATOR	KELOMPOK SASARAN	TARUHAN		SASARAN (MILLER RUFOM)		RISIKO
					2012	2013	2012	2013	
1	Salah satu indikator keberhasilan program adalah tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan.	1. Jumlah penduduk yang terdampak bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran, dll) yang ditangani.							
2	Salah satu indikator keberhasilan program adalah tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan.	2. Jumlah penduduk yang terdampak bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran, dll) yang ditangani.							
3	Salah satu indikator keberhasilan program adalah tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan.	3. Jumlah penduduk yang terdampak bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran, dll) yang ditangani.							
4	Salah satu indikator keberhasilan program adalah tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan.	4. Jumlah penduduk yang terdampak bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran, dll) yang ditangani.							
Jumlah									

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

No	PROGRAM/KEGIATAN/URUSAN	SASARAN	INDIKATOR	TAMBAH				ALOKASI (MILYAR RUPIAH)					
				2013		2014		2013		2014			
				2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		
1	PROGRAM/KEGIATAN/URUSAN KAWALAN SUDUT PENGAWASAN DAN PENGAWASAN KORUM	Keaktifan dan ketertarikan dalam melaksanakan KORUM						11,1	16,2	10,2	10,2		
1	Keaktifan dan ketertarikan dalam melaksanakan KORUM	Keaktifan dan ketertarikan dalam melaksanakan KORUM						7,5	9,3	9,3	9,3		5,1
			Jumlah rekening bank yang telah dibuka dengan penyertaan/kegiatan/kegiatan di instansi pemerintah dan swasta	4	4	4	4	1,6	1,7	1,7	1,7		1,7
			Keaktifan dan ketertarikan dalam melaksanakan KORUM	50	50	50	50	9,7	2,7	2,7	2,7		1,7
			Keaktifan dan ketertarikan dalam melaksanakan KORUM	5	5	5	5	9,6	2,3	2,3	2,3		1,2

HALAMAH 1

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kemeterian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

NO	PROGRAM/KEGIATAN/URUSAN	SASARAN	INDIKATOR	TAMBAH			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)						
				JUMLAH 2013	PERIODE DAHIL		JUMLAH 2013	PERIODE DAHIL					
					2013	2013		2010	2011	2013	2013		
			Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang perlindungan HAM	1	1	4	1	1	1	1	1	1	
			Penyuluhan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia kepada masyarakat luas	4	4	6	4	17	2,4	2,6	2,6	2,6	
			Penyuluhan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia kepada masyarakat luas	425	240	250	425	10	10	10	10	10	10
								104	3,7	13,2	13,2	13,2	
			Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi HAM yang terintegrasi dengan kegiatan lain	20	20	20	20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
			Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi HAM yang terintegrasi dengan kegiatan lain	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
			Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi HAM yang terintegrasi dengan kegiatan lain	20	20	20	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
			Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi HAM yang terintegrasi dengan kegiatan lain	3	3	3	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
			Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi HAM yang terintegrasi dengan kegiatan lain	1	1	1	1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
			Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi HAM yang terintegrasi dengan kegiatan lain	36	36	36	36	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	

JUL 2012 4-2

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

Kemeterian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

NO	PROGRAM/KEGIATAN/URUTAN	SASARAN	INDIKATOR	JANGKAAN DAHULU		ALOKASI (NILAI RUPIAH)			
				2013	2015	2013	2015	2015	
2	Peningkatan dan pengembangan kegiatan untuk Kasejahteraan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat	Pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat	<p>Angket pelatihan dan pendampingan masyarakat di daerah untuk peningkatan dan pengembangan usaha lokal.</p> <p>Angket pelatihan dan pendampingan masyarakat di daerah untuk peningkatan dan pengembangan usaha lokal.</p> <p>Angket pelatihan dan pendampingan masyarakat di daerah untuk peningkatan dan pengembangan usaha lokal.</p> <p>Angket pelatihan dan pendampingan masyarakat di daerah untuk peningkatan dan pengembangan usaha lokal.</p> <p>Angket pelatihan dan pendampingan masyarakat di daerah untuk peningkatan dan pengembangan usaha lokal.</p>	95	100	104	114	114	114
				95	100	104	114	114	114
				482	482	482	482	482	482
				482	482	482	482	482	482

JUL 2012

MATRIKS 2.3. KENCANA UYUNAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN / LEMBAGA / BIDANG	KATEGORI	URAIAN	KINDAFA	TARGET			ALOKASI LAR HUR	
				2013	2014	2015	2013	2014
1. PERKEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA	1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan di bidang hukum dan administrasi negara	1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan di bidang hukum dan administrasi negara	1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan di bidang hukum dan administrasi negara	80%	80%	80%	100,000	100,000
				80%	80%	80%	100,000	100,000
				80%	80%	80%	100,000	100,000
				80%	80%	80%	100,000	100,000
				80%	80%	80%	100,000	100,000
				80%	80%	80%	100,000	100,000
				80%	80%	80%	100,000	100,000
				80%	80%	80%	100,000	100,000
				80%	80%	80%	100,000	100,000
				80%	80%	80%	100,000	100,000

11111111

MATRIKS 2.3. KENCANA UYUNK PEMBAUNGAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN / LEMBAGA / BIDANG / SUB BIDANG / KEMENTERIAN / LEMBAGA	KEMENTERIAN / LEMBAGA / BIDANG / SUB BIDANG / KEMENTERIAN / LEMBAGA	KEMENTERIAN / LEMBAGA / BIDANG / SUB BIDANG / KEMENTERIAN / LEMBAGA	KEMENTERIAN / LEMBAGA / BIDANG / SUB BIDANG / KEMENTERIAN / LEMBAGA	TAKSI				ALOKASI LARIB	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Departemen Kehutanan	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Departemen Kehutanan	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Departemen Kehutanan	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

11/11/2012

MATRIKS 2.3. KENCANA UYUN PEMANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN / LEMBAGA / BIDANG	URUTAN	NAMA	KEMERANGAN	KEMERANGAN	TAKSI			ALOKASI LAR HUR	
					2013	2014	2015	2013	2014
KEMENTERIAN KESEHATAN	1	KEMENTERIAN KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5
					5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	5.1.8
					5.1.8	5.1.9	5.1.10	5.1.11	5.1.12
KEMENTERIAN KESEHATAN	2	KEMENTERIAN KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	KEMENTERIAN KESEHATAN	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5
					6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.1.8	6.1.9
					6.1.9	6.1.10	6.1.11	6.1.12	6.1.13

MATRIKS 2.3. KENCANA TILUAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEPENTINGAN / LEMBAGA: BAHAN BIOLOGI KLINIK/LOGG/GRUBLOGG

Kategori / Lembaga	Kategori	Keterangan	Target						Alasan Tidak Terpenuhi			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	Berkas 2012	Berkas 2013		
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013		
1. Penelitian dan Pengembangan	Kategori	1.1. Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		1.2. Penelitian dan Pengembangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2. Pendidikan dan Pelatihan	Kategori	2.1. Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		2.2. Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3. Pengabdian Masyarakat	Kategori	3.1. Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		3.2. Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4. Pengawasan dan Penilaian	Kategori	4.1. Pengawasan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		4.2. Pengawasan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5. Pengembangan Sistem Informasi	Kategori	5.1. Pengembangan Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		5.2. Pengembangan Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kategori	6.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		6.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7. Pengembangan Fasilitas	Kategori	7.1. Pengembangan Fasilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		7.2. Pengembangan Fasilitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
8. Pengembangan Sistem Manajemen	Kategori	8.1. Pengembangan Sistem Manajemen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		8.2. Pengembangan Sistem Manajemen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
9. Pengembangan Sistem Pengukuran	Kategori	9.1. Pengembangan Sistem Pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		9.2. Pengembangan Sistem Pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
10. Pengembangan Sistem Pengujian	Kategori	10.1. Pengembangan Sistem Pengujian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		10.2. Pengembangan Sistem Pengujian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11. Pengembangan Sistem Pengolahan	Kategori	11.1. Pengembangan Sistem Pengolahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		11.2. Pengembangan Sistem Pengolahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
12. Pengembangan Sistem Pengendalian Mutu	Kategori	12.1. Pengembangan Sistem Pengendalian Mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		12.2. Pengembangan Sistem Pengendalian Mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
13. Pengembangan Sistem Pengendalian Risiko	Kategori	13.1. Pengembangan Sistem Pengendalian Risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		13.2. Pengembangan Sistem Pengendalian Risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
14. Pengembangan Sistem Pengendalian Biaya	Kategori	14.1. Pengembangan Sistem Pengendalian Biaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		14.2. Pengembangan Sistem Pengendalian Biaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
15. Pengembangan Sistem Pengendalian Lingkungan	Kategori	15.1. Pengembangan Sistem Pengendalian Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		15.2. Pengembangan Sistem Pengendalian Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
16. Pengembangan Sistem Pengendalian Keamanan	Kategori	16.1. Pengembangan Sistem Pengendalian Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		16.2. Pengembangan Sistem Pengendalian Keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
17. Pengembangan Sistem Pengendalian Kualitas	Kategori	17.1. Pengembangan Sistem Pengendalian Kualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		17.2. Pengembangan Sistem Pengendalian Kualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
18. Pengembangan Sistem Pengendalian Kinerja	Kategori	18.1. Pengembangan Sistem Pengendalian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		18.2. Pengembangan Sistem Pengendalian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
19. Pengembangan Sistem Pengendalian Proses	Kategori	19.1. Pengembangan Sistem Pengendalian Proses	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		19.2. Pengembangan Sistem Pengendalian Proses	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
20. Pengembangan Sistem Pengendalian Waktu	Kategori	20.1. Pengembangan Sistem Pengendalian Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		20.2. Pengembangan Sistem Pengendalian Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

MATRIKS 2.3. KENCANA UYUNAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN / LEMBAGA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kategori	Subkategori	Uraian	Target			Rencana		Rencana	
			2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
I. RENCANA DAN STRATEGI KEMENTERIAN/LEMBAGA	Kebijakan dan strategi nasional	1. Program dan strategi nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Program dan strategi kementerian/lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Program dan strategi departemen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Program dan strategi institusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
II. RENCANA DAN STRATEGI KEMENTERIAN/LEMBAGA	Kebijakan dan strategi nasional	1. Program dan strategi nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Program dan strategi kementerian/lembaga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Program dan strategi departemen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Program dan strategi institusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MATRIKS 2.3. KENCANA MELAKUKAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

NO	FUNGSI/ UNIT/ LEMBAGA	MATERI	URUTAN	TARGET				ALOKASI LARIBER	
				2012	2013	2014	2015	2012	2013
1	1. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 2. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 3. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 4. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 5. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan	1. Kebijakan nasional dan rencana kerja nasional di bidang kesehatan 2. Kebijakan nasional dan rencana kerja nasional di bidang kesehatan 3. Kebijakan nasional dan rencana kerja nasional di bidang kesehatan 4. Kebijakan nasional dan rencana kerja nasional di bidang kesehatan 5. Kebijakan nasional dan rencana kerja nasional di bidang kesehatan	40%	50%	50%	50%	10%	10%	
5	1. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 2. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 3. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 4. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan 5. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan	1. Kebijakan nasional dan rencana kerja nasional di bidang kesehatan 2. Kebijakan nasional dan rencana kerja nasional di bidang kesehatan 3. Kebijakan nasional dan rencana kerja nasional di bidang kesehatan 4. Kebijakan nasional dan rencana kerja nasional di bidang kesehatan 5. Kebijakan nasional dan rencana kerja nasional di bidang kesehatan	40%	50%	50%	50%	10%	10%	
TOTAL									

MATRIK 2.3 KENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2012

No	PROGRAM/ RUCUNALAM PRIORITAS	Keterangan (B, D, K, L)	SASARAN	INDIKATOR	REKORSAK		KEMULAIAN		ALOKASI (MILYAR RUPIAH)	
					2013	2014	2013	2014	2013	2014
					2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	Program Desentralisasi Regional dan Perbaikan Proses Politik		Meningkatkan aksesitas dan koordinasi organisasi pemerintahan peradilan dan pengadilan keadilan di tingkat Kabupaten/Kota	1. Meningkatkan aksesitas peradilan dan koordinasi organisasi pemerintahan peradilan dan pengadilan keadilan di tingkat Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	100,0	100,0
1.1	Pembinaan program dan kegiatan peradilan keadilan, peningkatan aksesitas, perbaikan proses politik, dan peningkatan aksesitas keadilan	B	Meningkatkan aksesitas peradilan dan koordinasi organisasi pemerintahan peradilan dan pengadilan keadilan di tingkat Kabupaten/Kota	1. Meningkatkan aksesitas peradilan dan koordinasi organisasi pemerintahan peradilan dan pengadilan keadilan di tingkat Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	25,0	25,0
				2. Meningkatkan aksesitas peradilan dan koordinasi organisasi pemerintahan peradilan dan pengadilan keadilan di tingkat Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	25,0	25,0
				3. Meningkatkan aksesitas peradilan dan koordinasi organisasi pemerintahan peradilan dan pengadilan keadilan di tingkat Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	25,0	25,0
				4. Meningkatkan aksesitas peradilan dan koordinasi organisasi pemerintahan peradilan dan pengadilan keadilan di tingkat Kabupaten/Kota	0%	0%	0%	0%	25,0	25,0

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2012

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	Keterangan (R, D, K, G)	SASARAN	INDIKATOR	REKORDA			HELUARAN			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
					2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
														2013
1-3	Pedagogi, penelitian, evaluasi dan bimbingan teknis/supervisi/pengkaji/ studi kasus pembelajaran/ peniliti dan penelitian	E	Terselesaikannya, lincahnya, relevansi, kredibilitas, keadilan, profesionalitas dan peningkatkan mutu.	1. 8. Pedagogi dan penelitian relevansi, kredibilitas, keadilan, profesionalitas dan peningkatkan mutu/waktu dan akurasi/keadilan	75%	77.50%	77.50%	77.50%	77.50%	77.50%	51,0	00,0	30,0	30,0
				2. 8. Pedagogi dan penelitian lincah dan kredibilitas PPT yang ada di P. 300, 3000, 4-1 KRI yang dibuat dan diunggah. Jumlah dan kepatuhan	75%	77.50%	77.50%	77.50%	77.50%	77.50%				
				3. 8. Hasil belajar siswa (berwujud maupun tidak berwujud) yang diperoleh guru dan PPT yang dapat meningkatkan kemampuan belajar	85%	88%	88%	88%	88%	88%				
				4. 8. Fasilitas dan yang sudah (berwujud maupun tidak berwujud) disediakan PPT	75%	85%	85%	85%	85%	85%				
				5. 8. Kinerja staf yang bertugas pada pendidikan peraih	75%	100%	100%	100%	100%	100%				
				6. 8. Jumlah dan kepatuhan penitip dan bimbingan teknis/supervisi/pengkaji/penelitian	8	8	8	8	8	8				
				7. Jumlah dan kepatuhan kegiatan penelitian yang dilakukan	3 unit line	3 unit line	3 unit line	3 unit line	3 unit line	3 unit line				

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2012

No	PROGRAM/ RENCANA PRIORITAS	Keterangan (R, D, K, L)	SASARAN	INDIKATOR	REKORDEAN					ALOKASI (MILYAR RUPIAH)		
					2013	PENCAPAIAN MAJU		2013	2014	2015	2016	
						2013	2013					2014
11	Program Dukung Konsistensi dan Pembinaan Tugas Teknis Lainnya		Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pembinaan tugas teknis lainnya	1. Jumlah kegiatan pelatihan poin di bag. yang tercapai	75%	30%	berjalan dengan 250 OMS	berjalan dengan 250 OMS	60000	60000	60000	60000
					100%	100%	100%	100%	100%	100%		
11	Program Dukung Konsistensi dan Pembinaan Tugas Teknis Lainnya		Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pembinaan tugas teknis lainnya	2. Persentase penyelesaian dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan (uraj sarana), dan efektif (tepat guna)	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%
					100%	100%	100%	100%	100%	100%		
21	Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan data	L	Terselesaikannya perencanaan dan kegiatan dan informasi secara terintegrasi dan efektif	1. Proses dan hasil perencanaan dan kegiatan dan informasi secara terintegrasi dan efektif	75%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%
					100%	100%	100%	100%	100%	100%		

MATRIK 2.3 KENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2012

No	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	Keterangan (R, E, K, S)	SASARAN	INDIKATOR	REKORSA 2011	HILJARAN			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)		
						2013	2014	2015	2013	2014	2015
2.2	Peningkatan akses, kualitas, pengisian, pemeliharaan, dan inventarisasi sarana dan prasarana di unit.	F	Terdapat peningkatan akses, kualitas, pengisian, pemeliharaan, dan inventarisasi sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas pelayanan.	1. Tingkat persentase pemeliharaan sarana dan prasarana di unit. 2. Tingkat persentase pengisian dan inventarisasi sarana dan prasarana di unit. 3. Tingkat persentase kualitas pelayanan di unit.	100% (persentase)	100% (persentase)	100% (persentase)	5,5	5,0	5,0	5,0
2.3	Peningkatan apresiasi dan penghargaan terhadap kinerja pegawai.	K	Terdapat peningkatan apresiasi dan penghargaan terhadap kinerja pegawai.	1. Tingkat persentase apresiasi dan penghargaan terhadap kinerja pegawai. 2. Tingkat persentase jumlah pegawai yang mendapat penghargaan. 3. Tingkat persentase jumlah pegawai yang mendapat penghargaan.	100% (persentase)	100% (persentase)	100% (persentase)	3,475	3,717	4,317	4,317
2.4	Peningkatan sumbu daya, inovasi, pelayanan dan kinerja di lingkungan.	K	Terdapat peningkatan sumbu daya, inovasi, pelayanan dan kinerja di lingkungan.	1. Tingkat persentase sumbu daya, inovasi, pelayanan dan kinerja di lingkungan. 2. Tingkat persentase jumlah pegawai yang mendapat penghargaan. 3. Tingkat persentase jumlah pegawai yang mendapat penghargaan.	100% (persentase)	100% (persentase)	100% (persentase)	4,5	15,0	15,0	15,0

13/01/2012

Matrik 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2012

No	PROGRAM / RENCANA PRIORITAS	Keterangan (R, D, K/L)	SASARAN	INDIKATOR	REKORSAK			REKORSAK			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
					2013			2014			2015			
					2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
2.6	Kegiatan sosialisasi kepada siswa dan keluarga di lingkungan sekitar sekolah	K.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di lingkungan sekitar sekolah	1. Tersampainya siswa masih illness	3. Tingkat setoran pelaksanaan proyek sosial di lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,5	6,5	6,5
						90%	90%	90%	90%	90%	90%			
						80%	80%	80%	80%	80%	80%			
						70%	70%	70%	70%	70%	70%			
2.7	Peningkatan implementasi dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekitar sekolah	K.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan di lingkungan sekitar sekolah	1. Tersampainya siswa masih illness	3. Tingkat setoran pelaksanaan proyek sosial di lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	6,5	6,5	6,5
						90%	90%	90%	90%	90%	90%			
						80%	80%	80%	80%	80%	80%			
						70%	70%	70%	70%	70%	70%			

13/01/2012

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2012

No	PROGRAM / KEGIATAN / PRODUK	Keterangan (M, JL, K, L)	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2012		PENCAPAIAN TAHUN 2012		ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
					2012	2012	2013	2014	2013	2014	2015	
												2013
				5. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 6. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 7. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 8. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 9. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal	100%	100%	100%	100%	100%			
				10. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 11. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 12. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 13. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 14. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal	100%	100%	100%	100%	100%			
				15. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 16. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 17. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 18. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 19. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal	100%	100%	100%	100%	100%			
JL	Program Kelangkaan dan Konservasi		Memelihara sarana dan prasarana konservasi	10. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 11. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 12. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 13. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal 14. Tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Matrik 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2012

No	PROGRAM/ RUCUNAN PRIORITAS	Keterangan (M, D, K, L)	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA			REALISASI			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
					2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	
														2013
3.1	Pengembangan dan Jumlah sistem pelayanan	E	Terselesaikan, dibuktikan dengan dan pita warna KPI/KPI [000/000/000]	1. Sesi pelatihan kesehatan penyakit menular dan infeksi, model	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				2. Sesi pelatihan kesehatan pembangunan kesehatan [000/000/000] dan penyakit menular dan infeksi, model	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
				3. Sesi pelatihan kesehatan sistem pelayanan kesehatan [000/000/000] [000/000/000]	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Jumlah					190%	190%	190%	190%	190%	190%	190%	190%	190%	190%

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMDANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KELOMPOK PROGRAM	SABARAN	INDIKATOR	TAJUK						ALOKASI (MILIAK/RUPIAH)					
				REVISI 2013		PENGALIHAN MAJU				REVISI 2013	REVISI 2013				
				2014	2015	2014	2015	2016	2014		2015	2016			
1	Program Bantuan Pelaksanaan Tugas Titik Layanan di Kantor/Konstitusi	Penyediaan dukungan administratif maupun dan sumber daya lainnya yang diperlukan	Jumlah BAK dan posision	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian
	Program Bantuan Pelaksanaan Tugas Titik Layanan di Kantor/Konstitusi	Penyediaan dukungan administratif maupun dan sumber daya lainnya yang diperlukan	Jumlah BAK dan posision	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian
	Program Bantuan Pelaksanaan Tugas Titik Layanan di Kantor/Konstitusi	Penyediaan dukungan administratif maupun dan sumber daya lainnya yang diperlukan	Jumlah BAK dan posision	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian	1 bagian

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMDANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGNOSE/KELOMPOK PROGRAM	SABARAN	INDIKATOR	TAJUK							ALOKASI (MILIAKRUPIAH)		
				REVISI 2013	2014			2015			2014	2015	2016
					1 Pelat	1 Pelat	1 Pelat	1 Pelat	1 Pelat	1 Pelat			
		Program pelaksanaan program dan rencana kerja pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota dan perkotaan	Kelembagaan (bentuk, fungsi dan arahan dan pelaksanaan kegiatan)	0	1	2	10	20	40	15	50	40	30
		Kelembagaan (SDY dan lain-lain) dari pelaksanaan dan implementasi	Kelembagaan (bentuk, fungsi dan arahan dan pelaksanaan kegiatan)	1	1	2	2	2	10	20	40	15	50
		Kelembagaan (SDY dan lain-lain) dari pelaksanaan dan implementasi	Kelembagaan (bentuk, fungsi dan arahan dan pelaksanaan kegiatan)	0	1	2	10	20	40	15	50	15	50
2	Program Pemantauan dan Evaluasi	Kelembagaan (SDY dan lain-lain) dari pelaksanaan dan implementasi	Kelembagaan (bentuk, fungsi dan arahan dan pelaksanaan kegiatan)	0	1	2	10	20	40	15	50	15	50
		Kelembagaan (SDY dan lain-lain) dari pelaksanaan dan implementasi	Kelembagaan (bentuk, fungsi dan arahan dan pelaksanaan kegiatan)	0	1	2	10	20	40	15	50	15	50
		Kelembagaan (SDY dan lain-lain) dari pelaksanaan dan implementasi	Kelembagaan (bentuk, fungsi dan arahan dan pelaksanaan kegiatan)	0	1	2	10	20	40	15	50	15	50
		Kelembagaan (SDY dan lain-lain) dari pelaksanaan dan implementasi	Kelembagaan (bentuk, fungsi dan arahan dan pelaksanaan kegiatan)	0	1	2	10	20	40	15	50	15	50
		Kelembagaan (SDY dan lain-lain) dari pelaksanaan dan implementasi	Kelembagaan (bentuk, fungsi dan arahan dan pelaksanaan kegiatan)	0	1	2	10	20	40	15	50	15	50

03/2013

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMDANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KELOMPOK PROGRAM	SABARAN	INDIKATOR	TASUJUT						ALOKASI (MILIAKRUPIAH)								
				REVISI 2013		TUGAS/LOKASI MAJU		2013	2014		2015	2016	2016					
				2013	2014	2014	2015		2014	2015			2015	2016				
3	Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Kelembagaan dan profesionalitas manajemen dan budaya perusahaan	Indikator: Jumlah kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh K3															
4	Program Pengembangan dan Peningkatan Aparatur Manajemen dan Organisasi	Peningkatan kualitas pelayanan yang didukung dengan sumber daya manusia yang unggul	Indikator: Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh K3															
TOTAL ALOKASI																		

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAKSANAAN DAN ANALISIS TRADASAKSI KEUANGAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TANGGAP											
				2013			2014			2015			2016		
				2013	2014	2015	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.	1.1.504.000.000.000.000 Pembinaan Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 1.1.504.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	
2.	2.1.001.000.000.000.000 Pembinaan Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana 2.1.001.000.000.000.000 Pusat Pelaksana	

II.001.001.000.000.000

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAKSANAAN DAN ANALISIS TRASA-SAKSI KEUANGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TANGGAP					ALOKASI PILIHAN RUPAHY				
				PELAKSANAAN SAJUD					2013	2014	2015	2016	
				2013	2014	2015	2016						
1.	Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan
2.	Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Tersedianya kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang manajemen keuangan dan administrasi keuangan

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAKSANAAN DAN ANALISIS TRASA-SAKSI KEUANGAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TANGGAP			ALOKASI PILIHAN RUPAHY		
				2013	PELAYARAN SAJU		2013	PELAYARAN SAJU	
					2014	2015		2016	2014
1	1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara	1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara	1. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			2. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			3. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			4. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			5. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			6. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			7. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			8. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			9. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			10. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			11. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			12. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			13. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			14. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			15. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			16. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			17. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			18. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			19. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			20. Jumlah laporan keuangan yang dihasilkan	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: PUSAT PELAKSANAAN DAN ANALISIS TRADISIBERSI KEUANGAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TANGGAP				ALOKASI PELAJAR RUPIAH			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
2.	Tingkat keberhasilan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2013-2014	Terwujudnya Rancangan, Pelaksanaan dan Pelaksanaan pada Tingkat yang Berkualitas.	<p>A. Persentase realisasi dan keterlaksanaan seluruh pelaksanaan tindakan pelaksanaan, pelaksanaan, sistem administrasi dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.</p> <p>B. Persentase tingkat kualitas Laporan Keuangan SPKKS secara triwulan, semester dan tahunan.</p> <p>C. Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	100%	100%	100%	100%	477	626	601	707
				100%	100%	100%	100%	50	10	14	13
3.	Tingkat keberhasilan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2013-2014	Terdapatnya Rancangan, Pelaksanaan dan Pelaksanaan pada Tingkat yang Berkualitas.	<p>A. Persentase realisasi dan keterlaksanaan seluruh pelaksanaan tindakan pelaksanaan, pelaksanaan, sistem administrasi dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.</p> <p>B. Persentase tingkat kualitas Laporan Keuangan SPKKS secara triwulan, semester dan tahunan.</p> <p>C. Persentase keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	100%	100%	100%	100%	50	10	14	13
				100%	100%	100%	100%	50	10	14	13
TOTAL ALOKASI								708	858	835	1073

11/01/2013

Matrik 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAP						ALOKASI			KBT	
			2013	2014		2015		2013	2014		2015		
				2011	2012	2013	2014		2011	2012			2013
3386	Pengembangan Kurikulum Pembelajaran dan Penelitian Berbasis Riset	Indeks Kualitas Pembelajaran (IKP)	1	5	1	5	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Indeks Pengembangan Pembelajaran	1				1,3						
3397	Fondasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	14	14	14	14	3,5	3,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
3409	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	1	1			1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3479	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3481	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3482	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3483	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3484	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3485	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3486	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3487	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3488	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3489	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3490	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3491	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3492	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3493	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3494	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3495	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3496	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3497	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3498	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3499	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3500	Litbang dan Inovasi	Indeks Kualitas dan Pengembangan	2	2	2	2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

II_M079-2

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARUHAN						KBT		
			RENTANSA 2013	PEMBANGUNAN JASU		RENTANSA 2013	PEMBANGUNAN MENU				
				2011	2012		2011	2012			
3404	Penelitian Farmasi	jumlah publikasi ilmiah	70	77	75	77	2,2	2,7	2,7	2,7	F
3405	Penelitian Elektronika dan Teknik Material	jumlah publikasi ilmiah	-	1	-	1	2,5	6,6	8,5	8,5	F
3406	Penelitian Teknologi	jumlah buku/dicetak/monografi/kegiatan internasional dan pers. internasional jumlah kegiatan riset/abstrak/tesis	-	1	-	-	4,0	4,6	2,9	2,9	F
3407	Penelitian Farmasi	jumlah contoh produk	2	2	2	2	0,0	1,0	1,0	1,0	F
3408	Penelitian dan Pengembangan IT	jumlah publikasi internasional	-	1	-	-	2,0	2,5	2,5	2,5	F
3409	Penelitian dan Pengembangan IT	jumlah publikasi internasional	7	7	7	7	1,0	1,0	2,5	2,5	L
3410	Penelitian Matematika	jumlah publikasi internasional	5	7	3	7	5,0	6,6	1,5	1,5	F
3411	Penelitian Kimia	jumlah publikasi internasional	2	1	2	1	1,0	1,8	1,0	1,0	L
3412	Penelitian Biologi	jumlah publikasi internasional	2	2	2	1	1,5	1,7	1,5	1,5	L
3413	Penelitian Biologi	jumlah publikasi internasional	10	11	10	11	1,5	2,5	2,5	2,5	L
3414	Penelitian Biologi	jumlah publikasi internasional	-	1	-	-	2,0	2,5	0,0	0,0	F
3415	Penelitian Biologi	jumlah publikasi internasional	-	-	-	-	42,5	12,1	8,8	8,8	F

Matrik 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

No	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	RENTANSA 2013	TANGKAP			ALOKASI			KBT
				PEMBANGUNAN PASUKAN			RENTANSA 2013	PEMBANGUNAN PASUKAN		
				2011	2015	2016		2011	2015	
		jumlah dana yang akan disalurkan dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	1	1	5,0	2,5	2,5	Y	
		jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	1	1	3,0	1,5	1,5	Y	
		jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	1	1	1,0	1,0	1,0	Y	
		jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	1	1	1,5	1,0	1,0	Y	
		jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	1	1	1,5	0,8	0,8	Y	
3433	Penelitian Fisika	jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	1	1	5,0	2,5	2,5	Y	
3434	Penelitian Teknologi dan Mekatronik	jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4	1	1	5,0	2,5	2,5	Y	
		jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	1	1	0,5	0,2	0,2	Y	
		TUJUAN/ALOKASI/FAKUS				877,0	755,6	755,6		

II_M1073

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PERANGKUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	REVISI				TARUHT				ALOKASI				KBT
			2013				2013-2016				2013-2016				
			Revisi	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
000 01	DUKUNGAN MANAJEMEN SAKSI TEKNOLOGI GAS TENNIS LAINNYA														
3434	Melaksanakan dan memfasilitasi praktik														
		Indikator Standar Nasional Pendidikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3435	Pengembangan Pembelajaran Teknologi														
		Indikator Kemampuan dan Pengetahuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
000 06	KELOLAAN PERANGKUAN DAN PERANGKUAN DAN PERANGKUAN														
3435	Pengembangan Aplikasi Pembelajaran dan Zaman														
		Indikator Standar Nasional Pendidikan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Indikator Kemampuan dan Pengetahuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAP					ALOKASI			KET
			Revisi 2013	Praktis dan Maju			Alokasi 2013	Praktis dan Maju			
				2013	2015	2016		2014	2015	2016	
3436	Pasokan Bahan Baku Uranium	Tingkat Pelaksanaan PPTN	1	1	1	36,4	39,4	38,4	36,3	37,3	N
		Dokumen perencanaan dan pelaksanaan (Jadwal)	1	1	1	30,3	29,4	29,7	29,7	29,7	R
3437	Pembelajaran, Penelitian, Teknologi Nuklir	Tingkat Pelaksanaan Pembelajaran Kejuruan Teknologi Nuklir	1	1	1	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	D
3439	Penyusunan Kebijakan, Penelitian, Pengembangan Program Energi Nuklir	Tingkat Pelaksanaan Penelitian, Penelitian, Pengembangan Program Energi Nuklir	1	1	1	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	D
		Tingkat Pelaksanaan Penelitian, Penelitian, Pengembangan Program Energi Nuklir	1	1	1	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	N
		Tingkat Pelaksanaan Penelitian, Penelitian, Pengembangan Program Energi Nuklir	1	1	1	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	D
3439	Penyusunan Kebijakan, Penelitian, Pengembangan Program Energi Nuklir	Tingkat Pelaksanaan Penelitian, Penelitian, Pengembangan Program Energi Nuklir	1	1	1	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	R

II. M092-2

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PERANGKINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	REVISI				TAHAP					ALOKASI			KET	
			2013	Praktis dan Maju			2013	Praktis dan Maju			2014	Praktis dan Maju				
				2013	2015	2016		2013	2015	2016		2015	2016			
3431	Pengembangan Teknologi Pendidikan Sarana dan Prasarana	Terdah Debuana, Pengembangan Teknologi Pendidikan Sarana dan Prasarana	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3435	Pengembangan Perakapan dan Perangkitan	Terdah Debuana, Pengembangan Perangkitan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3442	Pengembangan Teknologi dan Sistem	Terdah Debuana, Pengembangan Teknologi dan Sistem	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3434	Pengembangan Teknologi dan Sistem	Terdah Debuana, Pengembangan Teknologi dan Sistem	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3437	Pengembangan Teknologi dan Sistem	Terdah Debuana, Pengembangan Teknologi dan Sistem	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3445	Pengembangan Teknologi dan Sistem	Terdah Debuana, Pengembangan Teknologi dan Sistem	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3447	Pengembangan Teknologi dan Sistem	Terdah Debuana, Pengembangan Teknologi dan Sistem	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

II. M093-3

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARUET					ALOKASI			KBT
			Revisi 2013	Praktis dan Maju			Alokasi 2013	Praktis dan Maju			
				2013	2015	2016		2014	2015	2016	
		Perubahan dan Pengembangan Teknologi dan Sistem Nuklir, Keamanan, dan Teknologi Kedokteran	1	1	1	20,4	10,8	9,1	10,3	F	
3443	Pengembangan, Penelitian, dan Penyuluhan Kelembagaan dan Kelembagaan	Perubahan dan Pengembangan Teknologi dan Sistem Nuklir, Keamanan, dan Teknologi Kedokteran	1	1	1	27,1	43,2	48,5	52,3		
3150	Pengembangan Teknologi dan Kelembagaan Kelembagaan	Perubahan dan Pengembangan Teknologi dan Sistem Nuklir, Keamanan, dan Teknologi Kedokteran	1	1	1	16,4	17,8	19,4	20,3		
		TOTAL ALOKASI PANG	1	1	1	64,0	101,8	116,0	123,0		

II. M093-1

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBAHANGUNAN KEMER TERIAN/LEMBAGA 2013

Kode	Bentuk Kegiatan/ Sistem Kegiatan	Indikator Output	Rencana			Target			Sifat
			2013			2014			
			2013	2014	2015	2014	2015	2016	
	PELAKSANAAN HUKUM DAN MAMPU LINDUNG DAN PERLAKSANAAN HUKUM TEKNOLOGI LAINNYA (PDP)				326,2	342,5	362,5	342,5	
	PROGRAM PENGKUALIFIKASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI				425,4	352,0	352,0	352,0	
3406	Pengujian dan Penerapan Teknologi Terapan/ Industri/ Jasa/ Pertanian/ Teknologi Produk Obat/Bahan	Jumlah laporan teknologi produk di industri dan sektor swasta	1	1	1				
		Pengujian dan Penerapan Teknologi Terapan/ Industri/ Jasa/ Pertanian/ Teknologi Produk Obat/Bahan	1	1	1	4,3	2,9	2,9	3,0
		Kapasitas teknologi nasional di bidang jasa/ industri/ jasa/ pertanian/ teknologi produk obat/bahan	1	1	1	0,4	0,5	0,5	1,0
		Pengujian dan Penerapan Teknologi Terapan/ Industri/ Jasa/ Pertanian/ Teknologi Produk Obat/Bahan	1	1	1	0,3	0,3	0,3	0,3
3409	Pengujian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (Desain dan Pengembangan Laboratorium/ Fasilitas/ Industri/ Jasa/ Pertanian/ Teknologi Produk Obat/Bahan)	Jumlah kegiatan industri/ jasa/ pertanian/ teknologi produk obat/bahan				8,0	-	-	
		Jumlah kegiatan industri/ jasa/ pertanian/ teknologi produk obat/bahan							
		Jumlah kegiatan industri/ jasa/ pertanian/ teknologi produk obat/bahan				5,7	-	-	
3406	Pengembangan PUP/ Niatia Keel								
						6,0	6,0	2,0	2,5
3485	Pengujian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi/ Industri/ Jasa/ Pertanian/ Teknologi Produk Obat/Bahan					5,6	5,6	6,0	6,0

II_M 061-1

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBAHANGUNAN KEMEN TERIAN/LEMBAGA 2013

Kode	Program/Kelembagaan/Instansi	Indikator Kinerja Utama	Rencana			Target			Ses
			2013			2014			
			2013	2014	2015	2014	2015	2016	
3501	Kegiatan dan Penerapan Teknologi	Jumlah kegiatan teknologi yang dihasilkan dan kerangka regulasi yang mendukung.	1	1	1	13,0	13,0	13,0	0
			1	1	1	0,7	0,0	-	-
		Kegiatan teknologi yang dihasilkan dan kerangka regulasi yang mendukung.	1	1	1	0,6	0,6	1,5	1,5
		Pengembangan teknologi yang dihasilkan dan kerangka regulasi yang mendukung.	1	1	1	10,0	10,0	10,0	10,0
		Pengembangan teknologi yang dihasilkan dan kerangka regulasi yang mendukung.	1	1	1	0,0	0,0	1,5	1,5
3448	Pengembangan Produk Berbasis Teknologi	Jumlah kegiatan teknologi yang dihasilkan dan kerangka regulasi yang mendukung.	1	1	1	4,5	6,5	-	0
		Pengembangan teknologi yang dihasilkan dan kerangka regulasi yang mendukung.	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5
3511	Teknologi Pembelajaran dan Mitigasi Bencana	Jumlah kegiatan teknologi yang dihasilkan dan kerangka regulasi yang mendukung.	1	1	1	2,5	2,5	2,5	2,5

MATRIX 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEPARTEMEN PERTANIAN DAN SERTA KELOMPOK NASIONAL (LAPOR)

Kode	Kegiatan	Indikator	Rencana			Target			Molitor			Ke.
			2013	2011	2012	2011	2012	2013	2013			
									2013	2013		
		3.	100	1000	1000	2000						
		4.	1	1	1	1						
		5.	1	1	1	1						
		6.	1	1	1	1						
		7.	1	1	1	1						
		8.	1	1	1	1						
		9.	1	1	1	1						
		10.	1	1	1	1						
		11.	1	1	1	1						
		12.	1	1	1	1						
		13.	1	1	1	1						
		14.	1	1	1	1						
		15.	1	1	1	1						
		16.	1	1	1	1						
		17.	1	1	1	1						
		18.	1	1	1	1						
		19.	1	1	1	1						
		20.	1	1	1	1						
		21.	1	1	1	1						
		22.	1	1	1	1						
		23.	1	1	1	1						
		24.	1	1	1	1						
		25.	1	1	1	1						
		26.	1	1	1	1						
		27.	1	1	1	1						
		28.	1	1	1	1						
		29.	1	1	1	1						
		30.	1	1	1	1						
		31.	1	1	1	1						
		32.	1	1	1	1						
		33.	1	1	1	1						
		34.	1	1	1	1						
		35.	1	1	1	1						
		36.	1	1	1	1						
		37.	1	1	1	1						
		38.	1	1	1	1						
		39.	1	1	1	1						
		40.	1	1	1	1						
		41.	1	1	1	1						
		42.	1	1	1	1						
		43.	1	1	1	1						
		44.	1	1	1	1						
		45.	1	1	1	1						
		46.	1	1	1	1						
		47.	1	1	1	1						
		48.	1	1	1	1						
		49.	1	1	1	1						
		50.	1	1	1	1						
		51.	1	1	1	1						
		52.	1	1	1	1						
		53.	1	1	1	1						
		54.	1	1	1	1						
		55.	1	1	1	1						
		56.	1	1	1	1						
		57.	1	1	1	1						
		58.	1	1	1	1						
		59.	1	1	1	1						
		60.	1	1	1	1						
		61.	1	1	1	1						
		62.	1	1	1	1						
		63.	1	1	1	1						
		64.	1	1	1	1						
		65.	1	1	1	1						
		66.	1	1	1	1						
		67.	1	1	1	1						
		68.	1	1	1	1						
		69.	1	1	1	1						
		70.	1	1	1	1						
		71.	1	1	1	1						
		72.	1	1	1	1						
		73.	1	1	1	1						
		74.	1	1	1	1						
		75.	1	1	1	1						
		76.	1	1	1	1						
		77.	1	1	1	1						
		78.	1	1	1	1						
		79.	1	1	1	1						
		80.	1	1	1	1						
		81.	1	1	1	1						
		82.	1	1	1	1						
		83.	1	1	1	1						
		84.	1	1	1	1						
		85.	1	1	1	1						
		86.	1	1	1	1						
		87.	1	1	1	1						
		88.	1	1	1	1						
		89.	1	1	1	1						
		90.	1	1	1	1						
		91.	1	1	1	1						
		92.	1	1	1	1						
		93.	1	1	1	1						
		94.	1	1	1	1						
		95.	1	1	1	1						
		96.	1	1	1	1						
		97.	1	1	1	1						
		98.	1	1	1	1						
		99.	1	1	1	1						
		100.	1	1	1	1						

1111002.3

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEPARTEMEN PERTANIAN DAN SERTA KEMERDEKAAN NEGARA (LAPORAN)

Kode	Kegiatan	Indikator	Rencana 2013		Target						Rencana 2013	Molok			Ke.		
			2013	2013	2011		2012		2013			2013	2013			2013	
					2011	2012	2013	2013	2013	2013			2013	2013			
	Pengembangan Sistem Kuis Bas (PKB) / Penguatan dan Zonasi dan Inovasi pada anjungan dan rumah kaca, tempung		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		1. Jumlah kode produksi yang terakreditasi oleh pemerintah pusat	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
		2. Jumlah zona iklim yang ada di anjungan rumah kaca dan tempung	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		3. Jumlah rumah kaca yang terakreditasi	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		4. Jumlah rumah kaca yang terakreditasi di anjungan rumah kaca	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
		5. Jumlah rumah kaca yang terakreditasi di rumah kaca	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		6. Jumlah rumah kaca yang terakreditasi di rumah kaca	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
		7. Jumlah rumah kaca yang terakreditasi di rumah kaca	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		8. Jumlah rumah kaca yang terakreditasi di rumah kaca	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
		9. Jumlah rumah kaca yang terakreditasi di rumah kaca	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		10. Jumlah rumah kaca yang terakreditasi di rumah kaca	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEPARTEMEN PERTANIAN DAN SATEKREKAS NAGRIKAL (LKP/PT)

Kode	Kegiatan	Indikator	Rencana 2013			Target			Molitor			Ke.
			2013	2011		2013	2013		2013	2013		
				2011	2012		2013	2013		2013	2013	
	Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Masyarakat di Bidang Pertanian		1	5	1	7						
		1. Jumlah kegiatan pelatihan dan pembinaan masyarakat di bidang pertanian yang diselenggarakan	1	5	1	7						
		2. Jumlah petani yang dibina dan dilatih	1	5	1	7						
		3. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian	1	5	1	7						
		4. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang berkualitas	1	5	1	7						
		5. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang berkelanjutan	1	5	1	7						
		6. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang bernilai tambah	1	5	1	7						
		7. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang memiliki daya saing	1	5	1	7						
		8. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang memiliki daya saing yang berkelanjutan	1	5	1	7						
		9. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang memiliki daya saing yang berkelanjutan dan bernilai tambah	1	5	1	7						
		10. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang memiliki daya saing yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang berkelanjutan	1	5	1	7						
		11. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang memiliki daya saing yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan	1	5	1	7						
		12. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang memiliki daya saing yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan	1	5	1	7						
		13. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang memiliki daya saing yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan	1	5	1	7						
		14. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang memiliki daya saing yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan	1	5	1	7						
		15. Jumlah petani yang dibina dan dilatih yang menghasilkan produk pertanian yang memiliki daya saing yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang berkelanjutan	1	5	1	7						
		TOTAL AKTIVITAS PADI	5	6	6	6						
			522135	522135	522135	522135						
												522135

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	URUTAN/REDAKSI PROBLEMS	SUBSIDI	KENDALA	TANGGAL				ALIRAN WILAYAH KEMAHAM					
				JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	DESEMBA		2014	2015	2016	
								2013	2013				
			34	-	1	1	2	2	2	3	3	3	3
			2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2
			-					34					
			405	120	102	100	120	30	20	15	20	15	20
			108	10	8	8	10	8	8	10	8	8	10
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RIK. 2.3.2

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KELENTERAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	URUTAN/RELEAKS PROBLEMA	SIMPULAN	KELOMPOK	BENCANA				TANPA				ALIRAN (WILAYAH RIWAYAH)				
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
1	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan	Kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan kelembagaan/kelembagaan
TOTAL																

Hal. 3 dari 5

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target				Alokasi				
			Rencana 2013	Pencapaian Maju		Rencana 2013	Pencapaian Maju				
				2014	2015		2014	2015	2014	2015	
034.06	Pengembangan Standar Nasional Nasional							80,9	80,9	80,9	80,9
353	Pengembangan sistem Standar Nasional Keseluruhan							9,4	10,3	11,1	11,1
		Jumlah Dokumen perancangan Evidensi, Model, Standardisasi & templat, Kesesuaian	1	4	1			9,4	10,3	11,1	11,1
353	Pendataan dan Penayatabatan Standardisasi							14,1	15,5	17,1	17,1
		Jumlah pelaksanaan seminar, jumlah kegiatan sosialisasi	6	4	4			7,0	8,7	9,5	9,5
		Jumlah kegiatan sosialisasi	6	4	4			2,6	3,3	3,7	3,7
		Jumlah partisipasi masyarakat Standardisasi dalam pengelompokan Standardisasi	300	1.340	1.400			2,6	2,6	2,6	2,6
3.660	Perumusan Standar							1,1	1,2	1,2	1,2
		Jumlah kebirokrasi perumusan standar	2	3	2			0,8	0,8	0,8	0,8
		Waktu & biaya pelaksanaan SNI	20	14	18			1,4	1,4	1,4	1,4
		Jumlah sumber daya perumusan standar	60	600	600			0,9	0,9	0,9	0,9

II.3.M.014-1

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi		
			Rencana 2013	Pencapaian Maju			Rencana 2013	2014		2015
				2014	2015	2016		2014	2015	
		8. 1) 1) yang dapat memenuhi persyaratan Sistemman Standar Nasional	27	28	28	31	10	10	10	10
		jumlah BSN yang difasilitasi pemerintah agar mematuhi dengan standar internasional	70	83	83	80	25	25	28	30
3-61	Memperluas jaringan standar	jumlah lebih dari pengembang standar pemerintah BSN dan penelitian keasetilab	5	5	5	5	10	17,0	12,5	20,4
		jumlah ITW yang mendapat fasilitas untuk memperoleh Lisensi Produk dan memajukan standar pertanya	23	27	27	23	22	22	22	22
		jumlah industri/ perusahaan yang mendapat fasilitas pengembangan standar/SP	70	100	100	110	7,7	2,2	2,2	3,3
		jumlah anggota lembaga SN yang dilatih/ kelas pembuat kelas/ pelaksanaan SN dan diluluskan pada saat ini/ selesai	8	8	R	R	2,4	2,4	2,4	2,4
		BSN yang difasilitasi untuk dilatih/ menjadi guru dan teknis baru/ asisten teknis/ adopsi BSN menjadi regulasi teknis	10,2	100	100	100	0,5	0,5	0,5	0,7

MATRIK 2.3. RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Rencana			Target			Alokasi			
			2013	2014	2015	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
084.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN								35,6	48,0	48,0	48,0
084.02	Program Pendekatan bersama Dan Prasarana Aparatur BSN								0,9	1,2	1,2	1,2
TOTAL ALOKASI PACU									96,0	130,1	130,1	130,1

II. GAMBAR 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 ANTIKORUPSI DAN TRANSPARANSI
 RENCANA TINDAK PEMERINTAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2011

KODE	MENDASAS/ASPEK/INDIKATOR	SOLUSI/UPAYA	Lokasi	Rencana 2011		Rencana 2012		Rencana 2013		Kendala	Monev
				2011	2012	2012	2013	2013	2014		
2034	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1		
					1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		
					1.3	1.3	1.3	1.3	1.3		
2034	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1		
					2.2	2.2	2.2	2.2	2.2		
					2.3	2.3	2.3	2.3	2.3		
2034	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1		
					3.2	3.2	3.2	3.2	3.2		
					3.3	3.3	3.3	3.3	3.3		

ANTRON 2.3. BENCANA TIMBANG PEMBAHNGUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2011
KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TES AGA MULIAH (BAPETRI)

KODE	PROJEK/SALINAN/INSTRUMEN/ALAT	Jumlah	Unit	Lampai			Alokasi (Rp) (dalam instruksi)			Sal													
				2011	2014	2015	2011	2014	2015														
2011	KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS TES AGA MULIAH (BAPETRI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
											-	-	-	-	-	-	-						
																		-	-	-	-	-	-
TOTAL ALOKASI PAGU																							

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NO	PROGRAM / REGISTAR / PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (MILIAU Rp)													
				REVENJA		PILGRIH MAJU			REVENJA		REGISTAR PRIORITAS/KL											
				2013	2016	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2015	2016								
1.	2012-2014 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik 10. Peningkatan kualitas pelayanan publik 	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2.	2012-2014 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik 9. Peningkatan kualitas pelayanan publik 10. Peningkatan kualitas pelayanan publik 	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NO	PROGRAM / REGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (MILIAU Rp)			
				REVENJA 2013	2014	2015	2016	REVENJA 2013	2014	2015	2016	2015
1.	2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100	<p>1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik di instansi pemerintah RI</p> <p>2. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik di instansi pemerintah RI</p>	<p>1. Jumlah layanan publik yang terlayani</p> <p>2. Jumlah layanan publik yang terlayani</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>

Matriks 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NO	PROGRAM / REGISTRIAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA		TARGET				ALOMASI (MILYAR Rp)					
				2013	2014	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
		1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan kualitas dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) serta meningkatkan profesionalitas dan kompetensi ASN	1. Jumlah PNS tetap di lingkungan L.A.N. 2. Jumlah PNS yang masuk ke dalam L.A.N. 3. Jumlah PNS yang keluar dari L.A.N. 4. Jumlah PNS yang meninggal dunia 5. Jumlah PNS yang pensiun 6. Jumlah PNS yang meninggal dunia 7. Jumlah PNS yang meninggal dunia 8. Jumlah PNS yang meninggal dunia	82%											
		2. Meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) melalui peningkatan profesionalitas dan kompetensi ASN	1. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 2. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 3. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 4. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 5. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 6. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 7. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 8. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	82%											
		3. Meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) melalui peningkatan profesionalitas dan kompetensi ASN	1. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 2. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 3. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 4. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 5. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 6. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 7. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 8. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	82%											
		4. Meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara (ASN) melalui peningkatan profesionalitas dan kompetensi ASN	1. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 2. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 3. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 4. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 5. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 6. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 7. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan 8. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	82%											

L.A.N. 2013-4

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NO	PROGRAM / REGIATIAN PRIORITY	SASUDAR	INDIKATOR	TARGET								
				REVENJA 2013	2014	2015	2016	REVENJA 2013	2014	2015	2016	
2	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Jumlah keluhan dan pengaduan yang ditanggapi	100%								
3	2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik	Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik	2. Jumlah keluhan dan pengaduan yang ditanggapi	100%								
4	3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	3. Jumlah keluhan dan pengaduan yang ditanggapi	100%								
5	4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	4. Jumlah keluhan dan pengaduan yang ditanggapi	100%								
6	5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik	5. Jumlah keluhan dan pengaduan yang ditanggapi	100%								
ALOKASI LEMBAR ADMINISTRASI NEGARA				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
ALOKASI LEMBAR ADMINISTRASI NEGARA				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	

13/01/2013

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBIANGUNAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013

NO	URUTAN/ KEGIATAN/ UPOKRES	HASIL/AN	INDIKATOR	TUJUAN				ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
				REWALAS 2012	PRASARANA/PAU			MUSKADA 2013	MUSKADA 2014		
					2013	2014	2015		2016	2013	2014
1.	1.1. Mengembangkan sistem budaya perusahaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi dan pengabdian masyarakat	Meningkatnya kualitas budaya, kinerja, produktivitas, disiplin, integritas, dan pengabdian masyarakat organisasi	1.1.1. Jumlah laporan pelanggaran disiplin	5.000.000	15 juta/di awal program	15	12	2,5	2,5	0	
U	1.1.1.1. Mengembangkan sistem budaya perusahaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi dan pengabdian masyarakat	1.1.1.1.1. Jumlah laporan pelanggaran disiplin	1.1.1.1.1.1. Jumlah laporan pelanggaran disiplin	1.000.000	1.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1	1.1.1.1.1. Mengembangkan sistem budaya perusahaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi dan pengabdian masyarakat	1.1.1.1.1.1. Jumlah laporan pelanggaran disiplin	1.1.1.1.1.1.1. Jumlah laporan pelanggaran disiplin	200.000	200.000	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1.1	1.1.1.1.1.1. Mengembangkan sistem budaya perusahaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi dan pengabdian masyarakat	1.1.1.1.1.1.1. Jumlah laporan pelanggaran disiplin	1.1.1.1.1.1.1.1. Jumlah laporan pelanggaran disiplin	50.000	50.000	100%	100%	100%	100%	100%	

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBIANGUNAN KEMENTERIAN / LEMDAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMDAGA : ASRI

NO	INDIKATOR/URUTAN/URUTAN	SASARAN	INDIKATOR	REWALAN 2012	TUJUAN			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)		
					2013	2014	2015	2013	2014	2015
1.	Unit Layanan Strategis	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indikator: Jumlah P. 10/ PKB/ Baku yang diterbitkan dan dilaksanakan	515 Kab/ Kota	192 Kab/ Kota	30 Kab/ Kota	30	2,6	30	1,0
		Kelembagaan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indikator: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	17 Kota/ Kab	14 Kota/ Kab		~	1,5		
2.	Unit Layanan Strategis	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indikator: Jumlah P. 10/ PKB/ Baku yang diterbitkan dan dilaksanakan	351 Kota/ Kab	301 Kota/ Kab	30 Kota/ Kab	30	3,1	30	1,0
ALOKASI BERSIFAT ASOSIAL REPUBLIK INDONESIA 2011/2014							152,8	422,3	103,4	2,167

31.01.14

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PENGANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DAIRAH KOPERAHWAJATAN NEGARA (DIK)

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKSIVOK	RPNP ANS		TARGET				AKHIRAS/TAHUN BERTALAH					
				2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
T	PROGRAM PENGUNGAN MANAJEMEN DAN SALAKANGUN, LOAS TUKSI LAKSANA BERH	Melakukan monitoring, evaluasi, pemantauan, penilaian dan laporan. Memberikan dukungan administratif di tingkat provinsi.	1. Meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	72%	100%	72%	100%	72%	100%	72%	100%	72%	100%	72%	100%
L	PASUKAN DAN BERKALAN BARUKA DAN PRASARANA BERKALAN	Menyediakan peralatan, perlengkapan dan perlengkapan sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	1. Meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.	72%	100%	72%	100%	72%	100%	72%	100%	72%	100%	72%	100%

DLM088-1

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PENGANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DAIRAH KEPERAWATAN NEGARA (DKN)

NO	PROGRAM/KELENGKAPAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKSIKOR	RINCIAN RENCANA 2013		TARUPT				RENCANA 2013		PEKERJAAN UMUM		
				2013	2014	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2013	2014	
			<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di DKN 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di DKN 											
1.	PROGRAM POKOK/KELENGKAPAN MANAJEMEN KEPERAWATAN	Tawar-menawar, komunikasi, dan kerjasama dengan profesi lain, organisasi profesi, dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di DKN 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di DKN 								12,1	11,7	118,1	28,4
			<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di DKN 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di DKN 											

LM.088-2

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PENGANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DAIRAH KEPERAWATAN NEGARA (DKN)

NO	PILORGRAM/ KELENGKAPAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKSIKOR	RPS/ANS 2013		TARGET PENGAKSIAN RIJAL			RENCANA 2013		SIKORAS (DIBYAR) BUDJARI		
						2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
						2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
			<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya Tim BKK (klinik) dan terwujudnya PMS yang lebih berkembang pada level rumah sakit. Perencanaan strategis, pemenuhan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PMS dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 			100%							
			<ul style="list-style-type: none"> Realisasi PMS berbasis bukti dan berbasis penelitian di rumah sakit. 			100%							
			<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya PMS berbasis bukti dan berbasis penelitian di rumah sakit. 			100%							
			<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya PMS berbasis bukti dan berbasis penelitian di rumah sakit. 			100%							

LM.088-3

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PENGANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DAIRAH KEPERAWATAN NEGARA (DKN)

NO	PROGRAM/KELENGKAPAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKSIKOR	RENCANA 2013		TARUPT		RENCANA		RENCANA	
				2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
			<p>1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya, serta perlu pengembangan layanan kesehatan jiwa.</p> <p>2. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya, serta perlu pengembangan layanan kesehatan jiwa.</p>								
			<p>Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya, serta perlu pengembangan layanan kesehatan jiwa.</p>								
			<p>Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya, serta perlu pengembangan layanan kesehatan jiwa.</p>								
			<p>Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya, serta perlu pengembangan layanan kesehatan jiwa.</p>								
			<p>Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Sukoharjo dan sekitarnya, serta perlu pengembangan layanan kesehatan jiwa.</p>								

:LM.088-

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PENGANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DAIRAH KEPERAWATAN NEGARA (DKN)

NO	PROGRAM/KELENGKAPAN PRIORITY	SASARAN	INDUKSIKOR	RPTG ANS 2013		TARGET			SIKREASI (MUSYAWIRAH)			
				2013	2013	2013	2014	2015	2016	2014	2015	
			<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 		95%						
			<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 		95%						
			<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 		95%						
			<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 		95%						
			<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 		95%						
			<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, kegiatan, dan kebijakan kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi indikator kesehatan 		95%						

LM.088-3

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PENGANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DAIRAH KEPERAWATAN NEGARA (DKN)

NO	PROGRAM/KELENGKAPAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKSIKOR	TARGET				SIKLIKAS (Tahun Budget)	
				RPKP 2013	2014	2015	2016	2014	2015
			<ul style="list-style-type: none"> • "Tumbuh dan Berkembang" • "Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan" 	100%	100%	100%	100%		
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas, mutu, dan efisiensi pelayanan kesehatan 	100%	100%	100%	100%		
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas, mutu, dan efisiensi pelayanan kesehatan 	100%	100%	100%	100%		
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas, mutu, dan efisiensi pelayanan kesehatan 	100%	100%	100%	100%		
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas, mutu, dan efisiensi pelayanan kesehatan 	100%	100%	100%	100%		
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas, mutu, dan efisiensi pelayanan kesehatan 	100%	100%	100%	100%		
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas, mutu, dan efisiensi pelayanan kesehatan 	100%	100%	100%	100%		

2012-088-0

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PENGANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DAIRAH KEPERAWATAN NEGARA (DKN)

NO	PILORGRAM/KELENGKAPAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKSIKOR	RPNP ANS 2013			TARUPT			SI PRKASHI (DKN) DAN BUNTAJI			
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan keperawatan di SRS, SRS dan Puskesmas (SRS, SRS)	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan di SRS, SRS dan Puskesmas	Amplifikasi pelayanan keperawatan di SRS, SRS dan Puskesmas	90.4.600.000	903.666.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
2	Pelaksanaan standar dan prosedur pelayanan keperawatan di SRS, SRS dan Puskesmas (SRS, SRS)	Terwujudnya standar pelayanan keperawatan di SRS, SRS dan Puskesmas	Amplifikasi pelayanan keperawatan di SRS, SRS dan Puskesmas	90.4.600.000	903.666.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000

LM.088-7

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PENGANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGILASAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKSIKOR	RPNP ANS			TARGET			DI PERAKH (MILYAR RUPIAH)				
				2013	2014	2015	2014	2015	2016	2014	2015	2016		
													RENCANA	2014
3	Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan	- Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan - Meningkatkan layanan kesehatan	- Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan - Meningkatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan	- Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan - Meningkatkan layanan kesehatan	- Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan - Meningkatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

..LM.088-8

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PENGANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DAIRAH KEPERAWATAN NEGARA (DKN)

NO	PILORGRAM/ KELESTARIAN PRIORITAS	SASARAN	INDUKSIKOR	RPNP ANS 2013	TARGET			RENCANA		SI POKAS (DIBYAR) BUDGET			
					2014	2015	2016	2014	2015	2014	2015		
			Amplifikasi dan Revisi Kurikulum Perawatan 1222-2-2008	1	-	-	-						
			Amplifikasi dan Revisi Kurikulum Perawatan 1222-2-2008	1	-	-	-						
TOTAL ALOKASI										173.4	552.30	481.00	552.22

DI.M.288-10

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SARAN	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI DOLLAR RUPIAH				
				RENCANA 2013		PERSINGKAS MAJU		RENCANA 2013		RENCANA				
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016			
1.	PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEWANGAN NEGARA DAN PERUBAHAN PENYELAKSIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERA PEMERINTAH	- Melakukan kualitas pengendalian, pengawasan internal, akuntabilitas keuangan negara dan penyediaan penyelenggaraan AUP pada Kementerian/Lembaga Bidang, Perekonomian	- Persentase hasil tugas/wasas tugas sektor yang dijalankan selalu positif dan kepuasan stakeholder - Persentase hasil tugas/wasas berdasarkan jumlah kegiatan yang diidentifikasi dan pengalihan keunit/instansi terkait yang dapat ditindaklanjuti - Persentase masalah yang ditindaklanjuti - Persentase temuan yang mempunyai implikasi optimal volume APBD Tingkat opini P3 yang ditetapkan KPP Persentase pengkajian pelaksanaan anggaran dan hasil yang terdapat - Persentase hasil pengendalian atas permasalahan stakeholder yang diidentifikasi dan penyelesaian oleh stakeholders - Persentase jumlah laporan audit atas anggaran APN yang opini baik dan WJ	85%	90%	95%		2200	3172	3489	3828			

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI MILIAR RUPIAH				
				RENCANA		PRAKIRAN MAJU		RENCANA		PRAKIRAN MAJU			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016		
		Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan publik masyarakat miskin di kota-kota besar, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduknya (KIP) pada Kementerian/ Lembaga/Bidang/ Direktorat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil pengamatan lintas sektor yang dilakukan melalui pengabdian masyarakat oleh stakeholders - Persentase hasil pengawasan terhadap seluruh program yang diadopsi baik yang pengabdian masyarakat - Persentase kunjungan ke lokasi sasaran - Jumlah kearifan lokal - Persentase "kemudahan" yang diperoleh optimal minimal 70% 	80%	90%	95%							
			<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peninjauan/ pemantauan langsung di lokasi sasaran - Persentase hasil pengawasan atas seluruh stakeholder yang diadopsi baik yang pengabdian masyarakat 	90%	90%	95%							

ILL.M.009.2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BDKP

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI MILILIR BUKHAI				
				PRASIKRAN MAJU			RENCANA				
				2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik masyarakat miskin di kota-kota besar, terutama di kawasan kumuh yang dikelola Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil capaian nilai kritis sektor yang dikelola melalui program/pilotan khususnya oleh stakeholders - Persentase hasil capaian waktu ketundaan pelayanan publik yang diadopsi dari nilai pengalihan kapulitansi oleh Pemerintah Daerah - Persentase masalah yang dituliskan dan selesai - Persentase kemutakhiran data yang dilaporkan oleh instansi/ unit - Persentase hasil capaian area pelayanan stakeholder yang diadopsi secara berkelanjutan khususnya oleh stakeholder - Jumlah TPO yang melakukan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal/ Pelayanan Prima 	80%	90%	95%					
		Meningkatnya K/L dan Peruda yang mampu membangun UP secara berkelanjutan yang selaku	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase K/L dan Peruda yang mampu membangun UP secara berkelanjutan yang selaku 	30%	35%	40%					

ILL.M.009.3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BDKP

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET									
				RENCANA			PRAKIRAN MAJU			ALOKASI MILIAR RUPIAH			
				2013	2014	2015	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
		Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan terpadu masyarakat miskin di Kota dan Kabupaten sebagai bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan E-1 (Peta Budaya Lokal) di Kota, Kabupaten, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<p>Perantaraan TIDAK/BUKTI/DIRMILIK yang GIC ATAK/KU yang tidak terakumulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% yang diketahui - 100% yang diketahui <p>Persentase hasil pengujian di lintas sektor yang dijabarkan dalam program dan pelaksanaan oleh stakeholders</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil pengujian keberhasilan dalam kegiatan yang di adakan dalam pelaksanaan kegiatan oleh Kantor Yogyakarta - Persentase ELM yang hanya 50% nya baik - Persentase ELM yang laporan kemampuan yang telah terakumulasi di Kota - Persentase masalah yang di raih dan terakumulasi 	85%	75%	85%							

ILL.M.009

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BDKP

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI MITRAB RUPAH		
				PRAKIRAN MAJU			RENCANA		
				2013	2014	2015	2013	2014	2015
		Meningkatkan jumlah dan kualitas anjak piutang di era kekinian	<ul style="list-style-type: none"> - IPY/TD/TC/MV/BKPD berisiko tinggi yang memperoleh manfaat - IPY/TD/TC/MV/BKPD yang menyalahgunakan, keliru, dan - Persentase penyelesaian kasus - HKU.Mutu dan keselamatan - Persentase penyelesaian kasus - Rata-rata jumlah anjak piutang yang dibayar oleh instansi - Persentase jumlah anjak piutang yang ditanggung oleh instansi yang dipungut - Rata-rata jumlah anjak piutang yang dibayar oleh instansi - Persentase mutasi anjak piutang 	77%	80%	85%			
				13	14	15			
				6	7	7			
				80%	85%	90%			
				97%	98%	92%			
				10%	50%	50%			
				87%	90%	92%			
				15%	20%	25%			
				72%	75%	80%			

ILL.M.009.5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI MILIAR RUPIAH			
				PENCAPAIAN			PRAKIRAAN MAJU			RENCANA		PRAKIRAAN MAJU	
				2013	2014	2015	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1.	Program dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur sipil negara dan pejabat pemerintahan/lembaga/institusi	Terdapat orang-orang yang mempunyai integritas	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat laporan yang BPKP terbitkan Pendidikan "Keris" dan "Keris" sebagai SOP Terdapat KPI dan Perda yang terdapat dalam organisasi Terdapat KPI dan Perda yang terdapat dalam organisasi Terdapat laporan yang BPKP terbitkan 	5	7	5	5	5	5	11,7	18,7	20,6	21,6
2.	PROGRAM DIRINGKAS MAMBAHAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPKP	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas teknis lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Persentase jumlah rencana pelaksanaan tugas teknis lainnya Persentase jumlah pegawai TPEP yang mempunyai kualifikasi di setiap bidang, terutama yang ditunjuk Persentase pegawai yang ditunjuk sebagai kepala bidang dan organisasi Persentase pegawai yang ditunjuk sebagai kepala bidang dan organisasi Persentase pegawai yang ditunjuk sebagai kepala bidang dan organisasi 	37%	90%	90%	90%	90%	90%	776,7	724,4	812,0	957,7

ILL.M.009 G

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI MILIAR RUPIAH							
				RENCANA			PRAKIRAN MAJU			RENCANA		PRAKIRAN MAJU					
				2013	2014	2015	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016				
			<ul style="list-style-type: none"> - Persepsi kepatuhan pegawai/pejabat atas perubahan dan kebijakan/budaya - Persepsi perilaku yang positif di bidang TKRP - Indeks efektifitas pengelolaan aset - Persepsi kepatuhan pegawai/pejabat dalam melaksanakan tugas - Persentase timbalelang hasil pengawasan TKRP - Indeks SDM kepatuhan saat kompetensi analisis total modal organisasi publik - Persentase pemanfaatan hasil E-Procure - Tingkat partisipasi publik dalam anggaran publik - Partisipasi publik di RFP yang baik 	8,25 skala ikterik	6,5 skala ikterik	8,75 skala ikterik	8,2 skala ikterik	8,5 skala ikterik	8,5 skala ikterik								
				81%	83%	85%	100%	100%									
				77%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%						
				28%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%						
				20%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%						
				75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%						
				30%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%						

ILL.M.009.7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI MILIAR RUPIAH					
				RENCANA		PRAKIRAN MAJU		RENCANA		PRAKIRAN MAJU		2013	2014	2015	2016
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016				
1	Capaian/ Pencapaian BSP Auditor APD dan penyedia layanan di Gedung Garuda (progres gel. dan nilai gel.)	Meningkatnya kompetensi auditor APD dan penyedia layanan sebagai akibat dari peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan negara	<p>Tingkat persentase sumber dan manfaat pemerintah yang serendah, bisa dimanfaatkan.</p> <p>Terdapat prestasi/sistem inovasi untuk mendorong perubahan dan peningkatan internal kelembagaan BPKP.</p> <p>Terdapat prestasi/sistem Akutal, Akutabilitas, Keselua- ran</p> <p>Jumlah peserta program dipusat jumlah peserta sertifikasi pa jumlah peserta di bidang subsektor.</p> <p>Jumlah peserta pelatihan jumlah peserta pelatihan jumlah paket pelatihan jumlah paket pengantar jumlah paket pelatihan jumlah paket pelatihan jumlah peserta pelatihan</p>	7,7 58%	6.000 70%	8.500 77%	10.000 100%	600 600	1.140 1.140	1.300 962	1.440 962	129,9 172,2	172,2 172,2	172,2 172,2	

ILL.M.009.0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BPKP

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI MILIAR RUPIAH			
				RENCANA 2013	2014	2015	2013	2014	2015	2016
3.	PENYEGUAPAN SASARAN DAN POKOKSARANA APAKAH BPKP	Tercapainya kebutuhan sasaran dan pemenuhan apakah BPKP	Tingkat Ekapasas (partisipasi pemerintah) (skala 1-10)	8,1	0,3	6,5	55,0	222,7	227,8	250,2
							1.057,7	1.282,4	1.426,7	1.571,2

ILL.M.009 9

MATRUKS 2.3 RENCANA TINDAK PERUBAHAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2012

NO	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	NAMA	JURUSAN	31 MARET 2012			31 MARET 2013			31 MARET 2014			31 MARET 2015		
				304	305	306	304	305	306	304	305	306	304	305	306
1	1000/2012/KEP/MB/2012	KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI	KEPUTUSAN MENTERI	302	304	305	302	304	305	302	304	305	302	304	305
2	1000/2012/KEP/MB/2012	KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI	KEPUTUSAN MENTERI	302	304	305	302	304	305	302	304	305	302	304	305
3	1000/2012/KEP/MB/2012	KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI	KEPUTUSAN MENTERI	302	304	305	302	304	305	302	304	305	302	304	305
4	1000/2012/KEP/MB/2012	KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI	KEPUTUSAN MENTERI	302	304	305	302	304	305	302	304	305	302	304	305
5	1000/2012/KEP/MB/2012	KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI	KEPUTUSAN MENTERI	302	304	305	302	304	305	302	304	305	302	304	305
6	1000/2012/KEP/MB/2012	KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI	KEPUTUSAN MENTERI	302	304	305	302	304	305	302	304	305	302	304	305
7	1000/2012/KEP/MB/2012	KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI	KEPUTUSAN MENTERI	302	304	305	302	304	305	302	304	305	302	304	305
8	1000/2012/KEP/MB/2012	KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI	KEPUTUSAN MENTERI	302	304	305	302	304	305	302	304	305	302	304	305
9	1000/2012/KEP/MB/2012	KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI	KEPUTUSAN MENTERI	302	304	305	302	304	305	302	304	305	302	304	305
10	1000/2012/KEP/MB/2012	KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUSUNAN ORGANISASI	KEPUTUSAN MENTERI	302	304	305	302	304	305	302	304	305	302	304	305

KEMENTERIAN KESEHATAN: KEMENTERIAN PERDAGANGAN

K/C	PROGRAM / KEGIATAN / BUDIDAYA / LOKASI	INDIKATOR	2012/2013			2013/2014			2014/2015			2015/2016		
			TUMBUK			TUMBUK			TUMBUK			TUMBUK		
			2012/2013	2013/2014	2014/2015	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2013/2014	2014/2015	2015/2016
III	PUSKESMAS POLDA/STAN/PRATAP PUSKESMAS/STAN/PRATAP KAWILAHYAN/STAN/PRATAP PUSKESMAS	- Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas	30	70	70	300	70	70	300	400	400	400	400	400
			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
			55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
			85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
IV	PUSKESMAS/STAN/PRATAP KAWILAHYAN/STAN/PRATAP PUSKESMAS	- Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
			45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
			55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
V	PUSKESMAS/STAN/PRATAP KAWILAHYAN/STAN/PRATAP PUSKESMAS	- Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas - Jumlah kunjungan ke Puskesmas	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
			55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	
			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
			70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
			75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	

11/11/2012

KEPENTINGAN, LEMBARA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN

K/C	PUSAT KEMENTERIAN PERDAGANGAN	INSTRUMEN	TANGGAL 2012			TANGGAL 2013			RUMAH KUNYU	
			1	2	3	4	5	6	7	8
A	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 100/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 101/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 102/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 103/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
B	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 104/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 105/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 106/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 107/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
C	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 108/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 109/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 110/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 111/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
D	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 112/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 113/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 114/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012
		Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 115/KEP/M-DAG/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012	10/01/2012

11 11 11

KEPENTINGAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN

K/C	URUTAN KELOMPOK	URUTAN SUB KELOMPOK	URUTAN KEGIATAN	TANGGAL			JUMLAH			KEM. PERDAGANGAN	KEM. PERDAGANGAN	KEM. PERDAGANGAN			
				2011	2012	2013	2011	2012	2013						
A	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
B	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
C	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
				7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
				9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

KEPENTINGAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No	URUTAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT KEPUTUSAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN	MATERI	TANGGAL				SALINAN (Sisa Salinan)					
					2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014		
1	1	1000/001/2011	1000/001/2011	Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan Produk Hasil Pertanian dan Produk Industri Dasar yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/Per/Men Perdagangan/2011	1000/001/2011	1000/001/2011	1000/001/2011	1000/001/2011	1000/001/2011	1000/001/2011	1000/001/2011	1000/001/2011	1000/001/2011	1000/001/2011
2	2	1000/002/2011	1000/002/2011	Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan Produk Hasil Pertanian dan Produk Industri Dasar yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/Per/Men Perdagangan/2011	1000/002/2011	1000/002/2011	1000/002/2011	1000/002/2011	1000/002/2011	1000/002/2011	1000/002/2011	1000/002/2011	1000/002/2011	1000/002/2011
3	3	1000/003/2011	1000/003/2011	Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan Produk Hasil Pertanian dan Produk Industri Dasar yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/Per/Men Perdagangan/2011	1000/003/2011	1000/003/2011	1000/003/2011	1000/003/2011	1000/003/2011	1000/003/2011	1000/003/2011	1000/003/2011	1000/003/2011	1000/003/2011
4	4	1000/004/2011	1000/004/2011	Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan Produk Hasil Pertanian dan Produk Industri Dasar yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/Per/Men Perdagangan/2011	1000/004/2011	1000/004/2011	1000/004/2011	1000/004/2011	1000/004/2011	1000/004/2011	1000/004/2011	1000/004/2011	1000/004/2011	1000/004/2011
5	5	1000/005/2011	1000/005/2011	Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan Produk Hasil Pertanian dan Produk Industri Dasar yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/Per/Men Perdagangan/2011	1000/005/2011	1000/005/2011	1000/005/2011	1000/005/2011	1000/005/2011	1000/005/2011	1000/005/2011	1000/005/2011	1000/005/2011	1000/005/2011
6	6	1000/006/2011	1000/006/2011	Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan Produk Hasil Pertanian dan Produk Industri Dasar yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/Per/Men Perdagangan/2011	1000/006/2011	1000/006/2011	1000/006/2011	1000/006/2011	1000/006/2011	1000/006/2011	1000/006/2011	1000/006/2011	1000/006/2011	1000/006/2011
7	7	1000/007/2011	1000/007/2011	Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan Produk Hasil Pertanian dan Produk Industri Dasar yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/Per/Men Perdagangan/2011	1000/007/2011	1000/007/2011	1000/007/2011	1000/007/2011	1000/007/2011	1000/007/2011	1000/007/2011	1000/007/2011	1000/007/2011	1000/007/2011
8	8	1000/008/2011	1000/008/2011	Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan Produk Hasil Pertanian dan Produk Industri Dasar yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/Per/Men Perdagangan/2011	1000/008/2011	1000/008/2011	1000/008/2011	1000/008/2011	1000/008/2011	1000/008/2011	1000/008/2011	1000/008/2011	1000/008/2011	1000/008/2011
9	9	1000/009/2011	1000/009/2011	Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan Produk Hasil Pertanian dan Produk Industri Dasar yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/Per/Men Perdagangan/2011	1000/009/2011	1000/009/2011	1000/009/2011	1000/009/2011	1000/009/2011	1000/009/2011	1000/009/2011	1000/009/2011	1000/009/2011	1000/009/2011
10	10	1000/010/2011	1000/010/2011	Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penghapusan Produk Hasil Pertanian dan Produk Industri Dasar yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/Per/Men Perdagangan/2011	1000/010/2011	1000/010/2011	1000/010/2011	1000/010/2011	1000/010/2011	1000/010/2011	1000/010/2011	1000/010/2011	1000/010/2011	1000/010/2011

KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO	KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN	INDUKSI FOR	TANGGUNG JAWAB				TANGGUNG JAWAB		KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN		
			1	2	3	4	5	6				
I	KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEPENTINGAN, KEMERDEKAAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11 3 3 3 3

KEMENTERIAN KEHUTAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN

K/C	PUSAT	KEMENTERIAN	INDUKSI	TUJUAN	FAKES		KEMUNGKINAN	KEMUNGKINAN	KEMUNGKINAN	KEMUNGKINAN
					2011	2012				
b	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
c	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
d	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	KEMENTERIAN KEHUTAN	KEMENTERIAN PERDAGANGAN

11 31 31

KEMENTERIAN KEHIDUPAN DAN PERUMAHAN RAKYAT

KID	PROGRAM/KEGIATAN/PROJEK/AS	SKALA/LOKASI	INDUKTOR	TAMBAH			ALOKASI (MILLER RUPIAH)				
				PRASISWA 2013			PRASISWA 2014				
				2014	2015	2016	2014	2015	2016		
2	Facilities/amenities - rumah klinis	3.000 unit	jumlah rumah kesehatan	885	1.000	1.000	274,04	350,00	100,00	2016	100,00
5	Programs for health services (Kesehatan Masyarakat) (Rumah sakit/RS) (Rumah sakit/RS)	20 (20) rumah kesehatan	jumlah rumah kesehatan	-	4	4	286,28	464,78	444,87		
JU	PROG RAMBUKUN PERUMAHAN KAWASAN PERKOTAAN						20.021	261,25	261,26		261,26
1	Programs for health services (Kesehatan Masyarakat) (Rumah sakit/RS) (Rumah sakit/RS)	10 (10) rumah kesehatan	jumlah rumah kesehatan	7 (7) rumah kesehatan	5 (5) rumah kesehatan	5 (5) rumah kesehatan	3,4	27,75	37,80		27,75
2	Programs for health services (Kesehatan Masyarakat) (Rumah sakit/RS) (Rumah sakit/RS)			5 (5) rumah kesehatan	5 (5) rumah kesehatan	5 (5) rumah kesehatan	11,3	11,85	11,90		11,85
3	Programs for health services (Kesehatan Masyarakat) (Rumah sakit/RS) (Rumah sakit/RS)			5 (5) rumah kesehatan	5 (5) rumah kesehatan	5 (5) rumah kesehatan	14,01	196,69	296,70		196,69
4	Programs for health services (Kesehatan Masyarakat) (Rumah sakit/RS) (Rumah sakit/RS)			5 (5) rumah kesehatan	5 (5) rumah kesehatan	5 (5) rumah kesehatan	15,85	11,85	11,90		11,85
5	Programs for health services (Kesehatan Masyarakat) (Rumah sakit/RS) (Rumah sakit/RS)			5 (5) rumah kesehatan	5 (5) rumah kesehatan	5 (5) rumah kesehatan	9,00	39,25	48,20		39,25
TOTAL ALOKASI							5.329,60	8.299,14	9.645,10		8.299,14
											8.299,14

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)				
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	DUKUNGAN KEANGGARAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN OLAH RAGA	Meningkatkan kualitas manajemen dan pelaksanaan administrasi, keuangan dan perlengkapan serta pelaksanaan anggaran umum di Kementerian Pemuda dan Olahraga.	1. Jumlah kunjungan atau rapat atau upaya pengantar program/kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan yang terintegrasi, abstrak, paper, video, atau bahan cetak.	35	35	35	35	2415	2415	2415	2415
2	PENGANTARAN SARANAS DAN PERUSAHAAN PARASPORTS MENYUPPLY TINDAK PEMUDA DAN OLAH RAGA	Meningkatkan kualitas layanan dan sarana olahraga nasional.	Persentase operasional dan jumlah layanan sarana olahraga nasional.	100	100	100	100	500	500	500	500
3	PROYEKSI KEPERLUAN DAN STRATEGIS	Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang, meningkatkan partisipasi organisasi dalam kegiatan olahraga.	1. Jumlah kegiatan organisasi kepemudaan yang diselenggarakan dalam pelaksanaan program, sarana prasarana, dan perencanaan program. 2. Jumlah pemuda aktif yang difasilitasi dalam kegiatan organisasi kepemudaan serta kapasitas di bidang sport science, health dan fitness.	9.000	9.200	9.000	9.000	1.125,5	888,0	850,5	890,2

II.L.M.072-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	MASALAH	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (MILIAH RUPIAH)				
				RENCANA 2013	PRAKTIS/REKAMATI		RENCANA 2013	PRAKTIS/REKAMATI					
					2014	2015		2014	2015	2014	2015	2016	
			3. Jumlah generasi kader kepemudaan.	900	3.153	3.350	3.150						
			4. Jumlah generasi yang dilibatkan sebagai sadar dan aktif dalam kegiatan keorganisasian.	5.000	5.763	6.000	6.000						
			5. Jumlah generasi pemuda, perempuan, dan generasi yang terdampak bencana yang berhasil memperoleh pengetahuan dan keterampilan.	5.000	5.763	6.000	6.000						
			6. Jumlah generasi pemuda yang memiliki kompetensi di sektor pertanian.	250	250	250	250						
			7. Jumlah generasi pemuda sebagai pembina/mentor/pelatih di organisasi kepemudaan.	1.000	1.000	1.000	1.000						
			8. Jumlah generasi pemuda sebagai pembina/mentor/pelatih di organisasi kepemudaan.	200	200	200	200						
			9. Jumlah generasi pemuda sebagai pembina/mentor/pelatih di organisasi kepemudaan.	400	400	400	400						

II.L.M.072-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITY	MASALAH	INDICATOR	TARGET			ALOKASI (MILIAH RUPIAH)				
				RENCANA 2013	PRATAMA MATI		RENCANA 2013	PRAKIRAN MATI			
					2014	2015		2014	2015	2016	
3.1	Pengembangan Program Keolahragaan	Meningkatnya partisipasi remaja perempuan	1. Jumlah remaja putri perempuan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan keterampilan keolahragaan	1.000	660	660	660	660	660	660	660
3.2	Pengembangan Keolahragaan Perempuan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan keolahragaan	1. Jumlah atletik kelajakar perempuan 2. Jumlah atletik kelajakar perempuan	1	1	1	1	1	1	1	1
3.3	Pengembangan Keolahragaan Perempuan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan keolahragaan	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader keolahragaan 2. Jumlah keolahragaan yang diadakan secara rutin	5.000	5.763	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.4	Pengembangan Keolahragaan Perempuan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan keolahragaan	1. Jumlah pemuda keolahragaan yang difasilitasi 2. Jumlah keolahragaan yang diadakan secara rutin	50	66	66	66	66	66	66	66
3.5	Pengembangan Keolahragaan Perempuan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan keolahragaan	1. Jumlah pemuda keolahragaan yang difasilitasi 2. Jumlah keolahragaan yang diadakan secara rutin	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

PLM.072-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLIMPIADA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	MASALAH	INDIKATOR	TARGET							
				RENCANA		PRAKTIS/MASJIT		ALOKASI (MILIAH RUPIAH)			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
3.4	Pengembangan Sepuluh-tu dan Keempatpuluh Pemuda	Meningkatnya peran aktif dan kemampuan sosial pemuda terdidik dan terampil dalam bidang sains, matematika, kesehatan dan prestasi sepepekerjaan pemuda	1. Jumlah periode: 1000 minggu 2. Jumlah satwa pemuda setiap peternakan per-anak-anak per-anak-anak per-anak-anak 3. Jumlah pemuda karier 4. Jumlah pemuda terdidik dan terampil, dan terampil per-anak-anak dan terampil per-anak-anak	1.000	1.000	1.000	1.000	70,5	70,5	70,5	70,5
3.5	Pengembangan Keempatpuluh Pemuda	Meningkatnya kemampuan dan prestasi per-anak-anak per-anak-anak per-anak-anak	1. Jumlah pemuda karier 2. Jumlah pemuda terdidik dan terampil, dan terampil per-anak-anak dan terampil per-anak-anak	500	500	500	500	10,2	10,2	10,2	10,2
3.6	Pengembangan Keempatpuluh Pemuda dan Keempatpuluh Pemuda dan Keempatpuluh Pemuda dan Keempatpuluh Pemuda	Meningkatnya kemampuan dan prestasi per-anak-anak per-anak-anak per-anak-anak	1. Jumlah pemuda karier 2. Jumlah pemuda terdidik dan terampil, dan terampil per-anak-anak dan terampil per-anak-anak	20	20	20	20	10,2	10,2	10,2	10,2

II.L.M.072-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	MASALAH	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (MILIAH RUPIAH)								
				RENCANA			PRAKTIS/MAJUT			RENCANA								
				2013	2014	2015	2014	2015	2016	2014	2015	2016						
			2. Jumlah sekolah dan lembaga kepemudaan dan kepemajoran yang terakreditasi	13	19	20	13											
			4. Jumlah sekolah dan lembaga kepemudaan dan kepemajoran yang terakreditasi	1	5	5	1											
2.7	Pemadangan Organisasi	Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan	1. Jumlah kelompok organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan, pengembangan, dan perencanaan program	9.000	5.303	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan, pengembangan, dan perencanaan program	123	120	120	123											
2.8	Pembinaan Organisasi	Tercapainya pertumbuhan organisasi kepemudaan	1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pelatihan, pengembangan, dan perencanaan program	5.000	5.003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

II.LM.072-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET										
				RENCANA		PRAKTIS/MASUKI		ALOKASI (MILIAH RUPIAH)						
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016			
			2. Jumlah periode yang difasilitasi dalam pendirian kelompok.	1.000	1.000	1.000	1.000							
			3. Jumlah senjaja gratis yang dipakai dan teknologi yang terdapat hasil dari penggunaan senjaja.	5.000	4.000	3.000	5.000							
2.0	Peningkatan Kapasitas Pemuda	Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang manajemen, manajerial, teknologi, serta iman dan akhlak.	1. Jumlah kader yang dilatih dan dibekali keterampilan kepramukaan.	5.000	5.000	5.000	5.000	112	112	112	112	112	112	
3.1.0	Pertukaran Potensi Sumber Daya Pemuda	Meningkatnya wawasan, potensi sumber daya kepemudaan.	1. Jumlah kader yang ditunjuk sebagai sumber daya kepramukaan.	34	34	34	34	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
			2. Jumlah wakil atau potensi keberdayaannya.	4	4	4	4							
3.1.1	Peningkatan Wawasan Pemuda	Meningkatnya wawasan kader di bidang manajemen, pendidikan, dan lingkungan hidup.	1. Jumlah kader yang difasilitasi dalam kegiatan wawasan kepramukaan.	4.000	5.000	8.000	8.000	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	

II.L.M.072-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDICATOR	TARGET						ALOKASI (MILIAH RUPIAH)		
				RENCANA			PRAKIRAN MAMPU			RENCANA		
				2013	2014	2015	2014	2015	2016	2014	2015	2016
3.12	Peningkatan Kesehatan dan Sarana Keperawatan	Stuntingnya permasalahan dan pencapaian masalah kesehatan dan sarana keperawatan	1. Jumlah klinik pelayanan kesehatan dan sarana kesehatan 2. Jumlah fasilitas serta sumberdaya kesehatan (health center)	34	29	20	23		70,5	70,0	70,0	10,0
3.13	Peningkatan Kesehatan Usia Muda Pusat, Perencanaan Pemuda dan Olahraga	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan pelatihan di bidang kesehatan (PPO, PPM) dan kesehatan	1. Jumlah (total) fasilitas pelayanan kesehatan (pembinaan serta kegiatan nasional)	1	-	-	1		5,0	5,0	5,0	5,0
			2. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana olahraga dan kesehatan	24	24	24	24					
3.14	Peningkatan Olahraga Layanan Khusus	Stuntingnya kapasitas sarana/instansi/lembaga olahraga dan masyarakat yang bergerak di bidang olahraga	1. Jumlah sarana/instansi/lembaga/olahraga/perhimpunan olahraga khusus 2. Jumlah fasilitas kesehatan olahraga layanan khusus 3. Jumlah sarana olahraga	100	100	100	100		21,9	21,9	21,9	2,0
				13	10	10	13					
				1.000	1.000	1.000	1.000					

PLM.020.7

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAHAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDICATOR	TARGET									
				KEMASAN			PRAKTIK/MAJLIS			ALOKASI (MILIAH RUPIAH)			
				2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
3.15	Pengembangan Olahraga Pemuda	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan atlet olahraga dalam meningkatkan prestasi olahraga	1. Jumlah atlet olahraga prestasi yang memiliki kompetensi di dalam-situasi pertandingan 2. Jumlah atlet hasil pembinaan olah raga keadabkasan 3. Jumlah atlet hasil pengembangan prestasi olahraga	250	250	250	250	270	270	270	270	270	270
3.15	Pengembangan Olahraga Rerata/ dan Pelayanan Informasi Keolahragaan	Meningkatnya hasil-hasil penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional serta kualitas pelayanan informasi keolahragaan	1. Jumlah peserta pertandingan olahraga nasional 2. Jumlah peserta dan atlet yang mengikuti pertandingan 3. Jumlah atlet hasil pembinaan prestasi 4. Jumlah atlet hasil pembinaan prestasi	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

II.L.M.072-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDICATOR	TARGET						ALOKASI (MILIAH RUPIAH)		
				RENCANA 2013	PRAKTIS/MAJU			RENCANA				
					2014	2015	2016	2014	2015	2016		
3.17	Pengembangan Satuan Kegiatan Praktek	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan olahraga atletis siswa	1. Jumlah PPL/PPLM dan asistensi khirsa olahraga yang dilaksanakan 2. Jumlah peserta pendidikan sekolah menengah tingkat nasional	57	54	54	54	140,0	140,0	140,0	240,0	240,0
3.18	Pengabdian Masyarakat dan Kegiatan Bimbingan	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan siswa dalam melaksanakan program yang sesuai dengan standar nasional	1. Jumlah asistensi kelolaan program prasarana olahraga nasional per tahun 2. Jumlah asistensi penyediaan prasarana olahraga 3. Jumlah penyediaan sarana olahraga	200	200	200	200	74,8	74,8	74,8	10,0	10,0
3.19	Pengembangan Keolahragaan dan Penyelenggaraan Kegiatan dan Kegiatan Praktek	Meningkatnya prestasi olahraga dan keterampilan serta peran serta masyarakat	1. Jumlah atletis nasional dan internasional 2. Jumlah atletis internasional 3. Jumlah atletis internasional	2	2	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				33	30	20	20					
				1.335	950	550	950	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
				5	5	5	5					

II.L.M.072-9

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	MASALAH	INDICATOR	TARGET						ALOKASI (MILIAH RUPIAH)			
				RENCANA			PRAKTIS/MAJITI			RENCANA			
				2013	2014	2015	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
3.21	Pengembangan Standarisasi Keperawatan dan Keasuhan di	Werselainya standar nasional kebidanan, keperawatan dan keasuhan	1. Jumlah inskaf standar nasional kebidanan, keperawatan dan keasuhan 2. Jumlah kebidanwan/keperawatn dan keasuhan 3. Jumlah kebidanwan/keperawatn dan keasuhan 4. Jumlah inskaf standar nasional kebidanan, keperawatan dan keasuhan	22	22	22	22	22	22	22	10,0	10,0	10,0
3.21	Peningkatan kemampuan kebidanwan/keperawatn dan keasuhan	Standarisasi kebidanan, keperawatan dan keasuhan	1. Jumlah kebidanwan/keperawatn dan keasuhan 2. Jumlah kebidanwan/keperawatn dan keasuhan 3. Jumlah kebidanwan/keperawatn dan keasuhan 4. Jumlah kebidanwan/keperawatn dan keasuhan	93	95	95	95	95	95	95	7,6	7,6	7,6
3.22	Peningkatan kemampuan kebidanwan/keperawatn dan keasuhan	Standarisasi kebidanan, keperawatan dan keasuhan	1. Jumlah kebidanwan/keperawatn dan keasuhan 2. Jumlah kebidanwan/keperawatn dan keasuhan 3. Jumlah kebidanwan/keperawatn dan keasuhan 4. Jumlah kebidanwan/keperawatn dan keasuhan	13	16	16	16	16	16	16	11,0	11,0	11,0

11.11.002-10

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROMOSI/ KEGIATAN PRIORITAS	MASALAH	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (MILIAH RUPIAH)		
				RENCANA 2013		PRAKTISIMAJU		RENCANA		PRAKTISIMAJU		
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	
3.2.1	Pengembangan, pelatihan, dan pembinaan	<p>2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan olahraga</p> <p>1. Jumlah peserta pertandingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan olahraga di tingkat nasional</p> <p>2. Jumlah peserta pertandingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan olahraga di tingkat nasional</p> <p>3. Jumlah atlet yang mengikuti pertandingan internasional</p> <p>4. Jumlah atlet yang mengikuti pertandingan internasional</p>	<p>93</p> <p>15.000</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>1</p>	<p>95</p> <p>15.375</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>-</p>	<p>95</p> <p>15.000</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>-</p>	<p>95</p> <p>15.000</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>-</p>	<p>144,7</p> <p>144,7</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>144,7</p> <p>144,7</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>144,7</p> <p>144,7</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>			

11.1.002-11

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITY	MASALAH	INDIKATOR	RENCANA			TARGET			ALOKASI (MILIAH RUPIAH)			
				2013	PRATAMA MATI		2014	2015	2016	RENCANA		PRAKIRAN MATI	
					2014	2015				2014	2015	2014	2015
3.24	Pengembangan Program Kemitraan	Meningkatnya kapasitas remaja bersportasi dan masalah pendidikan	1. Jumlah orang-orang yang mengikuti program ini dari total target program ini	400	400	400	400	400	17,5	17,5	17,5	17,5	
4	PROJEK PEMBINAAN SULAPBOLA PUSKASASI	Meningkatnya prestasi atlet dalam kompetisi internasional dan prestasi nasional	1. Jumlah atlet yang berkompetisi dalam kompetisi internasional dan kompetisi nasional	13	0	0	13	13	535,0	535,0	535,0	44,5	
4.1	Pembinaan Disiplin dan Kedisiplinan	Meningkatnya disiplin dan kedisiplinan atlet	1. Jumlah atlet yang mengikuti program ini dari total target program ini	35	135	135	135	135					
4.2	Pembinaan Disiplin dan Kedisiplinan	Meningkatnya disiplin dan kedisiplinan atlet	1. Jumlah atlet yang mengikuti program ini dari total target program ini	100	100	100	100	100	52,0	52,0	52,0	52,0	
4.3	Pembinaan Disiplin dan Kedisiplinan	Meningkatnya disiplin dan kedisiplinan atlet	1. Jumlah atlet yang mengikuti program ini dari total target program ini	55	55	55	55	55					

11.1.002-12

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (MILIAH RUPIAH)		
				RENCANA 2013	PRAKTIS/MAJUT		RENCANA 2013	PRAKTIS/MAJUT		2014	2015	2016
					2014	2015		2014	2015			
4.2	Pengembangan kualitas Olahraga	Meningkatnya prestasi pertandingan olahraga	1. Jumlah atlet nasional yang memperoleh medali pada pertandingan internasional 2. Jumlah fasilitas olahraga yang dimiliki atlet nasional 3. Jumlah atlet yang mengikuti pertandingan internasional	501	488	400	403	911	910	910	910	910
4.3	Pengembangan Olahraga Prestasi	Meningkatnya prestasi olahraga prestasi	1. Jumlah atlet/golongan atlet nasional 2. Jumlah fasilitas pembinaan cabang olahraga prestasi atlet nasional 3. Jumlah atlet yang mengikuti pertandingan internasional	1.500	1.303	1.080	1.000	4.730	4.730	4.730	4.730	4.730
TOTAL				1.079,1	1.513,6	1.476,0	1.623,6					

III.M.002-13

MATA RIKS 2.3 RENCANA TINDAK PERBUANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMINTUAN/LEMBAGA : KEMISI PEMBINAAN PASAR KORUPSI	PROGRAM / KEGIATAN / PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2013			TARGET			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)		
				2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain pada BPPK	Efektifitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain pada BPPK	Tingkat Kepuasan Layanan Pengguna BPPK secara keseluruhan Terhadap Layanan (Indeks, Skala 1-5)	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	507,3	596,7	476,0	403,8
2	Program Pemertanian dan Pengawasan Pencak-Pilates	Efektifitas Pemertanian dan Pengawasan Pencak-Pilates	Pertumbuhan Penghasilan Pegawai yang Menghasilkan Pencak-Pilates	95%	90%	90%	90%	90%	413,4	260,3	275,9	278,3
		Pertumbuhan TPK yang Masih Aktif	Hasil Pengembalian/ Penyalaman Korupsi Negara dari Pegawai Berkorupsi yang Telah dihukum (Persentase)	50%	50%	50%	50%	50%				
		Efektifitas Koordinasi dan Supervisi dalam Pelaksanaan	Kelengkapan Pemertanian Pegawai JPK oleh Anggota yang Bersertifikasi BPPK (Persentase)	100%	100%	100%	100%	100%				
		Reputasi dan Korupsi di Masyarakat	Indeks Integritas Nasional (Indeks)	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8				

III.3.2013-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMISI PEMERINTAHAN NASIONAL

NO	LOKUS/REGISTRASI PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARJEL				ALOKASI INDIKATOR RUPUKH					
				TITIK AWAL 2013	2014		2015		REVISI 2013	2014		2015	
					500	500	500	500		2014	2015	2014	2015
		Peningkatan TIK yang komprehensif	Penyelenggaraan Berkelanjutan Negara dari Pembangunan Wilayah	30%	30%	30%	30%	500	500				
		Memorandum Pemerintahan Pemerintahan Negara	Pelayanan yang Mumpuni dan Berkualitas (Persepsi Masyarakat)	30%	30%	30%	30%	500	500				
		Kecepatan dan Informasi dan data yang relevan	Ketersediaan Informasi dan data (persepsi)	90%	95%	95%	95%						
		Organisasi yang bebas dari korupsi dan konflik	Ketersediaan teknologi informasi (persepsi)	85%	85%	85%	85%						
		Organisasi yang bebas dari korupsi dan konflik	Ketersediaan dan kualitas informasi yang diterbitkan instansi RPK (Tunjai)	0	0	0	0						
		Efektifitas Pengeluaran Anggaran	Hasil Pemertasaan Pemas yang Dapat Dipublikasikan Ditinjau Pemindaan (Tunjai)	88	96	96	96						

11/11/2012

KEMENYERHAN/LEMBAGA: KEMISI PEMBINAAN/JASAN KORUPSI

KU	LOKUS/REGISTRAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARJEL			ALOKASI INDIKOR KUPUSI			
				2013	2014	2015	2016	REVISI 2013	2014	2015
6.1	Pencelahan Indikasi-korupsi	Pencelahan	Kasus-korupsi (kasus)	75	80	85	0.1	9.3	40.3	11.3
6.2	Pengaduan dan Laporan	Pengaduan	Pengaduan (korupsi)	70	75	80	0.0	0.0	0.0	0.0
6.3	Survei dan Pengawasan	Survei dan Pengawasan	Pengawasan (survei)	75	80	85	17.4	17.5	21.0	21.0
6.4	Korupsi dan Penyelidikan	Korupsi dan Penyelidikan	Pengawasan (survei) dan Penyelidikan (korupsi)	75	80	85	26.6	26.5	32.2	32.2

11/11/2012

KEMENDUKHUMAS : KEMENDUKUMHAM : KEMENDIKBUD : KEMENDISBERKOR : KEMENKUMHAM

Kategori	Indikator	Sasaran	Tipe Sasaran	Target			Alokasi Anggaran (Rp. Miliar)		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016
6.2	Pengembangan	Perencanaan	30.000	32.000	35.000	10,0	14,0	12,0	
6.3	Pengembangan	Perencanaan	374	372	352	4,1	4,8	5,2	

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KOMISI PEMBINAAN JASAN KORUPSI

KODE/NO KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARJUK			ALOKASI INDIKATOR RUPUKH		
			TITIK-SAMA 2013	2014		RENCANA 2013	2014	
				2014	2015		2014	2015
6.7	Pembinaan Sosial-budaya Sampung	Terdapatnya peserta didik yang kurang di sarana belajar pendidikan dasar di daerah perkotaan	100	100	100	30,0	30,0	40,0
		Terdapatnya sarana dan sarana belajar di daerah perkotaan	31	31	31			
		Terdapatnya sarana dan sarana belajar di daerah perkotaan	20	20	20			
		Terdapatnya kegiatan pembinaan di kota (50%)	10	10	10			
		Terdapatnya kegiatan pembinaan di kabupaten dan kota (50%)	20	20	20			
6.8	Pembinaan Sosial-budaya Sampung	Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dasar di daerah	40	50	50	3,3	3,7	4,0
		Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan dasar di daerah	75	75	75			
JUMLAH ALOKASI						740,7	887,2	751,9

11/3/2012 15:57

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA				ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
				RENCANA 2013	TARGET Prakerum. Maju			RENCANA 2013	Prakerum. Maju		
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	Program Peningkatan imajinasi & pelayanan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial	Meningkatnya efektivitas teknis administratif kepada Komisi Yudisial di bidang pembinaan kegiatan, peningkatan SPM, akuntabilitas serta peningkatan publik	Mewujudkan pemberian pelayanan yang handal oleh Komisi Yudisial bagi publik pencari keadilan					46,5	99,4	99,4	99,4
6	Program penguatan Hakim Agung dan pengawasan pejabat hakim	Mewujudkan penguatan kegiatan yang berhasil dan berkelanjutan	1. Menurunnya jumlah laporan pelanggaran masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim 2. Terjadinya sumber daya hakim menjadi lebih yang tercapai dan meningkatkan jumlah dan kualitas					34,7	62,4	62,4	62,4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PRIORITAS	SABARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (MILIAR RUPIAH)				
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	2017	RENCANA 2013	2014	2015	2016	2017
01	Pengawasan pengaduan hak asasi yang dilanggar berbagai kode etik dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta penanganan, pemantauan dan penyelesaian sengketa	Penyelidikan laporan pengaduan hak asasi yang dilanggar berbagai kode etik dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta pemantauan dan penyelesaian sengketa	<p>Persentase penyelesaian kasus pengaduan hak asasi yang dilanggar berbagai kode etik dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta pemantauan dan penyelesaian sengketa</p> <p>120 Laporan Harian Yang Terpantau dan Beres, serta Laporan Harian Yang Terpantau dan Beres</p> <p>12 Jumlah Pelanggaran Kode Etik 12 Perencanaan Perbaikan Sistem yang Terpantau dan Beres</p> <p>12 Jumlah Laporan Pemantauan Perbaikan Sistem yang Terpantau dan Beres</p>	50%	85%	85%	88%		4,5	9,6	34,6	34,6	5,0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL

NO	PROGRAM/ KEGATAN/ PRIORITAS	SABARAN	INDIKTOR	TARGET					ALOKASI (MILYAR RUPIAH)		
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	2017A	RENCANA 2013	2014	2015
62	Belektifitas dan Kepercayaan Masyarakat dan Pelayanan Tegap dan Baik	Menghasilkan nilai tambahan yang signifikan untuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan pelayanan publik negara, dan pelayanan masyarakat.	Indeks Kepercayaan Masyarakat (ICM) dan Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM) yang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan pelayanan publik negara dan masyarakat	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A
63	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi	Meningkatnya sarana dan prasarana kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi	Indeks Kinerja Kantor (IKK) yang menunjukkan kinerja kantor dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A	2013 2014 2015 2016 2017A
TOTAL ALOKASI											165,7

01.04.100.3

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA: (103) BADAN NASIONAL PENGANGGARAN BERKANA

MID	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARIFET			ALOKASI			
				2013	P. Belanja modal		2013	2014		2014
					2013	2013		2014	2014	
61	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Lanjutan	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja di bidang industri	Perolehan sertifikat kompetensi dan peningkatan mutu tenaga kerja di bidang industri	30,30		34,47				
62	Program Pengembangan Sistem dan Sistem Informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pelayanan publik	Perolehan sertifikat kompetensi dan peningkatan mutu tenaga kerja di bidang pelayanan publik	30,00		5,37				
63	Program Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja di bidang industri	Perolehan sertifikat kompetensi dan peningkatan mutu tenaga kerja di bidang industri	4,50		4,77				
66	Program Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja di bidang industri	Perolehan sertifikat kompetensi dan peningkatan mutu tenaga kerja di bidang industri	17,08		21,09				
1017	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi pelayanan publik	Perolehan sertifikat kompetensi dan peningkatan mutu tenaga kerja di bidang pelayanan publik	92,46		11,40				

11.3.1.102.1

KEMENTERIAN LEMBAGA: 1031 BADA, YINASUNAL PERANG GULAWA, BEKALANA

NO	PROGRAM/PROJEK/TAJAN	MATERIAL	INDIKATOR	TABEL 1					ALOKASI			
				2013		2014		2015	Kategori	Kategori	Kategori	
				2013	2014	2014	2015					
3884	Peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan berbahasa di lingkungan keluarga	Melaksanakan komunikasi dengan keluarga dan masyarakat di lingkungan keluarga	Kemampuan komunikasi	2013 2014 Kab/Kota	2014 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota
3885	Peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan berbahasa di lingkungan keluarga	Melaksanakan komunikasi dengan keluarga dan masyarakat di lingkungan keluarga	Kemampuan komunikasi	2013 2014 Kab/Kota	2014 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota
3886	Peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan berbahasa di lingkungan keluarga	Melaksanakan komunikasi dengan keluarga dan masyarakat di lingkungan keluarga	Kemampuan komunikasi	2013 2014 Kab/Kota	2014 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota
3887	Peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan berbahasa di lingkungan keluarga	Melaksanakan komunikasi dengan keluarga dan masyarakat di lingkungan keluarga	Kemampuan komunikasi	2013 2014 Kab/Kota	2014 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota
3888	Peningkatan kemampuan komunikasi dan keterampilan berbahasa di lingkungan keluarga	Melaksanakan komunikasi dengan keluarga dan masyarakat di lingkungan keluarga	Kemampuan komunikasi	2013 2014 Kab/Kota	2014 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota	2015 2015 Kab/Kota

11.3.3.102.2

KEMENTERIAN LEMBAGA: 1031 BADA Y INASIONAL PERANG GULAN 6.6.6.6. BEKALAYA

NO	PROGRAM/INDUKSI	SASARAN	INDUKTOR	TARUET					ALUAS				
				2013		Prestasi may		Kategori	Fapn Induktel	Prestasi may			
				2013	2013	2013	2013			2013	2013		
				2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013	2013
SP1	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	175	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SP2	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SP3	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SP4	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	Perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan masyarakat di lingkungan kerja	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

11.3.1.102.3

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROMSI/ RENCANA/ PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA				ALOKASI (Rp. MILIAR)					
				2013		2014		2013		2014		2015	
				RENCANA	2013	RENCANA	2014	RENCANA	2013	RENCANA	2014	RENCANA	2015
1	Peningkatan Kualitas Fasilitas Telekomunikasi dan Penyelenggaraan TI	Terdapatnya pemertanian dan pendanaan untuk peningkatan kualitas layanan TI	400.000	900.000	900.000	900.000	29.11	313.5	313.5	313.5	313.5		
1.1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan TI	Terdapatnya pemertanian dan pendanaan untuk peningkatan kualitas layanan TI	400.000	900.000	900.000	900.000	29.11	313.5	313.5	313.5	313.5		
1.2	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan TI	Terdapatnya pemertanian dan pendanaan untuk peningkatan kualitas layanan TI	400.000	900.000	900.000	900.000	29.11	313.5	313.5	313.5	313.5		
1.3	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan TI	Terdapatnya pemertanian dan pendanaan untuk peningkatan kualitas layanan TI	400.000	900.000	900.000	900.000	29.11	313.5	313.5	313.5	313.5		
1.4	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan TI	Terdapatnya pemertanian dan pendanaan untuk peningkatan kualitas layanan TI	400.000	900.000	900.000	900.000	29.11	313.5	313.5	313.5	313.5		

KEMENTERIAN PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NO	PROMOSI/REGISTRASI PRIORITAS	SARABAY	INDIKATOR	KEPILIHAN			ALOKASI (Rp. MILYAR)			
				REVISI 2013	2013	2014	REVISI 2013	2013	2014	
16	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perumahan dan Pemukiman di Wilayah Perkotaan dan Periurban	Memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan dan pengembangan perumahan di wilayah perkotaan dan periurban	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah perkotaan dan periurban	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000
17	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perumahan dan Pemukiman di Wilayah Perdesaan dan Kawasan Strategis Nasional	Memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan dan pengembangan perumahan di wilayah perdesaan dan kawasan strategis nasional	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah perdesaan dan kawasan strategis nasional	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000
18	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perumahan dan Pemukiman di Wilayah Perkotaan dan Periurban	Memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan dan pengembangan perumahan di wilayah perkotaan dan periurban	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah perkotaan dan periurban	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000
19	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perumahan dan Pemukiman di Wilayah Perdesaan dan Kawasan Strategis Nasional	Memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan dan pengembangan perumahan di wilayah perdesaan dan kawasan strategis nasional	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah perdesaan dan kawasan strategis nasional	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000
20	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perumahan dan Pemukiman di Wilayah Perkotaan dan Periurban	Memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan dan pengembangan perumahan di wilayah perkotaan dan periurban	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah perkotaan dan periurban	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000
21	Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perumahan dan Pemukiman di Wilayah Perdesaan dan Kawasan Strategis Nasional	Memfasilitasi dan meningkatkan pelayanan dan pengembangan perumahan di wilayah perdesaan dan kawasan strategis nasional	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan di wilayah perdesaan dan kawasan strategis nasional	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	10000 600.000.000.000 900.000.000.000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000	20000 1200000000000 1800000000000

KOMITMEN/LEMBAGA: BADAQ NASIONAL PEMEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NO	INDUKSI/PROJEK/PELUANG/PROSPEK	SARAN	INDIKATOR	REVENUE			PELAYARAN			MOROSI (Rp. MILIAR)		
				REVENUE 2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
1.1.1	Peningkatan Kompetensi Pekerja dan Dalam Sistem Kerja TKI	Meningkatkan kompetensi pekerja melalui pelatihan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di lapangan.	Indikator: Jumlah pekerja yang terampil dan produktif.	500.000.000	500.000.000	500.000.000	275.000.000	275.000.000	275.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
1.1.2	Proteksi dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri	Meningkatkan proteksi dan penyaluran tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.	Indikator: Jumlah pekerja yang terlindungi dan tersalurkan ke luar negeri.	100.000.000	100.000.000	100.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Fungsi Tenaga Kerja	Meningkatkan fungsi tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan.	Indikator: Jumlah pekerja yang terampil dan produktif.	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTAL RINP/TKI				300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000

011/11/2013

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013
KEMENTERIAN/LEMBAGA: BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

No	Program/Kegiatan/Struktur Organisasi	Indikator	TANGGULU					MOKASI (Miliar Rupiah)						
			2012	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Program Pembangunan dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Lainnya										30,1	32,5	38,0	30,8
1	Subsidi										3,228,8	4,898,8		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat									6,0	6,0		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1,2	1,2		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	1,2	1,2		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	1,2	1,2		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	1,2	1,2		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	1,2	1,2		
2	Subsidi										135,0	155,0		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	135,0	155,0		
3	Subsidi													
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	3,0	3,0		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	3,0	3,0		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3,0	3,0		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	3,0	3,0		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	3,0	3,0		
4	Subsidi													
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	1 Agustus	3,0	3,0		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	2 Agustus	3,0	3,0		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3 Agustus	3,0	3,0		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	4 Agustus	3,0	3,0		
		Peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan masyarakat	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	5 Agustus	3,0	3,0		

11/2/2012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENELITIAN DAN INOVASI SIBIDARBO

NO	Profil Kegiatan Sasaran Kegiatan	Indikator	TABEL					SLOKUSI (Miliar Rupiah)						
			RENCANA 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
5	Program Pengembangan, Riset dan Inovasi	<p>1. Jumlah publikasi internasional</p> <p>2. Jumlah publikasi nasional</p> <p>3. Jumlah publikasi internasional terakreditasi</p> <p>4. Jumlah publikasi nasional terakreditasi</p> <p>5. Jumlah publikasi internasional terakreditasi terakreditasi</p> <p>6. Jumlah publikasi nasional terakreditasi terakreditasi</p>	1. 10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
6	Program Penelitian dan Inovasi	<p>1. Jumlah publikasi internasional</p> <p>2. Jumlah publikasi nasional</p> <p>3. Jumlah publikasi internasional terakreditasi</p> <p>4. Jumlah publikasi nasional terakreditasi</p> <p>5. Jumlah publikasi internasional terakreditasi terakreditasi</p> <p>6. Jumlah publikasi nasional terakreditasi terakreditasi</p>	1. 10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENELITIAN DAN INOVASI SIBOGARGO

NO	Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator	TABEL			SLOKUSI (Miliar Rupiah)			
			RENCANA 2013	2014	2015	2016	RENCANA 2013	2014	2015
7	Penelitian penerapan sistem...	<p>1. Jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan</p> <p>2. Jumlah paten yang dihasilkan</p> <p>3. Jumlah kerjasama yang dihasilkan</p> <p>4. Jumlah mahasiswa yang dihasilkan</p> <p>5. Jumlah dosen yang dihasilkan</p> <p>6. Jumlah tenaga kerja yang dihasilkan</p> <p>7. Jumlah produk yang dihasilkan</p> <p>8. Jumlah layanan yang dihasilkan</p> <p>9. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p> <p>10. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p> <p>11. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p> <p>12. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p> <p>13. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p> <p>14. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p> <p>15. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p> <p>16. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p> <p>17. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p> <p>18. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p> <p>19. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p> <p>20. Jumlah kegiatan yang dihasilkan</p>							

11/01/12

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
				2013	TARGET		2013	KEGIATAN PRIORITAS K/L		
					2014	2015		2016	2014	2015
1.	PROGRAM DURUMPAH MAGAJEKIN DAN PEKERJAAN TUGAS TERUS LA MANA LA LA	1. Tersedianya kemampuan sumber organisasi LSP 2. Terpentunya SIM yang kompeten 3. Tersedianya sistem kepeg. dan hubungan LSP yang efektif	1. Rasio biaya yang di asah sesuai dengan diopsi per set. Jalinan KPP 2. Persentase pemenuhan kebutuhan material KPP 3. Persentase pegawai KPP yang mampu bekerja sesuai dengan kebutuhan 4. Persentase pemenuhan jumlah tenaga kepeg. 5. Persentase kepeg. Kantor yang telah melaksanakan SOP	100	100	100	31,6	60,0	50,8	54,0
2.	PROGRAM PENGUATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LSP	1. Terpentunya kebutuhan sarana dan prasarana KPP	1. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana yang sesuai dengan SOP 2. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	90	100	100	90,8	77,0	8,0	8,0

ILM.106-1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LKPP

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2013	TARGET			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
					2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
3.	PEMBERAN SISTEM PENGADAAAN PEMBELIAN	Terwujudnya pelaksanaan tuntutan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Komandan/Lembaga/Jasa Kelembagaan lainnya	Persentase jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi lainnya yang sudah diberikan tuntutan teknis di bidang pengadaan barang/jasa	93	93	-	-	61,9	99,0	117,0	117,0
		Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Instansi lainnya	Persentase pemerintah/jumlah Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi lainnya yang sudah diberikan advisasi di bidang pengadaan barang/jasa	93	100	-	-	-	-	-	-
		Terwujudnya pembinaan dalam penanganan pengaduan dan pemberian telaah/pemantauan penyelesaian sengketa sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah lainnya	Persentase Pembinaan jumlah pengaduan dan sengketa handling pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/Daerah/Instansi lainnya yang terselesaikan	90	100	-	-	-	-	-	-
		Terwujudnya sengketa kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi lainnya	Persentase Prinsip/penjumlahan sengketa keaktifan sengketa audit/pengadaan barang/jasa yang terselesaikan	100	-	-	-	-	-	-	-

[ILM.106-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LKPP

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
				RENCANA 2013	2014	2015	2016	REKAMANA 2013	2014	2015	2016
		Terselesaainya kasus korupsi, penyeleksi, persabangan, wadai dan atau usaha lainnya di bidang pengabdian: Batang/Asa	Persentase Peninjauan jumlah, pendapatan, buku dan keabsahan dari diri bidang pengabdian: Batang/Asa yang dipendukung, asetat, penyediaan dan penyediaan, serta dalam	100	-	-	-				
		Terdapatnya koordinasi dan sinergisasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka penyusunan RENCANA-EL dan RENCANA-EL yang efektif	Jumlah insidensi perencanaan yang melaksanakannya perencanaan: Batang/Asa	20	-	-	-				
		Terdapatnya koordinasi dan sinergisasi monitoring, evaluasi pelaksanaan, dan pelaksanaan evaluasi dengan partisipatif pengabdian: Batang/Asa	Jumlah instansi yang menggunakan pendekatan monitoring dan evaluasi: Batang/Asa	250	400	-	-				
		Terdapatnya pengabdian Batang/Asa perencanaan secara efektif dan efisien serta	Jumlah LSP yang memenuhi standar	350	500	-	-				
		Terdapatnya sistem kerja dan pembinaan, pendiri pengabdian: Batang/Asa perencanaan	Persentase pelayanan: Jalat sergembangan profesional: Batang/Asa	75	100	-	-				

ILM.106-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LKPP

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RFMC-ANA 2013	TARGET				ALOKASI (MILYAR RUPIAH)		
					PRAKTISYUM MAJU				REKAMANA 2013	KEGIATAN PRIORITAS K/L	
					2014	2015	2016			2014	2015
		Tenaga kerja sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi	Pencapaian cakupan pelayanan dalam polidibah kompetensi pengabdian tenaga/jasa kesehatan	82	100	-	-				
		Tenaga kerja sistem jaminan sosial kompetensi keahlian	Pemerataan penyiaran penyenggaraan uji kompetensi keahlian pengabdian barang/jasa kesehatan	100	100	-	-				
		Tenaga kerja keahlian pengabdian barang/jasa yang profesional dan kredibel	Peningkatan mutu pelayanan dan profesionalitas tenaga/ jasa kesehatan	81	100	-	-				
		Tenaga kerja keahlian pengabdian barang/jasa yang profesional dan kredibel serta memiliki kompetensi keahlian	Peningkatan mutu pelayanan dan profesionalitas tenaga/ jasa kesehatan	2	-	-	-				
		Tenaga kerja keahlian pengabdian barang/jasa yang profesional dan kredibel serta memiliki kompetensi keahlian	Peningkatan mutu pelayanan dan profesionalitas tenaga/ jasa kesehatan	2	-	-	-				
		Tenaga kerja keahlian pengabdian barang/jasa yang profesional dan kredibel serta memiliki kompetensi keahlian	Peningkatan mutu pelayanan dan profesionalitas tenaga/ jasa kesehatan	-	-	-	-				

ILM.106-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : LKPP

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA			TARGET			ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
				2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2013	2014	2015
3.1	Perencanaan strategi, kebijakan serta regulasi di bidang pengkajian dan pengkajian umum	Terdapatnya strategi, kebijakan dan regulasi di bidang pengkajian umum	Jumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan - Undang-undang Pengkajian Barang/Jasa - Draft PP Pengkajian Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	1,6	1,7	1,7	1,7
3.2	Pengembangan sistem e-Procurement	Terdapatnya otomatisasi TPSP	Jumlah LPS yang diinisiasi	80	200	100	50	-	-	6,0	21,0	13,5	4,5
3.3	Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengkajian Barang/Jasa Pemerintah	Terdapatnya cakupan pelayanan dalam pengembangan ULP	Jumlah penyusutan pembentukan ULP	70	70	70	70	-	-	2,7	2,8	2,8	2,8
ALOKASI LKPP 2010-2014									211,3	228,0	149,8	149,5	

ILM.106-5

MATRIK 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

TABEL

NO	LOKUS/KEGIATAN PRIORITAS	SARAN	INDIKATOR	BENTUK 2013	TABEL						
					REKORDENYA		RENCANA 2013				
					2014	2015	2016	2014	2015	2016	
I.	Program Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain pada Badan SAR Nasional						279,1	187,2	318,9	273,8	
II.	Program Peningkatan Saran-saran Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional						112,6	75,3	106,8	110,8	
III.	Program Pengembangan Perangkat, Peralatan, dan Peningkatan						921,0	630,1	863,1	906,3	
4.	Rencana dan/atau Program yang dilaksanakan	Meningkatkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan badan SAR	Capaian kegiatan pelaksanaan tugas	1	1	1	1				
			Kelempaan peralatan (paketi)	2	3	2	2				
			Salinan laporan	22	22	22	22				
			Salin Laporan Lembar (SLM)	11	13	13	12				
			Akta kepastian kerja (AKK)	0	0	0	0				
			Revisi Lembar Kerja (LKR)	2	4	2	4				
			Revisi Lembar Kerja (LKR)	0	0	0	0				
			Akta Pengetahuan (AP)	0	0	0	0				
			Akta Pengetahuan (AP)	0	0	0	0				
			Akta Pengetahuan (AP)	0	0	0	0				
			Akta Pengetahuan (AP)	0	0	0	0				
			Akta Pengetahuan (AP)	0	0	0	0				
				1	1	1	1	1	1	1	
				1	1	1	1	1	1	1	
				30	30	30	30	30	30	30	
				2	1	1	1	1	1	1	

2012-11-19

KEVENEYTIEN / LEVIRIA: BUDJAN SAH NASIONAL

NO	PROGRAM / PRIORITAS	SASARAN	INDUKATOR	TUNTUTAN 2013	TARGET			ALOKASI BUDJAS RUPIAH		
					2014	2015	2016	2013	2014	2015
2	Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Kerja	Penyediaan sarana dan prasarana kerja	Melalui, Produktivitas dan Kualitas Kerja	10	20	20	20	92,8	15,7	20,4
3	Peningkatan Kinerja dan Kualitas Kerja	Penyediaan sarana dan prasarana kerja	Melalui, Produktivitas dan Kualitas Kerja	30	30	30	30	106,4	28,0	106,7
4	Peningkatan Kinerja dan Kualitas Kerja	Penyediaan sarana dan prasarana kerja	Melalui, Produktivitas dan Kualitas Kerja	30	30	30	30	128,5	118,1	129,8
TOTAL ALOKASI								1.311,7	893,1	1.174,0

10/10/2012

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2012

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIBITAS	SASARAN	INDUKATOR	BIPNAMA			TAHUKET			ALOKASI (Rp. MILIAR)			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2015	2016
c.	Peningkatan dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan regulasi serta penyiapan dan monitoring dan evaluasi dan perbaikan regulasi	Peningkatan harmonisasi kebijakan, strategi, dan regulasi serta penyiapan dan monitoring dan evaluasi dan perbaikan regulasi	Kerangka Acuan Kebijakan, Strategi, dan Regulasi	17	17	17	17	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	
				2	2	2	2						
				12	12	12	12						
				5	5	5	5						
d.	Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, pengembangan, dan inovasi	Kerangka Acuan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi	51	55	55	55	5,0	6,0	6,0	6,0		
				31	25	25	31						
				11	16	16	16						
				12	12	12	12						
e.	Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan	Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan	Kerangka Acuan Pelayanan	12	12	12	12	0,6	10,0	10,0	10,0		
				12	12	12	12						
				11	11	11	11						
				7	8	9	11						
TOTAL				119B	119A	130D	143D						

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PENGANGGARAN KEMENTERIAN/ LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : DOWS	URUTAN TINDAK	RENCANA 2013			TARBIKET			RENCANA 2013			REVISI (Rp. Miliar)		
		URUTAN TINDAK			URUTAN TINDAK			RENCANA 2013			REVISI (Rp. Miliar)		
		2013	2014	2015	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Program Penguatan Penguasaan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Penguatan Penguasaan dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	021	
	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	022	
	023	023	023	023	023	023	023	023	023	023	023	023	
	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	024	
	025	025	025	025	025	025	025	025	025	025	025	025	
	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	026	
	027	027	027	027	027	027	027	027	027	027	027	027	027
	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028	028
	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029	029
	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030	030
Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Pelayanan Publik	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	031	
	032	032	032	032	032	032	032	032	032	032	032	032	
	033	033	033	033	033	033	033	033	033	033	033	033	
	034	034	034	034	034	034	034	034	034	034	034	034	
	035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	035	
	036	036	036	036	036	036	036	036	036	036	036	036	
	037	037	037	037	037	037	037	037	037	037	037	037	037
	038	038	038	038	038	038	038	038	038	038	038	038	038
	039	039	039	039	039	039	039	039	039	039	039	039	039
	040	040	040	040	040	040	040	040	040	040	040	040	040

REKAMEN LERJAN/LEMBAGAN : BPNWS	INDUKSI	KATEGORI	TASHERI			SIMPANSI (Rp. M (trn))		
			2015	2014		2014	2015	
				2015	2014		2015	2014
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Biaya	P22	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Biaya	3	2	12	17,8	01,0	33,0
			4	8	8	26,3	26,0	35,0
Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Biaya	P23	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Efisiensi Biaya	3	4	2	3,8	1,0	1,0
			2	4	2	18,7	16,0	16,0
Jumlah						39,6	39,6	70,0

11. No. 109 ?

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PROJEK	INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
			REVISI	PRAKARAN MARI			2013	2014	2015	2016		
				1.3	2014	2015					2016	
1	Program Dukungan Operasional dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Lainnya Organisasi Republik Indonesia	<p>Persentase penyelesaian dan penyelesaian tugas</p> <p>Persentase pelaksanaan tugas lainnya</p> <p>Jumlah pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain/negeri</p> <p>Persentase penyelesaian masalah/kegiatan</p> <p>Persentase penyelesaian dan penyelesaian laporan/kegiatan</p> <p>Persentase penyelesaian dan penyelesaian masalah/kegiatan</p> <p>Persentase penyelesaian dan penyelesaian masalah/kegiatan</p> <p>Persentase penyelesaian dan penyelesaian masalah/kegiatan</p> <p>Persentase penyelesaian dan penyelesaian masalah/kegiatan</p>	90	90	90	90	90	90	67,6	56,9	38,0	58,0

ILLUSTRASI

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : URUBISKALA		INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (MILYAR RUPIAH)			
			REVISI 1.3	Prakiraan Tahun			KURANG 2013	Prakiraan Biaya				
				2014	2015	2016		2014	2015	2016		
		Perkembangan dan kualitas sistem informasi yang akurat dan aktual	100	100	100	100						
1.1	Peningkatan dan perbaikan	Perkembangan dan kualitas sistem informasi yang akurat dan aktual	100	100	100	100	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		Perkembangan dan kualitas sistem informasi yang akurat dan aktual	100	100	100	100	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
		Perkembangan dan kualitas sistem informasi yang akurat dan aktual	100	100	100	100	3,7	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
1.2	Pangalihan dan inovasi	Perkembangan dan kualitas sistem informasi yang akurat dan aktual	100	100	100	100	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		Perkembangan dan kualitas sistem informasi yang akurat dan aktual	100	100	100	100	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
		Perkembangan dan kualitas sistem informasi yang akurat dan aktual	100	100	100	100	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
TOTAL ALOKASI			100	100	100	100	47,6	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9

ILLUSTRASI

TABEL 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NO	PRIORITAS/FOKUS KEGIATAN/PRODUKSI	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (Miliar Rupiah)					
			RENCANA 2013	PEKERJAAN MAJU		PEKERJAAN MAJU		RENCANA 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
01	Program Akademi Manajemen dan Pelaksanaan Topas Teknis Lainnya (NPP)											
4027	Pelaksanaan Dalam Rangka Penerbitan Keputusan dan Peraturan	Tersebutnya Dokumen: Perencanaan Program dan Anggaran, Pelaporan dan Dokumentasi	15 Dokumen 111 Dokumen	16 Dokumen dan 101 Ralat/revensi	15 Dokumen dan 20 Ralat/revensi	14 Dokumen dan 22 Ralat/revensi	45,00	70,00	53,00			53,50
		Tersebutnya Dokumen: Rencana Tindak Berbasis Risiko: Perencanaan Tahun 2013-2014	111 Dokumen	-	-	-	25,00	0	0	0	0	0
05	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan											
							135,00	135,00	42,51	42,51	64,71	64,71

Lampiran 1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERUBAHAN

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/PRIORITAS Wilayah Dasar	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (Milyar Rupiah)		
			REKENCA 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	REKENCA 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
4039	Pengelolaan Daerah	Tersedianya Data/bahan kebijakan/masukan dan rekomendasi Pengelolan Basis Wilayah Dasar	3 dokumen dan 4 rekomendasi	3 dokumen dan 4 rekomendasi	3 dokumen dan 4 rekomendasi	3 dokumen dan 4 rekomendasi	3,15	5,31	7,08
		Tersedianya Peraturan Pengelolan Basis Wilayah Dasar	1 draft peraturan	1 draft peraturan	-	-	2,25	0,00	0,00
		Tersedianya Laporan Fasilitas/Kemudahan/Fasilitas Pengelolan Basis Wilayah Dasar	10 Laporan	10 Laporan	-	-	1,00	0,00	0,00
		Terbangunnya 1500 batas wilayah dasar (naga, BSO, Gapokal dan	150 unit	150 unit	-	-	11,60	0,00	0,00
4040	Pengelolaan Daerah	Tersedianya Dukungan/Insentif/Masukan Selainkan Pengelolan Basis Wilayah Dasar dan	2 dokumen dan 2 rekomendasi	2 dokumen dan 2 rekomendasi	2 dokumen dan 2 rekomendasi	3 dokumen dan 4 rekomendasi	3,20	5,31	7,08
		Tersedianya laporan koordinasi/insentif/dukungan/insentif dan	2 laporan	2 laporan	-	-	0,75	0,00	0,00

11.M.A-2

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (Milyar Rupiah)			
			RENCANA 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	RENCANA 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perlintas Dukungar, Handara dan Peningkatan Dukungan Teknikal, Basis Wll, Isat dan udara.	3 unit Spesifikasi survey 10 unit alat kerumahaan dan pemantauan	3 unit Spesifikasi survey 10 unit alat kerumahaan dan pemantauan	-	-	6,30	6,30	0,00	0,00
		Terbangunnya sistem informasi peralihan peralihan data pengelolaan bus regional yang berbasis web (Lokal for local) No. 12/2010	1 Desain Sps Sistem Informasi Basis Lant	1 Desain Sps Sistem Informasi Basis Lant	-	-	1,20	1,20	0,00	0,00
		Terpeliharanya peralihan informasi yang akan diolah dan diolah	3 Patuk Teknik Sakremsi	3 Patuk Teknik Sakremsi	-	-	0,75	0,75	0,00	0,00
40-41	Pengelolaan Jantar Bataa Maggaa	Tersusunnya Dukungan/dukungan nasional dan dukungan pengelolan Jantar Bataa Maggaa	1 rekomendasi 5 rekomendasi	1 rekomendasi 5 rekomendasi	1 dokumen dan 7 rekomendasi	1 dokumen dan 7 rekomendasi	4,22	4,22	5,31	7,08
		Tersusunnya Peraturan Pengelolan Jantar Bataa Maggaa	3 Draft peraturan	3 Draft peraturan	-	-	1,12	1,12	0,00	0,00
		Tersusunnya Laporan Pelaksanaan/ Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi Pengelolan Jantar Bataa Maggaa	7 laporan	7 laporan	-	-	5,82	5,82	10,00	0,00
		Tersusunnya Laporan Kurangnya/SD dan/Perencanaan/Perencanaan Bataa Maggaa	1 laporan	1 laporan	-	-	0,55	0,55	0,00	0,00

II.M.12-3

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENYELIDIA PERBATASAN

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (Milyar Rupiah)			
			REKENCA 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	REKENCA 2013			
							TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	
		Tersedianya Sarana Pemlikartg Polisaraka Pengsi Pas Lintas Betas	20 unit	20 unit	-	-	0,8	0,8	0,00	0,00
		Tersedianya Sarana Perawatan Pas Lintas Betas (PLB)	5 PLB	5 PLB	-	-	13,10	13,10	0,00	0,00
4042	Pengelolaan Benda Barasan Perbatasan Darat	Tersedianya Dokumen/Rekomendasi Kasulkar Kelolaan Pengelolaan Perensi	4 dokumen dan 1 rekomendasi	4 dokumen dan 1 rekomendasi	4 dokumen dan 1 rekomendasi	3 dokumen dan 1 rekomendasi	4,00	4,00	5,91	7,08
		Tersedianya Perencanaan/Pengelolaan Perensi Kawasan Perbatasan Darat	2 perencanaan	2 perencanaan	-	-	1,00	1,00	0,00	0,00
		Tersedianya Fasilitas/Merakondasi/ Evaluasi Pengelolaan Perensi Kawasan Perbatasan Darat	5 laporan dan 4 unit	5 laporan dan 4 unit	-	-	10,00	10,00	0,00	0,00
4043	Penzasa Ruang Kawasan Perbatasan	Tersedianya Dokumen/rekomendasi Masukan seblakan Penzasa Ruang Kawasan Perbatasan	6 dokumen (5 prepus) dan 4 rekomendasi	5 dokumen (5 prepus) dan 4 rekomendasi	2 dokumen dan 3 rekomendasi	2 dokumen dan 3 rekomendasi	5,40	5,40	5,91	7,08

II.M.A-4

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENYELIDIA PERRATASAN

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (Milyar Rupiah)			
			REKENCA 2013	TAHUN 2014	PRAKIRAAN MAJU		REKENCA 2013	PRAKIRAAN MAJU		
					TAHUN 2015	TAHUN 2016		TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016
4044	Pengelolaan Zonasi Kawasan Perbatasan Laut	Tersusunnya Laporan Penilaian/ Monitoring/ Evaluasi Perataan Ruang Kawasan Perbatasan Tersusunnya Dokumen/rekomendasi Masukan sehubungan Pengeloaan Perataan Kawasan Perbatasan Laut Terlaksunanya Penilaian/ Monitoring/ Evaluasi Perataan Laut Perataan Kawasan Perbatasan Laut	0 Laporan 2 dokumen dan 2 rekomendasi	0 Laporan 2 dokumen dan 2 rekomendasi			4,40	4,40	0,00	0,00
4045	Pengelolaan Zonasi Kawasan Perbatasan Laut	Tersusunnya Laporan Penilaian/ Monitoring/ Evaluasi Perataan Laut Perataan Kawasan Perbatasan Laut	4 Laporan, 16 unit KJA, 15 Hasil proses dan 100 juta. dan 32 unit Pembuatan/kegiatan 2 unit gedung logistik/terminal, 10 unit Paket Paket 1 dokumen dan 1 rekomendasi	4 Laporan, 10 unit KJA, 15 Hasil proses dan 100 juta. dan 32 unit Pembuatan/kegiatan 2 unit gedung logistik/terminal, 10 unit Paket Paket 1 dokumen dan 1 rekomendasi			1,80	1,80	0,00	0,00
4046	Pengelolaan Zonasi Kawasan Perbatasan Laut	Tersusunnya Laporan Penilaian/ Monitoring/ Evaluasi Perataan Kawasan Perbatasan Laut	1 dokumen dan 1 rekomendasi	1 dokumen dan 1 rekomendasi			1,40	1,40	5,51	7,08

II.MA-5

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/PRIORITAS/KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI (Milyar Rupiah)			
			REKAMANA 2013	TAHUN 2014	PRAKIRAN MAJU		REKAMANA 2013	TAHUN 2014	PRAKIRAN MAJU	
					TAHUN 2014	TAHUN 2015			TAHUN 2015	TAHUN 2016
		Tersuturnya Laporan Kinerja/TP/ Evaluasi/ Identifikasi/kegiatan/ Pengukuran infrastruktur Publik Kawasan Terbatas	- Laporan	- Laporan	-	-	3,00	3,00	0,00	0,00
		Tertelaksananya Fasilitas perbatasan/Infrastruktur: Fisik di Kawasan Terbatas	1 laporan dan 7 tugas jalan/jembatan	1 laporan dan 7 tugas jalan/jembatan	-	10,70	10,70	0,00	0,00	0,00
4045	Pengolahan Infrastruktur/kegiatan/kegiatan dan semua Kawasan Perbatasan	Tersuturnya Dokumen/rekomendasi/program Masukan sebidang Pengelolan Infrastruktur Ekonomi dan Kesea Kawasan Terbatas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0,7	0,7	5,31	5,08	0,00
		Tertelaksananya kegiatan perbatasan dan infrastruktur/kegiatan/kegiatan kawasan perbatasan	3 laporan dan 9 unit	3 laporan dan 9 unit	-	5,30	6,15	0,00	0,00	0,00
		Tersuturnya laporan Monitoring/kegiatan/kegiatan Pengelolan Infrastruktur/kegiatan/kegiatan dan Kesea	2 laporan	2 laporan	-	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00

ICMA-6

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NASIONAL PENGELOLA PERUBAHAN

NO	PRIORITAS/FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR	REKENCA 2013			TARGET			ALOKASI (Milyar Rupiah)				
			REKENCA 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	REKENCA 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	REKENCA 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015
		Tersebutnya penyusunan/pemahaman/pertajihan teknis yang dilakukan di instansi terkait/kementerian dan lembaga kawasan perbatasan	1 draft penyusunan	1 draft penyusunan	1 draft penyusunan	1 draft penyusunan	1 draft penyusunan	1 draft penyusunan	1 draft penyusunan	0,4	0,4	0	0
4047	Pengelolaan Infrastruktur Pemukiman Kawasan Perbatasan	Tersebutnya Dukungan dan Rekomendasi Kebijakan, Pengelolan Fasilitas, dan Pemertanahan Kawasan Perbatasan	1 laporan dan 1 rekomendasi	1 laporan dan 1 rekomendasi	1 laporan dan 1 rekomendasi	1 laporan dan 1 rekomendasi	1 laporan dan 1 rekomendasi	1 laporan dan 1 rekomendasi	1 laporan dan 1 rekomendasi	3,50	3,50	5,31	7,08
		Tersebutnya penyusunan/pemahaman/pertajihan teknis; Pengelolaan Infrastruktur dan Pemertanahan Kawasan Perbatasan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2,00	2,00	0,00	0,00
		Tersebutnya fasilitasi/dukungan/merencanakan luas; Pengelolaan Infrastruktur; dan Pemertanahan Kawasan Perbatasan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	6,70	6,70	0,00	0,00
									JUMLAH	773,00	773,00	1,59,00	174,89

ILMIA-7

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2013
KEMENTERIAN / LEMBAGA: (112) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN TERAS DAN PELATIHAN PODAS DATAM
(BPKPPB- BATAM / BP-BATAM)

No	PRIORITY/ FOKUS PRIORITAS/ KEGIATAN PRIORITY	SARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI					
				RENCANA TAHUN 2013	2014	2015	2016	RENCANA TAHUN 2013	2014	2015	2016	
01	Program Dukungan Pelaksanaan dan Pelaksanaan Tugas/ekspedisi/kegiatan/kegiatan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang diselenggarakan secara berkala					500.000			500.000		
02	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur sipil negara					500.000			500.000		
							1.000.000			1.000.000		

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

NO	PROGRAM/PEKERJAAN/KELOMPOK/UNIT	SISWA	INDIKATOR	NO. INDIKATOR			KUALITAS			REVISI
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	
1	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Penilaian	1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan pendidikan	1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan pendidikan	1	1	1	100%	100%	100%	100%
			2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan pendidikan	1	1	1	100%	100%	100%	100%
			3. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan pendidikan	1	1	1	100%	100%	100%	100%
			4. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan pendidikan	1	1	1	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Penilaian	1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan pendidikan	1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan pendidikan	1	1	1	100%	100%	100%	100%
			2. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan pendidikan	1	1	1	100%	100%	100%	100%
			3. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan pendidikan	1	1	1	100%	100%	100%	100%
			4. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan penilaian di tingkat satuan pendidikan	1	1	1	100%	100%	100%	100%

L. MATIY

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA	NO. PROGRAM/KELOMPOK PROGRAM	SISWA	INDIKATOR	NO. INDIKATOR			KUALITAS	4. HASIL YANG DICIPTAKAN		
				INDIKATOR	INDIKATOR			PERSYARATAN	INDIKATOR	
					2013	2014			2015	2016
3	1. Promosi dan Pengembangan Kelembagaan	1. Promosi dan Pengembangan Kelembagaan	1. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan	1.1	1.1	2	50%	50%	50%	50%
			2. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan	2.1	2.1	2	50%	50%	50%	50%
			3. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan	3.1	3.1	2	50%	50%	50%	50%
4	2. Pengembangan Kelembagaan	2. Pengembangan Kelembagaan	1. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan	1.1	1.1	2	50%	50%	50%	50%
			2. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan	2.1	2.1	2	50%	50%	50%	50%
			3. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan	3.1	3.1	2	50%	50%	50%	50%
5	3. Pengembangan Kelembagaan	3. Pengembangan Kelembagaan	1. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan	1.1	1.1	2	50%	50%	50%	50%
			2. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan	2.1	2.1	2	50%	50%	50%	50%
			3. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan	3.1	3.1	2	50%	50%	50%	50%
TOTAL KEMENTERIAN/LEMBAGA										
							150%	150%	150%	150%

MAKHLAK 2.3 RENCANA JEMBAK PEMANGUNGAN KE MENTUBERASA, LUBUAGA TAJIUN JULU

KEMENTERIAN/DEPARTEMEN, SEKRETARIAT DESIDEBET

No.	JURUSAN/REKAMEN	SASARAN	JURISDIKSI	JEMBAT			SARANG/REKAMEN		
				NO. 1	PLAK. DESKAMEN	2740	NO. 1	PLAK. DESKAMEN	2740
1	1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.	1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.	1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	9. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	10. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1/2/2012

MATRIKS 2.2 RENCANA TINDAK PERBAIKAN KEMENTERIAN PERTANIAN, LERBRAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN, SEKRETARIAT BIDANG

No	TINDAKAN	SASARAN	INDIKATOR	REKORDETERJALAN		TARBIK		REKORDETERJALAN	REKORDETERJALAN	INDIKATOR PERKUR				
				Nilai	Target	Nilai	Target			Nilai	Target			
1	KEMENTERIAN PERTANIAN, SEKRETARIAT BIDANG	1. Meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian	1. Meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian	1.1. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				1.2. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				1.3. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.4. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.5. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.6. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.7. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.8. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.9. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				1.10. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	KEMENTERIAN PERTANIAN, SEKRETARIAT BIDANG	2. Meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian	2. Meningkatkan pelayanan dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian	2.1. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				2.2. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				2.3. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				2.4. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				2.5. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				2.6. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				2.7. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				2.8. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				2.9. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				2.10. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

1/2/2012

MATERI 2.5 RENCANA STRATEGIS PERUSAHAAN/LEMBAGA TAHUNAN 2012

NO	PROGRAM, KEGIATAN, PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	MENCAPAI			MENCAPAI			MENCAPAI					
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014			
1	Program Reformasi Birokrasi (P3B) dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Efisiensi Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Efisiensi Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	Meningkatkan Kualitas SDM dan Kinerja Pegawai	Kualitas SDM dan Kinerja Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Pengembangan Sistem Informasi (SI)	Meningkatkan Efektivitas Sistem Informasi	Efektivitas Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Pengembangan Hubungan Masyarakat (HM)	Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Masyarakat	Citra dan Kepercayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Pengembangan Lingkungan Hidup (LH)	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Kualitas Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Program Pengembangan Kerjasama (K)	Meningkatkan Jumlah Kerjasama	Jumlah Kerjasama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Program Pengembangan Anggaran (A)	Meningkatkan Efisiensi Anggaran	Efisiensi Anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Program Pengembangan Evaluasi (E)	Meningkatkan Kualitas Evaluasi	Kualitas Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Program Pengembangan Inovasi (I)	Meningkatkan Jumlah Inovasi	Jumlah Inovasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Program Pengembangan Komunikasi (K)	Meningkatkan Efektivitas Komunikasi	Efektivitas Komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Program Pengembangan Manajemen (M)	Meningkatkan Efisiensi Manajemen	Efisiensi Manajemen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Program Pengembangan Regulasi (R)	Meningkatkan Kualitas Regulasi	Kualitas Regulasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Program Pengembangan Sistem Pengendalian (SP)	Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengendalian	Efektivitas Sistem Pengendalian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Program Pengembangan Sistem Pengawasan (SP)	Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengawasan	Efektivitas Sistem Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Program Pengembangan Sistem Pengukuran (SP)	Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengukuran	Efektivitas Sistem Pengukuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Program Pengembangan Sistem Pengendalian Mutu (SPM)	Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengendalian Mutu	Efektivitas Sistem Pengendalian Mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Program Pengembangan Sistem Pengendalian Risiko (SPR)	Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengendalian Risiko	Efektivitas Sistem Pengendalian Risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Program Pengembangan Sistem Pengendalian Lingkungan (SPL)	Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengendalian Lingkungan	Efektivitas Sistem Pengendalian Lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Program Pengembangan Sistem Pengendalian Sosial (SPS)	Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengendalian Sosial	Efektivitas Sistem Pengendalian Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Program Pengembangan Sistem Pengendalian Budaya (SPB)	Meningkatkan Efektivitas Sistem Pengendalian Budaya	Efektivitas Sistem Pengendalian Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PLN/115/1

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013
KEMENTERIAN/LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

NO	PROGRAM/KELOMPOK PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	RENCANA 2013				ALOKASI JMLH GURUS/RIH			
				2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
1	PROGRAM PARTISIPASI DAN PEMBERKASABAN SUBSIDIARIS	1. Mendapatkan dan meningkatkan kualitas pemrograman radio. 2. Mengikuti kegiatan sosial dan ke-NGO.	1. Jumlah siaran langsung dan siaran terpadu. 2. Jumlah kegiatan sosial dan ke-NGO.	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000
2	KELOMPOK PERSIAPAN	1. Mendapatkan dan meningkatkan kualitas pemrograman radio. 2. Mengikuti kegiatan sosial dan ke-NGO.	1. Jumlah siaran langsung dan siaran terpadu. 2. Jumlah kegiatan sosial dan ke-NGO.	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000	1. 20000 2. 20000

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN : LEMBARA PENGANTAR PUBLIKASI DAN KEGIATAN KEPERAWATAN

NO	PROGRAM/KELOMPOK/TAJUK	LOKASI	MATERI	MATERI	PISAN MANA SAJAU				SILKES (MILIKERJASARI)				
					2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	
11	Keperawatan Gerontik dan Geriatri	12			12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.42	Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Keperawatan Gerontik dan Geriatri	12	Teori dan konsep keperawatan gerontik dan geriatri	12.001	12.002	12.003	12.004	12.005	12.006	12.007	12.008	12.009	12.010
5.43	Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Keperawatan Gerontik dan Geriatri	12	Teori dan konsep keperawatan gerontik dan geriatri	12.001	12.002	12.003	12.004	12.005	12.006	12.007	12.008	12.009	12.010
5.44	Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Keperawatan Gerontik dan Geriatri	12	Teori dan konsep keperawatan gerontik dan geriatri	12.001	12.002	12.003	12.004	12.005	12.006	12.007	12.008	12.009	12.010
5.45	Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Keperawatan Gerontik dan Geriatri	12	Teori dan konsep keperawatan gerontik dan geriatri	12.001	12.002	12.003	12.004	12.005	12.006	12.007	12.008	12.009	12.010

KEMENTERIAN KESEHATAN : LINTAS AGA PENTABER PUBLIKASI DAN KEPERAWATAN INDONESIA

KES	PROGRAM/KELOMPOK/KELOMPOK	KEMAHAN	MATERI/LOKUS	REVISI/REVISI	PUSKESMAS/UMUM				PUSKESMAS/UMUM						
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111

111116-2

KEHUTERAN DAN KESEHATAN : LINTAS AGA PENTARAPAN PUBLIC RADIO KEPERAWATAN INDONESIA

KRS	PROGRAM/NEKONOMIS/PROYEKSI	LOKASI	MATERI	INSTRUKTOR	REVISI/REVISI			PENGANGGARAN			SILANGI/IMILIKER/UMUM						
					2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
11	Program Keperawatan di Rumah Sakit	11	Keperawatan di Rumah Sakit	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
2	Program Keperawatan di Rumah Sakit	11	Keperawatan di Rumah Sakit	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11

111111-4

BUKITIKS, SUMEDARA, SUMEDARA, KEMEN TERJAN, LEMBAGA TAHUN 2014

KEMENTERIAN LEMBAGA : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI BEPUBLIK INDONESIA

NO	PROGAM/PROJEK/KEGIATAN	SISTEM	INDIKATOR	REVENUE			EXPENSE			NET RESULT								
				2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013						
1	PROGAM PENYIARAN PUBLIK TELEVISI		1. Jumlah siaran per jam															
			2. Jumlah penonton per jam															
			3. Jumlah iklan per jam															
			4. Jumlah pendapatan per jam															
			5. Jumlah biaya produksi per jam															
			6. Jumlah keuntungan per jam															

11/11/12

MATRIS 2.3 RENCANA TINDAK PEMERINTAHAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013

KOMPILASI RENCANA TINDAK PEMERINTAHAN PUBLIK TERSERJIP DI BENCORONESIA

No	TUJUAN/URAIAN TUGAS	HASIL	JANGKA WAKTU	SISWA		KEMAHKUMUDAN	
				KEMAHKUMUDAN		KEMAHKUMUDAN	
				2012	2011	2012	2011
1	Hasil dari kegiatan yang di lakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan terampil di bidang kehutanan di tingkat desa/kelurahan	Hasil dari kegiatan yang di lakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang profesional dan terampil di bidang kehutanan di tingkat desa/kelurahan	300 orang	300 orang	150 orang	150 orang	
2	Program kerjasama pemerintah desa/kelurahan dengan lembaga/kelompok masyarakat di bidang kehutanan	Program kerjasama pemerintah desa/kelurahan dengan lembaga/kelompok masyarakat di bidang kehutanan	100 orang	100 orang	50 orang	50 orang	

MATRIKS 2.3 RENCANA TINDAK PERMUNGKINAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2013

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (118) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PERAIRAN BEBAS SABANG (BKPPB-SABANG/ BPSS)

No	PRIORITAS, FOKUS PRIORITAS, KEGIATAN, URGULAS	SARASAN	INDIKATOR	BENTUK TUBUS 2013	TARGET		ALOKASI	
					2013	2014	2013	2014
01	PERUSAHAAN/LEMBAGA : (118) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PERAIRAN BEBAS SABANG (BKPPB-SABANG/ BPSS)	Memperluas jumlah investasi dan lapangan kerja di kawasan industri, pariwisata, perdagangan, jasa, jasa keuangan dan jasa lainnya	Investasi dan lapangan kerja		40.103	40.103	40.103	
02	PERUSAHAAN/LEMBAGA : (118) BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PERAIRAN BEBAS SABANG	Menyediakan jasa investasi dan lapangan kerja di kawasan industri, pariwisata, perdagangan, jasa, jasa keuangan dan jasa lainnya	Investasi dan lapangan kerja		302.200	302.200	302.200	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

U. 13.118.1

BAB 1 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2010-2014

1.1 Pendahuluan

Pengembangan wilayah didasarkan pada pembagian 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2013 mempertimbangkan berbagai hal, yaitu: (i) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (ii) kinerja pembangunan dan isu strategis di setiap wilayah; (iii) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014; (iv) rencana tata ruang wilayah pulau dan pola pemanfaatan ruang yang optimal; (v) pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI; dan (vi) pelaksanaan program percepatan pengurangan kemiskinan, yaitu: Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan Masyarakat, Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, dan Klaster 4 (keempat) Program Pro Rakyat.

Berbagai program dan prioritas tersebut sejalan dengan empat strategi utama, yaitu: percepatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), pengurangan kemiskinan (*pro-poor*), pengurangan pengangguran (*pro-job*) dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan (*pro-environment*).

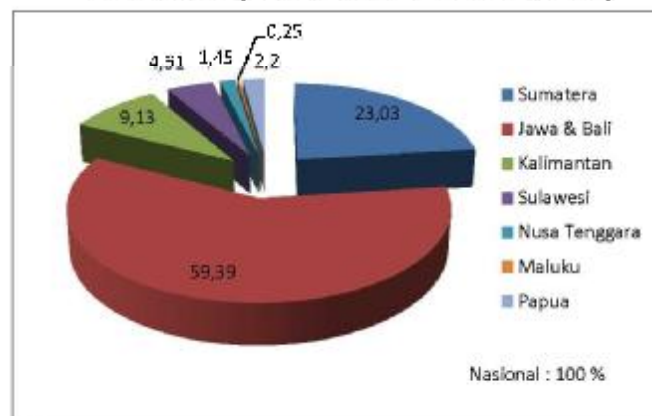
1.2 Kinerja dan Tantangan Pembangunan Wilayah

1.2.1 Perekonomian Wilayah

Sejalan dengan kemajuan perekonomian nasional, PDRB di semua wilayah menunjukkan peningkatan. Kemajuan perekonomian di beberapa wilayah dan provinsi di luar wilayah Jawa-Bali tumbuh di atas rata-rata nasional. Namun demikian, kesenjangan pembangunan wilayah tetap relatif tinggi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2010, wilayah Jawa-Bali masih menjadi pusat kegiatan ekonomi utama dengan sumbangan PDRB rata-rata per tahun lebih dari 59 persen dan wilayah Sumatera lebih dari 23 persen, sementara sumbangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,

Maluku dan Papua sekitar 17 persen. Tingginya PDRB Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera disebabkan oleh perkembangan kegiatan investasi dan produksi yang cukup pesat, dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi yang memadai dibanding wilayah lain. Perkembangan ekonomi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua secara bertahap mulai meningkat, namun masih mengandalkan ketersediaan sumberdaya alam (primer). Perkembangan industri pengolahan dan jasa-jasa di wilayah tersebut masih relatif lambat. Hambatan percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut adalah terbatasnya prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi serta ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

GAMBAR 1.1
SUMBANGAN PDRB MENURUT WILAYAH ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2010 (% TERHADAP TOTAL NASIONAL)

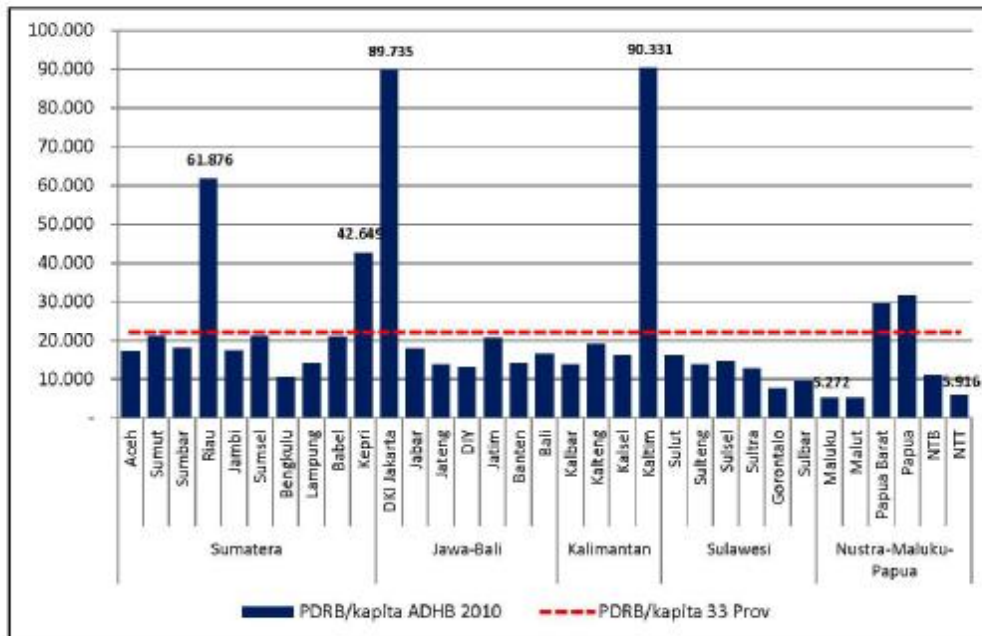


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah, 2010)

PDRB perkapita rata-rata antarwilayah menunjukkan adanya perbedaan yang cukup tinggi antarwilayah. Rata-rata PDRB perkapita tahun 2010 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (ADHK tahun 2000) untuk wilayah Sumatera sebesar Rp. 9,77 juta per jiwa, Jawa-Bali sebesar Rp. 19,50 juta per jiwa, Kalimantan sebesar Rp. 13,82 juta per jiwa, dan Papua sebesar Rp. 9,34 juta per jiwa. Sementara Wilayah Sulawesi, Kepulauan

Maluku, dan Nusa Tenggara rata-rata PDRB perkapita kurang dari Rp. 10 juta per jiwa dan terendah di Kepulauan Maluku sebesar Rp. 2,87 juta per jiwa.

GAMBAR 1.2
PDRB PERKAPITA DENGAN MIGAS ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2010
MENURUT PROVINSI

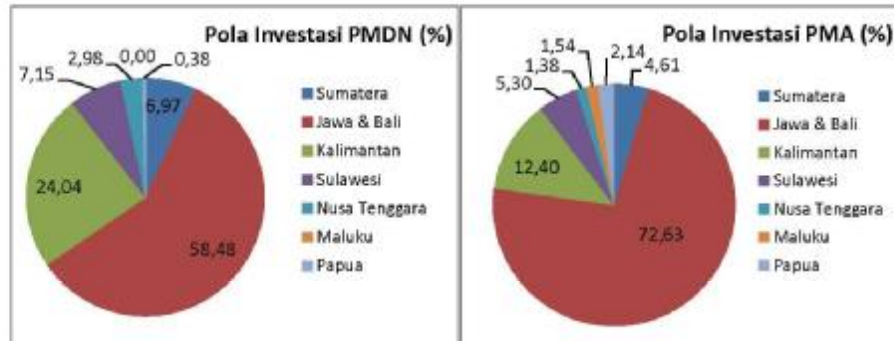


Sumber: BPS 2010 (diolah)

Salah satu penyebab kesenjangan PDRB antarwilayah adalah kurang meratanya persebaran investasi antardaerah. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2010 terpusat di wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan. Realisasi investasi PMDN di wilayah Jawa-Bali sebesar 58,48 persen dan wilayah Kalimantan sebesar 24,04 persen dari total realisasi PMDN. Wilayah Jawa-Bali juga menjadi pusat Penanaman Modal Asing (PMA). Persebaran investasi PMA tahun 2010 terpusat di wilayah Jawa-Bali sekitar 72,63 persen, dan di wilayah Kalimantan sekitar 12,40 persen. Sementara, nilai realisasi PMA di wilayah Kalimantan,

Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua secara keseluruhan sangat kecil, yaitu rata-rata kurang dari 5 persen dari total realisasi PMA (Gambar 1.3). Tantangan yang perlu diatasi adalah mendorong persebaran kegiatan investasi ke wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

GAMBAR 1.3
REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA MENURUT WILAYAH TAHUN 2010

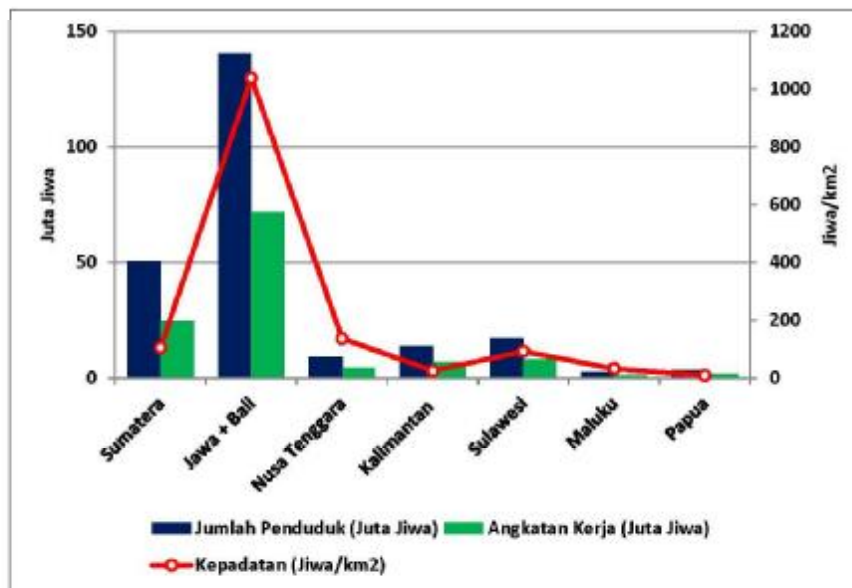


Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah), 2010

1.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan

Perkembangan kegiatan ekonomi mempunyai pengaruh timbal balik terhadap persebaran penduduk dan kesejahteraan sosial. Dengan luas sekitar 7 persen dari total luas wilayah nasional, wilayah Jawa-Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi utama harus menampung 61 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara, Papua dengan luas wilayah sekitar 22 persen dari total luas wilayah nasional hanya menampung sekitar 1 persen dari seluruh penduduk. Sebaran penduduk menunjukkan tingkat kepadatan penduduk terpusat di kota-kota besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

GAMBAR 1.4
PERSEBARAN PENDUDUK ANTARWILAYAH TAHUN 2010

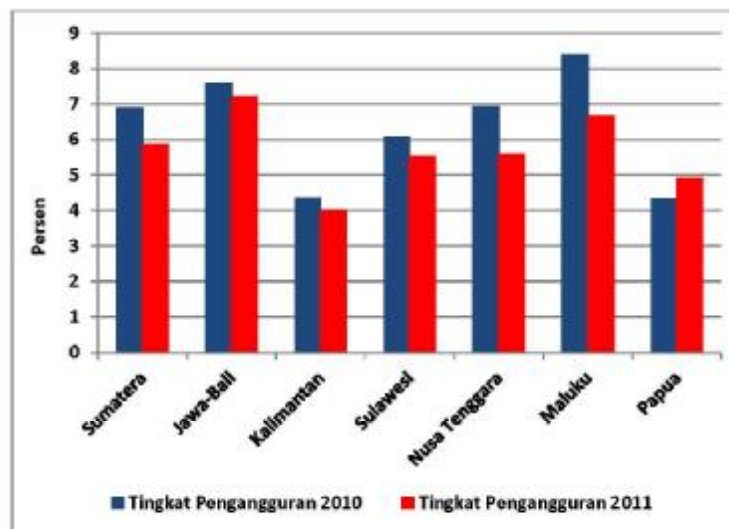


Sumber: BPS 2010.

*) Sakernas (Februari 2011)

Dengan memusatnya penduduk di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, jumlah angkatan kerja tertinggi berada di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali, sedangkan jumlah angkatan kerja terendah di wilayah Maluku dan Papua. Sementara, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di wilayah Jawa-Bali sebesar 7,22 persen pada tahun 2011 berkurang dibanding tahun 2010 yang mencapai 7,59 persen. Tingkat pengangguran tahun 2011 di seluruh wilayah relatif menurun dibanding tahun 2010, kecuali Papua. Kondisi ini menegaskan pentingnya perluasan lapangan kerja di Papua (Gambar 1.5).

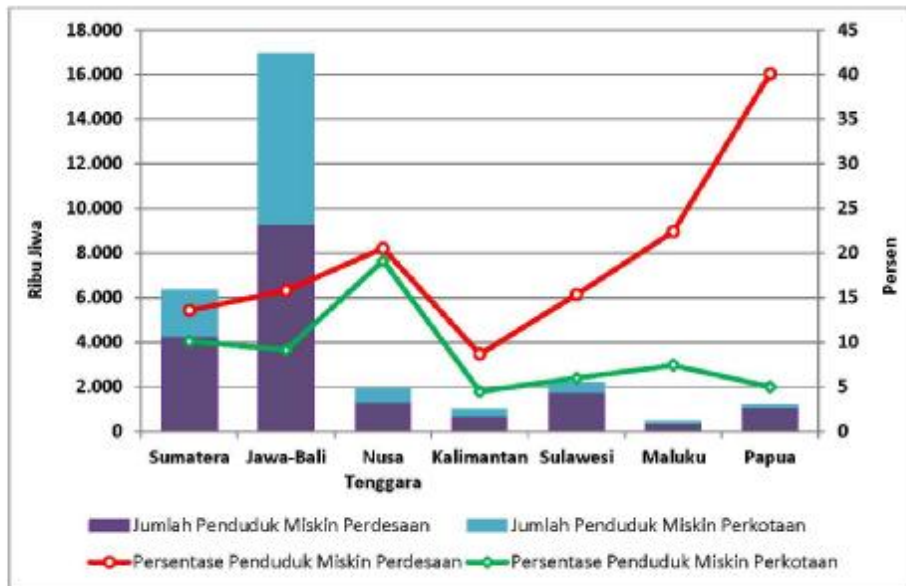
GAMBAR 1.5
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PER WILAYAH TAHUN 2010-2011,
(DALAM PERSEN).



Sumber: Sakernas, Agustus, BPS

Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011 adalah 29,89 juta jiwa atau 12,36 persen dari seluruh penduduk. Dari jumlah tersebut, 18,94 juta jiwa penduduk miskin tinggal di perdesaan dan sisanya 10,95 juta jiwa di perkotaan (Gambar 1.6). Jumlah penduduk miskin di wilayah Jawa-Bali baik di daerah perkotaan maupun perdesaan tercatat paling tinggi, yakni sekitar 57 persen dari total penduduk miskin. Berdasarkan persentase penduduk miskin, wilayah Papua merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar 30,68 persen, dan berikutnya wilayah Nusa Tenggara sebesar 20,09 persen dan wilayah Maluku sekitar 17,44 persen. Kondisi ini menyiratkan perlunya penanganan kemiskinan secara tuntas dan nyata, dan percepatan pembangunan wilayah Papua, Nusa Tenggara dan Maluku. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi adalah mempercepat pembangunan perdesaan terutama di wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara.

GAMBAR 1.6
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN
MENURUT WILAYAH TAHUN 2011

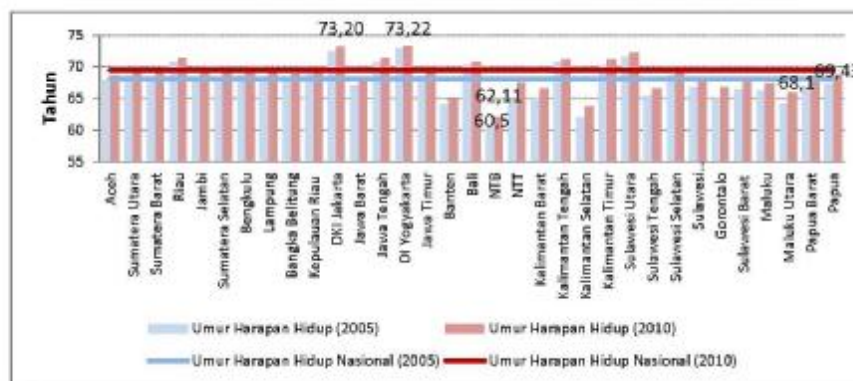


Sumber : Badan Pusat Statistik, September 2011

Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di wilayah Jawa-Bali secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan UHH tertinggi di Provinsi D.I Yogyakarta sebesar 73,22 tahun dan DKI Jakarta sebesar 73,20 tahun. UHH penduduk di wilayah Sumatera setara dengan UHH nasional. Hampir setengah dari seluruh provinsi memiliki UHH lebih rendah dari UHH nasional terutama di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. UHH terendah tercatat di Nusa Tenggara Barat sebesar 62,11 tahun. Perkembangan UHH selain dipengaruhi oleh asupan gizi dan pola hidup masyarakat juga dipengaruhi oleh mutu dan jangkauan layanan kesehatan. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi adalah mendorong peningkatan gizi dan perbaikan pola hidup sehat masyarakat, serta perluasan akses pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi penduduk di wilayah Nusa

Tenggara, Maluku, Papua, Sulawesi dan Kalimantan (Gambar 1.7).

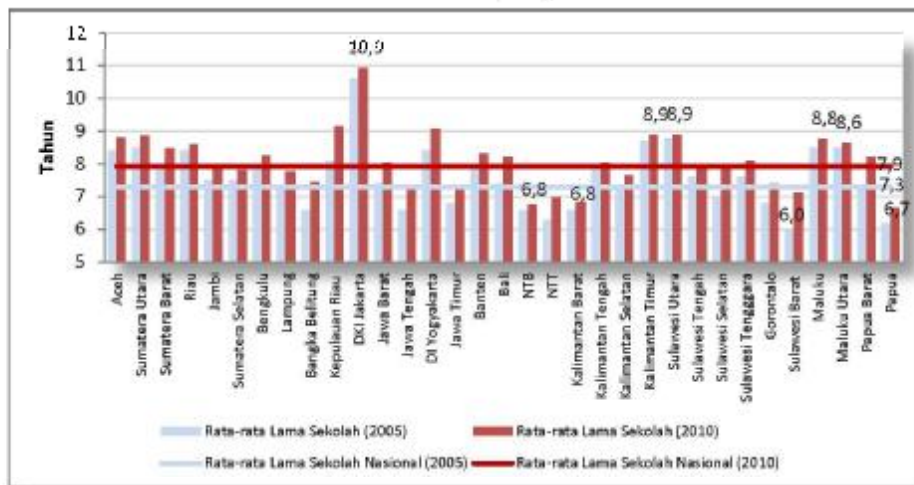
GAMBAR 1.7
UMUR HARAPAN HIDUP PADA TAHUN 2005-2010 PER PROVINSI



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Tingkat kesejahteraan rakyat juga dipengaruhi oleh akses layanan pendidikan yang salah satunya diukur dari rata-rata lama sekolah (RLS). Angka RLS nasional meningkat dari 7,3 tahun pada tahun 2005 menjadi sebesar 7,9 tahun pada tahun 2010 (lihat Gambar 1.5). RLS di wilayah Nusa Tenggara relatif paling rendah dibanding RLS di wilayah lain. Kondisi ini menyiratkan bahwa rata-rata lama sekolah selain dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam menyediakan biaya pendidikan juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan baik gedung sekolah, peralatan, guru dan fasilitas pendidikan lainnya. Tantangan yang harus diatasi adalah perluasan akses pelayanan pendidikan di wilayah Nusa Tenggara (Gambar 1.8).

GAMBAR 1.8
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) TAHUN 2005-2010

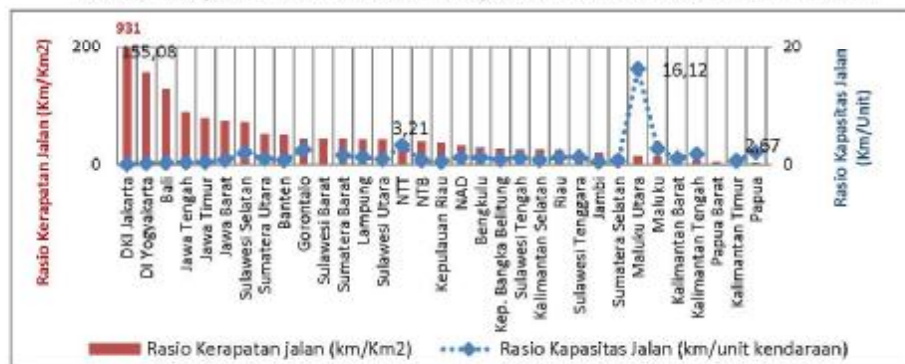


Sumber : Hasil Olahan BPS, 2011

1.2.3 Sarana dan Prasarana

Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan dan Maluku menghadapi keterbatasan prasarana dan sarana transportasi terutama jalan. Rasio Kerapatan Jalan (rasio panjang jalan dan luas wilayah daratan) di wilayah Papua, Maluku dan Kalimantan relatif rendah sehingga perlu percepatan pembangunan jalan. Sementara, Rasio Kapasitas Jalan (rasio panjang jalan dan jumlah unit kendaraan roda 4) di wilayah Jawa-Bali relatif rendah sehingga perlu pengembangan transportasi massal untuk mengatasi kemacetan lalu lintas (lihat Gambar 1.9).

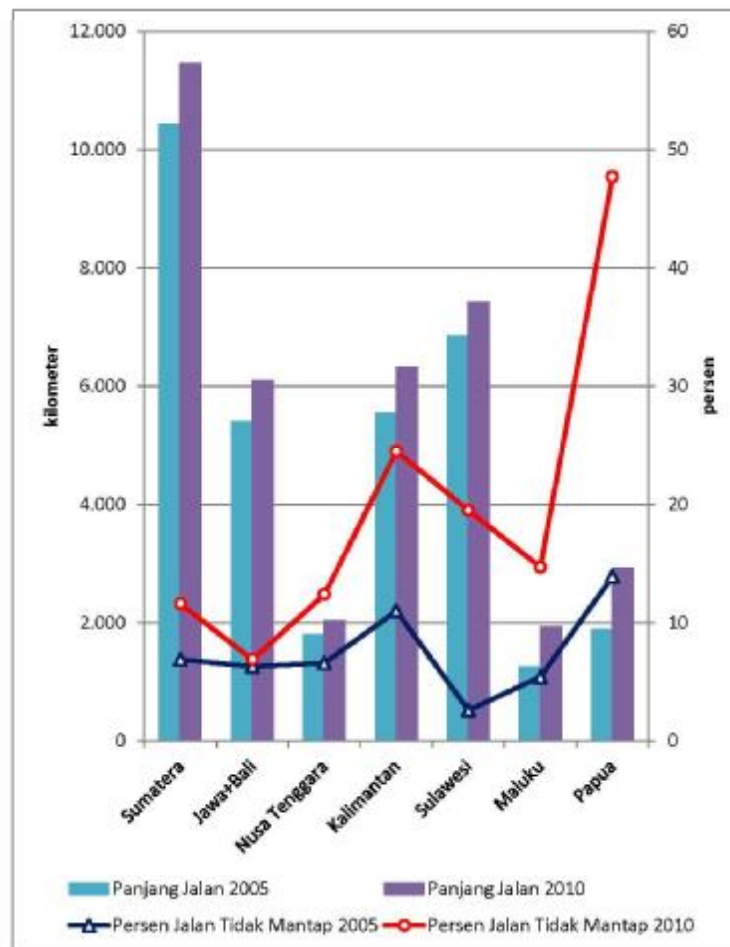
GAMBAR 1.9
KAPASITAS JALAN DAN KERAPATAN JALAN PER PROVINSI TAHUN 2008



Sumber : Departemen Pekerjaan Umum (diolah)

Berdasarkan kondisi jalan nasional, jumlah jalan tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) cenderung meningkat di setiap wilayah. Kondisi jalan tidak mantap antarwilayah tertinggi terdapat di wilayah Kalimantan sepanjang 1.547,66 km (24,5%), wilayah Papua 1.394,17 Km (47,7%), dan Sulawesi 1.445,39 Km (19,5%). Kondisi ini menghambat mobilitas barang dan penumpang yang menyebabkan harga komoditas menjadi tinggi dan berdampak terhadap kinerja perekonomian daerah. Oleh sebab itu, pembangunan dan pemeliharaan pembangunan jalan di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara menjadi sangat penting dan mendesak.

GAMBAR 1.10
KONDISI JALAN NASIONAL PADA TAHUN 2005 DAN 2010

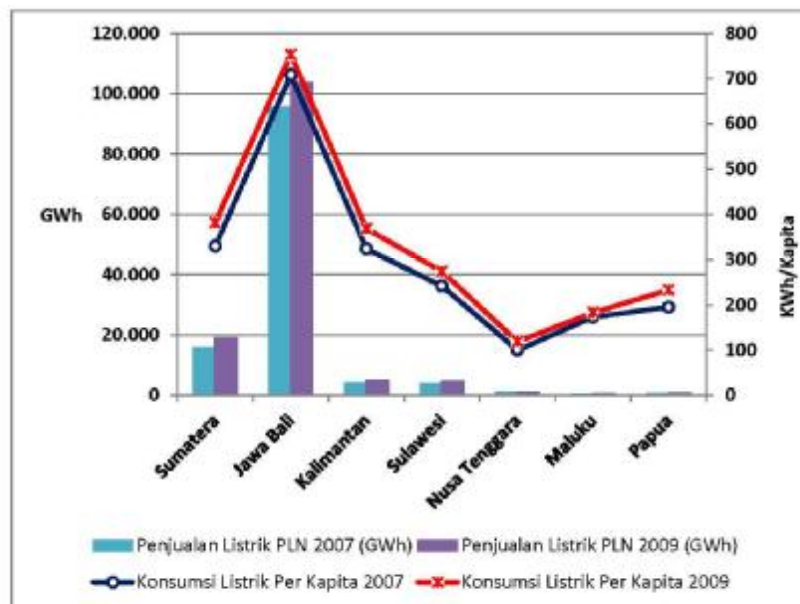


Sumber : Kementerian . PU

Perkembangan penjualan energi listrik PLN dan konsumsi listrik perkapita tertinggi tercatat di wilayah Jawa- Bali dan terendah di wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan akses listrik.

Ketersediaan listrik sangat penting bagi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi pada tahun 2013 adalah pentingnya perluasan akses layanan listrik di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Sulawesi dan Kalimantan.

GAMBAR 1.11
PERKEMBANGAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DAN
KONSUMSI PERKAPITA TAHUN 2007—2009.



Sumber: Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Keterangan : GWh = Giga Watt hour; KWh = Kilo Watt hour

1.2.4 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data tahun 2009, potensi hutan yang dapat dikelola seluas 81.857,80 ha yang berasal dari hutan produksi terbatas, hutan produksi dan hutan produksi. Potensi hutan sebagian besar terdapat di wilayah Kalimantan sebesar 36,37 persen, di Papua sebesar 26,76 persen dan wilayah Sumatera sebesar 20,48 persen. Kondisi ini menyiratkan adanya potensi pengembangan perkebunan di tiga wilayah tersebut. Tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2013 adalah

mengelola sumber daya hutan secara cermat, produktif, efektif, bijaksana dan memperhatikan kaidah pembangunan yang berkelanjutan dan kelestarian hutan.

Sumber daya alam lainnya adalah perkebangan dan energi terutama batu bara, gas bumi dan minyak bumi. Potensi gas bumi sebagian besar terdapat di Wilayah Sumatera mencapai sekitar 70 TSCF sebesar Papua (23,91 TSCF) dan Kepulauan Maluku (18,22 TSCF). Sementara cadangan minyak bumi Indonesia mencapai 7.039,57 MMSTB [*Million Stock Tank Barrels/Cadangan Minyak Bumi*] terutama terdapat di Wilayah Sumatera Tengah sebesar 49,4 persen, Jawa Timur sebesar 13,2 persen, Sumatera Selatan sebesar 11,2 persen, dan Kalimantan sebesar 8,6 persen dari total cadangan minyak bumi nasional. Tantangan yang harus diatasi adalah optimalisasi potensi gas bumi untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

TABEL 1.1
LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI
KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN PER PROVINSI
(S.D. BULAN SEPTEMBER 2009, (RIBU HEKTAR)).

Wilayah	Penggunaan Lahan (ribu ha)							
	KSA	HL	HPT	HP	HPK	TB	KH	KHP
Sumatera	5.009,0	5.972,8	5.925,0	7.402,2	5.445,6	129,7	27.639,3	27.870,4
Jawa-Bali	776,5	801,5	430,2	1.429,7	0,0	12,4	3.152,3	3.440,3
Nusa Tenggara	516,9	1.161,7	894,0	579,0	101,0	12,6	2.622,7	3.053,9
Kalimantan	4.753,5	6.383,2	10.535,6	14.277,7	4.963,4	0,0	50.615,3	40.697,0
Sulawesi	2.308,0	7.104,2	5.504,0	7.491,2	601,5	13,0	11.728,2	11.669,1
Maluku	423,3	1.003,6	1.653,6	1.053,2	5.504,9	0,0	7.145,1	7.264,7
Papua	9.706,3	10.619,1	2.054,1	10.505,2	9.262,1	0,0	50.545,4	42.224,8
Total	43.511,5	31.551,1	22.427,3	36.748,1	24.682,4	167,6	133.418,8	136.022,4

Sumber : Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, 2006

Keterangan:

- Data dasar dari citra landsat yang disempurnakan dengan citra *orthorectified* dan SRTM serta *ground check*
- Data digital penutupan lahan (skala 1:250.000) hasil penafsiran Citra Landsat 7 ETM+ Tahun 2005/2006
- Data digital kawasan hutan hasil digitasi peta lampiran SK Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi kecuali Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan TGHK

KSA = Kawasan Suaka Alam + Pelestarian Alam (ha)

HL = Hutan Lindung (ha)

HPT = Hutan Produksi Terbatas (ha)

HP = Hutan Produksi (ha)

HPK = Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ha)

TB = Taman Buru (ha)

KH = Kawasan Hutan (ha)

KHP = Kawasan Hutan dan Perairan (ha)

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2013

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2013 mengacu pada RPJMN 2010-2014 :

1. Mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik;
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;
4. Pemihakan bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana;
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Pada pelaksanaannya, pada tahun 2013 secara nyata antara lain meliputi : (i) kegiatan-kegiatan tertuang pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (ii) percepatan pengurangan kemiskinan melalui program empat klaster yang lebih efektif dan sinergis; (iii) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat serta percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur.

Dengan memperhatikan strategi tersebut, maka arah dan prioritas pengembangan wilayah tahun 2013 adalah sebagai berikut:

TABEL 1.2
ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH

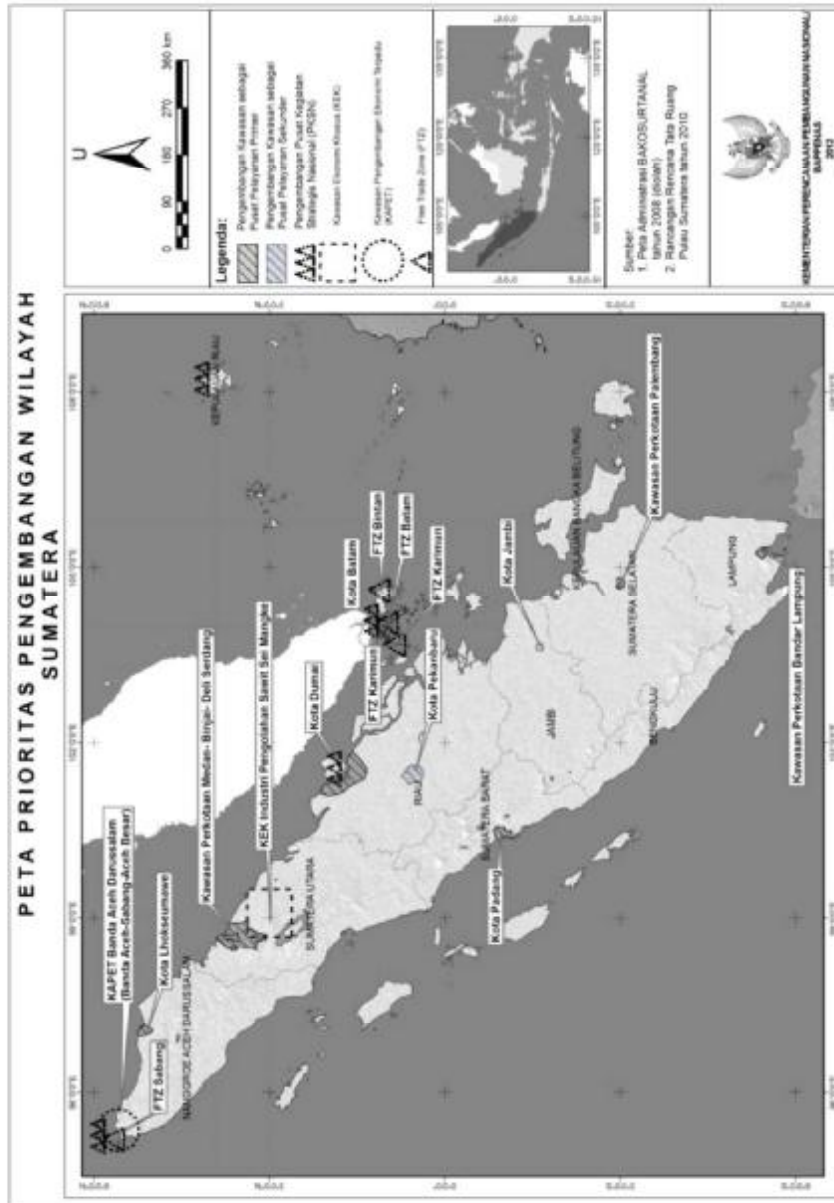
Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Prioritas Pengembangan
Sumatera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan; 2. Lumbung energi nasional; 3. Pusat perdagangan dan pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pengolahan Sawit Sei Mangkei; 2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Banda Aceh Darussalam; 3. Pengembangan mutu dan produksi pertanian di Aceh, Bengkulu, Riau, Lampung, dan Kepulauan Riau; 4. Pengembangan pusat industri dan pengolahan pertanian di Sumatera Utara dan Lampung ; 5. Pengembangan sarana irigasi di Aceh, Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Selatan;

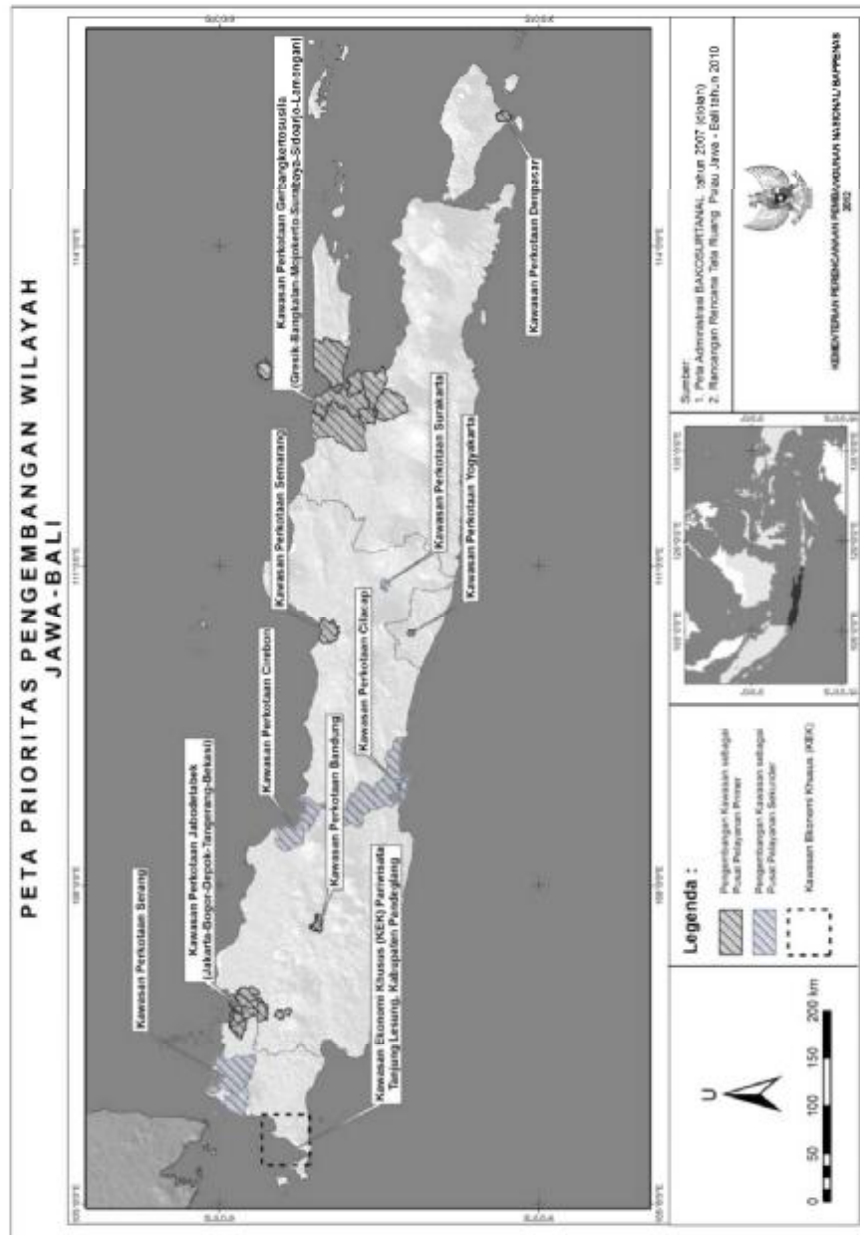
Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Prioritas Pengembangan
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Pengembangan infrastruktur penghubung berupa jalan di Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara; 7. Pengembangan jalan Tol di Riau dan Sumatera Utara; 8. Pengembangan infrastruktur kereta api di Aceh dan Sumatera Barat; 9. Pengembangan Bandara Sultan Thaha, Bandara Raja Haji Fisabilillah, Bandara Tanjung Pandan, Bandara Sultan Mahmud Baderudin, dan Bandara Sultan Syarif Kasim II; 10. Pengembangan Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Merak-Dakhekuni, dan Pelabuhan Farang; 11. Pengembangan pariwisata di Bangka Belitung;
Jawa-Bali	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lumbung pangan nasional; 2. Pengembangan industri pengolahan; 3. Penguatan intervensi perdagangan; 4. Peningkatan mutu pelayanan jasa dan pariwisata bertaraf internasional, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung; 2. Pengembangan Pertanian di Bah, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; 3. Pengembangan Pengairan dan Irigasi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; 4. Pengembangan Infrastruktur jalan di Bali, Jalan Lintas Lora Jawa, dan Ruas Semarang- Bawen- Yogyakarta; 5. Pengembangan jalan tol Tanjung Priok, Cisumdawu, dan Mantingan-Solo-Kertosono; 6. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Pamanukan, Taddan, Pascan, dan Branca; 7. Pengembangan infrastruktur perkotaan di ibodotabek (elektrifikasi) dan <i>double-track</i> lintas utara Jawa;
Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; 2. Peningkatan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Kiatulistiwa, DAS Kasah, Sasambir, dan Iatuhun; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai; 3. Pengembangan Infrastruktur jalan dan jembatan; 4. Pengembangan mutu dan produksi pertanian; 5. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi
Sulawesi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lumbung pangan nasional 2. Peningkatan produktivitas dan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung, Palapas, Pare-pare, dan

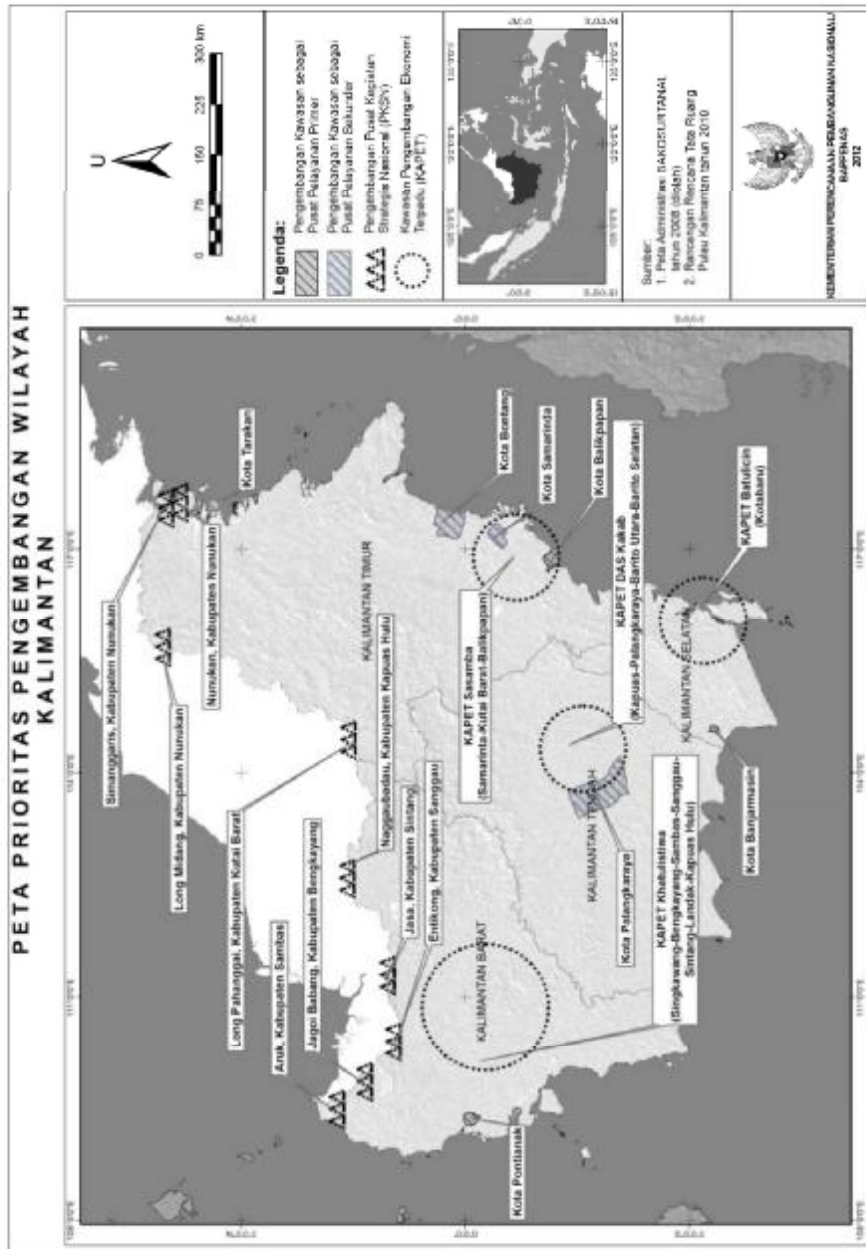
Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Prioritas Pengembangan
	<p>nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan</p> <p>3. Pengembangan bioenergi</p> <p>4. Peningkatan dan perluasan perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional.</p>	<p>Hank Sejahtera Sultra;</p> <p>2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Melangubato dan Tahuna;</p> <p>3. Pengembangan infrastruktur jalan;</p> <p>4. Pengembangan produktivitas dan mutu pertanian;</p> <p>5. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi.</p>
Nusa Tenggara	<p>1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan;</p> <p>2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan;</p> <p>3. Peningkatan produktivitas dan pariwisata;</p> <p>dengan memperbaiki keterkaitan wilayah-wilayah pulau</p>	<p>1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAFT) Bima dan Nelay;</p> <p>2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Acombur, Kafamenebu, dan Kalakahi;</p> <p>3. Pengembangan infrastruktur jalan dan pelabuhan penyeberangan;</p> <p>4. Pengembangan kawasan pariwisata;</p> <p>5. Pengembangan pengairan dan irigasi.</p> <p>Dalam rangka percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan prioritas:</p> <p>1. Pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pusat produksi dan pengolahan komoditas unggulan jagung dan kakao, pusat pembenihan dan produksi sapi dan kambing, pusat produksi dan pengolahan hasil-hasil perikanan, rumput laut, serta pusat produksi dan pengolahan garam.</p> <p>2. Pengembangan pariwisata melalui pengembangan desa wisata terutama pengembangan Kawasan Wisata Alam Komodo dan seluruh lokasi potensial Kawasan Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata minat khusus.</p> <p>3. Pengembangan infrastruktur yang menghubungkan antar kota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil, dan pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluar sebagai berikut: (1) jaringan jalan lintas Nusa Tenggara Timur; (2) jaringan prasarana dan transportasi penyeberangan antar-pulau; (3) jaringan listrik dan irigasi.</p> <p>4. Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan, dengan prioritas sebagai berikut: (1) pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan; dan (2) pengembangan kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional melalui pengembangan pemukiman eks Timor-Timur</p>

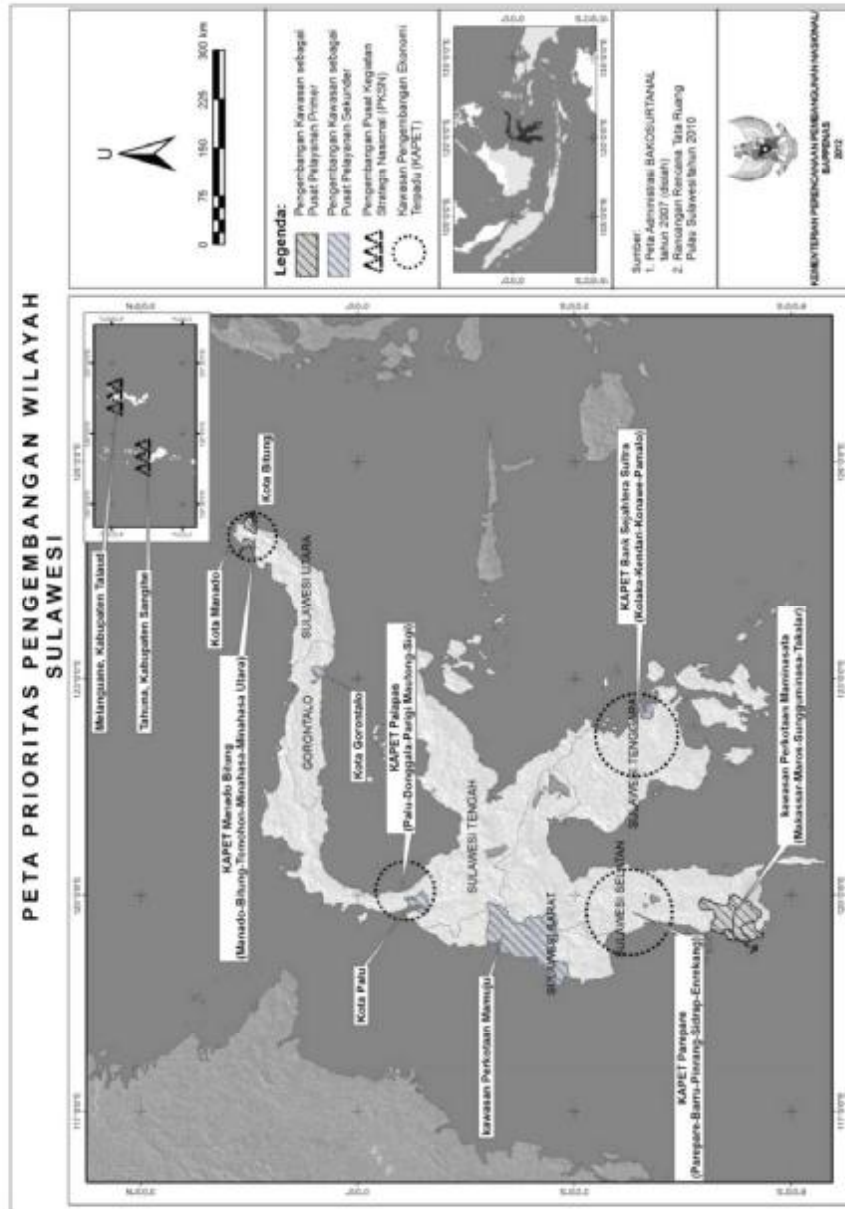
Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Prioritas Pengembangan
Maluku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan; 2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan; 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan; 4. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pariwisata dengan memperhatikan keberkahan wilayah-wilayah pulau. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAFET) Seram; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Domba, Dobo, Saumlaki, dan Iwaki; 3. Pengembangan infrastruktur jalan; 4. Pengembangan Pelabuhan Ambon, Ruli, dan Tohelo; 5. Pengembangan produksi dan pengolahan produk pertanian, perkebunan, dan Perikanan; 6. Pengembangan Pariwisata Bahari di Maluku.
Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mutu sumber daya manusia; 2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan; 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan; 4. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan dengan memperhatikan keberkahan wilayah-wilayah pulau. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAFET) Teluk Cenderawasih; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Jayapura, Tanah Merah, Merauke; 3. Pengembangan infrastruktur jalan; 4. Pengembangan Pelabuhan Kaimana dan Agats; 5. Pengembangan Bandara Sentani dan Isifak; 6. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan pengurangan kemiskinan; <p>Dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua prioritas selanjutnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya, Iani Jaya, Paniai, Nabire, Telukara, Pegunungan Bintang (Papua) dan Kabupaten Fak Fak dan Mamberamo (Papua Barat); 2. Pengembangan perikanan di Kawasan Pegunungan Tengah, Bomberai, dan Keller; 3. Penanggulangan kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menyediakan permodalan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perikanan dan industri rakyat melalui PNPV Mandiri, KUR, dan Respek; 4. Pengembangan ekonomi rakyat di Kabupaten Jayapura, Waropen, Yapen, Nabire, Mappi, Keerom, Asmat, Merauke, dan Mimika (Papua) dan Kabupaten Sorong Selatan, Kaimana, Fak fak, dan Teluk Bintuni (Papua Barat); 5. Pengembangan industri pengolahan sagu rakyat; 6. Peningkatan pelayanan pendidikan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat;

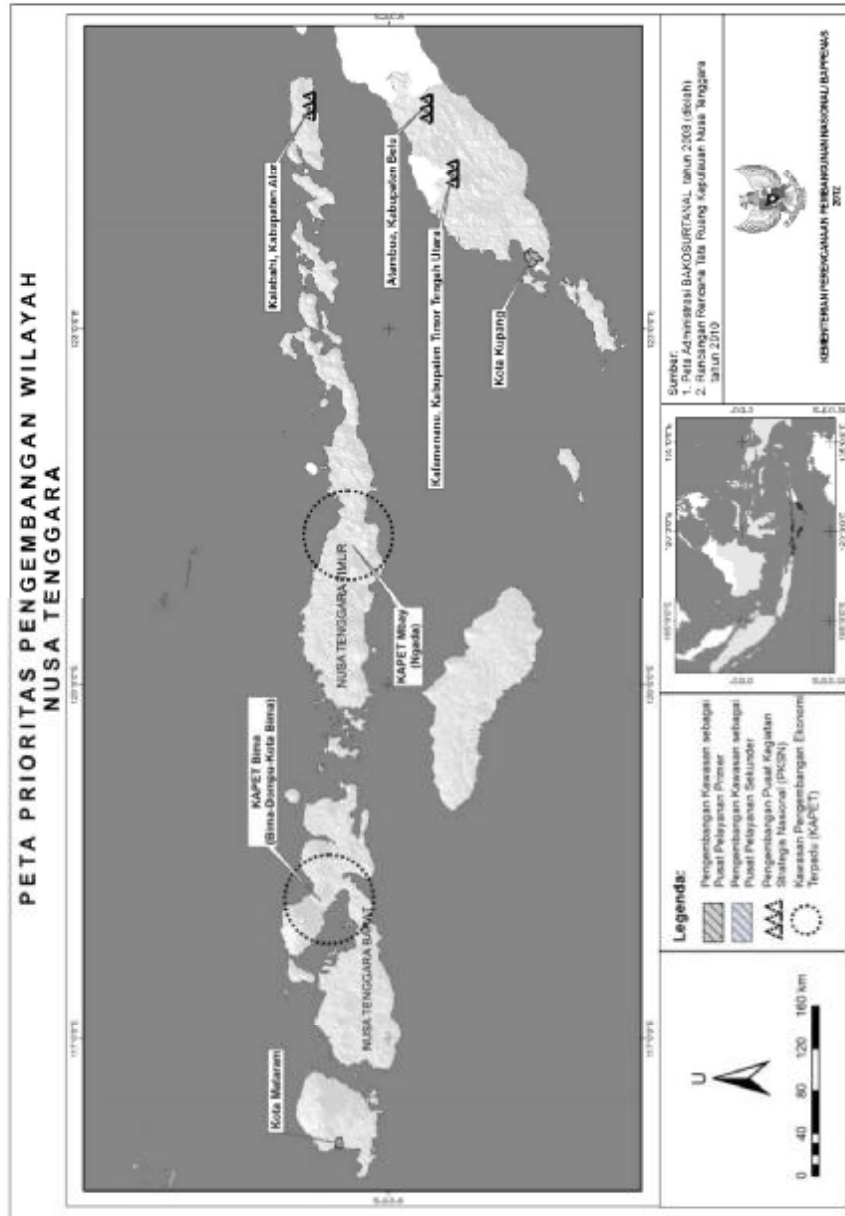
Wilayah	Arah Pengembangan Wilayah	Prioritas Pengembangan
		<p>2. Meningkatkan pelayanan kesehatan gratis semua SMC hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat;</p> <p>8. Pengembangan infrastruktur dasar di seluruh Papua dan Papua Barat terutama pengembangan sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS) dan pabrik semen di Timika dan Manokwari;</p> <p>9. Peminaan terhadap masyarakat asli Papua di seluruh Papua dan Papua Barat melalui pemberian kuota khusus bagi putra-putri asli Papua berupa kuota kepada siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, kuota menjadi anggota TNI/Polri dan sekolah Akademi Militer dan Akademi Kepolisian, serta pendirian sekolah kebidanan/keperawatan, sekolah kerja menengah, dan sekolah pendidikan keguruan.</p>

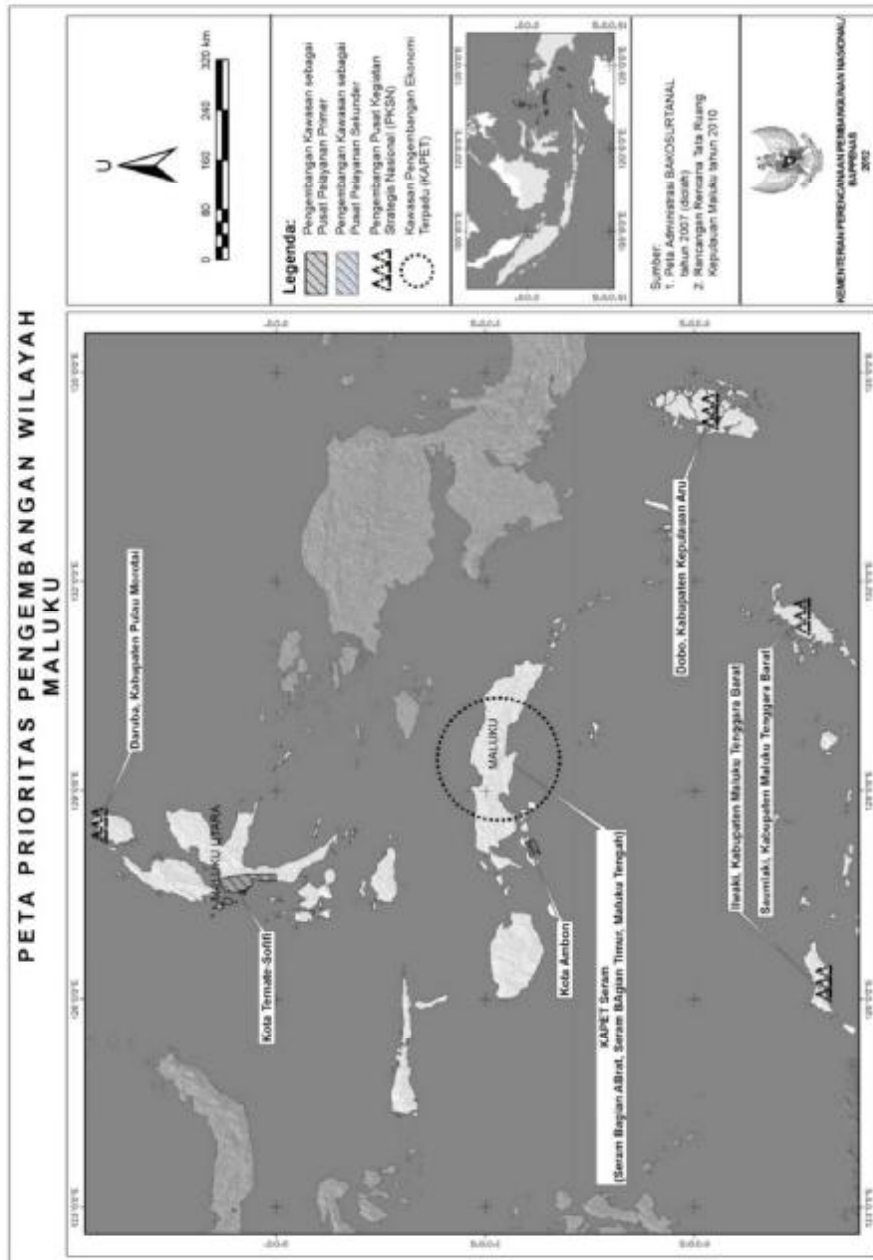


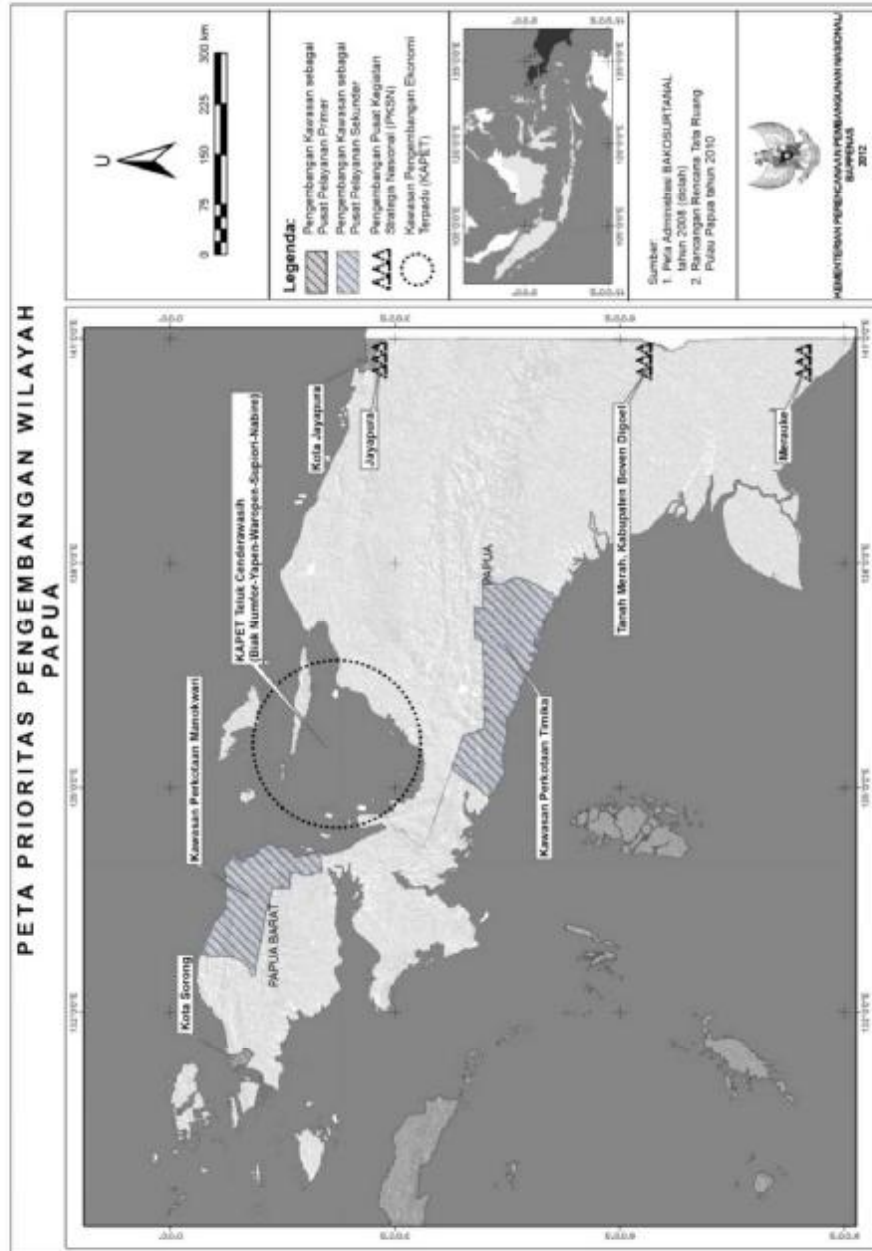












BAB 2 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2013

2.1 Kondisi Wilayah Sumatera Saat Ini

Secara umum kinerja perekonomian wilayah Sumatera pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta pertambangan dan penggalian. Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, dan Sumatera Utara tumbuh paling pesat di antara provinsi lainnya, sementara Sumatera Selatan, Riau dan Sumatera Utara merupakan daerah yang paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN.

Peningkatan kinerja perekonomian disertai dengan perbaikan indikator sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun di wilayah Sumatera. Capaian TPT secara umum lebih baik dari TPT nasional. Fenomena pengangguran lebih menonjol di daerah perkotaan dengan TPT sebesar 9,99 persen dibandingkan dengan di perdesaan yang hanya sebesar 4,21 persen. Di samping itu, tingkat kemiskinan wilayah juga cenderung menurun, meskipun hingga tahun 2011 (September) masih terdapat empat provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional. Secara umum fenomena kemiskinan lebih menonjol di daerah perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pemherdayaan Gender (IPG) pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya.

Di bidang infrastruktur wilayah, total panjang jaringan jalan di Sumatera terus meningkat. Di samping itu kualitas jalan juga mengalami sedikit peningkatan, di mana persentase jalan dengan kondisi baik meningkat dari 33,8 persen pada tahun 2008 menjadi 49,91 persen pada tahun 2011. Secara total kondisi jalan mantap tahun 2011 di Sumatera mencapai 88,2 persen. Secara rata-rata, hampir 90 persen desa-desa di wilayah Sumatera dapat diakses melalui jalan darat, 2,3 persen bisa diakses melalui transportasi air, dan 8,3 persen lainnya bisa dilalui melalui transportasi air dan darat. Rasio elektrifikasi untuk NAD 87,72 persen, Sumut 83,98 persen,

Riau 78,17 persen, Sumbar 77,72 persen, Jambi 76,54 persen, Kepri 91,52 persen, Bengkulu 71,15 persen, Sumsel 72,71 persen, Babel 82,26 persen dan Lampung 70,40 persen.

Dalam rangka penguatan konektivitas nasional sektor komunikasi dan informatika, capaian pembangunan di pulau Sumatera hingga tahun 2011 antara lain meliputi penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa Berdering) di 13.863 desa ISD (100 persen dari target) dan internet (Pusat Layanan Internet Kecamatan) di 1.651 desa ibukota kecamatan USO (100 persen dari target). Adapun pembangunan jaringan *broadband* hingga tahun 2011 oleh PT Telkom telah menjangkau 105 kabupaten/kota (69,5 persen).

Luas daerah irigasi di Pulau Sumatera mencapai 1,99 juta hektar atau sekitar 27 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia. Dari total 1,99 juta hektar daerah irigasi hanya 117,75 ribu hektar (6 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai. Kondisi tahun 2010 menunjukkan hanya 46,2% jaringan irigasi di Pulau Sumatera dalam kondisi baik, selebihnya dalam kondisi rusak, baik rusak berat, sedang maupun ringan. Dari sisi ketersediaan tampungan air, daya tampung air (*storage*) perkapita Pulau Sumatera adalah sebesar 51,88 m³/kapita, lebih kecil dari rata-rata daya tampung air perkapita nasional sebesar 52,31 m³/kapita. Sedangkan kondisi bendungan/waduk dalam kondisi baik sebesar 69% (9 buah) dan 23% rusak sedang. Dari 63 buah embung, sebanyak 11 buah (17%) dalam kondisi baik dan 16 buah (25%) dalam kondisi rusak berat.

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA

Perkembangan Pembangunan	Ayah	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Riau	Jambi	Sumatera Selatan	Bengkulu	Lampung	Kep. Bangka Belitung	Kep. Riau
Luas Wilayah (Kilometer 2011/2010)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
PODB Fisik dan AEDD (Tahun 2011/2010)	27.145	21.317	17.304	6.276	2.400	21.276	10.210	21.200	210.2	12.029
Indeks Pembangunan Wilayah (Sumatera 2011/2010)	7,41	6,41	6,47	7,39	4,80	5,77	5,77	5,81	7,01	7,10
Desentralisasi Produk (Waktu Sumatera 2011/2010)	10,18	10,41	4,49	8,27	7,90	13,95	17,35	15,58	1,24	6,70
Indeks Pembangunan Manusia (2010)	61,29	64,70	63,20	70,66	61,29	64,99	61,90	61,47	67,5	70,00
Indeks Pembangunan Gender (2010)	68,20	69,61	69,70	64,71	61,13	68,70	67,70	67,00	60,70	61,40
Indeks Pembangunan Gender (2010)	71,40	67,70	61,61	65,14	60,11	60,12	60,60	60,70	59,60	60,60
Indeks Pembangunan (2010)	70,0	72,1	70,1	72,2	70,8	71,4	70,2	70,0	71,0	70,0
Daerah (2010/2010)	6,8	6,8	6,1	6,0	7,8	7,8	6,1	7,7	7,4	6,0

Sumber : Badan Pusat Statistik

Peranan wilayah Sumatera semakin penting bagi perekonomian nasional. Pangsa produksi kelapa sawit wilayah Sumatera cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2010 menjangki penyumbang 70,43 persen produksi kelapa sawit nasional. Di bidang energi primer, 40 persen cadangan *Coal Bed Methane* (CBM) nasional berada di wilayah Sumatera. Sedangkan untuk batubara, besarnya cadangan di wilayah Sumatera mencapai 50 persen dari total cadangan batubara nasional.

Di bidang jasa lingkungan, wilayah Sumatera mempertahankan posisinya sebagai wilayah dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Papua dan Kalimantan, dengan luas 27,87 juta hektar. Namun demikian, laju deforestasi Sumatera pada periode tahun 2000-2005 tergolong tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya, yaitu mencapai 269,1 ribu hektar per tahun.

Secara geografis wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi serta lintasan gunung api aktif (*ring of fire*) sehingga memiliki kerawanan bencana alam yang relatif tinggi. Provinsi sebelah barat Sumatera merupakan salah satu

wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami karena terletak di antara dua lempengan Samudra India dengan lempengan Eurasia. Jenis bencana lainnya yang kerap melanda adalah banjir, yaitu tercatat 11.928 kejadian banjir terjadi selama tahun 2011.

Tantangan terbesar yang harus dikelola wilayah Sumatera adalah menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan wilayah. Isu lain yang tidak kalah penting adalah kedaulatan wilayah nasional di sepanjang perbatasan dengan negara lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terdepan, termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa di antaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena masih menyimpan potensi permasalahan dengan negara tetangga

2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sumatera

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2013 adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Meningkatkan jaringan transportasi wilayah;
3. Memantapkan peran Sumatera sebagai lumbung pangan dan lumbung energi;
4. Memantapkan peran Sumatera sebagai sentra perkebunan dan agribisnis khususnya di bagian tengah dan utara;
5. Mengembangkan wilayah pesisir timur sebagai koridor industri pengolahan berbasis sumber daya alam;
6. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah bagian utara dan selatan, serta antara pesisir timur dan barat sesuai dengan daya dukung lingkungan;
7. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Sumatera, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
8. Mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
9. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation Plus*).

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Sumatera tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Membaiknya berbagai indikator utama pembangunan (lihat Tabel 2.1) dan indikator kesejahteraan (lihat Tabel 2.2);
2. Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera;
3. Berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi;
4. Berkembangnya Sumatera bagian tengah dan bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis;
5. Meningkatnya investasi dan industrialisasi, khususnya di koridor pesisir timur;
6. Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai;
7. Terkendalinya pertumbuhan kawasan perkotaan di kawasan rawan bencana alam di Pantai Barat dan Pantai Timur;
8. Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan

- irigasi;
9. Meningkatnya Penyediaan Air Baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs;
 10. Menurunnya risiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk dan jalur transportasi utama;
 11. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan penantuan, evaluasi dan pelaporan.
 12. Selesaiannya persiapan pelaksanaan kegiatan REDD+ di Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan yang ditandai dengan: selesainya tata batas kawasan hutan, beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Penurunan hotspot (kumulatif dari rerata 2005-2009) dan penurunan konflik kawasan, serta rehabilitasi hutan dan lahan.

TABEL 2.2
SASARAK PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2013

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ (%)	Kemiskinan ²⁾ (%)	Pengangguran ³⁾ (%)
Aceh	4,11 – 5,28	16,91	6,77 – 6,13
Sumatera Utara	6,08 – 7,05	8,79	10,65 – 9,63
Sumatera Barat	5,56 – 6,25	7,1	8,55 – 7,73
Riau	4,27 – 4,45	5,87	6,25 – 5,65
Jambi	6,76 – 7,14	4,70	3,80 – 3,76
Sumatera Selatan	6,15 – 6,67	11,77	7,88 – 7,08
Bengkulu	7,09 – 7,55	12,26	2,15 – 1,85
Lampung	7,09 – 7,76	13,12	5,40 – 5,88
Bangka Belitung	6,20 – 6,89	4,89	3,05 – 2,73
Kepulauan Riau	6,98 – 7,22	4,71	2,73 – 1,95

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Ket: ¹⁾ Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

²⁾ Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

³⁾ Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja

TABEL 2.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, UMUR HARAPAN HIDUP
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2013

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾	Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾	Umur Harapan Hidup ³⁾
Aceh	30	9,2	69,5
Sumatera Utara	20	9,1	72,3
Sumatera Barat	24	8,5	71,4
Riau	20	8,7	72,4
Jambi	25	8,0	71,1
Sumatera Selatan	23	8,0	71,6
Bengkulu	26	8,2	70,0
Lampung	22	8,3	71,9
Bangka Belitung	24	9,0	71,2
Kepulauan Riau	19	10,5	72,6

Sumber : Proyeksi Depenas; DPS; Susenas

Ket: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dibelikan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

3) Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan wilayah Sumatera Tahun 2013 diarahkan sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Untuk mendukung arah pengembangan tersebut, strategi pengembangan wilayah yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
2. Mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi.
3. Mengoptimalkan produksi migas dan batubara serta mengembangkan sumber energi alternatif.
4. Meningkatkan integrasi jaringan dan kapasitas pembangkit listrik.
5. Meningkatkan integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah.
6. Meningkatkan akses pendidikan, pelatihan dan pelayanan

kesehatan.

7. Mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan.
8. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta kegiatan ekonomi kawasan perbatasan.
9. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana alam.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi.

2.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Sumatera

Isu strategis dan kegiatan strategis provinsi di wilayah Sumatera adalah sebagai berikut:

Provinsi Aceh

1. Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik dengan kegiatan prioritas: (i) Pemberian Bantuan Pola Diyat bagi Korban Konflik (Reintegrasi Damai Aceh); dan (ii) Mitigasi Bencana.
2. Penguatan ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas (i) optimalisasi pengelolaan dan konservasi sumber daya air; (ii) pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan; (iii) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Pertanian; (iv) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Pertanian
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dengan kegiatan strategis meliputi: (i) Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dasar; dan (ii) pendidikan luar sekolah/ pendidikan nonformal/ informal;
4. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dengan kegiatan prioritas (i) pembangunan jalan dan jembatan; (ii) pembangunan jaringan kereta api; (iii) pembangunan drainase perkotaan; (iv) pembangunan jalan evakuasi bencana; (v) pengamanan Pantai Lada dan Kruceng Raya.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan strategis meliputi: (i) peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia; (iii) pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana; (iv) peningkatan daya saing Rumah Sakit dan Puskesmas melalui peningkatan mutu pelayanan Keperawatan; (v) Peningkatan Upaya Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (P-DBK) melalui peningkatan mutu pembinaan dan pendampingan pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Provinsi Sumatera Utara

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat pada pelayanan kesehatan dengan kegiatan prioritas: (i) Pemenuhan Tenaga Kesehatan Spesialis pada RSUD Daerah Kab/Kota dan Tenaga Kesehatan (dokter, dokter gigi dan Bidan PTT) di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan; (ii) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan Melalui Pengadaan alat Kesehatan Kedokteran dan Pemhangunan/Rehabilitasi Gedung Sarana Pelayanan Kesehatan; (iii) Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Jamkesmas dan Jampersal; (iv) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dan Peningkatan Lingkungan Sehat; (v) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Bagi Masyarakat Melalui Upaya Promosi Kesehatan dan Pemhandayaan Masyarakat;
2. Pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dengan kegiatan prioritas pembangunan jalan Tol Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi diprioritaskan pada Tapan I yaitu Medan - Kualanamu dengan progres peribekasan lahan untuk jalan tol per- 2 Desember 2011 yaitu sebesar 32,58% (dari total luas lahan yang diperlukan sebesar 197,94 Ha);
3. Peningkatan status jalan Kawasan Industri Sei Mangkei dengan kegiatan strategis menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 - 2025, terdapat beberapa ruas jalan di Kabupaten Batu Bara dan Simalungun yang perlu mendapat penanganan dan perubahan status jalan Provinsi menjadi Nasional dan Gubernur Sumatera Utara melalui surat no 620/13764 tanggal 6 Desember 2012 Perihal Usulan Penanganan dan "Perubahan Status Jalan Mendukung Kawasan Strategis Nasional dan MP3EI" telah menyurati Menteri PII RI, ruas-ruas jalan tersebut adalah : (i) Ruas jalan Perdagangan - Lima Puh di Kabupaten Simalungun/Kabupaten Batubara sepanjang ± 11 Km, dari status jalan Provinsi menjadi status jalan Nasional (ii) Ruas jalan Simpang Kuala Tanjung menuju Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara sepanjang ± 16,02 Km, dari status jalan Provinsi menjadi status jalan Nasional (iii) Ruas jalan Perdagangan - Pematangsiantar sepanjang ± 40,6 Km, dari status jalan Provinsi menjadi status jalan Nasional; (iv) Ruas jalan Simpang Mayang - Kec. Bosar Maligas sepanjang ± 14 Km, dari status jalan Kabupaten menjadi status jalan

Nasional; (v) Ruas jalan Desa Mayang - Sei Rejangkar sepanjang ± 30 Km, dari status jalan Kabupaten menjadi status jalan Nasional (vi) Penanganan ruas jalan Pematang Siantar - Tiga Runggu di Kabupaten Simalungun sepanjang = 13 Km sebagai akses jalan menuju Kawasan Danau Toba yang merupakan Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Wilayah Ruang Nasional;

4. Pembangunan infrastruktur pendukung daerah wisata dengan kegiatan prioritas: (i) pemantapan jaringan jalan menuju Danau Toba, Bukit Lawang Bahorok, Pantai Cermin, dan Berastagi; (ii) pembangunan pelabuhan Sikara-Kara.
5. Peningkatan akses pendidikan menengah dan kejuruan dengan kegiatan strategis meliputi: (i) Pembangunan sekolah dengan perubahan komposisi sesuai kebutuhan sekolah berstandar internasional (KSBI) yaitu 30 persen SMA dan 70 persen SMK, dan pembangunan SMK bertaraf internasional dan program keterampilan kejuruan di SMA serta program kewirausahaan; (ii) Meningkatkan peran SMK disekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.

Provinsi Sumatera Barat

1. Penanganan daerah tertinggal dengan kegiatan strategis: (i) pengembangan fasilitas Pelabuhan Laut Pejat; (ii) pembangunan Pelabuhan Pasar Puat; (iii) pembangunan Pelabuhan Simaka; (iv) pengembangan fasilitas Pelabuhan Laut Tuo Pejat; (v) Pengadaan Mesin Tempel 15 PK dan Mesin Long Tail; (vi) pembangunan jalan evakuasi bencana; (vii) pengembangan Daerah Irigasi Kawasan Ubo.
2. Pengolahan lahan kritis dengan kegiatan prioritas: (i) Pengembangan perbenihan dan persemaian tanaman hutan; (ii) Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (iii) Peningkatan Usaha Hutan Tanaman; (iv) Pengembangan Kawasan Konservasi;
3. Pembangunan infrastruktur kereta api dengan kegiatan prioritas pembangunan jalur kereta api Bandara Duku-Bandara Internasional Minangkabau Tahap II.

Provinsi Riau

1. Pencapaian sasaran *Millenium Development Goals* dengan kegiatan strategis seperti: (i) Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMA; (ii) Bantuan operasional sekolah (BOS) SD-SMP; (iii) Rehabilitasi SMA-SMK, (iv) Rehabilitasi

- SD/MI dan SMP/MTs; (v) Pendidikan lanjutan untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; (vi) Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMK; (vii) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi; (viii) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak; (ix) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (x) Pembangunan gedung dan fasilitas IGD Terpadu dan Gedung Poliklinik sesuai master plan; (xi) Peningkatan Pelayanan Kefarmasian; (xii) Pembinaan Gizi Masyarakat; (xiii) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Bina GIZI dan KIA; (xiv) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Diljen Bina Upaya Kesehatan; (xv) Pembangunan Fisik Gedung Sentral; (xvi) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; (xvii) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; (xviii) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan; (xix) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit; (xx) Pengelolaan Data dan Informasi; (xxi) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan; (xxii) Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja, Olahraga dan Mata; (xxiii) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kes. Tradisional/Komplementer Alternatif;
2. Percepatan pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan kegiatan prioritas: (i) Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung IHKS di Pelitung Dumai; (ii) Pembebasan lahan IHKS Kuala Enok Inhil dan Pelitung Dumai;
 3. Pembangunan infrastruktur, energi dan lingkungan hidup dengan kegiatan strategis: (i) Pengadaan dan pemasangan PLTS terpadu terpusat kapasitas 1,5 s/d 20 Kw di Provinsi dan 7 kabupaten; (ii) Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Rehab Saluran Primer; (iii) Pembangunan Dermaga Penyeberangan; (iv) Pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II.
 4. Penyelenggaraan *Islamic Solidarity Games 2013*;
 5. Revitalisasi pertanian dengan kegiatan prioritas: (i) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan UED melalui pembangunan kantor UED PPD Provinsi Riau (632 unit); (ii) Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga panen dan Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan

- dan peningkatan keamanan pangan segar; (iii) Pengembangan sistem produksi pembudidayaan; (iv) Perluasan areal pengelolaan lahan pertanian; (v) Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman tahunan;
- 6. Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan dengan kegiatan strategis: (i) Fasilitasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (ii) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Provinsi Jambi

1. Pembangunan sistem dan peningkatan jaringan transportasi wilayah dengan kegiatan prioritas: (i) Peningkatan Kapasitas Jalan; (ii) Peningkatan Kapasitas Jembatan; (iii) pengembangan Bandara Sultan Thaha.
2. Peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan prioritas pembangunan Jalan Produksi pada setiap sentra produksi unggulan;
3. Pembangunan kawasan pantai timur Jambi sebagai kawasan ekonomi dengan kegiatan prioritas: (i) peningkatan kapasitas jaringan listrik; (ii) pembangunan jalan; (iii) rehabilitasi pelabuhan; (iv) pengembangan bandara;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kegiatan strategis meliputi pengembangan sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal;
5. Peningkatan pelayanan kesehatan sampai ke tingkat desa dengan kegiatan strategis peningkatan jumlah puskesmas.

Provinsi Sumatera Selatan

1. Peningkatan pembangunan industri di Koridor Ekonomi dengan kegiatan prioritas: (i) Pengembangan Rumah Kemas Industri; (ii) Pengembangan Hilirisasi Komoditi Karet Compound; (iii) Pengembangan Pabrik Pakan Ternak Skala Kecil; (iv) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Unggulan Daerah;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur *domestic connectivity* dengan kegiatan prioritas: (i) Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api; (ii) Pembangunan Bandara Atung Bungsu Kota Pagaralam; (iii) pembangunan Bandara Pagar Alam.
3. Percepatan pengurangan kemiskinan dengan kegiatan strategis: (i) Penyusunan Data IPM berdasarkan Pendekatan Kecamatan di 15 Kabupaten/Kota; (ii) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan di 7 Daerah Tertinggal; (iii)

- Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; (iv) Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Rawa Pasut;
4. Peningkatan pembangunan sumber daya manusia dengan kegiatan strategis meliputi: (i) rehabilitasi gedung SD di 7 daerah tertinggal; (ii) pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan program studi teknik lingkungan lahan basah (*lowland*) sebagai program *center of excellence*; dan (iii) pembangunan Institut Teknologi Sains Sumatera (ITSS) di Sumsel dalam mendukung MP3RI.

Provinsi Bengkulu

1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan dengan kegiatan prioritas peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan;
2. Peningkatan jumlah dan perbaikan distribusi tenaga medis, paramedis, dan dokter dengan kegiatan prioritas: (i) peningkatan jumlah dan perbaikan distribusi tenaga kesehatan; (ii) peningkatan ketersediaan obat dan vaksin; (iii) peningkatan pelayanan kefarmasian;
3. Percepatan pengurangan kemiskinan dengan kegiatan prioritas: (i) pengembangan KUBI usaha ekonomi produktif; (ii) peningkatan akses permodalan; (iii) perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni; (iv) pelatihan calon wirausahawan;
4. Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan dengan kegiatan strategis: (i) pengembangan bandara; (ii) peningkatan prasarana transportasi darat; (iii) pembangunan jalan di Pulau Rengas sepanjang 20 km; (iv) pengembangan Bandara Fatmawati; (v) pembangunan Bandara Lingsano.
5. Peningkatan cadangan pangan dengan kegiatan strategis: (i) peningkatan produksi dan produktivitas; (ii) pengembangan sistem perbenihan ikan; (iii) pengerahan prasarana pembudidayaan ikan; (iv) optimalisasi pola tanam tanaman pangan.

Provinsi Lampung

1. Perkuatan *domestic connectivity* dalam rangka percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dengan kegiatan prioritas: (i) Peningkatan kapasitas Bandara Raden Inten II menjadi Bandara Internasional dan Embarkasi/Debakasi Haji Penuh; (ii) Peningkatan dan Penataan Jalan Nasional dan Jalan Strategis Provinsi; (iii)

- Pembangunan Fisik Terminal Agribisnis;
2. Percepatan pencapaian sasaran *Millenium Development Goals* dengan kegiatan prioritas: (i) Dukungan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional; (ii) Peningkatan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya mempersiapkan tenaga kerja yang terampil sesuai pasar kerja; (iii) Pengadaan Rumah Sakit Bergerak (Mobile Hospital) untuk Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan;
 3. Pengembangan Lampung sebagai *Center of Excellence* di bidang pendidikan dan riset dengan kegiatan strategis berupa (i) pembangunan unit sekolah baru (USB) SMK Negeri unggul terpadu bertaraf internasional di Anakluha di Lampung Tengah, (ii) pembangunan Institut Teknologi Sumatera di provinsi Lampung; (iii) Dukungan Kebijakan dan Implementasi Rencana Pengembangan Kawasan Teknopolitan; (iv) Pengembangan Pusat Riset Bidang Energi Baru dan Terbarukan; (v) Pengembangan Pusat Riset Bidang Agroindustri;
 4. Pengembangan kawasan, tata ruang, dan konservasi dengan kegiatan prioritas: (i) Mitigasi dampak perubahan iklim global; (ii) Perencanaan dan penataan kawasan pesisir; (iii) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis.
 5. Pembangunan ekonomi wilayah terpadu dengan kegiatan strategis: (i) Peningkatan Produksi kelautan dan Perikanan Tangkap dan Budidaya (ikan dan rumput laut); (ii) Pengembangan Industri pengolahan Produk Pertanian; (iii) Pengembangan potensi panas bumi dan mikrohidro untuk pembangkit listrik; (iv) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Pemulihan daya dukung lingkungan dengan kegiatan strategis: (i) rehabilitasi lahan kritis dan bekas pertambangan dengan kegiatan strategis Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Tanaman Produktif; (ii) Pelestarian Hutan Lindung Pantai dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan; (iii) Peningkatan Lingkungan Hidup Daerah;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dengan kegiatan strategis: (i) Pengembangan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan; (ii) Pembangunan Kabel Transmisi Bawah Laut dari Sumatera ke Pulau Bangka; (iii) penguatan integrasi sistem darat, laut, dan udara; (iv)

- pembangunan PLTS Terpusat untuk listrik pedesaan; (v) pembangunan bandara Dipati Amir.
3. Pengembangan Bangka Belitung sebagai tujuan wisata dengan kegiatan strategis: (i) Pengembangan Museum Maritim dan Dive Center di Pulau Belitung; (ii) Pengembangan Kawasan Konservasi *Torsius Bancanus Sabarar*;
 4. Pengembangan industri unggulan daerah dengan kegiatan prioritas peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan dengan kegiatan strategis: (i) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan; (ii) Pengembangan Industri Agro; (iii) Revitalisasi Lada;
 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kegiatan strategis: (i) peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah; (ii) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; (iii) Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan; (iv) Perluasan Kesempatan Kerja; (v) Peningkatan Akses terhadap Air Bersih / Sanitasi.

Provinsi Kepulauan Riau

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi berbasis kelautan dengan kegiatan strategis: (i) Peningkatan dan Penumbuhan Industri Argo; (ii) Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; (iii) Penumbuhan Industri Kecil Menengah;
2. Peningkatan pendidikan dan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* dengan kegiatan strategis meliputi (i) peningkatan pendidikan dasar; (ii) pendidikan usia dini; (iii) Poyelesaikan Pembangunan RSUD Rujukan Provinsi Kepri; (iv) Pengadaan Alkes RSUD Kepri;
3. Penanganan pulau-pulau terluar dan daerah tertinggal dengan kegiatan prioritas: (i) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro; (ii) Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan; (iii) peningkatan prasarana dasar; (iv) Pembangunan Pembangkit Listrik 3.500 unit; (v) Pembangunan Pembangkit Listri di Natuna; (vi) Pembangunan Pelabuhan Pulau Laut Natuna; (vii) Pembangunan Pelabuhan Pulau Subi Natuna.
4. Percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas antarpulau dengan kegiatan prioritas: (i) penuntasan

- penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi; (ii) Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru; (iii) Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; (iv) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut; (v) pembangunan Jembatan Dorapak I.
5. Percepatan penurunan kemiskinan dengan kegiatan prioritas: (i) Pemberdayaan Sosial; (ii) Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, kementerian/lembaga pelaksana, sasaran, dan pagu indikatif di setiap provinsi dijabarkan dalam **Lampiran Bab 2**.

2.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Sumatera

Arah kebijakan pengembangan MP3EI untuk Koridor Ekonomi Sumatera memperkuat arah pengembangan wilayah Sumatera dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013, yakni mengembangkan Koridor Ekonomi Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Koridor Ekonomi Sumatera pada tahun 2013 oleh pemerintah pusat antara lain adalah:

1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antarkota Sigli-Bireun-Lhokseumawe (172 km) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
2. Penanganan jalan Lhokseumawe-Langsa (173,69 km) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
3. Perluasan Pelabuhan Lhokseumawe di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
4. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
5. Pembangunan rel kereta api ruas Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (21,5 km) dan rehabilitasi spur simpang Gunung Bayu lintas Perlanaan-Sei Mangke di Provinsi Sumatera Utara
6. Perluasan Pelabuhan Belawan di Provinsi Sumatera Utara
7. Penanganan jalan Pematang Siantar - Tebing Tinggi (34,5 km) di Provinsi Sumatera Utara
8. Penanganan jalan Limapuluh - Sp. Inalum (Kuala Tanjung) di Provinsi Sumatera Utara

9. Pembangunan jalan akses Pelabuhan Belawan (8 km) di Provinsi Sumatera Utara
10. Pengembangan jalan akses Kualanamu (8 km) di Provinsi Sumatera Utara
11. Penanganan jalan Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat-Batas Provinsi Riau (326,71 km) di Provinsi Sumatera Utara
12. Pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (60 km) di Provinsi Sumatera Utara
13. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Sumatera Utara
14. Pengembangan SPAM Kawasan Khusus Kota Lima Puluh 50 lt/dt di Provinsi Sumatera Barat
15. Satker Pembangunan Faspel Laut Cercook Paiman di Provinsi Sumatera Barat
16. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Teluk Tapang di Provinsi Sumatera Barat
17. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Sumatera Barat
18. Pelebaran Runway di Bandara Sultan Syarif Kasim II di Provinsi Riau
19. Penanganan jalan Simpang Batang – Batas Dumai (10 km rigid) di Provinsi Riau
20. Penanganan jalan Pekanbaru – Siberida – Batas Provinsi Jambi (51 km) di Provinsi Riau
21. Penanganan jalan Sorek-Sp. Japura-Rengat-Rumbai Jaya-K. Enok (238 km) di Provinsi Riau
22. Penanganan Jalan Sp. Kulinc - Pelabuhan Dumai di Provinsi Riau
23. Pembangunan jalan tol Pekanbaru - Kandis (Pembahasan Lahan) di Provinsi Riau
24. Lanjutan Pembangunan Dermaga Penumpang Dumai di Provinsi Riau
25. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Industri Dumai, Tj. Buton, dan Kuala Enok (3 x 40 lt/dt) di Provinsi Riau
26. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan

gardu induk di Provinsi Riau

27. Pengembangan Bandara Sultan Thaha di Provinsi Jambi
28. Penanganan jalan Muara Tembesi – Jambi (78,99 km) di Provinsi Jambi
29. Penanganan Jalan Lingkar Jambi di Provinsi Jambi
30. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Jambi
31. Penanganan jalan Muara Enim-Palembang (175 km) di Provinsi Sumatera Selatan
32. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api di Provinsi Sumatera Selatan
33. Pengembangan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II di Provinsi Sumatera Selatan
34. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Sumatera Selatan
35. Pengembangan Pelabuhan Baai di Provinsi Bengkulu
36. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Bengkulu
37. Pembangunan jalan KA *partial double track* antara Tulungbuyut – Blambangan Umpu di Provinsi Lampung
38. Pengembangan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni di Provinsi Lampung
39. Pengembangan Pelabuhan Sebalang (menunjang Pelabuhan Panjang) di Provinsi Lampung
40. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Lampung

Uraian proyek MP3EI tahun 2013 yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat di setiap provinsi dijabarkan dalam **Lampiran Bab 2**.

Rencana investasi yang akan dilakukan oleh BUMN, Swasta, KPS, dan APBD, adalah sebagai berikut:

BUMN

1. Pembangunan transmisi listrik di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (16 titik)

2. Perhangunan transmisi listrik di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai 2015 (1622.2 kms)
3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa Sawit (PLTBS) dan Bahan Baku Tebu. Kapasitas 2 x 3,5 MW
4. PLTP Sarulla - 1 Kap. 110 MW
5. Pembangunan Rel KA Stasiun Araskabu - Kualanamu Airport 9 km
6. Pembangunan transmisi listrik di Sumut sampai 2015 (1778.2 kms)
7. Pembangunan gardu induk/trafo di Sumut sampai 2015 (44303.100 MVA)
8. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit (PLTBS) Kapasitas 2 x 3,5 MW
9. Percepatan pengembangan hidro skala besar (2x87 MW), Persea Sumatera Utara (Asahan 3) - 30 ha
10. Perhangunan transmisi listrik di Provinsi Sumatera Utara (17 titik)
11. Penguatan jaringan distribusi gas bumi di Medan (46,9 km)
12. Penambahan Armada Kapal Ferry Ro-ro Lintas Sibolga - Nias (2000 GT) di Provinsi Sumatera Utara
13. Pengembangan sisi darat/sector Private di Bandara Kualanamu di Provinsi Sumatera Utara
14. Pembangunan transmisi listrik di Jambi (905 kms)
15. Pembangunan gardu induk/trafo di Jambi (14.903.000 MVA)
16. Pembangunan transmisi listrik di Provinsi Jambi (7 titik)
17. Pembangunan transmisi listrik di Babel sampai 2015 (746 kms)
18. Pembangunan gardu induk/trafo di Babel sampai 2015 (3403.100 MVA)
19. Pembangunan transmisi listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4 titik)
20. Pembangunan Terminal Bandara Jambi (96,2M)
21. Pembangunan PLTP Hululais Kapasitas 2 x 55 MW di Provinsi Bengkulu
22. Pembangunan transmisi listrik di Provinsi Riau sampai 2015 (2408 kms)
23. Pembangunan gardu induk/trafo di Riau sampai 2015

(21203.100 MVA)

24. Pembangunan PLTU Riau (Tenayan) 2 x 100 MW
 25. Pembangunan transmisi listrik di Provinsi Riau [15 titik]
 26. PLTU Peranap Kapasitas: 2x10 MW
 27. Pembangunan Jalur KA baru Tanjung Enim – Lampung (300 km) di Provinsi Sumatera Selatan
 28. Pembangunan PLTU Tanjung Enim 3 x 10 MW di Provinsi Sumatera Selatan
 29. Pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 2 x 300 MW di Provinsi Sumatera Selatan
 30. Pembangunan transmisi listrik di Sumsel sampai 2015 (2081,2 kms) di Provinsi Sumatera Selatan
 31. Pembangunan PLTU Banjarsari 2 x 100 MW di Provinsi Sumatera Selatan
 32. Pembangunan NGL Plant Sumatera Selatan, Prabumulih di Provinsi Sumatera Selatan
 33. PLTU Tarahan Mulut Tambang 2x8 MW di Provinsi Sumatera Selatan
 34. PLTP Lumut Balai Unit 3 & 4 (2x55 MW) di Provinsi Sumatera Selatan
 35. Pembangunan transmisi listrik di Lampung sampai 2015 (861 kms) di Provinsi Lampung
 36. Pembangunan gardu induk/trafo di Lampung sampai 2015 (8303.100 MVA) di Provinsi Lampung
 37. Pembangunan LPG Pressurized Terminal 5.000 MT di Lampung Kap. 2 MTPA di Provinsi Lampung
 38. Pembangunan PLTP 2x55 MW Uluhelu unit 1 & 2 di Provinsi Lampung
 39. Pembangunan PLTP 2x55 MW Ulubelu unit 3 & 4 di Provinsi Lampung
 40. Pembangunan PLTU Tarahan Mulut Tambang (2x8 MW) di Provinsi Lampung
 41. Penambahan Armada Kapal Ferry Roro Lintas Merak - Bakauheni sebanyak 13 unit kapal di Provinsi Lampung
- SWASTA**
1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomass Sawit (PLTBS)
 2. Pembangunan PLTP Jaboi (7MW) unit 1

3. Pemeliharaan Jalan Tol Medan - Binjai (35 km)
4. Pembangunan Dermaga Kuala Tanjung
5. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 30MW oleh PT. Kawasan Industri Dumai di Provinsi Riau
6. Proyek pembangunan rel kereta api Muara Enim - Tanjung Carat (270 km) dan pelabuhan batu bara Tanjung Carat di Provinsi Sumatera Selatan
7. Pengembangan (upgrade) PLTG Gunung Megang dari 2x40 MW menjadi 110 MW, upgrade 30 MW di Provinsi Sumatera Selatan
8. Pembangunan PLTU Sumsel 8 2 x 600 MW di Provinsi Sumatera Selatan
9. Pembangunan PLTU Mulut Tambah 4 x 150 MW Sumsel di Provinsi Sumatera Selatan
10. Jalan Tol Alang-Alang Lebar - Betung 43 km di Provinsi Sumatera Selatan
11. Penambahan dermaga dan fasilitas bongkar muat serta perluasan areal pelabuhan Merak dan Bakauheni di Provinsi Lampung

APBD

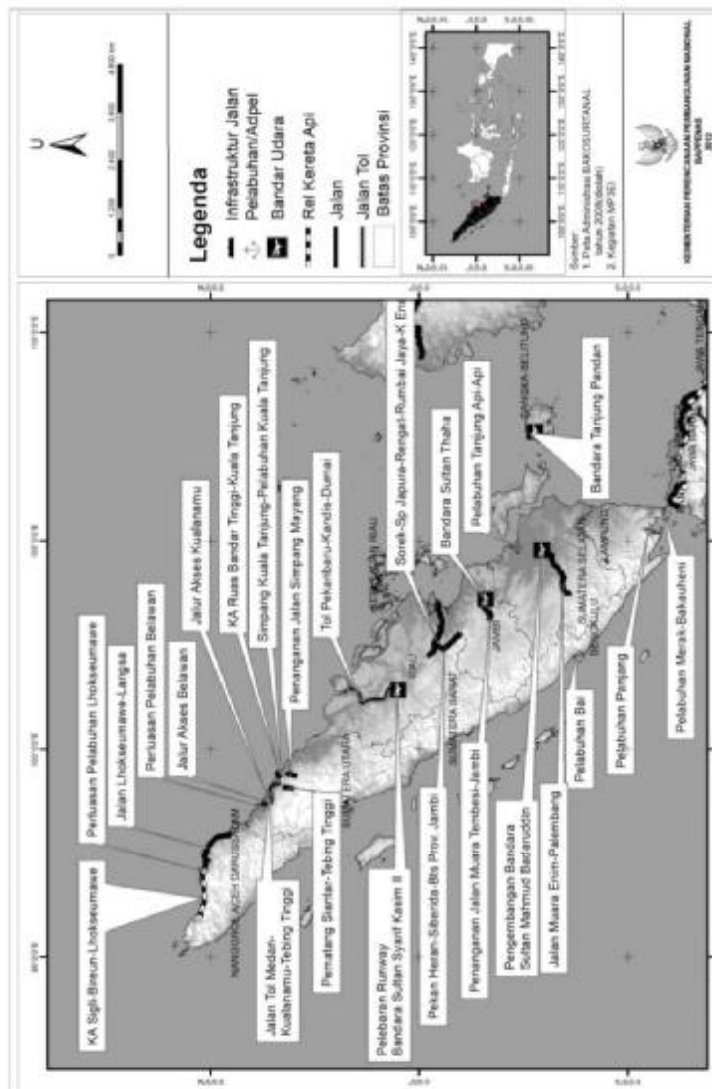
1. Ruas Jalan Simpang Kuala Tanjung menuju Pelabuhan Kuala Tanjung di Kab.Batubara sepanjang =16.02 km (Mendukung KPI Sei Mangke)
2. Perbaikan Jalan Raya Kabupaten, Ruas: Simpang Inalum - Kuala Tanjung (17 km)
3. Pemeliharaan jalan di Kabupaten Merangin (ruas jalan merupakan jalan Strategis Nasional) di Provinsi Jambi
4. Penanganan jalan antara Muaro Jambi - Pelabuhan Muara Sabak - 43 km di Provinsi Jambi
5. Penanganan jalan lingkaran Jambi - Talang Dukuh (Total Panjang 23 Km) + Akses jalan ke Talang Dukuh 6 km di Provinsi Jambi
6. Jalan Dumai - Pelintung (Jalan Provinsi) di Provinsi Riau
7. Ruas jalan Berbak - Ujung Jabung di Provinsi Riau
8. Pembangunan Jalan Sp.Lago - Sp. Buatun - Siak Sri Indrapura - Pelabuhan Buton (91,25 km) - Jalan Provinsi di Provinsi Riau

9. Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru - Buton tahap I. Paket I: Batas Pekanbaru - Sp.Meredan (22,5 km) di Provinsi Riau
10. Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru - Buton tahap I. Paket II: Meredan - Buatan (16 km) di Provinsi Riau
11. Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru - Buton tahap I. Paket III: Buatan - Dayun (22,5 km) di Provinsi Riau
12. Penanganan jalan strategis nasional Pekanbaru - Buton tahap I. Paket IV: Dayun - Sungai Tonggak (20 km) di Provinsi Riau

KPS

1. Pembangunan Rel KA dari Pelanakan ke Sei Mangke (3,4 km)
2. Pembangunan jalur KA Tj.Enim - Lampung dan Tj.Enim-Kertapati (Penanganan kapasitas dari 10 jt ton menjadi 22,7 jt ton/ tahun) di Provinsi Sumatera Selatan
3. Pembangunan Infrastruktur PLTU di Kawasan Industri Muara Enim 2 x 10 MW di Provinsi Sumatera Selatan
4. PLTP Lumut Balai Unit 1 & 2 (2x55 MW) di Provinsi Sumatera Selatan

GAMBAR 2.1
PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBLAYAI
TAHUN 2013 DI WILAYAH SUMATERA



LAMPIRAN BAB 2. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Pulau Sumatera tahun 2013

A. Provinsi Aceh

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana
1	Isu Strategis : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik				
	Kegiatan Strategis : Bantuan Peta Diyat bagi korban Konflik (Reintegrasi Damai Aceh)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat				
	KEMENTERIAN SOSIAL				
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah bantuan rehabilitasi bagi korban bencana sosial		0,00
	Kegiatan Strategis : Mitigasi Bencana				
	Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik				
	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL				
	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan fasilitasi Daerah Pasca Bencana Alam dan Sosial di Daerah Tertinggal	Jumlah kajian, pengembangan kebijakan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial	3 kabupaten	671,40
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Evakuasi Bencana				
Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan		Panjang Jalan yang dibangun		30.000,00
2	Isu Strategis : Kesehatan				
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana
	Program Dukungan: Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Pemherdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	65 persen	1.730,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Kualitas Sumber Daya Manusia					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan IT kelas III SS)	7	4.908,00
Kegiatan Strategis : Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	Disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia	942,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Upaya Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (P-DBK) melalui peningkatan mutu pembinaan dan pendampingan pelayanan Kesehatan Masyarakat					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang	Disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan	50242,70

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana
			memenuhi standar (fokus pada penyediaar T1 kelas II RS)	alokasi anggaran yang tersedia	
3	Isu Strategis : Ketahanan Pangan				
	Kegiatan Strategis : Optimalisasi Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Pengelolaaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaaan Jaringan Irigasi, Salva dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	1263,71	73.250,00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Program Pengembangan dan Pengelolaaan Perikanan Tangkap	Pengembangan dan Pembangunan dan Pengelolaaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan UPT Daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk lingkak luar dan daerah perbatasan yang potensial	1	10.000,00
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Pertanian				
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet	200	3.400,00
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Pertanian				
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi KEMENTERIAN PERTANIAN				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	Swasembada Gula Nasional : Tonu	5	927,00
4	Isu Strategis : Pendidikan				
	Kegiatan Strategis : Pendidikan Menengah				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Keneagaan	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Persentase SMK Memiliki Bengkel Kerja Sesuai Dengan Standar Sarana, Prasarana SMK	5	1.025,00
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Keneagaan	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	APK SMA/SMLEB Nasional	1.054,10 RKB	3.650,00
	Kegiatan Strategis : Pendidikan Dasar				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI RUANG DAN ALAT LAB. BACAASA		0,00
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	PERSENTASE LULUSAN SD/SDLB YANG MELANJUTKAN KE SMP/SMPLB	17 RKB	2.380,00
5	Isu Strategis : Pemantapan Infrastruktur				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan dan Jembatan				

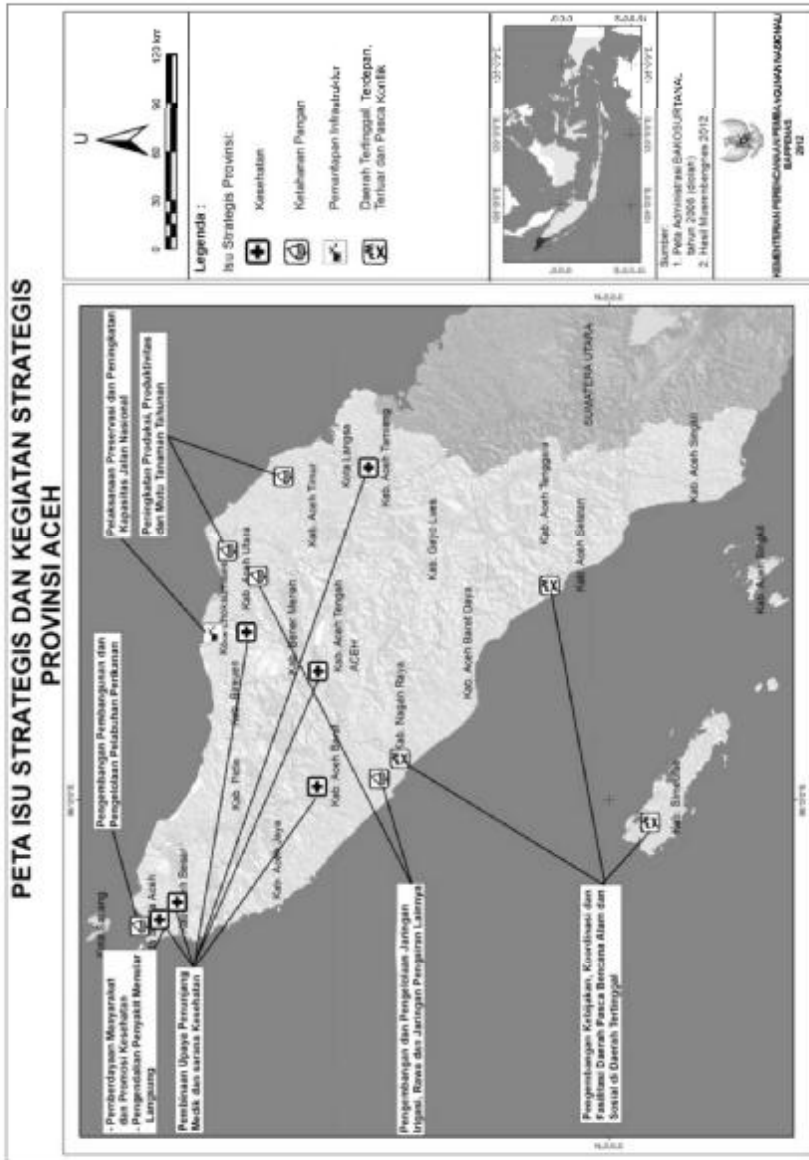
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg mendapat peningkatan struktur/ pelebaran	-	679.050,00
Kegiatan Strategis : Kereta Api Aceh					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Kereta Api	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	Terbangunnya Prasarana kereta api di Provinsi NAD (Karang mane - Kutablang), termasuk pengadaan tanah dan perawatan.	3,2 km	35.093,00
Kegiatan Strategis: Pengamanan Pantai Ladoh dan Krueng Raya					
Prioritas Nasional: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai	Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun		10.000,0

Catatan:

0 Kegiatan sudah diaomodasi melalui DAU Tahun 2013

Matriks Proyek MP3EI Tahun 2013

No.	Proyek MP3EI	Pelaksana Utama	RKP 2013 (Rp. Miliar)
1	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antarkota Sigi-Bireut-Lhokseumawe (172 Km)	Kementerian Perhubungan	59,89
2	Perangaran jalan Lhokseumawe-Langsa (173.692 Km)	Kementerian PU	61,127
3	Perluasan Pelabuhan Lhokseumawe	Kementerian Perhubungan	12,5
4	Peningkatan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	200,831



Propinsi : Sumatera Utara

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Aksesibilitas, Kemampuan Masyarakat dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masih Rendah.				
<i>Kegiatan Strategis : Pemenuhan Tenaga Kesehatan Spesialis pada RSUD Daerah Kab/Kota dan Tenaga Kesehatan (dokter, dokter gigi dan Bidan PTT) di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan.</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PSPDMK)	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Jumlah Kab/Kota di 33 Propinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM	Securah Kab/Kota di Sumu. yang siap melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM	1.195,80
<i>Kegiatan Strategis : Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan Melalui Pengadaan alat Kesehatan Kedokteran dan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Sarana Pelayanan Kesehatan.</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembiayaan Upaya Kesehatan	Pembiayaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan T1 kelas III RS)	disediakan dengan kebutuhan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia	20.754,68
<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Jamkesmas dan Jampersai</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Persentase RS yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas	90	420.608,05
<i>Kegiatan Strategis : Pencegahan & Pemberantasan Penyakit dan Peningkatan Lingkungan Sehat.</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengendalian Penyakit dan Lingkungan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Lingkungan	Jumlah IPD vertikal yang ditingkatkan secara dan prasarananya	disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia	8.920,00
<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Bagi Masyarakat Melalui Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Persentase Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	40	1.300,00
2	Isu Strategis : Pembangunan Jalan Tol Medan - Kualananu - Tebing Tinggi, yang dibagi atas II Tahapan pembangunan (Medan - Kualananu dan Kualananu - Tebing Tinggi)				
<i>Kegiatan Strategis : Pembebasan Lahan : Pembangunan jalan Tol Medan Kualananu Tebing Tinggi dan pembebasan lahan</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol	Tersedianya Dokumen Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Pengadaan Tanah jalan tol (BIU)	-	240.000,00
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Jumlah jalan bebas hambatan yang dibangun	8 Km	465.000,00
3	Isu Strategis : Peningkatan status beberapa ruas jalan mendukung akses Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM)				
<i>Kegiatan Strategis : Penanganan Jalan Mendukung Kawasan Strategis Nasional dan MP3EI</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
4	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran	-	88.100,00
	Isu Strategis : Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pendukung ke daerah wisata				
<i>Kegiatan Strategis : Banyaknya jalan yang rusak dengan rincian rusak berat 1.100 km, rusak sedang 1.770 km, rusak ringan 520 km dan kurangnya pembangunan infrastruktur pendukung ke daerah wisata mengakibatkan berkurangnya jumlah wisatawan yang berlanjung ke Provinsi Sumatera Utara. Terutama untuk Objek Wisata Danau Toba, Bukit Lawang Bahorok, Pantai Cermin, Berastagi, dan lain-lain, sehingga perlu dioptimalkan pembangunan infrastruktur pendukung ke daerah wisata</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Perencanaan					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran	-	88.100,00
	Isu Strategis : Akses Pendidikan Menengah dan Kejuruan yang bermutu				
<i>Kegiatan Strategis : - Pembangunan sekolah dengan perubahan komposisi sesuai kebutuhan Sekolah Berstandar Internasional (KSBI) yaitu 30% SMU dan 70% SMK; - Pembangunan SMK yang bertaraf Internasional dan program keterampilan kejuruan di SMA serta program</i>					
Prioritas Nasional: Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut				15.000,00

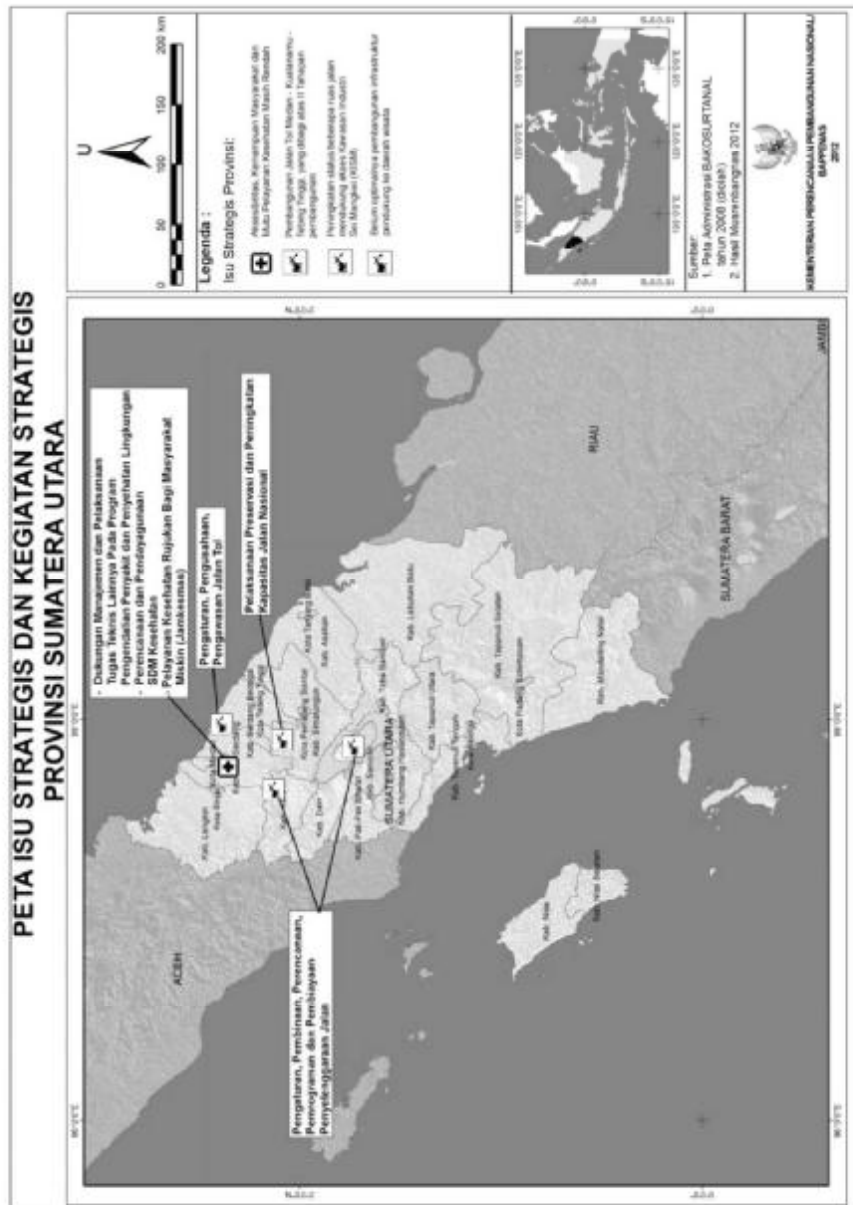
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
<i>kewirausahaan¹</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEMUDAHYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Persenlase Kabupaten/Kota Memiliki Minimal 2 (Satu) SMK SSB/SH		0,00
<i>Kegiatan Strategis : Meningkatkan peran SMK di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei¹</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEMUDAHYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Persentase SMK Menyerapkan Pembelajaran Adaptif yang Sesuai Dengan Tantutan Perseimbangan Iptek Sesuai Dengan Tingkatannya		0,00

Catatan:

- 1) Untuk kegiatan fisik jenjang pendidikan menengah disediakan dana dari pusat yang dialokasikan di 33 provinsi melalui mekanisme *block grant*. Daerah mengusulkan melalui proposal yang dilengkapi dengan data pendukung.

Matriks Proyek MP3EI 2013

No.	Proyek MP3EI	Pelaksana Utama	RKP 2013 (Rp Milyar)
1	Pembangunan rel kereta api ruas Bandar Tinggi – Kuala Tanjung (21,5 Km) dan rehabilitasi spoor simpang Gunung Bayu lintas Perlanaan-Sei Mangae	Kementerian Perhubungan	62,90
2	Perluasan Pelabuhan Belawan	Kementerian Perhubungan	335
3	Perancangan jalan Perawang Siantar – Tebing Tinggi (34,5 Km)	Kementerian PU	48,66
4	Perancangan jalan Limapuluh - Sp. Lalum (Kuala Tanjung)	Kementerian PU	2,093
5	Pembangunan jalan akses Pelabuhan Belawan (0 Km)	Kementerian PU	46,178
6	Pengembangan jalan akses Kuala namu (8 Km)	Kementerian PU	100
7	Perancangan jalan Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat Jalas Provinsi Riau (326,71 Km)	Kementerian PU	00,349
8	Pembangunan jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (60 Km)	Kementerian PU	253
9	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	693,075



Provinsi : Sumatera Barat

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Belum Fokusnya Program dalam Menangani Daerah Tertinggal				
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Pokai				
	Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Pembangunan terminal dan peningkatan faspel Laut Pokai	1 paket terminal	2.400,00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Pasar Puat				
	Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Volume pengerukan lumpur/sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta M ³), Pelabuhan Strategis yang di bangun/ditingkatkan/di rehabilitasi, Pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi, pelabuhan perintis yang di bangun		0,00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Sinaka				
	Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				

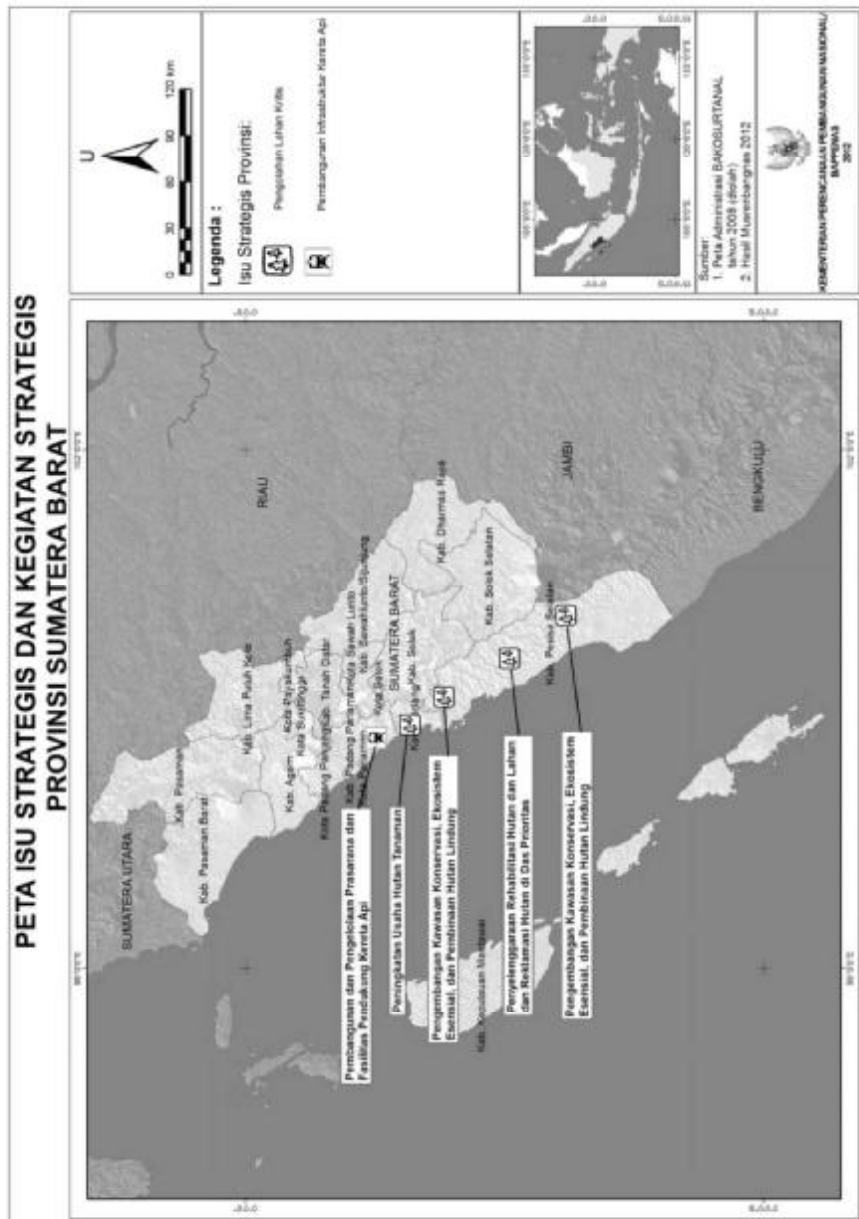
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transparansi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Volume pengerukan lumpur/sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta M ³). Pelabuhan Strategis yang di bangun/ditingkatkan/di rehabilitasi. Pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/dire habilitasi, pelabuhan perintis yang di bangun/		0,00
Kegiatan Strategis : Pengadaan Mesin Tempel 15 PK dan Mesin Long Tail					
Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Jumlah kelompok nelayan KUR penerima Pengembangan Usaha Mina Pudusaan (PUMP)		0,00 (dialokasi kan melalui dana pusat)
Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Evaluasi Bencana					
Prioritas Nasional : Lingkungan, Hidup dan Pengelolaan Bencana					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan				30.000,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan Daerah Irigasi Kawasan Ubo					
Prioritas Nasional: Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Pengairan Lainnya	Jumlah luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan		25.000,00
2	Isu Strategis : Pengolahan Lahan Kritis				
Kegiatan Strategis : Pengembangan perbenihan dan persemaian tanaman hutan					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana					
KEMENTERIAN KEHUTANAN					
	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Perhutanan Tanaman Hutan	Terjaminnya Area Sumber Berkah Seluas 4500 Ha Terkelola Secara Baik		0,00
Kegiatan Strategis : Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana					
KEMENTERIAN KEHUTANAN					
	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas	Terjaminnya Lahan rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.954.000 ha		1.100,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Usaha Hutan Tanaman					
Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana					
KEMENTERIAN KEHUTANAN					
	Program Peningkatan Usaha Kehutanan	Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	Penambahan Area Tanaman Pada Hutan Tanaman (HTI/ETIT) Seluas 2,65 juta Ha		1.314,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan Kawasan Konservasi					
Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana					
KEMENTERIAN KEHUTANAN					
	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, dan Pembinaan Hutan Lindung	Terjaminnya Penanganan Perubahan Kawasan Luar Pada 12 Provinsi Prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)		1.200,00
3	Isu Strategis : Pembangunan Infrastruktur Kereta Api				
Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Duku - Bandara Internasional Minangkabau Tahap II					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	Terbangunnya Jalur Ka Baru antara Duku dan Bandara Internasional Minangkabau Termasuk dua stasiun	3,95 km	50.884,0 0

MATRKS PROYEK MP3EI 2013

No.	Proyek MP3EI	Pelaksana Utama	RKP 2013 (Rp Milyar)
1	Pengembangan SPAM Kawasan Khusus Kota Lima Puluh (50 lt/dt)	Kementerian PU	16,32
2	Sektor Pembangunan Jaspel Laut Cerecik Cairan	Kementerian Perhubungan	10
3	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dekat Tapang	Kementerian Perhubungan	10
4	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	268,413



Provinsi : Riau

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Millenium Development Goals (MDGs)				
	Kegiatan Strategis : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4)	90	2,128,00
	Kegiatan Strategis : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Cakupan Kurjungan Neonatal Pertama (KM ₁)	90	2,084,34
	Kegiatan Strategis : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan akalnya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal	203 puskesmas	18,013,95
	Kegiatan Strategis : Pembangunan gedung dan fasilitas IGD Terpadu dan Gedung Poliklinik sesuai master plan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar	disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan alokasi anggaran yang	4,460,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
			(Lulus pada penyediaan IT kelas II RS)	tersedia	
Kegiatan Strategis : Peningkatan Pelayanan Kefarmasian					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	Persentase (%) Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	40	1.849,00
Kegiatan Strategis : Pembinaan Gizi Masyarakat					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	100	3.220,00
Kegiatan Strategis : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Bina GIZI dan KIA					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi & Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase satuan kerja yang menyanggarkan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan	95	1.267,41
Kegiatan Strategis : Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA¹					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Jumlah Siswa SMA Penerima BOMM		0

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia	1.500,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Fisik Gedung Bedah Sentral					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)	1	11.931,06
Kegiatan Strategis : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	disesuaikan dengan UPT vertikal di daerah	812,00
Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	65	1.470,00
Kegiatan Strategis : Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan	Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	1) Jumlah Dokumen Perencanaan anggaran, kebijakan dan evaluasi pembangunan kesehatan yang tersusun tepat waktu 2) Persentase (%) Ketersediaan Profil Kesehatan Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota Per Tahun	1 paket 90	1.611,50
Kegiatan Strategis : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah UPT vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	Disesuaikan dengan jumlah UPT vertikal di daerah	802,00
Kegiatan Strategis : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PSPDMK)	Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan		1.600,00
Kegiatan Strategis : Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja, Olahraga dan Matra					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Olahraga	Seuruh Puskesmas di Provinsi Riau yang mampu melaksanakan upaya kesehatan olah raga	280,00
Kegiatan Strategis : Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kas. Tradisional/Komplekmenter Alternatif					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplekmenter dan Alternatif	Jumlah Rs yang Menyediakan Pelayanan Kesehatan Tradisional, yang Aman dan Bermfaat sebagai Pelayanan Alternatif dan Komplekmenter	Seuruh RS di Provinsi Riau yang menyediakan pelayanan kesehatan tradisional, yang aman dan bermanfaat sebagai pelayanan alternatif dan komplekmenter	205,00
Kegiatan Strategis : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD¹					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	APM SD/S.DLB/PAKET A	3 R33	375,00
Kegiatan Strategis : Rehabilitasi SMA/SMK*					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Dukungar Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Rusak Akibat Bencana/Kerusuhan yang Direhabilitasi		0
Kegiatan Strategis : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP*					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	APM SMP/SMPLB/PAKET 3	9 R33	1.260,00
Kegiatan Strategis : Rehabilitasi SD/MI, SMP/MTs*					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Dukungar Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan Yang Terbuka		0
Kegiatan Strategis : Pendidikan Lanjutan untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pengembangan Profesi PTK Dan Penjamin Muta Pendidikan	Peningkatan Layanan Pendidik untuk Jenjang Paud, Dikdas, Dikmen dan Dikti	Jumlah Program dan Model Pengembangan Pendidik yang Dihasilkan Setiap Tahun Sesuai Bidangnya		0

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Jumlah Siswa SMK Penerima BOMM		0
2	Isu Strategis : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Islamic Solidarity Games (ISG) 2013				
Kegiatan Strategis : Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung IIRS di Pelintang Dumai					
Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum	Pemhangunan Infrastruktur	Perbaiki infrastruktur mendesak	-	0
Kegiatan Strategis : Pembebasan lahan IHKS Kuala Enok Inhil dan Pelintang Dumai					
Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi					
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perikanan	Jumlah leawasan yang terhentak	0	0
Kegiatan Strategis : Penyelenggaraan Islamic Solidarity Games (ISG) Tahun 2013					
Prioritas KI : Prioritas KI					
KEMENTERIAN PENUDA DAN OLAK RAGA					
	Program Pembinaan Olahraga Prestasi	Pembinaan Olahraga Prestasi	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Islamic Solidarity Games (ISG) Tahun 2013	1 Paket	50.000,00
3	Isu Strategis : Infrastruktur, Energi dan Lingkungan Hidup				
Kegiatan Strategis : Pengadaan dan pemasangan PLTS terpadu terpusat kapasitas 15 s/d 20 Kw di Provinsi dan 7 kabupaten di Provinsi Riau					
Non Prioritas : Non Prioritas					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ISDM	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kesdm	Persentase (%) Sarana dan Prasarana Kerja yang Sesuai Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja	0	0
Kegiatan Strategis : Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Rehab Saluran Primer					
Non Prioritas : Non Prioritas KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	2000 ha	40.900,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Bandara Sultan Syarif Kasim II					
Prioritas Nasional: Infrastruktur KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara				50.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Dermaga Penyeberangan					
Prioritas Nasional: Non Prioritas KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan Sarana dan Prasarana ASDP	Pembangunan dermaga penyeberangan Kampung Balak (Selat Panjang)	1 pelabuhan	10.500,00
4	Isu Strategis : Revitalisasi Pertanian				
Kegiatan Strategis : Peningkatan kapasitas penyelenggaraan UED melalui pembangunan kantor UED PPD Provinsi Riau (632 unit)					
Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase (%) Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan/Ued-Sp yang Berfungsi		0

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga panen dan					
Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar					
Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Jumlah kelembagaan yang diberdayakan dalam P2KP (Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan) dalam rangka mewujudkan Konsumsi Pangan Masyarakat Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (Desa)	168	7.777,00
Kegiatan Strategis : Penguatan sistem produksi pembudidayaan					
Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan	Jumlah Unit Pembudidayaan yang Tersertifikasi dan Memenuhi Standar		146
Kegiatan Strategis : Perluasan areal pengelolaan lahan pertanian					
Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan Area dan Pengelolaan Lahan Pertanian	Jumlah (Ha) Optimasi Lahan Pertanian (Konservasi dan Optimasi)	1.060	63.930,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman tahunan					
Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi					
KEMENTERIAN PERTANIAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mata Pencaharian Perkehuatan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mata Pencaharian Tabunan	Revitalisasi Perkebunan (Karu)	225	1.900,00
5	Isu Strategis : Pembangunan Daerah dan Kawasan Perbatasan				
	<i>Kegiatan Strategis : Fasilitas Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik				
	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)				
	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Pengelolaan Lintas Batas Negara	Tersusunnya Laporan Monitoring/Evaluasi Pengelolaan Lintas Batas Negara	1 dokumen	0
	<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik				
	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)				
	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Pengelolaan infrastruktur ekonomi dan Kesra kawasan perbatasan	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi Perencanaan (dengan 6 K/L dan 12 Provinsi) dan Koordinasi Pelaksanaan (dengan 10 Provinsi) Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan		0
	<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik				
	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRPP	Pelaksanaan dukungan Perencanaan, Kerjasama dan Hukum	Teraksananya koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam rangka pengelolaan perbatasan antar negara.	1 dokumen	0

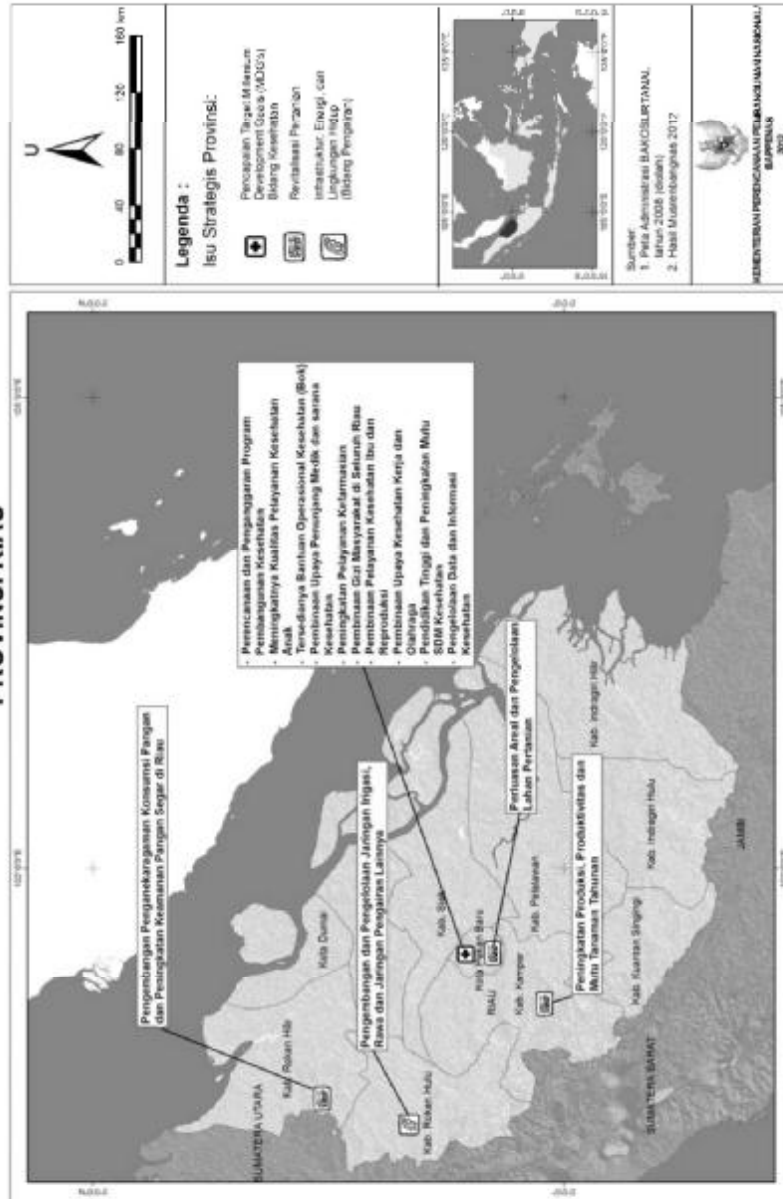
Catatan:

- 1) BOS dan BOS Rintisan pendidikan menengah universal (sebelumnya bernama BOMX) pada tahun 2013 menggunakan mekanisme transfer daerah.
- 2) Untuk kegiatan fisik jenjang pendidikan menengah disediakan dana dari pusat yang dialokasikan di 33 provinsi melalui mekanisme *block grant*. Daerah mengajukan melalui proposal yang dilengkapi dengan data pendukung.
- 3) Kegiatan sudah dialokasikan melalui DAK tahun 2013.

Matriks Proyek MP3EI 2013

No.	Proyek MP3EI	Pelaksana Utama	RKP 2013 (Rp Milyar)
1	Pelebaran Runway di Bandara Sultan Syarif Kasim II	Kementerian Perhubungan	100
2	Perancangan jalan Simpang Batang - Batas Dumai (10 Km rigid)	Kementerian PU	0,641
3	Perancangan jalan Pekan Heran - Siberida - Batas Provinsi Jambi (51 Km)	Kementerian PU	59,086
4	Perancangan jalan Sirek Sp. Japura Rengat-Rumbai Jaya-K. Enok (238 Km)	Kementerian PU	136,046
5	Perancangan jalan Sp. Kulim - Pelebaran Dumai	Kementerian PU	81,013
6	Pembangunan jalan tol Pekanbaru - Kandis (Pembebasan Lahar)	Kementerian PU	131
7	Lanjutan Pembangunan Dermaga Perampang Dumai	Kementerian Perhubungan	3,47
8	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Industri Dumai, Tj. Buton, dan Kuala Enok (3 x 40 %/dt)	Kementerian PU	15
9	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	784,253

PETA ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI RIAU



Provinsi : Jambi					
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Sistem dan jaringan transportasi wilayah yang kurang memadai				
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas jalan				
	Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan Nasional	Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran	-	367.408,10
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas Jemhatan				
	Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
		Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas jalan Nasional	Panjang jemhatan yg mendapat pemeliharaan rutin	-
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Bandara Sultan Thaha				
	Prioritas Nasional: Infrastruktur				
					50.000,00
2	Isu Strategis : Rendahnya Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Produksi pada setiap sentra produksi unggulan				
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Pengembangan Usaha dan Investasi	Jumlah Pelayanan Investasi di Sektor Pertanian		19.513,00

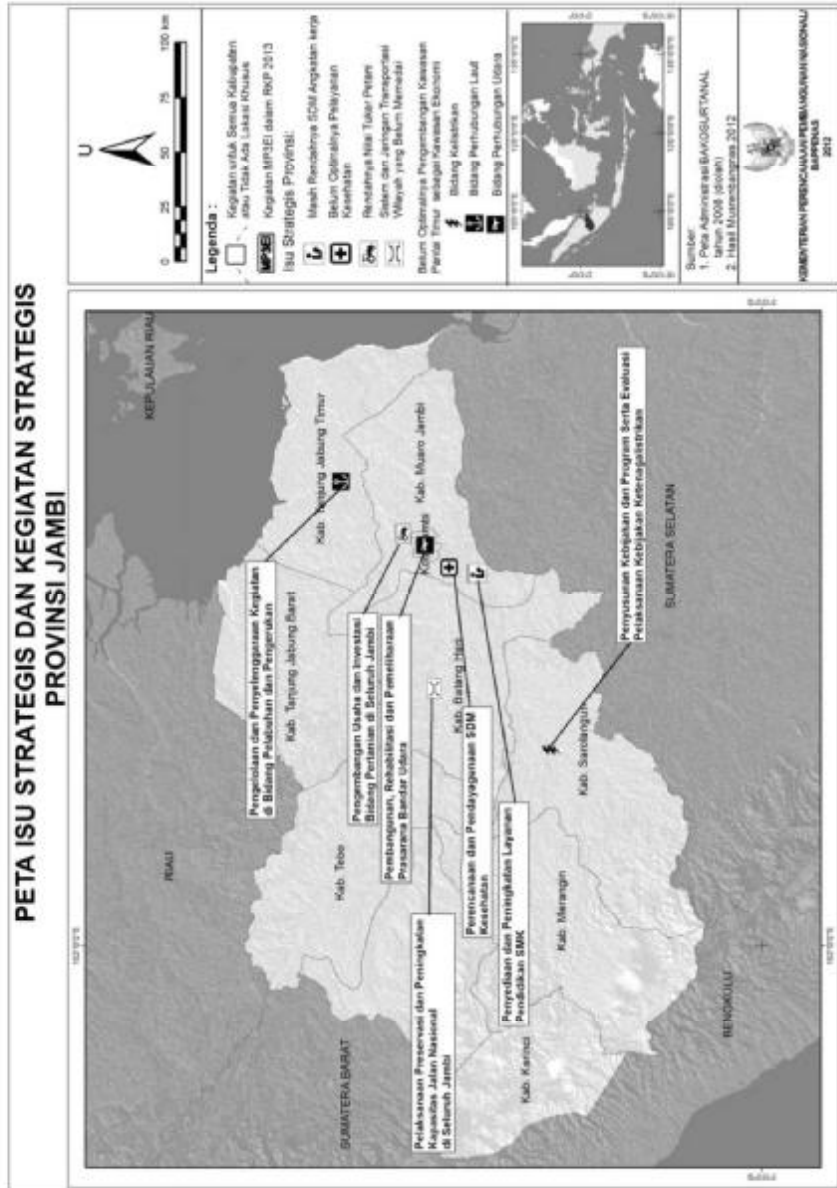
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
3	Isu Strategis : Belum Optimalnya Pengembangan kawasan pantal Timur Provinsi Jambi sebagai kawasan Ekonomi				
	Kegiatan Strategis : Pengembangan kawasan Ekonomi				
	Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	Program Pengabdian Ketenagalistrikan	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Panjang jaringan Transmisi (kms)	136	86,467.00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan kawasan Ekonomi				
	Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg dibangun baru	0	0
	Kegiatan Strategis : Pengembangan kawasan Ekonomi				
	Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengabdian dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerakkan	Pengerukan alur/kolam pelayaran Pelabuhan Nipah Panjang	370524 m3	12.600.00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan kawasan Ekonomi				
	Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Perpanjangan runway (penimbunan tanah) Bandara Sultan Thaha	1 paket	50,000.00
Kegiatan Strategis : Pengembangan Kawasan Ekonomi					
Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Kapasitas Pembangkit	0.00	0
Kegiatan Strategis : Jambi Flood Control					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengaman Pantai	Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun		70,000.00
Isu Strategis : Masih Rendahnya SDM Angkatan kerja di Provinsi Jambi Kegiatan Strategis : Pengembangan Sekolah Kejuruan berbasis unggulan lokal					
Prioritas Bidang : Bidang Sosial, Budaya dan Kehidupan Beragama KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Jumlah RKB-SMK	48 RKB	9.040,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Sekolah Kejuruan berbasis Unggulan Lokal					
Prioritas Bidang : Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan	Persentase Lulusan SMK Bersertifikat Kompetensi		580

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
		Pendidikan SMK			
5	Isu Strategis : Belum optimalnya pelayanan kesehatan sampai ke desa Kegiatan Strategis : Peningkatan jumlah puskesmas Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana. KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana dan prasarana, peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan CT kelas III RS)	disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia	5,335,45
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan	Jumlah dokumen Pembinaan Teknis Perencanaan Lokasi Jalan dan Jembatan Rawan Kecelakaan & Rawan Bencana	-	0

MATRIKS PROYEK MPSEI 2013

No.	Proyek MPSEI	Pelaksana Utama	IKIP 2013 (Rp Milyar)
1	Pengembangan Bandara Sultan Thaha	Kementerian Perhubungan	77
2	Perencanaan jalan Muara Tembesi – Jambi (78,99 Km)	Kementerian PU	47,80
3	Penanganan Jalan Lingkar Jambi	Kementerian PU	19,024
4	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	103,412



Provinsi : Sumatera Selatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Meningkatnya Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi				
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Rumah Kerasan Industri				
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil. Menengah:	Penyebaran dan Perumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah :	Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM		0
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Hilirisasi Komoditi Karet Kompond Sumatera Selatan				
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil. Menengah:	Penyebaran dan Perumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah :	Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM		0
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Pabrik Pakan Ternak Skala Kecil				
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil. Menengah:	Penyebaran dan Perumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah :	Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah :	0	0
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Unggulan Daerah.				
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Penyebaran dan Perumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP	0	0
2	Isu Strategis : Percepatan pembangunan infrastruktur : domestic connectivity				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Fasilitas Darat Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Peabotan dan Pengerukan	Lanjutan pembangunan laspel laut Tanjung Api-Api sisi darat	1 paket	75.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara Atung Bungsu Kota Pagaralam					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Penyelesaian pembangunan sisi utara Bandara Atung Bungsu Kota PagarAlam	1 paket	75.000,00
3	Isu Strategis : Percepatan Pengurangan Kemiskinan :Sinergi Klaster 1-4				
	Kegiatan Strategis : Penyusunan Data IPM berdasarkan Pendekatan Kecamatan di 15 Kabupaten/Kota				
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
BADAN PUSAT STATISTIK					
	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	Persentase terselenggaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional yang sesuai SOP	0	0
Kegiatan Strategis : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan di 7 Daerah Tertinggal di Sumsel					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Reformasi: dari Aspek Kesehatan	Pembinaan Upaya Peranjang, Medis dan Sarana Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana perlatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TTI kelas III RS)	7	13,382.70
Kegiatan Strategis : Penguangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. (PS. Di. Dangku Kiri/Kanan 10.000 ha di Kab. Muara Enim)					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembang dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan	7266.5 ha	337,490.00
Kegiatan Strategis : Rehabilitasi Gedung SD di 7 (tujuh) Daerah Tertinggal Provinsi Sumatera Selatan					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepsidan Layanan Pendidikar SD	RASIO RUANG KELAS - SISWA JENJANG SD	40 RK3	5.000,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan/Rehabilitasi Daerah Rawa Pasut					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembang dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan rekayasa rawa yang dibangun/ditingkatkan	19808	125,790.00
4	Isu Strategis : Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia				
Kegiatan Strategis : Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan Program Studi Teknik Lingkungan Lahan Basah (Lowland) sebagai Program Centre of Excellence di Provinsi Sumatera Selatan					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEBUDAYAAN					

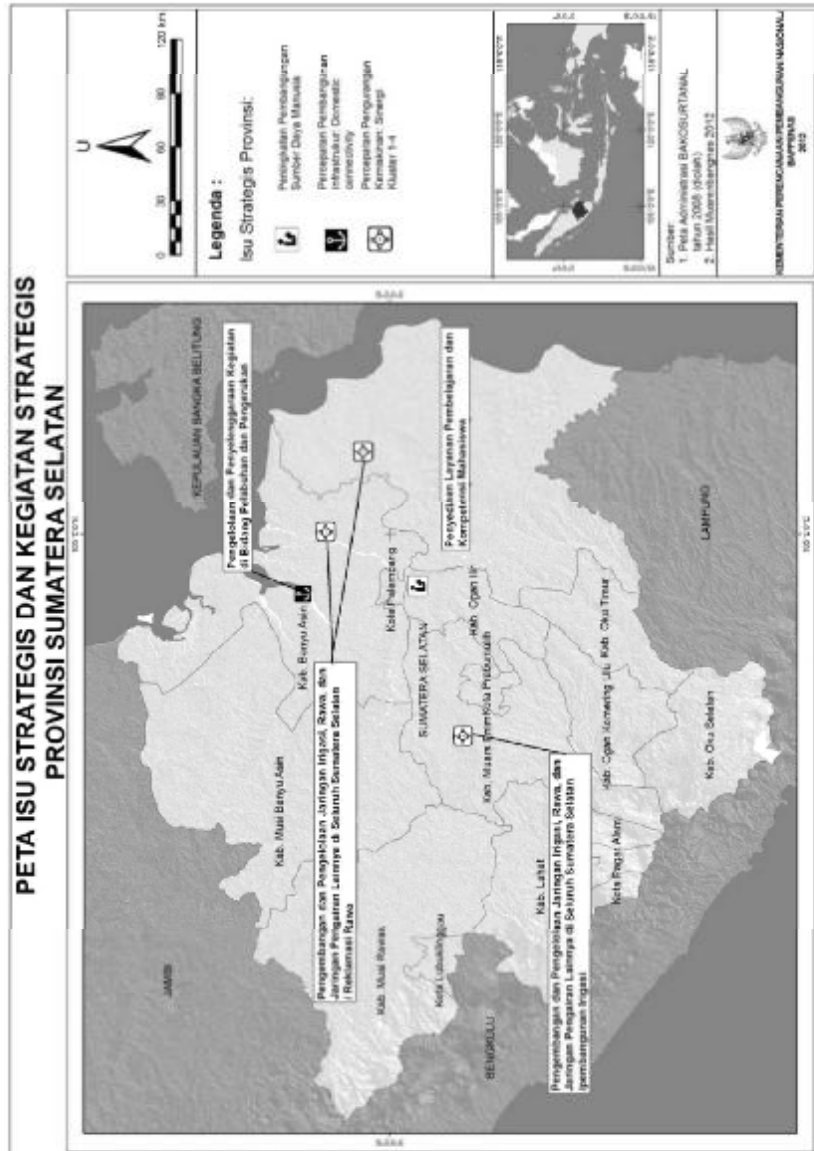
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pendidikan Tinggi	Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa	Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran		250

Catatan:

*) Akan dikordinasikan kembali dengan Ditjen Dikti

MATRIKS PROYEK MP3EI 2013

No.	Proyek MP3EI	Pelaksana Utama	RKP 2013 (Rp Milyar)
1	Penanganan jalan Muara Sini- Palembang (17,5 Km)	Kementerian PU	61,23
2	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api	Kementerian Perhubungan	75
3	Pengembangan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II	Kementerian Perhubungan	27,2
4	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	515,415



Provinsi Bengkulu

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Masih Rendahnya Mutu, Relevansi Dan Akses Pendidikan Di Provinsi Bengkulu				
	Kegiatan Strategis : Rendahnya Mutu, Relevansi Dan Akses Pendidikan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Dasar	Perjaminan Kestabilan Layanan Pendidikan SMP	PERSENTASE SMP/SMP3 YANG SESUAI DENGAN SPM	12 RKB, dok. Perencanaan, lap. Monev program dan BOS, 30 SMP terbuka, Paket B, Beasiswa bakat prestasi,	7.573,60
	Kegiatan Strategis : Rendahnya Mutu, Relevansi Dan Akses Pendidikan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kestabilan Layanan Pendidikan SD	PERSENTASE SD/SDLB YANG SESUAI DENGAN SPM	13 RKB, dok. Perencanaan, lap. BOS, lisma.	2.335,90
	Kegiatan Strategis : Rendahnya Mutu, Relevansi Dan Akses Pendidikan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA		1 USB, 6 RKB, dok. Perencanaan, 600 orang BOP Paket C, 8 SMA Pendikar, BSM 8.519 orang,	14.299,60

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik Lomba	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Rendahnya Mutu, Relevansi Dan Akses Pendidikan					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK		1 USB, 8 RKB, dok. Perencanaan, lap. Yonev program, BSM 6.473 siswa, lomba	11.086,6
Kegiatan Strategis : Rendahnya Mutu, Relevansi Dan Akses Pendidikan'					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Tinggi	Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi	Jumlah PU penerima program pengembangan kapasitas institusi		0
2 Isu Strategis : Kurangnya Jumlah Tenaga Medis, Para Medis, Dokter Dan Dokter Spesialis Serta Belum Meratanya Pendistribusiannya					
Kegiatan Strategis : Kurangnya Jumlah Tenaga Kesehatan Belum Meratanya Pendistribusiannya					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar nasional pendidikan	1 paket	2.004,30

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
3	Isu Strategis : Jumlah Penduduk Miskin Masih Tinggi				
Kegiatan Strategis : Menurunkan Persentase Penduduk Miskin					
Prioritas Bidang : Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Beragama					
KEMENTERIAN SOSIAL					
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Terwujudnya Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui KUBE Usaha Ekonomi Produktif			1.661,00
Kegiatan Strategis : Menurunkan Persentase Penduduk Miskin					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN SOSIAL					
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Tersedianya Dana Pembiayaan/Permodalan melalui KUBE-LKM			Meresuaikan Renja Kemensos. Kegiatan hanya dilakukan di tingkat Pusat.
Kegiatan Strategis : Menurunkan Persentase Penduduk Miskin					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN SOSIAL					
Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Peningkatan kondisi perumahan dan pemukiman yang baik melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni			Meresuaikan Renja Kemensos. Kegiatan hanya dilakukan di tingkat Pusat.
Kegiatan Strategis : Menurunkan Persentase Penduduk Miskin					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
Program Peningkatan Kompetensi	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas dan	Jumlah Calon Wirausaha Baru yang Dilatih	300 orang		863,7

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Tenaga Kerja dan Produktivitas	Kewirausahaan			
4 Isu Strategis : Kondisi Sarana Transportasi (Darat, Laut Dan Udara) Di Provinsi Bengkulu Yang Belum Memadai					
<i>Kegiatan Strategis : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Transportasi (Darat, Laut Dan Udara) Di Provinsi Bengkulu</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Perpanjangan runway sepanjang 250 m tahap 1 Bandara di Bengkulu	1 paket	30.000,00
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Paket Prasarana Ujung Daerah/Kawasan Perbatasan	1 paket	9.700,00
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Pembangunan breakwater dan penahan abrasi di Pelabuhan Pulau Baai	1 paket	13.300,00
<i>Kegiatan Strategis: Pembangunan jalan di Pulau Enggano sepanjang 20 km</i>					
Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan				20.000,00
<i>Kegiatan Strategis: Pengembangan Bandara Fatmawati</i>					
Prioritas Nasional: Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara				30.000,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis: Pengembangan Bandara Enggano					
Prioritas Nasional: Infrastruktur KEMENTERIAN PERJALANAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara				10.000,00
5	Isu Strategis: Belum Maksimalnya Akses Cadangan Pangan				
Kegiatan Strategis: Memaksimalkan Akses Cadangan Pangan					
Prioritas Nasional: Prioritas Ketahanan Pangan KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Produksi dan Milisi Tanah Komoditas Pertanian	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	Pengembangan komoditas ekspor: karet Pengembangan komoditas ekspor: tebu	200 Ha 5 paket	3.400,00 927,00
Kegiatan Strategis: Memaksimalkan Akses Cadangan Pangan					
Prioritas Nasional: Prioritas Ketahanan Pangan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Perikanan Ikan	Jumlah Benih dengan Mutu Terjamin		528
Kegiatan Strategis: Memaksimalkan Akses Cadangan Pangan					
Prioritas Nasional: Prioritas Ketahanan Pangan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Memiliki Prasarana dan Sarana yang Memadai		638
6	Isu Strategis: Kondisi Sarana Transportasi (Darat, Laut Dan Udara) Di Provinsi Bengkulu Yang Belum Memadai				
Kegiatan Strategis: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Transportasi (Darat, Laut Dan Udara) Di Provinsi Bengkulu					
Prioritas Nasional: Prioritas Infrastruktur					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Jalur Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Paket Prasarana Lajj Daerah/Kawasan Perbatasan		12.000,00
Kegiatan Strategis : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Transportasi (Darat, Laut, Dan Udara) Di Provinsi Bengkulu					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Jalur Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan		0
Kegiatan Strategis : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana Transportasi (Darat, Laut, Dan Udara) Di Provinsi Bengkulu					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Volume pengerukan lumpur/sedimen pada saat pelayaran dan/atau dalam pelabuhan (Juta M ³), Pelabuhan Strategis yang di bangun/ditingkatkan./di rehabilitasi, Pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan./di rehabilitasi, pelabuhan perintis yang di bangun/		0
7	Isu Strategis : Belum Maksimalnya Akses Cadangan Pangan				
	Kegiatan Strategis : Optimasi Pola Tanam Tanaman Pangan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				

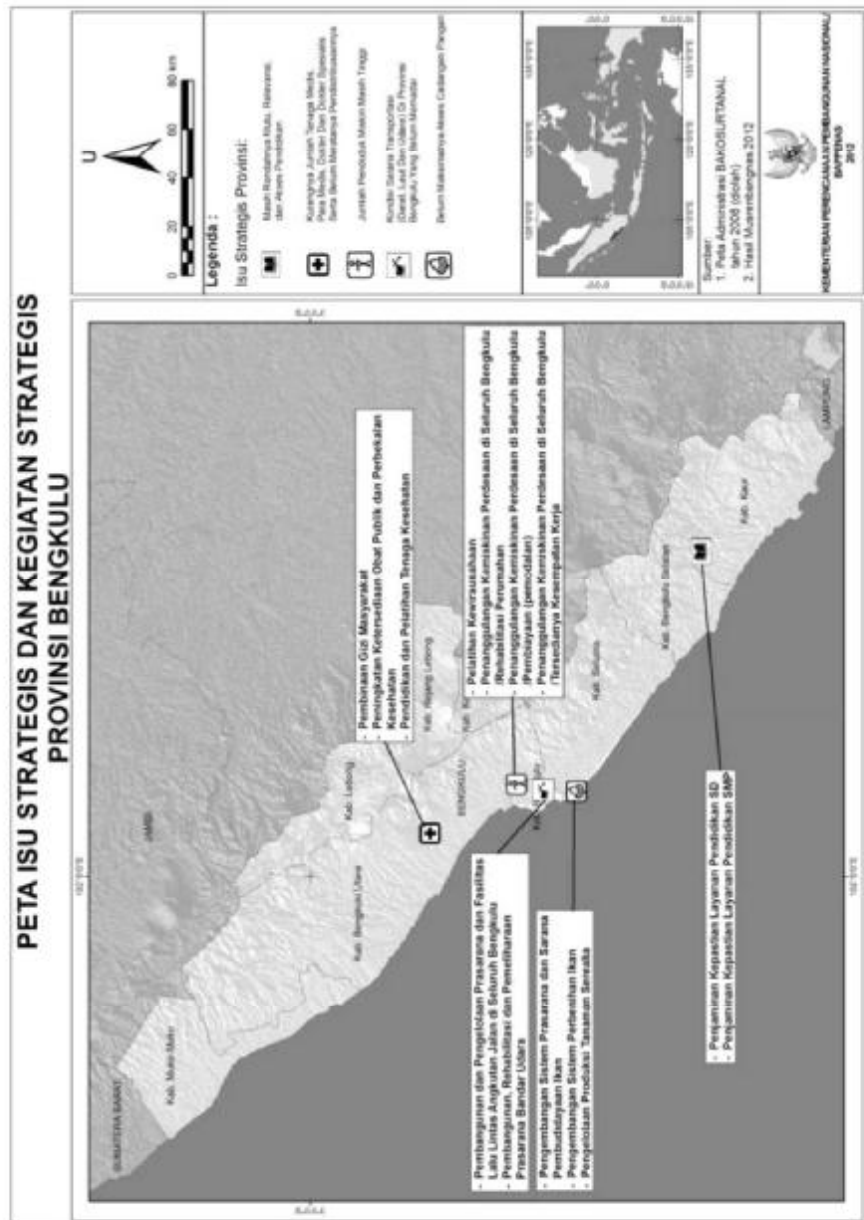
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Berkelanjutan	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan Termasuk untuk Jember, Bakar Nabati (Jibu Haj : SI - Ptt Padi Hibrida (Ribu Ja)	32100	18.902.00

Catatan:

1. Akan di koordinasikan kembali dengan Ditjen Dikti.

MATRIKS PROYEK MP3EI 2013

No.	Proyek MP3EI	Pelaksana (Utama)	IKIP 2013 (Rp Milyar)
1	Pengembangan Pelabuhan Rasi	Kementerian Perhubungan	0
2	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan garda induk	Kementerian ESDM	10,730



Provinsi Lampung

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Perkuatan Domestic Connectivity Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Daerah				
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Bandara Raden Inten II menjadi Bandara Internasional dan Embarkasi/Debarkasi Haji Penuh				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Pelapisan dan perluasan terminal Bandara Raden Inten II	2 paket	86.500,00
	Kegiatan Strategis : Peningkatan dan Penataan Jalan Nasional dan Jalan Strategis Provinsi				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	-Jumlah jalan dan jembatan yang dipreservasi - Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran	-	723.109,00
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas jalan				
	Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/	-	367.408,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
			pelebaran		
Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas Jembatan					
Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jembatan yg mendapat pemeliharaan rutin	-	13.534,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Fisik Terminal Agribisnis					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Pengembangan Pemasaran Domestik	Jumlah Lokasi Pelayanan Informasi Pasar Komoditi Pertanian		1.700,00
2 Isu Strategis : Percepatan Pencapaian Target MDGS					
Kegiatan Strategis : Dukungan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Lampung					
Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan	0.12 m3/dt	16.520,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya mempersiapkan tenaga kerja yang terampil sesuai pasar kerja					
Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pernerdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas	Jumlah lembaga pelatihan yang ditingkatkan kualitasnya	2 BLK	Alokasi bergantung pada telaah kebutuhan
Kegiatan Strategis : Pengadaan Rumah Sakit Bergerak (Mobile Hospital) untuk Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	Disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia	4,421.00
3	Isu Strategis : Pengembangan Lampung sebagai Centre of Excellence di Bidang Pendidikan dan Riset				
Kegiatan Strategis : Dukungan Kebijakan dan Implementasi Rencana Pengembangan Kawasan Teknopolitan					
Prioritas Nasional : Prioritas Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi					
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)					
	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Difusi Teknologi	Pengembangan Jaringan Inovasi		0
Kegiatan Strategis : Pengembangan Pusat Riset Bidang Energi Baru dan Terbarukan					
Prioritas Nasional : Prioritas Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi					
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)					
	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Bahan Bakar		0
Kegiatan Strategis : Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Unggul Terpadu Bertaraf Internasional di Anaktuha Lampung Tengah'					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Persentase SMK Menerapkan Pembelajaran Adaptif yang Sesuai Dengan Tuntutan Perkembangan Iptek Sesuai Dengan Tingkatannya		0
Kegiatan Strategis : Pengembangan Pusat Riset Bidang Agroindustri					
Prioritas Nasional : Prioritas Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi					
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)					
	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi	Pengkajian dan Penerapan Teknologi Energi Bahan Bakar		0
Kegiatan Strategis : Pembangunan Institut Teknologi Sumatera di Provinsi Lampung²					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Tinggi	Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan Tinggi	Jumlah PT penerima program pengembangan kapasitas institusi		35.000,00
4	Isu Strategis : Pengembangan Wilayah/ Kawasan, Tata Ruang, dan Konservasi				
Kegiatan Strategis : Mitigasi dampak perubahan iklim global					
Prioritas Bidang : Bidang Sda dan Lingkungan Hidup					
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan	1	1.500,00
Kegiatan Strategis : Perencanaan dan penataan kawasan pesisir					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah lokasi Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Wilayah Nasional, Lintas Wilayah, Provinsi/Kab/Kota yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini dan terkendali pemanfaatannya		0
Kegiatan Strategis : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Lampung					
Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana					
KEMENTERIAN KEHUTANAN					
	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas	Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas		1.467,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
			seluas 1.954.000 ha		
5	Isu Strategis : Pengembangan Ekonomi Wilayah Terpadu				
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi kelautan dan Perikanan Tangkap dan Budidaya (ikan dan rumput laut)				
	Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri (lokasi)	75	400
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Industri pengolahan Produk Pertanian dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil pertanian				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		2.700,00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan potensi panas bumi dan mikrohidro untuk pembangkit listrik				
	Prioritas Nasional : Prioritas Energi				
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi	Pemanfaatan Panas Bumi (Pemboran Eksplorasi)	0.00	0

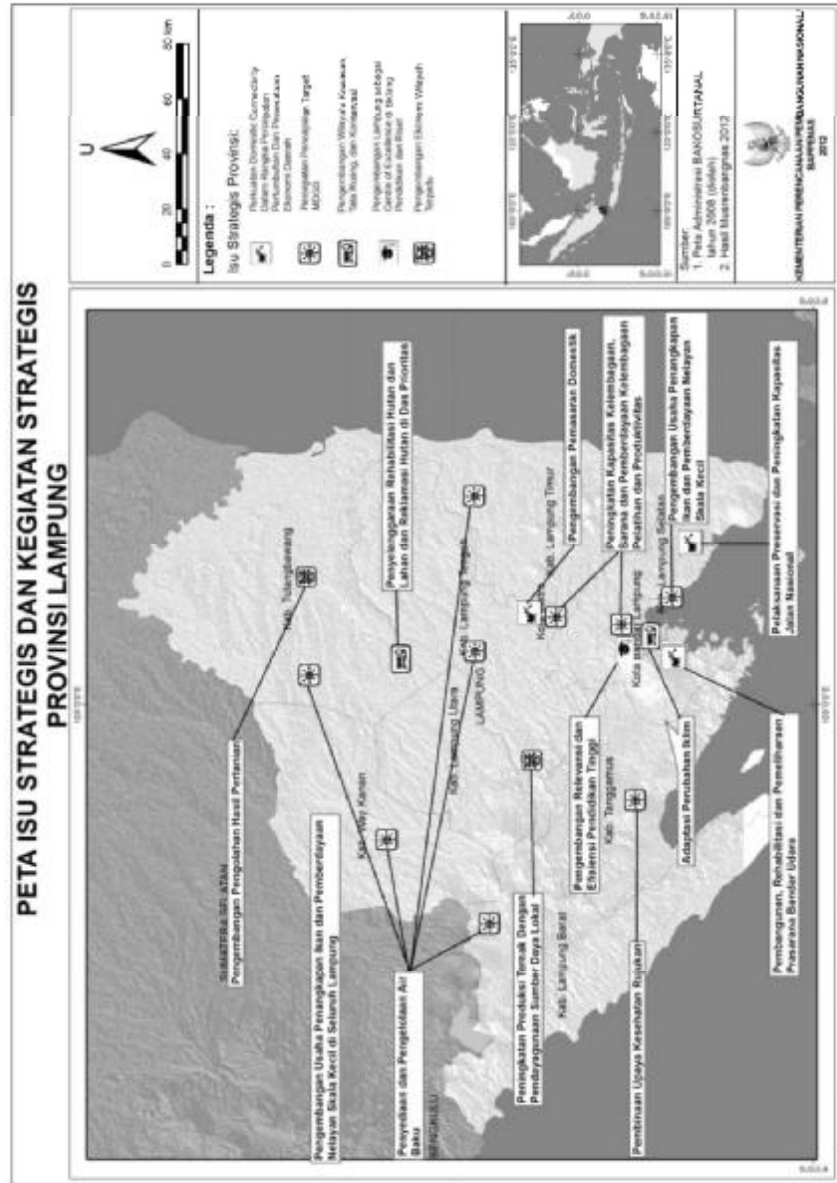
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	Pengembangan Agribisnis Peternakan Melalui Lm3 (Kelompok)	9477	6

Catatan:

- 1) Untuk kegiatan fisik jenjang pendidikan menengah disediakan dana dari pusat yang dialokasikan di 33 provinsi melalui mekanisme *block grant*. Daerah mengusulkan melalui proposal yang dilengkapi dengan data pendukung.
- 2) Ditjen Dikti mengalokasikan Rp. 35 miliar melalui dana pusat.

MATRIKS PROYEK MP3EI 2013

No.	Proyek MP3EI	Pelaksana Utama	RKP 2013 (Rp Milyar)
1	Pembangunan jalan KA <i>partial double track</i> antara Tulungbuyut - Blambangan Umpu	Kementerian Perhubungan	38,2
2	Pengembangan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni	Kementerian Perhubungan	451
3	Pengembangan Pelabuhan Sebalang (menunjang Pelabuhan Panjang)	Kementerian Perhubungan	10
4	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	48,226



Provinsi Bangka Belitung

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Pemulihan daya dukung lingkungan dengan kegiatan prioritas rehabilitasi lahan kritis dan bekas pertambangan				
	Kegiatan Strategis : Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Tanaman Produktif				
	Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				
	KEMENTERIAN KEHUTANAN				
	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas	Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 1.954.000 ha		987
	Kegiatan Strategis : Pelestarian Hutan Lindung Pantai dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				
	KEMENTERIAN KEHUTANAN				
	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas	Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai seluas 40.000 ha		0
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Lingkungan Hidup Daerah				
	Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				
	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Provinsi Yang Menyelenggarakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan		2.000,00
	Kegiatan Strategis : Reklamasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Eks-Tambang dengan Tanaman Produktif				
	Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				
	KEMENTERIAN KEHUTANAN				
	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Perhutanan Sosial	Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 32 provinsi		0

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
2	Isu Strategis : Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah				
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Bandar Udara H.AS Hanandjoeddin Tanjungpandan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Pelapisan landas pacu, apron, taxiway, stopway, dan fillet bandara H.AS Hanandjoedin	1 paket	27.600,00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Bandar Udara Dipati Amir				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara				36.000,00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Kabel Transmisi Bawah Laut dari Sumatera ke Pulau Bangka				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan	Jaringan Transmisi	0.00	0
	Kegiatan Strategis : penguatan Intergrasi Sistem Darat, Laut dan Udara				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah pulau kecil yang difasilitasi penyediaan infrastruktur secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar	2	400
	Kegiatan Strategis : Pembangunan PLTS Terpusat Untuk Listrik perdesaan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Energi				
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	Pembangunan PLTS Terpusat Untuk Listrik Perdesaan	0.00	0
3	Isu Strategis : Pengembangan Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Tujuan Destinasi Wisata				
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Museum Maritim di Pulau Belitung				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pelestarian Budaya	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Jumlah museum yang direvitalisasi	1 Museum	3.000,00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Dive Centre di Pulau Belitung				
	Prioritas Nasional : Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat				
	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Alam, Bahari dan Budaya	1 dtw	3.462,00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Kawasan Konservasi Tarsius Bancanus Salvator				
	Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana				
	KEMENTERIAN KEHUTANAN				
	Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Pengembangan Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, dan Pembinaan Hutan Lindung	Terjaminnya Konflik dan Tekanan Terhadap Kawasan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (Ca, Sm dan Tb) dan Hl Menurun Sebanyak 5%		1.000,00
4	Isu Strategis : Pengembangan industri unggulan daerah dengan kegiatan prioritas peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan				
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				

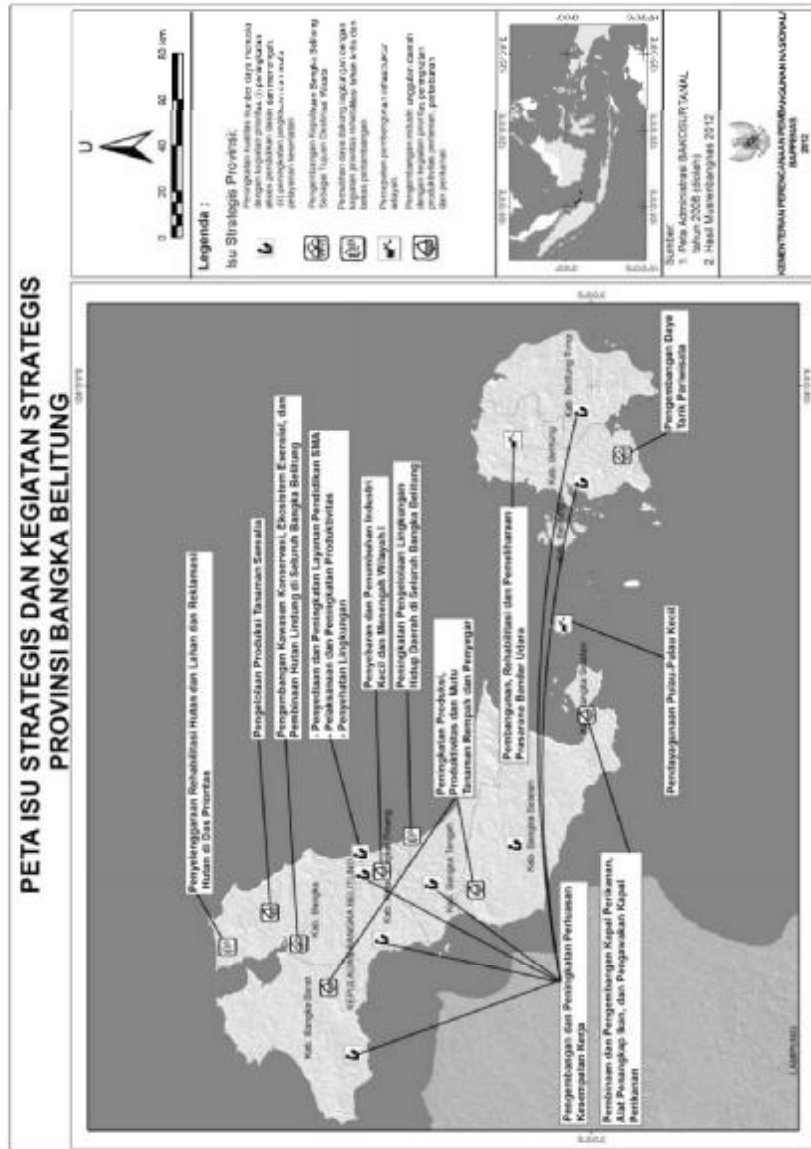
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan Termasuk untuk Bahan Bakar Nabati (Ribu Ha) : Sl - Ptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha)	4900 Ha	5.486,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan Industri Agro					
Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian					
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP	0	2.360,00
Kegiatan Strategis : Revitalisasi Lada					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada	270	3.500,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan Perikanan Tangkap					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	Jumlah kapal perikanan > 30 GT yang terbangun (unit)	1	1.500,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan Perikanan Tangkap					
Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Konflik					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil		Jumlah pulau kecil yang dipetakan potensinya, termasuk pulau-	2	400,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
			pulau kecil terluar		
Kegiatan Strategis : Pengembangan industri Hilir Berbasis Komoditas Unggulan Daerah					
Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian					
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Lokus Pengembangan	0	0
5	Isu Strategis : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kegiatan prioritas (i) peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah; (ii) peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan				
Kegiatan Strategis : Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan menengah					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Persentase Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMA	1 USB, 8 RKB, dok. Perencanaan, 630 orang BOP Paket C, 6 SMA Pendikar, lomba, BSM 1.770 orang	6.740,50
Kegiatan Strategis : Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas dan Kewirausahaan	Jumlah Pengembangan Desa Produktif	35 desa	1.750,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang	Disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan alokasi	1.524,04

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
			memenuhi standar (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)	anggaran yang tersedia	
Kegiatan Strategis : Perluasan Kesempatan Kerja					
Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian					
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	(a) Jumlah Penganggur yang Memperoleh Pekerjaan Sementara; (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara	28 paket di 7 kabupaten/kota	6.126,05
Kegiatan Strategis : Peningkatan Akses terhadap Air Bersih / Sanitasi					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Penyehatan Lingkungan	Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	63.5	1.674,20

MATRIKS PROYEK MP3EI 2013

No.	Proyek MP3EI	Pelaksana Utama	RKP 2013 (Rp Milyar)
1	Pengembangan Bandara Tanjung Pandan Hananjudin	Kementerian Perhubungan	43,9
2	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	26,411



Provinsi Kepulauan Riau

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kekuatan ekonomi kelautan dan industri pengolahan serta pariwisata yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)				
	Kegiatan Strategis : Peningkatan dan Penumbuhan Industri Argo				
	Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	Jumlah laporan		0
	Kegiatan Strategis : Pengelolaan Sumberdaya Perikanan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha				
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah		0
	Kegiatan Strategis : Penumbuhan IKM				
Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha					
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Terlaksananya kegiatan promosi dan pemasaran serta standar mutu		0	
2	Isu Strategis : Peningkatan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan dalam Rangka Percepatan Pencapaian Target MDGs				
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Pendidikan Dasar				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Pendidikan Dasar	Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Pendidik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Menerima Tunjangan		46.750,00
Kegiatan Strategis : Pendidikan Usia Dini					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang memperoleh penghargaan/perlindungan		6.241,00
Kegiatan Strategis : Pengadaan Alkes RSUP Kepri					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase (%) Produk Alat Kesehatan dan Pkrt yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat	90	1.556,77
Kegiatan Strategis : Penyelesaian Pembangunan RSUP Rujukan Provinsi Kepri					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan	Jumlah sarana dan fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana dan prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)	Disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia	319,30
3	Isu Strategis : Kurangnya penanganan Pulau-pulau Terluar dan daerah tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro				
	Prioritas Nasional : Prioritas Energi				
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik	0.00	0
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet	700	5.020,00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Pembangkit Listrik 3.500 unit				
	Prioritas Nasional : Prioritas Energi				
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan	Pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik	0.00	0

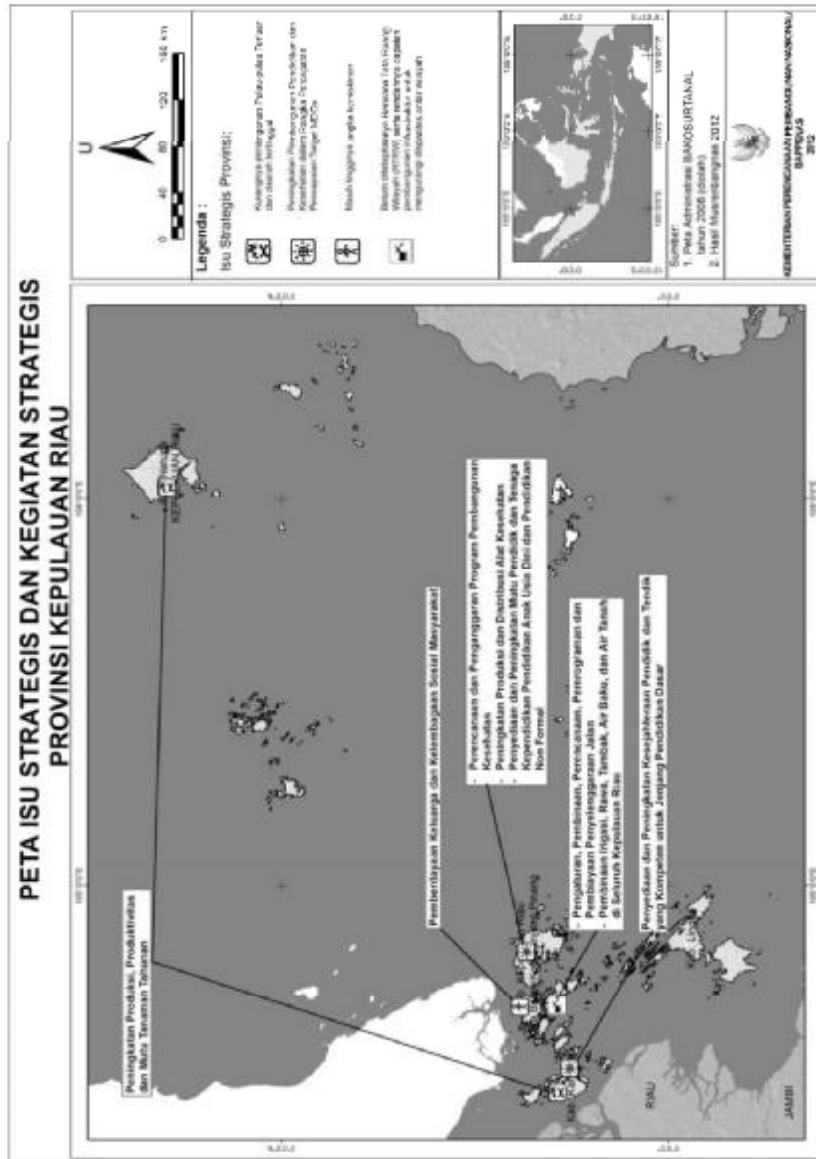
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
		Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik			
Kegiatan Strategis : Pembangunan Pembangkit Listrik di Natuna					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	0.00	0
Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Pulau Laut Natuna					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut				15.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Pulau Subi Natuna					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut				15.000,00
4	Isu Strategis : Belum ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau serta rendahnya capaian pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas dan aksesibilitas antar pulau dan antar daerah untuk mengurangi disparitas antar wilayah				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- Jumlah jalan dan jembatan yang dipreservasi - Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran - Panjang jalan dan jembatan yg dibangun baru	-	307.328,00
Kegiatan Strategis : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan air baku	Sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan	0.29 m3/dt	27.000,00
Kegiatan Strategis : Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan	Infrastruktur Drainase Perkotaan	2 kawasan	20.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Pembangunan Pelabuhan Pulau Laut dan Pelabuhan Pulau Subi	2 pelabuhan	30.000,00
Kegiatan Strategis: Pembangunan Jembatan Dompok I					
Prioritas Nasional: Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan				50.000,00
5	Isu Strategis : Masih tingginya angka kemiskinan, untuk itu perlu dilakukan upaya pemberian bantuan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak				
Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Sosial					
Prioritas K/L : Prioritas K/L					
KEMENTERIAN SOSIAL					
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang diberdayakan		136
Kegiatan Strategis : Perlindungan dan Jaminan Sosial					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN SOSIAL					
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)	Jumlah RTSM Yang mendapatkan bantuan Tunai Bersyarat PKH		0

Matriks Proyek MP3EI 2013

No.	Proyek MP3EI	Pelaksana Utama	RKP 2013 (Rp Milyar)
1	Satker sementara pembangunan faspel Malarko	Kementerian Perhubungan	10
2	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	195,172



BAB 3 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2013

3.1 Kondisi Wilayah Jawa-Bali Saat Ini

Secara umum kinerja perekonomian wilayah Jawa-Bali tahun 2011 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sektor utama yang menyumbang perekonomian wilayah Jawa-Bali adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, dan pertanian. Nilai realisasi investasi wilayah Jawa-Bali pada tahun 2010 meningkat dari tahun sebelumnya dan merupakan kontributor terbesar secara nasional. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita wilayah Jawa-Bali terus mengalami peningkatan, namun terdapat ketimpangan yang cukup signifikan antara Provinsi DKI Jakarta dan provinsi lain di wilayah Jawa-Bali. Walaupun perekonomian wilayah Jawa-Bali relatif maju dibandingkan wilayah lainnya, masih terdapat sembilan kabupaten tertinggal di wilayah Jawa-Bali.

Peningkatan kinerja perekonomian disertai dengan perbaikan indikator sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan wilayah cenderung menurun di wilayah Jawa-Bali. Fenomena pengangguran lebih menonjol di daerah perkotaan, sedangkan fenomena kemiskinan lebih menonjol di daerah pedesaan, kecuali di Provinsi DKI Jakarta yang seluruhnya berada di perkotaan. Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, secara umum semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya.

TABEL 3.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA BALI

Perkembangan Pembangunan	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali
Pertumbuhan Ekonomi 2011 (persen)	5,7	6,5	5,7	7,3	6,4	6,6	5,7
PDDB Perkapita ADHR Tahun 2010 (Rp.Ribu)	89,735	17,300	23,723	13,196	22,772	14,012	16,595
Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2011 (Persen)	11,20	9,40	5,90	3,97	9,15	13,06	2,32
Persentase Penduduk Miskin, September 2011 (Persen)	3,64	10,57	16,21	16,14	13,05	6,26	4,59
Indeks Pembangunan Manusia, 2010	77,51 (Peringkat: 1)	72,20 (Peringkat: 15)	72,49 (Peringkat: 14)	75,77 (Peringkat: 7)	71,62 (Peringkat: 18)	70,48 (Peringkat: 23)	72,17 (Peringkat: 15)
Indeks Pembangunan Gender, 2010	73,35	65,30	55,79	72,51	65,22	52,80	67,81
Indeks Pemberdayaan Gender, 2010	73,23	67,02	57,96	77,72	67,92	55,66	58,53
Angka Harapan Hidup, 2010 (Tahun)	73,21	68,20	71,41	73,22	69,60	54,51	70,72
Rata-Rata Lama Sekolah, 2010 (Tahun)	12,53	4,17	7,25	9,07	7,75	0,32	0,21

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Jawa-Bali merupakan produsen utama komoditas tanaman pangan dan komoditas ternak. Produksi padi di Jawa-Bali tahun 2011 mencapai sekitar 53,64 persen dari total produksi padi nasional, yang sebagian besar berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk komoditas daging sapi, wilayah Jawa Bali menghasilkan 64,56 persen produksi nasional. Pada tahun 2010, wilayah Jawa-Bali merupakan wilayah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam produksi perikanan budidaya, yaitu 29,57 persen produksi nasional.

Kondisi infrastruktur wilayah Jawa-Bali relatif lebih memadai

jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dari total panjang jalan di Jawa-Bali sepanjang 6.146,24 Km, kondisi jalan mantap (baik dan sedang) mencapai 93,7 persen atau sepanjang 5.759,70 Km. Kerapatan jalan tertinggi secara nasional terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sementara itu, kapasitas jalan terendah secara nasional adalah Provinsi DKI Jakarta, Bali dan Jawa Barat.

Pada tahun 2011, rasio elektrifikasi DKI Jakarta sebesar 100 persen, Banten 68,17 persen, Jawa Barat 70,72 persen, Jawa Tengah 77,31 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 75,19 persen, Jawa Timur 72,05 persen, Bali 69,77 persen dan rasio desa berlistrik DKI Jakarta sebesar 100 persen, Banten 100 persen, Jawa Barat 100 persen, Jawa Tengah 99,99 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 100 persen, Jawa Timur 99,99 persen, Bali 100 persen. Sedangkan untuk konversi energi, telah dibangun jaringan gas kota di rusun Jabotabek, Bekasi, Sidoarjo, Surabaya dan Depok.

Infrastruktur strategis lainnya adalah irigasi untuk mendukung peran wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dari total 3,30 juta hektar daerah irigasi di wilayah Jawa-Bali, hanya sekitar 666,92 ribu hektar (20,20 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk. Selain itu, hanya 39,20% daerah irigasi tersebut dalam kondisi baik (2010). Dari sisi ketersediaan tampungan air, daya tampung air (*storage*) perkapita Pulau Jawa-Bali adalah sebesar 49,4 m³/kapita, lebih kecil dari daya *storage* perkapita nasional sebesar 52,31 m³/kapita. Sedangkan kondisi bendungan/waduk dalam kondisi baik sebesar 42% (30 buah) dan 4% (3 buah) rusak berat. Dari 186 buah embung, sebanyak 80 buah (47%) dalam kondisi baik dan 15 buah (9%) dalam kondisi rusak berat.

Hampir seluruh wilayah Jawa-Bali termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana alam baik gempa bumi, longsor, dan banjir. Pada tahun 2011, tercatat 286 kejadian bencana longsor dan 320 kejadian bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Jawa-Bali.

3.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Tujuan pembangunan wilayah Jawa-Bali dalam tahun 2013 adalah untuk:

1. Mempertahankan wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung

pangan nasional;

2. Meningkatkan kapasitas wilayah Jawa-Bali dalam lingkup kerja sama ekonomi internasional, termasuk pengembangan kawasan-kawasan industri, pelabuhan laut dan udara internasional;
3. Meningkatkan standar hidup masyarakat Jawa-Bali;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi (jalan, jalan tol dan kereta api) dan energi;
5. Meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional;
6. Mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun;
7. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Jawa dan Bali.

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Jawa-Bali pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali, yang ditunjukkan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, serta angka harapan hidup (Tabel 3.2 dan Tabel 3.3);
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur transportasi;
3. Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik;
4. Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
5. Meningkatnya jumlah tampungan dan ketersediaan air melalui pembangunan dan rehabilitasi waduk;
6. Meningkatnya ketersediaan air baku bagi PDAM yang

mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs.

TABEL 3.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI
WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2013

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi ¹ (%)	Kemiskinan ² (%)	Pengangguran ³ (%)
DKI Jakarta	6,80 - 7,55	1,91	9,75 - 8,80
Jawa Barat	5,90 - 6,50	8,74	10,25 - 9,20
Jawa Tengah	6,88 - 7,48	12,02	6,45 - 5,83
DI Yogyakarta	5,85 - 6,50	15,08	5,05 - 4,60
Jawa Timur	6,78 - 7,45	11,06	4,30 - 3,70
Banten	6,55 - 7,00	4,46	15,50 - 13,00
Bali	6,55 - 7,00	4,24	2,70 - 2,40

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹ Pertumbuhan Ekonomi (*angka sementara*): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

² Kemiskinan: per-entase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

³ Pengangguran (*angka sementara*): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

TABEL 3.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP
DAN RATA-RATALAMA SEKOLAH DI WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2013

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) ²	Angka Harapan Hidup (Tahun) ³
DKI Jakarta	7	12,36	75,3
Jawa Barat	25	8,55	71,1
Jawa Tengah	19	7,92	72,8
DI Yogyakarta	8	9,34	76,2
Jawa Timur	22	7,88	72,0
Banten	30	8,80	69,9
Bali	12	8,72	73,4

Sumber : Proyeksi Bappenas (*angka sementara*); BPS; Susenas

Keterangan: ¹ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

² Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan wilayah Jawa-Bali tahun 2013 diarahkan sebagai pendorong industri dan jasa nasional, serta sebagai lumbung pangan nasional untuk wilayah Jawa, serta sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional untuk Provinsi Bali. Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri unggulan potensial daerah dan kawasan industri;
2. Mengembangkan pendidikan kejuruan dan keterampilan baik formal maupun non formal, serta mendorong pengembangan dan inovasi teknologi;
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, peternakan dan perikanan antara lain melalui penyuluhan dan introduksi teknologi;
4. Mengencalakan konversi lahan sawah dengan memperhatikan kebijakan tata ruang (RTRW) dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
5. Mengembangkan kegiatan *off-farm* untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
6. Membangun infrastruktur irigasi dan rehabilitasi daerah resapan air di kawasan-kawasan hulu/daya pertanian;
7. Pengembangan potensi wisata pantai (ekowisata) di wilayah selatan Jawa;
8. Mengembangkan aktivitas ekonomi padat karya yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja;
9. Menyediakan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha tani dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
10. Meningkatkan peribangunan infrastruktur transportasi, air bersih, dan energi;
11. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperluas jaringan perdagangan internasional;
12. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan;
13. Meningkatkan kesiapan mitigasi bencana banjir.

3.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Jawa-Bali

Isu strategis dan kegiatan strategis provinsi di wilayah Jawa-Bali adalah sebagai berikut:

Provinsi DKI Jakarta:

1. Penanganan masalah kemacetan kota, melalui pengembangan angkutan umum darat dan pengembangan angkutan umum laut ke gugusan Pulau Seribu, dengan kegiatan strategis: (i) penambahan armada Busway; dan (ii) pengadaan kapal angkutan dari/ke Kepulauan Seribu;
2. Penanggulangan banjir (penataan waduk, serta sarana dan prasarana pengendalian banjir), dengan kegiatan strategis: (i) normalisasi Sungai Ciliwung; (ii) penataan Waduk Marunda; (iii) penataan Waduk Sunter Ilule; (iv) penataan waduk Brigif/Kali Krukut Matra; dan (v) kerjasama dengan daerah hulu untuk pemeliharaan hutan, waduk/situ;
3. Penambahan air baku, dengan kegiatan strategis penambahan air baku dari Jatiluhur.

Provinsi Jawa Barat:

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah secara merata serta percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategi, ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi bencana, dengan kegiatan strategis: (i) pembangunan jalan bebas hambatan Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Kertajati), BIUTR (Bandung Intra Urban Toll Road); (ii) peningkatan sarana transportasi: pembangunan jalur KA Cicurug - Sukabumi, pembangunan jalur KA Stasiun Cirebon - Palabuhan (melalui Cangkring); (iii) pembebasan lahan untuk relokasi penduduk pembangunan Waduk Jatigede, Penanganan terpadu WS Citarum, pembebasan lahan Waduk Sadawarna Kab. Subang, penanganan banjir WS Citanduy melalui rehabilitasi ahir sungai Ciseel, pengendali dasar Sungai Ciliwung, Hilir Bendung Katumpala, Kota Bogor; (iv) pembangunan fasilitas sisi udara Bandara Kertajati; dan (v) pembangunan rumah untuk relokasi Bendungan Jatigede;
2. Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat, dengan kegiatan strategis: (i) pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas; (ii) Puskesmas Mampu PONED (200 POKED); (iii) pembangunan ruang rawat inap untuk keluarga miskin Jawa

Barat di 5 wilayah; dan (iv) pemhangunan Rumah Sakit Garut Selatan dan Indramayu;

3. Pengelolaan dan ketahanan pangan masyarakat, dengan kegiatan strategis: (i) rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, serta revitalisasi ombung/situ; (ii) subsidi dan regulasi Alsintan; (iii) subsidi benih dan regulasi; (iv) pengembangan SDM pertanian (penyuluh, POPT); dan (v) pembangunan jaringan irigasi tambak;
4. Aksesibilitas, peningkatan mutu pendidikan dan tata lola sekolah, dengan kegiatan strategis: (i) penyelenggaraan SMP (1000 RKB) di kabupaten/kota Jawa Barat; (ii) penyelenggaraan SMA (1000 RKB) di kabupaten/kota Jawa Barat; dan (iii) penyelenggaraan SMK (1000 RKB) di kabupaten/kota Jawa Barat;
5. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dengan kegiatan strategis: (i) pembangunan fasilitas pokok PPI Cisolek Kabupaten Sukahumi; (ii) pembangunan *breakwater* dan fasilitas pokok PPI Cikidang (Ciamis); (iii) pembangunan kapal di Kabupaten Sukahumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut (6 unit); dan (iv) peningkatan kelembagaan KUMKM melalui pendukung sarana dan prasarana Jajar Cyber Koperasi Paviliun KUMKM.

Provinsi Jawa Tengah:

1. Stabilisasi produksi pangan untuk keberlanjutan ketahanan pangan, dengan kegiatan strategis: (i) mekanisasi pertanian melalui perckayasaan Alsintan; (ii) pengelolaan air irigasi untuk pertanian; dan (iii) pembangunan jaringan irigasi tambak;
2. Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah, dengan kegiatan strategis: (i) penanganan pelabuhan penyebrangan Kemplal; (ii) pengembangan Bandara A Yani Semarang; (iii) peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (SPAM Regional Bregas); dan (iv) pembangunan jalan akses Pelabuhan Kendal;
3. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, dengan kegiatan strategis bantuan peningkatan kualifikasi tenaga pendidik (peningkatan kualifikasi tenaga pendidik S1/D4);

4. Penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka, dengan kegiatan strategis: (i) penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan (ii) penyaluran jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Provinsi DI Yogyakarta:

1. Pengembangan kawasan Baron, Sadeng, termasuk Baron Technopark, dengan kegiatan strategis pengembangan Pelabuhan Sadeng;
2. Pembangunan Pantai Selatan (Pausela)/jalur Jalan Lintas Selatan (JLIS), dengan kegiatan strategis: (i) penyelesaian perlengkapan jalan; (ii) pengamanan pantai Gelagak; dan (iii) pembangunan jalan lintas pantai selatan (Kulon Progo dan Gunung Kidul);
3. Penataan kawasan cagar budaya Kotagede, dengan kegiatan strategis pengelolaan sistem transportasi kawasan Kotagede;
4. Pemberdayaan UMKM dan pengembangan pasar tradisional, dengan kegiatan strategis: (i) peningkatan kualitas produksi UMKM; dan (ii) penguatan modal UMKM.

Provinsi Jawa Timur:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan, dengan kegiatan strategis:
 - a. lanjutan pembangunan Gedung PPJT (Pusat Pelayanan Jantung Terpadu) RSUD. Dr. Soetomo Surabaya;
 - b. pembangunan lanjutan Gedung Rawat Inap Maskin, IGD dan Bedah Sentral;
 - c. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD. Dr. Soedono Madiun : (i) Trauma Center dan (ii) Pengembangan Haemodialisa;
 - d. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang : (i) Kidney center (ii) Gedung kelas 3 (iii) penyelesaian R Intensif dan (iv) penyelesaian IGD; dan
 - e. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata/Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya: (i) Pembangunan Kelas III dan Gedung;
2. Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kawasan (jalan, pelabuhan laut, kereta api), dengan kegiatan strategis:

- (i) pembangunan Fly Over Peterongan, Fly Over Kertosono, Fly Over Kayen dan Fly Over Puspa Agro; (ii) pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Socah; (iii) pembangunan double track KA Lintas Surabaya-Bojonegoro, Surabaya-Mojokerto, Surabaya-Malang, Surabaya-Probolinggo, Surabaya-Madiun, pembangunan jalan KA Lintas Gubeng-Bandara Juanda, pembangunan KA komuter lintas Lawang-Malang-Kepanjen; (iv) pembangunan Jaspel Pacilan; dan (v) pembangunan jalan pantai selatan;
3. Peningkatan produktivitas padi dan penyediaan air baku, dengan kegiatan strategis:
- a. Pembangunan Waduk : (i) Studi Potensi Kalicanti dan Bangil Tak (ii) pembangunan Waduk Bendo (iii) pembangunan Waduk Tugu (iv) pembangunan Waduk Gonseng dan (v) pembangunan Waduk Tukul;
 - b. Pengembangan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Desa (JITUT/JIDRS);
 - c. peningkatan produksi , produktifitas pertanian tanaman pangan (padi);
 - d. Pengembangan Pengendalian Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan (PZKP);
 - e. Pengembangan jaringan irigasi permukaan (stok pangan 6 juta ton) : (i) SID dan DD Pemanfaatan Air Baku Bojonegoro Barrage (ii) pembuatan Jabung Ring Dike (2 Paket) (iii) pengembangan DL Bengawan Jero (iv) perbaikan Waduk Gonggang (v) OP Waduk Gonggang (vi) review DD Waduk Gonggang (vii) rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pondok Waluh Sekunder (viii) peningkatan Jaringan irigasi Peterongan [lanjutan tahap 1] (Mrican kanan) (ix) SID Peningkatan Ji Rawa Paras 670 Ha dan (x) Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah [tersebar];
 - f. Pembangunan jaringan irigasi tambak; dan
 - g. Pengerukan PPI Gelagah;
4. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dengan kegiatan strategis:
- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja: (i) Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Kelembagaan; (ii) Pemagangan; dan (iii) Pengadaan 2 (dua) unit Ambulance TKI;

- b. Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja; dan;
- c. Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Provinsi Banten:

1. Peningkatan investasi kawasan-kawasan industri, dengan kegiatan strategis: (i) pengembangan Kawasan Minapolitan Terpadu; (ii) pengembangan pusat kebugaran; (iii) revitalisasi pasar tradisional; dan (iv) pengembangan klaster industri;
2. Pembangunan infrastruktur wilayah/kawasan (jalan dan bandara, bendungan, kereta api), sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan kegiatan strategis: (i) pembangunan terminal; (ii) pembangunan jaringan air baku dan irigasi mendukung ketahanan pangan; (iii) pembangunan Bendungan Sidangheula; dan (iv) penangan jalan mendukung KKK Tanjung Lesung pada ruas Sp. Lahuban-Gibahung (50,9);
3. Peningkatan ketahanan pangan, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dengan kegiatan strategis: (i) pengembangan Balai Latihan Kerja di tujuh Kabupaten/Kota (mendukung MP3EI); (ii) fasilitasi sarana/prasarana Pusat Informasi Pasar Tenaga Kerja (mendukung MP3EI); (iii) pengembangan kewirausahaan pemuda; dan (iv) pengembangan sapi dan kerbau dalam mendukung swasembada daging;
4. Pengembangan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) dan inovasi teknologi, dengan kegiatan strategis: (i) pembangunan Politeknik Universitas Negeri Sultan Agung Tirtayasa (mendukung MP3EI); (ii) pembangunan Unit Sekolah Baru-SMK dan penambahan Ruang Kelas Baru SMK di Provinsi Banten (mendukung MP3EI); (iii) penambahan Ruang Kelas Baru SMA/MA; (iv) peningkatan layanan kesehatan masyarakat; dan (v) pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Rujukan Provinsi Banten.

Provinsi Bali:

1. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata dan MP3EI, dengan kegiatan strategis: (i) penyelesaian Dermaga Penyebrangan Gunaksa; pembangunan sisi laut dan darat; (ii) penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kapal Pesiar Tanah Ampo; dan (iii) pembangunan jalan akses Pelabuhan Gunake;

2. Peningkatan ketersediaan kapasitas listrik terpasang, dengan kegiatan strategis pembangunan SUTET 500kV;
3. Peningkatan produksi beras dalam rangka mendukung surplus beras nasional 10 juta ton tahun 2014, dengan kegiatan strategis: (i) peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan pertanian; dan (ii) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
4. Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan (terutama rehabilitasi sekolah yang rusak berat dan sedang), dengan kegiatan strategis: (i) rehabilitasi SD (172 sekolah); (ii) rehabilitasi SMP (151 sekolah); (iii) rehabilitasi SMA dan SMK (64 sekolah); dan (iv) pengadaan Information and Communication Technology (ICT) : 272 sekolah;
5. Peningkatan pelayanan kesehatan untuk mendukung pencapaian MDGs, dengan kegiatan strategis pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III RSUD Karangasem.

Uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, kementerian/lembaga pelaksana, sasaran, dan pagu indikatif di setiap provinsi, dijabarkan dalam **Lampiran Bab 3**

3.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Jawa-Bali

Arah kebijakan pengembangan MP3EI untuk Koridor Ekonomi Jawa dan Bali-Nusa Tenggara memperkuat arah pengembangan wilayah Jawa-Bali dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013, yakni mengembangkan Koridor Ekonomi Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional, serta mengembangkan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Koridor Ekonomi Jawa dan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara oleh pemerintah pusat pada tahun 2013 adalah:

1. Proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan Kalibaru (*urgent rehabilitation*) di Provinsi DKI Jakarta
2. Pembangunan tol akses Tanjung Priok sepanjang 17 km di Provinsi DKI Jakarta
3. Pemanfaatan Kanal Banjir Timur sebagai *green infrastructure* sepanjang 23,5 km di Provinsi DKI Jakarta
4. Rehabilitasi Saluran Tarum Kanal Barat di Provinsi DKI

Jakarta

5. Penanganan banjir DKI Jakarta (Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter) di Provinsi DKI Jakarta
6. Pembangunan rel Pasasa-Tanjung Priok 2,3 km *track* di Provinsi DKI Jakarta
7. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi DKI Jakarta
8. Pembangunan Waduk Sentosa (1.400 l/s) di Provinsi Jawa Barat
9. Transfer air baku Cibatarua, Cilaki, dan Cisangkuy (800 l/s) di Provinsi Jawa Barat
10. Pembangunan Pelabuhan Pemanukan di Provinsi Jawa Barat
11. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan di Provinsi Jawa Barat
12. Pembangunan DDT Manggarai-Bekasi dan Elektrifikasi Cikarang di Provinsi Jawa Barat*
13. Penanganan Jalan Pantura Cikampek - Cirebon (166,1 Km) di Provinsi Jawa Barat
14. Pembangunan Bendungan Jatigede di Provinsi Jawa Barat
15. Pembangunan elektrifikasi Citayati-Nambo (16 Km'sp) dan fasilitas pendukung prasarana di Provinsi Jawa Barat
16. Persiapan pembangunan sisi udara Bandara Kertajati di Provinsi Jawa Barat
17. Penanganan banjir Sungai Citarum di Provinsi Jawa Barat
18. Pembangunan *double track* lintas utara Jawa (Lokasi ruas di Provinsi Jawa Barat) di Provinsi Jawa Barat
19. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Jawa Barat
20. Pembangunan bendungan Jati Barang (1.050 l/s) di Provinsi Jawa Tengah
21. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo - Kertosono di Provinsi Jawa Tengah*
22. Penanganan Jalan Losari - Pejagan - Pemasang - Pekalongan di Provinsi Jawa Tengah

23. Pembangunan dan pemeliharaan *Fly Over* Kali Banteng (Menuju Pelabuhan Tanjung Emas) Provinsi Jawa Tengah
24. Penanganan Jalan Semarang - Bawen-Yogyakarta (106.3 Km) Provinsi Jawa Tengah*
25. Pembangunan Jalan Pati - Kembang - Batas Jatim Provinsi Jawa Tengah*
26. Pembangunan double track lintas utara Jawa (lokasi ruas di Provinsi Jawa Tengah) Provinsi Jawa Tengah
27. Perluasan Pelabuhan Tanjung Mas kearah Kendal (pembangunan dermaga peti kemas) Provinsi Jawa Tengah
28. Penanganan jalan Bulu - Tuban di Provinsi Jawa Timur
29. Penanganan jalan Pasuruan - Probolinggo - Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur
30. Pembangunan jalan tol Pandaan - Malang (pembebasan lahan) di Provinsi Jawa Timur
31. Pengembangan Adpel Probolinggo di Provinsi Jawa Timur
32. Pengembangan Pelabuhan Pascan - Jawa Timur di Provinsi Jawa Timur
33. Pengembangan Pelabuhan Taddan - Jawa Timur di Provinsi Jawa Timur
34. Pengembangan Pelabuhan Branta di Provinsi Jawa Timur
35. Pembangunan Rel KA pengganti darapak Lapindo (25 km) di Provinsi Jawa Timur
36. Pembangunan Bendung Gerak Serahayat di Provinsi Jawa Timur
37. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gandu induk di Provinsi Jawa Timur
38. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi Serpong-Maja-Rangkasbitung panjang 32 km
39. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi lintas Duri-Tangerang 20 km *double track* di Provinsi Banten
40. Penanganan jalan Cilegon- Pasauran (44,34 km) telah mencakup jalan Cilegon - Anyer (JSS) di Provinsi Banten
41. Penanganan Jalan Cikande - Serang - Cilegon (83.2 Km) di Provinsi Banten
42. Pembangunan Bendungan Karian (14,6 m3/det) di Provinsi

Banten

43. Pengembangan IPA Petanu (Tukar Petanu Kab Gianyar, Badung dan Denpasar) - 300 lt/dt di Provinsi Bali
44. Penanganan Jalan Tohpati – Kosamba (11,8 km) di Provinsi Bali
45. Pembangunan dan Pemeliharaan *Underpass* Dewa Ruci di Provinsi Bali
46. Pembangunan *intake* dan jaringan transmisi mata air Guyangan Klungkung - 40 l/s di Provinsi Bali
47. Pembangunan bendungan Pembangunan Waduk Titah, Kabupaten Buleleng (359 liter/metik) di Provinsi Bali
48. Pengembangan IPA Pened 300 lt/dt di Provinsi Bali
49. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Bali

Uraian proyek MP3MI tahun 2013 yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat di setiap provinsi dijabarkan dalam **Lampiran Bab 3**.

Rencana investasi yang akan dilakukan oleh BUMN, Swasta, Pemerintah Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, sebagai berikut:

BUMN

1. Proyek pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan Kalibaru (pembangunan gudang, pembangunan dermaga peti kemas, perkuatan dan Penanganan lapangan penumpukan, perkuatan dan pemasangan Rel Gantry Luffing Crane) di Provinsi DKI Jakarta
2. Pembangunan dermaga Kali Baru Utara (Tahap 1) di Provinsi DKI Jakarta
3. Percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol yang menghubungkan Jakarta dan wilayah pendukungnya (Proyek Jalan Tol Cengkareng - Kunciran) 15,22 km di Provinsi DKI Jakarta
4. Percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol yang

- menghubungkan Jakarta dan wilayah pendukungnya (Proyek Jalan Tol Kunciran Serpong) di Provinsi DKI Jakarta
5. Pembangunan monorail: Green Line (14,7 km) dengan 15 stasiun di Provinsi DKI Jakarta
 6. Pembangunan rel pasaso tanjung priuk 2,3 km dlm rangka Operasionalisasi jalur kereta api Dryport cikarang – Tanjung Priok di Provinsi DKI Jakarta
 7. Pembangunan PLTGU Priok Extension 500 MW di Provinsi DKI Jakarta
 8. Pembangunan PLTGU Priok Extension 243 MW di Provinsi DKI Jakarta
 9. Pembangunan PLTGU Muara Karang Repowering 194 MW di Provinsi DKI Jakarta
 10. Pembangunan terminal LPG Tanjung Priok di Provinsi DKI Jakarta
 11. Pembangunan transmisi di Jakarta sampai dengan 2015 terdapat 405 KM5 (Kilometer sirkuit) di Provinsi DKI Jakarta
 12. Pembangunan PLTG Muara Karang 400 MW di Provinsi DKI Jakarta
 13. Penambahan Armada Kapal Ferry Roro LDF (Long Distance Ferrys) 10 unit untuk mengurangi beban jalan pantura di Provinsi DKI Jakarta
 14. Pembangunan Sepur Simpang stasiun Lemah Abang Jababeka di Provinsi Jawa Barat
 15. Penanganan runway Bandara Husein Sastranegara di Provinsi Jawa Barat
 16. Pengembangan Terminal di Bandara Husein Sastranegara di Provinsi Jawa Barat
 17. pembangunan jalur ganda KA Cirebon - brebes 62 km di Provinsi Jawa Barat
 18. PLTU 2 Jabar – Pelabuhan Ratu (3 x 350 MW) di Provinsi Jawa Barat
 19. PLTU 1 Jabar – Indramayu (3 x 330 MW) di Provinsi Jawa Barat
 20. Pembangunan PLTU Indramayu 990 MW di Provinsi Jawa Barat
 21. Pembangunan PLTS Upper Cisokan Pump Storage 1000 MW

- di Provinsi Jawa Barat
22. Pembangunan PLTGU Muara Tawar Add-On 3,4 700 MW di Provinsi Jawa Barat
 23. Pembangunan transmisi di Jawa Barat sampai dengan 2015 terdapat 2337 KMS di Provinsi Jawa Barat
 24. Pembangunan PLTGU Muara Tawar Add-On 2 350 MW di Provinsi Jawa Barat
 25. Pembangunan PLTGU Muara Tawar Blok 5 231 MW di Provinsi Jawa Barat
 26. Pembangunan PLTGU Muara Tawar Add-On 2 150 MW di Provinsi Jawa Barat
 27. Pengembangan PLTP Kamojang Unit 5 1 x 40 MW di Provinsi Jawa Barat
 28. Pembangunan PLTU Indramayu Baru 1000 MW di Provinsi Jawa Barat
 29. Pembangunan PLTU Jawa Barat Baru 1000 MW di Provinsi Jawa Barat
 30. Pembangunan PLTU Sunyaragi 600 MW di Provinsi Jawa Barat
 31. PLTU1 Jabar - Indramayu di Provinsi Jawa Barat
 32. Pembangunan jalan tol penjagan - pecalang (57,5 km) di Provinsi Jawa Tengah
 33. PLTU 2 Jateng - Adipala (1 x 660 MW) di Provinsi Jawa Tengah
 34. Pembangunan transmisi di Jawa Tengah sampai dengan 2015 terdapat 1764 KMS di Provinsi Jawa Tengah
 35. Pembangunan proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) di Provinsi Jawa Tengah
 36. Pembangunan Matenggeng PS 443 MW di Provinsi Jawa Tengah
 37. Pembangunan Pipa gas Semarang - Gresik di Provinsi Jawa Tengah
 38. Pembangunan PLTU Jawa Tengah Baru 2000 MW di Provinsi Jawa Tengah
 39. Pembangunan Matenggeng PS 443 MW di Provinsi Jawa Tengah
 40. Modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Provinsi

Jawa Tengah

41. Proyek peninggian lapangan penumpukan dan balaman gudang samudra serta pengerukan kolam pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Mas di Provinsi Jawa Tengah
42. Pembangunan galangan kapal di Provinsi Jawa Timur
43. Pengembangan Stasiun Prapat Kurung di Provinsi Jawa Timur
44. PLTU 3 Jatim – Tanjung Awar- Awar (2 x 350 MW) di Provinsi Jawa Timur
45. PLTU 1 Jatim – Pacitan (2 x 315 MW) di Provinsi Jawa Timur
46. Pembangunan transmisi di Provinsi Jawa Timur sampai dengan 2015 terdapat 1147 KMS
47. Pembangunan PLTA Kalikonto 62 MW di Provinsi Jawa Timur
48. Pembangunan PLTA Kesamben 37 MW di Provinsi Jawa Timur
49. Pembangunan PLTGU Tuhan/Cepu 1500 MW di Provinsi Jawa Timur
50. Pembangunan PLTG Grati 800 MW di Provinsi Jawa Timur
51. PLTU Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur
52. Pembangunan PLTU Paiton 660 MW di Provinsi Jawa Timur
53. Pengembangan Dry Port di Surabaya di Provinsi Jawa Timur
54. Pengerukan kolam pelabuhan dan pembangunan terminal peti kemas di Teluk Lamong (Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak) di Provinsi Jawa Timur
55. Pengembangan terminal penumpang Bandara Juanda, Surabaya di Provinsi Jawa Timur
56. Pembangunan PLTU 3 Banten – Lontar (3 x 315 MW) di Provinsi Banten
57. PLTU 1 Banten – Suralaya (1 x 625 MW) di Provinsi Banten
58. Pembangunan transmisi di Provinsi Banten sampai dengan 2015 terdapat 810 KMS
59. Pembangunan PLTU Bojanegara 1.500 MW di Provinsi Banten
60. Pembangunan Terminal 3 dan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta di Provinsi Banten
61. Pembangunan terminal LPG Banten di Provinsi Banten
62. Pembangunan PLTU Bojanegera 750 MW di Provinsi Banten
63. Pengadaan 4 unit kapal penyeberangan 5.000 GT untuk mendukung penyeberangan Merak - Bakaheuni di Provinsi Banten

64. Pengembangan Bandara Ngurah Rai Bakabene di Provinsi Bali
65. Pengembangan gardu induk sanur new di Provinsi Bali
66. Pengembangan gardu induk hali licur/kuhu di Provinsi Bali
67. Pengembangan Transmisi total 786 kms di Provinsi Bali
68. Penanganan *fiber optic coverage* dan di metro regional dan backbone serta penggelaran BIS di Provinsi Bali
69. Pembangunan baru true broadband access

SWASTA

1. Pengelenggaraan jaringan telepon di Provinsi DKI Jakarta
2. Pengembangan Energetic Material Centre di Provinsi Jawa Barat
3. Pengembangan PLTP Kamojang Unit 6 1x60 MW di Provinsi Jawa Barat
4. Pengembangan WKP Karaha 30 MW (223,4 GWII, 393SBM) di Provinsi Jawa Barat
5. Pembangunan PLTU Cirebon 660 MW di Provinsi Jawa Barat
6. Pengembangan PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4 (2x120 MW) di Provinsi Jawa Barat
7. Pembangunan PLTP Patuha 120 MW di Provinsi Jawa Barat
8. Pembangunan PLTA Jatigede 110 MW di Provinsi Jawa Barat
9. Pembangunan PLTP Darajat 55 MW di Provinsi Jawa Barat
10. Pembangunan PLTGU Bekasi Power 130 MW di Provinsi Jawa Barat
11. Pembangunan PLTP Salak 40 MW di Provinsi Jawa Barat
12. Pembangunan PLTGU Cikarang Listrindo 100 MW di Provinsi Jawa Barat
13. Pembangunan PLTA Rajamandala 47 MW di Provinsi Jawa Barat
14. Pembangunan PLTGU Cikarang Listrindo 50 MW di Provinsi Jawa Barat
15. Pembangunan transmisi di Jawa Barat sampai dengan 2015 terdapat 435 KMS di Provinsi Jawa Barat
16. Pembangunan PLTP Tangkuban Perahu 1110 MW di Provinsi Jawa Barat
17. Pembangunan PLTP Karaha Bodas 110 MW di Provinsi Jawa Barat

18. Pembangunan PLTP Tampomas 45 MW di Provinsi Jawa Barat
19. Pembangunan PLTP Cibuni 10 MW di Provinsi Jawa Barat
20. Pembangunan PLTP Tangkuban Perahu 2.30 MW di Provinsi Jawa Barat
21. Pembangunan PLTP Patuha 60 MW di Provinsi Jawa Barat
22. Pembangunan PLTP Dieng 60 MW di Provinsi Jawa Barat
23. Pembangunan PLTP Cisolok - Cisukarame 55 MW di Provinsi Jawa Barat
24. Pembangunan PLTP Papandayan 55 MW di Provinsi Jawa Barat
25. Pembangunan PLTP Batukrawang 55 MW di Provinsi Jawa Barat
26. Pembangunan PLTP Papandayan 55 MW di Provinsi Jawa Barat
27. Pembangunan PLTP Wayang Windu 50 MW di Provinsi Jawa Barat
28. Pembangunan PLTP Citaman - Karang 10 MW di Provinsi Jawa Barat
29. Penyelenggaraan jaringan telepon di Provinsi Jawa Barat
30. Pembangunan Citarum Water Management Program di Provinsi Jawa Barat
31. Pembangunan KPS Air Minum Kebumen di Provinsi Jawa Tengah
32. Pembangunan PLTU Jawa Tengah (Infrastruktur) 1000 MW di Provinsi Jawa Tengah
33. Pembangunan PLTU Jawa Tengah (Infrastruktur) 1000 MW di Provinsi Jawa Tengah
34. Pembangunan PLTP Dieng 55 MW di Provinsi Jawa Tengah
35. Pembangunan transmisi di Jawa Tengah sampai dengan 2015 terdapat 1704 KMS di Provinsi Jawa Tengah
36. Pembangunan PLTP Ungaran 55 MW di Provinsi Jawa Tengah
37. Pembangunan PLTP Baturaden 220 MW di Provinsi Jawa Tengah
38. Pembangunan PLTP Guci 55 MW di Provinsi Jawa Tengah
39. Pembangunan PLTP Ungaran 30 MW di Provinsi Jawa Tengah
40. Pembangunan PLTP Ungaran 55 MW di Provinsi Jawa Tengah
41. Pembangunan PLTP Guci 55 MW di Provinsi Jawa Tengah
42. Pembangunan PLTP Dieng 55 MW di Provinsi Jawa Tengah

43. Pembangunan PLTP Mangunan 30 MW di Provinsi Jawa Tengah
44. Penyediaan SPAM kota Semarang Barat (1.050 l/s) di Provinsi Jawa Tengah
45. Pembangunan PLTP Arjuno 55 MW di Provinsi Jawa Timur
46. Pembangunan PLTU Paiton 3-4 Exp 815 MW di Provinsi Jawa Timur
47. Pembangunan PLTP Wilis/Ngebel 55 MW di Provinsi Jawa Timur
48. Pembangunan transmisi di Jawa Timur sampai dengan 2015 terdapat 40 KMS
49. Pembangunan PLTU Madura (2x200 MW) (2 x 200 MW) (4.580 M) di Provinsi Jawa Timur
50. Pembangunan PLTP Ijen 110 MW di Provinsi Jawa Timur
51. Pembangunan PLTP Wilis/Ngebel 110 MW di Provinsi Jawa Timur
52. Pembangunan PLTP Iyang Argopuro 110 MW di Provinsi Jawa Timur
53. Pembangunan Arjuno PLTP 55 di Provinsi Jawa Timur
54. Pembangunan PLTP Iyang Argopuro 110 MW (3490 M) di Provinsi Jawa Timur
55. Penyelenggaraan jaringan telepon di Provinsi Jawa Timur
56. Pelabuhan Tanjung Perak di Provinsi Jawa Timur
57. Pengembangan PLTP 1x110 MW di Pandeglang di Provinsi Banten
58. Pembangunan PLTU Banten 660 MW di Provinsi Banten
59. Pembangunan PLTP Rawa Dane 110 MW di Provinsi Banten
60. penyediaan SPAM kabupaten Tanggerang (900l/s)(IPA sepatan+ pipa transmisi)Penyediaan SPAM Kabupaten Tangerang (900 l/s)-konsensi di Provinsi Banten
61. Pembangunan terminal LPG Banten dengan kapasitas 1.000.000 ton /tahun di Provinsi Banten
62. Pembangunan KPS Air Minum Kabupaten Lebak di Provinsi Banten
63. Penyediaan SPAM Kabupaten Tangerang (900 l/s) di Provinsi Banten
64. PLTU Bali Timur 200MW di Provinsi Bali

65. PLTU Celukan Bawang 130 MW di Provinsi Bali
66. Peningkatan Transmisi total 40 kms di Provinsi Bali
67. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik di Kab. Badung, Bali di Provinsi Bali
68. PLTU Celukan Bawang 250 MW di Provinsi Bali
69. Pembangunan Bandara Bali Utara, Buleleng di Provinsi Bali

APRD

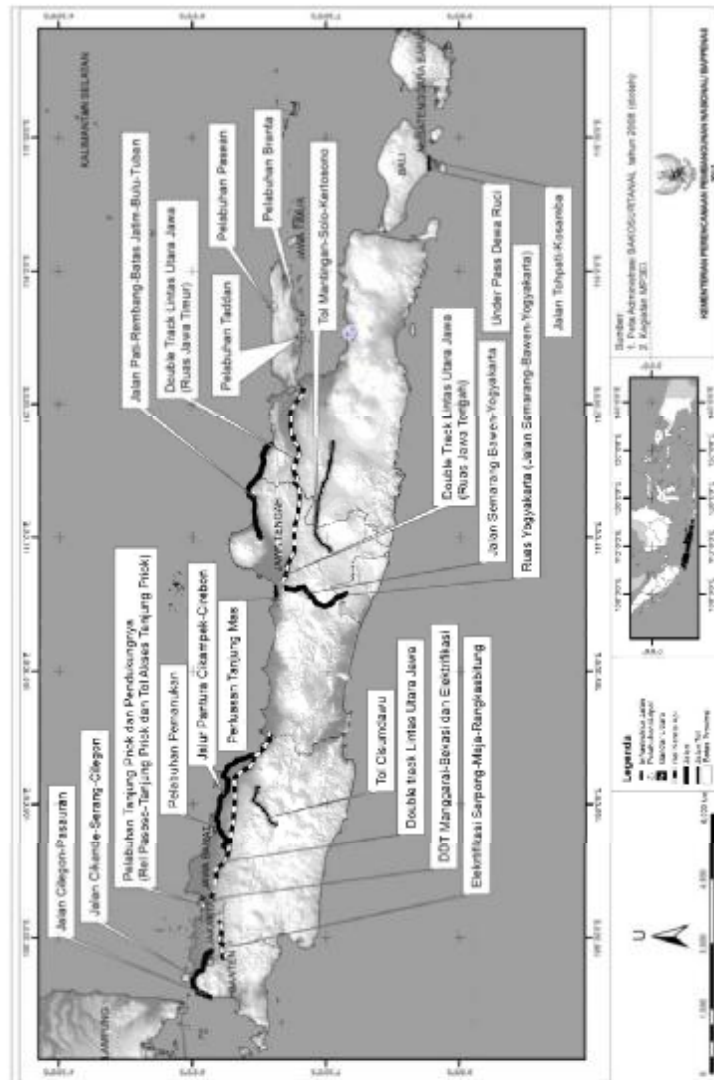
1. Pembangunan jalan menuju kawasan sepanjang 5 km (Pengembangan destinasi Surahaya - Madura dskt)

KPS

1. Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta (Jalan tol kemayoran -Kp.Melayu jalan tol Sunter-Kawa Biaya-Batu Ceper jalan tol Pasar Minggu- Casablanca jalan tol Sunter-Pulo Gebang- Tambelang jalan tol Ulujami-Tanah Abang jalan tol Duri Pulo di Provinsi DKI Jakarta
2. Pembangunan MRT East-West di Provinsi DKI Jakarta
3. Pembangunan MRT North-South Tahap I dan II di Provinsi DKI Jakarta
4. Pembangunan Fisik Jalan Bebas Hambatan Akses Tanjung Priok (E2, E2 A, dan NS) dan Akses Dry Port Cikarang di Provinsi DKI Jakarta
5. Pembangunan Bandara Kertajati di Provinsi Jawa Barat Penyediaan SPAM Jakarta, Bekasi, dan Karawang (Kanal Tarum Barat 5.000 l/s)- BOT di Provinsi Jawa Barat
6. Penyediaan SPAM Kota Bekasi (300 l/s)-Konsesi di Provinsi Jawa Barat
7. Penyediaan SPAM Regional Jatigede (6.000 l/s)-BOT di Provinsi Jawa Barat
8. Penyediaan SPAM Kabupaten Bekasi (450 l/s)-Konsesi di Provinsi Jawa Barat
9. Pembangunan konstruksi pelabuhan Cilamaya di Provinsi Jawa Barat
10. Pembangunan jalan Tol Bekasi-Cawang-Kp. Melayu 21,04 km di Provinsi Jawa Barat
11. Pembangunan Jalan Cimanggis-Cibitung 25,39 km
12. Pembangunan jalan tol Bandung (Pasir Koja- Soreang) 10,57 km di Provinsi Jawa Barat

13. Pemhangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi di Provinsi Jawa Barat
14. Pemhangunan tol terusan Pasteur - Ujung Berung - Cileunyi di Provinsi Jawa Barat
15. Pemhangunan IPA Jatiluhur (5.000 l/s) untuk Jakarta, Bekasi, dan Karawang 5.000 l/s)-BOT di Provinsi Jawa Barat
16. Pemhangunan jalan Tol Trans Jawa (Cikopo - Palimanan, Pejangan- Pematang, Pematang- Batang, Batang- Semarang, Semarang- Solo (Semarang-Bawen, Bawen-Solo), Solo-Mantingan, Mantingan- Kertosono, Kertosono- Mojokerto, Mojokerto- Surabaya 619 km di Provinsi Jawa Tengah
17. Pembangunan jalan tol Semarang-Ungaran (Seksi I) Ungaran-Bawen-Solo (Seksi II-V) total 72 km di Provinsi Jawa Tengah
18. Pemhangunan Jalan Bebas Hambatan Solo – Kertosono di Provinsi Jawa Tengah
19. Pemhangunan bandara internasional di Provinsi DI Yogyakarta dalam rangka mendukung pengembangan destinasi Borobudur-Yogya dan sekitarnya
20. Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo 45,32 Km di Provinsi Jawa Timur
21. Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi 215 Km di Provinsi Jawa Timur
22. Pemhangunan Jalan Tol Pandaan - Malang di Provinsi Jawa Timur
23. Pembangunan Jalan Waru - Wonorejo - Tj.Perak - 18,6 km di Provinsi Jawa Timur
24. Pembangunan Jalan Tol Gempol - Pandaan 13,61 km di Provinsi Jawa Timur
25. Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo di Provinsi Jawa Timur
26. Pemhangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi (178 Km) di Provinsi Jawa Timur
27. Jalan Tol Gempol - Pasuruan 32 Km di Provinsi Jawa Timur
28. Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai- Benoa - 7,5 km di Provinsi Bali

GAMBAR 3.1
PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBLAYAI
TAHUN 2013 DI WILAYAH JAWA-BALI



LAMPIRAN BAB 3. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Pulau Jawa-Bali tahun 2013

A. PROVINSI DKI JAKARTA

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2013

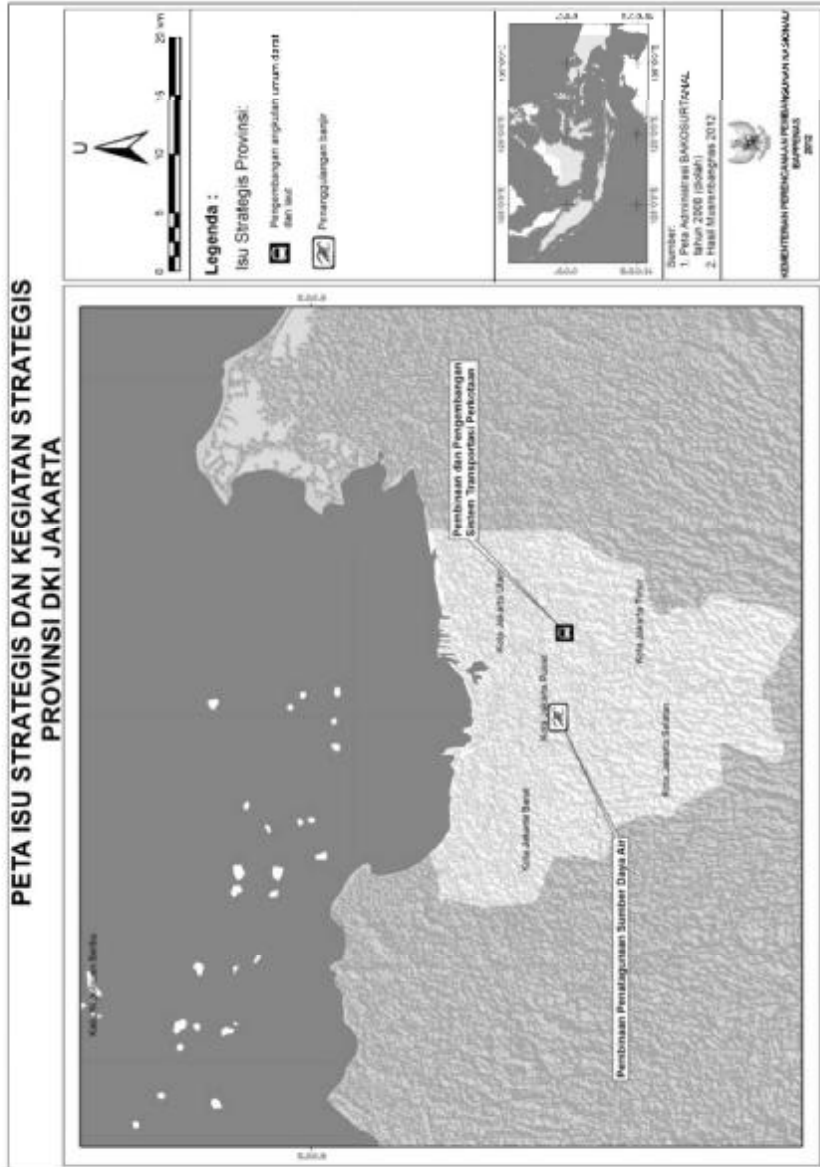
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Pengembangan angkutan umum darat dan laut (peningkatan layanan angkutan laut dari/ke Kepulauan Seribu)				
	<i>Kegiatan Strategis : Penambahan armada Busway</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Jumlah Paket Pengembangan Bus Rapid Transit (Brt), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan	10 unit	16.000,00
	Kegiatan Strategis : Pengadaan kapal angkutan dari/ke Kepulauan Seribu				
2	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Jumlah Unit		0
	Isu Strategis : Penanggulangan banjir				
	<i>Kegiatan Strategis : Normalisasi sungai Ciliwung</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai	Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi		0	

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
Kegiatan Strategis : Penataan waduk Marunda					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah buah waduk yang direhabilitasi		0
Kegiatan Strategis : Penataan waduk Sunter Hulu					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah buah waduk yang direhabilitasi		0
Kegiatan Strategis : Penataan waduk Brigif/Kali Krukut Matoa					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah buah waduk yang direhabilitasi		0
Kegiatan Strategis : Kerjasama dengan daerah hulu untuk pemeliharaan hutan, waduk/situ					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air	Rapat Koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultansi	12 bulan	600,00
3	Isu Strategis : Penambahan air baku				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
Kegiatan Strategis : penambahan air baku dari Jatiluhur					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan		0

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2013

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Proyek Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok (<i>Urgent Rehabilitatif</i>)	Kementerian Perhubungan	350
2	Pembangunan tol akses Tanjung Priok sepanjang (17 km)	Kementerian PU	552,36
3	Pemanfaatan Kanal Banjir Timur sebagai <i>green infrastructure</i> sepanjang (23,5 km)	Kementerian PU	1,07
4	Rehabilitasi Saluran Tarun Kanal Barat	Kementerian PU	205,09
5	Penanganan banjir DKI Jakarta (Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter)	Kementerian PU	1.366,78
6	Pembangunan rel Pasaso-Tanjung Priok (2,3 km <i>track</i>)	Kementerian Perhubungan	20
7	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	307,948



R. PROVINSI JAWA BARAT

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah secara merata serta percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategi, ketahanan energi dan diversifikasi sumber energi serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi bencana Kegiatan Strategis : Pembangunan jalan bebas hambatan Cirebon-Sumedang-Dawuan (Kertajati), BIUTR (Bandung Intra Urban Toll Road) Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Jumlah jalan bebas hambatan yang dibangun	4 Km	480.000,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Sarana Transportasi : Pembangunan Jalur KA Cicurug - Sukabumi, Pembangunan jalur KA Stasiun Cirebon - Patabuhan (melalui Cangkring), Pembangunan fasilitas stsl udara Bandara Kertajati Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Kereta Api	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kereta Api	Peningkatan jalan KA Lintas Bogor - Cicurug	28 km	40.000,00
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara				50.000,00
Kegiatan Strategis : Pembebasan lahan untuk relokasi penduduk pembangunan Waduk Jatigede, Penanganan terpadu WS Citarum, Pembebasan lahan Waduk Sadawarna Kab. Subang, Penanganan Banjir WS Citanduy melalui Rehabilitasi alur sungai Ciseel, Pengendali dasar Sungai Ciliwung, Hilir Bendung Katumpala, Kota Bogor Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	1660 Ha dengan prioritas lokasi: DI	78.790,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
2		Jaringan Pengairan Lainnya		Leuwigoong	
	Isu Strategis : Aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat				
	Kegiatan Strategis : Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Jumlah Puskesmas yang Menyerikan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin Di Puskesmas	seluruh Puskesmas	145.046,40
	Kegiatan Strategis : Puskesmas Mampu PONED (200 PONED)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned	150	2.538,30
	Kegiatan Strategis : Pembangunan ruang rawat inap untuk keluarga miskin Jawa Barat di 5 wilayah				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Persentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas	75,4	715.673,50
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Sakit Garut Selatan dan Indramayu				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TI kelas II-III)	2	122.228,10
3	Isu Strategis : Pengelolaan dan ketahanan pangan masyarakat				
<i>Kegiatan Strategis : Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, serta revitalisasi embung/situ</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengerihangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Peranian	Jumlah (Ila.) Optimasi Jaringan Tersier (JITUT, JDES dan Pengembangan TAX)	25490 ha	28.760,00
<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan jaringan irigasi Tambak</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan jaringan irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan		83.000,00
<i>Kegiatan Strategis : Subsidi benih dan regulasi</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan	12900	67.211,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Berkelanjutan:		yang Tepat : Tersusunnya Kebijakan Sistem Subsidi Jenis (Paket)		
Kegiatan Strategis : Pengembangan SDM pertanian (penyuluh, POPT)					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Revitalisasi Pendidikan Pertanian Serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	Jumlah jenis profesi sdm pertanian yang terstandarisasi dan tersertifikasi	37600	156.000,00
4	Isu Strategis : Aksesibilitas, peningkatan mutu pendidikan dan tata kelola sekolah				
Kegiatan Strategis : Penyelenggaraan SMP (1000 RKB) di Kabupaten/Kota Jawa Barat					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Perjamian Kepasian Layanan Pendidikan SMP	RAS.0 RUANG KELAS - SISWA JENJANG SMP	90	12.600,0
Kegiatan Strategis : Penyelenggaraan SMA (1000) RKB di Kabupaten/Kota Jawa Barat					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Persediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Persentase Siswa Sekolah Menengah Berasal Dari SMA	21 US3, 300 RKB	95.100,0
Kegiatan Strategis : Penyelenggaraan SMK (1000) RKB di Kabupaten/Kota Jawa Barat					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					

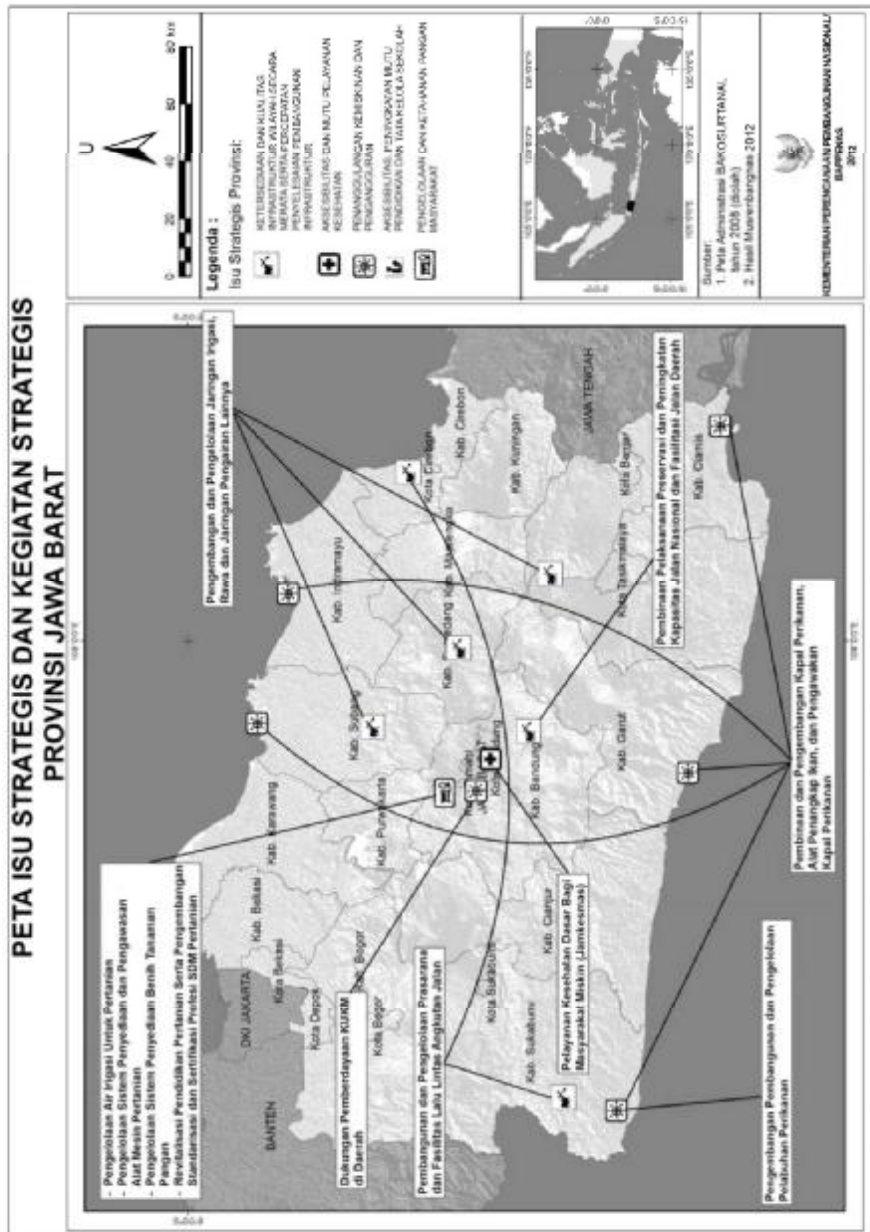
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pendidikan Ketenagala	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Jumlah RK3-SMK	421 RK3	86.305,0
5	Isu Strategis : Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran				
<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan fasilitas pokok PPI Cisolak Kabupaten Sukabumi</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Perikanan	Jumlah lanjutan pemangunan pelabuhan HPP Daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial	1	5.000,00
<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan breakwater dan fasilitas pokok PPI Cikidang (Ciamis)</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Perikanan	Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi)		0
<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan kapal di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indragayuh, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Garut (6 unit)</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	Jumlah pengadaan kapal perikanan > 30 GT yang terbangun (unit)	7	10.500,00
<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan kelembagaan KUMKM melalui pendukung sarana dan prasarana Jabar Cyber Koperasi Paviliun KUMKM</i>					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
Prioritas Nasional : Non Prioritas (Dana Desentralisasi)					
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH					
	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah	Terfasilitasinya dukungan pemberdayaan koperasi dan UKM di daerah		6.706,00
<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan rumah untuk relokasi bendungan Jatigoda</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesejahteraan Rakyat					
	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				175.000,00

Matriks Proyek MP3EI Tahun 2013

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Pembangunan Waduk Sentosa (1.400 l/s)	Kementerian PU	0,6
2	Transfer air baku Cibatarua, Cilaki, dan Gisangkuy (800 l/s)	Kementerian PU	16,67
3	Pembangunan Pelabuhan Pemanukan	Kementerian Perhubungan	30
4	Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	Kementerian PU	480
5	Pembangunan DDT Manggarai-Bekasi dan Elektrifikasi Cikarang*	Kementerian Perhubungan	102,3
6	Penanganan Jalan Pantura Cikampek - Cirebon (166,1 Km.)	Kementerian PU	200,46
7	Pembangunan Bendungan Jatigede	Kementerian PU	1.063,65
8	Pembangunan elektrifikasi Citayam-Nambo (16 Km' sp) dan fasilitas pendukung prasarana	Kementerian Perhubungan	49
9	Persiapan pembangunan sisi udara Bandara Kertajati	Kementerian Perhubungan	50
10	Penanganan banjir Sungai Citarum	Kementerian PU	689,97
11	Pembangunan double track lintas utara Jawa (Lokasi ruas di Provinsi Jawa Barat)	Kementerian Perhubungan	552,03
12	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	297,971

*Kegiatan lintas provinsi



C. PROVINSI JAWA TENGAH

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp.Juta)
1	Isu Strategis : Mempertahankan stabilitas produksi pangan untuk keberlanjutan ketahanan pangan				
<i>Kegiatan Strategis : Mekanisasi pertanian melalui perkerjasama Ashtan</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Jumlah (Unit) Bantuan Kepemilikan Ashtan (HAKA) Pompa Air	50 unit	500,00
<i>Kegiatan Strategis : Mekanisasi pertanian melalui perkerjasama Ashtan</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Jumlah (Unit) Bantuan Kepemilikan Ashtan (HAKA) Cudivator	15	1.240,00
<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan		50.000,00
<i>Kegiatan Strategis : Pengelolaan air irigasi untuk pertanian.</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jumlah (Ha) Optimasi Jaringan Tersier (JITUT, JIDES dan	68500 Ha	68.500,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran Pengerahangan TAM]	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
2	Isu Strategis : Pemerataan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan <i>Kegiatan Strategis : Bantuan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik (Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik S1/D4</i>				
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan dan Pendidik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar	Persentase Guru SD/SDLB Dalam Jabatan Berkualifikasi Akademik S-1/D-4	27087	81.513,00
3	Isu Strategis : Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah <i>Kegiatan Strategis : Penanganan pelabuhan penyebrangan Kendal</i>				
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalu Lintas SDP	Pembangunan jalan akses sepanjang 4 km ke Pelabuhan Penyeberangan Kendal	1 paket	11.500,00
<i>Kegiatan Strategis : Pengembangan Bandara A Yani Semarang</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Lanjutan pembangunan apron, taxiway, dan runway Bandara A Yani	1 paket	194.800,00
<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih (SPAM Regional Bregas)</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					

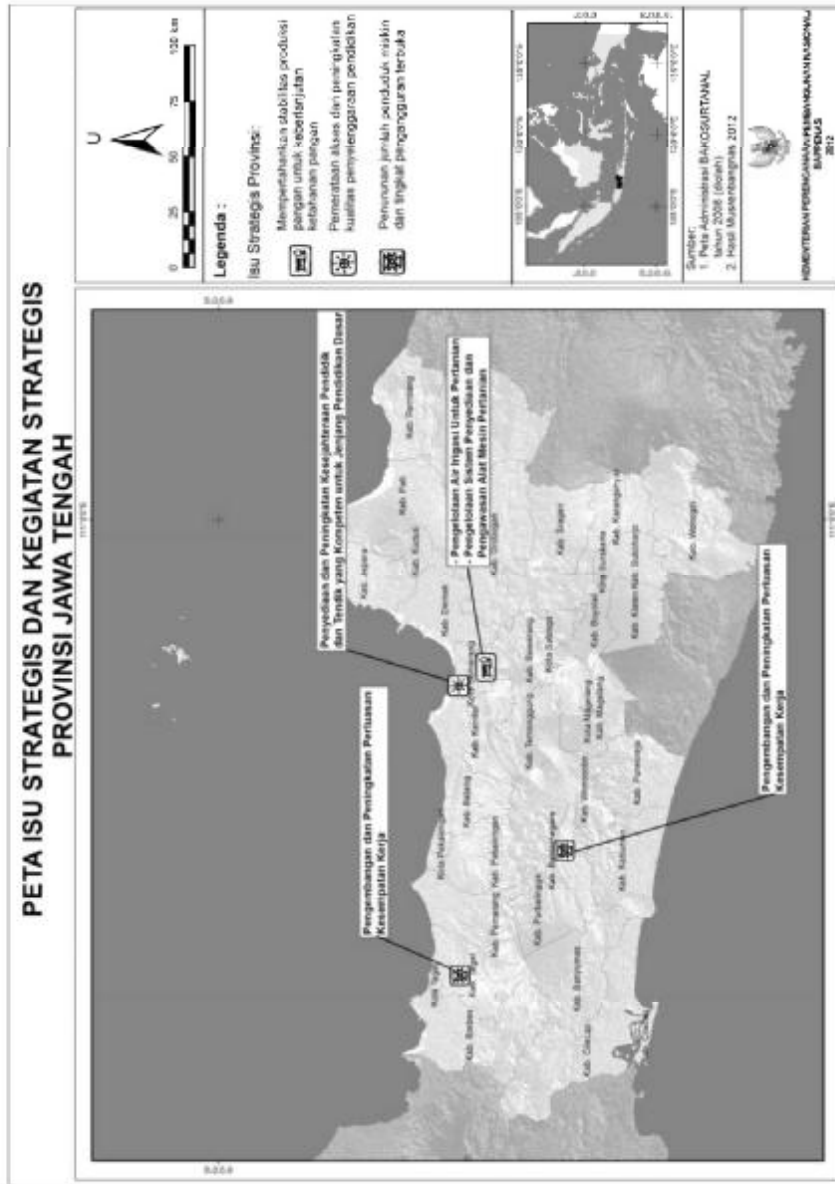
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp./Juta)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah kawasan regional lintas kabupaten/kota yang terlayani infrastruktur air minum	1 regional Brogas (Brebes, Tegal, Slawi)	61.500,00
4	Isu Strategis : Penurunan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terhulu.				
Kegiatan Strategis : Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Kab./Kota yang melaksanakan sinergi program APJN untuk perluasan kesempatan kerja melalui terapan teknologi tepat guna	35 Kab./Kota	2.670,00
Kegiatan Strategis : Penyaturan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN SOSIAL					
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)	Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH	459.443 RTSM	350.756,00
Kegiatan Strategis : Penempatan dan perluasan kesempatan kerja.					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	(a) Jumlah Penganggur yang Memperoleh Pekerjaan Sementara; (b) jumlah kab/kota	136 paket di 35 kab/kota	36.080,20

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran yang menyenggarakan program pengurangan pengangguran sementara	Target Fisik	Dana (Rp.Juta)
----	---------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	----------------

Matriks Proyek MP3EI Tahun 2013

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Pembangunan bendungan Jati Barang (1.050 l/s)	Kementerian PU	162,05
2	Pembangunan Jalan Bohas Hambatan Solo - Kertosono*	Kementerian PU	500,8
3	Penanganan Jalan Lasari - Pejagan - Pemalang - Pekalongan	Kementerian PU	131,68
4	Pembangunan dan pemeliharaan <i>Fly Over</i> Kali Banteng (Menuju Pelabuhan Tanjung Emas)	Kementerian PU	45
5	Penanganan Jalan Semarang - Bawen - Yogyakarta (106,3 Km)*	Kementerian PU	225,07
6	Pembangunan Jalan Pati - Rembang - Batas Jatim*	Kementerian PU	83,98
7	Pembangunan double track lintas utara Jawa (Lokasi ruas di Provinsi Jawa Tengah)	Kementerian Perhubungan	3.784,80
8	Perluasan Pelabuhan Tanjung Mas kearah Kendal (pembangunan dermaga peti kemas)	Kementerian Perhubungan	20

*Kegiatan lintas provinsi



D. PROVINSI DI YOGYAKARTA

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

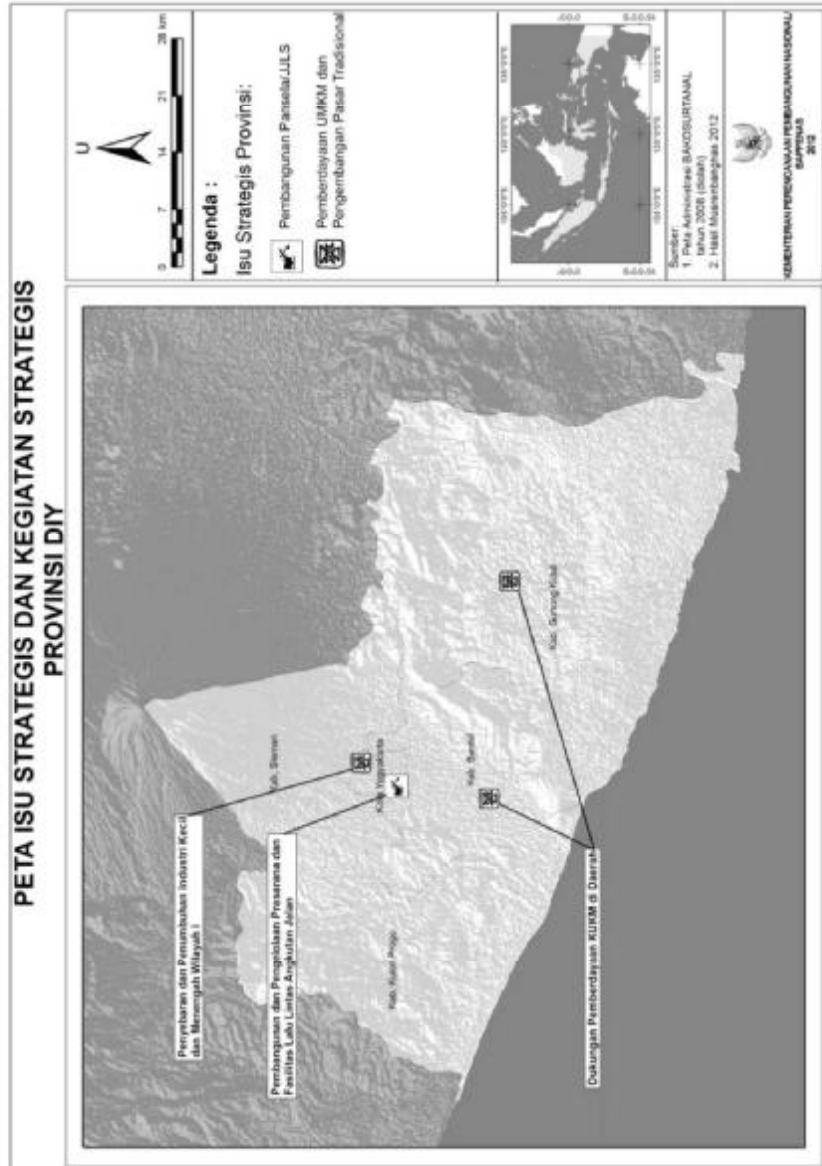
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp.Juta)
1	Isu Strategis : Pengembangan Kawasan Baron, Sadeng, termasuk Baron Technopark				
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Pelabuhan Sadeng				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan UPT Daerah untuk mendukung minapolitan		0
2	Isu Strategis : Pembangunan Pansela/JJLS				
	Kegiatan Strategis : Penyediaan Perlengkapan Jalan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Fasilitas Keselamatan Laj		5.500,00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan (Kulon Progo dan Gunung Kidul)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan				40.000,00
	Kegiatan Strategis : Pengamanan Pantai Gelagah				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp.Juta)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengaman Pantai	Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun		30.000,00
3	Isu Strategis : Penataan Kawasan Cagar Budaya Kotagede				
	Kegiatan Strategis : Pengelolaan Sistem Transportasi Kawasan Kotagede				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Jumlah Paket Rencana Induk Angkutan Perkotaan, Rencana Induk Sistem Informasi Lalu Lintas Perkotaan, Laporan Evaluasi, Terselenggaranya Atcs, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan,		0
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni		1.500,00
4	Isu Strategis : Pemberdayaan UMKM dan Pengembangan Pasar Tradisional				
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Kualitas Produksi UMKM				
	Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni		1.500,00
	Kegiatan Strategis : Penguatan Modal UMKM				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp.Juta)
Prioritas Nasional : Non Prioritas (Dana Dekonsentrasi)					
KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH					
	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah	Terfasilitasinya dukungan pemberdayaan koperasi dan UKM di daerah		5.026,00
Kegiatan Strategis : Pengerukan PPI Glagah					
Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap				30.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Pasar Percontohan					
Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha					
KEMENTERIAN PERDAGANGAN					
	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Percontohan yang dibangun	1	15.000,00 ¹⁾

Catatan:

- ¹⁾ Angka ini merupakan usulan yang masih akan melalui proses seleksi sesuai dengan mekanisme pengajuan dan penetapan pasar percontohan berdasar proposal daerah oleh Kementerian Perdagangan.



E. PROVINSI JAWA TIMUR

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
1	Isu Strategis : Peningkatan pelayanan kesehatan				
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)	5	817.612,40
2	Isu Strategis : Pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kawasan dan Program MP3EI				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Fly Over Peterongan, Fly Over Kertosono, Fly Over Kayen dan Fly Over Puspa Agro				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Jumlah flyover/ underpass yang dibangun		100.000,00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Socah				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg dibangun baru		10.000,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Pantai Selatan Jatim					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan				85.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan double track KA Lintas Surabaya-Bojonegoro, Surabaya-Mojokerto, Surabaya-Malang, Surabaya-Probolinggo, Surabaya-Madiun, pembangunan jalan KA Lintas Gubeng-Bandara Juanda, pembangunan KA komuter lintas Lawang-Malang-Kepanjen					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	Pembangunan jalur ganda KA lintas Bojonegoro - Surabaya	103 km	1.230.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Faspel Pacitan					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut				30.000,00
3	Isu Strategis : Peningkatan produktivitas padi dan penyediaan air baku				
Kegiatan Strategis : Pembangunan Waduk : 1. Studi Potensi Kalimati dan Bangil Tak ; 2. Pembangunan Waduk Bendo; 3. Pembangunan Waduk Tugu; 4. Pembangunan Waduk Gonseng; 5. Pembangunan Waduk Tukul					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah buah waduk yang dibangun	5 buah dengan prioritas lokasi: i) Bendo, ii) Tugu-Madiun, iii) Gongse ng, iv) Tugu-Trenggalek, v) Tukul	199.540,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak					
Prioritas Bidang : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan		25.000,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Desa (JITUT/JIDES)					
Prioritas Bidang : Bidang Sda dan Lingkungan Hidup					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jumlah (Ha) Optimasi Jaringan Tersier (JITUT, JIDES dan Pengembangan TAM)	53	2.805,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi , Produktifitas Pertanian Tanaman Pangan (Padi)					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Tersalurkannya Bantuan Langsung Benih Unggul (Blbu) untuk Kawasan Slptt dan Non Slptt : Benih Padi Hibrida (Ton)		0
Kegiatan Strategis : Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan (P2KP)					
Prioritas Bidang : Bidang Sda dan Lingkungan Hidup					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Penanganan Kegiatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Sumberdaya Lokal (Prop/Kab/Kota)	504	1.857,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan (stok pangan 6 juta ton) : 1. SID dan DD Pemanfaatan Air Baku Bojonegoro Barrage; 2. Pembuatan Jabung Ring Dike (2 Paket); 3. Pengembangan DI. Bengawan Jero; 4. Perbaikan Waduk Gonggang; 5. OP Waduk Gonggang; 6. Review DD Waduk Gonggang; 7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pondok Waluh Sekunder; 8.Peningkatan Jaringan Irigasi Peterongan (lanjutan tahap 1) (Mrican kanan); 9. SID Peningkatan JI Rawa Paras 670 Ha; 10. Pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (tersebar)					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	4.405 ha dengan prioritas lokasi: i) D.I Peteron	137.270,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
				gan, ii) D.I Bengawan Jero, dan iii) D.I Nipah.	
4	Isu Strategis : Penurunan jumlah pengangguran				
	Kegiatan Strategis : Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja : 1. Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Kelembagaan; 2. Pemagangan; 3. Pengadaan 2 (dua) unit Ambulance TKI				
	Prioritas Bidang : Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama				
	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas	Jumlah lembaga pelatihan yang ditingkatkan kualitasnya	14 BLK	30.000,00 (alokasi bergantung pada telaah kebutuhan)
	Kegiatan Strategis : Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja				
	Prioritas Bidang : Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama				
	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	(a) Jumlah Penganggur yang Memperoleh Pekerjaan Sementara; (b) jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara	101 paket di 31 Kab/ Kota	26.204,48
	Kegiatan Strategis : Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja				
	Prioritas Bidang : Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama				
	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik dari BPTA	2.010 anak	13.100,00

Matriks Proyek MP3EI Tahun 2013

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Penanganan jalan Bulu - Tahun	Kementerian PU	160,80
2	Penanganan jalan Pasuruan - Probolinggo - Banyuwangi	Kementerian PU	54,04
3	Pembangunan jalan tol Pandaan - Malang (Pembahasan Lahan)	Kementerian PU	78,00
4	Pengembangan Adpel Probolinggo	Kementerian Perhubungan	5
5	Pengembangan Pelabuhan Pascan - Jawa Timur	Kementerian Perhubungan	5
6	Pengembangan Pelabuhan Taddan - Jawa Timur	Kementerian Perhubungan	5
7	Pengembangan Pelabuhan Branta	Kementerian Perhubungan	5
8	Pembangunan Rel KA pengganti dampak Lapindo (25 km)	Kementerian Perhubungan	15
9	Pembangunan Rembang Gerak Sembayat	Kementerian PU	199,5
10	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	111,400

F. PROVINSI BANTEN

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Peningkatan Investasi dan Unggulan Daerah				
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Kawasan Minapolitan Terpadu				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil	Jumlah lokasi pembinaan dan pengelolaan usaha mendukung minapolitan (Jokasi)		247,00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Pusat Kebudayan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat				
	KEMENTERIAN PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Alam, Bahari dan Budaya	1 Pasar Informasi	1.000,00
	Kegiatan Strategis : Revitalisasi Pasar Tradisional				
	Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha				
	KEMENTERIAN PERDAGANGAN				
	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Pemerintah yang dibangun	1	15.000,00 ²⁾
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Kluster Industri				
	Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha				
	KEMENTERIAN PERDAGANGAN				
	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah	(i) Meningkatnya koordinasi dan pembinaan fasilitas perdagangan luar negeri daerah; (ii) Layanan		1.150,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
			fasilitasi perdagangan luar negeri daerah; (iii) fasilitasi promosi dan diklat ekspor; (iv) Tersedianya informasi produk potensial daerah		
Kegiatan Strategis : Revitalisasi Pasar Tradisional					
Prioritas Nasional : Prioritas Lalin Investasi dan Iklim Usaha					
KEMENTERIAN PERDAGANGAN					
	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	(i) Tersedianya data dan informasi perdagangan dalam negeri; (ii) Asiliasi Penasaran Produk Unggulan Daerah; (iii) Penyelenggaraan Pasar Murah; (iv) Pengembangan UKM Potensial Waralaba Daerah; (v) Pemberdayaan Pertindungan Konsumen; (vi) Pengawasan Kemetrologia n; (vii) Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; (viii) Pelaksanaan	1	1.323,49

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
2	Isu Strategis : Pembangunan Infrastruktur Wilayah/Kawasan, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan Strategis : Pembangunan Terminal				
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan		0
Kegiatan Strategis : Pembangunan Jaringan Air Baku dan Irigasi Mendukung Ketahanan Pangan					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan	0,44 m ³ /s dengan prioritas lokasi: (i) Bendung Karet Citawing ; (ii) Bendung Tetap Pasaura n	11.700,00
Kegiatan Strategis : Penanganan Jalan mendukung KEK Tanjung Lesung Ruas Sp. Labuhan-Cibaliung					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan			Ruas Sp. Labuhan-Cibaliung (50,9Km)	20.000,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Pembangunan Bendungan Sidangheula					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan		7.000,00
3	Isu Strategis : Peningkatan ketahanan pangan, serta pengurangan kemiskinan dan pengangguran				
Kegiatan Strategis : Pengembangan Balai Latihan Kerja di Tujuh Kabupaten/Kota (mendukung MP3EI)					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pembedayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas	Jumlah BLK yang Ditingkatkan Kualitasnya	3 BLK	4.300,00
Kegiatan Strategis : Fasilitasi Sarana/Prasarana Pusat Informasi Pasar Tenaga Kerja (mendukung MP3EI)					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja	Jumlah Bursa Kerja yang Memenuhi Standar Pelayanan Umum	1 paket di Disnaker Provinsi Banten	300,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan Kewirausahaan Pemuda					
Prioritas Nasional : Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat					
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA					
	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Sebagai Kader Kewirausahaan,	30 Orang	234,00
Kegiatan Strategis : pengembangan Sapi dan Kerbau Dalam Mendukung Swasembada					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Daging				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kelangkaan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peringatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.	Peringkatan Produksi Ternak Daging Peralayanan Sumber Daya Lokal	Pengembangan Sapi Perca (Insitit Baru Berdasar Blue Print)	22	4.490,00
4	Isi Strategis : Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inovasi Teknologi				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Politeknik Universitas Negeri Sultan Agung Tirtayasa (mendukung MP3EI) ¹⁾				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Tinggi	Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik	Produktivitas yang terakreditasi minimal B		0
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Unit Sekolah Baru-SMK dan Penambahan Ruang Kelas Baru SMK di Provinsi Banten (mendukung MP3EI)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peringkatan Layanan Pendidikar SMK	APK SMK		0
	Kegiatan Strategis : Penambahan Ruang Kelas baru SMA/MA ²⁾				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peringkatan Layanan Pendidikar SMA	Propinsi Ber-APK > 37,79%		0
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin Di Puskesmas	226	39.453,40

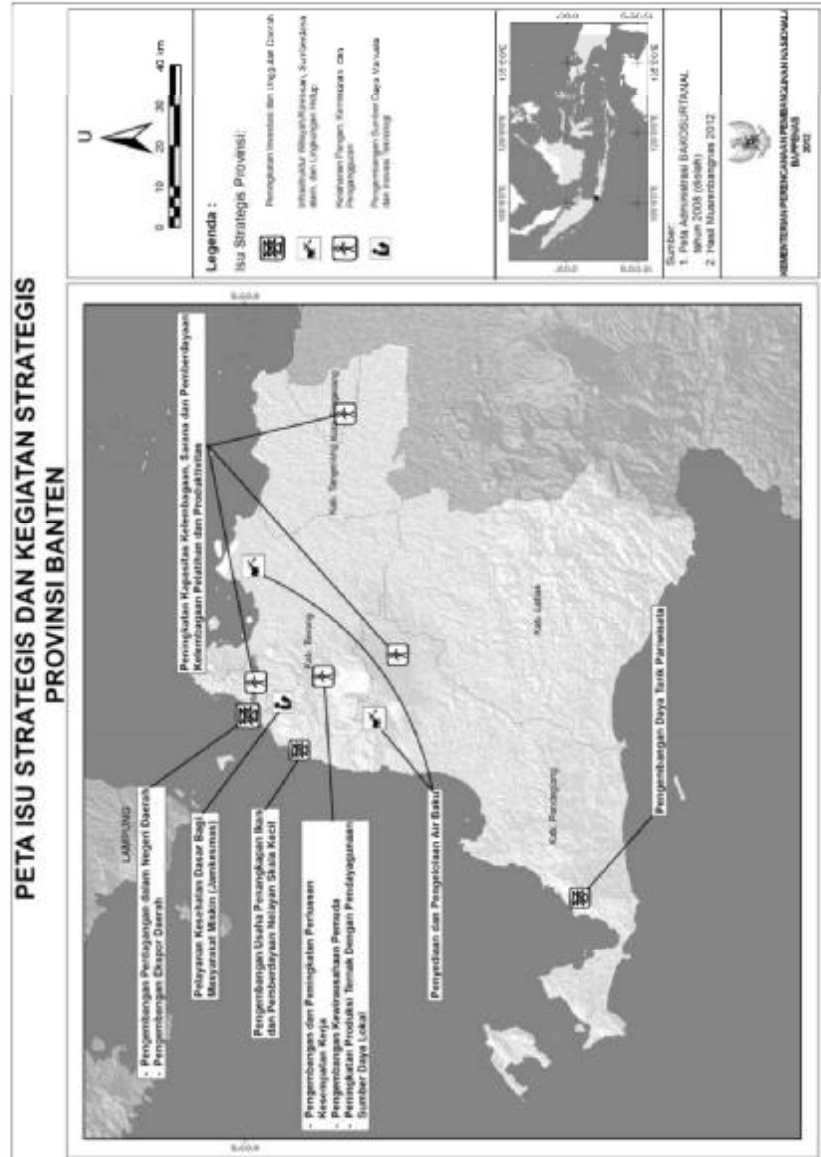
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Pemenuhan Sarana dan Prasarana RSU Rujukan Provinsi Banten					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Kefarmasian dan Alkes	Persentase (%) Produk Alat Kesehatan dan Part yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat	100	1.504,60

Catatan:

- 1) Alas: dikoordinasikan kembali dengan Ditjen Dikti.
- 2) Untuk kegiatan lingkup pendidikan menengah disediakan dana dari pusat yang dialokasikan di 33 provinsi melalui mekanisme *block grant*. Daerah mengusulkan melalui proposal yang dilengkapi dengan data pendukung.
- 3) Angka ini merupakan usulan yang masih akan melalui proses seleksi sesuai dengan mekanisme pengajuan dan penetapan pasar pemerintah berdasar proposal daerah oleh Kementerian Perdagangan.

Matriks Proyek MP3EI Tahun 2013

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi Serpong-Maja-Rangkasbitung; panjang 32 km	Kementerian Perhubungan	239,0
2	Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi lintas Duri-Tangerang (20 Km <i>double track</i>)	Kementerian Perhubungan	208,79
3	Penanganan jalan Cilegon-Pasauran, (44,34 Km) telah mencakup jalan Cilegon - Anyer (JSS)	Kementerian PU	20,039
4	Penanganan Jalan Cikande – Serang – Cilegon (83,2 Km)	Kementerian PU	77,31
5	Pembangunan Bendungan Karian	Kementerian PU	337,55



G. PROVINSI BALI

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Pembangunan Fasilitas Kesehatan				
<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Ruang Rawat Inap Kelas III RSUD Klungkung, Bangli, Negara, Karangasem</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan dan sarana kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi standar peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)	4 Rumah Sakit Ilmiah di Klungkung, Bangli, Negara, dan Karangasem	5.131,80
2	Isu Strategis : Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata dan MP3EI				
<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Western Ring Road</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi	Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun		40.100,00
<i>Kegiatan Strategis : Penyelesaian Dermaga Penyebrangan Gunaksa: Pembangunan Sisi Laut dan Darat</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP	Lanjutan Pembangunan dermaga penyeberangan Gunaksa Tahap VI termasuk supervisi	1 paket	7.500,00
<i>Kegiatan Strategis : Penyelesaian Dermaga Penyebrangan Gunaksa: Pembangunan Akses</i>					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Jula)
Jalan Masuk ke Pelabuhan					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASHP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP			50.000,00
Kegiatan Strategis : Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Kapal Pesiar Tanah Ampo dan Renoa					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PPN/BA/PENAS (KPS)					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Jumlah unit		0
Kegiatan Strategis : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Petanu					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PPN/JA/PENAS (KPS)					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan		21.500,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tukad Penet					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PPN/JA/PENAS (KPS)					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan		30,00
3	Isu Strategis : Peningkatan pelayanan dan kualitas pendidikan (terutama rehabilitasi sekolah yang rusak berat dan sedang)				
Kegiatan Strategis : Rehabilitasi SD (172 sekolah)					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kestabilan Layanan Pendidikan SD			400,90
	Kegiatan Strategis : Rehabilitasi SMP (151 sekolah)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kestabilan Layanan Pendidikan SMP			350,00
	Kegiatan Strategis : Rehabilitasi SMA dan SMK (64 sekolah)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Menengah				2.625,00
	Kegiatan Strategis : Pengadaan Information and Communication Technology (ICT) : 272 sekolah				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk			0
	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pendayagunaan E-Administrasi			
4	Isu Strategis : Peningkatan produksi beras dalam rangka mendukung surplus beras nasional 10 juta ton tahun 2014				
	Kegiatan Strategis : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan				25.330,00

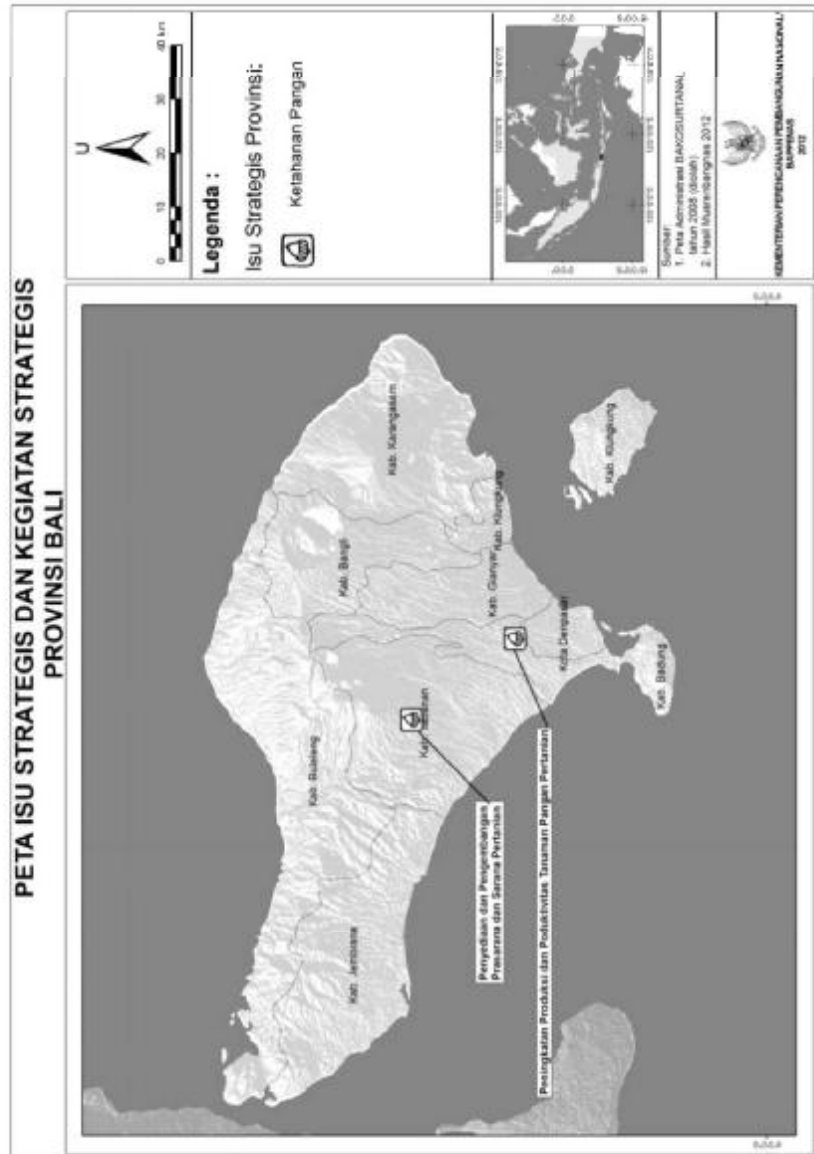
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
Kegiatan Strategis : Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian; Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
	KEMENTERIAN PERTANIAN				36.560,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian				
5	Isu Strategis : Peningkatan ketersediaan kapasitas listrik terpasang Kegiatan Strategis : Pembangunan SUTET 500kV Jawa Bali Crossing				
	Prioritas Nasional : Prioritas Energi PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA				
					0 (TULU)

Catatan:

- 1) Untuk kegiatan fisik disediakan dana dan pusat yang dialokasikan di 33 provinsi melalui mekanisme *block grant*. Daerah mengajukan melalui proposal yang dilengkapi dengan data pendukung. Alokasi nasional untuk pengembangan TUK, yaitu jenjang SMA untuk 942 sekolah sebesar Rp. 92,7 M; jenjang SMA untuk 1.500 sekolah sebesar Rp. 155,5; dan jenjang SMK untuk 639 sekolah sebesar Rp. 35,1 M.

Matriks Proyek MP3EI Tahun 2013

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Pengembangan IPA Petanu (Tukan: Pelanu Kab Gianyar, Badung dan Denpasar) - (300 lt/cit)	Kementerian PU	21,5
2	Penanganan Jalan Tolpati - Kosaamba (11,8 Km)	Kementerian PU	64,68
3	Pembangunan dan Pemeliharaan <i>Underpass</i> Dewa Ruci	Kementerian PU	50
4	Pembangunan <i>intake</i> dan jaringan transmisi mata air Guyangan Klungkung (40 I/s)	Kementerian PU	0,5
5	Pembangunan bendungan Pembangunan Waduk Tilab, Kabupaten Buleleng (359 I/s)	Kementerian PU	163,31
6	Pengembangan IPA Pened (300 lt/cit)	Kementerian PU	30
7	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	20,264



BAB 4 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2013

4.1 Kondisi Wilayah Kalimantan Saat Ini

Secara umum kinerja perekonomian wilayah Kalimantan pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian terutama perkebunan, industri pengolahan migas, dan pertambangan dan penggalian. Perkembangan PDRB per kapita wilayah Kalimantan terus mengalami peningkatan riil, walaupun ketimpangan antarprovinsi masih cukup tinggi. Dalam mendorong perekonomian wilayah Kalimantan, Kalimantan Timur adalah provinsi yang paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN.

Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Kalimantan cenderung menurun dan sedikit di bawah TPT nasional kecuali untuk Kalimantan Timur. Fenomena pengangguran juga lebih menonjol di daerah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan.

Sebagian besar provinsi di Kalimantan memiliki tingkat kemiskinan jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Sementara itu, terkait dengan aspek pembangunan manusia, seluruh provinsi di Kalimantan menunjukkan perbaikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Umur Harapan Hidup (UHH), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Namun demikian ketidakterataan pembangunan manusia antarprovinsi masih terlihat terutama disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar dan rendahnya mutu pelayanan di daerah perdesaan, pedalaman, dan perbatasan. Tercatat saat ini terdapat 16 Kabupaten tertinggal yang masih memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pelayanan dasar publik.

TABEL 4.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

Perkembangan Pembangunan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 (%)	5,9	6,7	6,1	3,9
PDDB Perkapita Dengan Migas Tahun 2010 (Rp.Ribu)	13.757	19.243	16.142	90.331
Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2011 (%)	3,89	2,55	5,23	9,84
Persentase Penduduk Miskin, September 2011 (%)	8,43	6,64	5,35	6,63
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010	60,15 (Peningkat 28)	74,64 (Peningkat 7)	69,2 (Peningkat 16)	73,96 (Peningkat 5)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010	54,21	69,32	55,97	50,37
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010	58,25	68,63	62,53	50,25
Umur Harapan Hidup Tahun 2010 (Tahun)	56,60	71,30	63,91	71,20
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 (Tahun)	6,82	8,05	7,65	8,97

Sumber : Basko: Pusat Statistik

Di bidang infrastruktur, total panjang jaringan jalan di Kalimantan meningkat dari 44.723 km pada tahun 2008 menjadi 52.606 km pada tahun 2009. Seiring dengan itu, kualitas jalan mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 - 2009 persentase jalan dengan kondisi baik meningkat dari 28,01 persen menjadi 37,10 persen. Sejalan dengan hal itu persentase jalan dengan kondisi rusak berat mengalami penurunan dari 18,14 persen menjadi 15,89 persen.

Sementara itu, sektor komunikasi dan informatika, hingga tahun 2011 dalam penyediaan jasa akses telekomunikasi telah mencakup 3.937 desa USO dan internet di 619 desa ibukota kecamatan USO (100 persen dari target).

Luas jaringan irigasi Kalimantan mencapai 480,32 ribu hektar atau sekitar 6 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia. Dari total 480,32 ribu hektar daerah irigasi tersebut, hanya sekitar 7,33 ribu hektar (1,52 persen) yang

ketersediaan airnya dijamin oleh waduk.

Wilayah Kalimantan pada tahun 2010 menjadi penyumbang 18,22 persen produksi komoditas kelapa sawit nasional. Wilayah Kalimantan memiliki kekayaan cadangan minyak bumi, gas dan batubara. Untuk Batubara, Kalimantan mempunyai cadangan 52,100 juta ton dengan potensi untuk melakukan kegiatan gasifikasi batubara.

Dari sisi luas kawasan hutan, wilayah Kalimantan adalah yang tertinggi kedua setelah Papua dengan luas sebesar 40,9 juta hektar dengan laju deforestasi yang sangat tinggi sekitar 246 ribu hektar/tahun (tahun 2000-2005).

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, masalah utama yang dihadapi oleh wilayah Kalimantan adalah pengamanan dan pengembangan daerah perbatasan dan konflik horizontal.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan

Tujuan pembangunan wilayah Kalimantan dalam tahun 2013 adalah untuk :

1. Meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat serta akses terhadap pelayanan dasar publik di wilayah Kalimantan.
2. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat (jalan dan kereta api), laut maupun udara;
3. Memantapkan wilayah Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.
4. Memantapkan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
5. Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha;
6. Meningkatkan fungsi transportasi laut dan sungai untuk daerah terpencil dan pedalaman di wilayah Kalimantan;
7. Meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Kalimantan

dan daerah perbatasan;

8. Meningkatkan kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia.
9. Mewujudkan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai bagian dari paru-paru dunia dan konservasi keanekaragaman hayati antara lain melalui program REDD+ dan reklamasi bekas lahan tambang.
10. Memastikan keberlanjutan layanan telekomunikasi dan internet, percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan Air Baku bagi PDAM, pembangunan jaringan transmisi air baku dan pembangunan dan rehabilitasi waotuk.

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya standar dan kualitas hidup dan aksesibilitas masyarakat Kalimantan terhadap pelayanan dasar publik yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, serta usia harapan hidup (Tabel 4.2 dan 4.3).
2. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara;
3. Berkembangnya wilayah Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.
4. Berkembangnya Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
5. Meningkatnya sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha.
6. Terpeliharanya kawasan hutan tropis basah yang bervegetasi minimal 45,00 persen dari luasan Pulau Kalimantan serta terehabilitasinya dan terpeliharanya

kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna endemik.

7. Selesainya tata batas kawasan hutan; beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); Penurunan hotspot (kumulatif dari rerata 2005-2009) dan penurunan konflik kawasan; serta rehabilitasi hutan dan lahan. (persiapan kegiatan pelaksanaan REDD+) di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
8. Keberlanjutan layanan telekomunikasi dan internet di wilayah USO, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Sanggau Ledo dan Kakap Komplek, Karau, Balang Alai, Amandil, Pitala, Beriwit, dan Dumaring; pembangunan pipa transmisi air baku Mempawah-Sungai Pinyuh dan pembangunan jaringan transmisi air baku di Palangkaraya; pembangunan dan rehabilitasi waduk Marangkayu, Teritib, dan Muara Joloi.

TABEL 4.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2013

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi ²⁾ (%)	Kemiskinan ²⁾ (%)	Pengangguran ³⁾ (%)
Kalimantan Barat	4,78 – 5,55	6,55	4,50 – 5,10
Kalimantan Tengah	5,82 – 6,50	4,96	3,15 – 3,55
Kalimantan Selatan	6,10 – 6,65	3,69	4,20 – 4,36
Kalimantan Timur	4,45 – 4,95	5,66	7,60 – 8,85

Sumber: Proyeksi Bappenas; DPS; Susenas

TABEL 4.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2013

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾	Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾	Umur Harapan Hidup ³⁾
Kalimantan Barat	26	7,33	70,90
Kalimantan Tengah	21	8,48	72,20
Kalimantan Selatan	31	7,09	69,50
Kalimantan Timur	15	9,57	73,50

Sumber : Proyeksi Dapenas; DPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan wilayah Kalimantan Tahun 2013 diarahkan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, dan kehutanan, gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber daya alam, produksi dan pengolahan hasil tambang, serta lumbung energi nasional.

Untuk mendukung arah pengembangan tersebut, strategi pengembangan yang dilakukan adalah:

1. Mengembangkan Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Balikpapan sebagai pusat industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang melayani sentra-sentra produksi di sekitarnya, serta mengembangkan produk/industri unggulan wilayah dan kerja sama antardaerah.
2. Mengoptimalkan industri migas dan pertambangan serta mengembangkan industri energi alternatif terbarukan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan kerja, dan jangkauan pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan jaringan jalan (Trans Kalimantan, dan jalan perbatasan), angkutan sungai dan laut, serta angkutan

udara dan mengintegrasikannya dalam suatu jaringan transportasi terpadu.

5. Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi.
6. Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan.
8. Memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin.

4.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Kalimantan

Isu strategis dan kegiatan strategis provinsi di wilayah Kalimantan adalah sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Barat:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan strategis Pembangunan Food Estate;
2. Peningkatan Infrastruktur yang memadai dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan Pelabuhan Internasional, dan (ii) Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan; (iii) Pengamanan pantai Duri.
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan kegiatan strategis mencakup pembangunan Salap SD-SMP-SMA/SMK di kawasan perbatasan;
4. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dengan kegiatan strategis Pembangunan Energi Baru Terbarukan;

Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan dengan kegiatan strategis (i) pembangunan Politeknik Pertambangan dan Perkebunan; (ii) pembangunan sarana prasarana Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya; (iii) pembangunan sarana prasarana pendidikan; dan (iv) pembangunan pusat studi gambut dan primata endemik (orang utan) berskala internasional;
2. Peningkatan Ketersediaan infrastruktur dasar pembangunan dengan kegiatan strategis (i) Penuntasan pembangunan jalan poros selatan dan dukungan MP3EI; (ii)

- Pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu di Kabupaten Seruyan dan Sukamara; (iii) Penyusunan RS, DED PLTA di Sei Tengah Kabupaten Lamandau; (iv) Pembangunan PLTMH di Seuyan dan Lamandau; (v) Pengadaan dan Pembangunan PLTS terpusat di Bako Utara, Kotawaringin Timur dan Pulau Disau; (vi) Percepatan sawah, pengadaan sarpras dan pelayanan tata air mikro; (vii) Penguatan pantai Kab. Kapuas dan Kab. Sukamara; dan (viii) Pelapisan Runway Bandara Tjiilikriwet dan Bandara Sampit.
3. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kegiatan strategis Pembangunan fisik dan pengadaan alkes Rumah Sakit Jiwa;
 4. Pengembangan perekonomian rakyat dengan kegiatan strategis Pengembangan sentra industri rotan.

Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Peningkatan Infrastruktur sebagai peningkatan Local Connectivity dengan kegiatan strategis (i) Lanjutan Pembangunan Terminal Regional Tipe A : 3; (ii) Pembangunan emplasment area AKAP dan Area Kedatangan Serta Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan (BRT) Kawasan Metro Banjar Bakula; (iii) Peningkatan Jalan Nasional di Kalimantan Selatan dengan penerapan lebar minimum 6 meter (Fly over Banjarmasin 400,4 m) dan pendukung kegiatan MP3EI (Jalan Lingkar Batu Licin-Tanah Bumbu); (iv) Pembangunan perpanjangan landasan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin; (v) Pembangunan DI Pitap.
2. Pengembangan bidang Ekonomi berkelanjutan untuk meletakkan lingginya ketergantungan Pertumbuhan Ekonomi dari sektor pertambangan dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan PLTU Asam-Asam 5 dan 6, 2 x 65 MW; (ii) PLTU batulicin 2 x 70 MW (iii) Pembangunan Jaringan Distribusi (SUTM) dan (SUTR); (iv) Pengembangan industri Industri Rotan dan Meubel dan Minyak Siri (Tanah Laut); (v) Relokasi Industri Pengolahan rotan unit Kalimantan Selatan; (vi) Pembangunan Pelabuhan Banjarmasin (Trisakti); (vii) Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Tanah Laut

(Tanjung Dewa); (viii) Lanjutan Pembangunan dermaga Pelabuhan Laut Pelaihari (Pelabuhan Swarangan); (ix) Perencanaan Pembangunan Kajian Transportasi sungai di Prov. Kalsel; (x) Peningkatan Produksi Lempak dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal (Peternakan Sapi); (xi) Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian; (xii) Peningkatan Nilai tambah, daya saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor hasil Pertanian; Peningkatan usaha kehutanan / Peningkatan usaha hutan alam /peningkatan usaha hutan tanam/ peningkatan usaha hutan industri primer; (xiii) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian; (xiv) Peremajaan Kebun karet Rakyat dan Dukungan Pasca panen/Pengolahan hasil perkebunan; (xv) pengembangan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan.

3. Penguatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan D.I. Batang Asai, D.I. Amardit, D.I. Itap, Polder Alahio, Waduk Tapin; (ii) Pengelolaan jaringan Irigasi (1.540 Ha), Pengembangan Sumber Air (28 Unit), Pengembangan Konservasi Air (120unit), Pengelolaan Pengembangan Sumber Air (3 Unit) & Konservasi Air 2 (Unit) & P3A; (iii) Cetak Sawah (2.000 Ha), Perluasan areal (3.000 Ha) &Optimasi lahan (3.300Ha) dan perluasan perlempapan pertanian; (iv) penyediaan benih padi (616.250 Kg) dan tersedianya Pengawakan Benih Padi; (v) pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan; (vi) Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan ; (vii) Pengembangan Sistem Perikanan ikan, Sistem Prasarana dan Sarana pembudidayaan Ikan, Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan, Pengawakan dan penerapan teknologi Terapar adaptif perikanan budidaya; (viii) Fasilitasi Penguatan dan pengembangan, Pemasaran dalam negeri hasil perikanan.
4. Peningkatan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Selatan, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya IPM dengan kegiatan strategis (i) penuntasan buta aksara dan peningkatan sarana prasarana jenjang pendidikan dasar; (ii) pembangunan RKB, rehab sekolah, dan peningkatan sarana prasarana pendidikan jenjang SMA;
5. Penanggulangan Kemiskinan dengan kegiatan strategis (i)

Peningkatan kualitas dan Produktifitas tenaga kerja; (ii) Upaya Kesehatan Masyarakat (jamkesprim, rujukan); (iii) Perbaikan Gizi Masyarakat; (iv) Promosi dan pemberdayaan Masyarakat; (v) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan dan Perataan Lingkungan dan Perumahan Kumuh serta Fasilitasi Pembangunan Rumah Susun Sederhana dan Perumahan Kumuh

Provinsi Kalimantan Timur:

1. Peningkatan jumlah daerah pedalaman dan perbatasan yang dialiri listrik dengan kegiatan strategis Kegiatan Pemasangan PLTS;
2. Peningkatan Jumlah Dan Mutu Infrastruktur Untuk Membuka Jalur Lintas Kalimantan Dan Kawasan Terisolir (Pedalaman Dan Perbatasan) dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Panjang; (ii) Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Tanjung Baka/Bala; (iii) Pembangunan Jalan Lintas Provinsi (Jalan Nasional Trans Kalimantan) Baik Poros Selatan, Poros Tengah, Dan Poros Utara (Perbatasan); (iv) Pembangunan jalan perbatasan; (v) Pembangunan Faspt CPO Malloy.
3. Pencapaian sasaran swasembada beras dengan kegiatan strategis (i) Riset dan Teknologi (Pengembangan Teknologi Pertanian); (ii) Perluasan lahan sawah (pencetakan sawah)
4. Pemenuhan kebutuhan tenaga terampil siap pakai melalui pendidikan dengan kegiatan strategis pengembangan Institut Teknologi Kalimantan dan Institut Seni dan Budaya.

Uraian isu strategis, program dan kegiatan strategis, Kementerian/Lembaga, sasaran, target, dan pagu indikatif di setiap provinsi di Kalimantan dapat dilihat dalam **Lampiran Bab 4**.

4.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Kalimantan

Arah kebijakan pengembangan MP3EI untuk Koridor Ekonomi Kalimantan memperkuat arah pengembangan wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013, yakni mengembangkan Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Koridor Ekonomi Kalimantan oleh pemerintah pusat pada tahun 2013 adalah:

1. Pembangunan Jembatan Tayan (1,420 Km) di Provinsi Kalimantan Barat
2. Penanganan Jalan Pontianak - Sei Pinyuh - Sei Duri di Provinsi Kalimantan Barat
3. Penanganan jalan Sekadau - Sanggau Tayan - Pontianak (263,8 Km) di Provinsi Kalimantan Barat
4. Pengembangan pelabuhan Pontianak (55 Kri) di Provinsi Kalimantan Barat
5. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Kalimantan Barat
6. Penanganan jalan Sari Saripit - Sp. Runtu - Pangkalan Bun - Kumai di Provinsi Kalimantan Tengah
7. Adpel Pulau Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah
8. Pembangunan PLTU Sampit (2 x 25 MW) di Provinsi Kalimantan Tengah
9. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Kalimantan Tengah
10. Pembangunan jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito) di Provinsi Kalimantan Selatan
11. Pembangunan Fly Over Jalan A.Yani - Simpang Gatot Subroto Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan
12. Pembangunan PLTU Kota Baru 2x7 MW (Pembayaran Progres dan Masa Pemeliharaan) di Provinsi Kalimantan Selatan
13. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Kalimantan Selatan
14. Penanganan jalan batas provinsi Kalteng - Tenggara - Samarinda - Kaltim (408,2 km) di Provinsi Kalimantan Timur
15. Pembangunan Jembatan Pulau Balang bentang panjang (1,314 Km) di Provinsi Kalimantan Timur
16. Penanganan Jalan Tj. Selor - Tj. Redeb - Maloy (440,8 Km) di Provinsi Kalimantan Timur
17. Penanganan Jalan Samarinda - Bontang - Sangatta - Maloy (304,5 Km) di Provinsi Kalimantan Timur
18. Pembangunan Faspel Penajam Pasir & Kuala Semboja di

Provinsi Kalimantan Timur

19. Pengembangan kapasitas Pelabuhan Malay di Provinsi Kalimantan Timur
20. Pelabuhan Tanah Grogot di Provinsi Kalimantan Timur
21. Korpel Nunukan di Provinsi Kalimantan Timur
22. Pengembangan pelabuhan Samarinda (45 Km) di Provinsi Kalimantan Timur
23. PLTG Kaltim (2x50 MW) (Peaking) di Provinsi Kalimantan Timur
24. PLTU Tarakan (2x7 MW) di Provinsi Kalimantan Timur
25. PLTU Melak (2x7 MW) di Provinsi Kalimantan Timur
26. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan garpu induk di Provinsi Kalimantan Timur

Uraian proyek MP3EI tahun 2013 yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat di setiap provinsi dijabarkan dalam **Lampiran Bab 4**.

Rencana investasi yang akan dilakukan oleh BUMN, Swasta, KPS, dan APBD adalah sebagai berikut:

BUMN

1. PLTU 2 Kalbar – Bengkayang (2 x 27.5 MW) di Provinsi Kalimantan Barat
2. Pembangunan pembangkit listrik – PLN di Provinsi Kalimantan Barat
3. Pembangunan fasilitas transmisi kelistrikan – PLN di Provinsi Kalimantan Barat
4. Pengembangan Terminal Kargo di Bandara Supadio di Provinsi Kalimantan Barat
5. Pembangunan PLTGU Bangkanai 120 MW di Kabupaten Barito Utara, di Provinsi Kalimantan Tengah
6. Pembangunan pembangkit listrik – PLN di Provinsi Kalimantan Tengah
7. Pembangunan fasilitas transmisi kelistrikan – PLN di

Provinsi Kalimantan Tengah

8. Pembangunan Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV Palangkaraya - Kuala Kurun di Provinsi Kalimantan Tengah
9. Pembangunan PLTU Buntok 2 x 7MW di Provinsi Kalimantan Tengah
10. Pembangunan PLTU 2x3 Kuala Pembuang di Provinsi Kalimantan Tengah
11. Pengerabangan Pelabuhan Bunikarjo di Provinsi Kalimantan Tengah
12. Pengerabangan pelabuhan Bagendang di Provinsi Kalimantan Tengah
13. Pengerabangan kapasitas Pelabuhan Kumai di Kabupaten Kumai, di Provinsi Kalimantan Tengah
14. Pembangunan Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV Muara Teweh-Buntok di Provinsi Kalimantan Tengah
15. Pembangunan transmisi listrik sampai 2015 (1848 kms) di Provinsi Kalimantan Tengah
16. Pembangunan pembangkit listrik - PLN di Provinsi Kalimantan Selatan
17. Pembangunan fasilitas transmisi kelistrikan - PLN di Provinsi Kalimantan Selatan
18. PLTU Kassel (2x100 MW) di Provinsi Kalimantan Selatan
19. PLTU Kotabaru (2x7 MW) di Provinsi Kalimantan Selatan
20. Penanganan Depot Kotabaru menjadi Terminal Transit di Provinsi Kalimantan Selatan
21. Pendalaman alur pelayaran Selat Malaka - Tj. Kemuning, Garing Siring di Provinsi Kalimantan Selatan
22. Pengembangan fasilitas TPK Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan
23. Pembangunan pembangkit listrik (PT. PLN) di Provinsi Kalimantan Timur
24. Mini LNG Plant, Batakan, Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur
25. Bandara Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur
26. Penanganan jalan batas Propinsi Kalteng Tenggara -

- Samarinda (408,2 km) di Provinsi Kalimantan Timur
27. Pembangunan fasilitas transmisi kelistrikan (PT, PLN) di Provinsi Kalimantan Timur
 28. Pembangunan power plant 2 x 100 MW di Provinsi Kalimantan Timur
 29. Pembangunan pembangkit listrik (PT, PLN) di Provinsi Kalimantan Timur

Swasta

1. Pembangunan pembangkit listrik (IPP) di Provinsi Kalimantan Barat
2. PLTU 2x 65 MW di Provinsi Kalimantan Barat
3. Pembangunan fasilitas transmisi kelistrikan (IPP) di Provinsi Kalimantan Barat
4. Pembangunan SPAM Kota Pontianak Timur (300 l/s) di Provinsi Kalimantan Barat
5. Pembangunan pembangkit listrik (IPP) di Provinsi Kalimantan Tengah
6. Pembangunan PLTU PT. IDMC (2 x 100 MW) di Provinsi Kalimantan Tengah
7. PLTU 1 Kalteng – Pulang Pisau (2 x 60 MW) di Provinsi Kalimantan Tengah
8. Pembangunan PLTGU Bangkasa (120 MW) di Kabupaten Barito Utara, di Provinsi Kalimantan Tengah
9. Perluasan Pelabuhan Angkut Batubara di Provinsi Kalimantan Tengah
10. Pembangunan PLTU Mulu Tambang (2x30 MW) di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
11. Pembangunan pembangkit listrik (IPP) di Provinsi Kalimantan Selatan
12. Pembangunan infrastruktur rel kereta api sebagai pendukung *Integrated Mining Development MEC Coal Project* (Muara Wahau, Bengalon, Sangata) sepanjang 130 km (4500M) di Provinsi Kalimantan Timur
13. Pembangunan infrastruktur pelabuhan sebagai

pendukung Integrated Mining Development MEC Coal Project di Provinsi Kalimantan Timur

14. Pembangunan fasilitas transmisi kelistrikan (JPP) di Provinsi Kalimantan Timur
15. Pembangunan power plant 2 x 15 MW di Provinsi Kalimantan Timur

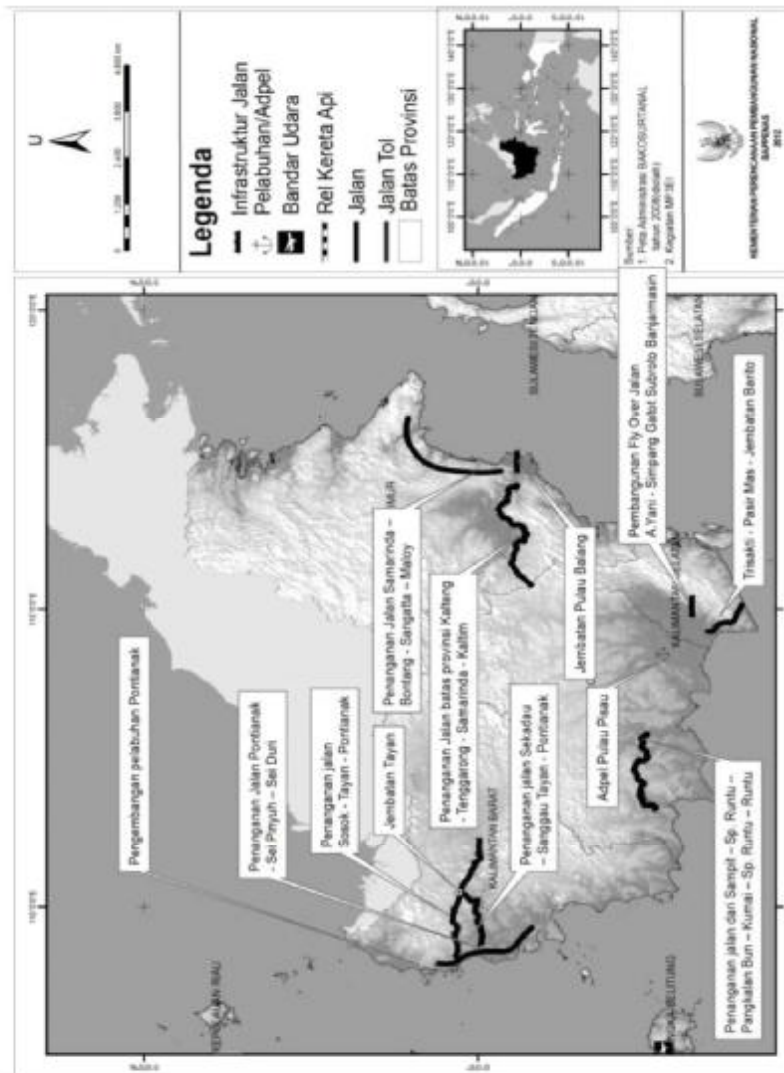
KPS

1. Pembangunan Jalur Kereta Api Puruk Cahu - Bangkuang (185 Km) di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Pembangunan Express way Samarinda - Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur
3. Pembangunan Jalur Kereta Api Tanjung Redep, Wulungan, Kutai Timur, Batu Licin. KA Batuhara (Perocahu - Bangkuang sepanjang 185 km), di Provinsi Kalimantan Timur

APRD

1. Penanganan Jalan Strategis Nasional dari Sampit - Bagendang - Ujung Pandaran - (42 km) di Provinsi Kalimantan Tengah
2. Pelebaran jalan menuju kawasan wisata sepanjang 30 km (Pengembangan Destinasi Pulau Derawan dan Tanjung Batu) di Provinsi Kalimantan Timur
3. Jalan akses TPK Palaran -- Samarinda (jalan strategis nasional) di Provinsi Kalimantan Timur.

GAMBAR 4.1
PROYEK MIPEL DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBLAYAI
MELALUI TA 2013 DI WILAYAH KALIMANTAN



LAMPIRAN BAB 4. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Pulau Kalimantan tahun 2013

A. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Ketahanan Pangan				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Food Estate				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah	11971	119.710,00
2	Isu Strategis : Rendahnya Kualitas Infrastruktur				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Internasional				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Volume pengerukan lumpur/sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta M3), Pelabuhan Strategis yang di bangun/ditingkatkan/di rehabilitasi, Pelabuhan non perintis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi, pelabuhan perintis yang di bangun/	Review SID	700,00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Pengaman Pantai Duri				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahan Gunung Merapi dan Pengaman Pantai	Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun		40.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan					
Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Dokumen Program Dan Anggaran Tahunan	-	0,00 Akan diusulkan sebagai <i>New Initiative</i>
3	Isu Strategis : Rendahnya Kualitas IPM				
Kegiatan Strategis : Pembangunan Sekolah Satu Atap SD-SMP-SMA/SMK di Kawasan Perbatasan					
Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Jumlah RKB-SMK	8 unit sekolah di 5 Kabupaten Perbatasan	13.427,5
4	Isu Strategis : Rendahnya Rasio Elektrifikasi				
Kegiatan Strategis : Pembangunan Energi Baru Terbarukan					
Prioritas Bidang : Bidang Sda dan Lingkungan Hidup					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Energi Baru	Pembinaan, Pengawasan dan	Pembangunan Desa Mandiri Energi Non BBN	0	0,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Terbarukan Dan Konservasi Energi	Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan			

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2013

No	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Pembangunan Jembatan Tayan (1,49 Km)	Kementerian PU	354,97
2	Penanganan Jalan Pontianak - Sei Pinyuh - Sei Duri	Kementerian PU	19,73
3	Penanganan jalan Sekadau - Sanggau Tayan - Pontianak - (Kalbar) (263,8 Km)	Kementerian PU	109,63
4	Pengembangan pelabuhan Pontianak (55 Km)	Kementerian Perhubungan	30
5	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	30,382

B. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Matriks ISU Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Pendidikan di Kalimantan Tengah				
	<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan politeknik pertambangan dan perkebunan</i>				
	Non Prioritas : Non Prioritas				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Tinggi	Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik	Prodi vokasi yang terakreditasi minimal B	288	0,00
	<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan sarana prasarana fakultas kedokteran Universitas Palangka Raya</i>				
	Non Prioritas : Non Prioritas				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu Pendidikan Kesehatan	Jumlah Mahasiswa	42	0,00
	<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (Pembangunan Lab dan ruang praktik, Pembangunan Lab Bahasa, Pembangunan Lab Komputer, Pembangunan UGB)</i>				
Non Prioritas : Non Prioritas					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
Program Pendidikan Dasar	Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan (pembangunan lab dan ruang praktik)	Ruang lab dan ruang praktik	396	950,00	
<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan pusat studi gambut dan primata endemik (orang utan) berskala internasional</i>					
Non Prioritas : Non Prioritas					

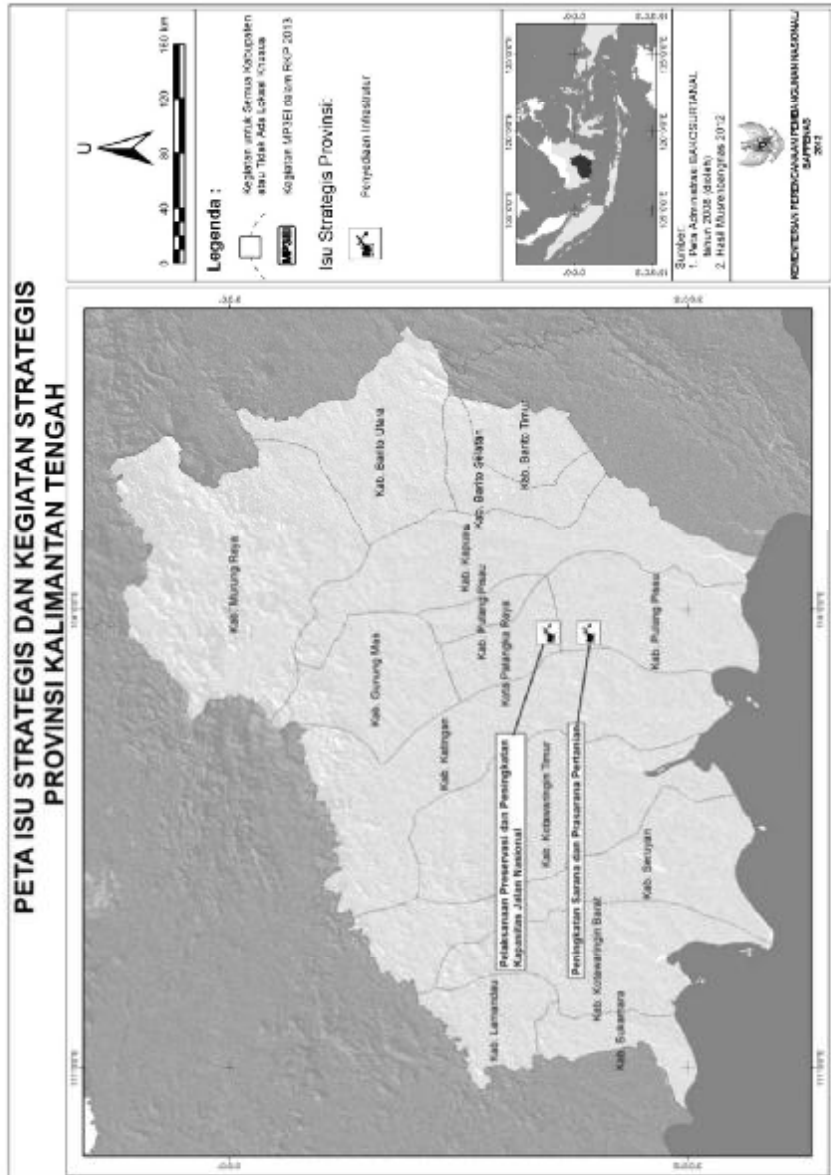
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Tinggi	Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi	Pusat Studi	240	0,00
2	Isu Strategis : Penyediaan Infrastruktur di Kalimantan Tengah				
Kegiatan Strategis : Penuntasan pembangunan jalan poros selatan dan dukungan MP3EI					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg dibangun baru	-	1.012.119,00
Kegiatan Strategis : Pengamanan Pantai Kab. Kapuas dan Kab. Sukamara					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai	Panjang sarana/prasarana pengamanan pantai yang dibangun		25.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelapisan Runway Bandara Tjilikriwut					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara				30.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelapisan Runway Bandara Sampit					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara				20.000,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu di Kabupaten Seruyan dan Sukamara; Penyusunan FS, DED PLTA di Sei Tongah Kabupaten Lamandau; Pembangunan PLTMH di Seuyan dan Lamandau; Pengadaan dan Pembangunan PLTS terpusat di Barito Utara, Kotawaringin Timur dan Pulang Pisau					
Non Prioritas : Non Prioritas					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	0	0,00
Kegiatan Strategis : Pencetakan sawah, pengadaan sarpras dan perluasan tata air mikro dalam pengembangan food estate untuk mendukung swasembada beras;					
Non Prioritas : Non Prioritas					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1) Perluasan Areal Pertanian ;2) Optimalisasi lahan	Peningkatan indeks per-tanaman dari IP-0 ke IP 100 dan IP 100 ke IP 200	13320	99,54
3	Isu Strategis : Kesehatan di Kalimantan Tengah				
Kegiatan Strategis : Pembangunan fisik dan pengadaan alkes Rumah Sakit Jiwa					
Non Prioritas : Non Prioritas					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan		1	5.957,60
4	Isu Strategis : Perekonomian Rakyat di Kalimantan Tengah				
Kegiatan Strategis : Pengembangan sentra industri rotan					
Non Prioritas : Non Prioritas					
	Program	Penyebaran &	Berkembang-	3.500,00	0,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Penumbuhan Industri Kecil & Menengah Wilayah I	nya IKM Kerajinan & Barang Seni		

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2013

No	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Penanganan jalan dari Sampit - Sp. Runtu - Pangkalan Bun - Kumai	Kementerian PU	154,31
2	Adpel Pulau Pisau	Kementerian Perhubungan	32
3	Pembangunan PLTU Sampit (2 x 25 MW)	Kementerian ESDM	404,662
4	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	619,790



C. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Peningkatan Infrastruktur sebagai peningkatan Local Conectivity				
	Kegiatan Strategis : Lanjutan Pembangunan Terminal Regional Tipe A : 3. Pembangunan emplasment area AKAP dan Area Kedatangan Serta Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan (BRT) Kawasan Metro Banjar Bakula				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Transportasi Jalan	terminal ti	7.000,00
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Nasional di Kalimantan Selatan dengan penerapan lebar minimum 6 meter dengan tujuan pengurangan kemacetan di perkotaan (Fly over Banjarmasin 400,4 m) dan pendukung kegiatan MP3EI (Jalan Lingkar Batu Licin-Tanah Bumbu)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg dibangun baru	-	560.908,00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan DI Pitap				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan		20,000.00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin : Pembangunan Paralel taxiway dan exit taxiway dan Perpanjangan run way 500 m dan Pembangunan terminal kedatangan dan terminal keberangkatan					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Perpanjangan landasan dari 2500 m menjadi 3000 m Bandara Syamsudin Noor	1 paket	75,000.00
2	Isu Strategis : Pengembangan bidang Ekonomi berkelanjutan untuk menekan tingginya ketergantungan Pertumbuhan Ekonomi dari sektor pertambangan				
Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Pengembangan Pelistrikan di Kalimantan Selatan sebagai Penunjang Ekonomi berkelanjutan : (1) Pembangunan PLTU Asam-Asam 5 dan 6, 2 x 65 MW (2). PLTU batulicin 2 x 70 MW (3). Pembangunan Jaringan Distribusi (SUTM) dan (SUTR)					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik	0	0,00
Kegiatan Strategis : Penyebaran dan pertumbuhan industri kecil dan menengah dengan salah satunya pengembangan pada : Industri Rotan dan Meubel dan Minyak Siri (Tanah Laut) dan Relokasi Industri Pengolahan rotan unit Kalimantan Selatan					
Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha					
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					
	Program Revitalisasi dan Perumbuhan Industri Agro	Revitalisasi dan Perumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan			0,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan : (1). Pembangunan Pelabuhan Banjarmasin (Trisakti) (2).Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Tanah Laut (Tanjung Dewa) (3).Lanjutan Pembangunan dermaga Pelabuhan Laut Palaihari (Pelabuhan Swarangan)					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Penyelesaian pembangunan faspel laut Palaihari tahap IV	1 paket	96,400.00
Kegiatan Strategis : Perencanaan Pembangunan Kajian Transportasi sungai di Prov. Kalsel					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan				0,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi ternak dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal (Peternakan Sapi); Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Penyediaan Sarana Peternakan & Perlengkapan peternakan); Peningkatan Nilai tambah, daya saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Eksport hasil Pertanian					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal		40	16.500,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan usaha kehutanan / Peningkatan usaha hutan alam /peningkatan usaha hutan tanam/ peningkatan usaha hutan industri primer .					
Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
KEMENTERIAN KEHUTANAN					
	Program Peningkatan Usaha Kehutanan	Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	Penambahan Areal Tanaman Pada Hutan Tanaman (HTI/HTR) Seluas 2,65 Juta Ha		1.300,00
<i>Kegiatan Strategis : Pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan Pertanian (Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian); Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu tanaman Perkebunan berkelanjutan (Peremajaan Kebun karet Rakyat, Dukungan Pasca panen/Pengolahan hasil perkebunan); Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat (pengembangan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan).</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim		450	3.304,00
3	Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan dalam Upaya Pencapaian target Nasional Surplus 10 juta ton dan target produksi 2,2 juta ton Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014				
<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Infrastruktur Irigasi : 1). D.I Batang Alai (Kabupaten HST) 2). D.I Amandit (Kabupaten HSS) 3). D.I Pitap (Kabupaten Balangan) 4). Polder Alabio (Kab. HSU) 5). Waduk Tapin dan Infrastruktur Irigasi Lainnya (Kab. Tapin)</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	5289,01 ha dengan prioritas lokasi: i) D.I Amandit dan ii) DI Batang Alai	63,100.00
<i>Kegiatan Strategis : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian : Jaringan Irigasi (11.540 Ha); Pengembangan Sumber Air (28 Unit) ; Pengembangan Konservasi Air (12Unit) ; Pengelolaan Pengembangan Sumber Air (3 Unit) & Konservasi Air 2 (Unit) & 'P3A</i>					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jumlah (Ha) Optimasi Jaringan Tersier (JITUT, JIDES dan Pengembangan TAM)	18600	18.600,00
Kegiatan Strategis : Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian : Cetak Sawah (1.800 Ha), Perluasan areal (3.080 Ha) &Optimasi Lahan (3.300Ha) dan perkuatan perlengkapan pertanian					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian		9740	47.795,00
Kegiatan Strategis : Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan : penyediaan benih Padi (616.250 Kg); Tersedianya Penangkaran Benih Padi					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan		275	1.375,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap (pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawalan kapal perikanan) ; Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan ; Peningkatan perikanan Budidaya : Pengembangan Sistem Perbenihan ikan, Sistem Prasarana dan Sarana pembudidayaan Ikan, Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan, Pengawalan dan penerapan teknologi Terapan adaptif perikanan budidaya ; Peningkatan Daya saing produk perikanan : Fasilitasi Penguatan dan pengembangan, Pemasaran dalam negeri hasil perikanan. dengan fungsi kegiatan perekonomian					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Jumlah Orang Tenaga Kerja Perikanan Budidaya		12.865,00
4	Isu Strategis : Peningkatan angka IPM untuk menjadikan SDM Provinsi Kalimantan Selatan yang berkualitas				
<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Kualitas Kesehatan (Rendahnya Angka Usia Harapan Hidup) : Perbaikan Gizi Masyarakat, Pengembangan Lingkungan Sehat dan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM	216	20.903,80
<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Kualitas Kesehatan (Rendahnya Angka Usia Harapan Hidup) : penurunan AKI dan AKB serta pemberdayaan tenaga kesehatan</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, 2. persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4),	89 persen	2.568,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
			3. Persentase faskes yang memberikan pelayanan KB sesuai standar		
Kegiatan Strategis : Pendidikan (Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah dan penuntasan buta huruf) : Wajar 9 tahun (Pembangunan Sekolah SD-SMP satu atap di daerah terpencil), Pendidikan Keaksaraan (Kejar paket A,B dan C), Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan tingkat SD dan SMP					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP			140,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan kualitas Pendidikan : Pembangunan RKB, Rehab sekolah, Peningkatan sarana dan Prasarana Pendidikan tingkat SD dan SMP					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA			5.022,50
5	Isu Strategis : Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat yang Sejahtera				
Kegiatan Strategis : Peningkatan kualitas dan Produktifitas tenaga kerja pendukung RPJP kalsel tahun 2025 sebagai daerah berbasis agro industri					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan	Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	3872 orang	10.500,00
Kegiatan Strategis : Perluasan Akses Kesehatan Masyarakat Miskin : Upaya Kesehatan Masyarakat (jamkesprov, rujukan); Perbaikan Gizi Masyarakat ; Promosi dan pemberdayaan Masyarakat					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin Di Puskesmas	224	11.438,64
Kegiatan Strategis : Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan dan Penataan Lingkungan dan Permukiman Kumuh serta Fasilitasi Pembangunan Rumah Susun Sederhana dan Perumahan Murah					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT					
	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya	Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya	100	1.300,00

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2013

	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Pembangunan jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito)	Kementerian PU	10,00
2	Pembangunan Fly Over Jalan A.Yani - Simpang Gatot Subroto Banjarmasin	Kementerian PU	50,00
3	Pembangunan PLTU Kota Baru (2x7 MW)	Kementerian ESDM	246,87
4	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	3,034

D. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

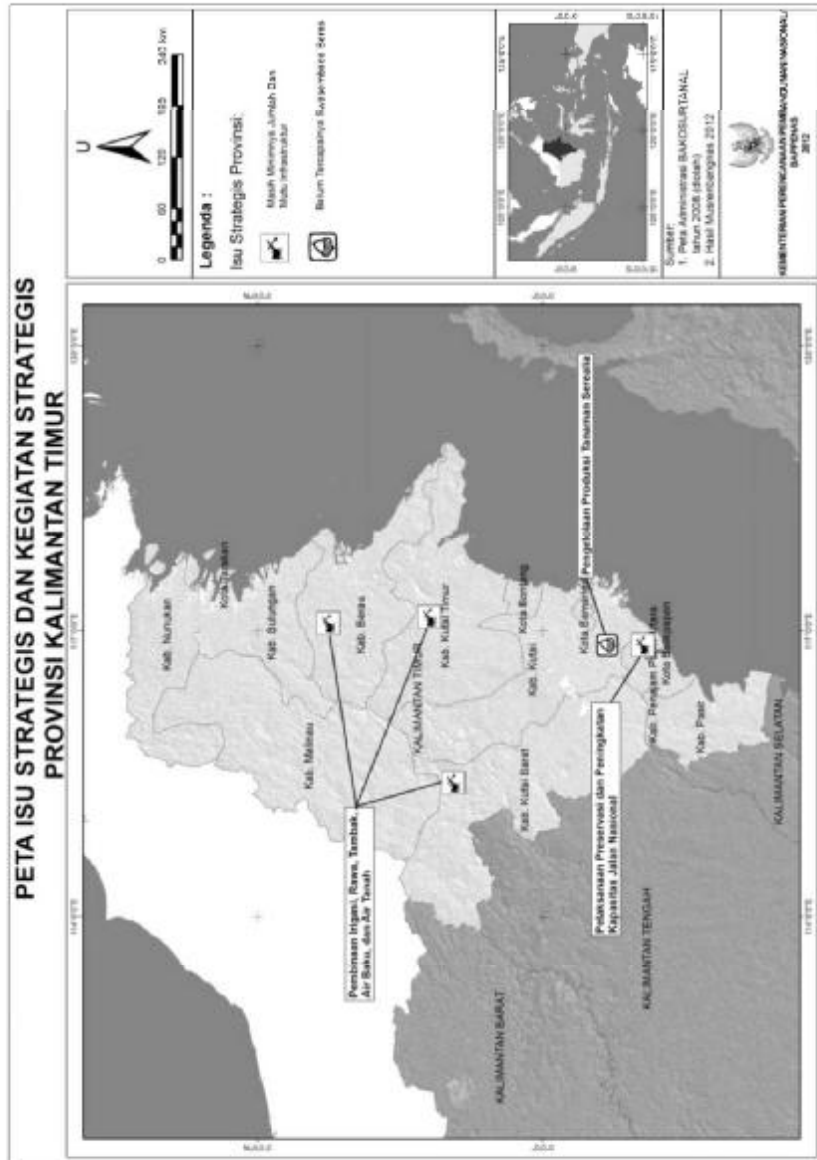
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Masih terdapatnya daerah pedalaman dan perbatasan yang belum dialiri listrik				
	Kegiatan Strategis : Kegiatan Pemasangan PLTS				
	Prioritas Nasional : Prioritas Energi				
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik	0	0,00
2	Isu Strategis : Minimnya Jumlah Dan Mutu Infrastruktur Untuk Membuka Jalur Lintas Kalimantan Dan Kawasan Terisolir (Pedalaman Dan Perbatasan)				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Panjang				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jembatan yg dibangun baru	-	176,000.00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Irigasi Daerah				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	4076 dengan prioritas lokasi: i) DI Muara Bangun, ii) DI Beriwit,	60,120.00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
				iii) DI Kaubun, iv) DI Rapak Oros, v) DI Tepian Buah.	
Kegiatan Strategis : Pembangunan Irigasi Daerah Rawa Tanjung Buka					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	4076 dengan prioritas: DI Rawa Tanjung Buka	40.000,0 0
Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Lintas Provinsi (Jalan Nasional Trans Kalimantan) Baik Poros Selatan, Poros Tengah, Dan Poros Utara (Perbatasan)					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi	-	100.000,00
3	Isu Strategis : BELUM TERCAPAINYA SWASEMBADA BERAS				
Kegiatan Strategis : Riset dan Teknologi (Pengembangan Teknologi Pertanian)					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Jumlah Varietas atau Galur Harapan Komoditas Pertanian	0	0,00
Kegiatan Strategis : Perluasan lahan sawah (pencetakan sawah)					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan	Pengelolaan Produksi	Luas Areal	49725	28.326,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Tanaman Serealia	Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan Termasuk untuk Bahan Bakar Nabati (Ribu Ha) ; Sl - Ptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha)		
4	Isu Strategis : Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Siap Pakai				
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Institut Teknologi Kalimantan (Anggaran Pusat dan ITS Pembina, pelaksanaan secara bertahap)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Tinggi	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Jumlah PT yang Mempunyai Inkubator Bisnis/Industri		0,00
	Kegiatan Strategis : Institut Seni dan Budaya				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Tinggi	Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama	Persentase PT yang Melaksanakan Life Skills		0,00

Matriks Proyek MP3EI Tahun 2013

No	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Penanganan Jalan batas provinsi Kalteng - Tenggara - Samarinda - Kaltim (408,2 Km)	Kementerian PU	203,19
2	Pembangunan Jembatan Pulau Balang bentang panjang (1,314 Km)	Kementerian PU	176
3	Penanganan Jalan Tj. Selor - Tj. Redeb - Maloy (440,8 Km)	Kementerian PU	352,69
4	Penanganan Jalan Samarinda - Bontang - Sangatta - Maloy (304,5 Km)	Kementerian PU	189,59
5	Pembangunan Faspel Penajam Pasir & Kuala Semboja	Kementerian Perhubungan	10
6	Pengembangan kapasitas Pelabuhan Maloy	Kementerian Perhubungan	50
7	Pelabuhan Tanah Grogot	Kementerian Perhubungan	2,5
8	Kanpel Nunukan	Kementerian Perhubungan	1
9	Pengembangan pelabuhan Samarinda (45 Km)	Kementerian Perhubungan	35
10	PLTG Kaltim (2x50 MW) (Peaking)	Kementerian ESDM	740,350
11	PLTU Tarakan (2x7 MW)	Kementerian ESDM	165,436
12	PLTU Melak (2x7 MW)	Kementerian ESDM	30,707
13	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	96,472



BAB 5 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2013

5.1 Kondisi Wilayah Sulawesi Saat Ini

Secara umum kinerja pembangunan ekonomi wilayah Sulawesi tahun 2011 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Dalam mendorong perekonomian Wilayah Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN. Sejalan dengan itu, perkembangan PDRB per kapita wilayah Sulawesi terus mengalami peningkatan riil, walaupun ketimpangan antarprovinsi masih cukup tinggi.

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Sulawesi cenderung menurun dan berada jauh di bawah TPT nasional. Fenomena pengangguran lebih menonjol di daerah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.

Sebagian besar provinsi di Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, kecuali untuk provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, laju penurunan kemiskinan di Sulawesi adalah yang tercepat dibandingkan dengan provinsi lain. Sementara itu, terkait dengan aspek pembangunan manusia (2010), seluruh provinsi di Sulawesi menunjukkan perbaikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Umur Harapan Hidup (UHH), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Namun demikian ketidakterataan pembangunan manusia antarprovinsi masih terlihat terutama disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar dan rendahnya mutu pelayanan di daerah pedesaan dan pedalaman. Tercatat sampai saat ini masih terdapat 33 Kabupaten Tertinggal di wilayah Sulawesi yang masih memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pelayanan dasar publik.

TABEL 5.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI

Perkembangan Pembangunan	Sulawesi Utara	Sulawesi Tengah	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tenggara	Gorontalo	Sulawesi Barat
Perumbuhan Ekonomi Tahun 2011 (%)	7,4	7,7	9,7	10,4	9,8	7,7
PDRE Perkapita Dengan Migas Tahun 2010 (Rp.Ribu)	16.223	13.725	14.563	12.727	7.745	9.427
Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2011 (%)	6,02	4,0	6,58	3,26	4,26	6,85
Persentase Penduduk Miskin, September 2011 (%)	6,46	10,04	10,27	14,61	16,02	13,31
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010	75,36 (Peningkat 21)	71,14 (Peningkat 22)	72,62 (Peningkat 19)	70,00 (Peningkat 23)	70,28 (Peningkat 24)	66,64 (Peningkat 25)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010	67,37	62,43	61,99	63,87	58,99	63,31
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010	71,35	65,37	62,45	64,25	57,67	63,15
Umur Harapan Hidup Tahun 2010 (Tahun)	72,22	66,00	70,00	67,80	66,82	67,20
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 (Tahun)	8,89	8,00	7,84	8,11	7,38	7,11

Sumber : Badan Pusat Statistik

Di bidang infrastruktur, total panjang jaringan jalan di Sulawesi meningkat dari 75.671 km pada tahun 2008 menjadi 81.259 km pada tahun 2009, atau dengan kata lain terjadi

penambahan jalan sepanjang 5.588 km. Namun kualitas jalan ternyata mengalami penurunan. Pada tahun 2008 - 2009 persentase jalan dengan kondisi baik menurun dari 42,44 persen menjadi 40,11 persen. Sejalan dengan hal itu persentase jalan dengan kondisi rusak berat meningkat dari 14,83 persen menjadi 21,15 persen.

Sementara itu, sektor komunikasi dan informatika, hingga tahun 2011 dalam penyediaan jasa akses telekomunikasi telah mencakup 3.471 desa USO dan internet di 799 desa ihukota kecamatan USO.

Sedangkan luas jaringan irigasi Sulawesi (2011) mencapai 1,02 juta hektar atau sekitar 14 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia. Dari total 1,02 juta hektar daerah irigasi tersebut, hanya sekitar 33,56 ribu hektar (3,28 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, antara lain Waduk Bili-Bili dan Waduk Ponre-Ponre di Sulawesi Selatan. Dari sisi ketersediaan tampungan air, daya tampung air (storage) perkapita Pulau Sulawesi adalah sebesar 43,24 m³/kapita, lebih kecil dari daya storage perkapita nasional sebesar 52,31 m³/kapita.

Pada tahun 2010 Wilayah Sulawesi memiliki kontribusi terhadap produksi nasional sebesar 10,82 persen, 14,96 persen, 6,84 persen, 2,59 persen, dan 6,89 persen berturut-turut untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, dan daging sapi. Dalam produksi perikanan nasional wilayah Sulawesi merupakan wilayah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap (Tuna). Sementara itu, wilayah Sulawesi memiliki kekayaan cadangan minyak bumi (49,79 MMSTB), gas bumi (4,23 TSCJ) dan batubara (233,10 Juta ton). Dari sisi luas kawasan hutan, wilayah Sulawesi memiliki 12,4 juta hektar hutan dengan laju deforestasi rata-rata sekitar 173 ribu hektar/tahun (tahun 2002-2003).

Dalam hal pertahanan dan keamanan, wilayah Sulawesi bagian utara yang berdekatan dengan Filipina sangat rawan dengan tingginya konflik separatisme serta penyusupan jaringan sistemik teroris, penyelundupan senjata api dan barang-barang berbahaya lainnya.

5.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sulawesi

Tujuan pembangunan wilayah Sulawesi dalam tahun 2013 adalah untuk:

1. Meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat serta pelayanan publik dasar di Wilayah Sulawesi;
2. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara.
3. Memantapkan peran Wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional;
4. Memantapkan wilayah Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan.
5. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 30 persen dari luas Wilayah Sulawesi;
6. Memastikan keberlanjutan layanan telekomunikasi dan internet, percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan prasarana air baku bagi PDAM, pembangunan intake dan jaringan air baku, pembangunan dan rehabilitasi waduk, dan penurunan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman pada penduduk dan jalur transportasi utama.

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya standar dan kualitas hidup serta aksesibilitas masyarakat Sulawesi terhadap pelayanan dasar publik wilayah Sulawesi yang ditunjukkan dengan meningkatnya berbagai indikator pembangunannya yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, serta usia harapan hidup (Tabel 5.2 dan 5.3).
2. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara.
3. Meningkatnya kontribusi wilayah Sulawesi sebagai

hambang pangan nasional.

4. Berkembangnya wilayah Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan.
5. Terjaganya dan terelabilitasnya kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas Wilayah Sulawesi;
6. Keberlanjutan dalam layanan telekomunikasi dan internet, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasidi Lalue, Torosik, Raudangan, Lambanda Tomme, Kaluku, Paseloreng, dan Kerala kalaroe, pembangunan prasarana air baku di Pilolyanga, pembangunan *intake* dan jaringan air baku di Timboro Kopi, pembangunan dan rehabilitasi waduk, tertanganinya abrasi pantai di Pantai Kakorotan dan Pantai Sampolawa;

TABEL 5.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2013

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ (%)	Kemiskinan ²⁾ (%)	Pengangguran ³⁾ (%)
Sulawesi Utara	7,10 - 7,80	6,92	9,50 - 8,63
Sulawesi Tengah	8,88 - 9,82	13,40	5,50 - 4,00
Sulawesi Selatan	7,50 - 8,50	8,29	5,80 - 5,23
Sulawesi Tenggara	8,00 - 8,5	13,2	4,00 - 3,00
Gorontalo	7,00 - 8,00	19,35	3,65 - 2,32
Sulawesi Barat	11,50 - 12,00	8,17	3,05 - 2,00

Sumber: Proyeksi Bappenas, BPS, Susenas

Keterangan: ¹⁾ Pertumbuhan Ekonomi (*angka sementara*): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

²⁾ Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

³⁾ Pengangguran (*angka sementara*): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja

TABEL 5.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾	Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾	Umur Harapan Hidup ³⁾
Sulawesi Utara	10	9,08	75,42
Sulawesi Tengah	32	8,19	71,39
Sulawesi Selatan	25	8,60	70,8
Sulawesi Tenggara	26	8,13	71,39
Gorontalo	27	8,50	69,5
Sulawesi Barat	23	8,40	71,07

Sumber : Proyeksi Bappenas (angka acuan); BPS; Susenas

Keterangan : ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia

²⁾ tahun per 1000 kelahiran hidup

³⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas.

⁴⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

5.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan wilayah Sulawesi Tahun 2013 diarahkan sebagai Pusat Produksi dan pengolahan hasil pertanian (padi, jagung dan sebagainya), perkebunan (kakao, cengkeh, kelapa, kelapa sawit dan sebagainya), perikanan, lumbung pangan nasional, pengembangan gugus (*cluster*) industri makan dan minuman, jalur wisata alam, serta pertambangan nikel.

Untuk mendukung arah pengembangan tersebut, strategi pengembangan yang dilakukan adalah:

1. Mengembangkan Manado - Bitung, Maminasata, Gorontalo, Palu, dan Kendari yang berorientasi pada upaya pembangunan kawasan industri dan jasa skala nasional sebagai sebagai Pusat Produksi dan dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional, dan pengembangan gugus (*cluster*) industri makan dan minuman.
2. Meningkatkan produksi, efisiensi, dan produktifitas tanaman pangan dan perkebunan, serta perikanan tangkap.
3. meningkatkan intensitas perhubungan laut, integrasi jaringan perhubungan udara, dan kapasitas pelayanan pelabuhan Makassar dan Bitung.

4. Meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik dan diversifikasi sumber energi primer.
5. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja, memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan efektivitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

5.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Sulawesi

Isu strategis dan kegiatan strategis provinsi di wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

Provinsi Sulawesi Utara

1. Pemantapan sebagai Global Hub di Kawasan Timur Indonesia dengan kegiatan strategis Penyusunan Master Plan International Hub Port Bitung;
2. Peningkatan konektivitas Manado-Bitung dengan kegiatan strategis Pembangunan Jalan Toll Manado-Bitung;
3. Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Bitung - Gorontalo dengan kegiatan strategis Perencanaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bitung-Gorontalo;
4. Pencapaian Millenium Development Goals melalui kegiatan strategis pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan;
5. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dengan kegiatan strategis pembangunan infrastruktur.

Provinsi Sulawesi Tengah

1. Peningkatan kualitas Industri dan Lapangan Kerja Berkualitas dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan Industri Rumput Laut Yang Dapat Menyerap Tenaga Kerja; (ii) Pembangunan Industri Rotan Yang Dapat Menyerap Tenaga Kerja; (iii) Pembangunan Industri Kakao Yang Dapat Menyerap Tenaga Kerja;
2. Peningkatan Investasi di Daerah dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Industri Palu; (ii) pembangunan jaringan yang terkoneksi dengan perbankan Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Suply Kelistrikan Pembangunan Lapangan Terbang Morowa

- dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan Bandara Kasiguncu Poso; (ii) Perpanjangan Runway Bandara Muliana Palu; (iii) Pembangunan Jalan Mamboro - ParigiMpu; (iv)Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara Syukuran Aminudin Amir Luwuk;
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan strategis pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI);
 5. Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan sekolah kejuruan pertanian; (ii) Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi; (iii) Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Provinsi Sulawesi Selatan

1. Peningkatkan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Padi dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 3.570 Ha dan jaringan tata air tambak 24.000 Ha, Rehabilitasi jaringan irigasi 92.204 Ha dan jaringan tata air tambak 365 Ha, Pelaksanaan pemabangunan 17 waduk dan 4 embung, rehab waduk 2 buah, pembangunan air baku dengan kapasitas 2,50 m³/det, Rehab prasarana air baku 0,70 m³/det, dan Pembangunan prasarana pengendalian banjir 0,68 Km; (ii) Pemulihan produksi dan kualitas kakao dan pembinaan kakao lestari; (iii) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (embung dan SILO Dryer) serta Peningkatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT); (iv)Fasilitasi penyediaan benih, operasional pelayanan sertifikasi, perlindungan tanaman dan pengendalian
2. Pembangunan Industri Pengolahan dengan kegiatan strategis (i) Pengembangan Industri Mobil Serbaguna/Mobil Toko Untuk UKM dan Upaya Akselerasi Dominasi Sektor Pertanian Ke Sektor Industri Pengolahan; (ii) Pengembangan mesin industri alsintan untuk mendukung industri pengolahan; (iii) Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan; (iv) Pendirian rumah coklat, tempat showroom, pusat promosi dan pemasaran coklat, pusat demo mesin pengolahan proses olahan dari biji kakao menjadi coklat,

- pusat data dan informasi pemasaran; (v) Pengembangan intensifikasi tani rakyat dan industri gula.
3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah untuk Perkuatan Konektivitas Regional dan Nasional dengan kegiatan strategis (i) Preservasi jalan 1530,67 Km, Pembangunan jembatan 16,449 m, Pelebaran jalan 73,17 Km, Pembangunan fly over/underpass 800 MK dan rekonstruksi jalan 30,32 Km; (ii) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan; (iii) Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas LLA; (iv) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandara;
 4. Pemenuhan kebutuhan energi dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan PLTMH; (ii) Pembangunan jaringan gas kota; (iii) Pembangunan PLTA Pimrang Bakar II (2 x 63 MW); (iv) Pembangunan PLTS; (v) PLTU Talalar Baru (2 x 100MW)
 5. Peningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan dengan kegiatan strategis (i) penyediaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan jenjang pendidikan dasar; dan (ii) peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah.

Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Alam dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan Pusat Industri Perlambangan; (ii) Pembangunan Pusat Industri Pengolahan Kakao; (iii) Pembangunan Pusat Industri Perikanan dan Rempul Laut; (iv) Pembangunan Pusat Industri Pariwisata * Dukungan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Pusat-pusat Industri; (v) Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian, Perikanan dan Perekonomian Lainnya; (vi) Pengembangan Sarana Prasarana energy; (vii) Pengembangan System Pelayanan Perizinan Satu Pintu (One Stop Service); (viii) Penyiapan Regulasi untuk Mendukung Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Industrialisasi;
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Pencapaian (IPM) target Millennium Development Goals (MDGs) dengan kegiatan strategis yang meliputi (i) peningkatan pendidikan;

- dan (ii) penjaminan kepastian pendidikan layanan SMP
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Wilayah dengan kegiatan strategis (i) Pembangunan Jalan dan Jerabatan yang menghubungkan Sentra Produksi dan Pengolahan; (ii) Pembangunan Jalan dan Jembatan yang menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan (Perkotaan) di Seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara; (iii) Pengembangan Sarana dan Prasarana pengelolaan Sumberdaya Air; (iv) Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; (v) Pembangunan Sarana Prasarana Kewilayahan (Bandara, Pelabuhan, Rumah Sakit, Pertokoan, Perhotelan; (vi) Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu yang Menghubungkan Seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara; (vii) Mengembangkan Sistem Telekomunikasi yang Mampu Menjangkau Seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara;
 4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Manusia pada beberapa Bidang Keahlian serta perlu ditingkatkannya Kompetensi, Profesional dan Disiplin Pengelolaan Pemerintah dengan kegiatan strategis; (i) Peningkatan kebutuhan tenaga medis, tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli pertanian dalam arti luas; (ii) Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah; (iii) pelaporan hasil-hasil pembangunan, peningkatan kinerja & disiplin aparatur.

Provinsi Gorontalo

1. Peningkatan Infrastruktur Pembangunan Jalan, Pelabuhan dan Sarana Transportasi Dalam Mendukung Konektivitas Terhadap Sentra Ekonomi Rakyat dan Produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dengan kegiatan strategis (i) Produktivitas Sektor Pertanian dan ketahanan pangan; (ii) Perhubungan Ruas Jalan Paguyaman - Tolango - Paris - Jangala - Pel. Anggrek; (iii) Pembangunan Jalan outer ring road; (iv) Pelabuhan Gorontalo (Dermaga III / D)
2. Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan strategis mencakup (i) pengembangan infrastruktur sekolah; (ii) peningkatan kualitas guru; (iii) pengembangan Balai Diklat Tekno Agro; dan (iv) pengembangan Politeknik Gorontalo (Poligon) menjadi Polteknas;
3. Pengembangan Energi Untuk Mendukung Industrialisasi dengan kegiatan strategis (i) Pengembangan Geothermal; (ii)

Pengembangan energi terbarukan; (iii) Pengembangan Biomassa energy.

4. Pengembangan Wilayah Strategis dengan kegiatan strategis (i) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo - Paguyaman - Kwandang (Gopandang); (ii) Pembangunan Pelabuhan Laut (Dermaga) dan Bandar Udara
5. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan kegiatan strategis (i) Peningkatan produksi jagung 1 juta ton (sistem ekstensifikasi dan intensifikasi), dan pengembangan gendaradi/sejuta minapadi; (ii) Peningkatan Produksi ikan Budidaya & Rumput Laut dan ikan tangkap; (iii) Pengembangan policulture budidaya air payau; (iv) Pengadaan ternak sapi;

Provinsi Sulawesi Barat

1. Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kegiatan strategis (i) Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak; (ii) Penanggulangan Penyakit Menular; (iii) Penanggulangan Kasus Gizi Buruk dan Kurang; (iv) Peningkatan SDM Kesehatan; (v) Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan (Pergadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit)
2. Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan pendidikan dengan kegiatan strategis (i) penyediaan sarana prasarana Universitas Sulawesi Barat; (ii) penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMA dan SMK; (iii) penyediaan layanan pendidikan masyarakat; (iv) penjaminan kepastian layanan SD; (v) penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan SMA dan SMK.
3. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Belang-belang, Kabupaten Mamuju dengan kegiatan strategis Pembangunan Pabrik Industri Hilir Pengalasan Kakao;
4. Pembukaan jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan kegiatan strategis (i) Peningkatan Struktur Jalan Provinsi; (ii) Pembangunan Jaringan Irigasi; (iii) Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi; (iv) Pemeliharaan dan Penggantian Jembatan ; (v) Peningkatan Struktur Jalan Provinsi
5. Pengurangan Angka Kemiskinan, khususnya yang terkait dengan program klaster 4 (Program Pro Rakyat) dengan kegiatan strategis ; (i) Pembinaan Usaha Mina Pedesaan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan); (i) Pembangunan Listrik Pedesaan

uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, Kementerian/Lembaga, sasaran, target, dan pagu indikatif di setiap provinsi di Sulawesi dapat dilihat dalam **Lampiran Bah 5**.

5.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Sulawesi

Arah kebijakan pengembangan MP3EI untuk Koridor Ekonomi Kalimantan memperkuat arah pengembangan wilayah Sulawesi dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013, yakni mengembangkan Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai pusat produksi dan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Koridor Ekonomi Sulawesi oleh pemerintah pusat pada tahun 2013 adalah:

1. Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan laut Bitung, Sulawesi Utara di Provinsi Sulawesi Utara
2. Pembangunan faspel Tahuna di Provinsi Sulawesi Utara
3. Pengembangan faspel Lirung di Provinsi Sulawesi Utara
4. Penanganan Jalan Atinggola – Maelang – Kaiya (121,5 Km) di Provinsi Sulawesi Utara
5. Pembangunan SPAM Kota Bitung 40 lt/lt di Provinsi Sulawesi Utara
6. Penanganan jalan Parigi - Poso - Tentena - Tidantana (293,2 km) di Provinsi Sulawesi Tengah
7. Pembangunan SPAM Kota Palu 300 lt/lt di Provinsi Sulawesi Tengah
8. Pembangunan SPAM Kota Poso 300 lt/lt di Provinsi Sulawesi Tengah
9. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Sulawesi Tengah
10. Penanganan jalan dari Siwa - Pare-pare - Barru - Maros - Makassar (312,9 Km) di Provinsi Sulawesi Tengah
11. Penanganan Jalan Maros - Watampone-Pelabuhan Bajo E. (158,6 Km) di Provinsi Sulawesi Tengah
12. Penanganan jalan dari Batas Sultra - Malili - Masamba - Palopo - Siwa (317,9 Km) di Provinsi Sulawesi Tengah
13. Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Garongkong di Provinsi Sulawesi Tengah
14. Perluasan Pelabuhan Makassar (*Makassar New Port*) di

Provinsi Sulawesi Tengah

15. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Sulawesi Tengah
16. Penanganan jalan Sp-Torohulu- Lainya-Kendari (127 Km) di Provinsi Sulawesi Tenggara
17. Penanganan Jalan Kendari - Asera 125.4 km di Provinsi Sulawesi Tenggara
18. Penanganan jalan Kolaka Utara - Lasusua - Bts. Sulsel di Provinsi Sulawesi Tenggara
19. Pelabuhan Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara
20. Pelabuhan Bau – Bau di Provinsi Sulawesi Tenggara
21. Pengembangan Pelabuhan Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara
22. Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan laut Bungkutoko di Provinsi Sulawesi Tenggara
23. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi Sulawesi Tenggara
24. Lanjutan Pembangunan Faspel laut Anggrek di Provinsi Gorontalo
25. Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan Gorontalo di Provinsi Gorontalo
26. Penanganan Ruas Jalan Majene - Tapalang - Mamuju (143,1 km) di Provinsi Sulawesi Barat
27. Pembangunan Jalan Akses Bandara Tanpa Padang di Provinsi Sulawesi Barat
28. Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan laut Belangbelang di Provinsi Sulawesi Barat

Uraian proyek MP3EI tahun 2013 yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat di setiap provinsi dijabarkan dalam **Lampiran Bab 5**.

Rencana investasi yang akan dilakukan oleh BUMN, Swasta, KPS, dan APBD, adalah sebagai berikut:

BTM/N

1. Pengembangan Lapangan Panas Bumi Labencong Unit IV 20MW, Kab. Tomohon, di Provinsi Sulawesi Utara
2. Pengembangan Lapangan Panas Bumi Kotamobagu 4x20MW, Kab. Kotamobagu, di Provinsi Sulawesi Utara
3. Pembangunan PLTP Kotamobagu 4x20MW, Kab. Kotamobagu, di Provinsi Sulawesi Utara
4. Penambahan Armada Kapal Ferry Re-ro Lintas Bitung - Ternate 1 unit (1000 GT) di Provinsi Sulawesi Utara
5. Pekerjaan Upper Deck lantai Dermaga Tahap 1 di Bitung di Provinsi Sulawesi Utara
6. Pembangunan PLTM (Sasarino 1MW Tomini II 2x1MW Sawidage II 1MW), PLTU (Leak 2x3MW Kolomodale 2x3MW Arqiana 2x3MW Toli-toli 2x3MW Bangkir 2x3MW Tambu 2x3MW), PLTG Luwuk 10MW di Provinsi Sulawesi Tengah
7. Relokasi DPPH Hasanudin & Pipanisasi Avtur Instalasi Makassar ke DPPH Hasanuddin di Provinsi Sulawesi Selatan
8. Pembangunan PLTM Ratalimbong-Kolaka 2MW, PLTU Sulsel Baru 2,50MW (1114 M), PLTG Sulsel Baru 50MW dan 100MW, PLTD Selayar 2MW di Provinsi Sulawesi Selatan
9. Pengerukan Kolam Pelabuhan Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan
10. Program EBT dan jaringan (PLTS 23.583 unit, PLTMI 1.326 unit, PLT Angin 1.200 unit, Gardu Distribusi 1.820 unit, JTM 6.550 kms, JTR 5.380 kms, PLTD 18 unit di Provinsi Sulawesi Selatan
11. Pemantapan Pelabuhan Utama Makassar - Pengerukan Kolam Pelabuhan Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan
12. Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin - Pembangunan MRO di Kawasan Bandar Lama di Provinsi Sulawesi Selatan
13. Pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin - Pembangunan Terminal II di Kawasan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan
14. Pembangunan Bus Rapi Transit (BRT) Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan
15. Pekerjaan Upper Deck lantai Dermaga 3&4 di Kendari di

Provinsi Sulawesi Tenggara

16. Pembangunan Lapangan Penumpukan Pelikemas di Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara
17. Pembangunan PLTU (Kendari 2x10 MW Wangi-wangi 2x3 MW Raba 2x3 MW), PLTM Rongi 1 MW, PLTU Raba 3 MW di Provinsi Sulawesi Tenggara
18. Penambahan Armada Kapal Ferry Ro-ro Lintas Bajoe - Kolaka 1 unit (1500 GT) di Provinsi Sulawesi Tenggara
19. Pembangunan PLTU Gorontalo Baru 2x25 MW di Provinsi Gorontalo
20. Pembangunan Proyek DS LNG, Kab. Mamuju, di Provinsi Sulawesi Barat
21. Pembangunan PLTM (Bonchau 2x2 MW Budaong-Budaong 2x1 MW Kalukku 1 MW, Balla 1 MW) di Provinsi Sulawesi Barat

Swasta

1. Pembangunan PLTI (Tahuna 2x4MW Sulut I 2x25MW), PLTP (Lahendong V 20MW Lahendong VI 20MW), PLTM (Milangodaa I 1MW Duminanga 1MW Belengan 1MW), PLTA Sawangan 2x8MW di Provinsi Sulawesi Utara
2. Pembangunan PLTA 2x20 Mw di Provinsi Sulawesi Tengah
3. Pembangunan PLTM (Ilek 3 MW Pekasalo 1 MW Mampueno 1MW Wawopada 4MW Biak I 2MW Biak II 1MW Biak III 1MW Kotaraya 1MW Bambalo III 2MW Batubota 3MW Bunta 3MW Lambangan 3MW Sawadigo I 2MW), PLTA Poso Luergy 3x65MW, PLTU (Moutong 2x4MW Luwuk 2x10MW di Provinsi Sulawesi Tengah
4. Pembangunan Utilitas Air bersih di Provinsi Sulawesi Tengah
5. Pembangunan PLTA Kareba, Kab. Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan
6. Pembangunan PLTM (Ranteballa 2x1MW Manipi 4MW dan 7MW), PLTGU Sengkang 2x60MW, PLTU (Sulsel-1 2x100MW Takalar 4x100MW Selayar 2x4MW), PLTG Sulsel Baru 50MW dan 100MW) di Provinsi Sulawesi Selatan
7. LPG storage di Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan
8. Pembangunan SPAM Kota Makassar (1000 l/s) Catatan: 1. IPA

untuk Kawasan Industri Makassar (KIMA) 2. Sumber Sungai Jeneberang di Provinsi Sulawesi Selatan

9. Penanganan SPAM Makassar dari 1000 l/s menjadi 2000 l/s
Catatan: 1. BOT 2. Sumber Pemungutan Bili-Bili tersedia 3000 l/s dengan pipa) di Provinsi Sulawesi Selatan
10. Pembangunan PLTU (Kolaka 2x10MW Bau-bau 4x10MW Kendari Baru 1 2x25MW), PLTU Sultra-kendari(2x10 MW) 236 M PLTP (Mangolo 2x5MW Lainya 2x10MW) di Provinsi Sulawesi Tenggara
11. Pembangunan PLTU Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
12. Pembangunan PLTU (Molotabu 2x10 MW Gorontalo 2x6 MW) di Provinsi Gorontalo
13. Pelaluban Teluk Bayur di Provinsi Sulawesi Barat
14. Proyek PLTA berkapasitas 350 MW di Sungai Karana Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat
15. Pembangunan PLTU Mamuju (2x7MW) di Provinsi Sulawesi Barat

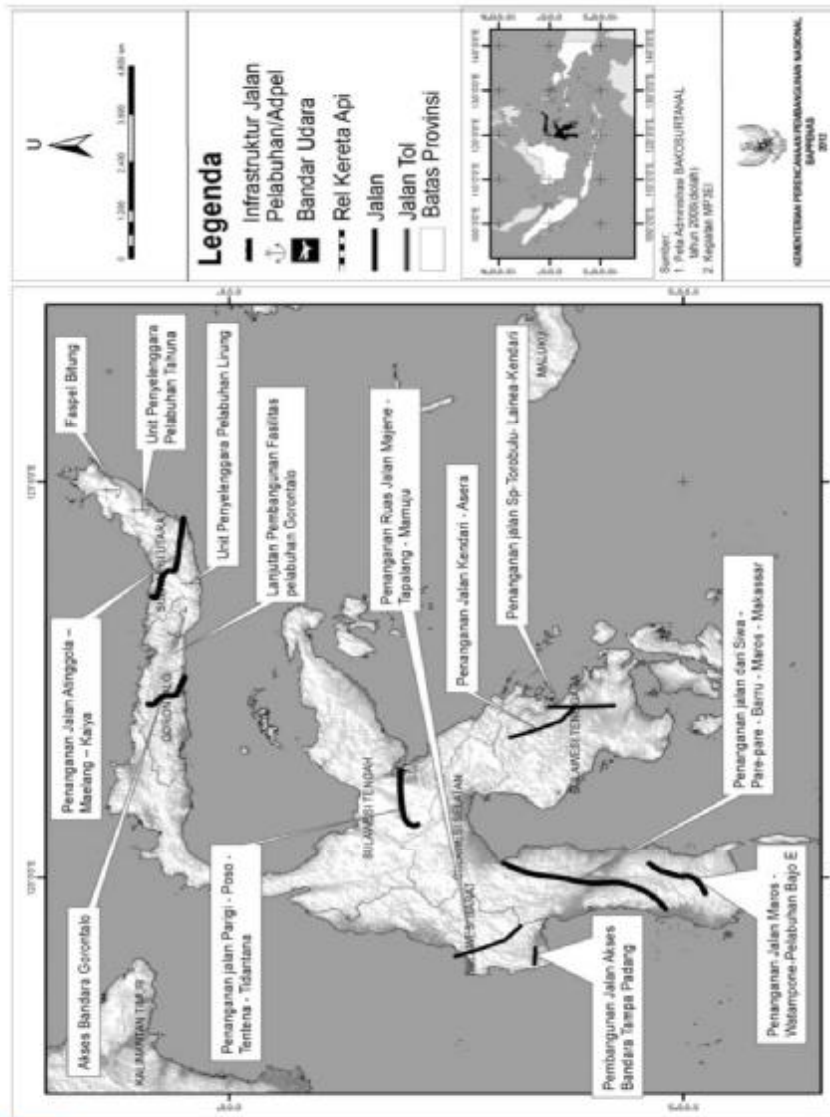
KPS

1. Bandara Kualanamu di Provinsi Sulawesi Utara
2. SPAM Kota Bitung - 40 l/s di Provinsi Sulawesi Utara
3. Pembangunan Jalan Tol Manado - Minut - Bitung/Pembangunan Jalan Express Way Manado - Bitung - 46 km (31,8 km) di Provinsi Sulawesi Utara
4. Pembangunan Jalan Palu-Parigi di Provinsi Sulawesi Tengah
5. Pembangunan pembangkit tenaga listrik (965 MW) PLTU Barru (2x50MW), PLTGU Sengkang 180 MW, PLTD Selayar (2x2MW), PLTU Jenepona 200MW, PLTD Selayar (1x2MW), PLTU Takalar (2x100MW), PLTU Selayar (2x4MW) di Provinsi Sulawesi Selatan
6. Pembangunan PLTA Buttu Batu Enrekang (2x100MW) di Provinsi Sulawesi Selatan
7. Pembangunan PLTA Bonto Batu Enrekang (2x50MW) di Provinsi Sulawesi Selatan
8. Pembangunan PLTA Keserahan Enrekang/Pinrang (2x45MW)

di Provinsi Sulawesi Selatan

9. Pembangunan PLTU Bosowa Punagaya Jeneponto (1x300MW) di Provinsi Sulawesi Selatan
10. Pembangunan PLTU PLN Punagaya Jeneponto (2x100MW) di Provinsi Sulawesi Selatan
11. Pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Makassar-Sengkang, Sengkang-Pomala-Donggi, dan Masamba-Kolaka di Provinsi Sulawesi Selatan
12. Pembangunan infrastruktur jalan dan listrik pendukung operasi produksi nikel di Kab. Kolaka dan Kab. Konawe, di Provinsi Sulawesi Tenggara
13. Pembangunan jalan poros Soroako - Bahodopi, Kab. Morowali, Sulawesi Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara

GAMBAR 5.1
PROYEK MI'3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBLAYAI
TAHUN 2013 DI WILAYAH SULAWESI



LAMPIRAN BAB 5. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Pulau Sulawesi tahun 2013

A. PROVINSI SULAWESI UTARA

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Global Hub di Kawasan Timur Indonesia				
	<i>Kegiatan Strategis : Penyusunan Master Plan International Hub Port Bitung</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi Serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di Sektor Perhubungan	Pembangunan faspel laut Bitung	1 paket	70,000.00
2	Isu Strategis : Konektivitas Jalan Toll Manado Bitung				
	<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Toll Manado-Bitung</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Jumlah jalan bebas hambatan yang dibangun	-	30,000.00
3	Isu Strategis : Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Bitung - Gorontalo				
	<i>Kegiatan Strategis : Perencanaan Pembangunan Jalur Kereta Api Bitung-Gorontalo</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				

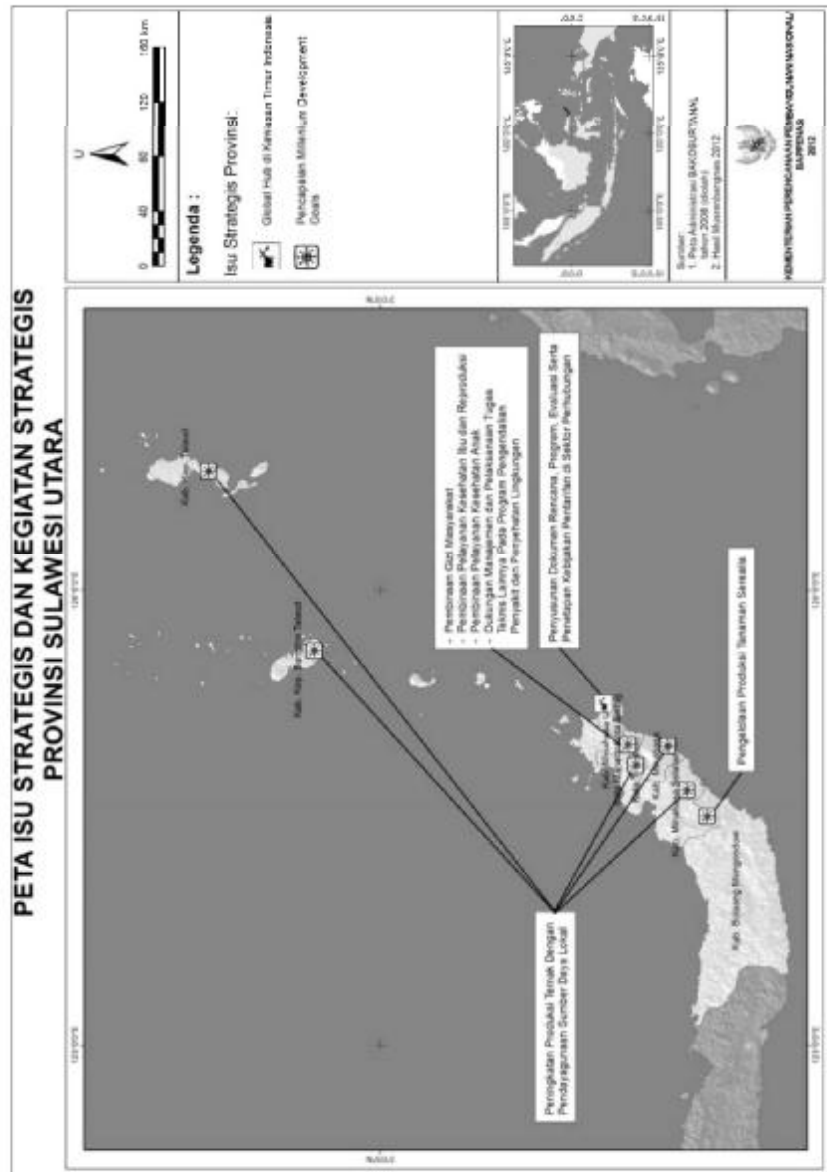
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian	Jumlah Laporan Survey/Studi Kebijakan/Masterplan/Studi Kelayakan Bidang Pembinaan & Peningkatan Perkeretaapian	-	0
4	Isu Strategis : Pencapaian Millenium Development Goals				
	Kegiatan Strategis : Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	100	3.504,00
	Kegiatan Strategis : Pencapaian swasembada daging sapi				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	Optimalisasi IB dan INKA (Pkt)	14593	153
	Kegiatan Strategis : Pencapaian Swasembada Beras dan Swawembada Pangan Berkelanjutan				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan Termasuk untuk Bahan Bakar Nabati (Ribu Ha) : SI - Ptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha)	73855	24.000,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	dan Swasembada Berkelanjutan				
Kegiatan Strategis : Pengendalian Penyakit Menular					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Upt Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya		1.147,00
Kegiatan Strategis : Menurunkan angka kematian ibu dan bayi					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	89	2.560,00
Kegiatan Strategis : Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn)	89	2.678,00
Kegiatan Strategis : Pendidikan (Pencegahan penularan penyakit HIV AIDS)					
Non Prioritas : Non Prioritas					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Persentase Penurunan Jumlah Siswa SMA yang Memiliki Perilaku Menyimpang		500,00
5	Isu Strategis : Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung				
	Kegiatan Strategis :				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitas Jalan Daerah		-	0
	Kegiatan Strategis :				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Pengembangan Perwilayahan Industri	Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III	Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)		0
	Kegiatan Strategis :				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Jumlah lulusan pendidikan yang dapat diserap oleh dunia usaha dan dunia industri (orang)		0

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2013

No	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan laut Bitung, Sulawesi Utara	Kementerian Perhubungan	10
2	Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tahuna	Kementerian Perhubungan	5
3	Unit Penyelenggara Pelabuhan Lirung	Kementerian Perhubungan	10
4	Penanganan Jalan Atinggola - Maelang - Kaiya (sulut) 121.5 km	PU	94



B. PROVINSI SULAWESI TENGAH

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Industri dan Pengembangan Lapangan Kerja Berkualitas				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Industri Rumpuk Laut Yang Dapat Menyerap Tenaga Kerja				
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah perusahaan dan instansi terkait		0
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Industri Rotan Yang Dapat Menyerap Tenaga Kerja				
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Jumlah Terminal Kayu & Rotan		0
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Industri Kakao Yang Dapat Menyerap Tenaga Kerja				
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah perusahaan dan instansi terkait		0
2	Isu Strategis : Peningkatan Investasi di Daerah				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Industri Palu				
	Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Pengembangan Perwilayahan Industri	Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III	Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)		0

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
Kegiatan Strategis : pembangunan jaringan yang terkoneksi dengan perbankan Pusat, Provinsi dan Kabupaten					
Prioritas KL : Prioritas KL					
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis	Jumlah UKM yang menerapkan aplikasi e-Bisnis		0
3	Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Suplay Kelistrikan				
Kegiatan Strategis : Pembangunan Lapangan Terbang Morowali					
Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Konstruksi landas pacu Bandara Morowali tahap I	18000 m2	18,000.00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara Kasiguncu Poso					
Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Pembangunan apron dan gedung terminal bandara Kasiguncu Poso	2 paket	13,100.00
Kegiatan Strategis : Perpanjangan Runway Bandara Mutiara Palu					
Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Pelapisan apron dan taxiway dan pembuatan apron rigid Bandara Mutiara Palu	2 paket	22,700.00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Mamboro - Parigi					
Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg dibangun baru	-	0

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
Kegiatan Strategis : Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk					
Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk	1 paket	20,700.00
4	Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia				
Kegiatan Strategis : Pembangunan BLK Internasional					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Pemberdayaan Kelembagaan Pelatihan dan Produktifitas	Jumlah BLK yang di tingkatkan kualitas		0
Kegiatan Strategis : Peningkatan dan Pengembangan Rumah Sakit Undata					
Prioritas KL : Prioritas KL					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)	1	4.921,30
Kegiatan Strategis : Pengembangan RSBI					
Prioritas Bidang : Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Persentase Kab. Memiliki Satu SMA SBI/RSBI		14.234,10

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Upaya Kesehatan	Jumlah Upt Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya	1	3.065,40
5	Isu Strategis : Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian				
Kegiatan Strategis : Pembangunan sekolah kejuruan pertanian					
Non Prioritas : Non Prioritas					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Pendidikan Menengah Pertanian	Jumlah generasi muda pertanian yang difasilitasi melalui pendidikan SMK SPP	1986	27.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi					
Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	2300 ha	48.905,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi					
Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jumlah (unit) Pengembangan Irigasi Perpipaian		0

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2013

No	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Penanganan jalan Parigi - Poso - Tentena - Tidantana (Batas Sulsel) - 293.2km.	Kementerian PU	70
2	Pelabuhan Raha	Kementerian Perhubungan	5

C. PROVINSI SULAWESI SELATAN

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Meningkatkan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Padi				
	<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi 3.570 Ha dan jaringan tata air tambak 20.000 Ha, Rehabilitasi jaringan irigasi 92.204 Ha dan jaringan tata air tambak 365 Ha, Pelaksanaan pembangunan 17 waduk dan 4 embung, rehab waduk 2 buah, pembangunan air baku dengan kapasitas 2,50 m3/det, Rehab prasarana air baku 0,70 m3/det, Pembangunan prasarana pengendalian banjir 0,68 Km</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	9105 Ha	184,400.00
	<i>Kegiatan Strategis : Pemulihan produksi dan kualitas kakao dan pembinaan kakao lestari</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao	1	1.500,00
	<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan populasi sapi untuk ternak swasembada bahan pangan</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	Pengembangan Budidaya Ternak Non Unggas (kelompok)	450	35.720,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (embung dan SILO Dryer) serta Peningkatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT)					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Jumlah (Kab) Operasional Pengembangan, Pengawasan dan Kelembagaan Alsintan (UPJA)	44	2.320,00
Kegiatan Strategis : Fasilitas penyediaan benih, operasional pelayanan sertifikasi, perlindungan tanaman dan pengendalian					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan Termasuk untuk Bahan Bakar Nabati (Ribu Ha) : SI - Ptt Padi Hibrida (Ribu Ha)	461045	134.600,00
2	Isu Strategis : Pembangunan Industri Pengolahan				
Kegiatan Strategis : a. Pengembangan Industri Mobil Serbaguna/Mobil Toko Untuk UKM b. Upaya Akselerasi Dominasi Sektor Pertanian Ke Sektor Industri Pengolahan					
Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha					
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					
	Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat	Jumlah Anggota Klaster Klaster Otomotif		0
Kegiatan Strategis : Pengembangan mesin industri alsintan untuk mendukung industri pengolahan					
Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat					
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	Jumlah laporan		0
Kegiatan Strategis : Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah	6	5.000,00
Kegiatan Strategis : Pendirian rumah coklat, tempat showroom, pusat promosi dan pemasaran coklat, pusat demo mesin pengolahan proses olahan dari biji kakao menjadi coklat, pusat data dan informasi pemasaran					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan	6	2.600,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan intensifikasi tebu rakyat dan industri gula					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	Swasembada Gula Nasional : Tebu	1000	13.900,00
3	Isu Strategis : Pembangunan Infrastruktur Wilayah untuk Perkuatan Konektivitas Regional dan Nasional				
Kegiatan Strategis : Pembangunan jalur Bus Rapid Transit (BRT)					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan	Jumlah Paket Pengembangan Bus Rapid Transit (Brt), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan	10 bus	10.000,00
Kegiatan Strategis : Preservasi jalan 1530,67 Km, Pembangunan jembatan 16.449 m, Pelebaran jalan 73,17 Km, Pembangunan fly over/underpass 800 MK dan rekonstruksi jalan 38,32 Km					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- Jumlah jalan dan jembatan yang dipreservasi - Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran - Panjang jembatan yg dibangun baru - Jumlah flyover/ underpass yang dibangun	-	917,020.00
Kegiatan Strategis : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Pengerukan dan pembangunan breakwater di Pelabuhan Makassar dan pembangunan dermaga dan pengerukan Pelabuhan Paotere	2	55,000.00
Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					

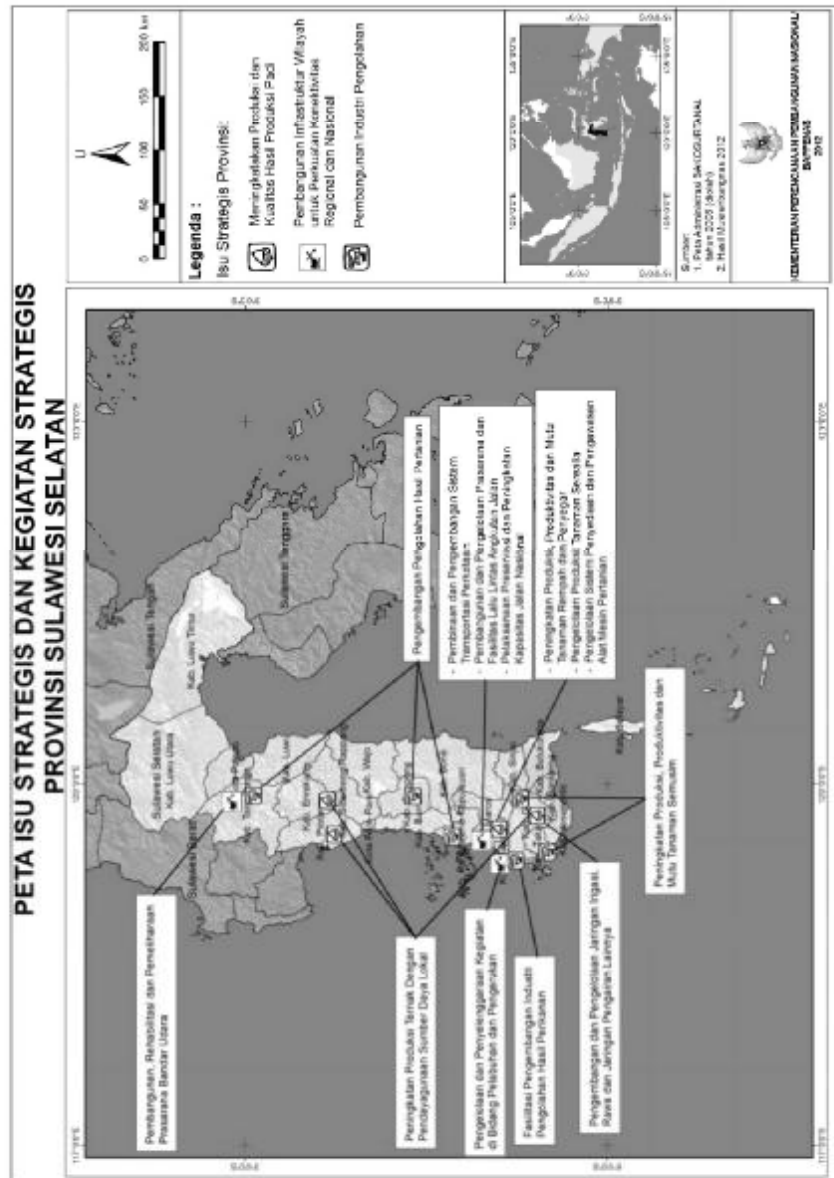
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Pengadaan pemasangan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan LLAJ	2 paket	16,900.00
Kegiatan Strategis : Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandara					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi		15.000,00
4	Isu Strategis : Pemenuhan Kebutuhan Energi				
Kegiatan Strategis : Pembangunan PLTMH					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	Pembangunan Desa Mandiri Energi Non BBN	0.00	0
Kegiatan Strategis : Pembangunan jaringan gas kota					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Penambahan Jaringan Gas Kota (Kota/Sambungan Rumah)	0.00	0
Kegiatan Strategis : Pembangunan PLTA Pinrang Bakar II (2 x 63 MW)					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	0.00	0
Kegiatan Strategis : Pembangunan PLTS					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	Pembangunan PLTS Terpusat Untuk Listrik Perdesaan	0.00	0
Kegiatan Strategis : PLTU Takalar Baru (2 x 100MW)					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	0.00	0
5	Isu Strategis : Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan				
Kegiatan Strategis : Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan dasar					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang	Persentase Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Menerima Tunjangan	175964	175.964,67

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
		Pendidikan Dasar			
Kegiatan Strategis : Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	ANGKA KELULUSAN SMP		9.846,49
Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Sakit Sayang Rakyat berlantai 3 (untuk penambahan kamar kapasitas 200 tempat tidur)					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)	Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan (New Initiative)	Disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia	13.406,00

Matriks Proyek MP3EI Tahun 2013

No	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Penanganan jalan dari Siwa - Parepare - Barru - Maros - Makassar (312,9 Km)	Kementerian PU	157,747
2	Penanganan Jalan Maros - Watampone-Pelabuhan Bajo E. (158,6 Km)	Kementerian PU	26,39
3	Penanganan jalan dari Batas Sultra - Malili - Masamba - Palopo - Siwa (317,9 Km)	Kementerian PU	66,771
4	Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Garongkong	Kementerian Perhubungan	5
5	Perluasan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port)	Kementerian Perhubungan	5
6	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	300,033



D. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Isu Strategis : Belum Optimalnya Pengelolaan dan Peningkatan Nilai Tambah Sumberdaya Alam.				
	<i>Kegiatan Strategis : * Pembangunan Pusat Industri Pertambangan * Pembangunan Pusat Industri Pengolahan Kakao * Pembangunan Pusat Industri Perikanan dan Rumpuk Laut * Pembangunan Pusat Industri Pariwisata * Dukungan Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Pusat-pusat Industri. * Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian, Perikanan dan Perekonomian Lainnya. * Pengembangan Sarana Prasana energi. * Pengembangan System Pelayanan Perizinan Satu Pintu (One Stop Service). * Penyiapan Regulasi untuk Mendukung Pelaksanaan Pengelolaan SDA dan Industrialisasi.</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral	Jumlah KP mineral yang diinventarisir di Sulteng dan Sultra	0.00	0
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Tersalurkannya Bantuan Langsung Benih Unggul (Bibu) untuk Kawasan Slptt dan Non Slptt : Benih Padi Non Hibrida (Ton)	127325	2.608,00
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal		24	9.115,00
	Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat				
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	Jumlah Bibit Rumput Laut		0
Isu Strategis : Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Pencapaian (IPM) target Millennium Development Goals (MDGs)					
Kegiatan Strategis : Peningkatan Pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan					
Prioritas Bidang : Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama					
KEMENTERIAN SOSIAL					
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	Tingkat Pengembangan Usaha		1.619,40
Kegiatan Strategis : Peningkatan Pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	RASIO RUANG KELAS - SISWA JENJANG SD		924,41
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Penyehatan Lingkungan	(1) Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (2) Persentase (%) Penduduk yang menggunakan Jemban Sehat	63,5 72	1.800,00
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	RASIO RUANG KELAS - SISWA JENJANG SMP		5.500,00
Isu Strategis : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Wilayah					
Kegiatan Strategis : * Pembangunan Jalan dan Jembatan yang menghubungkan Sentra Produksi					

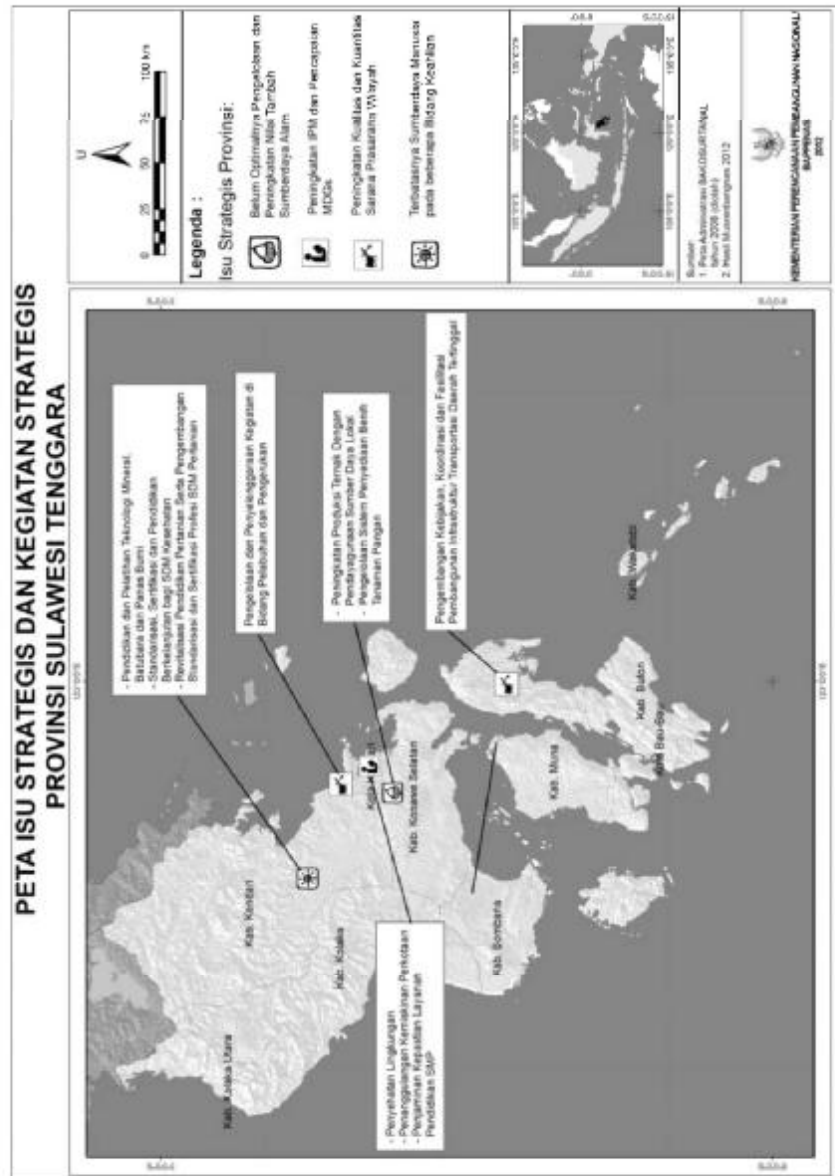
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
<p><i>dan Pengolahan. * Pembangunan Jalan dan Jembatan yang menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan (Perkotaan) di Seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara. * Pengembangan Sarana dan Prasarana pengelolaan Sumberdaya Air. * Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. * Pembangunan Sarana Prasarana Kewilayahan (Bandara, Pelabuhan, Rumah Sakit, Pertokoan, Perhotelan. * Mengembangkan Sistem Transportasi Terpadu yang Menghubungkan Seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara. * Mengembangkan Sistem Telekomunikasi yang Mampu Menjangkau Seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara</i></p>					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Pembangunan faspel Bungkutoko tahap V dan faspel Kendari	2 paket	18,700.00
Kegiatan Strategis : Pengaman Pantai Wameo Kabupaten Buton					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengaman Pantai	Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun		5,000.00
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL					
	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal	Jumlah Kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal		750
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal	Jumlah Kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal		1.500,00
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang pembangunan/pelebaran Jalan di Kaw. Strategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan	-	0
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg dibangun baru	-	0
Isu Strategis : Terbatasnya Sumberdaya Manusia pada beberapa Bidang Keahlian serta perlu ditingkatkannya Kompetensi, Profesional dan Disiplin Pengelolaan Pemerintah.					
Kegiatan Strategis : * Kebutuhan tenaga medis, tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli pertanian dalam arti luas. * Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, pelaporan hasil-hasil pembangunan, peningkatan kinerja & disiplin aparatur.					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	1. Standarisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM Kesehatan 2. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	(1) Persentase (%) Profesi Tenaga Kesehatan yang Memiliki Standar Kompetensi (2) Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan	80 1	2.095,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
			mengacu pada standar nasional pendidikan		
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Jumlah Sarana Diklat Yang Terakreditasi Standar Mutu	2	336,8
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Revitalisasi Pendidikan Pertanian Serta Pengembangan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian	Jumlah jenis profesi sdm pertanian yang terstandarisasi dan tersertifikasi	1166	17.055,00

Matriks Proyek MP3EI Tahun 2013

No	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Penanganan jalan Sp-Torobulu- Lainya-Kendari 127 Km	Kementerian PU	62,26
2	Penanganan Jalan Kendari - Asera (125,4 km)	Kementerian PU	99,93
3	Penanganan jalan Kolaka Utara - Lasusua - Bts. Sulsel	Kementerian PU	141,79
4	Pelabuhan Bau - Bau	Kementerian Perhubungan	20
5	Pengembangan Pelabuhan Kendari	Kementerian Perhubungan	10
6	Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan laut Bungkutoko, Sulawesi Tenggara	Kementerian Perhubungan	5
7	Pelabuhan Raha	Kementerian Perhubungan	5
8	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	420,360



E. PROVINSI GORONTALO

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Isu Strategis : Kurangnya Infrastruktur Pembangunan Jalan, Pelabuhan dan Sarana Transportasi Dalam Mendukung Konektivitas Terhadap Sentra Ekonomi Rakyat dan Produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Ruas Jalan Paguyaman - Tolango - Paris - Ilangata - Pel. Anggrek				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- Jumlah jalan dan jembatan yang dipreservasi - Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran	-	38,500.00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan outer ring road				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg dibangun baru	-	50,000,00
	Kegiatan Strategis : Pelabuhan Gorontalo (Dermaga III / D)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Pembangunan Dermaga Tahap III Pelabuhan Gorontalo (dermaga, talut, timbunan tanah daerah kerja pelabuhan, pekerjaan listrik)	1 paket	10,000.00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Isu Strategis : Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia					
Kegiatan Strategis : Pengembangan Bidang Kesehatan Untuk Mendukung SDM Berkualitas ; Pembangunan R.S Provinsi Rujukan					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan sesuai standar	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi standar prasarana peralatan (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)	1	2.155,80
Kegiatan Strategis : Pengembangan Infrastruktur Sekolah					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Persentase SMA Menerapkan Pembelajaran Berwawasan Kebangsaan, Lingkungan Hidup , dan Kesehatan Sekolah		0
Kegiatan Strategis : Peningkatan Kualitas Guru					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pengembangan Profesi PTK Dan Penjamin Mutu Pendidikan	Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Kependidikan Lainnya yang Mengikuti Peningkatan Profesionalisme Berkelanjutan		6.620,00
Kegiatan Strategis : Balai Diklat Tekno Agro					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Jumlah Pembelajaran Kewirausahaan		205,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
Kegiatan Strategis : Politeknik Gorontalo (Poligon) jadi Polteknas					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Tinggi	Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik	Prodi vokasi yang terakreditasi minimal B		0
Isu Strategis : Pengembangan Energi Untuk Mendukung Industrialisasi					
Kegiatan Strategis : Pengembangan Geothermal					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	0.00	0
Kegiatan Strategis : Pengembangan energi terbarukan					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan	Dokumen Kebijakan dan Program Pengembangan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan	0.00	0
Kegiatan Strategis : Biomassa energy					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Program Listrik Murah dan Hemat	478	5.900,00
Isu Strategis : Pengembangan Wilayah Strategis					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo - Paguyaman - Kwandang (Gopandang)					
Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi					
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					
	Program Pengembangan Perwilayahan Industri	Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III	Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri		0
Kegiatan Strategis : Energi (Listrik)					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Panjang jaringan distribusi (kms)	227	74,638.30
Kegiatan Strategis : Pelabuhan Laut (Dermaga)					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Pembangunan faspel laut Anggrek, Kwandang, dan Bumbulan	3 paket	17,400.00
Kegiatan Strategis : Bandar Udara					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Pelapisan runway, pembuatan taxiway, pembangunan terminal dan perluasan apron Bandar Udara Gorontalo	2 paket	98,000.00
Isu Strategis : Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan					
Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi jagung 1 juta ton dengan sistem ekstensifikasi dan					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
intensifikasi (perluasan lahan perkebunan, pengadaan benih, penggunaan teknologi pertanian/traktor dan optimalisasinya), dan pengembangan gentanadi/sejuta minapadi					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan Termasuk untuk Bahan Bakar Nabati (Ribu Ha) : SI - Ptt Jagung Hibrida (Ribu Ha)	5280 0	16.400,00
Kegiatan Strategis : Revitalisasi Danau Limboto					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengaman Pantai	Meningkatnya ketersediaan kelestarian air		27,900.00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi ikan Budidaya & Rumput Laut serta Peningkatan produksi ikan tangkap dengan membangun infrastruktur pendukung TPI, pelabuhan ikan, cool storage, kapal ikan, pengembangan sola dealer paket nelayan 2 unit, pabrik es dan rumpon					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi)		0
Kegiatan Strategis : Pengembangan policulture budidaya air payau					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya	Jumlah Diseminasi Teknologi dalam Rangka Pengembangan Teknologi Minapolitan		0
Kegiatan Strategis : Pengadaan ternak sapi					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	Optimalisasi IB dan INKA (Pkt)	1096 7	16

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2013

No	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Lanjutan Pembangunan Faspel laut Anggrek, Gorontalo	Kementerian Perhubungan	3.2
2	Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan Gorontalo	Kementerian Perhubungan	10

F. PROVINSI SULAWESI BARAT

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan kesehatan: masih tingginya penyakit menular, angka kematian bayi, gizi buruk balita dan anak-anak, angka kesehatan ibu dan belum adanya Rumah Sakit representatif (PN 3)				
	<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan anak</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn)	85	2.678,00
	<i>Kegiatan Strategis : Penanggulangan Kasus Gizi Buruk dan Kurang</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
KEMENTERIAN KESEHATAN					
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembinaan Gizi Masyarakat	Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S)	100	2.707,00	
<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan SDM Kesehatan</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya	100	1.604,00	

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
			melalui pendidikan berkelanjutan		
Kegiatan Strategis : Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan (Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit)					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	Jumlah Upt Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya	1	2.215,00
2	Isu Strategis : Optimalisasi akses dan kualitas pelayanan pendidikan: rendahnya rata-rata lama sekolah (7,1) rendahnya APM pada tingkat SMP dan SMU/SMK dan belum terdapatnya Universitas Negeri (PN 2)				
Kegiatan Strategis : Penjamin Kepastian Layanan SMP					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	APM SMP/SMPLB/PAKET B		3.471,00
Kegiatan Strategis : Penyediaan Sarana dan Prasarana Universitas Sulawesi Barat					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Tinggi	Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama	Persentase PTN/BHMN Menjadi BHPP		0
Kegiatan Strategis : Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA dan SMK					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	APK SMK		8.385,00
Kegiatan Strategis : Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	Persentase Buta Aksara > 15 Tahun	15000	7.617,76
Kegiatan Strategis : Penjamin Kepastian Layanan SD					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL					
	Program Pendidikan Dasar	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	APM SD/SDLB/PAKET A		923
Kegiatan Strategis : Penyediaan dan Peningkatan layanan Pendidikan SMA dan SMK					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	APK SMK		0
3	Isu Strategis : Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Belang-belang, Kabupaten Mamuju, dengan fasilitas Pelabuhan Kontainer Internasional yang didukung oleh ketersediaan energi dan suplai air bersih yang memadai (PN Perekonomian)				
Kegiatan Strategis : Pembangunan Pabrik Industri Hilir Pengolahan Kakao					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					
	Program Pengembangan Perwilayahan Industri	Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III	Jumlah daerah yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)		0
Kegiatan Strategis : Pembangunan Pabrik Industri Pengolahan Rotan					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pengembangan Perwilayahan Industri	Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III	Jumlah daerah yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)		0
Kegiatan Strategis : Peningkatan dan Perluasan Fasilitas Sarana Depo BBM dan Jetty Penunjang Bandara Tampo Padang					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Laporan Penambahan Kapasitas Depot	Pelapisan apron dan taxiway, pengadaan peralatan keamanan dan keselamatan.	0
Kegiatan Strategis :					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Pelapisan apron, pembuatan runway strip dan RESA, serta pengeadaan pemasangan AFL Bandara di Sulbar	2 paket	9,200.00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	0.00	0

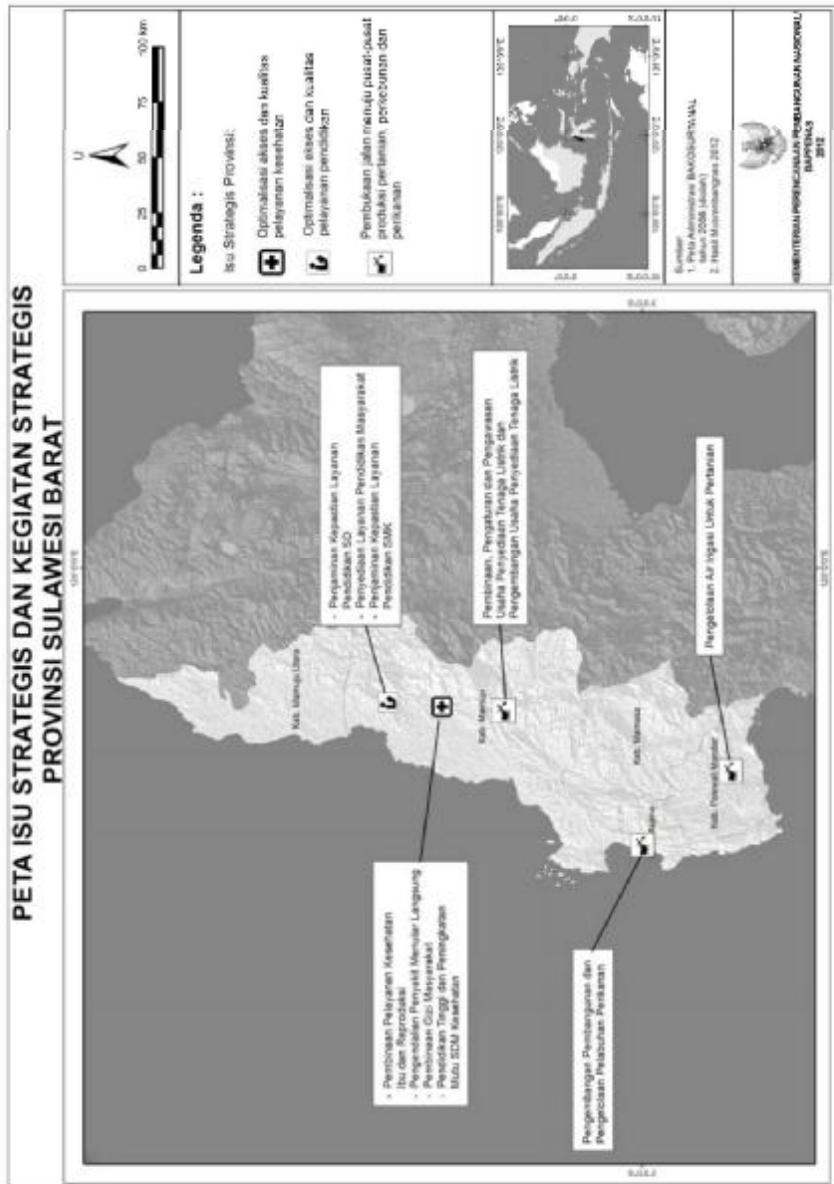
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
4	Isu Strategis : Pembukaan jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian, perkebunan dan perikanan (PN 6 : Infrastruktur)				
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan bebas hambatan yg dibangun	-	0
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Daerah Irigasi Kaluku				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan		25,000.00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Jaringan Irigasi				
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jumlah (Ha) Optimasi Jaringan Tersier (JITUT, JIDES dan Pengembangan TAM)	8000	8.000,00	
Kegiatan Strategis : Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan perikanan UPT daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi)	1	10.000,00
Kegiatan Strategis : Pemeliharaan dan Penggantian Jembatan					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pembinaan, Penyiapan Produk Pembinaan Dan Pembinaan Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan	-	0
Kegiatan Strategis : Peningkatan Struktur Jalan Provinsi					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah	Pengendalian Kepatuhan Pelaksanaan Jalan	-	0
5	Isu Strategis : Pengurangan Angka Kemiskinan ,khususnya yang terkait dengan program klaster 4 (Program Pro Rakyat) (PN4)				
	Kegiatan Strategis : Pembinaan Usaha Mina Pedesaan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan				
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Jumlah Kelompok Pembudidaya Penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP		0
Kegiatan Strategis : Pembangunan Listrik Pedesaan					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik	430	5.310,00

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2013

No	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Penanganan Ruas Jalan Majene - Tapalang - Mamuju (143.1 Km)	Kementerian PU	97,02
2	Pembangunan Jalan Akses Bandara Tampa Padang	Kementerian PU	19.1
3	Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan laut Belang-belang, Sulawesi Barat	Kementerian Perhubungan	55.9



BAB 6
PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2013

**6.1 Kondisi Wilayah
Nusa Tenggara Saat
Ini**

Kinerja perekonomian wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2011 menurun dibandingkan dengan tahun 2010. Sektor utama yang berperan dalam pembentukan PDRB yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, serta jasa-jasa. PDRB per kapita wilayah justru terus meningkat secara riil, meskipun apabila dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita nasional, PDRB wilayah Nusa Tenggara termasuk rendah.

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, namun berada diatas TPT nasional. Tingkat kemiskinan di Wilayah Nusa Tenggara juga mengalami penurunan, meskipun masih jauh di atas rata-rata nasional.

Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih jauh di bawah rata-rata nasional.

TABEL 6.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA

Perkembangan Pembangunan	NTB	NTT
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 (ADCK 2000) (%)	-3,2	5,6
PIIBS Perkapita Dengan Migas Tahun 2010 (Rp/bulan)	4.130	2.578
Persentase Pengangguran Tahun 2011 (Agustus) (%)	5,33	2,69
Persentase Kemiskinan Tahun 2011 (September) (%)	19,67	20,48
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010	65,20 (Peringkat 32)	67,36 (Peringkat 31)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010	56,02	64,61
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010	54,49	57,98
Umur Harapan Hidup Tahun 2010 (Tahun)	62,11	67,26
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 (Tahun)	6,77	6,99

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan : *) = Data Pertumbuhan c-to-c Triwulan IV 2010

Di bidang infrastruktur wilayah, total panjang jaringan jalan di Nusa Tenggara menurun dari 27.745 km pada tahun 2008 menjadi 27.297 km pada tahun 2009. Namun sebaliknya, kualitas jalan justru mengalami peningkatan, di mana persentase jalan dengan kondisi baik meningkat dari 33,7 persen menjadi 41,2 persen antara tahun 2008 dan 2009. Sejalan dengan hal itu persentase jalan dengan kondisi rusak berat sedikit menurun dari 17,7 persen menjadi 17,5 persen antara tahun 2008 dan 2009.

Dalam rangka penguatan konektivitas nasional sektor komunikasi dan informatika, capaian pembangunan di pulau Bali dan Nusa Tenggara hingga tahun 2011 antara lain meliputi penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa Berdering) di 2.593 desa USO (100% dari target) dan internet (Pusat Layanan Internet Kecamatan) di 428 desa ibukota kecamatan USO (100% dari target). Adapun pembangunan jaringan *broadband* hingga tahun 2011 oleh PT Telkom telah menjangkau 26 kabupaten/kota (65%). Kebutuhan konsumsi listrik dan rasio elektrifikasi di Nusa Tenggara juga masih tergolong rendah. Rasio Elektrifikasi tahun 2011 di Nusa Tenggara Timur baru sekitar 39,92 persen dan di Nusa Tenggara Barat 52,88 persen dan rasio desa berlistrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur 96,16 persen dan di Nusa Tenggara Barat 99,82 persen.

Luas irigasi di Wilayah Nusa Tenggara sampai dengan tahun 2007 mencapai 486,31 ribu hektar atau sekitar 7 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 26,97 ribu hektar (6 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk yaitu Waduk Batu Bulan, Batujae, Mamak, Palaperado, Pengga di NTB, Waduk Haekrit dan Tilong di NTT serta beberapa waduk di wilayah Nusa Tenggara lainnya, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai, baik melalui bendung maupun *free intake*. Dari sisi ketersediaan lampungan air, daya lampung air (storage) perkapita wilayah Nusa Tenggara adalah sebesar 39,99 m³/kapita, lebih kecil dari rata-rata daya storage perkapita nasional sebesar 52,31 m³/kapita.

Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2009 menyumbang 13,56 persen hasil produksi kedelai nasional. Untuk komoditas jagung dan kedelai, wilayah Nusa Tenggara menyumbang 5,46 persen dan 3,93 persen. Komoditas tanaman perkebunan yang menjadi unggulan di wilayah ini adalah tembakau yang

menghasilkan 30,37 persen produksi nasional. Tanaman perkebunan lain yang dihasilkan adalah kopi sebesar 2,97 persen dan kakao 1,7 persen. Produksi perikanan di Nusa Tenggara lebih bergantung kepada hasil perikanan tangkap dibandingkan dengan perikanan budidaya serta hasil rumput laut yang merupakan komoditas utama dari wilayah Nusa Tenggara.

Wilayah Nusa Tenggara juga rawan terhadap bencana alam banjir. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, dua masalah utama yang dihadapi oleh wilayah Nusa Tenggara adalah pengamanan dan pengembangan daerah perbatasan dan konflik horizontal meskipun kedua masalah ini tidak terjadi di semua provinsi di wilayah Nusa Tenggara. Selain itu, masih banyak daerah yang termasuk tertinggal di wilayah Nusa Tenggara. Di Provinsi NTB, 8 dari 10 kabupaten/kota termasuk daerah tertinggal, sedangkan di Provinsi NTT, 20 dari 21 kabupaten/kota termasuk daerah tertinggal.

6.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Tujuan pembangunan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2013 adalah untuk:

1. Meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Nusa Tenggara terhadap pelayanan publik dasar.
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Nusa Tenggara bagian Barat dan Timur.
4. Meningkatkan kontribusi wilayah Nusa Tenggara dalam perdagangan internasional.
5. Mengoptimalkan sektor unggulan di wilayah Nusa Tenggara.
6. Meningkatkan jaringan transportasi antarwilayah.
7. Meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik, dan telepon).
8. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di wilayah Nusa Tenggara.

9. Mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita (Tabel 6.2).
2. Meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di wilayah Nusa Tenggara.
3. Meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di wilayah Nusa Tenggara.
4. Berkurangnya ketimpangan kontribusi perdagangan internasional antara wilayah Nusa Tenggara bagian barat dengan Nusa Tenggara bagian timur.
5. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan laut dengan terbentuknya industri pengolahan hasil laut di wilayah Nusa Tenggara.
6. Memastikan keberlanjutan layanan telekomunikasi dan internet di wilayah USO dan memperluas jangkauan layanan broadband hingga menjangkau 29 kabupaten/kota (72,5 persen)
7. Pembangunan sistem penyediaan air baku dalam rangka pencapaian target MDGs, diantaranya pembangunan tampungan air baku Tonda Utara, pembangunan sistem jaringan air baku Bima, rehabilitasi jaringan air baku Pulau Lombok di NTB, pembangunan intake dan pipa transmisi Kolhua, Raknamo, dan Pulau Flores di NTT;
8. Percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di Daerah Irigasi (DI) Pandanduri, Rababaka Komplek, Tamutung di NTB dan DI Mbay, Nggorang, Wae Dingin, Wae Musur, Bena, Haekto di

NTT.

9. Meningkatnya jumlah tampungan dan keterseediaan air melalui pembangunan waduk Pandanduri di Lombok Timur, Waduk Tanju dan Mila di Dompu, Waduk Bintangbano di Sumbawa Barat, Waduk Mujur di Lombok Tengah, Waduk Raknanto dan Waduk Kolhua di Kupang dan Waduk Linaranutu di NTT.
10. Menurunnya resiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk dan jalur transportasi utama, dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan pengendali banjir Kota Mataram, Senggigi, dan Kota Kupang;
11. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendirian IAM, penerapan norma dan standar IAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

TABEL 6.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2013

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ [%]	Kemiskinan ²⁾ [%]	Pengangguran ³⁾ [%]
Nusa Tenggara Barat	3,45 – 3,88	18,73	2,78 – 2,55
Nusa Tenggara Timur	5,70 – 6,28	19,73	1,53 – 1,33

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

²⁾ Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

³⁾ Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

TABEL 6.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2013

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾	Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾	Umur Harapan Hidup ³⁾
Nusa Tenggara Barat	39	7,33	68,2
Nusa Tenggara Timur	28	6,89	70,91

Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk (i) pengembangan sentra produksi komoditas unggulan dan industri; (ii) Pengembangan pariwisata bahari, serta (iii) Pengembangan PKN Kupang dan Mataram sebagai pusat industri pengolahan dan komoditas unggulan dan pariwisata.

Kebijakan tersebut didukung dengan konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang tengah dituangkan kedalam pengembangan koridor Bali dan Nusa Tenggara yang berperan sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi pengembangan wilayah Nusa Tenggara diantaranya:

1. Mengembangkan fokus spesialisasi komoditas unggulan termasuk pemasarannya dengan menitikberatkan pada produksi rumput laut, jagung, kakao, peternakan, dan perikanan tangkap.
2. Meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal.
3. Mengembangkan objek pariwisata dan kinerja pembangunan kepariwisataan, yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air.
4. Meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota pesisir serta daerah tertinggal dengan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi penyebrangan dan pelabuhan laut

sehingga membentuk keterkaitan sosial-ekonomi yang kuat.

5. Meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali-Lombok-Komodo-Tana Toraja;
6. Meningkatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional, baik secara bilateral dengan Australia dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerja sama ekonomi sub-regional;
7. Meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara; serta
8. Mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai "beranda depan" Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Nusa Tenggara

Isu Strategis masing-masing provinsi di Wilayah Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

NUSA TENGGARA BARAT

Isu strategis dan kegiatan strategis pembangunan wilayah Nusa Tenggara Barat 2013, adalah sebagai berikut:

1. Prevalensi Balita Gizi dan Kasus Kematian Ibu Melahirkan, kegiatan strategisnya meliputi pengadaan peralatan untuk puskesmas, desa siaga tuntas, insentif untuk kader posyandu, dan pengadaan alat-alat kesehatan dan fasilitas RSU Rujukan Provinsi, serta pengadaan alat pemeriksaan Napza.
2. Penyediaan Infrastruktur Wilayah Yang Memadai, kegiatan strategisnya meliputi: (i) Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Embung-Embung; Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Air Tanah; Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai; (ii) Pembangunan Bendungan Pandanduri Swangi Kab. Lombok Timur; Pembangunan Bendungan Rababaka Kab. Dompu; (iii) Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Carik Kab. Lombok Utara; Pembangunan Fasilitas

Pelabuhan Waworada Kab. Bima; Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat; Pelabuhan Badas Kab. Sumbawa; (iv) Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Jembatan (Jalan Nasional dan Jalan Strategis Nasional). Usulan penangangan: Senggigi-Pemenang;Sejorong-Telar Lunyuk; Dompu-Hu'u; Kempo-Kesi-Hodo;Lunyuk Ropang-Sekokat; Bima-Tawali; Melayu-Kelo; Penujak-Kuta; RII-Malaram; Sunset Buolevard Ampenan

3. Peningkatan Pelayanan Pendidikan, kegiatan strategisnya yaitu: Penambahan Parsi untuk BSM dari SD,SMP,SMA dengan asumsi 40% dari total jumlah murid; Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMK.
4. Pengembangan Kawasan Pariwisata, kegiatan strategisnya yaitu: Pembangunan fasilitas pariwisata.
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, kegiatan strategisnya yaitu: Pengembangan Industri Kecil dan menengah; Wirasaha Baru/Koperasi Berkualitas; Program Keluarga Harapan (PKH).

NUSA TENGGARA TIMUR

Isu strategis dan kegiatan prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara Timur 2013, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang terstandar dan persoalan mutu pendidik dan peserta didik, kegiatan strategisnya yaitu: Sertifikasi guru, untuk meningkatkan proporsi guru bersrtifikasi dari 24% menjadi sekurangnya 50%.
2. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas kesehatan, kegiatan strategisnya yaitu: Fasilitasi peningkatan 147 puskesmas non rawat nginap menjadi puskesmas rawat nginap.
3. Peningkatan Konektifitas Wilayah, kegiatan strategisnya yaitu: Pembangunan bandara Surabaya II (Mbay).
4. Pengembangan Sektor Unggulan Daerah, kegiatan strategisnya yaitu: Pengembangan pusat pembibitan sapi Timor di Besipae TTS dan Sapi Ongole di Kabaru - Sumba Timur; Penembangan kakao melalui perbanyak benih kakao dan perluasan areal tanam kakao; Pengembangan jagung melalui pengembangan pusat perbenihan jagung

(7 lokasi) dan pengadaan traktor roda 4; Pengembangan usaha perikanan tangkap melalui pengadaan armada perikanan tangkap 30GT sebanyak 60 unit dan 60 GT sebanyak 40 unit.

5. Pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan; kegiatan strategisnya yaitu: Peningkatan jalan akses desa perbatasan wilayah Kab. Belu, TTT dan Kab. Kupang dan jalan lingkaran luar perbatasan sepanjang 255 km; Pembangunan embung/waduk Raknomo di Kab. Kupang; Aesesa di Kab. Ngarai dan Kolena di Kota Kupang; serta pemangunan 500 embung kecil di 20 kabupaten se NTT.

Uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, Kementerian/Lembaga, sasaran, target, dan pagu indikatif di setiap provinsi di Nusa Tenggara dapat dilihat dalam **Lampiran Bab 6**.

6.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Nusa Tenggara

Arah Kebijakan Pengembangan MP3EI untuk wilayah Nusa Tenggara sebagai bagian dari koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara, memperkuat arah pengembangan wilayah Nusa Tenggara, dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013, yakni mengembangkan koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan di Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2013 adalah:

1. Penanganan Jalan dari Benete - Simpang Negara (61,8 Km) mendukung kegiatan industri perikanan & rumput laut (72,1km) di Provinsi NTB
2. Penanganan Jalan dari Bangau - Dompu - Ramba - Lb. Bajo mendukung industri rumput laut di Provinsi NTB
3. Pembangunan faspel laut pelabuhan Lombok di Provinsi NTB
4. Pembangunan bendung (waduk) Pandauduri di Provinsi NTB
5. Pembangunan waduk Rababeka di Dompu di Provinsi NTB
6. PLTU Lombok Mataram 1 x 25 MW di Provinsi NTB
7. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi NTB
8. Penanganan Jalan Boluk - Tenau - Kupang - Oesapa - Oesapa (59,1 Km) di Provinsi NTT
9. Penanganan jalan nasional yang mendukung akses ke Bandara Mbay: Bajawa - Ende NTT (125,7km) di Provinsi NTT
10. Penanganan Fasilitas Pelabuhan Laut Komodo untuk mendukung Pariwisata di Provinsi NTT
11. Pembangunan Pelabuhan Rakyat Namonsain/Nomensabu (Kupang) di Provinsi NTT
12. Pengembangan Pelabuhan Tenau (Kupang) di Provinsi NTT
13. Pengembangan sistem jaringan kabupaten Kupang 100 lt/dt di Provinsi NTT

14. PLTP Uhmhu (2x2,5 MW) di Provinsi NTT
15. PLTU Atambua(4x6 MW) di Provinsi NTT
16. Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Provinsi NTT

Urutan proyek MP3EI tahun 2013 yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat di setiap provinsi dijabarkan dalam **Lampiran Bab 6**.

Rencana investasi yang akan dilakukan oleh BUMN, Swasta, KPS, dan APBD adalah sebagai berikut:

RIJMN

1. Pembangunan dan Persiapan Pengoperasian Bandara Internasional Lombok, di Lombok Tengah OPR di Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. PLTU 2 NTB - Lombok 2x25 MW di Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. PLTU 1 NTB - Bima 2x10 MW di Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Pengembangan Transmisi total 324 kms di Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. WKP Sembalun 20 MW di Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. Pengembangan Transmisi total 78 kms di Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. PLTU NTB Lombok Baru 2x25 MW di Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. PLTU 1 NTT - Ende 2x7 MW di Provinsi Nusa Tenggara Timur
9. PLTU 2 NTT – Kupang (2 x 16,5 MW) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. Pengembangan Transmisi total 590 kms di Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Terminal peti kemas Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur

12. Penambahan Armada Kapal Ferry Ro-ro Lintas Lembar - Padang Bay 3 unit (1500 GT & 2000 GT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
13. Penambahan Armada Kapal Ferry Ro-ro Lintas Sape - Lb.Bajo 1 unit (1500 GT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
14. Penambahan Armada Kapal cadangan Ferry Ro-ro di wilayah Tengah (Lembar) 1 unit (2000 GT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
15. Rehabilitasi bandara Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Swasta

1. Pengembangan Cruise port - Larahar – Selatong di Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. WKP Hulu Daha 2x10 MW di Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Air Bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. PLTH Surabaya baru 1 FTP 2 2x10 MW di Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. PLTH 2 NTB – Lorabek (2 x 25 MW) di Provinsi Nusa Tenggara Barat
6. PLTH Sumbawa Baru 2x15 MW di Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. PLTP Hulu 20 MW di Provinsi Nusa Tenggara Barat
8. Perbaikan dan Pengoperasian dua kapal induk Mina Jaya Niaga untuk penangkapan tuna di Kab. Nagaken, di Provinsi Nusa Tenggara Timur
9. PLTU Larantuka 2x4 MW FTP2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur
10. PLTU Waingapu 2X4 MW FTP2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Pengembangan Transmisi total 30 kms di Provinsi Nusa Tenggara Timur
12. Perbaikan dan Pengoperasian dua kapal induk Mina Jaya Niaga untuk penangkapan tuna di Maumere, Kab. Sikka, di Provinsi Nusa Tenggara Timur

13. Perbaikan dan Pengoperasian dua kapal induk Mina Jaya Niaga untuk penangkapan tuna di Larangluka, Flores Timur, di Provinsi Nusa Tenggara Timur
14. Pengoperasian dua kapal induk Mina Jaya Niaga untuk penangkapan tuna di Kab. Lembata, di Provinsi Nusa Tenggara Timur

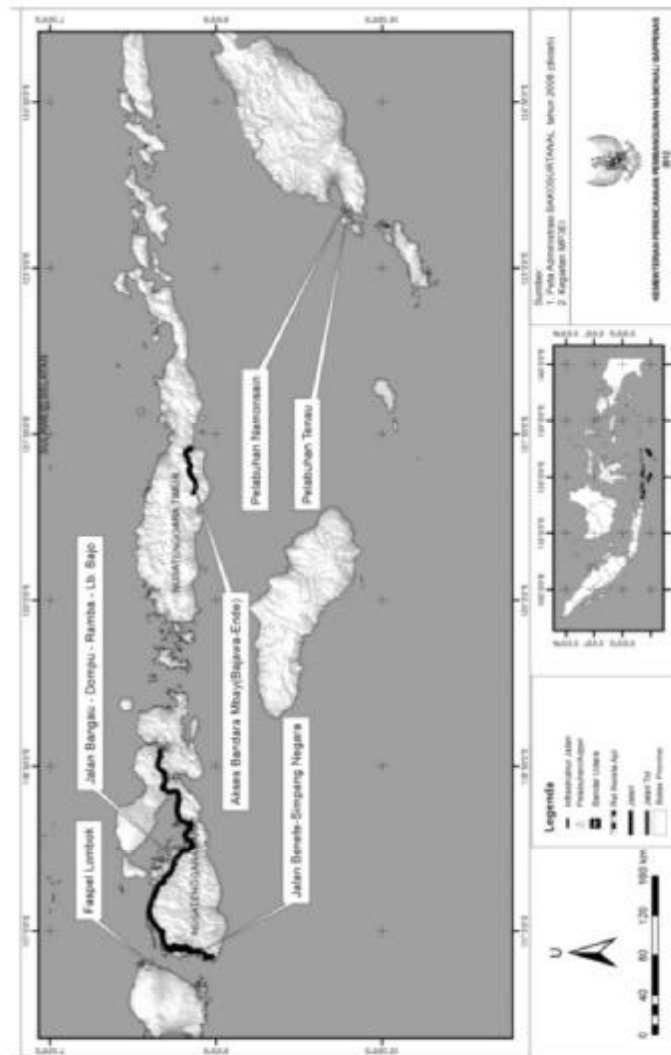
APBD

1. Pengadaan 10 kapal tangkap jenis Long Liner 60 GT untuk kegiatan perikanan tangkap di Kab. Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pembangunan waduk Bintang Bano di Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Pengadaan 10 kapal tangkap jenis Long Liner 60 GT untuk kegiatan perikanan tangkap di Kab. Flores Timur, di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Pengadaan 10 kapal tangkap jenis Long Liner 60 GT untuk kegiatan perikanan tangkap di Kab. Lembata, di Provinsi Nusa Tenggara Timur
5. Pengadaan 20 kapal tangkap jenis Long Liner 30 GT untuk kegiatan perikanan tangkap di Kab. Ende, di Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Pengadaan 20 kapal tangkap jenis Long Liner 30 GT untuk kegiatan perikanan tangkap di Kab. Sikka, di Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Pengadaan 20 kapal tangkap jenis Long Liner 30 GT untuk kegiatan perikanan tangkap di Kab. Rote Nado, di Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Pengadaan 20 kapal tangkap jenis Long Liner 30 GT untuk kegiatan perikanan tangkap di Kab. Aler, di Provinsi Nusa Tenggara Timur

KPS

1. Penanganan Jalan Strategis Nasional (Pelabuhan Lembar - Labuhan Poh) 70 km (70M) di Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Pembangunan pelabuhan pariwisata/cruise Tanah ampo di Provinsi Nusa Tenggara Timur

GAMBAR 6.1
PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIJALANIN MELALUI
TA 2013 DI WILAYAH NUSA TENGGARA



LAMPIRAN BAB 6. **Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Kepulauan Nusa Tenggara tahun 2013**

A. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan				
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Industri Kecil dan menengah				
	Prioritas KL : Prioritas KL				
	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III	Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP		0
	Kegiatan Strategis : Wirausaha Baru/Koperasi Berkualitas				
	Prioritas KL : Prioritas KL				
	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah	Terfasilitasinya dukungan pemberdayaan koperasi dan UKM di daerah		4.213,00
	Kegiatan Strategis : Program Keluarga Harapan (PKH)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan				
	KEMENTERIAN SOSIAL				
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)	Jumlah RTSM Yang mendapatkan bantuan Tunai Bersyarat PKH		124.129 (hasil pembahasan pasca musrenbangnas) *) Alokasi anggaran ini termasuk kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi, Monitoring, Publikasi serta

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
					pemberian bantuan ke RTSM.
2	Isu Strategis : Pengembangan Kawasan Pariwisata				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan fasilitas pariwisata				
	Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana				
	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah Dukungan Amenitas/Fasilitas Pariwisata	4 DTW	3.600,00
3	Isu Strategis : Peningkatan Pelayanan Pendidikan				
	Kegiatan Strategis : Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMK				
	Prioritas KL : Prioritas KL				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Jumlah RKB-SMK		10.660,00
	Kegiatan Strategis : Penambahan Porsi untuk BSM dari SD,SMP,SMA denga asumsi 40% dari total jumlah murid				
	Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan				
	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
	Program Pendidikan Menengah	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	22.184 siswa SMA, 13.546 siswa SMK	39.936,00
4	Isu Strategis : Penyediaan Infrastruktur Wilayah Yang Memadai				
	Kegiatan Strategis : Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Embung-Embung; Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Air Tanah; Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	3354	25.670,00

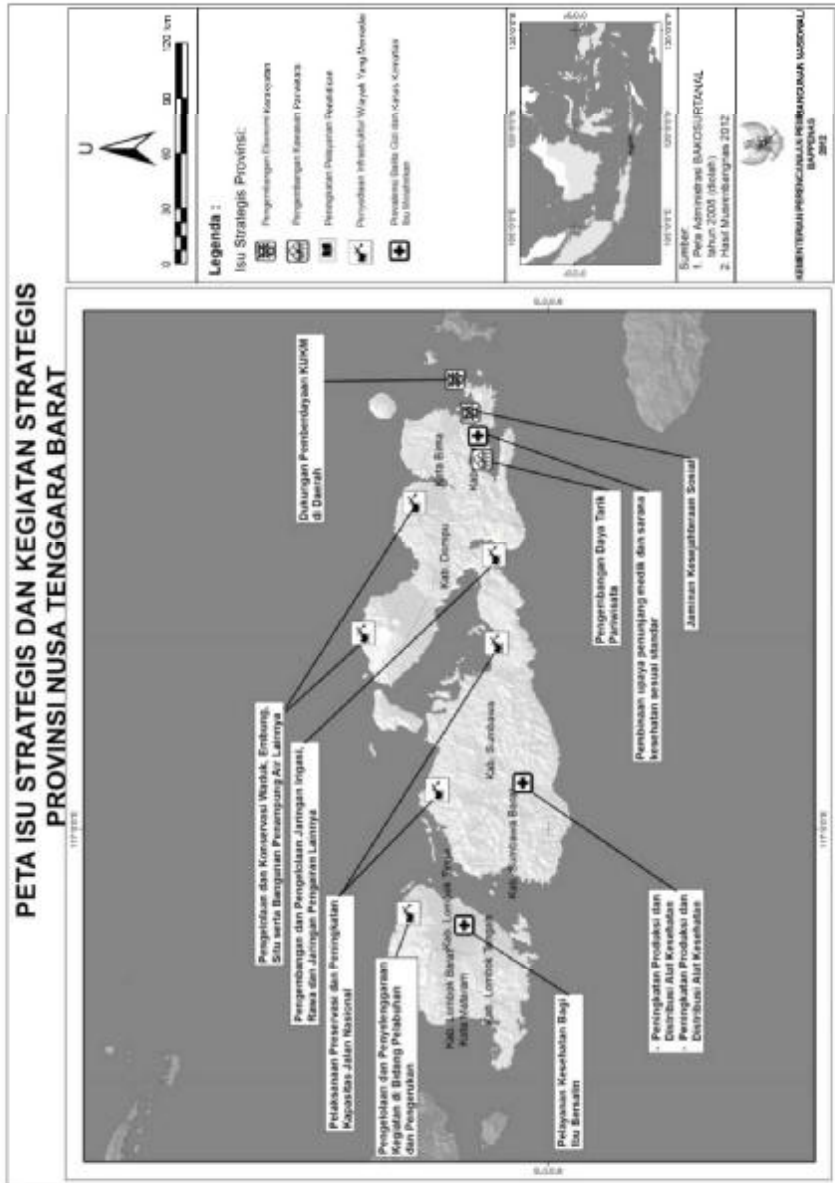
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
		Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			
Kegiatan Strategis : Pembangunan Bendungan Pandanduri Swangi Kab. Lombok Timur; Pembangunan Bendungan Rababaka Kab. Dompu					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah buah embung / Situ / bangunan penampung air lainnya yang dibangun	2 buah	347.126,00
Kegiatan Strategis : Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Carik Kab. Lombok Utara; Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Waworada Kab. Bima; Pelabuhan Lembar Kab. Lombok Barat; Pelabuhan Badas Kab. Sumbawa					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Pembangunan faspel laut Carik, Pengembangan faspel ferla Pelabuhan Badas, Penyelesaian pembangunan faspel laut Waworada, Pembangunan jalan dan halaman Pelabuhan Lembar	4 paket	43,800.00
Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Jembatan (Jalan Nasional dan Jalan Strategis Nasional). Usulan penanganan: Senggigi-Pemenang; Sejong-Tetar Lunyuk; Dompul-Hu'u; Kempo-Kesi-Hodo; Lunyuk Ropang-Sekokat; Bima-Tawali; Melayu-Kolo; Penujak-Kuta; BIL-Mataram; Sunset Buolevard Ampenan					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- Jumlah jalan dan jembatan yang dipreservasi - Jumlah jalan yang ditingkatkan	-	583.090,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisk	Dana (Rp. Juta)
			strukturnya/ pelebaran - Jumlah jalan/jembatan strategis di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun/dilebarka n Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi		
Kegiatan Strategis : Jalan Lingkar Utara Kota Sumbawa (SAMOTA)					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan			-	50.000
Kegiatan Strategis : Jalan Lintas Selatan NTB					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan			-	75.000
5	Isu Strategis : Prevalensi Balita Gizi dan Kasus Kematian Ibu Melahirkan				
Kegiatan Strategis : Peralatan untuk PUSKESMAS					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan	Persentase (%) Produk Alat Kesehatan dan PKRT yang Beredar Memenuhi Persyaratan Keamanan, Mutu dan Manfaat	90	1.796,60
Kegiatan Strategis : Desa Siaga Tuntas					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin (Jampersal)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melayani Program Jampersal	Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani Jampersal	33.854,18
Kegiatan Strategis : Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan fasilitasi RSU Rujukan Provinsi di Pulau Sumbawa dan RSU Provinsi Dasan Cermen serta Balabkes P. Lombok					
Prioritas KL : Prioritas KL					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan upaya penunjang medik dan sarana kesehatan sesuai standar	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar (mengakomodasi pengadaan alkes dan fasilitas RSU Rujukan Provinsi di Pulau Sumbawa dan RSU Provinsi Dasan Cermen serta Balabkes P.Lombok, pengadaan alat pemeriksaan NAPZA)	3 Faskes	9.537,70

Matriks Proyek MP3EI Tahun 2013

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (MILYAR)
1	Penanganan Jalan dari Benete - Simpang Negara (61,8 Km) mendukung kegiatan industri perikanan & rumput laut (72,1km)	Kementerian PU	54,07
2	Penanganan Jalan dari Bangau - Dompu - Ramba - Lb. Bajo mendukung industri rumput laut	Kementerian PU	23,82
3	Pembangunan faspel laut pelabuhan Lombok	Kementerian Perhubungan	62,00
4	Pembangunan bendung (waduk) Pandanduri, NTB	Kementerian PU	237,5
5	Pembangunan waduk Rababeka di Dompu	Kementerian PU	104,37
7	PLTU Lombok Mataram (1 x 25 MW)	Kementerian ESDM	16,255
8	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	196,64



B. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Provinsi Tahun 2013

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Pembangunan daerah tertinggal, terluar dan terdepan				
<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan jalan akses desa perbatasan wilayah Kab. Belu, TTU dan Kab. Kupang dan Jalan lingkaran luar perbatasan sepanjang 255 km</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah	- Jumlah jalan dan jembatan yang dipreservasi - Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran - Jumlah jalan/jembatan strategis di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun/dilebarkan	-	852,622.00
<i>Kegiatan Strategis : Pembangunan embung/waduk Raknamo di Kab. Kupang, Aesesa di Kab. Ngada dan Kolhua di Kota Kupang; serta pemangunan 500 embung kecil di 20 kabupaten se NTT</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air	Jumlah buah embung / Situ / bangunan penampung air lainnya yang dibangun	5	69,200.00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
		Lainnya			
2	Isu Strategis : Pengembangan Sektor Unggulan Daerah				
	Kegiatan Strategis : Pengembangan pusat pembibitan sapi Timor di Besipae TTS dan Sapi Ongole di Kabar - Sumba Timur				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal	Peningkatan Produksi Embrio Ternak (Embrio)	112	30.852,00
	Kegiatan Strategis : Penembangan kakao melalui perbanyakan benih kakao dan perluasan areal tanam kakao				
	Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan			0
	Kegiatan Strategis : Pengembangan jagung melalui pengembangan pusat perbenihan jagung (7 lokasi) dan pengadaan traktor roda 4				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat :	2280 0	6.414,00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan usaha perikanan tangkap melalui pengadaan armada perikanan tangkap 30GT sebanyak 60 unit dan 60 GT sebanyak 40 unit				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				

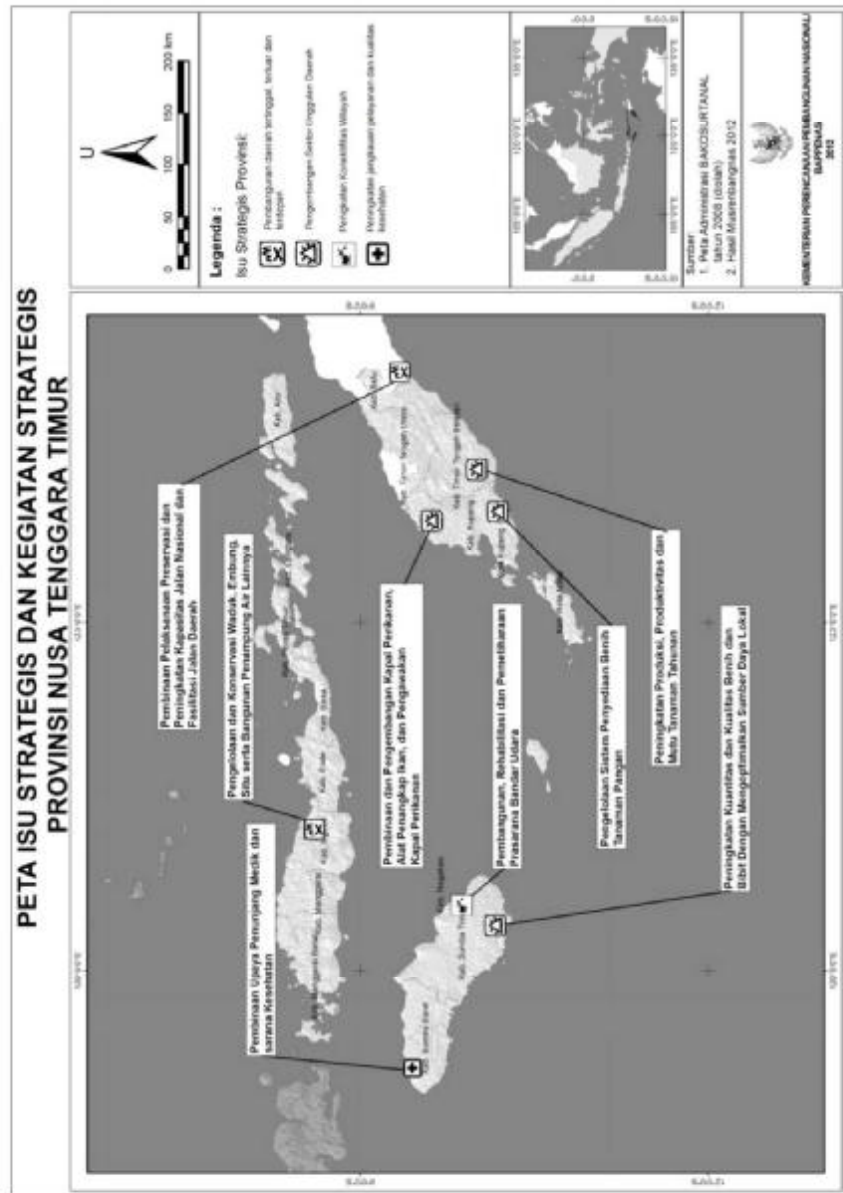
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan	Jumlah kapal perikanan > 30 GT yang terbangun (unit)	3	4.500,00
3	Isu Strategis : Peningkatan Konektifitas Wilayah				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan bandara Surabaya II (Mbay)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan di Daerah Perbatasan dan Rawan Bencana	1 paket	5,600.00
	Kegiatan Strategis : Jalan Lingkar Kota Kupang				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
KEMENTERIAN Ppekerjaan Umum					
	Program Penyelenggaraan Jalan				60.000
4	Isu Strategis : Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas kesehatan				
	Kegiatan Strategis : Fasilitas peningkatan 147 puskesmas non rawat nginap menjadi puskesmas rawat nginap				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)	147	7.548,20
5	Isu Strategis : Peningkatan jangkauan dan kualitas pendidikan,penyediaan sarana dan				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
prasarana belajar yang terstandar dan persoalan mutu pendidik dan peserta didik					
<i>Kegiatan Strategis : Sertifikasi guru, untuk meningkatkan proporsi guru bersertifikat dari 24% menjadi sekurangnya 50%¹⁾</i>					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pengembangan Profesi PTK Dan Penjamin Mutu Pendidikan	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			0

Catatan:

- 1) Masuk ke dalam kegiatan Badan SDM. Alokasi EDS untuk 828 sekolah sebesar Rp 5 miliar dan KKS 205 orang sebesar Rp 3 miliar.

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (MILYAR)
1	Penanganan Jalan Bolok - Tenau - Kupang - Oesau - Oesapa (59,4 Km)	Kementerian PU	85,92
2	Penanganan jalan nasional yang mendukung akses ke Bandara Mbay: Bajawa - Ende NTT (125,7km)	Kementerian PU	14,13
3	Penanganan Fasilitas Pelabuhan Laut Komodo untuk mendukung Pariwisata	Kementerian Perhubungan	5,0
4	Pembangunan Pelabuhan Rakyat Namonsain/Nomensabu (Kupang)	Kementerian Perhubungan	5,0
5	Pengembangan Pelabuhan Tenau (Kupang)	Kementerian Perhubungan	91,0
6	Pengembangan sistem jaringan kabupaten Kupang 100 lt/dt	Kementerian PU	35,0
7	PLTP Ulumbu (2x2,5 MW)	Kementerian ESDM	9,50
8	PLTU Atambua(4x6 MW)	Kementerian ESDM	26,745
9	Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk	Kementerian ESDM	126,064



BAB 7 PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2013

7.1 Kondisi Wilayah Maluku Saat Ini

Kinerja perekonomian wilayah Maluku pada tahun 2011 menurun dibanding dengan tahun 2010. Sektor utama dalam perekonomian Maluku adalah pertanian, perdagangan-hotel dan restoran dan jasa-jasa. Perkembangan pola investasi PMA dan PMDN di wilayah Maluku masih sangat kecil. Kendala yang dihadapi terutama minimnya infrastruktur wilayah dan iklim investasi, serta belum berkembangnya industri bernilai tambah tinggi.

Sebagian besar wilayah Maluku masih tertinggal, dimana sebanyak 8 kabupaten di Provinsi Maluku dan 7 kabupaten di Provinsi Maluku Utara merupakan daerah tertinggal.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Wilayah Maluku cenderung menurun, namun TPT Provinsi Maluku masih lebih tinggi dari TPT nasional. Rendahnya pengangguran di satu sisi dan rendahnya tingkat pendapatan regional per kapita di sisi lain menunjukkan rendahnya kualitas pekerjaan dan produktivitas pekerja. Disamping itu, tingkat kemiskinan di wilayah Maluku cenderung menurun dalam empat tahun terakhir. Namun demikian, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku masih sangat tinggi dibanding tingkat kemiskinan nasional.

Dalam hal pembangunan manusia, secara umum semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, perbaikan di bidang kesehatan dan pendidikan adanya perbaikan untuk indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Maluku memiliki potensi perikanan laut (tangkap dan budidaya) yang cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal. Hal ini disebabkan masih kecilnya skala rata-rata usaha perikanan tangkap, kontinuitas ketersediaan bahan bakar, dan terbatasnya fasilitas pendingin. Pada sisi lain, wilayah perairan Maluku sangat rawan terhadap pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan asing dengan kapasitas kapal yang lebih besar. Penetapan Provinsi Maluku sebagai

Lambung Ikan Nasional pada tahun 2010 diharapkan dapat merevitalisasi usaha perikanan, baik tangkap maupun budidaya, melalui pendekatan lintas sektor yang lebih terpadu.

Kondisi infrastruktur wilayah Maluku, permasalahan terkait dengan rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. Selain itu, kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Minimnya infrastruktur yang dibangun juga mengakibatkan keterisolasian wilayah antarpulau dan dalam pulau.

Di wilayah Maluku, jaringan jalan di pulau-pulau terpencil belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas pulau. Selain itu, armada angkutan jalan raya sangat terbatas karena armada yang tersedia tidak sebanding dengan luas daratan pada setiap kabupaten. Jangkauan kapal PELNI, kapal ferry, perintis, dan kapal pelayaran rakyat (Pelra) masih sangat terbatas dan tidak memadai untuk kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri atas pulau-pulau kecil, sedang, dan besar.

Sementara itu, ketersediaan energi listrik menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan rasio elektrifikasi terus meningkat dari 55 persen di Maluku dan 48 persen di Maluku Utara pada tahun 2004 menjadi masing-masing 70,80 dan 70,34 persen pada tahun 2011 dan rasio desa berlistrik Provinsi Maluku 95,41 persen dan Maluku Utara 99,72 persen. Namun angka ini masih di bawah angka rasio elektrifikasi nasional (67 persen).

Dalam rangka penguatan konektivitas nasional sektor komunikasi dan informatika, capaian pembangunan di pulau Maluku hingga tahun 2011 antara lain meliputi penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa Berdering) di 1.286 desa USO (64,2 persen dari target) dan internet (Pusat Layanan Internet Kecamatan) di 158 desa ibukota kecamatan USO (100 persen dari target). Adapun pembangunan jaringan *broadband* dijadwalkan untuk dimulai tahun 2012 dengan target 8 kabupaten/kota.

Luas irigasi di Maluku sampai dengan tahun 2007 mencapai 152,49 ribu hektar atau sekitar 2 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesiayang tersebar di Maluku sekitar 62

persen dan Maluku Utara sekitar 38 persen. Daerah irigasi tersebut terdiri atas kewenangan Pemerintah Pusat seluas 41,54 ribu hektar, kewenangan pemerintah provinsi 82,31 ribu hektar, dan kewenangan kabupaten 28,64 ribu hektar. Dari total 152,49 ribu hektar daerah irigasi di kepulauan Maluku, ketersediaan airnya masih mengandalkan aliran sungai, baik melalui bendung maupun *free intake*. Dari sisi ketersediaan lampungan air, daya lampung air (*storage*) perkapita wilayah Maluku adalah sebesar 0,30 m³/kapita, lebih kecil dari rata-rata daya *storage* perkapita nasional sebesar 52,31 m³/kapita.

Wilayah perairan Kepulauan Maluku di bagian selatan berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia, sedangkan di bagian utara Kepulauan Maluku berbatasan dengan Filipina. Kesepakatan garis batas maritim antara Pemerintah RI dengan Filipina serta dengan Timor Leste menjadi hal yang perlu segera dilakukan. Selain itu, terdapat mobilitas penduduk tradisional dari Timor Leste ke Pulau Wetar, Pulau Kisar (Kabupaten Maluku Barat Daya) dan Pulau Larat (Kabupaten Maluku Tenggara Barat).

TABEL 7.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU

Perkembangan Pembangunan	Maluku	Maluku Utara
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 (ADEK 2000) (%)	6,0	6,4
PDRB Perkapita dengan Migas ADHK 2000 Tahun 2010 (Rp.Ribu)	2,772	2,924
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2011 (Agustus) (%)	7,38	5,55
Persentase Kemiskinan Tahun 2011 (September) (%)	22,45	10,00
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2010	71,42 (Peringkat 20)	69,02 (Peringkat 30)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010	67,23	64,41
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010	75,94	58,17
Angka Harapan Hidup Tahun 2010 (Tahun)	67,4	66,01
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 (Tahun)	8,63	8,63

Sumber : Badan Pusat Statistik

7.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Maluku

Tujuan pembangunan wilayah Maluku dalam tahun 2013 adalah untuk:

1. Meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara;
2. Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya laut dan perkebunan di wilayah Maluku;
3. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara;
4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan, wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di wilayah Maluku, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional;
6. Mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Maluku pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Maluku, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan perkapita.
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perikanan dan perkebunan di wilayah Maluku.
3. Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi.
4. Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan, wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Meningkatnya keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di jaringan irigasi D.I. Patlean, Tolabit dan Toliwang,

Akelamo, Aha, Talaga, Kahohodan Kobe di Maluku Utara, serta jaringan irigasi Di Lofin, Saenal Kiri, Bubi, Kairatu, Way Geren, Way Moten, Way Bini, dan Way Pure di Maluku.

- f. Tersedianya air baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs, antara lain pembangunan prasarana air baku Kota Ambon, Kota Tual di Maluku dan pembangunan prasarana air baku Waijo-Selat di Maluku Utara.
7. Menurunnya risiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk dan jalur transportasi utama, dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan pengendali banjir di Morotai dan Kota Atambon.
8. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

TABEL 7.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2013

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ (%)	Kemiskinan ²⁾ (%)	Pengangguran ³⁾ (%)
Maluku	5,28 – 5,85	22,12	6,15 – 5,83
Maluku Utara	5,88 – 6,68	7,33	3,59 – 3,43

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

²⁾Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

³⁾Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja

TABEL 7.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2013

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾	Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾	Umur Harapan Hidup ³⁾
Maluku	29	9,30	69,9
Maluku Utara	30	9,30	69,5

Sumber :Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk pengembangan sentra produksi komoditas unggulan dalam upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan di wilayah Maluku.

Kebijakan tersebut, didukung pula oleh konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang tengah dituangkan kedalam pengembangan koridor Ekonomi Kepulauan Maluku-Papua yang berperan sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan nasional.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi pengembangan wilayah Maluku diantaranya:

1. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya; mengembangkan diversifikasi produk ke arah ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar negeri; serta dengan mengembangkan Ambon sebagai pusat klaster industri pengolahan perikanan.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dengan melakukan diversifikasi pangan.
3. Memperkuat interaksi perdagangan antar wilayah.
4. Mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya

dir:

5. Mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
6. Mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah;
7. Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
8. Memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip kelestarian; serta
9. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha.

7.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Pembangunan Wilayah Maluku

Isu Strategis pembangunan wilayah Maluku 2013, adalah sebagai berikut:

A. PROVINSI MALUKU :

Isu strategis dan kegiatan strategis pembangunan wilayah Maluku 2013, adalah sebagai berikut:

1. Perluasan Sentra-sentra Produksi Perkebunan, Beras dan Pangan Lokal, kegiatan strategisnya yaitu: Pengembangan 3 Jenis Pangan Lokal (Sagu, Jagung, Umbi-umbian); Pengembangan Areal Perkebunan Kelapa; Pengembangan Areal Perkebunan Tanaman Cengkeh dan Pala; Pencetakan Sawah Baru seluas 16.000 Hektar.
2. Perluasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau,

kegiatan strategisnya yaitu: Pengadaan Puskesmas Keliling Laut; Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Rumah Sakit Pratama; Peningkatan Pembangunan RSUD Haulussy menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Peningkatan Pembangunan RSUD Kabupaten/Kota; Pembangunan Rumah Tunggu di Daerah Terpencil dan Kawasan Perbatasan; Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB.

3. Percepatan Pembangunan Maluku Sebagai lumbung ikan nasional, kegiatan strategisnya yaitu: Peningkatan Sarana Pelabuhan Perikanan; Pengadaan Kapal Perikanan > 30 GT (unit); Pengembangan Budidaya Perikanan.
4. Percepatan Pembangunan Infrastruktur, kegiatan strategisnya yaitu: Penyelesaian Jalan Trans Maluku; Pembangunan Pelabuhan Penyederhanaan; Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi serta Embung; Penyelesaian Pembangunan PLTMH, dan PLTA Wayisal; Penyelesaian Bandar Udara Domaluhun Baru, Saumlaki, Bula, Aru, Namniwel serta Perluasan Lapangan dan Bangunan.
5. Pengembangan Pariwisata Bahari, kegiatan strategisnya yaitu: Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Banda yang didukung oleh Pengembangan Wisata di Pantai Natsepa, Liang, dan Namalatu; Promosi Pengembangan Destinasi Wisata.

B. PROVINSI MALUKU UTARA

Isu strategis dan kegiatan strategis pengembangan wilayah Maluku Utara 2013, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian, kegiatan strategisnya yaitu: Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian di Maluku Utara (Pencetakan Sawah di 7 Kab/Kota, Jalan Usaha Tani, Sumur Bor, Jides, Jitot); Pengembangan Tanaman Durian dan Duku; Pengembangan Kawasan Peternakan di Provinsi Maluku Utara; Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengelolaan Lainnya; Pengembangan inovasi teknologi pertanian dalam pengolahan tanaman pangan lokal.
2. Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Lokal,

- kegiatan strategisnya yaitu: Pengembangan Sistem Usaha dan Pengelolaan Investasi Perikanan yang Berdaya Saing serta Pembangunan Baru Prasarana Pelabuhan Perikanan Disolifi, Bohong dan Pulau Gbi; Pengembangan Pangan Lokal sebagai Alternatif Pangan; Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata; Intensifikasi dan Pengembangan Tanaman Kakao.
3. Peningkatan Infrastruktur dan Suplai Kelistrikan kegiatan strategisnya yaitu: Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan; Pengembangan Daya Dukung Energi Alternatif Daerah; Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur transportasi.
 4. Peningkatan Pengelolaan Pulau Terluar, Terpencil, Perbatasan dan Tertinggal, kegiatan prioritasnya yaitu: Pembangunan Pos Lintas Batas, Pengembangan Industri Perikanan di wilayah perbatasan serta Blue Print Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan; Pembangunan *Outlying Fishing Port* (Pelabuhan Perikanan Samudra Lingkar Luar); Pengembangan dan pengelolaan Perikanan sebagai sentra Produksi di wilayah pesisir; Pemberdayaan Masyarakat pesisir di Provinsi Maluku Utara; Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kegiatan strategisnya yaitu: Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Kesehatan dan Jaringan; Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa; Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan; Pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; Peningkatan Penyuluhan Perikanan; Perlindungan social; Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa; Peningkatan Kesehatan Masyarakat; Penyediaan Layanan Beasiswa Pendidikan SMA/SMK; Pemberdayaan Sosial; Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK *SDLB/SMPLB*; Peningkatan Kesehatan Masyarakat; Penguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan di Maluku Utara; Mengembangkan SDM/Aparatur berbasis kompetensi.

7.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Maluku

Uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, Kementerian/Lembaga, sasaran, target, dan pagu indikatif di setiap provinsi di Maluku dapat dilihat dalam **Lampiran Bab 7**.

Arah Kebijakan Pengembangan MP3EI untuk wilayah Maluku sebagai bagian dari koridor ekonomi Kepulauan Maluku-Papua, memperkuat arah pengembangan wilayah Maluku, dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013, yakni mengembangkan koridor ekonomi Kepulauan Maluku-Papua sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan di Koridor Ekonomi Maluku-Papua adalah:

1. Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Yos Sudarso Ambon di Provinsi Maluku
2. Adpel Ambon di Provinsi Maluku
3. Pembangunan sarana irigasi di Pulau Buru dan Seram Timur di Provinsi Maluku
4. Pembangunan prasarana air baku di Pulau Ambon dan Lease dan pulau-pulau terselatan Maluku di Provinsi Maluku
5. Penanganan Jalan Masohi - Haya - Laimu (136,3 Km) di Provinsi Maluku
6. Penanganan Jalan Daruba - Wayabula (Jalan Strategis Nasional) (52 Km) di Provinsi Maluku Utara
7. Penanganan Daeo - Bere-Bere (55,7 Km) di Provinsi Maluku Utara
8. Penanganan Jalan Daruba - Daro (26 Km) di Provinsi Maluku Utara
9. Pelabuhan Buli di Provinsi Maluku Utara
10. Pelabuhan Jailolo di Provinsi Maluku Utara
11. Pelabuhan Tobelo di Provinsi Maluku Utara
12. Satker sementara pembangunan Faspel Laut Falabisahaya-Malut di Provinsi Maluku Utara
13. Pelabuhan Labuhan/Babang di Provinsi Maluku Utara
14. Adpel Ternate di Provinsi Maluku Utara
15. Pelabuhan Gebe di Provinsi Maluku Utara

16. Rehabilitasi Bandara termasuk perpanjangan Runway Bandara Udara Morotai di Provinsi Maluku Utara

uraian proyek MPREI tahun 2013 yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat di setiap provinsi dijabarkan dalam **Lampiran Bab 7**.

Rencana investasi yang akan dilakukan oleh BUMN, Swasta, APBD, dan KPS adalah sebagai berikut:

BUMN

1. Kapal collecting 50-100 GT dan 300-500 GT di Provinsi Maluku
2. Pengembangan Lapangan Panas Bumi Jailolo 2 x 5 MW, Kab. Halmahera Barat, di Provinsi Maluku Utara

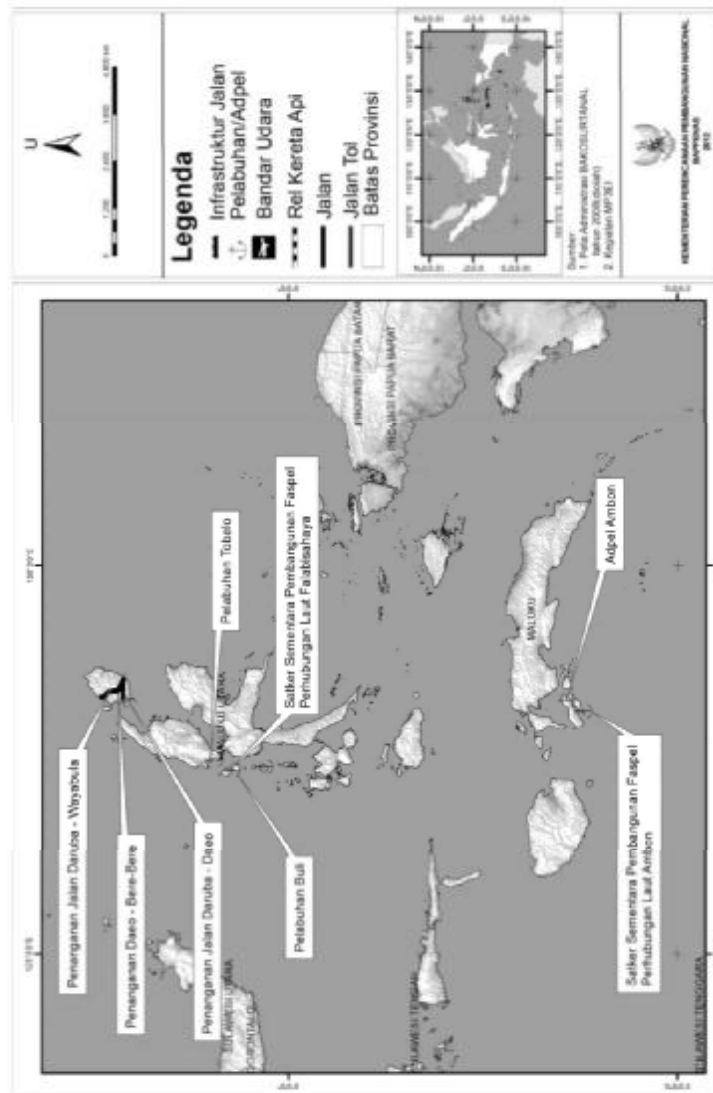
APBD

Pembangunan pengaman pantai pendukung Amhon Waterfront City di Provinsi Maluku

KPS

1. Pembangkit Listrik di Provinsi Maluku
2. Ringroad Pulau Morotai, Jalan Sepanjang 234.59 Km, Jembatan Sepanjang 275 m untuk menunjang kegiatan perikanan dan pariwisata di Provinsi Maluku Utara
3. Penanganan dan pembangunan pembangkit listrik untuk menunjang Pengembangan Kawasan Mega metropolitan Morotai (5 MW) di Provinsi Maluku Utara
4. Pembangkit Listrik (1.637M, GB, TA 2011) di Provinsi Maluku Utara
5. Pengembangan Lapangan Songa Wayaua 5 MW di Provinsi Maluku Utara

GAMBAR 7.1
PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBLAYAI MELALUI
TA 2013 DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU



LAMPIRAN BAB 7. **Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Kepulauan Maluku tahun 2013**

E. PROVINSI MALUKU

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Pengembangan Pariwisata Bahari				
	<i>Kegiatan Strategis : Pengembangan Destinasi Wisata Pulau Banda yang didukung oleh Pengembangan Wisata di Pantai Natsepa, Liang, dan Namalatu</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat				
	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata Alam, Bahari dan Budaya	1 DTW	1.000,00
	<i>Kegiatan Strategis : Promosi Pengembangan Destinasi Wisata</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat				
	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	Program Pengembangan Pemasaran	Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri	Jumlah Pendukung Event Seni, Budaya dan Pariwisata Daerah		650
2	Isu Strategis : Percepatan Pembangunan Infrastruktur				
	<i>Kegiatan Strategis : Penyelesaian Jalan Trans Maluku</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	- Jumlah jalan dan jembatan yang dipreservasi - Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran - Panjang dan jembatan yg dibangun baru - Jumlah	-	744.012,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
			jalan/jembatan strategis di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun/dilebarkan Panjang jalan yg dibangun baru		
			Pembangunan jalan ruas Jailolo-Goal dan Bulu Gotowase		70.000,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana serta subsidi operasi penyeberangan angkutan perintis ASDP di Maluku	13 paket	107,500.00	
Kegiatan Strategis : Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi serta Embung					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	4600	98.100,00	
Kegiatan Strategis : Penyelesaian Bandar Udara Dumatubun Baru, Saumlaki, Bula, Aru, Namniwel serta Perluasan Lapter Namrole dan Banda					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Pembangunan , rehabilitasi, pemeliharaan prasarana Bandar Udara Dumatubun	7 paket	87,100.00	

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
			Baru, Saumlaki, Bula, Aru, Namniwel, Namrole, dan Bandaneira		
Kegiatan Strategis : Penyelesaian Pembangunan PLTMH, dan PLTA Wayisal					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	0.00	0
Kegiatan Strategis : Penyelesaian Bandar Udara Dumatubun Baru, Saumlaki, Bula, Aru, Namniwel serta Perluasan Lapter Namrole dan Banda					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi	-	123.272,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara Namniwel					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara		Percepatan pengoperasian bandara baru (1 tahun), daerah tertinggal (bandara Namniwel)		30.000
3	Isu Strategis : Percepatan Pembangunan Maluku Sebagai LUMBUNG IKAN NASIONAL				
Kegiatan Strategis : Peningkatan Sarana Pelabuhan Perikanan					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan UPT daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi)	1	5.000,00
Kegiatan Strategis : Pengadaan Kapal Perikanan > 30 GT (unit)					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	Jumlah kapal > 30 GT yang terbangun(unit)	4	6.000,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan Budidaya Perikanan					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan	Luas Lahan yang Difasilitasi Sesuai target Produksi Perikanan Budidaya (ha setiap kab/kota)		1.546,00
4	Isu Strategis : Perluasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau				
Kegiatan Strategis : Pengadaan Puskesmas Keliling Laut					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)		
Kegiatan Strategis : Peningkatan Puskesmas Rawat Inap menjadi Rumah Sakit Pratama					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)		
5	Isu Strategis : Perluasan Sentra-sentra Produksi Perkebunan, Beras dan Pangan Lokal				
	Kegiatan Strategis : Pengembangan 3 Jenis Pangan Lokal (Sagu, Jagung, Umbi-umbian)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	Jumlah Penanganan Kegiatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Sumberdaya Lokal (Prop/Kab/Kota)	140	6.230,00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Areal Perkebunan Kelapa				
	Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa	1000	2.720,00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Areal Perkebunan Tanaman Cengkeh dan Pala				
	Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar	Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri : Cengkeh	200	960
	Kegiatan Strategis : Pencetakan Sawah Baru seluas 16.000 Hektar				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah	5700	5.700,00

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2013

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANAUTAMA	RKP 2013 (Rp. Milyar)
1	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Yos Sudarso Ambon	Kementerian Perhubungan	20
2	Adpel Ambon	Kementerian Perhubungan	68
3	Pembangunan sarana irigasi di Pulau Buru dan Seram Timur	Kementerian PU	61,75
4	Pembangunan prasarana air baku di Pulau Ambon dan Lease dan pulau-pulau terselatan Maluku	Kementerian PU	20,96
5	Penanganan Jalan Masohi - Haya - Laimu (136,313 Km)	Kementerian PU	48,49

F. PROVINSI MALUKU UTARA

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Belum optimalnya kualitas SDM				
	Kegiatan Strategis : Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Kesehatan dan Jaringannya				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)	Seluruh faskes	1.346,70
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Upaya Kesehatan	Jumlah Upt Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya	Disesuaikan dengan jumlah fasilitas kesehatan	5.180,60
	Kegiatan Strategis : Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan				
	Prioritas Bidang : Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama				
	KEMENTERIAN SOSIAL				
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Terwujudnya Kesempatan Kerja dan Berusaha, Melalui KUBE Usaha Ekonomi Produktif		1.515,00
	Kegiatan Strategis : Pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian				
	Prioritas KL : Prioritas KL				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani yang Difasilitasi Pengembangannya (Gapoktan)	1211	8.715,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Penyuluhan Perikanan					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh	50 kelompok	1.198,00
Kegiatan Strategis : Perlindungan sosial					
Prioritas Bidang : Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama					
KEMENTERIAN SOSIAL					
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah korban bencana alam yang dibantu jumlah lokasi Kampung Siaga Bencana (KSB)		317,30
Kegiatan Strategis : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase RSJ yang memberikan layanan sub spesialis dasar dan napza sesuai standar		0
Kegiatan Strategis : Peningkatan Kesehatan Masyarakat					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned		0
Kegiatan Strategis : Penyediaan Layanan Beasiswa Pendidikan SMA/SMK					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Jumlah Siswa SMA Penerima BOMM		0
Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Sosial					
Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik					
KEMENTERIAN SOSIAL					
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat)	Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur		4.684,50* *) Alokasi anggaran ini meliputi Bahan Bangunan Rumah (BBR), Rumah KAT, dan Infrastruktur
Kegiatan Strategis : Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB	PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA YANG MEMILIKI MINIMAL SATU SDLB		2.620,55
Kegiatan Strategis : Peningkatan Kesehatan Masyarakat					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Persentase RSJ yang memberikan layanan sub spesialis dasar dan napza sesuai standar		0
Kegiatan Strategis : Penguatan Program dan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa					
Prioritas KL : Prioritas KL					
KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	PNPM Inti		79.947,50

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Kegiatan Strategis : Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan di Maluku Utara					
Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan					
KEMENTERIAN DALAM NEGERI					
	Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Persentase (%) Kumulatif Provinsi/ Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Pembentukan dan Fasilitasi Pelembagaan Penguatan Forum Dialog Penyelesaian Konflik		969,35
Kegiatan Strategis : Mengembangkan SDM/Aparatur berbasis kompetensi					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Jumlah diklat	3	424,8
2	Isu Strategis : Belum Optimalnya Pengelolaan Pulau Terluar, Terpencil, Perbatasan dan Tertinggal				
Kegiatan Strategis : Pembangunan Pos Lintas Batas, Pengembangan Industri Peikanan di wilayah perbatasan serta Blue Print Pengembangan Ekonomi Wilayah Perbatasan					
Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah pulau kecil yang dipetakan potensinya, termasuk pulau-pulau kecil terluar	1	200
Kegiatan Strategis : Pembangunan Outhering Fishing Port (Pelabuhan Perikanan Samudra Lingkar Luar)					
Prioritas Nasional : Prioritas Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau	Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil			0

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Kecil				
Kegiatan Strategis : Pengembangan dan pengelolaan Perikanan sebagai sentra Produksi di wilayah pesisir					
Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pendayagunaan Pesisir dan Lautan	Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi		0
Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Masyarakat pesisir di Provinsi Maluku Utara					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha	Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil		0
Kegiatan Strategis : Pengembangan dan Pengelolaan Konservasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis	Kawasan konservasi perairan yang dikelola berkelanjutan	1	100
3	Isu Strategis : Belum Optimalnya Peningkatan Infrastruktur dan Suplai Kelistrikan				
Kegiatan Strategis : Percepatan Pembangunan Jalan dan Jembatan					
Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur	-	476.451,00
Kegiatan Strategis : Jalan Trans Maluku					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan		Pembangunan jalan Trans Maluku ruas Arudias-Arma,Arma Siwahan, dan Ibra-Damar		70.000
Kegiatan Strategis : Pengembangan Daya Dukung Energi Alternatif Daerah					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik	0.00	0
Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur transportasi.					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Pembangunan , rehabilitasi, pemeliharaan prasarana Bandar Udara Baabulah Ternate, Oesman Sadik Labuha, Gamarmalamo Galela, Morotai, Buli Maba, Kuabang Kao	6 Paket	97,500.00
4	Isu Strategis : Belum Optimalnya Peningkatan Investasi dan Pengelolaan Potensi Lokal				
Kegiatan Strategis : Pengembangan Sistem Usaha dan Pengelolaan Investasi Perikanan yang Berdaya Saing serta Pembangunan Baru Prasarana Pelabuhan Perikanan Disofiji, Bobong dan Pulau Obi					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah lanjutan Pembangunan pelabuhan UPT daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial.	1	10.000,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan Pangan Lokal sebagai Alternatif Pangan					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Jumlah desa yang diberdayakan dalam program aksi desa mapan (Desa)	22	3.467,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata					
Prioritas Bidang : Bidang Sarana dan Prasarana					
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah Dukungan Amenitas/Fasilitas Pariwisata		500
Kegiatan Strategis : Intensifikasi dan Pengembangan Tanaman Kakao					
Prioritas KL : Prioritas KL					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan		0	0
5	Isu Strategis : Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian				
Kegiatan Strategis : Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian di Maluku Utara (Pencetakan Sawah di 7 Kab/Kota, Jalan Usaha Tani, Sumur Bor, Jides, Jitut)					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Jumlah (Ha) Optimasi Jaringan Tersier (JITUT, JIDES dan	3200	3.200,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Pertanian		Pengembangan TAM)		
Kegiatan Strategis : Pengembangan Tanaman Durian dan Duku					
Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	Pengembangan Kawasan Tanaman Buah		0
Kegiatan Strategis : Pengembangan Kawasan Peternakan di Provinsi Maluku Utara					
Prioritas KL : Prioritas KL					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	Optimalisasi IB dan INKA (Pkt)	21	16.400,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengelolaan Lainnya					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	1067	64.950,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan inovasi teknologi pertanian dalam pengolahan tanaman pangan lokal					
Prioritas Bidang : Bidang Ekonomi					
KEMENTERIAN PERTANIAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Jumlah Laporan Kegiatan Strategis Nasional/ Daerah yang Memperoleh Pendampingan Inovasi oleh BPTP dan dapat Mencapai Target Sasarannya	3	10.089,00

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2013

No	PROYEK MP3EI	PELAKSANAUTAMA	RKP 2013 (Rp.Milyar)
1	Penanganan Jalan Daruba - Wayabula (52 km)	Kementerian PU	41,34
2	Penanganan Daero - Bere-Bere (55,7 km)	Kementerian PU	24,69
3	Penanganan Jalan Daruba - Daero (26 km)	Kementerian PU	12,50
4	Pelabuhan Buli	Kementerian Perhubungan	13,70
5	Pelabuhan Jailolo	Kementerian Perhubungan	13,60
6	Pelabuhan Tobelo	Kementerian Perhubungan	16,50
7	Satker sementara pembangunan Faspel Laut Palabisahaya-Malut	Kementerian Perhubungan	27,80
8	Pelabuhan Labuhan/Babang	Kementerian Perhubungan	2,23
9	Adpel Ternate	Kementerian Perhubungan	68,0
10	Pelabuhan Gebe	Kementerian Perhubungan	5,3
11	Rehabilitasi Bandara termasuk perpanjangan Runway Bandara Udara Morotai	Kementerian Perhubungan	14

BAB 8 PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2013

8.1 Kondisi Wilayah Papua Saat Ini

Secara umum kinerja perekonomian wilayah Papua tidak sebesar sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain masih tingginya ketergantungan ekspor-impor produk pertambangan dalam kinerja perekonomian daerah. Adapun Sektor utama yang menyumbang perekonomian wilayah Papua adalah sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, serta perdagangan. Sejalan dengan perbaikan kinerja ekonomi wilayah, PDRB per kapita wilayah juga terus meningkat secara riil.

Dalam bidang sosial, indikator sosial di Wilayah Papua mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun di Wilayah Papua dan capaian TPT di tingkat wilayah tersebut lebih baik dari TPT nasional. Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua masih sebesar 31,98 persen, sedangkan di Provinsi Papua Barat sebesar 31,92 persen. Persentase penduduk miskin tersebut masih jauh di atas rata-rata nasional sebesar 12,49 persen. Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Di bidang infrastruktur wilayah, total panjang jaringan jalan di Papua terjadi penambahan jalan sepanjang 10.174 km pada tahun 2009. Namun, kualitas jalan justru mengalami penurunan, di mana persentase jalan dengan kondisi baik menurun drastis dari 35,5 persen menjadi 22,8 persen antara tahun 2008 dan 2009. Kebutuhan total listrik untuk wilayah Papua adalah sebesar 1,95 PJ dengan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 9,6 persen. Pada tahun 2011, rasio elektrifikasi sebesar 32,6 persen dengan komposisi rasio elektrifikasi untuk daerah Papua Barat adalah 58,24 persen dan Papua 29,25 persen dan rasio desa berlistrik Provinsi Papua sebesar 39,07 persen dan Papua Barat 83,11 persen. Pembangunan jaringan broadband dijadwalkan dimulai tahun 2012, dengan target 9 kabupaten/kota, dan penyelesaiannya diperkirakan tahun 2013. Sementara itu, terkait dengan daerah irigasi, luas daerah irigasi di Papua sampai dengan

tahun 2007 mencapai 39,52 ribu hektar atau sekitar 1 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia. Seluruh jaringan irigasi tersebut ketersediaan airnya masih mengandalkan aliran sungai, baik melalui bendung maupun *free intake*. Sedangkan luas daerah rawa mencapai 23,71 ribu hektar (rawa lebak).

TABEL 8.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA

Perkembangan Pembangunan	Papua	Papua Barat
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 (ADHK 2000) + (%)	27,2	-5,7
PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2010 ADHK 2000 (Rp.Ribu)	11.422	7.983
Persentase Pengangguran Tahun 2011 (Agustus) (%)	3,94	8,94
Persentase Kemiskinan Tahun 2011 (September) (%)	31,24	28,53
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2009	69,15 (Peningkat 29)	64,94 (Peningkat 35)
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010	67,00	58,50
Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010	53,40	59,60
Umrut Harapan Hidup Tahun 2010 (Tahun)	69,00	70,60
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010 (Tahun)	6,4	6,2

Sumber: Badan Pusat Statistik

Keterangan: (%) = Data Pertumbuhan dan Kontribusi IV 2010

Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), berdasar data sebaran produksi pangan utama tahun 2010, untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, dan daging sapi, memiliki kontribusi terhadap produksi nasional. Selain itu wilayah Papua mempunyai cadangan minyak dan gas cukup besar untuk minyak sebesar 94,93 MMSTB sedang untuk gas sebesar 24,32 TSCF. Luas kawasan hutan di Papua merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu sebesar 42,2 juta hektar.

Wilayah Papua memiliki kawasan perbatasan, baik berupa perbatasan laut maupun perbatasan darat. Gangguan keamanan yang masih terjadi di wilayah perbatasan ini terutama dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam, aktivitas penebangan tidak berijin, dan

8.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua

pergeseran patok-patok perbatasan yang kesemuanya ini berpotensi merugikan kewibawaan dan kedaulatan NKRI. Masih banyak daerah yang termasuk tertinggal di wilayah Papua. Di Provinsi Papua Barat, 8 dari 11 kabupaten/kota termasuk daerah tertinggal, sedangkan di Provinsi Papua, 27 dari 29 kabupaten/kota termasuk daerah tertinggal.

Tujuan pembangunan wilayah Papua dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2013 adalah untuk:

1. Meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Papua;
2. Meningkatkan standar layanan jasa pendidikan di Papua;
3. Meningkatkan standar layanan jasa kesehatan di Papua;
4. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Papua;
5. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi;
6. Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana;
7. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik dasar;
8. Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lauh;
9. Meningkatkan fungsi transportasi udara perintis untuk daerah terpencil dan pedalaman di wilayah Papua;
10. Meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Papua dan daerah perbatasan;
11. Meningkatkan kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antara Papua dan Papua Nugini.
12. Mewujudkan dan mempertahankan fungsi Papua sebagai

bagian dari paru-paru dunia dan konservasi keanekaragaman hayati.

13. Mewujudkan kemandirian;
14. Meningkatkan mutu pengelolaan otonomi khusus dan koordinasi percepatan pembangunan wilayah Papua.
15. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Papua.
16. Memerong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sasaran untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2013 yang bersifat cepat terwujud dan dirasakan dampaknya bagi masyarakat, terutama adalah:

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Papua yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita (tabel 8.2);
2. Tersedianya pendidikan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat;
3. Tersedianya pelayanan kesehatan gratis hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat;
4. Terlaksananya pengembangan peternakan di Kawasan Pegunungan Tengah, Bomberai, dan Kebar;
5. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara;
6. Meningkatnya jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan

udara, telekomunikasi, listrik dan telepon);

7. Tersedianya sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS) dan terbangunnya pabrik semen di Timika dan Manokwari;
8. Pemberian kuota khusus bagi putra-putri asli Papua berupa kuota kepada siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, kuota menjadi anggota TNI/Polri dan sekolah Akademi Militer dan Akademi Kepolisian, serta pendirian sekolah kebidanan/keperawatan, sekolah kepamongprajaan, dan sekolah pendidikan keguruan.
9. Menastikan keberlanjutan layanan telekomunikasi dan internet di wilayah USO dan memulai pengoperasian jaringan broadband
10. Pembangunan sistem penyediaan air baku di Wasior, Sorong, Manokwari, Raja Ampat, Kota Jayapura, Nabire, Yalimo, dan Lanny;
11. Percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Klasegun, Malaos, Mariyat dan Klasafet di Sorong, DI Waibu di Raja Ampat, DI Oransbari di Manokwari, DI Wanggar, Yaho, dan Mayde di Nabire, DI Koya di Jayapura, dan DI Yahulimo;
12. Menurunnya resiko banjir di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman pada penduduk dan jalur transportasi utama;
13. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

TABEL 8.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2013

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ (%)	Kemiskinan ²⁾ (%)	Pengangguran ³⁾ (%)
Papua Barat	6,80 – 7,40	29,21	6,18 – 6,63
Papua	5,98 – 6,48	30,65	3,30 – 2,50

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

- Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
 2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.
 3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

TABEL 8.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2013

Provinsi	Angka Kematian Bayi ¹⁾	Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾	Umur Harapan Hidup ³⁾
Papua Barat	28	7,97	70,73
Papua	28	6,72	70,93

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

- Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.
 2) Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.
 3) Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

8.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk pengembangan sektor dan komoditas unggulan, pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah, disamping itu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ke depan di Koridor Maluku-Papua, pengembangan wilayahnya diarahkan sebagai Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera.

Pada tahun 2013, sebagai upaya mewujudkan percepatan Papua dan Papua Barat dilakukan dengan strategi :

1. Pembangunan kawasan terisolir;
2. Pembangunan kawasan pedesaan;
3. Pembangunan kawasan perkotaan; dan
4. Pembangunan kawasan strategis;

Kebijakan percepatan sebelumnya, disempurnakan dengan memperluas bidang kebijakan pokok percepatan dengan prinsip pengembangan kawasan yang diarahkan untuk keterpaduan dan sinergi lintas bidang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan Papua Barat yang terdiri dari:

1. Penguatan ketahanan pangan.
2. Penanggulangan kemiskinan.
3. Pengembangan ekonomi rakyat.
4. Peningkatan pelayanan pendidikan.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan.
6. Pengembangan infrastruktur dasar.
7. Pemihakan terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat.

Dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan dukungan dari kebijakan yang bersifat regulasi dan kelembagaan sebagai berikut:

1. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan.
2. Keamanan dan ketertiban.
3. Pengembangan kapasitas kelembagaan.

Pengembangan wilayah Papua Tahun 2013 terutama diarahkan untuk :

1. Menempatkan hak ulayat di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat;
2. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya

- berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan;
3. Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua;
 4. Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat pertumbuhan wilayah;
 5. Menampung berbagai kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan;
 6. Meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan;
 7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antar moda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; serta
 8. Meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyasikan laju pertumbuhan antarwilayah.

8.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Papua

Isu Strategis masing-masing provinsi di Wilayah Papua adalah sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA

Isu strategis dan kegiatan strategis pembangunan wilayah Papua 2013, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur Daerah Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah, kegiatan strategisnya yaitu: Pembangunan Pelabuhan Waren Kab. Waropen; Pembangunan Pelabuhan Serui Kab. Kep. Yapen; Pembangunan Pelabuhan Depapre Kab. Jayapura; Pembangunan Pelabuhan Pomako Kab. Mimika; Pengadaan Kapal 200 GT 10 Unit; Pemeliharaan Rutin Jalan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul,

Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Biak Nunfor, Kep. Yapen); Pemeliharaan Rutin Jembatan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul, Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Biak Nunfor, Kep. Yapen); Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul, Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Biak Nunfor, Kep. Yapen); Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul, Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Biak Nunfor, Kep. Yapen); Rekonstruksi/ Peningkatan Struktur Jalan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul, Jayawijaya, Puncak Jaya, Nabire, Paniai, Biak Nunfor, Kep. Yapen); Penggantian Jembatan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul, Mimika, Nabire, Paniai); Perhangunan Jalan Baru (Kab. Jayapura, Jayawijaya, Mimika, Nabire, Paniai); Pembangunan Jembatan Baru (Kab. Jayapura, Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika, Nabire); Pelebaran Jalan (Kab. Jayapura, Jayawijaya, Nabire, Paniai, Biak Nunfor, Kep. Yapen).

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, kegiatan strategisnya yaitu: penyediaan tenaga pelayanan di kampung; pembinaan dukun dan kader di kampung; serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
3. Pengurangan Persentase Penduduk Miskin dan Kesenjangan Pembangunan, kegiatan strategisnya: Pengembangan Usaha Perumahan di Kab. Keerom dan Mimika; Pengembangan Usaha Perkebunan Karet di Kab. Merauke, Mappi, Boven Digoel; Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Perumahan Tanaman Kelapa dalam di Kab. Biak Nunfor, Supiori, Mimika, dan Merauke, dan Tanaman Kakao di Kab. Keerom, Sarmi, Jayapura, Nabire, Waropen, dan Kepulauan Yapen; Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan (20.000 Induk, 35.000 Benih), Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan (60 Ha); Penanggulangan Kemiskinan melalui Penguatan Modal Usaha Peternakan Sapi Potong, Kambing dan babi; Penyediaan Rumah Sehat dan Layak Huni di 29 Kab/Kota.
4. Peningkatan Ketahanan Pangan dalam mendukung Kemajuan Ekonomi Daerah, kegiatan strategisnya yaitu:

Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Sentra Peternakan Berbasis Integrasi Sapi-Sawit di Kab.Keerom dan Jayapura, Integrasi Sapi-Kakao di Kab.Sarmi dan Nabire, Integrasi Sapi-Tebu di Kab. Merauke; Pengembangan Sentra Peternakan melalui Penyediaan Ternak Sapi Bakalan di Kota Jayapura, Kab.Keerom, Sarmi dan Kota Jayapura yang Berintegrasi dengan Tanaman Perkebunan; Pengembangan Pembangunan Peternakan berbasis Sumberdaya Lokal (Ternak Rabi) di Kab. Jayawijaya, Yalimo, Lani Jaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, dogiyai, Deyai, Kota Jayapura; Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Sentra Peternakan berbasis Integrasi Sapi- Tebu di Kab. Merauke; Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 29 Kab/Kota; Peningkatan Produksi dan Pengolahan Tanaman Pangan Lokal di 29 Kab/Kota; Jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan (Kab. Jayapura); Jaringan irigasi yang di rehabilitasi (Kab. Nabire dan Kota Jayapura); Jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan (Kab. Merauke); Jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi (Kab. Merauke); Jaringan irigasi yang diperasikan dan dipelihara (Kab. Nabire dan Kota Jayapura).

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

PROVINSI PAPIA BARAT

Isu strategis pembangunan wilayah Papua Barat 2013, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Pembangunan, Terutama Akses Transportasi di Kawasan Terisolir di Papua Barat, kegiatan strategisnya yaitu: Peningkatan Bandara Udara Rendani; Pembangunan Bandara Falkak; Peningkatan Jalan Manokwari-Kebar, Bofuer-Windesi, Jalan Lingkar Raja Ampat; Pembangunan Jembatan Inari.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, kegiatan strategisnya yaitu: Rehabilitasi gedung sekolah tingkat SD-SMA/SMK; Pembangunan rumah guru di daerah terisolir; Pembangunan pendidikan berpola asrama; Rehabilitasi gedung sekolah tingkat SD-SMA/SMK.

3. Peningkatan upaya pengurangan kemiskinan di kawasan terisolir, kegiatan strategisnya yaitu: Pembangunan rumah tertata; Penyediaan listrik murah dan hemat (solar cell); Pengembangan infrastruktur kelautan dan perikanan (sarana dan prasarana); Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat;
4. Pemerataan terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkesimbangan, kegiatan strategisnya yaitu: Pengadaan peralatan rumah sakit; Pembangunan rumah tenaga medis di daerah terisolir.

Uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, Kementerian/Lembaga, sasaran, target, dan pagu indikatif di setiap provinsi di Papua dapat dilihat dalam **Lampiran Bab 8**.

8.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Papua

Arah Kebijakan Pengembangan MP3EI untuk wilayah Papua sebagai bagian dari koridor ekonomi Kepulauan Maluku-Papua, memperkuat arah pengembangan wilayah Papua, dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013, yakni mengembangkan koridor ekonomi Kepulauan Maluku-Papua sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan di Koridor Ekonomi Maluku-Papua khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah:

1. Penanganan Jalan Merauke - Muting - Waropko (204 Km) di Provinsi Papua
2. Penanganan Jalan Habema - Yaguru di Provinsi Papua
3. Penanganan Jalan Timika - Nabire (427,7 Km) di Provinsi Papua
4. Penanganan Jalan Depapre-Bonggrang dan Ringroad Jayapura (137,1 Km) di Provinsi Papua
5. Penanganan Jalan Okaba - Buraka - Wanam, Bian - Wogikel (MIFEE) di Provinsi Papua
6. Pelabuhan Nabire di Provinsi Papua
7. Pelabuhan Sarmi di Provinsi Papua
8. Pembangunan Faspel Pomako di Provinsi Papua
9. Adpel Biak di Provinsi Papua

10. Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua
11. Pelabuhan Bade di Provinsi Papua
12. Pembangunan Dermaga Terminal Penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan Depapre di Provinsi Papua
13. Pelabuhan Merauke di Provinsi Papua
14. Pelabuhan Serui di Provinsi Papua
15. Pelabuhan Agats di Provinsi Papua
16. Pelabuhan Jayapura: pembangunan perpanjangan dermaga 60m di Provinsi Papua
17. Penanganan dan Perluasan Bandara Sentani di Provinsi Papua
18. Perpanjangan Bandara Mopah Merauke di Provinsi Papua
19. Pelabuhan Waren di Provinsi Papua
20. Penanganan Jalan Kokas – Fakfak – Bomberai (139,9 Km) di Provinsi Papua Barat
21. Penanganan Jalan Manokwari – Kekar – Sorong (606,2 Km) di Provinsi Papua Barat
22. Pelabuhan Teminabuan di Provinsi Papua Barat
23. Pembangunan Faspel Laut Arar – Sorong di Provinsi Papua Barat
24. Pembangunan Faspel Fak-fak di Provinsi Papua Barat
25. Pelabuhan Saunek di Provinsi Papua Barat

Uraian proyek MP3EI tahun 2013 yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat di setiap provinsi dijabarkan dalam **Lampiran Bab 8**.

Rencana investasi yang akan dilakukan oleh BUMN, Swasta, KPS, dan APBD, adalah sebagai berikut:

BUMN

1. Pembangunan transmisi listrik di Papua sampai 2015 (236 kms)
2. Pembangunan gardu induk/trafo di Papua sampai 2015

- [1403.100 MVA]
3. Pembangunan gardu induk/trafo di Papua Barat sampai 2015 (1403.100 MVA)
 4. Pengembangan Ketenagalistrikan untuk RPI dan pengolahan di Provinsi Papua Barat
 5. Pembangunan jaringan transmisi listrik di di Provinsi Papua Barat
 6. Pembangunan jaringan backbone serat optic di di provinsi Papua Barat
 7. Pembangunan baru true broadband access dan di Provinsi Papua Barat

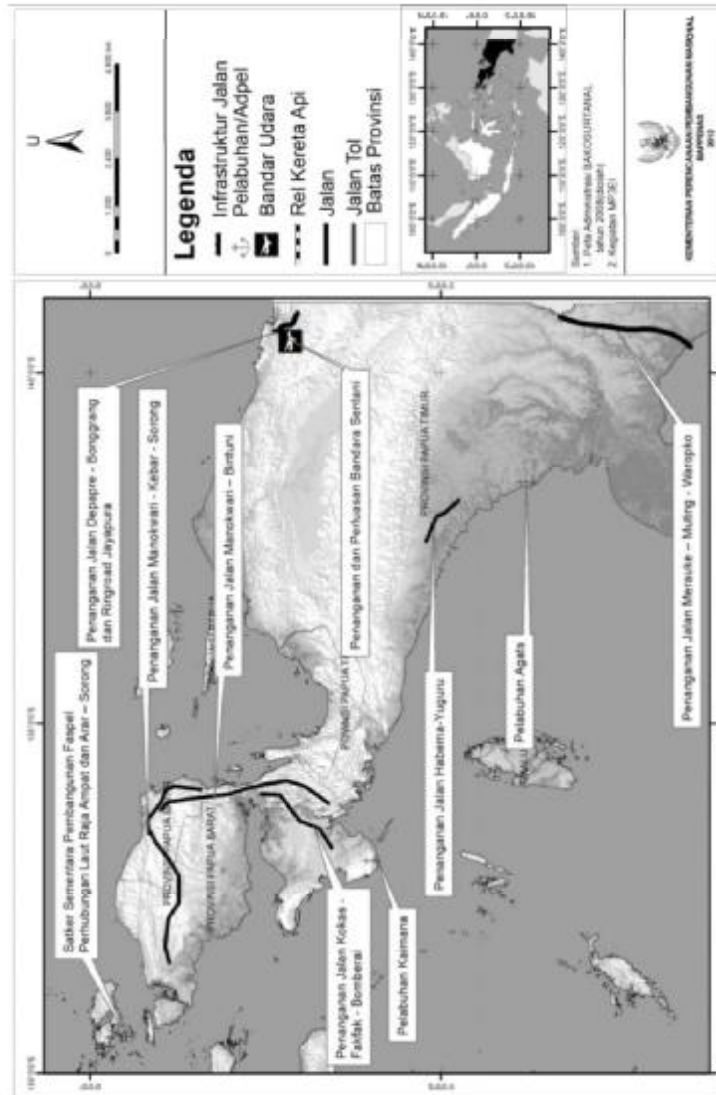
SWASTA

1. Pembangunan PLT Biomasa 2 (Tanah Miring) di Provinsi Papua
2. Pembangunan Proyek Gas Tangguh di provinsi Papua Barat

KPS

1. Pembangunan PLT Biomasa 1 (Merauke) di Provinsi Papua
2. Pembangunan PLTA 310MW di Uruenuka di Provinsi Papua
3. Penanganan pendukung kapasitas Pelabuhan Sorong di Provinsi Papua
4. Penanganan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Timika di Provinsi Papua
5. Pembangkit Listrik di Papua Barat
6. Pembangunan jaringan Backbone Nasional (Palapa Ring) berbasiskan active network sharing dan jaringan core di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

GAMBAR B.1
PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBLAYAI MELALUI
TA 2013 DI WILAYAH PAPUA



LAMPIRAN BAB 8. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Pulau Papua tahun 2013

A. PROVINSI PAPUA

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Lemahnya Ketahanan Pangan dan Rendahnya Tingkat Kemajuan Ekonomi Daerah				
	<i>Kegiatan Strategis : 1. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Sentra Peternakan Berbasis Integrasi Sapi-Sawit di Kab.Keerom dan Jayapura, Integrasi Sapi-Kakao di Kab.Sarmi dan Nabire, Integrasi Sapi-Tebu di Kab. Merauke. 2. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Sentra Peternakan melalui Penyediaan Ternak Sapi Bakalan di Kota Jayapura, Kab.Keerom, Sarmi dan Kota Jayapura yang Berintegrasi dengan Tanaman Perkebunan. 3. Pengembangan Pembangunan Peternakan berbasis Sumberdaya Lokal (Ternak Babi) di Kab. Jayawijaya, Yalimo, Lani Jaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, dogiyai, Deyai, Kota Jayapura</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	Pengembangan Budidaya Ternak Non Unggas [kelompok]	2.200	54.705,00
	<i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pengembangan Sentra Peternakan berbasis Integrasi Sapi- Tebuh melalui perluasan areal tebuh rakyat di Kabupaten Merauke</i>				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	Swasembada Gula Nasional : Tebu	15	270
Kegiatan Strategis : Peningkatan Kemampuan Masyarakat dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 29 Kab/Kota					
Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha					
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH					
	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah	Terfasilitasinya dukungan pemberdayaan koperasi dan UKM di daerah		4.396,00
Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi dan Pengolahan Tanaman Pangan Lokal di 29 Kab/Kota					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat:	75	375
Kegiatan Strategis : (1) Jaringan Irigasi yang dibangun/ ditingkatkan (Kab. Jayapura) 108 Ha (Rp. 10.500 jt); (2) Jaringan irigasi yang di rehabilitasi (Kab. Nabire dan Kota Jayapura) 5.350 Ha (Rp. 5.100 jt); (3) Jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan (Kab. Merauke) 200 Ha (Rp. 3.000 jt); (4) Jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi (Kab. Merauke) 600 Ha (Rp. 5.400 jt); (5) Jaringan irigasi					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	yang dioperasikan dan dipelihara (Kab. Nabire dan Kota Jayapura) 2 Buah (Rp. 2.000 Jt)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM				
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun /ditingkatkan	5074,5 Ha	82,650.00
2	Isu Strategis : Masih Tingginya Persentase Penduduk Miskin dan Kesenjangan Pembangunan				
	Kegiatan Strategis : 1. Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Usaha Perkebunan di Kab. Keerom dan Mimika, 2. Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Usaha Perkebunan Karet di Kab. Merauke, Mappi, Boven Digoel, 3. Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Perkebunan Tanaman Kelapa dalam di Kab. Biak Numfor, Supiori, Mimika, dan Merauke, dan Tanaman Kakao di Kab. Keerom, Sarmi, Jayapura, Nabire, Waropen, dan Kepulauan Yapen				
	Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan				
	KEMENTERIAN PERTANIAN				
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan	Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa	1450	5.340,00
	Kegiatan Strategis : Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan (20.000 Induk, 35.000 Benih), Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan (60 Ha)				
	Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan				
	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan	Jumlah Produksi Induk Unggul.		1.770,50
Kegiatan Strategis : Penanggulangan Kemiskinan melalui Penguatan Modal Usaha Peternakan Sapi Potong, Kambing dan babi					
Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan					
KEMENTERIAN PERTANIAN					
	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal	Pengembangan Budidaya Ternak Non Unggas (kelompok)		0
Kegiatan Strategis : Penyediaan Rumah Sehat dan Layak Huni di 29 Kab/Kota					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	Prasarana yang dibangun di wilayah strategis	350	30.603,00
3	Isu Strategis : Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan				
Kegiatan Strategis : Pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) di 23 Kabupaten					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	APK SMK		3.997,50
Kegiatan Strategis : Peningkatan Pendidikan Dasar SD dan SMP Satu Atap Berasrama di 23 Kabupaten (Kabupaten Keerom, Paniai, Jayawijaya, Puncak Jaya, Merauke, Nabire, Waropen, Mimika, Asmat, Mappi, Yahukimo, sarmi, Tolikara, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Yalimo, dogiyai, Nduga, Lani Jaya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Deiyai) ³⁾					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB	PERSENTASE BERAKREDITASI SDLB	2854	0
Kegiatan Strategis : Penyediaan Tenaga Pelayanan di Kampung Sambil Menunggu Tersedianya Tenaga Bidang di Kampung : Flying Health Care/Mobile Clinic = 290 Kampung, detasering bidang dan Perawat di Kampung = 290 Kampung, Pembinaan Dukun dan Kader di kampung = 1.160 Orang.					
Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan					
KEMENTERIAN KESEHATAN					
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Sesuai usulan daerah	2.487,00
Kegiatan Strategis : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Keaksaraan di					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
29 Kabupaten/Kota					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	Penyediaan Layanan Paud	APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS)		16.442,00
4	Isu Strategis : Terbatasnya Sarana Prasarana Infrastruktur Daerah Dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Daerah				
Kegiatan Strategis : (1). Pembangunan Pelabuhan Waren Kab. Waropen 1.120 M2 Rp. 21.848 milyar; (2). Pembangunan Pelabuhan Serui Kab. Kep. Yapen 560 M2 Rp. 10.924 milyar; (3). Pembangunan Pelabuhan Depapre Kab. Jayapura 2.300 M2 Rp. 43.999 milyar; (4). Pembangunan Pelabuhan Pomako Kab. Mimika 1.800 M2 Rp. 43.042 milyar; (5). Pengadaan Kapal 200 GT 10 Unit Rp. 180 milyar.					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Pembangunan faspel di Pelabuhan Waren, Serui, Depapre, Pomako.	4 paket	182,256.00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara Wahgete Baru					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara		Percepatan Pengoperasian Bandara Baru Daerah Tertinggal		15.000
<p><i>Kegiatan Strategis : (1) Pemeliharaan Rutin Jalan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul, Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Biak Numfor, Kep. Yapen) 1.637,68 KM (Rp. 86.412,5 Jt); (2) Pemeliharaan Rutin Jembatan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul, Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Biak Numfor, Kep. Yapen) 7.149,6 M' (Rp. 10.999,4 Jt); (3) Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul, Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Biak Numfor, Kep. Yapen) 101,45 KM (Rp. 347.475 Jt); (4) Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul, Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika, Nabire, Paniai, Biak Numfor, Kep. Yapen) 1.198,18 M (Rp. 44.000 Jt); (5) Rekonstruksi/ Peningkatan Struktur Jalan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul, Jayawijaya, Puncak Jaya, Nabire, Paniai, Biak Numfor, Kep. Yapen) 216,69 KM (Rp. 1.024.445,8 Jt); (6) Penggantian Jembatan (Kab. Jayapura, Merauke, Boven Digul, Mimika, Nabire, Paniai) 1.201 M (Rp. 298.936,1 Jt); (7) Pembangunan Jalan Baru (Kab. Jayapura, Jayawijaya, Mimika, Nabire, Paniai) 105,05 KM (Rp. 584.867,4 Jt); (8) Pembangunan Jembatan Baru (Kab. Jayapura, Jayawijaya, Puncak Jaya, Mimika, Nabire) 622 M' (Rp. 184.714,2 Jt); (9) Pelebaran Jalan (Kab. Jayapura, Jayawijaya, Nabire, Paniai, Biak Numfor, Kep. Yapen) 41,8 KM (Rp. 203.787,1 Jt)</i></p>					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah jalan dan jembatan yang dipreservasi - Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran - Panjang jalan dan jembatan yg dibangun baru - Jumlah jalan/jembatan strategis di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan 	-	2,084,604.00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. juta)
			terdepan yang dibangun/dilebarkan		

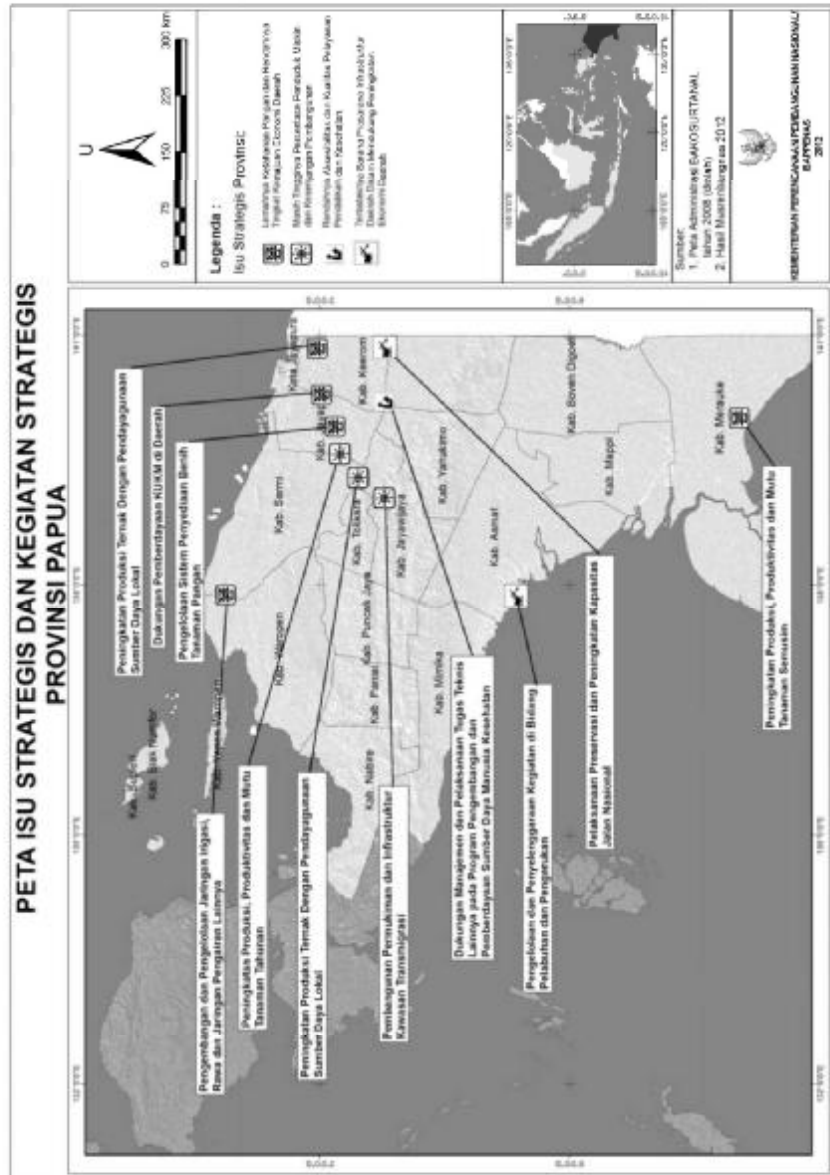
Catatan:

Pembangunan SD-SMP setiap dialokasikan melalui *block grant*. Daerah mengusulkan melalui proposal yang dilengkapi dengan data pendukung.

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2013

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. MILYAR)
1	Penanganan Jalan Merauke – Muting - Waropko (204 Km)	Kementerian PU	535,85
2	Penanganan Jalan Habema – Yaguru	Kementerian PU	294,00
3	Penanganan Jalan Timika – Nabire (427,7 Km)	Kementerian PU	409,63
4	Penanganan Jalan Depapre-Bonggrang dan Ringroad Jayapura (137,1 Km)	Kementerian PU	84,01
5	Penanganan Jalan Okaba - Buraka - Wanam, Bian - Wogikel (MIFEE)	Kementerian PU	50,00
6	Pelabuhan Nabire	Kementerian Perhubungan	25,00
7	Pelabuhan Sarmi	Kementerian Perhubungan	18,00
8	Pembangunan Faspel Pomako	Kementerian Perhubungan	88,00
9	Adpel Biak	Kementerian Perhubungan	3,00
10	Pelabuhan Kaimana	Kementerian Perhubungan	80,00

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. MILYAR)
11	Pelabuhan Bade	Kementerian Perhubungan	60,00
12	Pembangunan Dermaga Terminal Penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan Depapre	Kementerian Perhubungan	42,00
13	Pelabuhan Merauke	Kementerian Perhubungan	84,00
14	Pelabuhan Serui	Kementerian Perhubungan	54,00
15	Pelabuhan Agats	Kementerian Perhubungan	94,00
16	Pelabuhan Jayapura: pembangunan perpanjangan dermaga (60m)	Kementerian Perhubungan	45,00
17	Penanganan dan Perluasan Bandara Sentani	Kementerian Perhubungan	273,2
18	Perpanjangan Bandara Mopah Merauke	Kementerian Perhubungan	35,6
19	Pelabuhan Waren	Kementerian Perhubungan	15,0



B. PROVINSI PAPUA BARAT

Matriks Isu Strategis dan Kegiatan Strategis

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
1	Isu Strategis : Belum adanya pemerataan terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkesimbangan				
	Kegiatan Strategis : Pengadaan peralatan rumah sakit				
	Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan				
	KEMENTERIAN KESEHATAN				
	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan sarana Kesehatan	jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar (fokus pada penyediaan TT kelas III RS)	1 paket	0 2.172,50
2	Isu Strategis : Belum optimalnya upaya pengurangan kemiskinan di kawasan terisolir				
	Kegiatan Strategis : Pembangunan rumah tertata				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT				
	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pembangunan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman	Jumlah unit rumah sejahtera yang terbangun melalui penyediaan PSU Kawasan	400	2.500,00
Kegiatan Strategis : Penyediaan listrik murah dan hemat (solar sell)					
Prioritas Nasional : Prioritas Energi					
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha	Program Listrik Murah dan Hemat	1984	24.485,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
		Penyediaan Tenaga Listrik			
Kegiatan Strategis : Pengembangan infrastruktur kelautan dan perikanan (sarana dan prasarana)					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan	Jumlah kapal > 30 GT yang terbangun (unit)	4	6.000,00
Kegiatan Strategis : Pengembangan infrastruktur kelautan dan perikanan (sarana dan prasarana)					
Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan					
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan perikanan UPT daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi)	1	5.000,00
Kegiatan Strategis : Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat					
Prioritas Bidang : Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama					
KEMENTERIAN SOSIAL					
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	Terwujudnya Kesempatan Kerja dan Berusaha, Melalui KUBE Usaha Ekonomi Produktif		6.600,00

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
3	Isu Strategis : Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia				
Kegiatan Strategis : Rehabilitasi gedung sekolah tingkat SD-SMA/SMK¹⁾					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Dasar	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar	Persentase Gedung Sekolah Rusak Akibat Bencana/Kerusuhan Yang Direhabilitasi	1629,9	0
Kegiatan Strategis : Pembangunan rumah guru di daerah terisolir					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL					
	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan pengembangan infrastruktur pendidikan		600
Kegiatan Strategis : Pembangunan pendidikan berpola asrama²⁾					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Jumlah SMA Memiliki Asrama Siswa		0
Kegiatan Strategis : Rehabilitasi gedung sekolah tingkat SD-SMA/SMK¹⁾					
Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan					
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					

No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
	Program Pendidikan Menengah	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pendidikan Menengah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah Rusak Akibat Bencana/Kerusuhan yang Direhabilitasi		0
4	Isu Strategis : Terbatasnya Infrastruktur Dasar Pembangunan, Terutama Akses Transportasi di Kawasan Terisolir di Papua Barat				
	Kegiatan Strategis : Peningkatan Bandara Udara Rendani				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi	-	121.000,00
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara Fakfak				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun	-	0
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara Kambuaya				
	Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur				
	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN				
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara		Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun	-	10.000
	Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara Waisai Raja Ampt				

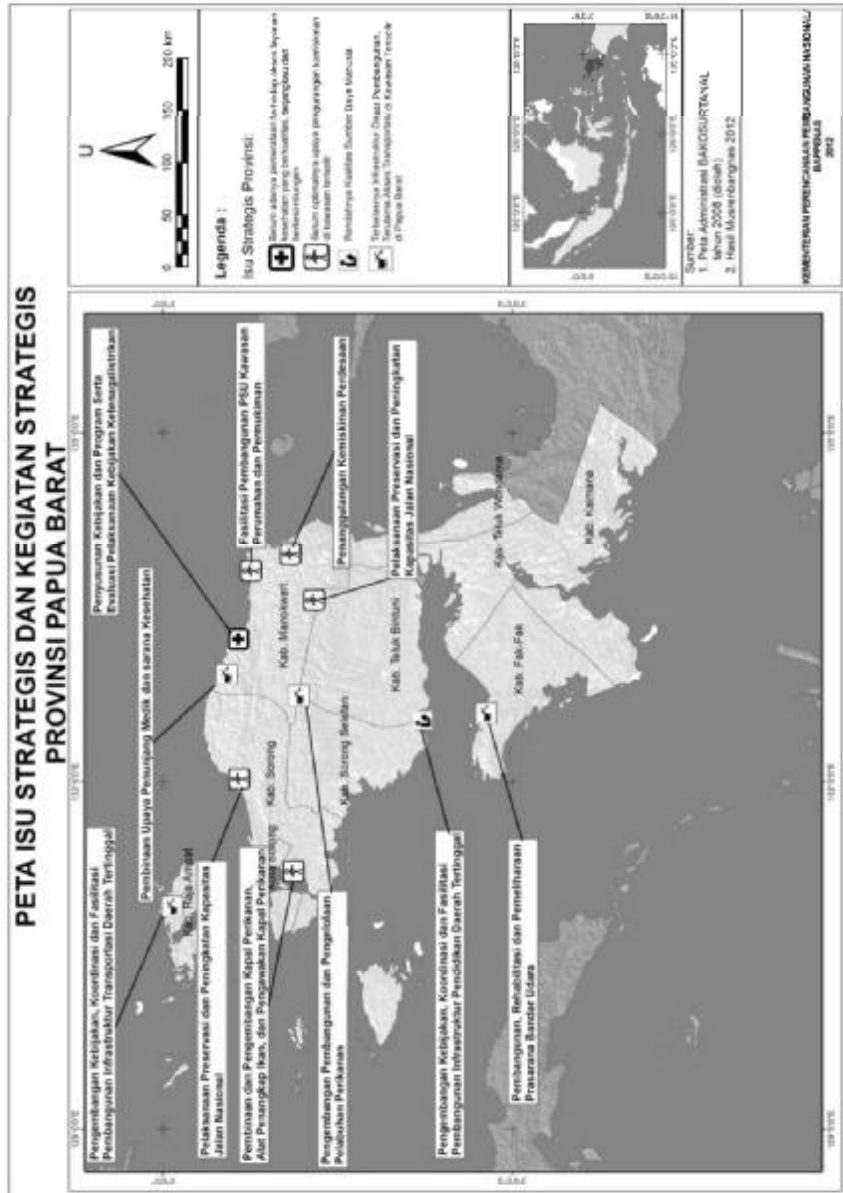
No	Program	Kegiatan	Indikator Sasaran	Target Fisik	Dana (Rp. Juta)
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara		Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun	-	15.000
Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Manokwari-Kebar, Bofuer-Windesi, Jalan Lingkar Raja Ampat					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur	-	909.634,00
Kegiatan Strategis : Pembangunan Jembatan Inari					
Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur					
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM					
	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Panjang jalan yg dibangun baru	-	50.000,00

Catatan:

- 1) Alokasi Rp. 1.629,9 juta merupakan alokasi untuk kegiatan Dukungan Manajemen Dikdas. Untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sedang jenjang pendidikan dasar diakomodasi melalui DAK tahun 2013. Untuk kegiatan fisik jenjang pendidikan menengah disediakan dana dari pusat yang dialokasikan di 33 provinsi melalui mekanisme *block grant*. Daerah mengusulkan melalui proposal yang dilengkapi dengan data pendukung.
- 2) Provinsi Papua Barat menyiapkan lahan dan menyampaikan dokumen pendukung kepada Direktorat Pembinaan SMA untuk pembahasan lebih lanjut.

Matriks Proyek MP3EI Tahun 2013

NO	PROYEK MP3EI	PELAKSANA UTAMA	RKP 2013 (Rp. MILYAR)
1	Penanganan Jalan Kokas - Fakfak - Bomberai (139,9 Km)	Kementerian PU	108,64
2	Penangan Jalan Manokwari - Kebar - Sorong (606,2 Km)	Kementerian PU	597,218
3	Pelabuhan Teminabuan	Kementerian Perhubungan	7,75
4	Pembangunan Faspel Laut Arar - Sorong	Kementerian Perhubungan	38,00
5	Pembangunan Faspel Fak-fak	Kementerian Perhubungan	40,00
6	Pelabuhan Saunek	Kementerian Perhubungan	3,00



BAB 9 KAIDAH PELAKSANAAN

9.1 Sinergi antara Pusat-Daerah dan Antar Daerah

Untuk melaksanakan kebijakan, rencana, program dan kegiatan-kegiatan prioritas dalam Buku III RKP ini diperlukan beberapa kaidah pelaksanaan yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

Sinergi pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

9.1.1 Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan

Dalam tahap perencanaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam: (i) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); (ii) penetapan target pembangunan; (iii) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh Kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; (iv) pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; (v) penyusunan kebijakan perijinan investasi di daerah; dan (vi) penentuan kebijakan pengendalian tingkat inflasi.

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipatif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

9.1.2 Sinergi dalam Kerangka Regulasi

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun

berjalan dalam koridor RPJMN 2010-2014. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan: (i) konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan perundangan; (ii) pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan; baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; dan (iii) fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah.

9.1.3 Sinergi dalam Kerangka Anggaran

Sinergi Pusat-Daerah dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai kebijakan RPJMN 2010-2014.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain adalah untuk: (i) mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai *block grant* belanja publik pmda menurut kewenangan; (ii) menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhan nasional, serta memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan beban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang belum diakomodasi dalam aspek legal.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, langkah yang akan ditempuh Pusat-Daerah antara lain adalah: (i) sinergi perencanaan DAK antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah agar pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar-benar mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional; (ii) memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin efektivitas program dan kelancaran pelaporan; dan (iii) sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian/lembaga agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH dan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, langkah yang akan ditempuh Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah adalah: (i) menjamin keterbukaan informasi dan data dari pusat kepada daerah; dan (ii) mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam.

9.1.4 Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur Daerah

Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan akan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah yang akan dilakukan dalam tahun mendatang adalah: (i) menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja secara bertanggung jawab; (ii) mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan daerah otonom dengan tetap mengutamakan harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dan rentang kendali manajemen yang ideal; serta (iii) meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah.

9.1.5 Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah

Dalam mempercepat pengembangan wilayah akan dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah dan pemerintah daerah adalah: (i) sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang untuk menghindari tumpang tindih kebijakan; (ii) memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mitigasi bencana alam; (iii) meningkatkan perhatian pemda pada tata ruang; (iv) mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan prasarana dan sarana tanpa perhitungan harmonisasi wilayah pelayanan bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga; (v) meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang khususnya dengan sektor kehutanan; (vi) mempercepat penyusunan

peraturan pendukung pelaksanaan rencana tata ruang wilayah yang mencakup sistem tata guna lahan dan sistem transportasi; (vii) mempercepat penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; (viii) membangun kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

9.2 Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Berdasarkan Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa selain sebagai kepala daerah otonom, Gubernur juga menjadi wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya, implementasi berbagai peraturan perundangan tersebut di atas masih belum berjalan efektif dan belum konsisten dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Koordinasi antara Kementerian/ Lembaga dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pun tidak berjalan optimal. Sinergitas antara pusat dan daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah juga belum berjalan dengan semestinya. Koordinasi perencanaan pembangunan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum terwujud dengan baik sehingga memerlukan upaya khusus untuk menjawab isu-isu penting ini. Langkah yang diambil antara lain melakukan revisi peraturan pemerintah terkait dan menerbitkan surat edaran bersama antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

9.2.1 Urgensi Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, urusan pemerintah pusat telah banyak dilimpahkan ke pemerintahan daerah. Hal ini dan format lengkap pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan telah diatur melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta besarnya alokasi APBN sebesar 35% untuk dana transfer ke daerah. Pemerintah Pusat melalui Rencana Kerja Pemerintah tahun 2013 mengamanatkan prioritas-prioritas nasional yang harus dicapai dan Gubernur diharapkan dapat memastikan pelaksanaan dan pencapaian

prioritas nasional tersebut di daerah. Dengan demikian, peran Gubernur adalah menjadi sangat penting untuk mencapai keberhasilan bagi pembangunan nasional di daerah mengingat besarnya porsi kewenangan dan anggaran yang dipimpahkan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan salah satu instrumen pembangunan untuk mencapai sasaran prioritas nasional di daerah yang dilaksanakan beberapa Kementerian/Lembaga pada tataran pelaksanaannya belum seluruhnya berjalan optimal dan belum sesuai dengan yang dibutuhkan daerah.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menitikberatkan pada tingkat kabupaten/kota telah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah kabupaten/kota seperti berkesinambungan dan memberikan pelayanan publik di daerahnya masing-masing. Terkadang semangat tersebut berlebihan dan justru menimbulkan masih kontraproduktif bagi perkembangan wilayah kabupaten/kota selangannya, sehingga muncul permasalahan kesenjangan pembangunan antar daerah didalam satu wilayah dan antar wilayah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah menjadi diperlukan terutama dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan sekaligus monitoring serta evaluasi pada kegiatan-kegiatan yang berasal dari kementerian/lembaga dan kegiatan kabupaten/kota namun bersifat lintas kabupaten/kota. Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah sangat diperlukan saat ini terutama untuk dapat meningkatkan sinergi Pusat dan Daerah.

9.2.2 Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) komponen utama, yaitu regulasi, instrumen pengendali, serta peran, tugas dan fungsi.

A. Regulasi

Selain berbagai kebijakan dan regulasi yang telah disinggung sebelumnya, untuk lebih menguatkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No 0442/M.PPN/11/2010; SE-696/MK 2010; 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Tugas Gubernur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi meliputi:

1. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota serta antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara umum seperti menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah, menjaga dan mengamalkan ideologi pancasila serta kehidupan demokrasi dan stabilitas politik;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Penekanan pada koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi RPJPD, RPJMD, RKPD kabupaten dan kota agar mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan RKPD provinsi serta RPJPN, RPJMN dan RKP dan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
5. Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis

serta kepada bupati/walikota yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan koordinasi dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis serta hak gubernur untuk tidak mengalokasikan dana tugas pembantuan kepada kabupaten/kota bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

Regulasi penting lainnya yang terkait dengan penguatan peran Gubernur adalah Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam. SEB tiga menteri ini menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang dilakukan melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, atau Urusan Bersama maka Gubernur mempunyai peran dan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara rencana penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama dari Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan;
2. Memberitahukan kepada DPRD Provinsi pada saat pembahasan RAPBD tentang rencana penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama dari Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi;
3. Melaksanakan program dan kegiatan dekonstrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga terkait;
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama di wilayahnya; dan
5. Melaporkan hasil penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama di wilayahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

B. Instrumen Pengendali

Sebagai wakil Pemerintah Pusat, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Gubernur dapat menggunakan sejumlah instrumen sebagai berikut:

1. Dalam proses koordinasi, pembinaan, dan pengawasan

yang dilaksanakan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, Gubernur menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam forum koordinasi perencanaan baik bersama kementerian/ lembaga maupun pemerintah. Forum-forum yang dimaksud meliputi:

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov);
 - b. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bersama Kementerian/Lembaga;
 - c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas);
 - d. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Pra Musrenbangnas) dalam pembahasan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Musyawarah Pimpinan Daerah).
2. Gubernur melakukan koordinasi dalam menjawab kebutuhan daerah dengan prioritas sektoral (Kementerian/Lembaga) melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 3. Gubernur juga mendorong sinergi pusat dan daerah melalui sinkronisasi pendanaan APBN dan APBD.

C. Peran, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, dalam mendukung *penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah*, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Kuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi perencanaan dan penganggaran:
 - a. Melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan beberapa kementerian/lembaga terkait dengan proses pra musrenbangnas dan musrenbangnas, khususnya terkait dengan dukungan terhadap prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014;
 - b. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi, dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal di wilayah provinsi;
 - c. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara rencana penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama dari kementerian/lembaga dengan program dan kegiatan yang didanai APBD;
 - d. Penekanan pada koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi RPJPD, RPJMD, RKPD kabupaten dan kota agar mengacu kepada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta RPJPN, RPJMN, dan RKP dan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - e. Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis serta kepada bupati/walikota yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan koordinasi dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis serta hak gubernur untuk mengusulkan kepada Kementerian/Lembaga agar tidak mengalokasikan dana tugas pembantuan kepada kabupaten/kota

bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

2. Tahap pelaksanaan/implementasi:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga terkait;
- b. Menyelenggarakan forum koordinasi pimpinan daerah (Musyawarah Pimpinan Daerah) dalam rangka koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah termasuk:
 - I. memberi dukungan terhadap kerja sama antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - II. menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - III. menetapkan kriteria, penetapan situasi serta melakukan koordinasi terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan daerah, serta stabilitas politik;
 - IV. menjaga pengamalan ideologi Pancasila, membangun kehidupan demokrasi dan menjaga kerukunan hidup beragama.
- c. Menangani isu-isu lintas kabupaten/kota melalui koordinasi, mediasi atau fasilitasi oleh Gubernur dalam bidang: (i) penegakan peraturan perundang-undangan; (ii) batas wilayah dan isu kawasan; (iii) penanggulangan bencana; (iv) daerah otonom dan khusus; (v) kerjasama daerah; (vi) tata ruang; (vii) ketenteraman dan keterlibatan masyarakat; serta (viii) tugas-tugas yang diamanatkan perundang-undangan lainnya;
- d. Melakukan fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk:
 - I. Memberikan informasi tentang kebijakan Pemerintah dan instansi vertikal di provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi;
 - II. Melakukan penyetaraan kualitas pelayanan publik antarkabupaten/kota di wilayah provinsi

- yang bersangkutan;
- III. Melakukan fasilitasi dan konsultasi pengelolaan kepegawaian kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
 - IV. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi;
 - V. Membangun etos kerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - VI. Memfasilitasi Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
3. Tahap pelaporan, pembinaan dan pengawasan:
- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program/kegiatan dekonsentrasi yang ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - b. Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan sesuai dengan PP 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Melakukan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
2. Dalam merencanakan program dan kegiatan yang didanai melalui anggaran kementerian/lembaga (K/L), setiap Kementerian/Lembaga wajib:
- a. Memperhatikan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Tidak mengalokasikan program dan kegiatan yang bukan merupakan kewenangannya.

3. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan atau urusan bersama, Kementerian/Lembaga wajib :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Gubernur sebelum penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dalam rangka sinergi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - b. Mencantumkan program dan kegiatan yang didanai melalui dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama di dalam Renja K/L dan memahaminya di dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dalam mencapai prioritas pembangunan nasional;
 - c. Mengalokasikan anggaran dengan kinerja yang jelas dan terukur dengan memperlimbangkan pencapaian prioritas pembangunan;
 - d. Mencantumkan kegiatan, daerah/lokasi, dan kebutuhan anggaran dalam kerangka perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM);
 - e. Memberitakutkan indikasi program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni (setelah ditetapkan pagu sementara);
 - f. Menerbitkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya minggu pertama bulan Desember (setelah ditetapkan pagu definitif); dan
 - g. Mengevaluasi laporan Gubernur dan memperhatikan usulan Gubernur atas pengenaan sanksi terhadap penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di wilayahnya.

9.3 Kaidah Sinergi Antarsektoral, AntarPusat-Daerah dan AntarDaerah

Buku III Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan merupakan penjabaran sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Buku I RKP 2013 dalam dimensi wilayah yang telah dibagi pada 7 (tujuh) wilayah, yaitu : Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Berbagai sasaran pembangunan di tiap wilayah ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara nasional. Arah kebijakan dan strategi pengembangan di tiap wilayah menjadi acuan lokus bagi sektoral (Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menetapkan kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang tertuang dalam Buku III RKP 2013.

Buku III RKP Tahun 2013 juga disusun dengan berpedoman pada kebijakan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Pulau serta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Buku III RKP Tahun 2013 menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2013 dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 terkait aspek kewilayahan. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, disusun kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam Buku III RKP tahun 2013;
2. Dalam menyusun Renja K/L dan RKA-K/L Tahun 2013, setiap Kementerian/Lembaga wajib mempertimbangkan arah kebijakan, strategi pengembangan wilayah dan lokasi kegiatan sebagaimana tertuang didalam Buku III RKP Tahun 2013;
3. Dalam menyusun RKPD Tahun 2013 wajib mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah sebagaimana tertuang didalam Buku III RKP Tahun 2013;
4. Arah kebijakan dan strategi pengembangan yang bersifat

lintas sektor dilakukan melalui sinergi kegiatan antar/kementerian lembaga dan antar satuan kerja perangkat daerah;

5. Setiap kementerian/lembaga beserta pemerintah daerah wajib menjaga konsistensi antara Buku III RKP Tahun 2013, Renja K/L dan RKA-K/L Tahun 2013, serta RKPD Tahun 2013;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Buku III RKP Tahun 2013, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menjamin sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam Buku III RKP Tahun 2013 dilakukan melalui sinkronisasi pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dana perimbangan dan dana otonomi khusus; serta investasi swasta yang dihasilkan melalui kesepakatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam Buku III RKP Tahun 2013 dilakukan melalui sinergi kegiatan antarkementerian/lembaga, dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundangan.